



Tata Kelola Perusahaan



“Di tengah pelemahan ekonomi global dan ancaman perubahan iklim, BRI berkomitmen untuk tetap menjalankan Transformasi Berkelanjutan Untuk Tumbuh Semakin Kuat dan Hebat dalam mendukung perekonomian nasional. BRI terus bertransformasi dan berinovasi dalam menciptakan kegiatan bisnis yang berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik. Kami meyakini dengan menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, perusahaan akan mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial serta mampu menciptakan akselerasi pertumbuhan yang tangkas di tengah ketidakpastian perekonomian global”





Untuk menjalankan Transformasi Berkelanjutan agar dapat tumbuh semakin kuat dan hebat, BRI berkomitmen untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik berjalan secara efektif dan berkembang sejalan dengan transformasi yang dilakukan perseroan. Tata kelola perusahaan kami tercermin dari penetapan visi dan misi yang jelas, *Tone of the Top* yang kuat, penerapan manajemen risiko dan *internal control* yang efektif, budaya perusahaan yang solid, serta keterlibatan perusahaan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip dan praktik tata kelola BRI juga mempertimbangkan harapan dari regulator dan pemangku kepentingan lainnya. BRI sebagai Bank Umum terbesar di Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diatur oleh Kementerian BUMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Selain mematuhi

ketentuan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dikeluarkan oleh regulator, BRI juga menerapkan tata kelola perusahaan berdasarkan *best practice* yang berlaku seperti yang dikeluarkan oleh *Basel Committee*, OECD, *International Corporate Governance Network*, dan KNKG.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) secara terus menerus memperkuat komitmen untuk menerapkan, menegakkan, dan mengembangkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan di setiap lini usaha perusahaan. BRI secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dalam rangka menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta melindungi aspirasi dan hak dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai keberhasilan penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan, membutuhkan partisipasi aktif dari *Top Management* perusahaan dan seluruh Insan BRILian, hingga akhirnya terbentuk budaya perusahaan yang kokoh. BRI menciptakan pedoman perilaku yang berisikan kode etik serta nilai budaya perusahaan yang berlaku bagi seluruh pekerja. Penerapan nilai budaya perusahaan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pekerja dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan perusahaan.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dengan Kinerja Perusahaan

Melalui penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, BRI berhasil menunjukkan kinerja yang positif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik yang berdampak pada tingginya risiko bagi perusahaan. Beberapa pencapaian kinerja dan tata kelola digambarkan sebagai berikut:



Tujuan Penerapan GCG

Penerapan tata kelola BRI mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan termuat dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Perusahaan menyadari keberlangsungan bisnis perseroan tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga BRI meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga menjadi landasan perusahaan untuk mencapai visi BRI yaitu “Menjadi *The Most Valuable Banking Group and Champion of Financial Inclusion in South East Asia*”.

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan nilai tambah berupa:

1. Menciptakan landasan bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.
2. Mengawal setiap proses bisnis perusahaan agar dalam koridor *governance*.
3. Meningkatkan reputasi BRI.
4. Mempertahankan dan menguatkan daya saing BRI.
5. Menjaga kepercayaan *stakeholders* kepada BRI.
6. Meningkatkan pertumbuhan nilai perusahaan yang berkelanjutan.

BRI terus berkomitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk memberikan dampak positif dalam mencapai kinerja berkelanjutan perusahaan. Tujuan penerapan tata kelola yang baik adalah untuk:



1. Mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh Insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi perusahaan.
3. Memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa Perusahaan dijalankan dan diawasi secara profesional.
4. Mendukung penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
5. Mewujudkan terciptanya *good corporate citizen*.

Tahapan Penerapan GCG

Guna memastikan tercapainya GCG *Excellent* di BRI, maka implementasi GCG BRI dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu perumusan, implementasi, serta *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tahapan Penerapan GCG



Dasar Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola BRI didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, aspirasi pemangku kepentingan dan kebutuhan Perusahaan. Disamping itu, BRI juga menerapkan tata kelola Perusahaan mengacu pada *best practice* yang berlaku di industri keuangan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BRI antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
9. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
11. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
13. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
14. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
15. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
16. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
17. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
18. Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
19. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
20. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
21. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit *Intern* pada Bank Umum.
22. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
23. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
24. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
25. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
26. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.
27. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Umum.
28. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
29. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
30. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
31. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
32. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
33. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
34. Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
35. Surat Edaran OJK Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
36. Surat Edaran OJK No. 13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
37. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
38. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
39. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
40. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
41. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
42. Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan *Intern*.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI juga mengacu pada beberapa pedoman tata kelola (*best practices*) sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.



Kerangka Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Kerangka implementasi tata kelola perusahaan BRI didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola BRI terdiri dari *structure, process & outcome* yang antara lain tercermin pada penetapan visi dan misi Perusahaan, kejelasan masing-masing fungsi organ utama dan pendukung dalam pengelolaan perusahaan, proses manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan yang efektif, serta penciptaan budaya perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan Perusahaan.



Perumusan prinsip-prinsip GCG untuk mendukung aktivitas kinerja berkelanjutan BRI dijabarkan sebagai berikut:

Prinsip GCG	Penjabaran
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI mengungkapkan informasi secara tepat waktu, akurat, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) sesuai dengan kepentingan dan haknya. 2. BRI mempunyai kebijakan tertulis untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. 3. BRI mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya visi dan misi BRI, nilai-nilai/sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan BRI. 4. Prinsip keterbukaan informasi tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan beserta informasi rahasia BRI dan Nasabah.

Prinsip GCG	Penjabaran
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada <i>shareholders</i> dan <i>stakeholders</i>. 2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS. 3. BRI menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas BRI dan <i>stakeholders</i> lainnya sesuai ketentuan berlaku. 4. BRI menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi dan misi BRI. 5. BRI memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. 6. BRI memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme <i>check and balance</i> dalam pencapaian visi dan misi BRI. 7. BRI memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.
Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal BRI. 2. BRI turut serta dalam memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lainnya yang mendukung untuk terpeliharanya sumber daya alam. 3. BRI bertindak sebagai warga korporasi yang baik (<i>good corporate citizen</i>) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Independensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif. 2. BRI melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajaran dan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada <i>stakeholders</i> sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BRI. 2. BRI memberikan kesempatan kepada <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BRI serta adanya akses keterbukaan informasi.

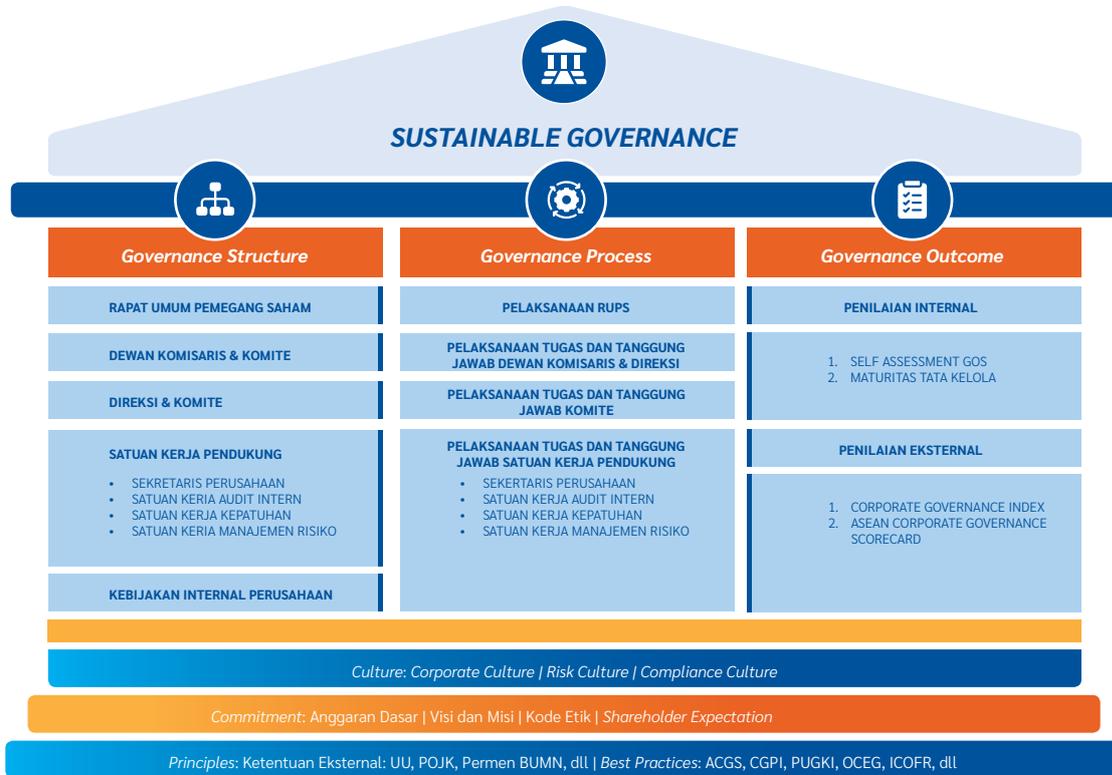
Struktur, Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola

BRI memiliki 4 (empat) pilar Tata Kelola Perusahaan yang baik, meliputi *governance commitment*, *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Keempat pilar tersebut terwujud pada Organ Tata Kelola Bank yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi. Masing-masing organ memiliki peran penting dalam memastikan dan mengupayakan terlaksananya penerapan Tata Kelola yang baik, serta dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Bank dalam menjalankan kegiatan usaha mentaati Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI telah memiliki Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG Policy/Charter) yang berlaku bagi seluruh organisasi dan insan BRI, yaitu Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 1 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dirumuskan berdasarkan perkembangan bisnis BRI, evaluasi atas pedoman sebelumnya serta *best practice* GCG tersebut mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yaitu komitmen, struktur, proses dan hasil yang dijabarkan pada bagan berikut:



Framework Tata Kelola Perusahaan BRI



Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)

Governance Principles

Untuk menghasilkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan maka BRI berpedoman kepada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kebijakan regulator yang berlaku dan *best practice* terkini.

Governance Commitment

Sepanjang perjalanan BRI dalam melayani jasa keuangan untuk masyarakat, BRI berkomitmen untuk terus mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan implementasi GCG, agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi usaha terkini. Komitmen GCG BRI tertanam dalam visi dan misi, *core value*, serta strategi kebijakan bisnis Bank yang kemudian dituangkan ke dalam elemen-elemen fundamental usaha Bank.

Governance Culture

BRI membangun budaya melalui *Corporate Culture*, *Risk Culture* & *Compliance Culture* dalam rangka mewujudkan aktivitas bisnis yang *prudent* dan patuh disetiap tingkatan organisasi.

Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

Struktur tata kelola Perseroan terdiri atas Organ Perseroan dan Infrastruktur.

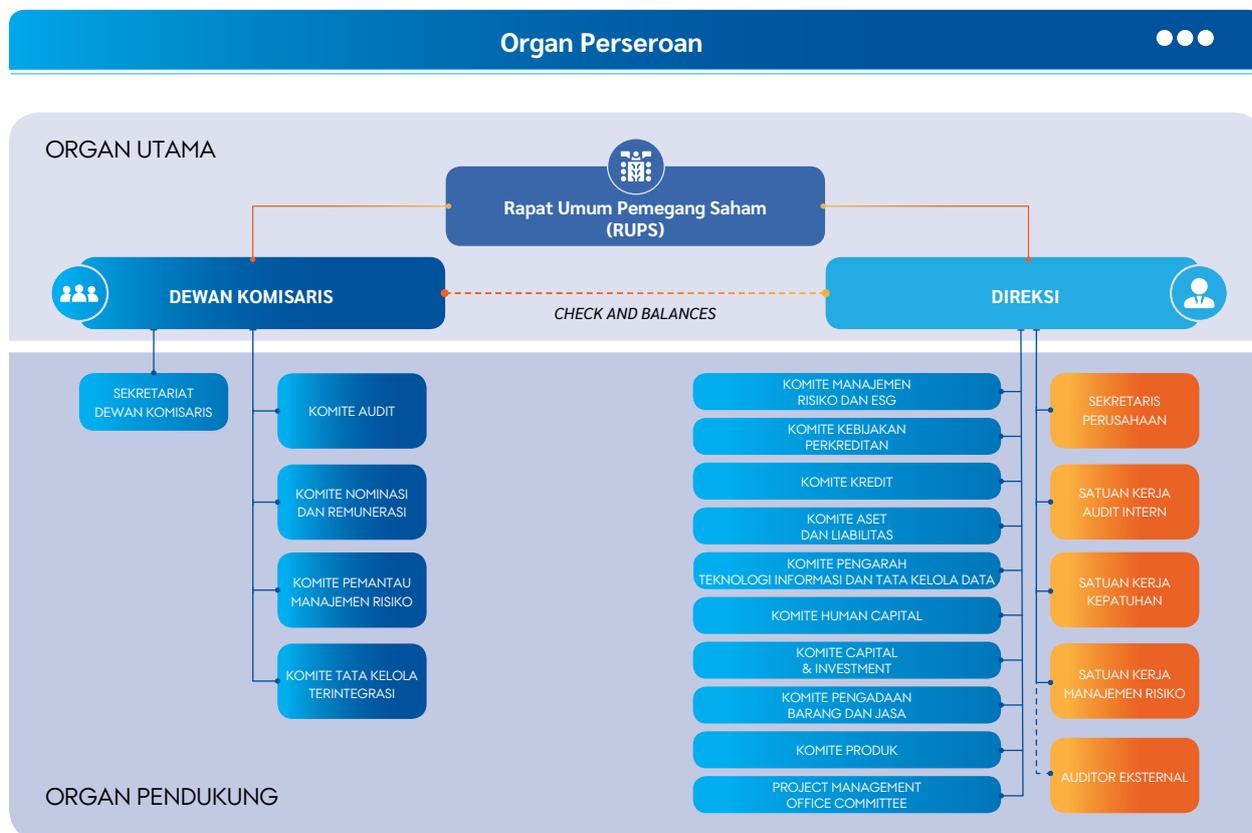
Organ Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta

mekanisme *check and balance*. Struktur Tata Kelola BRI meliputi Organ Utama dan Organ Pendukung sebagai berikut:



RUPS

RUPS adalah organ tertinggi dalam struktur GCG. RUPS merupakan forum pemegang saham untuk pengambilan keputusan serta meminta pertanggungjawaban atas hal yang berkaitan dengan kepentingan usaha BRI dengan memperhatikan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang diselenggarakan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank oleh Direksi termasuk memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Bank. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak

terkait, dan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Direksi

Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Bank termasuk mewakili Bank dengan pihak ketiga di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi Bank dijelaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Organ Pendukung Struktur Tata Kelola

Komite di Bawah Dewan Komisaris

- Komite Audit
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Pemantau Manajemen Risiko
- Komite Tata Kelola Terintegrasi



Pembahasan lebih rinci terkait Komite di bawah Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Komite di Bawah Direksi

- *Asset and Liability Committee* (ALCO)
- *Risk Management Committee* (RMC) dan *ESG Committee*
- Komite Kredit
- Komite *Capital & Investment*
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Pengarah Teknologi Informasi & Tata Kelola Data
- Komite Pengadaan Barang & Jasa
- Komite *Human Capital*
- Komite Produk
- *Project Management Office Steering Committee*

Ketentuan lebih rinci terkait Komite di bawah Direksi tertuang dalam pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Dewan Komisaris

Merupakan organ yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Perusahaan

Merupakan organ pendukung yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan berperan untuk membantu Dewan Komisaris serta Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan serta sebagai penghubung dan pengelola komunikasi baik antara perusahaan kepada pihak internal maupun pihak eksternal diantaranya pemegang saham, regulator serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Perusahaan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bertugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (ERM). Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Manajemen Risiko akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Kepatuhan

Merupakan Unit kerja independen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan di BRI. Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Kepatuhan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Audit Intern

Audit Internal merupakan unit kerja yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit. Audit Intern bertugas sebagai penyedia *assurance* dan konsultasi yang

bersifat independen dan objektif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank. Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Audit Intern akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Audit Ekstern

Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh Eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa keuangan (BPK), pemeriksa lain sesuai regulasi dan kantor akuntan Publik. Bank wajib menunjuk akuntan Publik dan kantor akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

Infrastruktur Tata Kelola

Kebijakan dan Prosedur

Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektivitas penerapan GCG oleh Direksi, Dewan Komisaris dan insan Perseroan, kebijakan internal Bank dievaluasi dan disempurnakan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan (*policy owner*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank. Penyempurnaan dan evaluasi atas kebijakan internal Bank disusun sesuai dengan hirarki kebijakan internal Bank.

Kebijakan Penyusunan Rencana Bank

Rencana Bank meliputi:

1. Rencana Jangka Panjang (RJP/*Corporate Plan*) yang berfungsi sebagai garis-garis besar haluan usaha atau strategi Bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan terkait RJP tertuang dalam kebijakan Umum RJP dan Pedoman Pelaksanaan RJP.
2. Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan rincian pelaksanaan strategi dan program kerja serta target kinerja Bank untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan terkait RBB tertuang dalam Kebijakan Umum RBB dan Pedoman Pelaksanaan RBB.
3. Rencana kerja anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan rincian target-target kinerja Bank selama 1 (satu) tahun. Kebijakan terkait RKAP tertuang dalam Surat Edaran Bank tentang RKAP.

Kebijakan Usaha

Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk *Standard Operating Procedure* yang mencakup surat edaran, surat keputusan, Buku Prosedur Operasional dan/atau Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan sejalan dengan kebijakan GCG. Prinsip GCG harus tercermin dalam semua kebijakan dan peraturan internal Bank baik yang berkaitan dengan usaha Bank maupun berkaitan dengan manajemen internal Bank. Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas usaha baru harus dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan

yang berlaku. Ketentuan terkait produk dan/atau aktivitas baru Bank diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kebijakan Pengawasan

Pengawasan Bank diimplementasikan melalui konsep 3 (tiga) garis pertahanan/*Three Lines Model* yaitu:

1. *First Line Model* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Unit kerja Bisnis/Operasional sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kualitas *output* dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. *Second Line of Model* merupakan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
3. *Third Line of Model* merupakan pengawasan yang dilakukan audit intern melalui evaluasi kepada *First Line* dan *Second Line of Defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.
4. Kebijakan Pengawasan BRI terdiri dari:
 - a. Kebijakan pengendalian internal, yang disusun dengan memperhatikan ruang lingkup:
 - i. Lingkungan pengendalian, contoh: penerapan konsep *three line of defense*.
 - ii. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, contoh: *risk assesment* terhadap produk dan/atau aktivitas bisnis bank.
 - iii. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan disetiap tingkatan struktur bank, contoh: kebijakan pengawasan atasan langsung, *dual control* dan sebagainya.

- iv. Sistem informasi dan komunikasi, contoh: informasi yang tersedia di dalam *Data Warehouse* (DWH)
 - v. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas aktivitas pengendalian intern, contoh: kebijakan penerapan perangkat manajemen risiko.
- b. Kebijakan pengawasan dan tindak lanjut atas aktivitas pengendalian internal, antara lain meliputi kebijakan audit intern, Strategi Anti *Fraud*, kajian hukum dan pengujian kepatuhan.
 - c. Kebijakan pengawasan eskternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh auditor eskternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

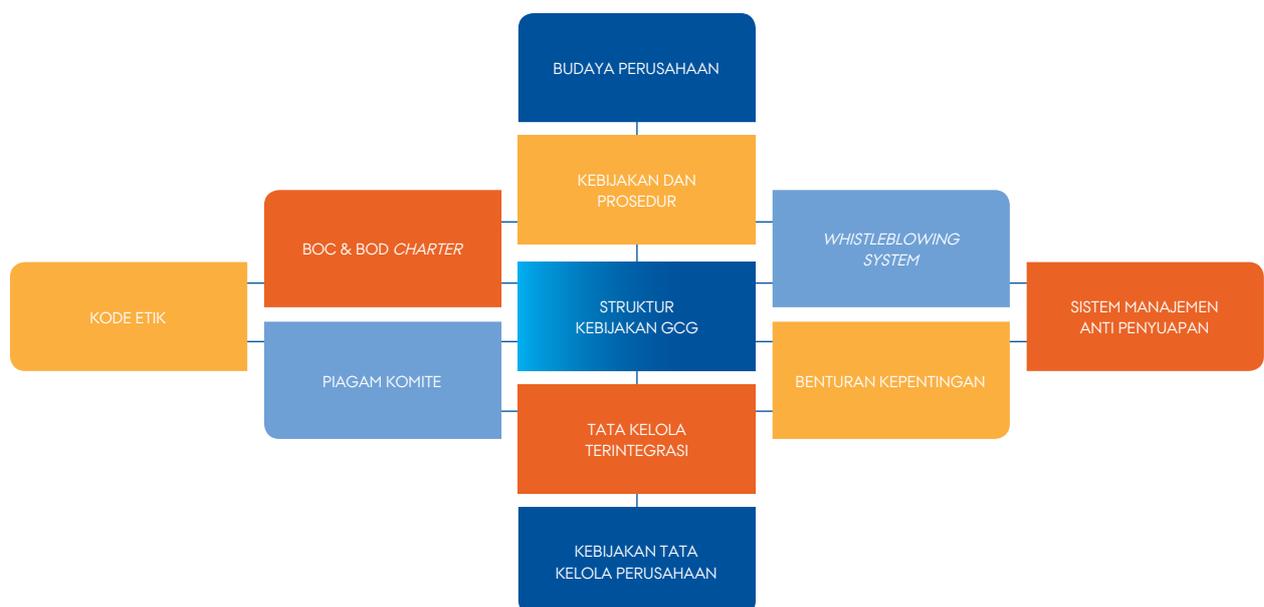
Kebijakan Transparansi dan Pengungkapan

Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam:

1. Panduan transparansi dan pengungkapan (*Transparency and Disclosure Guidelines*)
2. Kebijakan Rahasia Bank.
3. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eskternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan.
4. Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.

Sebagai bentuk komitmen BRI, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik didukung dengan infrastruktur yang lengkap. BRI menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sekedar untuk memenuhi peraturan, tetapi merupakan bagian dari komitmen untuk menjalankan bisnis yang sehat, bertanggung jawab dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan dunia usaha.

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan ●●●





Secara rinci, Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Bank BRI antara lain:

1. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. No. 4 tanggal 06 Oktober 2021.
2. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 1 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 2 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09-KOM/BRI/11/2017 dan No. S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris.
6. Surat Keputusan Direksi No. B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 11-KOM/11/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Pemantau Manajemen Risiko.
9. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi.
10. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 14-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi.
11. Surat Keputusan Direksi No. KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
12. Surat Keputusan Direksi No. B.242-DIR/SKP/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Rapat Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
13. Surat Keputusan Direksi No. B.1784-DIR/CSC/CSM/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Rapat Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
14. Surat Edaran Direksi No. SE.21-DIR/KPD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kebijakan dan Prosedur.
15. Surat Edaran Direksi No. SE.38-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang *Corporate Strategy* (Buku 1 terkait Rencana Jangka Panjang).
16. Surat Edaran Direksi No. SE.38a-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama atas *Corporate Strategy* (Buku 2 terkait Rencana Bisnis Bank).
17. Surat Edaran Direksi No. SE.38a-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama atas *Corporate Strategy* (Buku 3 terkait Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP)).
18. Surat Edaran Direksi No. SE. 38a-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama atas *Corporate Strategy* (Buku 4 terkait Rencana Kerja Fungsional (RKF)).
19. Surat Edaran Direksi No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (Buku 5 Strategi Anti *Fraud*).
20. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 1 terkait Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)).
21. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 2 terkait Penanganan *Whistleblowing System*).
22. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 3 terkait Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi).
23. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 4 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016).
24. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 5 terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)).
25. Surat Edaran Direksi No. SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama Atas *Corporate Governance* (Buku 6 terkait Kode Etik).
26. Surat Edaran Direksi No. SE.41-DIR/KEP/11/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
27. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. SO.92-KEP/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Implementasi Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Proses (Mekanisme) Tata Kelola (Governance Process)

Proses Tata Kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen pencapaian kinerja yang terbaik dan mewujudkan struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip GCG. Proses Tata kelola BRI di antaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Direksi

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Organ Pendukung
5. Perencanaan Strategik & Manajemen Kinerja
6. Bisnis Proses dan Aktivitas Perusahaan
7. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
8. Sistem Manajemen Kepatuhan
9. Audit Internal

Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Untuk memastikan hasil tata kelola perusahaan telah memadai, maka BRI melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan setiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas implementasi penerapan dari struktur tata kelola dan proses tata kelola di BRI. Penilaian ini dilakukan juga untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka perbaikan penerapannya di masa yang akan datang. Penilaian GCG ini dilakukan secara periodik yang terdiri dari penilaian yang dilakukan sendiri (*self-assessment*) dan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, sebagai berikut:

Penilaian Internal

Self Assesment GCG

BRI melakukan *self-assessment* atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik setiap semester sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 13/POJK.03/22017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Prinsip – prinsip Tata Kelola terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan operasional Bank. Penilaian dilakukan secara komprehensif atas pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola perusahaan, yaitu:

1. *Governance Structure*
Penilaian bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.
2. *Governance Process*

Penilaian bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan terstruktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

3. *Governance Outcome*

Penilaian bertujuan untuk menilai outcome yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Kriteria Penilaian

Berdasarkan SEOJK Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* tata kelola perusahaan meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit internal
7. Penerapan fungsi audit eksternal
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis bank.

Pihak yang melakukan Penilaian

Self Assessment GCG dikoordinasikan oleh Divisi Kepatuhan dan dievaluasi oleh Komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala selanjutnya dilaporkan ke OJK.

Hasil *Self Assessment*

Pada penilaian tata kelola perusahaan yang dilakukan pada tahun 2023, hasil *self assessment* sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola		
Entitas	Peringkat	Definisi Peringkat

Individual)

2

Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI.



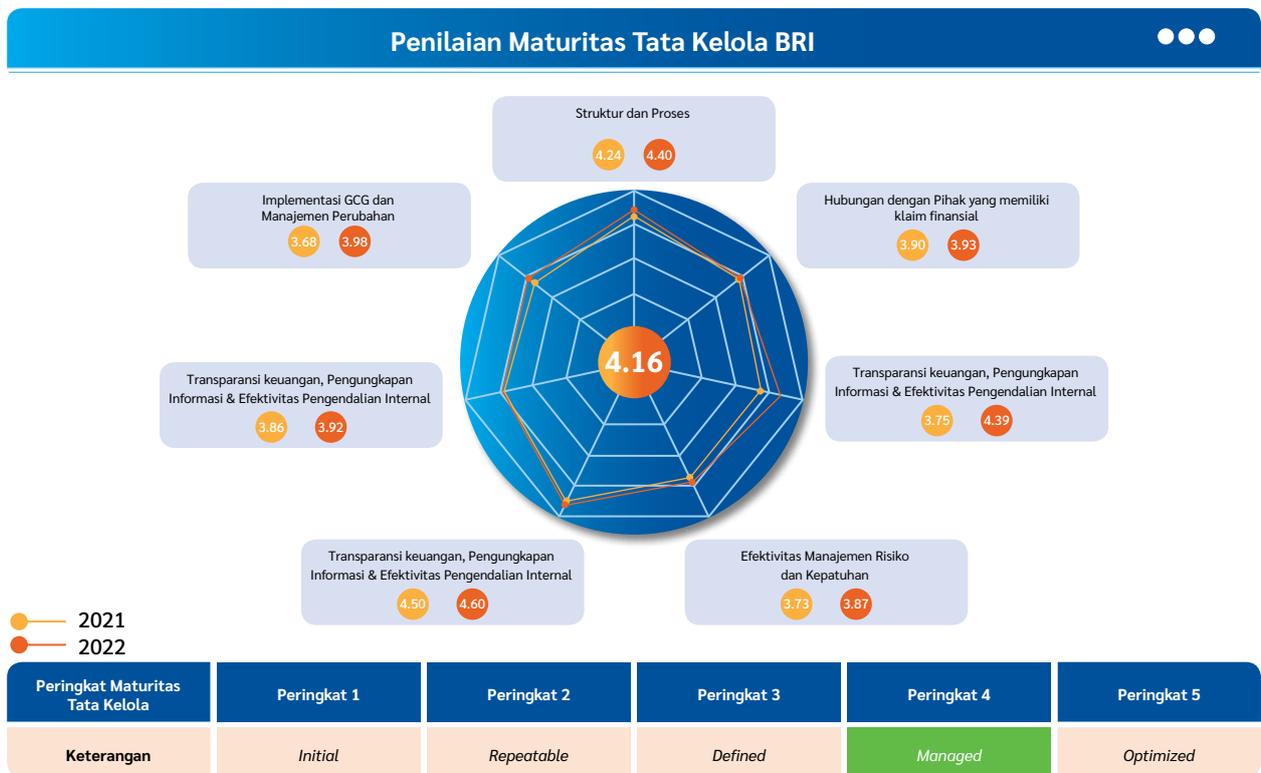
Analisis

Struktur Tata Kelola	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada aspek <i>governance structure</i> secara umum telah memadai dengan telah dimilikinya struktur tata kelola, kebijakan, sumber daya manusia, dan sistem yang terintegrasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di BRI. Kelemahan yang terjadi pada <i>governance structure</i> telah ditindaklanjuti sehingga tidak mengganggu kinerja Perusahaan.
Proses Tata Kelola	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada aspek <i>governance process</i> secara umum telah berjalan dengan baik, proses bisnis yang dijalankan mengacu pada rencana bisnis yang telah ditetapkan serta setiap organ perusahaan telah menjalankan proses bisnis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, BRI senantiasa melakukan <i>review</i> dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan <i>governance process</i> dapat segera dilakukan tindak lanjut perbaikan.
Hasil Tata Kelola	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada aspek <i>governance outcome</i> secara umum telah dilaksanakan dengan baik, proses pengungkapan dan transparansi informasi, data dan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas kelemahan dalam pelaporan yang dilakukan, BRI telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi manajemen dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan memberikan kemudahan bagi para <i>stakeholder</i> untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Tingkat Maturitas Tata Kelola

Penilaian Maturitas Tata Kelola BRI dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), serta sebagai metode pengukuran yang terstruktur terkait dengan struktur, proses maupun hasil dari implementasi Tata Kelola secara berkala.

BRI telah melakukan evaluasi terhadap tingkat maturitas tata kelola BRI pada tahun 2023. Nilai tingkat tata kelola BRI adalah 4,16 dengan rincian pada diagram berikut ini:



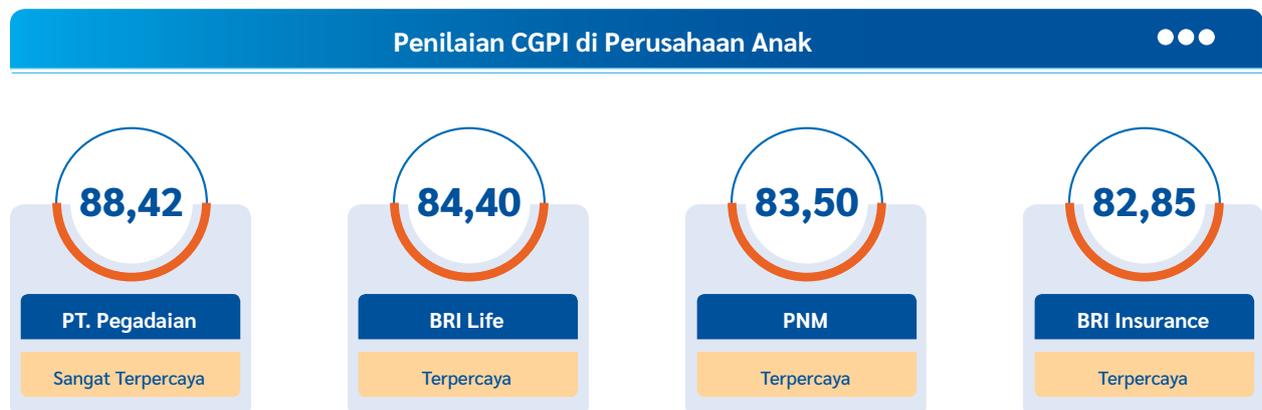
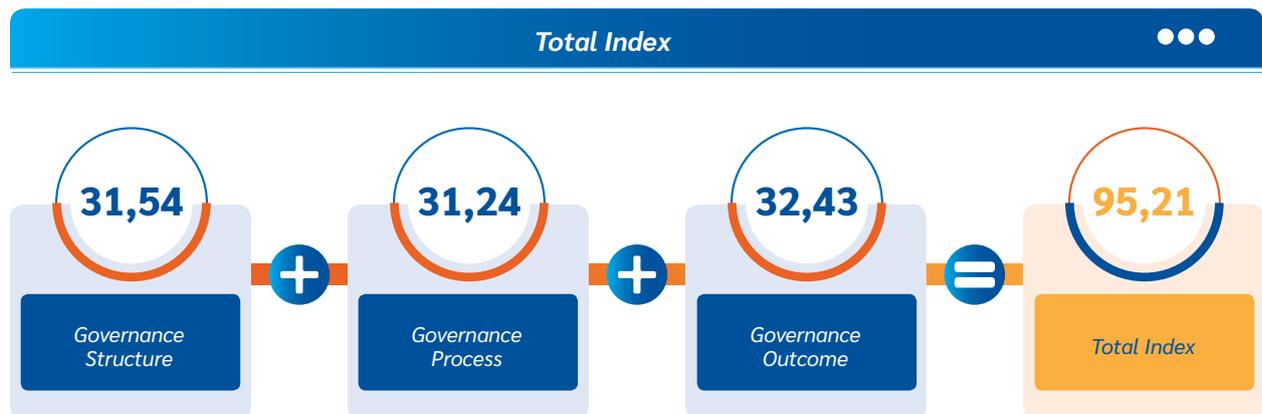
Corporate Governance Perception Index

Hasil penilaian CGPI selama 4 (empat) tahun terakhir telah menjadi acuan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan penerapan GCG secara terukur. Secara konsisten BRI terus melakukan perbaikan dan peningkatan GCG secara komprehensif sehingga pada tahun 2023 BRI memperoleh skor CGPI tertinggi. Hal ini merupakan komitmen manajemen BRI untuk secara terus menerus dan berkesinambungan mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.



CGPI diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan. Pada pelaksanaan CGPI tahun 2023 dengan tema “Membangun Ketangkasan dalam Kerangka GCG”, telah dilakukan penilaian terhadap 3 aspek yaitu:

- *Governance Structure* meliputi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan.
- *Governance Process* meliputi sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan.
- *Governance Outcome* meliputi *output*, *outcome* dan *impact* dari proses implementasi GCG.





ASEAN Corporate Governance Scorecard

Salah satu penilaian eksternal yang dilakukan terhadap praktik tata kelola BRI selama beberapa tahun terakhir adalah penilaian berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mengadopsi prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikeluarkan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). ACGS merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan tercatat di ASEAN dan mempromosikan perusahaan tercatat di ASEAN Asset Class. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam

inisiatif ini. Pada Tahun 2023, BRI mendapatkan penghargaan sebagai Top 3 PLC (*Public Listed Company*) in Indonesia & ASEAN Asset Class PLCs.

ASEAN Corporate Governance Scorecard merupakan penilaian yang dilakukan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dengan penilaian yang mencakup:

1. Hak-Hak Pemegang saham
2. Keberlanjutan dan Ketahanan
3. Pengungkapan dan Transparansi
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Pelaksanaan penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan terbuka, yang mengatur tentang 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan prinsip tata kelola.

Penerapan rekomendasi tersebut dalam GCG BRI adalah sebagai berikut:

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	
A.1.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1: Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan: Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham BRI dilaksanakan menggunakan metode pemungutan suara satu hak suara (<i>one vote one share</i>). Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan dan petugas mengumpulkan hak suara dengan menghampiri seluruh pemegang saham yang hadir.</p> <p>Perseroan telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (<i>voting</i>) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sesuai ketentuan OJK, Perseroan telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara RUPS yang dituangkan ke dalam Tata Tertib RUPS Bank BRI yang diumumkan kepada pemegang saham melalui <i>website</i> perseroan. • Prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) melibatkan Pihak Independen yaitu Notaris, PT Datindo Entrycom, Kantor Akuntan Publik. • Proses pengumpulan hak suara telah diatur dalam Anggaran Dasar BRI dan Tata Tertib RUPS yang dimuat pada <i>website</i> Perusahaan. <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2: Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan: Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Sesuai ringkasan Risalah RUPS Tahunan BRI yang terselenggara pada 14 Maret 2023, seluruh Dewan Komisaris dan Anggota Direksi menghadiri RUPS Tahunan BRI.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPST dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</p> <p>Risalah rapat dipublikasikan dalam <i>website</i> perseroan 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 14 Maret 2023. Adapun RUPST diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2023.</p> <p>Risalah RUPST Bank tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun pada <i>website</i> BRI. (www.bri.co.id)</p> <p>Informasi terkait RUPS Tahunan pada tahun 2022 telah disajikan pada Sub Bab Rapat Umum Pemegang Saham pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
A.2.	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4: Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan: Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Kebijakan ini mencakup aktivitas hubungan investor diantaranya <i>analyst meeting</i>, <i>public expose</i> bertujuan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Bank BRI memiliki satu unit kerja khusus yaitu Divisi Investor Relation yang berfungsi untuk mengelola hubungan dengan investor. Akses Keterbukaan Informasi Laporan Tahunan</p> <p>ini dan juga diungkapkan melalui <i>Website</i> Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com).</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5: Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Pengungkapan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor telah di <i>upload</i> dalam situs web Perseroan yaitu www.bri.co.id dan www.ir-bri.com.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
B.1.	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6: Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI posisi 31 Desember 2023 adalah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri 7 (tujuh) Komisaris Independen dan 3 (tiga) Komisaris non Independen.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7: Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan: Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris BRI.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
B.2.	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
B.2.1.	<p>Rekomendasi 8: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolejal. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolejal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>BRI melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam <i>Board Charter</i> sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan (www.bri.co.id)</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
B.2.2.	<p>Rekomendasi 9: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam <i>Board Manual</i> sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan (www.bri.co.id)</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Dewan Komisaris yang terdapat pada Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris diungkapkan pada laporan tahunan BRI 2023 pada Bab Dewan Komisaris.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan Suksesi Direksi disampaikan pada Bab Komite Nominasi dan Remunerasi pada laporan tahunan BRI 2023.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
C. Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi		
C.1. Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan: Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi telah melalui pertimbangan matang dan telah mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Direksi BRI tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) Direksi.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.</p>	<p>Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk meyakini bahwa kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi telah sesuai dengan kelayakan berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun kebutuhan Perseroan dan diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi Laporan Tahunan ini.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.1.3.	<p>Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan: Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Direktur yang membidangi/membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, antara lain:</p> <p>Pendidikan: Meraih gelar MBA, Finance & Strategy dari Simon School of Business-University of Rochester, Amerika Serikat (2010)</p> <p>Sarjana Peternakan, dari Institut Pertanian Bogor (2001).</p> <p>Pengalaman: Executive Vice President Subsidiary Management Division</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
C.2.	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolektif. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>BRI melaksanakan penilaian kinerja Direksi berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan.</p> <p>Direksi telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam <i>Board Charter</i> sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan (www.bri.co.id)</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi telah diungkapkan pada bagian hasil Penilaian Kinerja Direksi pada laporan Tahunan BRI Tahun 2023.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi yang menyatakan Pemberhentian anggota Direksi apabila yang bersangkutan Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang tertera pada <i>Board Charter</i>. Kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BRI.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
D. Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
D.1.	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Penjelasan: Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Kebijakan BRI tentang <i>Insider Trading</i> diatur dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran (SE) Nomor SE.09.a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama Atas <i>Corporate Governance</i> Buku 6 perihal Kode Etik 2. Surat Edaran (SE) Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> Buku 1 perihal Benturan Kepentingan <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Pelaksanaan penerapan Strategi Anti Fraud di BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor : SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (Buku 5 Strategi Anti <i>Fraud</i>).</p> <p>Untuk meningkatkan kemampuan Bank dalam pencegahan <i>Fraud</i> serta memberikan respon yang cepat dalam penanganan dan penyelesaian suatu kejadian <i>Fraud</i>, maka pengelolaan risiko <i>Fraud</i> dibagi menjadi 2 aktivitas besar, yaitu pada saat <i>Fraud</i> masih merupakan suatu potensi risiko (<i>managing risk</i>) dan setelah insiden <i>Fraud</i> terjadi (<i>incident handling</i>). Aktivitas pengelolaan risiko <i>Fraud</i> ini diadaptasi dan dikembangkan dari 4 (empat pilar) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Deteksi 3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
		<p>Untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) BRI telah memiliki kebijakan anti korupsi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> Buku 3 perihal Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi.</p> <p>Untuk menciptakan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), BRI telah menerapkan ISO 37001:2016 dan mengadopsi kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang tertuang pada Surat Edaran (SE) Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> perihal Buku 4 perihal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.</p> <p>Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam pencegahan korupsi.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i>, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait Pengelolaan <i>Vendor</i> BRI sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor SE.18-DIR/PLM/05/2023 perihal Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Buku 11). Saat ini BRI mengembangkan aplikasi <i>Vendor Management System</i> yang terintegrasi dengan aplikasi BRISMILE, dimana dalam aplikasi tersebut mencakup proses pendaftaran dan seleksi calon <i>vendor</i>, <i>monitoring</i>, pemeliharaan rekanan (<i>vendor maintenance</i>) sampai dengan evaluasi kinerja <i>vendor</i> sehingga BRI mempunyai <i>database vendor</i> yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BRI.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang dituangkan pada setiap Perjanjian Kredit antara BRI dengan debitur. Pada perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti transparansi laporan keuangan kepada kreditur.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<p>Kebijakan mengenai <i>Whistleblowing System</i> di BRI yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> perihal Buku 2 perihal <i>Whistleblowing System</i> mengatur tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan, sarana pelaporan, perlindungan & kerahasiaan pelapor, serta unit pengelola <i>Whistleblowing System</i>.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (<i>Comply</i>)</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan: Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Insentif jangka panjang pekerja terdapat dalam Bagian Kesejahteraan Pekerja dalam Laporan Tahunan BRI Tahun 2023.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (Comply)</p>
E. Aspek 5: Keterbukaan Informasi		
E.1. Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan: Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>Stakeholders</i> melalui media teknologi informasi, selain <i>website</i> Perseroan. <i>Omni Channel</i> BRI adalah sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui <i>channel</i> yang tersedia yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka melalui <i>Customer Service</i> di seluruh Unit kerja operasional BRI 2. <i>Call Centre</i> 1500017, (+62 577987400) 3. Media Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Facebook : BankBRI b. Instagram : @bankbri id c. Twitter : @kontakBRI, @promo_BRI, @bankbri_id 4. Youtube : BANK BRI 5. Chatbot : Sabrina (melalui facebook messenger dan whatsapp/telegram 081-212-14017) <p>Keterangan: Memenuhi (Comply)</p>
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan: Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Pada Laporan Tahunan BRI Tahun 2023 menyampaikan kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut.</p> <p>Keterangan: Memenuhi (Comply)</p>



Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang Diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di BRI
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolejal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS 2. Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya memberikan arahan dan pengawasan kepada Direksi dalam kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rencana dan kerja perseroan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris BRI memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan. Hal ini terlihat dalam keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi dan pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> . Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan perbankan terkini dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan baik di dalam dan luar negeri.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank BRI memiliki fungsi Manajemen Risiko yang berfungsi diantaranya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko Perusahaan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Divisi yaitu <i>Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Division, Digital Risk Division, Operational Risk Division, Wholesale Credit Risk Analyst Division dan Credit & Product Risk Policy Division</i> . Dalam upaya fungsi pengawasan, Direksi mengkomunikasikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di BRI
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian profil risiko Bank dilakukan dan disampaikan dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris setiap triwulan.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko Kepatuhan Bank dilakukan oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko terkait penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>Review</i> dan evaluasi fungsi kepatuhan dilakukan setiap semesteran.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi BRI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam hal pengawasan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab SKAI bertanggungjawab melaksanakan kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Struktur remunerasi BRI mengacu terhadap Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Penerapan Tata Kelola Remunerasi BRI disampaikan dalam Laporan Tahunan BRI 2023 pada Bab Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Pengungkapan dan transparansi BRI kepada Pemegang saham disampaikan melalui <i>website</i> perusahaan www.bri.co.id terhadap informasi terkini. Keterbukaan informasi Bank BRI juga disampaikan pada Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

Hubungan Struktur, Mekanisme dan Hasil Tata Kelola

Tata kelola perusahaan diterapkan dalam suatu rangkaian terintegrasi yang meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu *structure*, *process*, dan *outcome*. Ketiga aspek tersebut dijalankan oleh BRI guna menjamin tersedianya struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai, memaksimalkan efektivitas proses pelaksanaan tata kelola, dan meningkatkan *outcome* tata kelola untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Saham BRI terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

- Saham Seri A Dwiwarna
Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.
- Saham Seri B.
Saham Seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna tersebut memberikan hak istimewa kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama sebagai berikut:

- Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - Persetujuan perubahan permodalan.
 - Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



- d. Persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain.
 - h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
 4. Hak untuk meminta akses data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.

Di luar dari hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut, Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama sepanjang tidak diatur lain oleh Anggaran Dasar yaitu:

1. Menghadiri RUPS baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menyampaikan pendapat dan/atau pengambilan keputusan. Masing-masing pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara dan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
2. Menerima informasi terkait BRI yang akurat dan tepat waktu dengan prinsip kesetaraan informasi terhadap seluruh pemegang saham.
3. Menerima pembagian dividen dan pembagian keuntungan BRI dalam bentuk lainnya sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.
4. Menerima pembagian sisa hasil likuidasi Bank dalam hal terjadinya kepailitan.
5. Meminta diselenggarakannya RUPS oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, atas dasar kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
6. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS dengan ketentuan pemegang seri A dwiwarna atau 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 jumlah saham beredar.
7. Memperoleh penjelasan lengkap dan Informasi yang akurat mengenai persyaratan prosedur penyelenggaraan RUPS.
8. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

9. Meminta kepada Perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan/aksi korporasi yang merugikan pemegang saham atau Perseroan.
10. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS sepanjang berkaitan dengan mata acara Rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
11. Melalui RUPS, melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan ketentuan mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Seluruh Pemegang Saham harus dapat:
 - a. Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi.
 - b. Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
2. Pemegang Saham Pengendali harus dapat:
 - a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
 - c. Mengupayakan akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan, dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan.
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

BRI menjunjung tinggi kesetaraan perlakuan terhadap seluruh Pemegang Saham yang tercermin dari:

1. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham, dengan hak mengajukan RUPS bagi pemegang saham minimal 10%.
2. Penyediaan akses informasi yang sama melalui kanal *Investor Relations* antara lain melalui interaksi langsung pada acara *Public Expose, Non-Deal Roadshow, Press Conference*, atau *1-on-1 Meeting, Conference Call*, dan *email*, serta dokumen yang tersedia pada *website* Perusahaan, *Investor Relations*, dan Bursa Efek Indonesia meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, dan *Highlights* Kinerja Keuangan Perusahaan, dan sebagainya.

- Jumlah Komisaris Independen di atas batas minimum yang ditetapkan regulator, yaitu 7 (tujuh) orang Komisaris dari total 10 (sepuluh) orang Komisaris.
- Pemegang Saham memiliki kesetaraan untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Perseroan, di antaranya informasi kinerja Perseroan, laporan keuangan, dan pelaksanaan RUPS.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki juru bicara yang berwenang berkomunikasi dengan Pemegang Saham. Semua Pemegang Saham harus mendapatkan

perlakuan dan informasi yang sama (*equitable treatment*) secara tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi Nomor S.08-DIR/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Rapat Umum Pemegang Saham

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Tahapan penyelenggaraan RUPS Tahun 2023 telah memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagai berikut:

Tahapan	Kegiatan
Pemberitahuan kepada OJK	Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS.
Pengumuman RUPS	Pengumuman RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS melalui situs <i>web</i> penyedia e-RUPS, situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia, situs <i>web</i> Perusahaan Terbuka.
Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS melalui situs <i>web</i> penyedia e-RUPS, situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia, situs <i>web</i> Perusahaan Terbuka. Saat pemanggilan RUPS mata acara berikut penjelasannya telah di unggah pada situs Perusahaan dan dapat diunduh.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RUPS, dipublikasikan melalui situs <i>web</i> penyedia e-RUPS, situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia, situs <i>web</i> Perusahaan Terbuka.
Penyampaian Risalah RUPS	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.

Ketentuan Kuorum

No.	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
1.	Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan.	Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2.	Pengalihan kekayaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan.	Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3.	Perubahan hak atas saham.	Dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4.	Di luar dari Mata Acara 1 sampai dengan 3 tersebut di atas yang memerlukan persetujuan RUPS.	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5.	Mata Acara yang perlu persetujuan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen.	Dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen.	Disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.



Tata Tertib RUPS

Tata tertib dalam pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengakses atau mengunduh Tata Tertib RUPS pada *website* Perseroan.
2. Tata tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Kesempatan diberikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara RUPS.
4. Pimpinan RUPS atau pihak yang ditunjuk Pimpinan RUPS akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham.
5. Pemungutan suara dilakukan setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat selesai dijawab. Suara hanya dapat disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
6. Penghitungan dan/atau validasi suara dalam RUPS dilakukan oleh pihak Independen, yaitu Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Upaya Mengajak Pemegang Saham Hadir Dalam RUPS

BRI berupaya agar seluruh Pemegang Saham hadir dan menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan RUPS yang disebarakan secara tepat waktu melalui *website* Perusahaan, Bursa Efek serta Koran Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
2. Memaparkan materi dari setiap mata acara rapat sebagai referensi Pemegang Saham.
3. Membuka akses bagi Pemegang Saham untuk berkomunikasi dengan Perusahaan terkait penyelenggaraan RUPS melalui kontak yang tersedia di *website* Perusahaan.
4. Menyediakan *form proxy* pada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk memberikan suara dalam RUPS yang dapat diakses melalui *web* Perseroan dan/atau Bursa Efek.

Ketentuan Pemungutan Suara RUPS

Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Tata cara pemungutan suara dalam RUPS yaitu:

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik memberikan suara *abstain* atau tidak setuju dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya pada waktu pemungutan suara.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan mata acara.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melakukan pemungutan suara melalui *e-voting* pada eASY KSEI
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara *abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

5. Pimpinan RUPS akan mengumumkan hasil pemungutan suara.
6. Setiap pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh pemegang selain atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Pekerja Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.

Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS Melibatkan Pihak Independen

Dalam penyelenggaraan RUPS, BRI tidak hanya mengundang para Pemegang Saham namun juga selalu melibatkan pihak Independen terutama dalam pemungutan dan perhitungan suara, yaitu Notaris Fathiah Helmi S.H dan PT Datindo Entrycom.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

Ketentuan kuorum, prosedur *voting* termasuk dengan tata tertib Rapat diungkapkan sebelum RUPS dimulai. Pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik melalui fasilitas *e-voting* eASY KSEI, hal ini dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk memberikan independensi dan kerahasiaan kepada Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses pemungutan suara melalui *e-voting* pada eASY KSEI.

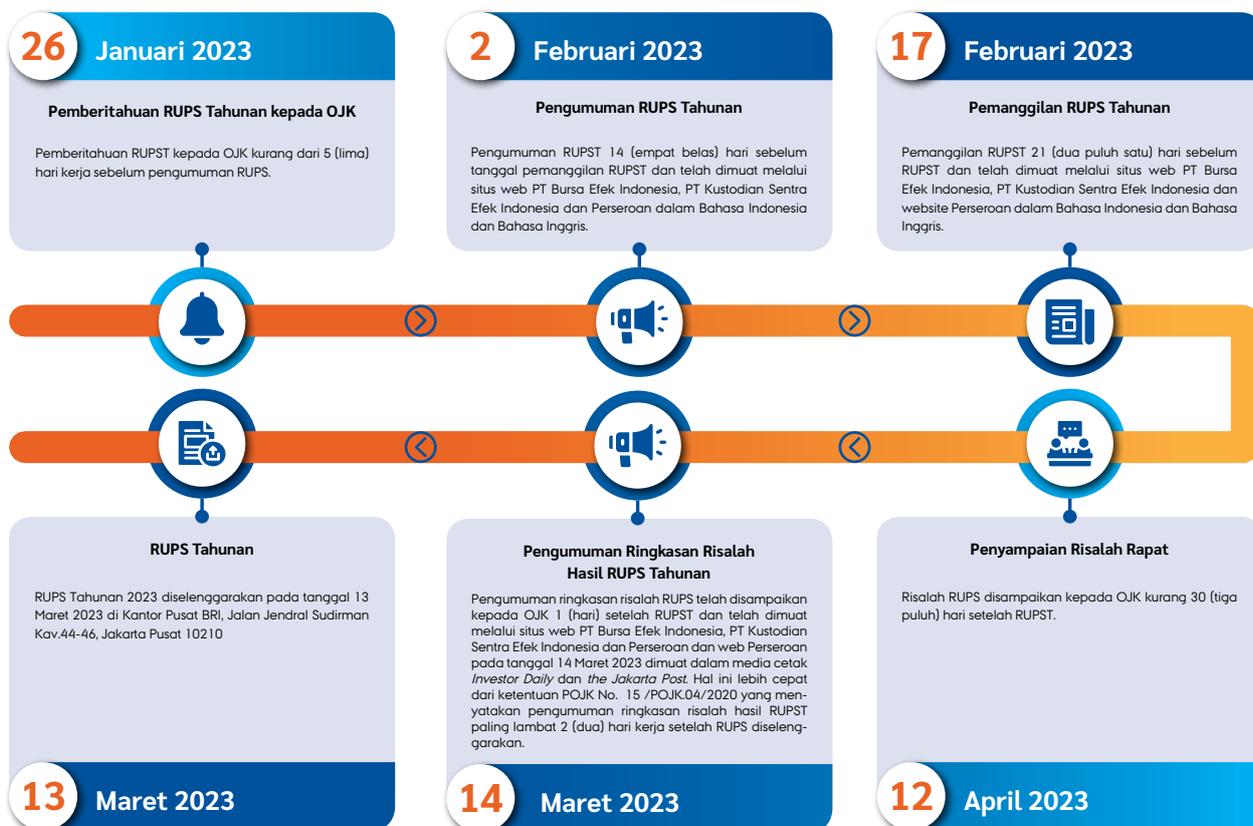
Pada mekanisme pengambilan keputusan, diawali dengan memberikan penjelasan terkait setiap agenda yang akan diputuskan oleh pemegang saham dan minimal jumlah kuorum putusan atas tiap agenda yang diusulkan. Adapun putusan dapat diberikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya. Selanjutnya, Ringkasan RUPS menjelaskan tahapan pelaksanaan RUPS, menjelaskan kepada Pemegang Saham tentang dasar pertimbangan kepada setiap agenda RUPS yang akan mendapatkan persetujuan Pemegang Saham, dan hasil tanya jawab dan/atau penyampaian pendapat.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 dan Realisasinya

RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal Senin, 13 Maret 2023 sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor R.57-DIR/CSC/01/2023 tanggal 26 Januari 2023.
2. Memuat publikasi Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan pada tanggal 2 Februari 2023.
3. Memuat publikasi Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs *web* Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 17 Februari 2023.

Tahapan RUPS Tahunan 13 Maret 2023



Sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Selanjutnya, sesuai Pasal 42 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa total saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 136.071.001.108 saham yang setara dengan 90,171% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara

Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022
Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
Ketiga	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2023, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



Keempat	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2023.
Kelima	Persetujuan atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) Perseroan dan Pengininan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.
Keenam	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021.
Ketujuh	Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (<i>Buyback</i>) dan Pengalihan Saham Hasil <i>Buyback</i> yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (<i>Treasury Stock</i>).
Kedelapan	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir pada RUPS Tahunan 2023. Adapun rincian kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	✓
2.	Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	✓
3.	Hadiyanto	Komisaris	✓
4.	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	✓
5.	Hendrikus Ivo*	Komisaris Independen	✓
6.	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	✓
7.	Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	✓
8.	Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	✓
9.	Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	✓
10.	Agus Riswanto	Komisaris Independen	✓
11.	Sunarso	Direktur Utama	✓
12.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	✓
13.	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	✓
14.	Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	✓
15.	Supari	Direktur Bisnis Mikro	✓
16.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	✓
17.	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	✓
18.	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	✓
19.	Agus Winardono	Direktur <i>Human Capital</i>	✓
20.	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	✓
21.	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Direktur Keuangan	✓
22.	Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	✓

* Ybs sebagai Ketua Komite Audit

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	135.440.592.847 suara atau 99,537% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	13.477.373 suara atau 0,010% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	616.930.888 atau 0,453% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedua	135.639.487.467 suara atau 99,683% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.473 suara atau 0,000003% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	431.510.168 suara atau 0,317% dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Ketiga	126.437.892.593 suara atau 92,921% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	9.323.836.566 suara atau 6,852% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	309.271.949 suara atau 0,227% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Keempat	133.816.867.555 suara atau 98,343% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.862.685.797 suara atau 1,369% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	391.447.756 suara atau 0,288% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Kelima	135.749.756.080 suara atau 99,764% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.473 suara atau 0,000003% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	321.241.555 suara atau 0,236% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Keenam	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.			Tidak ada
Ketujuh	132.136.015.948 suara atau 97,108% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.607.432.108 suara atau 2,651% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	327.553.052 suara atau 0,241% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedelapan	92.770.309.437 suara atau 68,178% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	42.011.550.436 suara atau 30,874% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.289.141.235 suara atau 0,947% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada



Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2023

Keputusan	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kesatu</p> <p>Keputusan</p> <p>1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk mengesahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) sesuai Laporan Nomor 00060/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022. <p>2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) sesuai Laporan Nomor 00079/2.1032/AU.2/10/1681-3/1/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material ('Laporan PUMK').</p> <p>3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan-Laporan tersebut di atas beserta dokumen pendukungnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Laporan tahunan termasuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah dipublikasikan pada tanggal 10 Februari 2023 RUPS telah menyetujui laporan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 RUPS telah menyetujui laporan PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 	Telah Terealisasi Seluruhnya
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kedua</p> <p>Keputusan</p> <p>Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp51.170.312.486.481,20 (lima puluh satu triliun – seratus tujuh puluh miliar – tiga ratus dua belas juta – empat ratus delapan puluh enam ribu – empat ratus delapan puluh satu Rupiah – dua puluh sen) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 85% atau sekurang-kurangnya sebesar Rp43.494.765.613.509,02 (empat puluh tiga triliun – empat ratus sembilan puluh empat miliar – tujuh ratus enam puluh lima juta – enam ratus tiga belas ribu – lima ratus sembilan puluh – dua sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham, termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp8.602.823.028.828 (delapan triliun – enam ratus dua miliar – delapan ratus dua puluh tiga juta – dua puluh delapan ribu – delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sekurang-kurangnya sebesar Rp34.891.942.584.681,02 (tiga puluh empat triliun – delapan ratus sembilan puluh satu miliar – sembilan ratus empat puluh dua juta – lima ratus delapan puluh empat ribu – enam ratus delapan puluh satu rupiah – dua sen). Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp23.153.100.328.010,20 (dua puluh tiga triliun – seratus lima puluh tiga miliar – seratus juta – tiga ratus dua puluh delapan ribu – sepuluh Rupiah dua puluh sen) termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp4.594.825.681.932 (empat triliun – lima ratus sembilan puluh empat miliar – delapan ratus dua puluh lima juta – enam ratus delapan puluh satu ribu – sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah). Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar Rp18.558.274.646.078,20 (delapan belas triliun – lima ratus lima puluh delapan miliar – dua ratus tujuh puluh empat juta – enam ratus empat puluh enam ribu – tujuh puluh delapan Rupiah dua puluh sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Dividen untuk Tahun Buku 2022 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>). Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian 15% atau sebesar-besarnya Rp 7.675.546.872.972,18 (tujuh triliun – enam ratus tujuh puluh lima miliar – lima ratus empat puluh enam juta – delapan ratus tujuh puluh dua ribu – sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah – delapan belas sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan. 	<p>Seluruh dividen (termasuk dividen interim) telah dibayarkan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negara Republik Indonesia sebesar Rp23.153.100.328.010,20, disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara Pemegang saham publik sebesar Rp20.341.665.285.498,82 yang dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) pada tanggal 12 April 2023 Sisa laba bersih 2022 yang tidak dibayarkan sebagai dividen telah dicatat sebagai saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2023 	Telah Terealisasi Seluruhnya

Keputusan	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
<p style="text-align: center;">Mata Acara Ketiga</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2022; dan Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2023. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi: <ol style="list-style-type: none"> Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2022; dan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2023. 	<ol style="list-style-type: none"> Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2023 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022 bagi Dewan Komisaris telah ditetapkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan Surat No.SR-23/Wk2.MBU.A/07/2023. Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2023 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022 bagi Direksi telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.SR.24-KOM/07/2023 berdasarkan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan No.SR-23/Wk2.MBU.A/07/2023. 	Telah Terealisasi Seluruhnya
<p style="text-align: center;">Mata Acara Keempat</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member Firm of Ernst & Young Global Limited</i>) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023; Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member Firm of Ernst & Young Global Limited</i>), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2023, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. 	Dewan Komisaris telah menunjuk, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member Firm of Ernst & Young Global Limited</i>) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan	Telah Terealisasi Seluruhnya
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kelima</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada LPS; Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK; Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) dengan memperhatikan POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik, serta peraturan terkait lainnya. 	RUPS telah menyetujui <i>Resolution Plan</i> Perseroan, termasuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal diperlukan tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi.	Telah Terealisasi Seluruhnya
<p style="text-align: center;">Mata Acara Keenam</p> <p>Keputusan</p> <p>Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.</p>	RUPS telah menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Terbatas.	Telah Terealisasi Seluruhnya



Keputusan	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
<p style="text-align: center;">Mata Acara Ketujuh</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah seluruh <i>buyback</i> sebesar-besarnya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang dalam pelaksanaannya memperhatikan perizinan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasury (<i>treasury stock</i>) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dan/atau program lainnya sesuai dengan persetujuan OJK serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan buyback kepada Direksi Perseroan. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil <i>buyback</i> yang disimpan sebagai saham <i>treasury (treasury stock)</i> kepada: <ol style="list-style-type: none"> Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau program lainnya sesuai dengan Persetujuan OJK; Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. 	<p>RUPS telah menyetujui pembelian saham kembali Perseroan yang dilakukan secara bertahap oleh direksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan masih dalam tahap pembelian kembali saham Perseroan sampai dengan 14 September 2024. Pengalihan saham hasil pembelian kembali saham masih menunggu Perseroan selesai membeli kembali seluruh saham.
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kedelapan</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Sunarso sebagai Direktur Utama Sdr. Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro Sdr. Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan Sdr. Hadiyanto sebagai Komisaris <p>Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 2 September 2019, Keputusan RUPS Tahunan Buku 2017 tanggal 22 Maret 2018 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 2 September 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 22 Maret 2018 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 jo RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 22 Maret 2018. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direktur Perseroan.</p> Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Sunarso sebagai Direktur Utama Sdr. Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro Sdr. Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan Sdr. Awan Nurmawan Nuh sebagai Komisaris Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada angka 2 tersebut adalah paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 	<p>Komisaris yang diangkat pada RUPS Tahun 2023 telah melakukan dan mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor KEPR-160/D.03/2023 pada tanggal 8 Desember 2023.</p>	<p>Telah Terealisasi Seluruhnya</p>

Keputusan	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
<p>Dewan Komisaris Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim Komisaris : Awan Nurmawan Nuh* Komisaris : Rabin Indrajad Hattari Komisaris Independen : Hendrikus Ivo Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa Komisaris Independen : Heri Sunaryadi Komisaris Independen : Paripurna Poerwoko Sugarda Komisaris Independen : Agus Riswanto Komisaris Independen : Nurmaria Sarosa</p> <p>Direksi Direktur Utama : Sunarso Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto Direktur Bisnis Konsumer : Handayani Direktur Bisnis Mikro : Supari Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Agus Noorsanto Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto Direktur Human Capital : Agus Winardono Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Arga Mahanana Nugraha Direktur Jaringan dan Layanan : Andrijanto</p> <p>Keterangan:</p> <p>*) Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>		
<p>5. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pada angka 2 tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan ('Fit & Proper Test') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam <i>Fit & Proper Test</i> oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil <i>Fit & Proper Test</i> OJK dimaksud.</p> <p>6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p> <p>7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan <i>Fit & Proper Test</i> terhadap Anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada angka 2 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh putusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.</p>		

Dengan demikian seluruh keputusan RUPS Tahunan 2023 telah direalisasikan.

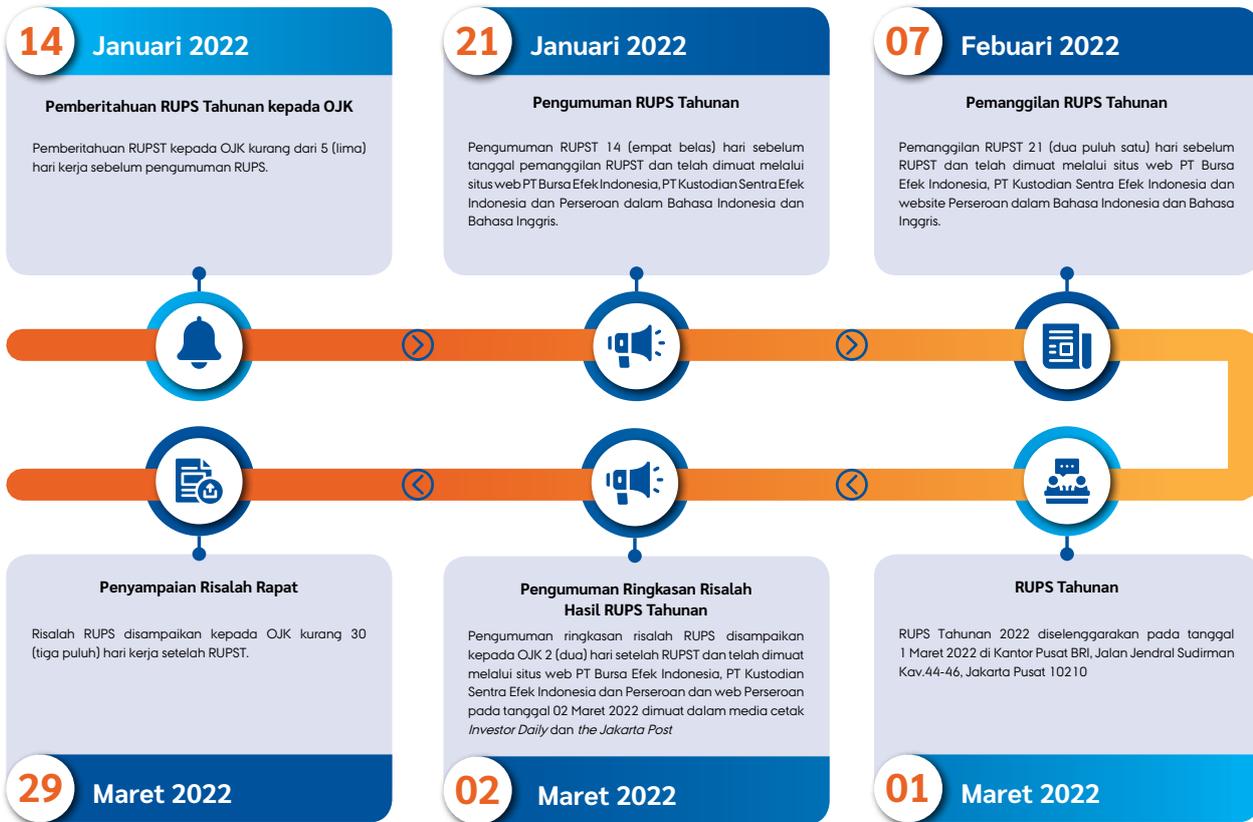
Pelaksanaan RUPS Tahunan 2022 dan Realisasinya

RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2022 sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.R.59- DIR/ CSC/01/2022 tanggal 14 Januari 2022.
2. Memuat publikasi Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan pada tanggal 21 Januari 2022.
3. Memuat publikasi Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs *web* Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 7 Februari 2022.



Tahapan RUPS Tahunan 1 Maret 2022



Sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Selanjutnya, sesuai Pasal 42 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa total saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 133.488.652.489 saham yang setara dengan 88,086% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

MATA ACARA

Kesatu

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Ketiga	Penguuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
Keempat	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Kelima	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022.
Keenam	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021.
Ketujuh	Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (<i>Buyback</i>) dan Pengalihan Saham Hasil <i>Buyback</i> yang Disimpan sebagai Saham sebagai Saham Treasury (<i>Treasury Stock</i>).
Kedelapan	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2022

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir pada RUPS Tahunan 2022. Adapun rincian kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	✓
2.	Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	✓
3.	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	✓
4.	Hadiyanto	Komisaris	✓
5.	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	✓
6.	Hendrikus Ivo**	Komisaris Independen	✓
7.	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	✓
8.	Zulnahr Usman	Komisaris Independen	✓
9.	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	✓
10.	Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	✓
11.	Sunarso	Direktur Utama	✓
12.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	✓
13.	Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	✓
14.	Handayani	Direktur Bisnis dan Konsumer	✓
15.	Supari	Direktur Bisnis Mikro	✓
16.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	✓
17.	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	✓
18.	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	✓
19.	Agus Winardono	Direktur Human Capital	✓
20.	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	✓
21.	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Direktur Keuangan	✓
22.	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Jaringan dan Layanan	✓

Keterangan:

* Hadir secara elektronik

** Ybs sebagai Ketua Komite Audit

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.



Kesempatan Mengajukan Pernyataan/Pendapat dan Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	132.794.043.027 suara atau 99,479% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	130.158.836 suara atau 0,097% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	564.450.626 atau 0,422% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedua	133.277.575.393 suara atau 99,841% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	115.933.692 suara atau 0,086% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	95.143.404 suara atau 0,071% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	133.191.655.592 suara atau 99,777% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	241.941.192 suara atau 0,181% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	55.055.705 suara atau 0,041% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	122.280.557.105 suara atau 91,603% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	10.712.138.057 suara atau 8,024% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	495.957.327 suara atau 0,371% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kelima	128.210.159.912 suara atau 96,045% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	5.204.304.695 suara atau 3,898% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	74.187.882 suara atau 0,055% dari seluruh saham yang mempunyai hak suara	- (tidak ada)
Keenam	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.			- (tidak ada)
Ketujuh	109.932.525.101 suara atau 82,353% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.139.411.854 suara atau 15,836% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	2.416.715.534 suara atau 1,810% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kedelapan	91.160.921.871 suara atau 68,291% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	39.103.585.210 suara atau 29,293% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.224.145.408 suara atau 2,415% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

Keterangan:

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2022

Keputusan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kesatu</p> <p>Keputusan</p> <p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00049/2.1032/AU.1/07/1681- 2/1/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.</p> <p>2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00092/2.1032/AU.2/10/1681-2/1/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.</p> <p>3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berikut pelaksanaan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.</p>	<p>1. Laporan tahunan termasuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah dipublikasikan pada tanggal 4 Februari 2022;</p> <p>2. RUPS telah menyetujui laporan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p> <p>3. RUPS telah menyetujui laporan PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p> <p>4. RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</p>	-	Telah Terealisasi Seluruhnya
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kedua</p> <p>Keputusan</p> <p>Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp 31.066.592.139.593,55 sebagai berikut:</p> <p>1. Bagian 85% atau sebesar Rp 26.406.603.318.654,52 ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 14.045.104.988.588,05 disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.</p> <p>b. Dividen untuk Tahun Buku 2021 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>)</p> <p>c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:</p> <p>i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Bagian 15% atau sebesar Rp 4.659.988.820.939,03 digunakan sebagai saldo laba ditahan.</p>	<p>1. Seluruh dividen (termasuk dividen interim) telah dibayarkan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Negara Republik Indonesia sebesar Rp14.045.104.988.588,05, disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.</p> <p>b. Pemegang saham publik sebesar Rp12.361.498.330.066,47 yang dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) pada tanggal 12 April 2023.</p> <p>2. Sisa laba bersih 2021 yang tidak dibayarkan sebagai dividen telah dicatat sebagai saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2022.</p>	-	Telah Terealisasi Seluruhnya



Keputusan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
<p style="text-align: center;">Mata Acara Ketiga</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahannya; Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya. 	<p>RUPS telah mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-12/MBU/09/2021</p>	-	Telah Terealisasi Seluruhnya
<p style="text-align: center;">Mata Acara Keempat</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi: <ol style="list-style-type: none"> Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2022 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021 bagi Dewan Komisaris telah ditetapkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan Surat No.SR-21/Wk2.MBU.A/07/2022. Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2022 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021 bagi Direksi telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.R.68-KOM/07/2022 berdasarkan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan No.SR-21/Wk2.MBU.A/07/2022. 	-	Telah Terealisasi Seluruhnya
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kelima</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member Firm of Ernst & Young Global Limited</i>) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022; Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member Firm of Ernst & Young Global Limited</i>), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. 	<p>Dewan Komisaris telah menunjuk, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member Firm of Ernst & Young Global Limited</i>) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.</p>	-	Telah Terealisasi Seluruhnya
<p style="text-align: center;">Mata Acara Keenam</p> <p>Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.</p>	<p>RUPS telah menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021.</p>	-	Telah Terealisasi Seluruhnya

Keputusan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
<p style="text-align: center;">Mata Acara Ketujuh</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (<i>buyback</i>) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh <i>buyback</i> sebesar-sebesaranya Rp3.000.000.000.000,- . Menyetujui pengalihan saham hasil <i>buyback</i> yang disimpan sebagai saham treasury (<i>treasury stock</i>) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan <i>buyback</i> kepada Direksi Perseroan. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil <i>buyback</i> yang disimpan sebagai saham treasury (<i>treasury stock</i>) kepada: <ol style="list-style-type: none"> Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja; Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 	<ol style="list-style-type: none"> RUPS telah menyetujui pembelian saham kembali Perseroan yang dilakukan secara bertahap oleh direksi; Perseroan telah membeli kembali saham Perseroan dengan jumlah nominal seluruh <i>buyback</i> sebesar Rp3.000.000.000.000 	<p>Perseroan telah mengalihkan beberapa saham hasil pembelian saham kembali Perseroan</p>	<p>Perseroan masih dalam tahap mengalihkan saham hasil pembelian saham kembali Perseroan yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 25 Januari 2026 (tidak termasuk perpanjangan)</p>
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kedelapan</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto sebagai Komisaris Sdr. R. Widyo Pramono sebagai Komisaris Independen Sdr. Zulnihar Usman sebagai Komisaris Independen Sdr. Indra Utoyo sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer <p>Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> Mengalihkan penugasan Sdr. Arga Mahanana Nugraha yang diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa Tahun 2021, semula sebagai Direktur Jaringan dan Layanan Perseroan menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi Perseroan. Dengan demikian, masa jabatan Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Sdr. Paripurna Poerwoko Sugarda sebagai Komisaris Independen Sdr. Agus Riswanto sebagai Komisaris Independen Sdri. Nurmaria Sarosa sebagai Komisaris Independen Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer Sdr. Andrijanto sebagai Direktur Jaringan dan Layanan Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada angka 3 tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 	<p>Direksi dan Komisaris yang diangkat pada RUPS Tahun 2022 telah melakukan dan mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 15/KDK.03/2022, Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 27/KDK.03/2022, Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 28/KDK.03/2022, dan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 29/KDK.03/2022.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah Terealisasi Seluruhnya</p>



Keputusan			Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
Dewan Komisaris					
No	Nama	Jabatan			
1	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama			
2	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim			
3	Komisaris	Hadiyanto			
4	Komisaris	Rabin Indrajad Hattari			
5	Komisaris Independen	Hendrikus Ivo			
6	Komisaris Independen	Dwi Ria Latifa			
7	Komisaris Independen	Heri Sunaryadi			
8	Komisaris Independen	Paripurna Poerwoko Sugarda*			
9	Komisaris Independen	Agus Riswanto*			
10	Komisaris Independen	Nurmaria Sarosa*			
Direksi					
No	Jabatan	Nama			
1	Direktur Utama	Sunarso			
2	Wakil Direktur Utama	Catur Budi Harto			
3	Direktur Bisnis Konsumer	Handayani			
4	Direktur Bisnis Mikro	Supari			
5	Direktur Kepatuhan	Ahmad Solichin Lutfiyanto			
6	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	Agus Noorsanto			
7	Direktur Manajemen Risiko	Agus Sudiarto			
8	Direktur Human Capital	Agus Winardono			
9	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Amam Sukriyanto			
10	Direktur Keuangan	Viviana Dyah Ayu R.K.			
11	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	Arga Mahanana Nugraha			
12	Direktur Jaringan dan Layanan	Andrijanto*			
Keterangan:					
*) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.					

Keputusan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
<p>6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ('Fit & Proper Test') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam <i>Fit & Proper Test</i> oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil <i>Fit & Proper Test</i> OJK dimaksud.</p> <p>7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p> <p>8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan <i>Fit & Proper Test</i> terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh putusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.</p>			

Dengan demikian, tidak terdapat keputusan RUPS tahunan 2022 yang belum direalisasikan pada tahun 2023.

Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Direksi secara kolegial bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Tanggung Jawab kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

1. Melaksanakan keputusan RUPS.
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
4. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang

dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain.

5. Mengkonsultasikan pemberian kredit di atas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Tanggung Jawab Akuntansi dan Laporan Tahunan

1. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktek yang umum berlaku bagi perusahaan.
2. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
3. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan berkala.

Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko

1. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.



2. Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan.
3. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk menjamin keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku, penjagaan atas harta kekayaan Bank, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.

Tanggung Jawab Terkait Organisasi

Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Hak dan Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki kewenangan di bawah ini sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan:

1. Menetapkan Kebijakan yang sesuai dengan pengelolaan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang dan/atau badan lain.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiunan, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan.
6. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya diluar pokok yang dilakukan dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan mereka berakhir pada

penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan mereka, yang tidak boleh lebih dari lima tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Namun RUPS berhak memberhentikan mereka sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya oleh RUPS.

Kriteria Direksi

Kriteria Direksi BRI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Menteri BUMN No.PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta ketentuan yang berlaku lainnya.

Kualifikasi Umum

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
 - d. Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016

Mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Persyaratan Integritas

Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi wajib memiliki:

1. Akhlak dan moral yang baik.
2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi BRI telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board charter*) Nokep B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 24 April 2020. *Board charter* Direksi berisi tentang aturan dan panduan tentang tata kerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Perseroan.

Board charter Direksi berisi antara lain:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Wewenang dan kewajiban Direksi
4. Nilai-nilai perusahaan
5. Etika kerja Direksi
6. Waktu kerja Direksi
7. Rapat Direksi
8. Struktur Keanggotaan Direksi
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

Pembidangan Tugas Direksi

Sesuai dengan Surat Keputusan NOKEP: 1633-DIR/PPM/08/2023 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Direksi dan *Senior Executive Vice President* (SEVP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2023, pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang tugas
Sunarso	Direktur Utama	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan. b. Memimpin seluruh Direktorat dan Sub Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan. c. Pencapaian target Perusahaan. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan. b. Memimpin seluruh Direktorat dan Sub Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan. c. Pencapaian target Perusahaan. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Perusahaan & Direktorat Keuangan serta Sub Direktorat Change Management & Transformation Office. c. Pencapaian target Direktorat Keuangan dan Sub Direktorat Change Management & Transformation Office. d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). f. Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.



Nama	Jabatan	Bidang tugas
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan	<p>Menjalankan tugas dan wewenang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Sub Direktorat Bisnis Treasury & Global Services. Pencapaian target bisnis <i>wholesale</i> dan kelembagaan serta bisnis treasury dan global services. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat serta kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait. <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.</p>
Supari	Direktur Bisnis Mikro	<p>Menjalankan tugas dan wewenang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Mikro dan Sub Direktorat Bisnis Ultra Mikro. Pencapaian target bisnis mikro dan bisnis ultra mikro (termasuk bisnis BRILink, inkubasi bisnis serta pelaksanaan dan penyaluran Program Pemerintah). Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait. <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.</p>
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	<p>Menjalankan tugas dan wewenang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Kecil & Menengah dan Sub Direktorat Bisnis Komersial. Pencapaian target bisnis kecil (termasuk KUR Kecil), bisnis menengah, <i>value chain</i> dan bisnis komersial. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait. <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.</p>
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	<p>Menjalankan tugas dan wewenang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Digital & Teknologi Informasi dan Sub Direktorat Operations. Pencapaian target Direktorat Digital & Teknologi Informasi dan Sub Direktorat Operations. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait. <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.</p>

Nama	Jabatan	Bidang tugas
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	<p>Menjalankan tugas dan wewenang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Kepatuhan. Pencapaian target Direktorat Kepatuhan. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait. <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.</p>
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	<p>Menjalankan tugas dan wewenang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Konsumer. Pencapaian target bisnis konsumer. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait. <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.</p>
Agus Winardono	Direktur Human Capital	<p>Menjalankan tugas dan wewenang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. Penyusunan dan implementasi strategi dan pengembangan Direktorat Human Capital dan Sub Direktorat Strategi Human Capital. Pencapaian target Direktorat Human Capital dan Sub Direktorat Strategi Human Capital. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait. <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.</p>
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	<p>Menjalankan tugas dan wewenang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Jaringan & Layanan. Pencapaian target bisnis dana, bisnis <i>retail payment</i>, target jaringan dan layanan. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait. <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.</p>
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	<p>Menjalankan tugas dan wewenang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Kecil & Menengah dan Sub Direktorat Bisnis Komersial. Pencapaian target bisnis kecil (termasuk KUR Kecil), bisnis menengah, <i>value chain</i> dan bisnis komersial. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait. <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.</p>



Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
4. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Sunarso	Direktur Utama	-	-
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	-	-
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	-	-
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis <i>Wholesale & Kelembagaan</i>	-	-
Supari	Direktur Bisnis Mikro	-	-
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	-	-
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	-	-
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	-	-
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	-	-
Agus Winardono	Direktur Human <i>Capital</i>	-	-
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	-	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan, serta reputasi Perseroan maupun perusahaan anaknya. Selain itu, anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan Perseroan selain remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) dan tantiem yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Anggota Direksi Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Direksi.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Direksi yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kerja Direksi yaitu:

Waktu dan Tempat

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selain rapat Direksi, bersama Dewan Komisaris, Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris.
2. Rapat pada prinsipnya dilaksanakan pada hari tertentu di bulan berjalan. Rapat dapat dijadwalkan pada hari lainnya apabila:

- a. Dipandang perlu oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi.
 - b. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
 - c. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan pertimbangan tertentu, rapat dapat diselenggarakan dengan cara konferensi (melalui media elektronik, antara lain media telekonferensi, video *conference* atau sarana media elektronik lainnya).
3. Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan agenda yang disesuaikan dengan Kalender Manajemen. Penjadwalan rapat tersebut ditetapkan dalam Rapat Direksi.
 4. Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat.
 5. Dalam hal terdapat usulan dengan lebih dari 2 (dua) alternatif keputusan dan hasil pemungutan suara belum memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk 1 (satu) alternatif keputusan, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk 2 (dua) alternatif keputusan dengan jumlah suara terbanyak, sehingga diperoleh suara setuju lebih dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
 6. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa adanya keberatan berdasarkan suara terbanyak dari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir.
 8. Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak, baik yang telah ada maupun akan ada, dengan Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat. Oleh karenanya, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berhak mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Agenda dan Materi Rapat

Usulan agenda dan materi rapat Direksi disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan. Selain rapat yang telah terjadwal tersebut, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Pemanggilan Rapat

1. Pemanggilan rapat disampaikan langsung kepada setiap peserta rapat secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau pesan digital dan/atau sarana lainnya dengan tanda terima yang memadai.
2. Pemanggilan rapat tersebut mencantumkan agenda, pameri, tanggal, waktu dan tempat rapat.
3. Disampaikan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Direksi diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau jangka waktu yang lebih singkat jika keadaan mendesak.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

1. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. Apabila hasil pemungutan suara tidak mencapai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), maka Rapat Direksi tidak mengambil putusan atas agenda tersebut.

Risalah Rapat

1. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang merupakan bukti sah untuk anggota Direksi mengenai keputusan yang diambil.
2. Risalah rapat sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan.
 - b. Agenda yang dibahas.
 - c. Daftar hadir yang ditandatangani peserta rapat.
 - d. Lamanya rapat berlangsung.
 - e. Keputusan yang diambil.
 - f. Hal-hal yang dibicarakan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan dan/atau keberatan (*dissenting opinion*) beserta alasannya, jika ada.
3. Risalah rapat didokumentasikan oleh Perseroan.



Rencana Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Adapun jadwal Rapat Direksi diagendakan dilaksanakan setiap hari Senin. Rapat Direksi dapat dijadwalkan pada hari lainnya apabila dipandang perlu.

Agenda Rapat Direksi yang rutin ditetapkan Direksi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Agenda Rapat Tahun 2024	Waktu
1	Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Tahun Buku 2023	Minggu ke-II Januari 2024
2	Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Minggu ke-I April 2024
3	Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Minggu ke-I Juli 2024
4	Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Minggu ke-II Oktober 2024
5	Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Minggu ke-II Januari 2025
6	Evaluasi dan Rencana Revisi Bisnis Bank 2024-2026	Minggu ke-II Juni 2024
7	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025	Minggu ke-IV Oktober 2024
8	Aktivitas Operasional dan Putusan Perusahaan yang Membutuhkan Persetujuan Melalui Dewan Komisaris	Minimal dilaksanakan 1 bulan sekali di tahun 2024

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir. HC	Dir. Keu	Dir. HBL	Dir. Ritmen	Dir. TIO	Dir. MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
1	2 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kesiapan Perlindungan Data Pribadi Agenda Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
2	9 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Policy and Procedure Governance Update Angka 31 Desember 2022 dan Laporan Progress Audit 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
3	11 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Rencana Corporate Act 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
4	16 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Rencana Program Kompensasi Berbasis Saham Framework Komunikasi Pekerja BRI 	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11	12	91,67%	

No .	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
5	25 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Rencana <i>Buyback</i> Metode <i>Performance Evaluation</i> Perubahan Ketentuan Insentif Giro Wajib Minimum dan Devisa Hasil Ekspor Indeks Bisnis UMKM Q-4 2022 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	12	91,67%
6	30 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Update project BRIFIRST</i> Rencana RUPS Tahunan Perusahaan Anak 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
7	6 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Analyst Meeting & Press Conference</i> Kinerja Keuangan TW IV <i>Motivation Bonus</i> <i>Appointed Bank Term Deposit</i> Valas Dana Hasil Ekspor 	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%	
8	13 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Update RUPST</i> Tahun 2023 dan Dividen <i>Payout</i> Tahun Buku 2022 Rencana Pendidikan Luar Negeri BRI Laporan SIPK 2022 dan Usulan Ketentuan SIPK 2023 	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%	
9	20 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Alokasi OHC 2023 Rencana Penerbitan <i>Sub Debt</i> BRI 2023 Distribusi <i>Pool Bonus</i> RCEO dan RCA 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%	
10	27 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Portofolio Inisiatif Strategis Rencana Penguatan <i>Retail Banking</i> Matrix Penilaian Kinerja Unit Kerja 2023 	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%	
11	6 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Update Ceremonial SIPK</i> 8 Maret 2023 BRI <i>Excellence Award</i> 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%	



No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum	
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir. HC	Dir. Keu	Dir. HBL	Dir. Ritmen	Dir. TIO	Dir. MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons
12	20 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Central Counterparty Transaksi Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) Strategi Pertumbuhan Dana Ritel Inquiry Dukcapil dan Migrasi NPWP ke NIK Rencana Pendidikan Luar Negeri BRI 	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10	12	83,33%
13	27 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Overview Business Wholesale Progress Transformasi Segmen SME, Value Chain dan Enabler Pertumbuhan Aset 	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	10	12	83,33%
14	3 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Dana Mikro Program Mudik Bersama BRI Progress Strategic Workforce Planning 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
		<ul style="list-style-type: none"> a. Review Individual Performance Evaluation Process; b. Employee Engagement Survey Report 2022 Pembahasan Premi/IJP/CNP & Subrogasi Asuransi Kredit 															
15	10 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Overview bisnis konsumen BRI Progress Transformation Network Update rencana implementasi TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) Evaluasi Corporate Plan 2022 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No .	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
16	17 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Analyst Meeting & Press Conference Kinerja Keuangan TW I Penyampaian Hasil Survey Indeks Bisnis UMKM Q1 2023 Rencana Revamping Museum BRI 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
17	2 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan Hasil Implementasi ICOFR Fase 1 New Solution for 10T Pelaksanaan BRI Excellence Award 2022 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
18	8 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Kontrak Management BRI 2023 Laporan Analisis Distribusi Bonus Pool Tahun 2022 Kenaikan Berbasis Kompetensi Tahun 2023 	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11	12	91,67%	
19	15 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Peran BRI dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Moneter Melalui Pendalaman Pasar Keuangan 	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%	
		<ul style="list-style-type: none"> Journey Sinergi Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur BRI Group Update Pinjaman Korporasi 																
20	22 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Brilianpreneur Tahun 2023 Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2023 	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%	
21	29 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Nama Danareksa Investment Management Evaluasi Pinca Development Program 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	



No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir. HC	Dir. Keu	Dir. HBL	Dir. Ritmen	Dir. TIO	Dir. MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
22	5 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Progress Internal Audit Flash Report Journey Operation Risk Evaluasi Corporate Title 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
23	12 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Harnessing Disruption Our IT Vision for The Future Human Capital Strategic Issues & Responses Prognosa Tabungan (Mikro dan Ritel) sampai dengan Juni 2023 dan Desember 2023; 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
24	19 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issues Direktorat Bisnis Mikro Update Corporate Secretary Division <ol style="list-style-type: none"> Sponsorship BRI Liga 1 2023 - 2024 Desain Logo HUT BRI 128th Update Revisi RKAP 2023 dan RBB 2023-2025 Corporate Action Perusahaan Anak BRI Proyeksi NPL dan CKPN 2023 	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
25	26 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issues & Respons Direktorat Compliance BRILiaN Group Leadership Forum 2023 Logo HUT BRI 128th Update Rencana Corporate Action 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
26	3 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Switch Over Server BRI BRIBRAIN: Harnessing AI for Innovation and Growth Update Implementasi Branch Office Metro 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No .	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum			
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons		
27	10 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Prognosa Giro Akhir Tahun 2023 Rencana Kalender Events BRI 2024 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
28	17 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Rencana Corporate Action Perusahaan Anak Update Project E-Channel Platform 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
29	24 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issues & Respons Treasury and Global Services Strategi Tabungan Update Project BRIFIRST 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
30	31 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Final Check Implementasi KC Metro Update Likuiditas dan Usulan PUB Tahap 2 Update DPLK 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	10	12	83,33%	
31	7 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Progress Limited Review Laporan Keuangan Juni 2023 Perubahan Perhitungan ATMR risiko Pasar Penetapan Direktur Pembina RO dan Perusahaan Anak 	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	9	12	75,00%	
32	14 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issue and Respons Direktorat Jaringan dan Layanan Penyampaian Hasil Survey Indeks Bisnis UMKM Q2 2023 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%	



No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir. HC	Dir. Keu	Dir. HBL	Dir. Ritmen	Dir. TIO	Dir. MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
33	21 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issue and Respons Direktorat Institutional & Wholesale Business Penguatan Strategic Planning dalam rangka Prioritas Program Kerja Analyst Meeting dan Publikasi Kinerja Keuangan BRI Triwulan II tahun 2023 Update Rencana Corporate Action Perusahaan Anak 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
34	28 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issues & Respons Small & Medium Subrogasi Asuransi Kredit Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan II 2023 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
35	4 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issues Change Management & Transformation Office Update Rencana Corporate Action Postur RKAP 2024 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
36	11 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Project Integrasi ATM 	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
37	18 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issue and Respons Internal Audit Strategic Issue and Respons Direktorat Konsumer Update Implementasi KC Metro Pembahasan HUT BRI ke 128 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
38	25 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issue and Respons Direktorat Consumer Update Penyempurnaan BRISURF 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	91,67%	

No .	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
39	2 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Issue and Respons Direktorat Operation Update Rencana Corporate Action Perusahaan Anak Pemaparan Materi Corporate Governance Perception Index 2023 LTI 2023 - 2025 Update Kegiatan HUT BRI Update Skenario KUR 2023 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
40	9 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi SME Center Untuk Refocusing Kanca Area Metro Melalui Implementasi Small Business Head (SBH) Human Capital Current Issue Tindak Lanjut Corporate Governance Perception Index 2023 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11	12	91,67%	
41	16 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Kegiatan HUT BRI 128 Analyst Meeting dan Publikasi Kinerja Keuangan BRI Triwulan III tahun 2023 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
42	23 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Rencana Corporate Action Perusahaan Anak Rencana Dividen Interim 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%	
43	30 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Materi Perundingan PKB Internal Communication Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (Apuvindo) Nugraha Karya Desa BRILian 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	12	91,67%	



No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir. HC	Dir. Keu	Dir. HBL	Dir. Ritmen	Dir. TIO	Dir. MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
44	6 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Qlola Platform Update Produk dengan Brand BRI Persiapan Perundingan PKB 2023-2025 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
45	13 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Collection Model ARCI (Automated Real time Collection) Update Kebijakan dan Kinerja PUMK Penyaluran Tahun 2023 Update Rencana Pengembangan Business Model Perusahaan Anak 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
46	20 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> RKAP RBB, RAKB 2024-2026 Update Rakernas BRI Update Rencana Corporate Action Perusahaan Anak 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
47	27 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi KC Metro Strategic Initiatives Progress Update October 2023 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BRI 2024 Tema dan Design Annual Report BRI 2023 Rencana Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Menteri BUMN terkait fasilitas Direksi 	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	9	12	75,00%	
48	4 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Penanganan Subrogasi Review Hasil Audit Eksternal 2023 Rencana Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Menteri BUMN terkait fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
49	11 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Dividen Interim tahun buku 2023 Update Vintage Analysis Credit per-Segmen Rencana Motivation Bonus Corporate Band 1 Update HUT BRI ke 128 Rencana Corporate Action Perusahaan Anak 	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	12	83,33%
50	18 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Business Process Architecture Inisiasi Pengembangan Bisnis BRI di luar negeri 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
51	27 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Rapat Kerja Wilayah BRI 2024 Proyeksi Kinerja BRI 2023 	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	9	12	75,00%

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Bab Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sunarso	Direktur Utama	51	47	92%	10	10	100%	1	1	100%
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	51	49	96%	10	9	90%	1	1	100%
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	51	48	94%	13	13	100%	1	1	100%
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan	51	49	96%	10	10	100%	1	1	100%
Supari	Direktur Bisnis Mikro	51	50	98%	11	11	100%	1	1	100%
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	51	47	92%	10	9	90%	1	1	100%



Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	51	48	94%	10	10	100%	1	1	100%
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	51	48	94%	10	10	100%	1	1	100%
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	51	48	94%	10	9	90%	1	1	100%
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	51	47	92%	10	10	100%	1	1	100%
Agus Winardono	Direktur Human Capital	51	50	98%	13	13	100%	1	1	100%
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	51	50	98%	12	12	100%	1	1	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi telah diatur pada Surat Keputusan Direksi NOKEP S.43-DIR/SKP/01/2018 tentang Kebijakan Program Orientasi dan Pendidikan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan program pendidikan Direksi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Direksi yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.

3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Direksi merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan Perseroan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* Perseroan.

Program pendidikan dilaksanakan oleh anggota Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Sunarso	Direktur Utama	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	<i>Gartner Data & Analytics Summit</i>	31 Juli – 1 Agustus 2023, Sydney, Australia	Sydney, Australia
		<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	<i>Advance Executive Presence</i>	23 – 25 Agustus 2023, Berkeley, California	Berkeley Haas
		<i>Communicating Data Through Storytelling</i>	25 Oktober - 12 Desember 2023, Online	MIT
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	07 Desember 2023	BARa
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan	<i>Leadership in a Technology Driven World</i>	19 – 23 Juni 2023, London, UK	Imperial College Business School
		<i>Achieving Your Leadership Vision</i>	13 - 16 November 2023, New York, US	NYU Stern School of Business
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	07 Desember 2023	BARa
Supari	Direktur Bisnis Mikro	<i>Gartner Data & Analytics Summit</i>	31 Juli – 1 Agustus 2023, Sydney, Australia	Sydney, Australia
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	07 Desember 2023	BARa
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	<i>Leading Strategic Growth and Change</i>	5 – 9 Juni 2023, New York, US	Columbia Business School
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	07 Desember 2023	BARa
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	<i>Exploiting Disruption in a Digital World</i>	07 – 12 Mei 2023, London, UK	London Business School
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	07 Desember 2023	BARa
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	<i>High Performance Leadership Course</i>	13-17 November 2023, Chicago, USA	Chicago Booth
Agus Sudiarso	Direktur Manajemen Risiko	<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	07 Desember 2023	BARa
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	<i>Digital Marketing Strategy: Customers, Planning, and ROI</i>	13 – 15 Juni 2023, New York, US	Columbia Business School
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	07 Desember 2023	BARa
Agus Winardono	Direktur Human Capital	C2 Montreal 2023	24 – 26 Mei 2023, Montreal, Canada	C2 Montreal
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	07 Desember 2023	BARa
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	<i>B2B Marketing Leaders Forum APAC 2023</i>	24 – 25 Mei 2023, Sydney, Australia	B2B Marketing Leaders
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	21 Desember 2023	LPPI



Program Orientasi bagi Direksi Baru

Bentuk program orientasi bagi Direksi baru dapat berupa:

1. Meminta presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan unit kerja/divisi terkait.
2. Mengadakan pertemuan dengan anggota Dewan Komisaris/Direksi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan terkini yang ada di Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan.
3. Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi usaha Bank BRI.
4. Meminta data/dokumen terkait visi dan misi Perseroan, kebijakan Bank BRI, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan Bank BRI.
5. Melakukan diskusi dengan Unit Kerja terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu serta memberikan *feedback* kepada Unit Kerja terkait.

Selama tahun 2023 tidak terdapat Direksi baru sehingga tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Sertifikasi/Refreshment		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Tahun Terbit
Sunarso	Direktur Utama	LSPP	Level 5	2023
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	LSPP	Level 5	2023
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	LSPP	Level 5	2023
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis <i>Wholesale & Kelembagaan</i>	LSPP	Level 5	2023
Supari	Direktur Bisnis Mikro	LSPP	Level 5	2023
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	LSPP	Level 5	2023
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	LSPP	Level 5	2023
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	BSMR	Level 5	2020
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	LSPP	Level 5	2023
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	LSPP	Level 5	2023
Agus Winardono	Direktur <i>Human Capital</i>	LSPP	Level 5	2023
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	LSPP	Level 5	2023

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, diantaranya namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan RUPS yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan.
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya
3. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
4. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
5. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
6. Melaksanakan rapat internal Direksi maupun bersama Divisi terkait.
7. Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Selain itu, keputusan-keputusan Direksi diputuskan melalui forum Komite yang dibentuk oleh Direksi serta Forum Rapat Direksi yang secara detail dilaporkan pada Sub-Bab Rapat Direksi tahun 2023 pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank, Direksi BRI dibantu oleh sepuluh komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Hingga 31 Desember 2023, BRI memiliki 10 (sepuluh) komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

No	Komite	Nomor Surat Keputusan (NOKEP)
1.	<i>Komite Capital & Investment</i>	B.871-DIR/PPM/06/2022
2.	<i>IT Steering Committee</i> Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data	B.870-DIR/PPM/06/2022
3.	<i>Komite Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee</i>	B.872-DIR/PPM/06/2022
4.	<i>Asset & Liability Committee (ALCO)</i>	B.1564-DIR/PPM/07/2023
5.	Komite Barang dan Jasa (PBJ)	B.656-DIR/PPM/10/2021
6.	Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)	B.655-DIR/PPM/10/2021
7.	<i>Komite Human Capital (HC)</i>	B.603-DIR/PPM/03/2023
8.	Komite Produk	B.213-DIR/CDS/06/2021
9.	Komite Kredit	B.469-DIR/KRD/03/2022 B.469a-DIR/KRD/03/2022
10.	<i>Project Management Office Steering Committee</i>	B.869-DIR/PPM/06/2022

Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi tugasnya, Direksi BRI dapat membentuk komite-komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Pada tahun 2023, Direksi menilai bahwa seluruh Komite telah melaksanakan tugasnya dengan optimal. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara hasil kinerja komite dengan kriteria penilaian. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi masing-masing komite kepada Perseroan termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi. Secara lengkap kinerja komite penunjang Direksi dibahas pada Sub-Bab Komite Direksi.

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan kepada manajemen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2023 Corporate Secretary BRI telah memiliki dan melaksanakan target pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI) antara lain Penyaluran TJSL dan CSR, Profil Risiko Reputasi, *Corporate Image index*, *Share of Voices Media*, *Engagement Rate Social Media*, Pemenuhan & Kepatuhan sebagai Perusahaan Terbuka sesuai ketentuan Regulator, Pasar Modal, dan Anggaran

Dasar, Efektivitas Pengelolaan Pemberitaan Negatif di media massa dan media sosial, *Customer Satisfaction* Indeks Direksi & Dewan Komisaris, *Global Reputable Awards*, Implementasi Improvement Produk/Proses, Pengukuran *Sustainability Return on Investment* (SROI) atas Program TJSL BRI. Pada tahun 2023, secara umum Corporate Secretary telah mencapai dan melampaui target KPI yang telah ditetapkan.

Penilaian Kinerja Unit Internal Audit

Penilaian kinerja terhadap unit kerja Audit Intern baik di *level head office* maupun regional dilakukan berbasis penilaian *Key Performance Indicator* (KPI). Penilaian KPI unit kerja Audit Intern dilakukan menggunakan metode berdasarkan perspektif *balance scorecard* yang mencakup aspek finansial, *customer* dan internal produk dan *process*. KPI aspek finansial diukur berdasarkan pencapaian atas rasio-rasio keuangan perusahaan, serta pengendalian kerugian/denda akibat kelemahan internal *control* ataupun gangguan sistem. KPI pada aspek *customer* diukur melalui kapasitas dan kepuasan *stakeholder* (Manajemen BOD, BOC dan Auditor Eksternal) terhadap kinerja audit intern. Sedangkan KPI terhadap internal produk dan *process* diukur melalui beberapa pencapaian target antara lain pemenuhan pencapaian perencanaan audit, efektivitas penyelesaian rekomendasi auditor eksternal/pengawas, penilaian *quality assurance*, dan Tata kelola audit intern terintegrasi, serta *project* strategis.



Penilaian Kinerja Unit Manajemen Risiko

Direksi melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit Kerja di bawah Direksi termasuk unit kerja Manajemen Risiko. Penilaian dilakukan berdasarkan penetapan target Perusahaan (*Bankwide*) yang kemudian diturunkan kepada unit kerja Manajemen Risiko dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI). Penilaian KPI unit kerja Manajemen Risiko antara lain diukur dengan menggunakan Aspek Kuantitatif dan Kualitatif. KPI untuk Aspek Kuantitatif meliputi pencapaian atas rasio-rasio keuangan Perseroan dan atas 8 (delapan) risiko yang dikelola oleh bank. Sedangkan KPI aspek kualitatif diukur melalui beberapa pencapaian antara lain Tingkat Kesehatan Bank, Predikat Profil Risiko individu terintegrasi dengan Konglomerasi Keuangan serta penilaian atas pelaksanaan Forum MR, Komite Manajemen Risiko serta tingkat penerapan manajemen risiko Perseroan (*Risk Management Maturity Index*).

Pada tahun 2023, secara umum Unit Kerja Manajemen Risiko telah mencapai target KPI yang telah ditetapkan oleh Direksi dan juga aspirasi pemegang saham.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Pemberhentian Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia
2. Masa jabatannya berakhir
3. Diberhentikan dalam RUPS, disebabkan alasan yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar BRI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk rangkap jabatan yang dilarang, maupun pengunduran diri. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib untuk:

1. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan nasihat, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
3. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
5. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
6. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
8. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
9. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan.
10. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
11. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
12. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank; dan

- b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir d merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.

14. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
15. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
16. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - c. Komite Pemantau Manajemen Risiko; dan
 - d. Komite Tata Kelola Terintegrasi.
17. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris menjalankan tugas secara efektif.
18. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala.
19. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;
 - c. Pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
 - d. Pengaturan rapat Dewan Komisaris;
 - e. Larangan terhadap Dewan Komisaris;
 - f. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan
 - g. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
20. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
21. Menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan

oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Memimpin pelaksanaan rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
9. Memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila Anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang



merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Perseroan mengatur keputusan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yaitu:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan dan aset dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan kriteria dan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama dengan kriteria dan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang berdasarkan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan berdasarkan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis berdasarkan kriteria sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris.

6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan. Berdasarkan kriteria dan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
8. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
9. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
10. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
11. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih lagi atas:
 - a. Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
 - b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak.

Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan mereka berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan mereka, yang tidak boleh lebih dari lima tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Namun RUPS berhak memberhentikan mereka sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya oleh RUPS.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria anggota Dewan Komisaris BRI disusun berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 27/03. POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta ketentuan internal Dewan Komisaris BRI Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Keputusan 07-KOM/BRI/07/2015 tentang Kebijakan Nominasi Anggota Komisaris dan Direksi.

Kualifikasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 2. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah: <ol style="list-style-type: none"> a. Dinyatakan pailit. b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit. c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. 3. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 4. Tidak memangku rangkap jabatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank; b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya. b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank. 6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. <p>Kualifikasi umum tersebut di atas antara lain dapat dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Bakal Calon yang bersangkutan.</p>
Persyaratan Integritas	<p>Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akhlak dan moral yang baik. 2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
Pemenuhan POJK No.27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	<p>Dewan Komisaris sebagai Pengurus Bank wajib mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatuhan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.</p>
Pemenuhan SE OJK Nomor 39/SEOJK.03/ 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank	<p>Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya. 2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. 3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib Dewan Komisaris yang disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018. Tata Tertib Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dan sebagai dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Dewan Komisaris. Adapun isi Tata Tertib Dewan Komisaris yaitu:



Bab I	Pendahuluan 0.1 Pengertian Umum 0.2 Dasar Hukum
Bab II	Pedoman dan Tata Tertib Kerja 0.1 Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Larangan 0.2 Pembagian Kerja 0.3 Waktu Kerja 0.4 Etika Kerja 0.5 Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) 0.6 Rapat Dewan Komisaris 0.7 Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris 0.8 Organisasi 0.9 Laporan dan Korespondensi
Bab III	Penutup

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Hadiyanto*	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Agus Riswanto	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Awan Nurmawan Nuh**	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

*Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

**Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris BRI mengacu ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tercantum pada pasal 46 yang mengatur larangan Dewan Komisaris untuk merangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank.
 - b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila:
 - a. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank.
 - b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. Menjaga integritas.
 - b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
 - c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan / Instansi Lain	Nama Perusahaan / Instansi Lain
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Wakil Menteri BUMN	Kementerian BUMN
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	Dosen dan Peneliti	Universitas Indonesia
Hadiyanto *	Komisaris	-	-
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Sekretaris Kementerian BUMN	Kementerian BUMN
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	-	-
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Pengacara	Kantor Pengacara Ria Latifa & Partner
		Komisaris Utama	PT Bersua Utama Indonesia
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Tower Bersama Group
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	Dosen	Universitas Gajah Mada
		Komisaris Utama	PT Kaltim Methanol Industri
Agus Riswanto	Komisaris Independen	-	-
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	-	-
Awan Nurmawan Nuh **	Komisaris	Inspektur Jenderal	Kementerian Keuangan

*Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

**Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023



Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Komisaris Independen

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komposisi Komisaris Independen pada posisi tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang dari 10 (sepuluh) orang Komposisi anggota Dewan Komisaris (70%).

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen						
	Rofikoh Rokhim	Dwi Ria Latifa	Hendrikus Ivo	Heri Sunaryadi	Agus Riswanto	Paripurna Poerwoko Sugarda	Nurmaria Sarosa
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pernyataan Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafiqoh Rokhim
Tempat/tanggal lahir : Klaten/12 Februari 1971
No KTP : 3701010010000000000
Alamat domisil (copy KTP) : Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 100
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12120
Nomor HP : 08122222222
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan : 021-51000000

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Sunarya
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 7 Oktober 2021

Rafiqoh Rokhim

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Dai Ria Latifa
Tempat/tanggal lahir	Tanjung Balai Karimun / 2 Desember 1966
No KTP	3701010010000000000
Alamat domisil (copy KTP)	Jakarta
Nomor telepon rumah	021-51000000
Jabatan	Komisaris Independen
Nama perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan	021-51000000

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Sunarya
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 03 Desember 2020

Dai Ria Latifa

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

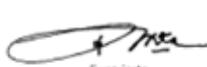
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

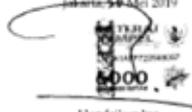
Nama : Hendrikus Ivo
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 11/05/1958
No. KTP/Paspor : 3701010010000000000
Alamat : Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 100, 12120, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan : 021-51000000

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Sunarya
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 04 Mei 2019

Hendrikus Ivo

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Sunaryadi
Tempat/tanggal lahir : Jember/26-05-1965
No KTP : 3701010010000000000
Alamat KTP : Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 100, 12120, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Alamat domisil : Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 100, 12120, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nomor telepon rumah : 021-51000000
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan : 021-51000000

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Sunarya
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 7 Oktober 2021

Heri Sunaryadi



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paripurna Poerwoko Sugarda
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta / 21 September 1957
No KTP : 3170010000000000000
Alamat domisili (copy KTP) : Jalan ...
Nomor telepon rumah :
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan : 021-5750000

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
 2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
 3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.
- Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Jakarta, 01 Maret 2022

Sunatso

Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Paripurna Poerwoko Sugarda

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Rowanto
Tempat/tanggal lahir : Delanggu/16 Februari 1962
No KTP : 3170010000000000000
Alamat domisili (copy KTP) : Jalan ...
Nomor telepon rumah :
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan : 021-5750000

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
 2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
 3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.
- Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Jakarta, 01 Maret 2022

Sunatso

Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Agus Rowanto

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmaria Sarosa
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 27 Mei 1965
No KTP : 3170010000000000000
Alamat domisili (copy KTP) : Jalan ...
Nomor telepon rumah :
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan : 021-5750000

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
 2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
 3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.
- Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Jakarta, 1 Maret 2022

Sunatso

Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Nurmaria Sarosa

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris berlangsung secara berkesinambungan dan dapat diinisiasi dari Dewan Komisaris atau Direksi sehingga diperoleh kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan diantaranya Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasehat, dengan Direksi.

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang satu kali dalam satu bulan.
2. Rapat bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan satu atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Panggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama. Bila Komisaris Utama berhalangan atau tidak ada, maka panggilan rapat dapat dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat oleh Dewan Komisaris dengan Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat lima hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara fisik atau melalui media elektronik.
6. Panggilan rapat seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
7. Pedoman pelaksanaan rapat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
 - b. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
 - c. Agenda dan jadwal rapat merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris.
 - d. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk membantu, mengatur dan mempersiapkan rapat, menyiapkan, dan membagikan agenda rapat dan materi diskusi.
 - e. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
 - f. Materi rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi/Direktur, harus diberikan kepada Dewan Komisaris paling lambat tiga hari kerja sebelum rapat berlangsung, sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk

menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.

8. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Materi rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
2. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
3. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam kuasa sebagaimana dimaksud, anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Suara

1. Hak suara dalam rapat diatur sebagai berikut:
 - a. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
 - b. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara yang terbanyak dari yang hadir.
 - d. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan



dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

2. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

Dokumentasi

Dalam setiap rapat harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para Anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Pedoman pembuatan risalah rapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik yang hadir dan yang memberikan serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Radirkom maupun Rakom) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Rencana Rapat Dewan Komisaris

Rencana Rapat Tahun 2023

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

No	Rencana Rapat	Periode
1	Update Kondisi Makroekonomi dan Proyeksi Tahun 2023	Triwulan I
2	Pembahasan Isu Terkini BRI	
3	a. Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 b. Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan 2023	
4	Pembahasan Usulan KPI Kolegial Direksi Tahun 2023 Triwulan III	Triwulan II
5	Pembahasan Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	
6	Pembahasan Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR), Komite Nominasi Remunerasi (KNR), dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT).	Triwulan III
7	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris	
8	Pemaparan <i>Chief Economist</i> BRI mengenai Update Kondisi Makro Ekonomi dan Proyeksi tahun 2024	Triwulan IV

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

No	Rencana Rapat	Periode
1	a. Evaluasi atas realisasi RBB dan RKAP Triwulan IV tahun 2022 b. Realisasi laporan keuangan <i>Audited</i> tahun buku 2022	Triwulan I
2	a. <i>Update</i> kebijakan <i>human capital</i> BRI b. <i>Update</i> program kerja BRI Corporate University	
3	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan I Tahun 2023 b. Evaluasi atas Realisasi RBB dan RKAP Triwulan I tahun 2023	Triwulan II
4	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB tahun 2023-2025 dan RKAP tahun 2023	
5	Perubahan struktur organisasi	
6	Persetujuan penyesuaian struktur organisasi dan perubahan supervisi KCK	Triwulan III
7	a. Analisa <i>rootcause</i> dan evaluasi <i>control system</i> b. Tindak lanjut (<i>performance management impact, reward & punishment</i> dan <i>culture program</i>)	
8	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan II tahun 2023 b. Evaluasi atas realisasi RBB, RKAP, dan KPI Kolegial (KM) Triwulan II tahun 2023	
9	a. <i>Update</i> transformasi jaringan kerja BRI b. <i>Mapping</i> tipologi <i>regional office</i> berdasarkan potensi bisnis	
10	Pembahasan tindak lanjut tanggapan OJK terkait <i>workload manpower</i> mikro	Triwulan IV
11	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan III tahun 2023 b. Evaluasi atas realisasi RBB, RKAP, dan KPI (Kolegial) Triwulan III tahun 2023.	
12	Riset potensi ekonomi, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit menurut wilayah.	
13	Perubahan item dan target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) individual Direksi BRI tahun 2023	
14	Pembahasan persetujuan atas usulan revisi RBB tahun 2024-2026 dan RKAP tahun 2024.	
15	Persetujuan usulan rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) BRI tahun 2024-2028	
16	<i>Closing Remarks</i> 2023	

Rencana Rapat Tahun 2024

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

No	Rencana Rapat	Periode
1	<i>Update</i> Kondisi Makroekonomi dan Proyeksi Tahun 2024	Triwulan I
2	Pembahasan Isu Terkini BRI	
3	a. Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 2024 b. Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan 2024	
4	Pembahasan Usulan KPI Kolegial Direksi Tahun 2024 Triwulan III	Triwulan II
5	Pembahasan Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	
6	Pembahasan Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR), Komite Nominasi Remunerasi (KNR), dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT).	Triwulan III
7	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris	
8	Pemaparan <i>Chief Economist</i> BRI mengenai <i>Update</i> Kondisi Makro Ekonomi dan Proyeksi tahun 2025	Triwulan IV



Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

No	Rencana Rapat	Periode
1	a. Evaluasi atas realisasi RBB dan RKAP Triwulan IV tahun 2023 b. Realisasi laporan keuangan <i>Audited</i> tahun buku 2023	Triwulan I
2	a. <i>Update</i> kebijakan <i>human capital</i> BRI b. <i>Update</i> program kerja BRI Corporate University	
3	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan I Tahun 2024 b. Evaluasi atas Realisasi RBB dan RKAP Triwulan I tahun 2024	Triwulan II
4	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB tahun 2024-2026 dan RKAP tahun 2024	
5	Perubahan struktur organisasi	Triwulan III
6	Persetujuan penyesuaian struktur organisasi dan perubahan supervisi KCK	
7	a. Analisa <i>rootcause</i> dan evaluasi <i>control system</i> b. Tindak lanjut (<i>performance management impact, reward & punishment</i> dan <i>culture program</i>)	
8	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan II tahun 2024 b. Evaluasi atas realisasi RBB, RKAP, dan KPI Kolegial (KM) Triwulan II tahun 2024	
9	a. <i>Update</i> transformasi jaringan kerja BRI b. <i>Mapping</i> tipologi <i>regional office</i> berdasarkan potensi bisnis	Triwulan IV
10	Pembahasan tindak lanjut tanggapan OJK terkait <i>workload manpower</i> mikro	
11	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan III tahun 2024 b. Evaluasi atas realisasi RBB, RKAP, dan KPI (Kolegial) Triwulan III tahun 2024.	Triwulan IV
12	Riset potensi ekonomi, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit menurut wilayah.	
13	Perubahan item dan target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) individual Direksi BRI tahun 2024	
14	Pembahasan persetujuan atas usulan revisi RBB tahun 2025-2027 dan RKAP tahun 2025.	
15	Persetujuan usulan rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) BRI tahun 2025-2027	
16	<i>Closing Remarks</i> 2024	

Realisasi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda	KW	RR	HD (*)	RIH	HI	DRL	HS	PPS	AR	NS	ANN (**)	Komisaris yang Hadir	Total Dewan Komisaris	Kuorum
1	Selasa, 10 Januari 2023	Update Kondisi Makroekonomi dan Proyeksi Tahun 2023	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	10	90%
2	Senin, 16 Januari 2023	Pembahasan Isu Terkini BRI	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	10	90%
3	Selasa, 28 Februari 2023	a. Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		9	10	90%
		b. Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan 2023														
4	Selasa, 30 Mei 2023	Pembahasan Usulan KPI Kolegial Direksi Tahun 2023	1	1		1	1	1	1	1	1	1		10	10	100%
5	Selasa, 27 Juni 2023	Pembahasan Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	1	1		1	1	1	1	1	1	1		10	10	100%
6	Selasa, 4 Juli 2023	Pembaharuan susunan komite pemantau manajemen risiko (KPMR), Komite Nominasi Remunerasi (KNR), dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)	1	1		1	1	1	1	1	1	1		10	10	100%
7	Selasa, 26 September 2023	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris	1	1		1	1	1	1	1	1	1		10	10	100%
8	Selasa, 5 Desember 2023	Pemaparan <i>Chief Economist</i> BRI mengenai <i>Update Kondisi Makro Ekonomi dan Proyeksi tahun 2024</i>	1	1		1	1	1	1	1	1	1		10	10	100%

Keterangan:

*) Sdr. Hadiyanto aktif sejak periode 1 Januari 2023 - 13 Maret 2023.

**) Sdr. Awan Nurmawan Nuh, aktif sejak periode 13 Maret 2023 - Sekarang.

Catatan:

KW Kartika Wirjoatmodjo

RR Rofikoh Rokhim

HD Hadiyanto

RIH Rabin Indrajad Hattari

HI Hendrikus Ivo

DRL Dwi Ria Latifa

NS Nurmaria Sarosa

HS Heri Sunaryadi

PPS Paripurna Poerwoko Sugarda

AR Agus Riswanto

ANN Awan Nurmawan Nuh



Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Realisasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

No	Hari & Tanggal	Agenda	KW	RR	RIH	HI	HS	DRL	NS	PPS	AR	HD *)	ANN **)	Direksi	SEVP
1	Selasa, 7 Februari 2023	a. Evaluasi atas realisasi RBB dan RKAP Triwulan IV Tahun 2022. b. Realisasi Laporan keuangan <i>Audited</i> Tahun Buku 2022	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1. Sunarso 2. Supari 3. Handayani 4. A Solichin L 5. Agus Noorsanto 6. Agus Winardono 7. Viviana Dyah Ayu R. K 8. Arga Mahanan N 9. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo
2	Selasa, 14 Februari 2023	a. <i>Update</i> Kebijakan <i>Human Capital</i> BRI b. <i>Update</i> Program Kerja BRI Corporate University	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Agus Winardono	
3	Senin, 17 April 2023	a. Realisasi Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2023 b. Evaluasi atas Realisasi RBB, dan RKAP Triwulan I Tahun 2023	1	1	1	1	1	0	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo
4	Selasa, 20 Juni 2023	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB Tahun 2023-2025 dan RKAP Tahun 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Amam Sukriyanto 8. Agus Winardono 9. Viviana Dyah Ayu R. K 10. Arga Mahanan N 11. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo
5	Selasa, 20 Juni 2023	Perubahan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa

No	Hari & Tanggal	Agenda	KW	RR	RIH	HI	HS	DRL	NS	PPS	AR	HD *)	ANN **)	Direksi	SEVP
6	Selasa, 1 Agustus 2023	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi dan Perubahan Supervisi KCK	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	Viviana Dyah Ayu R. K	-
7	Selasa, 15 Agustus 2023	1. Analisa <i>rootcause</i> dan Evaluasi <i>Control System</i> 2. Tindak lanjut (<i>Performance Management impact, reward & Punishment</i> dan <i>culture program</i>)	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Agus Winardono	1. Triswahju Herlina 2. Harsya Wardhana Prasetyo
8	Selasa, 29 Agustus 2023	a. Realisasi Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 b. Evaluasi atas Realisasi RBB, RKAP dan KPI Kolegial (KM) Triwulan II Tahun 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	0		0	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
9	Selasa, 12 September 2023	a. <i>Update</i> Transformasi Jaringan Kerja BRI b. <i>Mapping</i> Tipologi Regional Office berdasarkan Potensi Bisnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Andrijanto	Harsya Wardhana Prasetyo
10	Selasa, 19 September 2023	Pembahasan Tindak Lanjut Tanggapan OJK terkait <i>Workload Manpower</i> Mikro	1	1	1	1	1	1	1	1	0		0	1. Supari 2. Agus Winardono 3. Viviana Dyah Ayu R. K 4. Andrijanto	-
11	Selasa, 24 Oktober 2023	1. Realisasi Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 2. Evaluasi atas Realisasi RBB, RKAP dan KPI (Kolegial) Triwulan III Tahun 2023	0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
12	Selasa, 7 November 2023	Riset Potensi Ekonomi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Menurut Wilayah.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Agus Sudiarto 2. Viviana Dyah Ayu R. K	-



No	Hari & Tanggal	Agenda	KW	RR	RIH	HI	HS	DRL	NS	PPS	AR	HD *)	ANN **)	Direksi	SEVP
13	Selasa, 21 November 2023	Perubahan <i>Item</i> dan Target <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Individual Direksi BRI tahun 2023	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
14	Selasa, 21 November 2023	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB Tahun 2024-2026 dan RKAP Tahun 2024.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
15	Selasa, 21 November 2023	Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BRI Tahun 2024-2028.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
16	Senin, 18 Desember 2023	<i>Closing Remarks</i> 2023	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa

*) Sdr. Hadiyanto aktif sejak periode 1 Januari 2023 - 13 Maret 2023.

**) Sdr. Awan Nurmawan Nuh, aktif sejak periode 13 Maret 2023 - Sekarang.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	8	7	88%	16	14	88%	1	1	100%
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Hadiyanto *	Komisaris	3	3	100%	2	2	100%	1	1	100%
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	8	7	88%	16	14	88%	1	1	100%
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	8	8	100%	16	14	88%	1	1	100%
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Agus Riswanto	Komisaris Independen	8	8	100%	16	15	94%	1	1	100%
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Awan Nurmawan Nuh **	Komisaris	5	5	100%	14	12	86%	-	-	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

** Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah diatur pada Surat Keputusan Direksi NOKEP S.43-DIR/SKP/01/2018 tentang Kebijakan Program Orientasi dan Pendidikan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan program pendidikan Dewan Komisaris bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memberikan pembekalan untuk mengembangkan dan memperkuat struktur serta *governance* Perseroan

Program pendidikan dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
		Kompetensi / Pelatihan	Pelaksanaan	
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	<i>Refresher Program – Level 7 “Indonesian Banking in supporting Indonesia towards a Low Carbon Economy”</i>	Jakarta, 07-08 Desember 2023	<i>Bankers Association for Risk Management</i>
		<i>Forum Annual Meeting 2023</i>	Davos, 17 -18 January 2023	<i>World Economic Forum</i>
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Training: (1)Negotiation Strategies: Optimizing Outcomes Through Collaboration & Conflict Resolution; (2)Great Leadership Series: Organizational Politics & Power Dynamics</i>	New York, 12-16 Juni 2023	NYU Stern School of Business
		<i>Training - Venture Capital Executive Program</i>	California, 25 November - 02 Desember 2023	Berkeley Executive Education
		<i>Training - Program Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)</i>	Yogyakarta, 8 Desember 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		<i>Training - Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 6</i>	Yogyakarta, 19 Desember 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Hadiyanto*	Komisaris	<i>Training - Boards That Lead: Corporate Governance That Builds Value</i>	Pennsylvania, 01-02 Februari 2023	Wharton Business School
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	<i>Training - Effective Execution of Organizational Strategy</i>	Pennsylvania, 09-13 Oktober 2023	Wharton Business School
		<i>Training - Strategy: Building and Sustaining Competitive Advantage</i>	Boston, 10-15 Desember 2023	Harvard Business School
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	<i>Training - Program Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)</i>	Yogyakarta, 8 Desember 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	<i>Training - Disruptive Innovation: Strategies for Successful Enterprises</i>	Boston, 19-24 Juni 2023	Harvard Business School
		<i>Training - Energizing People for Performance</i>	Chicago, 13-16 November 2023	Northwestern-Kellogg Executive Education School of Management
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	<i>Training - Leadership in Technology Driven World</i>	Inggris, 19-23 Juni 2023	Imperial College Business School
		<i>Training - Digital Transformation Strategy</i>	London, 04-08 Desember 2023	Imperial Business School
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	<i>Training - Leading Change & Organizational Renewal</i>	Boston, 19-24 Maret 2023	Harvard Business School
		<i>Training - Leading & Building a Culture of Innovation</i>	Boston, 3-8 Desember 2023	Harvard Business School
Agus Riswanto	Komisaris Independen	<i>Training - Digital Transformation Strategy</i>	London, 4-8 Desember 2023	Imperial Business School
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	<i>Training - Disruptive Innovation: Strategies for Successful Enterprises</i>	Boston, 19-24 Juni 2023	Harvard Business School
		<i>Training - Energizing People for Performance</i>	Chicago, 13-16 November 2023	Northwestern-Kellogg Executive Education School of Management
Awan Nurmawan Nuh**	Komisaris	<i>Training - Program Orientasi Bagi Komisaris Baru</i>	- 14 Maret 2023 - 11 April 2023 - 4 Mei 2023 - 9 Mei 2023 - 11 Mei 2023 - 31 Mei 2022 - 7 Juni 2023 - 8 Juni 2023	Intern Divisi BRI

*Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

**Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Program Orientasi diadakan untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Program Orientasi merupakan program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru. Pelaksanaan program ini berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya. Tujuan dari program orientasi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
2. Menambah pengetahuan untuk dan Komisaris baru mengenai Visi, Misi, Profil dan tujuan BRI.
3. Memberikan gambaran tanggung jawab, wewenang dan larangan sebagai Komisaris BRI.

4. Memberikan pedoman, gambaran tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
5. Menambah pemahaman Dewan Komisaris mengenai sistem kerja dan operasional di BRI.
6. Menambah pemahaman mengenai sistem kerja dan operasional di BRI; pemahaman *value creation* untuk para *stakeholders*, manajemen risiko, pemahaman industri perbankan atau bisnis perusahaan anak BRI.
7. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis BRI.
8. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.

Program orientasi bagi Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Awan Nurmawan Nuh yang telah diikuti adalah sebagai berikut:

Materi Program Orientasi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris	Senin, 14 Maret 2023	Corporate Secretary
- Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Anggota Dewan Komisaris - Anggaran Dasar	Selasa, 11 April 2023	Sekretaris Dewan Komisaris
- Overview BRI (<i>Financial performance & business per segment</i>) - Investor Concerns - Overview Subsidiaries	Kamis, 4 Mei 2023	Investor Relations Division
- Struktur Organisasi - Visi, Misi dan Rencana Strategis Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>) - RBB (Rencana Strategis Jangka Menengah) dan RKAP (Rencana Strategis Jangka Pendek)	Kamis, 11 Mei 2023	Planning, Budgeting, and Performance Division
Subsidiaries Performance	Rabu, 31 Mei 2022	Subsidiaries Management Division
GCG, Integrated GCG Framework & Implementation	Rabu, 7 Juni 2023	Compliance Division
Risk Management	Kamis, 8 Juni 2023	Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Division
Pelaksanaan Fungsi Audit	Jumat, 9 Mei 2023	Satuan Kerja Audit Internal

Sertifikasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1	Komisaris	Minimal tingkat 1	4 Tahun
2	Komisaris Independen	Minimal tingkat 2	4 Tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala paling kurang:

1. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
2. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, ditetapkan kriteria penyetaraan penjenjangan dan penyetaraan penjenjangan terhadap SDM pemilik Sertifikat Manajemen Risiko yang masih berlaku sesuai ketentuan di atas.



Adapun tabel sertifikasi manajemen risiko Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi/ Refreshment		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Tahun Terbit*
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	BARa	Level 5	2023
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2023
Hadiyanto**	Komisaris	LSPP	Level 1	2018
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	BSMR	Level 1	2022
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	BSMR	Level 3	2020
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2022
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2021
Pariurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2022
Agus Riswanto	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2022
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2022
Awan Nurmawan Nuh***	Komisaris	LPPI	Pembekalan MR	2023

*Beberapa Dewan Komisaris dalam proses *refreshment*

**Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

***Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester sebagai berikut:

1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja PT BRI Semester II Tahun 2022 tanggal 23 Februari 2023.
2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2023 tanggal 30 Agustus 2023.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab dilaksanakan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan surat Dewan Komisaris kepada Direksi.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama Tahun 2023 antara lain:

1. Pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan selama Tahun 2023.
2. Reviu atas realisasi kinerja laporan keuangan keuangan BRI secara konsolidasi dan triwulanan.
3. Evaluasi atas usulan RBB Tahun 2024-2026 dan RKAP 2024, termasuk realisasi pencapaian RKAP & RBB Tahun 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PUMK BRI Tahun 2023.
5. Konsultasi kredit Direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan SKAI Tahun 2023.
7. Evaluasi kinerja dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan BRI.
8. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris BRI termasuk nominasi pengurus Perusahaan Anak.
9. Reviu dan persetujuan atas penyediaan kepada pihak terkait dan penyertaan modal yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris
10. Evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit SKAI, pemantauan atas tindak lanjut atas temuan audit internal dan eksternal secara triwulanan.
11. Reviu atas Perkembangan Bisnis pada masing-masing Segmen Kredit.
12. Evaluasi peraturan dana pensiun termasuk reviu atas tata kelola dan kinerja dana pensiun
13. Evaluasi atas implementasi kebijakan *human capital* BRI.
14. Evaluasi tingkat kesehatan Bank, profil risiko, pelaksanaan fungsi kepatuhan, strategi anti-*fraud* dan penerapan APU PPT.

15. Evaluasi kebijakan *talent pool* BRI dan SKAI.
16. Evaluasi atas usulan reorganisasi dalam rangka penyelarasan target bisnis dan kolaborasi antar segmen.
17. Evaluasi atas implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dan penguatan tata kelola Terintegrasi.
18. Reviu atas portofolio kredit korporasi dan debitur berisiko tinggi.
19. Tata kelola, arsitektur dan *update security* strategi BRI.
20. Reviu dan persetujuan atas rencana aksi keuangan berkelanjutan, *recovery plan*, dan *resolution plan*.
21. Reviu atas kinerja keuangan dan investasi DPLK Tahun 2022 termasuk persetujuan atas rencana bisnis Bank DPLK Tahun 2023.
22. Reviu atas perkembangan bisnis pada masing-masing segmen kredit.
23. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris lainnya dalam rangka fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengeluarkan surat persetujuan dan surat keputusan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Persetujuan
1	Senin, 16 Januari 2023	Perencanaan Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Tahun 2023
2	Selasa, 7 Maret 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dapen BRI 2023
3	Selasa, 28 Februari 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
4	Selasa, 28 Maret 2023	Permohonan Persetujuan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait an. PT Permodalan Nasional Madani
5	Kamis, 13 April 2023	Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023
6	Selasa, 2 Mei 2023	Rencana Penyertaan Modal KPEI dalam rangka Pengembangan <i>Central Counterparty</i> (CPP) Suku Bunga Nilai Tukar (SBNT)
7	Selasa, 30 Mei 2023	Usulan KPI Kolegial Direksi Tahun 2023
8	Selasa, 20 Juni 2023	Usulan <i>Threshold</i> PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani.
9	Selasa, 20 Juni 2023	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB Tahun 2023-2025 dan RKAP Tahun 2023
10	Selasa, 20 Juni 2023	Perubahan Struktur Organisasi
11	Selasa, 4 Juli 2023	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris
12	Selasa, 1 Agustus 2023	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi & Perubahan Supervisi KCK
13	Selasa, 26 September 2023	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris
14	Selasa, 21 November 2023	Perubahan <i>Item</i> dan Target <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Individual Direksi BRI tahun 2023
15	Selasa, 21 November 2023	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB Tahun 2024-2026 dan RKAP Tahun 2024.
16	Selasa, 21 November 2023	Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BRI Tahun 2024-2028.
17	Selasa, 28 November 2023	Persetujuan Realisasi Rencana Bisnis DPLK Semester I 2023
18	Selasa, 5 Desember 2023	Penyediaan dana kepada pihak terkait an. PT BRI Danareksa Sekuritas



Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian kinerja dilakukan atas *Key Performance Indicator* (KPI) kolegal atau KPI bersama dan KPI Direktorat (Individu).



Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan dalam agenda RUPS. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

Pelaksanaan penilaian Direksi dilakukan dengan beberapa kriteria dan alat ukur yaitu berdasarkan pada pencapaian KPI dan berdasarkan penilaian GCG pada aspek Direksi.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Secara Kolegal

Adapun kriteria evaluasi kinerja yang diukur adalah sebagai berikut:



KPI individu masing-masing Direksi dapat dilihat pada bagian Kriteria Penilaian Kinerja Individu.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDU**Direktur Utama**

- Tingkat kesehatan Bank terjaga.
- Target keuangan perusahaan tercapai sesuai anggaran (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB).
- Pelaksanaan program-program dari Pemerintah selesai tepat waktu.
- Kualitas aktiva produktif dan kecukupan cadangan kerugian terjaga.
- Capaian integrasi Ultra Mikro tercapai melebihi target.
- Pengembangan talenta muda tercapai melebihi target.

Wakil Direktur Utama

- Tingkat kesehatan Bank terjaga.
- Target keuangan perusahaan tercapai sesuai anggaran (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB).
- Pelaksanaan program-program dari Pemerintah selesai tepat waktu.
- Kualitas aktiva produktif dan kecukupan cadangan kerugian terjaga.
- Capaian integrasi Ultra Mikro tercapai melebihi target.
- Pengembangan talenta muda tercapai melebihi target.

Direktorat Keuangan

- Target keuangan perusahaan tercapai sesuai anggaran (RKAP) & Rencana Bisnis Bank.
- Target kinerja kontribusi Perusahaan Anak secara total tercapai.
- Target market *capitalization* & *Total Shareholder Return* tercapai.
- Kualitas Laporan Keuangan Hasil Sertifikasi/*Surveillance* ISO dengan target Layak

Direktorat Bisnis Konsumer

- Target pinjaman tercapai dengan kualitas aset tetap terjaga
- Target jumlah debitur tercapai
- Target *asset under management* tercapai
- Market *share* pinjaman konsumer mengalami peningkatan dari tahun 2022

Direktorat Bisnis Mikro

- Target laba bisnis mikro tercapai
- Target OS pinjaman mikro tercapai
- Target *Recovery Extracomptable* mikro tercapai
- Target realisasi KPI *Holding* Ultra Mikro

Direktorat Bisnis Kecil dan Menengah

- Target *fee based income* bisnis SME dan Komersial tercapai
- Target Penyaluran KUR Kecil tercapai
- Target Akuisisi Debitur baru baik Segmen Kecil dan Menengah tercapai
- Target simpanan bisnis komersial tercapai dengan biaya yang tetap efisien
- Target pinjaman bisnis komersial tercapai dengan kualitas aset tetap terjaga

Direktorat Bisnis Wholesale dan Kelembagaan

- Target laba bisnis *wholesale* dan kelembagaan tercapai
- Target *revenue* bisnis *wholesale* tercapai
- Target *fee-based income* bisnis *wholesale* dan kelembagaan tercapai
- Target simpanan tercapai dengan biaya yang tetap efisien
- Target pinjaman tercapai dengan kualitas aset tetap terjaga
- Target kontribusi UKLN tercapai.
- Target volume dan jumlah transaksi bisnis *treasury*, internasional dan *investment services* tercapai.

Direktorat Jaringan dan Layanan

- Target *Reliability* dan Produktivitas ATM dan CRM tercapai
- Target *Growth CASA Merchant* tercapai
- Target Penetrasi *Market Share Merchant* (MID) tercapai
- Kerugian akibat *Skimming/Fraud e-channel* oleh pihak eksternal diminimalisir dan lebih rendah dari tahun 2022

Direktorat Kepatuhan

- Target Peringkat GCG & Profil Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum tercapai
- Target *Score Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tercapai
- Target Peringkat Komposit Tata Kelola Terintegrasi tercapai
- Target pengendalian denda/kerugian terkait regulator tercapai
- Target pencapaian kualitas litigasi BRI tercapai

Direktorat Manajemen Risiko

- Target *Recovery Ekstrakomptabel* tercapai
- Target Kerugian akibat Risiko Operasional tercapai
- Target *zero incident* dalam IT *security* (*cybersecurity breach*) tercapai
- Target *Risk Maturity Index* tercapai



Direktorat Human Capital

- Target *Employee of Choice* tercapai
- Target Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko tercapai
- Target Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti tercapai
- Target Milenial dalam *nominated talent* tercapai
- Target % Keberhasilan pengisian pekerja dari *Talent Pool* tercapai
- Target Implementasi *Program* Terkait *Talent Development & Career Path System* di lingkup *Holding/Klaster* tercapai

Direktorat Digital & Teknologi Informasi

- Target IT *maturity level* tercapai
- Target *zero incident* dalam IT *security* tercapai
- Realisasi anggaran IT membaik dari tahun sebelumnya
- Target pengelolaan kas tercapai
- Target pengelolaan *user experience* atas *platform* BRIsurf, BRImen & NDS tercapai

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Realisasi KPI masing-masing Anggota Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dilakukan *review* oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan remunerasi setiap Anggota Direksi. Kinerja individu Direksi dapat dilihat secara khusus pada KPI Individu yang terdiri dari KPI Bersama dan KPI Direktorat. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Perseroan pada periode 2023, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS.

Sebelum diungkapkan dalam RUPS, penilaian atas KPI Kolegial Direksi telah melalui proses *reviu* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian KPI Direksi secara kolegial pada tahun buku 2023 sebagai berikut:

Kategori	Bobot	Parameter KPI	Realisasi
Financial	26%	(C) PPOP (5%) & PPOP Growth (5%) (C) ROE Tier 1 (4%) (G) CAR (5%) (G) TSR (3%) (C) Market Cap (4%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rp94,12 T & 13,80% • 22,94% • 25,23% • Peringkat 2 dari 8 Peers • Rp867,68 T
Operasional	12%	(G) LAR (3%) & LAR Coverage (3%) (G) COC (3%) (G) BOPO (3%)	<ul style="list-style-type: none"> • 12,54% & 53,59% • 2,38% • 64,36%
Sosial	7%	(S) Realisasi KUR (4%) (S) Recovery Rate Subrograsi (3%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rp163,33 T KUR Tersalurkan • 22,93%
Inovasi Model Bisnis	21%	(C) Average Dana Murah (7%) (C) CASA Ratio (5%) (G) Realisasi KPI Holding UMI (9%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rp791,53 T • 64,55% • 105,10%
Kepemimpinan Teknologi	12%	(C) Integrasi ATM dan EDC Payment (3%) (G) Implementasi Master Plan IT (4%) (G) Cyber Security Breach (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana sesuai <i>milestone</i> • Terimplementasi sesuai <i>milestone</i> • Zero Incident
Peningkatan Investasi	12%	(E) Rating ESG (4%) (G) Risk Management Maturity Index (3%) (C) Kontribusi Perusahaan Anak (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • S&P Global Score: 63 & MSCI Rating A • Index Score 4,03 • Rp8,37 T
Pengembangan Talenta	10%	(S) Program <i>Talent Management</i> di Klaster (2%) (G) Penyelesaian <i>roadmap</i> penguatan Dapen BRI (2%) (G) Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (2%) (S) Rasio Perempuan di <i>Nominated Talent</i> (2%) (S) <i>Young Talent</i> di <i>Nominated Talent</i> (2%)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana sesuai <i>timeline</i> pelaksanaan program <i>Cluster Talent Committee</i> • <i>Roadmap</i> tersedia sesuai <i>timeline</i> • BOD & SEVP dalam fungsi organ pengelola risiko, telah memenuhi kualifikasi • 22,58% • 22,58%
PENCAPAIAN			101.80%

Keterangan: (C) Commercial; (E) Environment; (S) Social; (G) Governance

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyusun rencana kerja pada awal tahun dan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) berdasarkan pencapaian kerja Dewan Komisaris dan *Key performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan reviu atas pelaksanaan tugas komite-komite dan Sekretariat Dewan Komisaris sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Berdasarkan hasil reviu serta *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris dan Komite di dinyatakan bahwa seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023 dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self-assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Indikator atau kriteria kinerja Dewan Komisaris diukur dari pencapaian atas program kerja/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun. Adapun program kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi perspektif *Learning & Growth*, *Internal process*, *compliance* dan *financial*. Kriteria penilaian Dewan Komisaris tahun 2023 sebagai berikut:

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)
1	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Dewan Komisaris	a Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
			b Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi	2,00
			b Anggota Dewan Komisaris memenuhi kompetensi/ sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
			c Program pendidikan/ <i>training</i> /seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali program pendidikan/ <i>training</i> /seminar	2,00
Sub Total					10,00



No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)		
2	Internal Process	Perencanaan	a Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	2,50		
			b Pengesahan RBB dan/atau revisi RBB tepat waktu	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	5,00		
		Pelaksanaan	a Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Permohonan persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	5,00		
			b Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal empat bulan sekali.	10,00		
			c Menyusun kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Proses Nominasi Calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	a. Surat penyampaian <i>nominated talent</i> kepada <i>Cluster Talent Committee</i> (CTC) b. Kebijakan Nominasi Perseroan	2,50		
			d Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	2,50		
			e Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	5,00		
		Pengawasan	a Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Melakukan kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah	7,50		
			b Pelaksanaan Reviu pengendalian internal	Reviu atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	2,50		
			c Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50		
			d Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50		
			E Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50		
		Sub Total					50,00

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)			
3	Compliance Perspective	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai <i>Good Corporate Governance</i>	a	Pelaksanaan Penilaian <i>self-assessment</i> GCG	Penilaian <i>self-assessment</i> GCG dilaksanakan setiap semester dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50		
			b	Pelaksanaan <i>self-assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian <i>self-assessment</i> GCG dilaksanakan setiap Semester dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50		
			c	Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	5,00		
			d	Skor Penilaian CGPI	Skor penilaian CGPI lebih baik dari tahun sebelumnya	2,50		
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a	Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko.	Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	10,00		
			b	Pelaksanaan fungsi kepatuhan	Pelaksanaan reviu fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester	2,50		
			c	Pelaksanaan Reviu atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan Reviu atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50		
			d	Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50		
		Sub Total					30,00	
		4	Financial Perspective	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan	a	Laba Bersih	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	2,50
					b	Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	2,50
					c	NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2,50
d	CAR				Pencapaian target CAR sesuai RKAP	2,50		
Sub Total					10,00			
TOTAL					100,00			



Pihak yang Melakukan Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 secara *self-assessment* dan disampaikan pada RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir		
1	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Dewan Komisaris	a	Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dewan Komisaris <i>comply</i> dengan ketentuan yang berlaku	2,00	Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Organisasi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100	2,00	
			b	Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Organisasi Organ di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00	Organisasi Organ di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Organisasi Organ di bawah Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100	2,00	
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a	Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi	2,00	Setiap Dewan Komisaris yang baru diangkat memperoleh program orientasi Dewan Komisaris.	Selama Tahun 2023 terdapat Anggota Dewan Komisaris baru yaitu Awan Nurmawan Nuh dan telah mengikuti program orientasi Dewan Komisaris	100	2,00	
			b	Anggota Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Anggota Dewan Komisaris memenuhi kewajiban kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku	2,00	Anggota Dewan Komisaris memenuhi kewajiban kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kewajiban kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.	100	2,00	
			c	Program pendidikan/ <i>training</i> / seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali program pendidikan/ <i>training</i> / seminar	2,00	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan <i>training</i> minimal satu kali dalam setahun	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan <i>training</i> minimal satu kali dalam setahun	100	2,00	
		Sub Total					10,00			10,00	
		2	<i>Internal Process</i>	Perencanaan	a	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	2,50	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	RKAP Dewan Komisaris Tahun 2024 disahkan pada tanggal 29 Desember 2023	100

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir	
			b	Pengesahan RBB dan/atau revisi RBB tepat waktu	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	5,00	Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan tanggapan atas usulan RBB ke Direksi Paling lambat tanggal 30 November 2023	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas RBB pada tanggal 28 November 2023 dan persetujuan atas Revisi RBB pada tanggal 26 Juni 2023	100	5,00
	Pelaksanaan		a	Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Permohonan persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	5,00	Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan	Selama tahun 2023, terdapat 16 Persetujuan yang disampaikan Dewan Komisaris atas seluruh permohonan yang disampaikan Direksi	100	5,00
		b	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal empat bulan sekali.	10,00	Dewan Komisaris minimal melaksanakan rapat dengan Direksi sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris minimal 4 (empat) bulan sekali	Selama tahun 2023 terdapat 16 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan 109 Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris	100	10,00	
		c	Menyusun kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Proses Nominasi Calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	a. Surat penyampaian <i>Nominated Talent</i> kepada <i>Cluster Talent Committee</i> (CTC). b. Kebijakan Nominasi Perseroan	2,50	a. Dewan Komisaris menyampaikan surat <i>Nominated Talent</i> kepada <i>Cluster Talent Committee</i> (CTC). b. Kebijakan Nominasi Perseroan tersedia sesuai ketentuan	a. Dewan Komisaris telah menyampaikan surat <i>Nominated Talent</i> kepada <i>Cluster Talent Committee</i> (CTC) pada Januari 2023 b. Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 28 Juli 2015.	100	2,50	



No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir	
			d	Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	2,50	a. Terdapat ketentuan Dewan Komisaris terkait Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris b. Rekomendasi struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	a. Dewan Komisaris memiliki kebijakan sebagai berikut: 1. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Kebijakan Tata Kelola Remunerasi. 3. Pelaksanaan pemberian remunerasi yang ditangguhkan. b. Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 dan tantiem atas kinerja tahun buku 2022 kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tanggal 29 Maret 2023.	100	2,50
			e	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	5,00	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PUMK BRI tahun buku 2023 disampaikan sebelum RUPST 2023 yaitu tanggal 21 Februari 2023	100	5,00
	Pengawasan		a	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Melakukan kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah	7,50	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke kantor wilayah BRI	Selama Tahun 2023 Dewan Komisaris melaksanakan Kunjungan kerja sebanyak 17 kali ke 12 <i>Regional Office</i>	100	7,50
			b	Pelaksanaan Reviu pengendalian internal	Reviu atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	2,50	<i>Review</i> atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan.	Dewan Komisaris telah melakukan <i>review</i> dan persetujuan atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI Tahun 2023 tanggal 21 Februari 2023	100	2,50

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir	
			c	Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target sebanyak 4 kali	Rekomendasi tertulis atas hasil pemeriksaan audit internal berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi telah dilakukan evaluasi laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit internal SKAI disampaikan setiap triwulan (TW IV '22, TW I '23, TW II'23 dan TW III '23)	100	2,50
			d	Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Rekomendasi tertulis atas hasil pemeriksaan audit eksternal berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi telah dilakukan evaluasi laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit eksternal disampaikan setiap triwulan (TW IV '22, TW I '23, TW II'23 dan TW III '23)	100	2,50
			E	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Reviu laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Dewan Komisaris telah melakukan reviu terhadap audit umum laporan keuangan tahun 2022, laporan keuangan TW I, TW II dan TW III tahun 2023		
			Sub Total			50,00			50,00	
3	<i>Compliance Perspective</i>	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai <i>Good Corporate Governance</i>	a	Pelaksanaan Penilaian <i>self-assessment</i> GCG	Penilaian <i>self-assessment</i> GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	<i>Self-Assessment</i> GCG dilaksanakan 2 kali dalam setahun	Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan <i>self-assessment</i> GCG SM II 2022 dan SM I 2023 dan menyampaikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi	100	2,50
			b	Pelaksanaan <i>self-assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian <i>self-assessment</i> GCG terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Penilaian <i>Self-Assessment</i> GCG Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Penilaian <i>self-assessment</i> GCG Terintegrasi tahun 2023 dilaksanakan 2 kali yaitu SA TKT SM II 2022 dan SA TKT SM I 2023 telah dilakukan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	2,50



No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir	
			c	Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik wajar dalam semua hal yang material.	5,00	Opini Akuntan Publik wajar dalam semua hal yang material.	Opini Akuntan Publik wajar dalam semua hal yang material.	100	5,00
			d	Skor penilaian CGPI lebih baik dari tahun sebelumnya	Skor penilaian CGPI sesuai dengan target	2,50	Target Skor nilai CGPI lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2022/ 95,18)	Skor CGPI tahun 2023 dengan skor 95,21	100	2,50
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a	Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko .	Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	10,00	Terdapat rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko	Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi secara tertulis berupa pendapat dan saran kepada Direksi terhadap laporan profil risiko setiap triwulan	100	10,00
			b	Pelaksanaan fungsi kepatuhan	a.Pelaksanaan reviu atas fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester. b.Nilai <i>self-assessment</i> reviu pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester.	2,50	Peringkat risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (<i>Low to Moderate</i>) menurut asesmen OJK	Risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (<i>Low to Moderate</i>)	100	2,50
			c	Pelaksanaan Reviu atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan Reviu atas Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas reviu fungsi kepatuhan dan tingkat kesehatan bank yang dilaksanakan setiap semester	Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran kepada Direksi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kesehatan bank Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023	100	2,50
			d	Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023	100	2,50

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir	
Sub Total					30,00			30,00		
4	Financial Perspective	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan*	a	Laba Bersih	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	2,50	Rp56,16 T	Rp60,43 T	107,6%	2,69
b			Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	2,50	Rp1.911,7 T	Rp1.965,0 T	102,8%	2,57	
c			NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2,50	2,73%	2,95%	91,9%	2,30	
d			CAR	Pencapaian target CAR sesuai RKAP	2,50	24,72%	25,24%	112,8%	2,82	
Sub Total					10,00			10,38		
TOTAL					100,00			100,38		

Keterangan:

*Angka realisasi keuangan menggunakan prognosa dalam usulan RKAP/RBB.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Prosedur dan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilihat dari pencapaian KPI masing-masing Komite. Dewan Komisaris menilai bahwa selama Tahun 2023 komite Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing komite.

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Audit

Indikator atau kriteria kinerja Komite Audit diukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota Komite Audit dalam setiap rapat.

Adapun program kerja Komite Audit disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan proses telaah terhadap laporan keuangan, hasil audit internal dan eksternal (KAP), dan memberikan rekomendasi atas pemilihan KAP.

Secara umum seluruh KPI Komite Audit telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Audit Tahun 2023 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit yang memenuhi ketentuan sehingga rapat Komite Audit dapat dilaksanakan dengan kuorum dalam setiap mengambil keputusan.

Penilaian Kinerja Komite Audit Tahun 2023

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	Learning & Growth Perspective	Organisasi Komite	Komposisi Anggota Komite sesuai ketentuan.	Komposisi Anggota KA sesuai dengan POJK, Peraturan KBUMN dan Regulator.	Komposisi Anggota KA Tahun 2023 telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN.	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan.	Reviu Piagam Komite Audit	Piagam Komite Audit telah dilakukan reviu sesuai ketentuan.	5	5



No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan.	Anggota KA memiliki kompetensi diantaranya: 1. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi. 2. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.	Anggota KA diantaranya memiliki kompetensi bidang keuangan dan/ atau akuntansi, hukum, ekonomi, audit dan perbankan.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan.	Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.	Masa tugas Anggota KA BRI KA tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris.	5	5
		Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu.	RKAP KA pada Tahun 2024 disahkan Tahun 2023	RKAP KA pada Tahun 2024 disahkan pada tanggal 29 Desember 2023.	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun.	Satu bulan sekali (12 kali).	Selama Tahun 2023 dilaksanakan 23 kali Rapat KA.	5	5
			Evaluasi dan persetujuan Direksi atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT).	Setahun sekali.	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran kepada Dewan tentang Persetujuan Terhadap Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023.	5	5
			Memberikan Rekomendasi terkait usulan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.	Setahun sekali.	Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PUMK tahun buku 2023 pada tanggal 16 Januari 2023.	5	5
	Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Dewan Komisaris.	Sesuai tugas dan arahan Dewan Komisaris.	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.	5	5		
2	Internal Process Perspective	Pengawasan	Reviu laporan hasil pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	Setiap Triwulan.	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui setiap Triwulan.	5	5

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
			Reviu laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	Penelaahan dan diskusi antara Komite Audit, Dewan Komisaris dan SKAI dituangkan dalam risalah rapat sebanyak dua kali dengan KAP dan dua kali dengan SKAI.	Penelaahan dan diskusi antara Komite Audit, Dewan Komisaris dan SKAI dituangkan dalam risalah rapat sebanyak dua kali dengan KAP dan dua kali dengan SKAI.	10	10
			Reviu terhadap pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> .	Setahun sekali.	Komite Audit telah melakukan reviu terhadap efektivitas <i>Whistleblowing System</i> BRI	5	5
			Reviu pelaksanaan audit umum Laporan keuangan dan kinerja DPLK BRI.	Setahun sekali.	Komite Audit telah melakukan penelaahan komite audit atas laporan hasil audit atas laporan keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2022	10	10
			Reviu tindak lanjut <i>Management Letter</i> dan tindak lanjut atas temuan audit yang dilakukan oleh Pihak eksternal.	Setahun sekali.	Komite Audit telah melakukan reviu atas <i>monitoring</i> tindak lanjut atas temuan auditor eksternal (<i>management letter</i>) setiap triwulan.	10	10
			Penelaahan Atas Laporan Kejadian <i>fraud</i> yang diperkirakan Berdampak Signifikan.	Setahun sekali.	Selama Tahun 2023 Komite Audit telah menyampaikan penelaahan Atas Laporan Kejadian <i>fraud</i> yang diperkirakan Berdampak Signifikan.	5	5
3	<i>Compliance Perspective</i>	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Pendapat Akuntan Publik adalah wajar dalam semua hal yang material.	wajar dalam semua hal yang material	Opini hasil pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan BRI wajar dalam semua hal yang material.	10	10
Total						100	100

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Nominasi dan Remunerasi

Indikator atau kriteria kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) di ukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KNR dalam setiap rapat. Adapun program kerja KNR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan proses nominasi pengurus perseroan dan anak perusahaan, evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, serta remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum seluruh KPI KNR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja KNR Tahun 2023 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KNR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KNR dapat dilaksanakan dengan kuorum dalam setiap pengambilan keputusan.

Adapun pencapaian indikator atau kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KNR sesuai dengan Peraturan regulator dan Kementerian BUMN	Komposisi Anggota KNR tertuang dalam SK Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan ketentuan POJK & Kementerian BUMN	5	5



No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai	
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Seluruh Anggota KNR Lulus <i>Fit & Proper test</i> OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2023	Seluruh Anggota Komisaris anggota KNR dinyatakan lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK dan mengikuti Pendidikan.	5	5	
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di <i>Update</i> sesuai ketentuan dan masa jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Penetapan Ketua dan Anggota KNR BRI, Masa jabatan ketua dan Anggota KNR telah sesuai ketentuan.	5	5	
2	Internal Process Perspective	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKA KNR pada Tahun 2024 disahkan paling lambat akhir tahun 2023	RKA KNR Tahun 2024 disahkan pada tanggal 29 Desember 2023	10	10	
			Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Sesuai ketentuan, rapat Komite dilaksanakan minimal sekali dalam 4 (empat) bulan	Selama Tahun 2023 dilaksanakan 20 (dua puluh) kali rapat KNR.	10	10
				Nominasi pengurus BRI	Minimal sekali dalam setahun	Nominasi Pengurus BRI telah dilakukan sesuai rincian rapat.	10	10
				Nominasi pengurus anak perusahaan	<i>Tentative</i> sesuai dengan usulan Direksi	Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan nominasi pengurus anak perusahaan sesuai rincian rapat.	10	10
			Reviu dan menyusun rekomendasi Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Rekomendasi KNR atas usulan Remunerasi Pengurus Perseroan.	10	10	
			Mereviu/ Pembahasan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	KNR telah melakukan Pembahasan Remunerasi Pengurus Perseroan sesuai rincian rapat.	10	10	
			Pengawasan	Reviu/ Pembahasan Kebijakan Ketenagakerjaan dan remunerasi Pekerja secara periodik	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	KNR melakukan pembahasan mengenai Penyesuaian Ketentuan Internal terkait Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris pada 22 Agustus 2023	10	10
3	Compliance Perspective	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Evaluasi kinerja Direksi	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Melaksanakan Rapat pembahasan Evaluasi Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 14 Februari 2023	5	5	
			Pelaksanaan penilaian <i>self assessment</i> GCG Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara semesteran	Hasil penilaian <i>self assessment</i> GCG di Dewan Komisaris diperoleh dengan peringkat komposit 2	5	5	
			Penilaian kinerja Organ Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dan evaluasi Anggota Komite telah dilaksanakan setiap akhir tahun dan disampaikan dalam Laporan Tahunan BRI.	5	5	
Total						100	100	

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Pemantau Risiko

Indikator atau kriteria kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) di ukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KPMR dalam setiap rapat. Adapun program kerja KPMR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan pemantauan implementasi manajemen risiko perseroan dan perusahaan anak.

Secara umum seluruh KPI KPMR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja KPMR Tahun 2023 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KPMR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KPMR dapat dilaksanakan dengan kuorum dalam setiap pengambilan keputusan.

Adapun pencapaian indikator atau kinerja KPMR adalah sebagai berikut:

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penetapan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KPMR dari Dewan Komisaris telah lulus <i>fit & proper test</i> OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2023	Seluruh Anggota KPMR dari Dewan Komisaris dan Pihak Independen telah lulus <i>fit & proper test</i> OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2023	5	5
			Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Penetapan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	5	5
2	<i>Internal Process Perspective</i>	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKA KPMR pada Tahun 2024 disahkan paling lambat akhir tahun 2023	RKA KPMR pada Tahun 2024 disahkan pada tanggal 29 Desember 2023	5	5
		Perencanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Minimal 4 kali rapat.	Selama Tahun 2023 dilaksanakan 45 kali Rapat KPMR. Selain itu KPMR juga ikut aktif dalam rapat bersama Dewan Komisaris	5	5
			Evaluasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris	Seluruh paket pemberian kredit di atas jumlah tertentu dievaluasi sesuai ketentuan	Selama Tahun 2023 KPMR melakukan <i>review</i> sebanyak 12 kali konsultasi kredit.	5	5
			Evaluasi atas penyediaan dana bagi pihak terkait	Seluruh penyediaan dana kepada Pihak terkait dievaluasi sesuai ketentuan	Selama Tahun 2023 KPMR melakukan <i>review</i> sebanyak 2 kali persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2023	5	5
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak: perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Rencana Aksi korporasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris di evaluasi sesuai ketentuan	Selama Tahun 2023 KPMR melakukan <i>review</i> persetujuan rencana aksi korporasi. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	10	10



No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
		Pengawasan	Review kecukupan kebijakan umum manajemen risiko dan <i>Recovery Plan</i>	Sekali setahun	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan <i>review</i> KUMR, <i>Risk Appetite Statement (RAS)</i> , <i>Resolution Plan</i> , dan <i>Recovery Plan</i> . <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	10	10
			Review dan Evaluasi portofolio perkreditan/ <i>portfolio guideline</i>	Sekali setahun	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan <i>review</i> dan evaluasi kebijakan <i>portfolio</i> perkreditan/ <i>Loan portfolio guideline</i> masih berlaku	5	5
			Review pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik	Setiap Semester	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan <i>review</i> pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	5	5
			Review pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)	Setiap Semester	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan <i>Review</i> pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023.	5	5
			Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya <i>fraud</i> Perseroan	Setiap Semester	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan evaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya <i>fraud</i> Perseroan. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	5	5
			Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan	Sekali setahun	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023.	5	5

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
3	Compliance Perspective	Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko Perseroan	Setiap Triwulan	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan Evaluasi profil risiko Perseroan setiap triwulan. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2023	10	10
			Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan	Setiap Semester	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	10	10
Total						100	100

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/Pencapaian Target	Bobot	Pencapaian Bobot
I	Learning & Growth Perspective (25%)	Penguatan Tata Kelola Terintegrasi	Penguatan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan Konsultan Eksternal	Melakukan Penguatan Tata Kelola Terintegrasi di tahun 2023	Selama tahun 2023, terdapat : Hasil <i>assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi. Kebijakan Umum Tata Kelola dan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi	10	10
			Penyesuaian Piagam/ Pedoman Kerja KTKT sesuai ketentuan	Minimal dilakukan satu kali	Pada tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian piagam/ pedoman KTKT	5	5
		Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi Anggota KTKT	Minimal dilakukan satu kali	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	5	5
			Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Komunikasi Anggota KTKT BRI Group	Minimal dilakukan satu kali	Telah dilaksanakan sebanyak satu kali di Jakarta	5	5
II	Internal Process Perspective (40%)	Perencanaan & Evaluasi	1.a. Penetapan Rencana Kerja secara Tahunan	Menetapkan Rencana Kerja KTKT	RKA KTKT tahun 2024 telah disahkan pada tanggal 29 Desember 2023	10	10
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	minimal 2 kali	Selama Tahun 2023 dilaksanakan 21 kali Rapat KTKT dengan rekomendasi atas evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Manajemen Risiko Terintegrasi, Kepatuhan Terintegrasi dan Pengendalian Intern Terintegrasi)	10	10
			Rapat Teknis dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	minimal 9 kali	Selama tahun 2023 telah dilakukan Rapat Teknis dengan Perusahaan Anak dan Pihak Terkait sebanyak 12 kali.	10	10



No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/Pencapaian Target	Bobot	Pencapaian Bobot
			Rapat lain sesuai dengan Tugas KTKT	Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris	Selama Tahun 2023, KTKT menghadiri rapat terkait BRI Group sesuai dengan arahan Dewan Komisaris seperti <i>Exit Meeting</i> dengan KA & SKAI serta RMC Terintegrasi	10	10
III	Compliance Perspective (35%)	Kepatuhan terhadap Ketentuan yang berlaku	Komposisi dan Penyesuaian anggota Konglomerasi Keuangan Keanggotaan dan masa jabatan anggota komite sesuai perubahan yang tertuang pada Surat Keputusan Anggota Komite	Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Perubahan Anggota KTKT melalui SK Dewan Komisaris: 1. Nokep: 08-KOM/BRI/09/2022 tanggal 06 September 2022 2. Nokep: 05-KOM/BRI/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 3. Nokep: 08-KOM/BRI/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 4. Nokep : 09-KOM/BRI/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 5. Nokep : 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023	5	5
Pelaporan Hasil <i>Assessment</i> TKT semesteran			<i>Self-Assessment</i> -setiap semester (dengan tenggat waktu 15 Februari dan 15 Agustus pada tahun berjalan)	Selama tahun 2023, KTKT telah melaksanakan pelaporan <i>Self-Assessment</i> Semester pada tanggal : a. 10 Januari 2023 b. 04 Juli 2023	5	5	
Pelaporan Hasil Laporan Pelaksanaan TKT secara tahunan			<i>Self-Assessment</i> Tahunan (dengan tenggat waktu Bulan Mei)	Selama tahun 2023, KTKT telah melaksanakan pelaporan <i>Self-Assessment</i> Tahunan melalui Surat Direksi Nomor B.06-DIR/KEP/ING/04/2023 pada tanggal 12 April 2023	5	5	
Reviu penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi			Setiap semester	Selama tahun 2023 KTKT melakukan <i>review</i> Laporan Tahunan penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2023	10	10	
Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik			Setiap semester	Selama tahun 2023 KTKT melakukan Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.	5	5	
Penyampaian Laporan wajib sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Selama tahun 2023, KTKT telah melaksanakan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu	5	5	
Total						100	100

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan



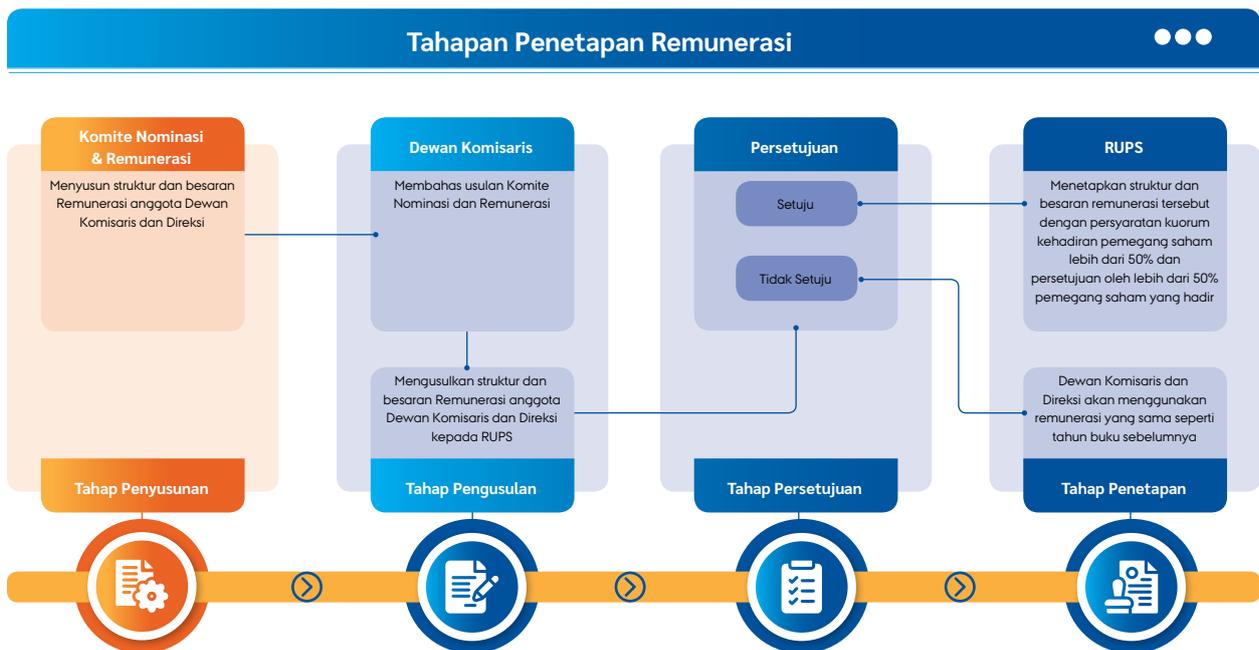
Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi diatur sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Dewan Komisaris meminta daftar *Top Talent* BRI yang memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan sebagai Bakal Calon pengurus BRI.
2. Direksi menyampaikan daftar *Top Talent* BRI berdasarkan data *Talent Management System* BRI, hasil *assessment* oleh lembaga profesional independen serta hasil Rapat *Talent Committee* BRI.
3. Berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) menjanging Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
5. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
 - a. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama.
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi menjanging bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjangingan ini melibatkan lembaga *assessment* profesional dari pihak eksternal yang independen.
 - c. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan, evaluasi dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Melakukan *interview*/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau
 - 2) Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.
 - d. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
6. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
8. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Cluster Talent Committee untuk selanjutnya disampaikan dalam RUPS.
9. RUPS menentukan susunan dan perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI, dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
10. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
11. OJK berwenang untuk memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Tahapan	Aktivitas
Tahap Penyusunan	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan struktur dan besaran Remunerasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.</p>

Tahapan	Aktivitas
Tahap Pengusulan	Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai penetapan honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem dan LTI untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Tahap Penetapan	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya. Dalam hal RUPS belum menetapkan Struktur dan besaran remunerasi, maka RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna.



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain hasil *benchmarking* remunerasi dengan industri sejenis (*peer group*) baik di level domestik maupun regional berdasarkan kompleksitas dan skala bisnis perusahaan, pencapaian kinerja, ukuran dan kompleksitas dari operasi Perseroan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris mencakup sebagai berikut:

- Honorarium dan Tantiem
Honorarium dan Tantiem Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, sedangkan Honorarium dan Tantiem Wakil Komisaris Utama ditetapkan sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
- Tunjangan
Tunjangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:



Jenis	Uraian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)	THR diberikan sejak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran THR maksimal 1 (satu) kali honorarium per bulan dan dibayarkan secara penuh.
Tunjangan Transportasi	Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar 20% dari honorarium per bulan masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Komisaris telah diberikan fasilitas kendaraan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam SK sebelumnya, maka diatur sebagai berikut: a. Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan di atas. b. Bagi Komisaris yang berhenti dari jabatannya dan periode sewa kendaraan belum berakhir maka diberikan kesempatan membeli kendaraan sebesar sisa biaya sewa yang belum dibayarkan, dengan catatan harga beli kendaraan tersebut dapat dinegosiasikan dengan pihak vendor. Bagi Komisaris dimaksud diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan kendaraan tersebut.
Asuransi Purna Jabatan	Diikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun.
Keanggotaan pada Club	Keanggotaan pada 2 (dua) perkumpulan profesi.
Pakaian Corporate	Diberikan dalam bentuk pakaian seragam, jas dan/atau pakaian kerja beserta kelengkapannya serta batik/tenun/pakaian nasional lainnya dengan nilai sesuai plafond anggaran per tahun yang diatur oleh Keputusan Direksi.

3. Fasilitas

Fasilitas yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Jenis	Uraian
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan untuk anggota Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; rawat jalan dan obat; rawat inap dan obat; dan pemeriksaan kesehatan secara medis (<i>medical check-up</i>); Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris beserta seorang istri/suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping. <i>Medical check up</i> diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <i>medical check up</i> diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan <i>medical check up</i> dilakukan di dalam negeri. Fasilitas kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut di atas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> penggantian <i>Frame</i> setiap 2 (dua) tahun, dengan besaran nilai maksimum diatur dalam Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham; penggantian Lensa setiap 1 (satu) tahun.
Fasilitas Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan. Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. Perseroan tidak diperkenankan memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> BUMN yang bersangkutan; negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri.

Jenis	Uraian
	<p>10. Anggota Dewan Komisaris yang menggunakan fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa kapasitas anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan; bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila anggota Dewan Komisaris dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>11 Perseroan harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p>

Struktur Remunerasi Direksi

Struktur remunerasi Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris SR.24-KOM/07/2023 dan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan surat Nomor SR-23/Wk2.MBU.A/07/2023 sebagai berikut:

- Honorarium dan Tantiem Besarnya Gaji dan Tantiem Direksi ditetapkan proporsional terhadap gaji dan tantiem Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 90% dan gaji Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
- Tunjangan

Jenis	Besaran per anggota Direksi	Keterangan
Tunjangan Hari Raya	Besaran THR maksimal 1 (satu) kali Gaji per bulan dan dibayarkan secara penuh.	Diberikan sejak diangkat oleh RUPS.
Tunjangan Perumahan	Rp27,5 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya utilitas.	Tidak diberikan bagi anggota Direksi yang menempati rumah jabatan
Asuransi Purna Jabatan	Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per tahun.	Diikutsertakan sejak dinyatakan efektif lulus <i>Fit and Proper Test</i> oleh OJK.
Keanggotaan Klub	<p>Direktur Utama/Wakil Direktur Utama:</p> <p>2 (dua) keanggotaan Golf. 2 (dua) keanggotaan <i>Club Financial</i>. 1 (satu) keanggotaan <i>Club Kebugaran (family club)</i> 2 (dua) <i>club</i> profesi.</p> <p>Direktur:</p> <p>1 (satu) keanggotaan Golf. 1 (satu) keanggotaan <i>club Kebugaran (family club)</i>. 2 (dua) <i>club</i> profesi</p>	Keanggotaan bersifat untuk pengembangan potensi bisnis dan relasi.
Pakaian <i>corporate</i>	Diberikan dalam bentuk pakaian seragam, jas dan/ atau pakaian kerja beserta kelengkapannya serta batik/ tenun/pakaian nasional lainnya dengan nilai sesuai plafond anggaran per tahun yang diatur oleh Keputusan Direksi.	Berupa pakaian untuk kegunaan dinas.
Komunikasi	Biaya komunikasi yang dapat diberikan dalam bentuk penggantian biaya pulsa dan/ atau paket data sesuai pemakaian.	

3. Fasilitas

Jenis	Uraian
Kendaraan	<p>Fasilitas kendaraan untuk anggota Direksi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Disediakan 1 (satu) fasilitas kendaraan beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional untuk masing-masing anggota Direksi yang diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Batas maksimum jenis fasilitas dan tata cara pengadaan kendaraan ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Bagi Direksi yang belum memperoleh fasilitas kendaraan karena sedang dilakukan proses pengadaan oleh Perseroan, maka diberikan Tunjangan Transportasi yang besaran nilainya ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Direksi telah diberikan fasilitas kendaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris sebelumnya, maka diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana ayat 1 sampai dengan ayat 3 di atas. Bagi Direksi yang jabatannya berakhir dan periode sewa kendaraan belum berakhir, maka yang bersangkutan diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan kendaraan tersebut dan harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perseroan setelah masa transisi selesai.



Jenis	Uraian
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kesehatan untuk anggota Direksi diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. 2. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. rawat jalan dan obat; c. rawat inap dan obat; dan d. pemeriksaan kesehatan secara medis (<i>medical check-up</i>); 3. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. 4. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping. 5. <i>Medical check up</i> diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>medical check up</i> diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan b. <i>medical check up</i> dilakukan di dalam negeri. 6. Fasilitas kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut di atas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. penggantian <i>Frame</i> setiap 2 (dua) tahun, dengan besaran nilai maksimum diatur dalam Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham; b. penggantian Lensa setiap 1 (satu) tahun.
Fasilitas Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada anggota Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. 3. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. 4. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. 5. Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan. 6. Dalam hal anggota Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan. 7. Dalam hal anggota Direksi diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan. 8. Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Direksi tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. 9. Perseroan tidak diperkenankan memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. BUMN yang bersangkutan; b. negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri. 10. Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; b. bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan; c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila anggota Direksi dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 11. Perseroan harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi BUMN dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris

No.	Nama	Honorarium	THRK	Tantiem Sebelum Pajak	Tunjangan Transport	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
1	Kartika Wirjoatmodjo	√	√	√	√	√	√
2	Rofikoh Rokhim	√	√	√	√	√	√
3	Rabin Indrajad Hatari	√	√	√	√	√	√
4	Hendrikus Ivo	√	√	√	√	√	√
5	Dwi Ria Latifa	√	√	√	√	√	√
6	Heri Sunaryadi	√	√	√	√	√	√
7	Nurmaria Sarosa	√	√	√	√	√	√
8	Agus Riswanto	√	√	√	√	√	√
9	Paripurna P. Sugarda	√	√	√	√	√	√
10	Awan Nurmawan Nuh*	√	√			√	√
11	Hadiyanto**	√		√	√	√	√
Jumlah Total		21.251.437.256	1.744.160.000	3.096.358.867	117.069.776.485	4.287.797.613	152.625.708.971

*Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

**Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi

No.	Nama	Honorarium	THRK	Pengobatan	Tantiem Sebelum Pajak	Tunjangan Perumahan	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
1	Sunarso	√	√		√	√	√	√
2	Catur Budi Harto	√	√		√	-	√	√
3	Supari	√	√		√	√	√	√
4	Amam Sukriyanto	√	√		√	-	√	√
5	Handayani	√	√		√	√	√	√
6	Agus Winardono	√	√		√	-	√	√
7	Viviana Dyah Ayu Retno K.	√	√		√	-	√	√
8	Andrijanto	√	√		√	√	√	√
9	Agus Sudiarto	√	√		√	√	√	√
10	Agus Noorsanto	√	√		√	-	√	√
11	Arga M. Nugraha	√	√		√	-	√	√
12	Ahmad Solichin Lutfiyanto	√	√		√	-	√	√
Jumlah Total		56.160.000.000	403.050.000	1.481.589.915	306.949.722.785	1.017.500.000	14.215.450.000	384.227.312.700



Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BRI maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham mencapai 5% (lima persen). Adapun, kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi yang lebih dari 5% adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Sunarso	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Supari	Direktur Bisnis Mikro	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Winardono	Direktur <i>Human Capital</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Arga Mahanana Nugraha	Direktur <i>Digital</i> dan Teknologi Informasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Hadiyanto*	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	PT Moneti Indo Tekno (40%)
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Awan Nurmawan Nuh**	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	PT Bursa Utama Indonesia [80%]
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	PT Putra Bersama Investama (99%)	Nihil
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Riswanto	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	PT Selaras Logistik Indonesia (20%)

* Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

**Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Pengungkapan informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Kebijakan Umum No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan (dhi. Divisi Sekretariat Perusahaan) mengenai kepemilikan saham dan setiap perubahannya atas saham.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dilaporkan kepada Unit Kerja Sekretaris Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.
3. Unit Kerja Sekretaris Perusahaan melaporkan atas kepemilikan dan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham dimaksud
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan.

Sepanjang tahun 2023 transaksi saham yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaporkan kepada Perusahaan (dhi Corporate Secretary Division) dalam kurun Waktu 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pembelian/penjualan saham Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian/ Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
1	Viviana Dyah Ayu R. K.	Direktur Keuangan	Pembelian	996.200	35.000	4.650	1.031.200	5 Januari 2023	Investasi	B.1-CSC/CSM/CGC/01/2023
			Pembelian	1.031.200	15.000	4.430	1.046.200	10 Januari 2023	Investasi	B.1CSC/CSM/CGC/01/2023
			Pengalihan	1.046.200	466.600	5.450	1.512.800	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023



No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian/ Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
2	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Pembelian	1.010.154	50.000	4.650	1.060.154	5 Januari 2023	Investasi	R.1.e-CSC/BOD/BSC/01/2023
			Pengalihan	1.060.154	466.600	5.450	1.526.754	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
3	Sunarso	Direktur Utama	Pembelian	2.398.156	287.700	4.615	2.685.856	6 Januari 2023	Investasi	B.52-CSC/CSM/CGC/01/2023
			Pengalihan	2.685.856	549.000	5.450	3.234.856	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
4	Agus Winardono	Direktur Human Capital	Pembelian	982.681	22.900	4.440	1.005.581	10 Januari 2023	Investasi	B.53-CSC/CSM/CGC/01/2023
			Pembelian	1.005.581	31.300	4.860	1.036.881	16 Februari 2023	Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	B.5-CSC/CSM/CGC/02/2023
			Pengalihan	1.036.881	466.600	5.450	1.503.481	18 Agustus 2023		B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
5	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	Pembelian	1.401.041	200.000	4.460	1.601.041	12 Januari 2023	Investasi	B.4-CSC/CSM/CGC/01/2023
			Pengalihan	1.601.041	4.300	4.020	1.605.341	21 Juli 2023	Pelaksanaan hak atas Program ESOP/ESA yang diperoleh saat masih berstatus Pekerja Perseroan.	B.12-CSC/CSM/CGC/07/2023
			Pengalihan	1.605.341	466.600	5.450	2.071.941	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
6	Supari	Direktur Bisnis Mikro	Pengalihan	2.423.114	1.200	3.630	2.424.314	21 Juli 2023	Pelaksanaan hak atas Program ESOP/ESA yang diperoleh saat masih berstatus Pekerja Perseroan.	B.11-CSC/CSM/CGC/07/2023
			Pengalihan	2.424.314	466.600	5.450	2.890.914	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023

No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian/ Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
7	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Pengalihan	1.344.957	494.100	5.450	1.839.057	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
8	Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	Pengalihan	2.958.600	466.600	5.450	3.425.200	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
9	Achmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	Pengalihan	3.120.870	466.600	5.450	3.587.470	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
10	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	Pengalihan	1.250.800	466.600	5.450	1.717.400	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
11	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informas	Pengalihan	847.185	466.600	5.450	1.313.785	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
12	Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	Pengalihan	734.200	388.800	5.450	1.123.000	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
13	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Pengalihan	442.800	247.000	5.450	689.800	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023
14	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Pengalihan	398.400	222.300	5.450	620.700	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini Dewan Komisaris dan Direksi yang telah memenuhi kriteria baik dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.



Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Sunarso	Direktur Utama	60 tahun	Laki-laki	Sarjana Agronomi Magister Administrasi Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Wholesale Banking, Corporate Banking, Micro Banking, Risk Management, Administrasi Bisnis, Manajemen
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	60 tahun	Laki-laki	Sarjana Agronomi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Consumer Banking, Wholesale Banking, Risk Management, Manajemen
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Kedokteran Gigi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang penerbangan dan perbankan	Consumer Banking, Wholesale Banking, Risk Management, Manajemen
Supari	Direktur Bisnis Mikro	57 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Micro Banking, Risk Management, Manajemen
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	53 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), Wholesale Banking, Manajemen
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Akuntansi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Wholesale Banking, Corporate Banking, Risk Management, Akuntansi, Manajemen
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang penerbangan dan perbankan	Risk Management, Sharia Banking, Corporate Banking, Hukum, Manajemen
Agus Winardono	Direktur Human Capital	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi Perusahaan Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Human Capital, Risk Management, Ekonomi, Manajemen Keuangan
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	55 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Industri Pertanian Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Retail Banking, International Business Banking, Risk Management, Master Administrasi Bisnis Advance
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	45 tahun	Perempuan	Sarjana Peternakan Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Risk Management, Finance & Strategic
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	43 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Informatika Master of Science	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	IT & Digital Banking, Risk Management, Manajemen
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	49 tahun	Laki-laki	Sarjana Akuntansi Master Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Finance, Risk Management, Akuntansi, Keuangan

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	50 tahun	Laki-laki	Sarjana Akuntansi Master of Business Administration	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko	Banking, Finance, Risk Management
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	52 tahun	Perempuan	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen	Finance, Economics, Management
Hadiyanto*	Komisaris	61 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Master of Law Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum ekonomi, dan manajemen	Law, Economics, Management
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	48 tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi & Matematika Magister Manajemen Ph.D. in Economics,	Memiliki pengalaman dalam bidang statistik, ekonomi dan manajemen	Statistic, Economics, Management
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	65 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam hukum, perbankan dan pengawasan bank	Law, Banking, Audit
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	55 tahun	Perempuan	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas Magister of Science	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan regulasi	Law, Social Politics, Regulation
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen	Capital Market, Technology, Management
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	66 tahun	Laki-laki	Doktorandus Manajemen Sarjana Hukum Magister Hukum Doctor Hukum	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan manajemen	Law, Social Politics, Management
Agus Riswanto	Komisaris Independen	61 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Magister Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum, penegakan hukum dan regulasi	Law, Intelligent, Regulation
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	58 tahun	Perempuan	Sarjana Arsitektur	Memiliki pengalaman dalam ESG, logistik dan manajemen	ESG, Logistics, Management
Awan Nurmawan Nuh**	Komisaris	55 tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi Master of Business Taxation	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi, audit dan perpajakan	Accounting, Audit, Taxation

*Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

**Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris merupakan organ yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan Perseroan. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar

Perseroan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib Sekretariat Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 10- KOM/11/2018 tanggal



01 November 2018 yang memuat tugas dan tanggung jawab sekretariat Dewan Komisaris diantaranya:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf, Sekretaris Komisaris, dan Pelaksana di Lembaga Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan rapat-rapat Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif kesekretariatan dan protokoler Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Perseroan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan.
5. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Menyusun laporan tentang pelaksanaan *Self Assessment* GCG Dewan Komisaris dan Komite setiap semester.
7. Mengkoordinasikan tercapainya pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris.
8. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



Widia Jessti

Sekretaris Dewan Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Pekalongan pada tahun 1986. Usia 37 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Tangerang Selatan.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Diploma III - Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006)
- Sarjana Ekonomi (Akuntansi) - Universitas Indonesia (2009)
- Master of Business Administration (Global Banking and Finance) - University of Birmingham, UK (2016)



PENGALAMANKERJA

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Februari 2021 - April 2022)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (April 2019 - Februari 2021)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) MIND ID (Maret 2017 - April 2019)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (November 2011 - September 2014)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor NOKEP: 05-KOM/BRI/04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

April 2022 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Jabatan Fungsional di Kementerian BUMN

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Advanced Leader Program	Bali, 10 Juli 2023	IMD/Bank Mandiri
BSE GRS <i>Masterclass</i> 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
ESG for Boards - Governance of ESG	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
GRC Integrated Information for Supervisory Board	Jakarta, 05 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris, yaitu:

- Mengkoordinasikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di lingkungan Dewan Komisaris.
- Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
- Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti: RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan.
- Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.
- Menyusun konsep agenda-agenda, waktu dan tempat pelaksanaan rapat berdasarkan arahan Dewan Komisaris dan masukan dari Komite Dewan Komisaris.
- Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan memperoleh materi rapat dari sumber-sumber yang terkait dengan agenda rapat, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada Komite jika diperlukan.
- Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perusahaan.
- Menyusun konsep risalah rapat dan menyimpan salinannya.
- Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/ pertimbangan pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.

2. Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan

Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan, dan protokoler Dewan Komisaris, termasuk dalam hal:

- Melakukan penatakelolaan persuratan, arsip dan dokumen lainnya yang ditujukan kepada Dewan Komisaris berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.
- Mengkoordinasikan tindak lanjut arahan/disposisi Dewan Komisaris atas surat dan/atau dokumen tersebut, termasuk melakukan korespondensi dengan pihak manajemen Perseroan, pihak eksternal, dan pihak-pihak lainnya, khusus hal-hal yang telah mendapatkan keputusan Dewan Komisaris yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite.
- Melakukan penatakelolaan kegiatan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, antara lain keikutsertaan dalam program *training/workshop/seminar*, kunjungan kerja, perjalanan dinas, dan lain-lain, termasuk memastikan tersedianya sarana dan logistik untuk mendukung kelancaran kegiatan/acara tersebut.

3. Penyusunan Konsep Rencana Kerja dan Laporan Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun:

- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
- Laporan mengenai hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris kepada RUPS, serta laporan-laporan lainnya yang diperlukan.

4. Pelaksanaan Tugas Lain yang menjadi Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Mengacu pada Piagam Sekretaris Dewan Komisaris yang disetujui oleh Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugas lain, termasuk:



- a. Mengkoordinasikan dan melakukan tindak lanjut atas permintaan Dewan Komisaris dalam pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penilaian mandiri atas *Good Corporate Governance* pada Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Perseroan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit telah diatur dalam:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
9. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
10. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
11. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
12. Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara.
13. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.
14. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 02-KOM/BRI/02/2020 dan Nokep: 01-DIR/KPT/02/2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
15. Surat Keputusan Direksi Nomor KU. 02 -DIR/KEP/10/2023 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
16. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan perubahan-perubahannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan; keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan Perseroan berkenaan dengan:

Laporan Keuangan

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Perseroan.
2. Mengevaluasi kinerja SKAI.
3. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit tahunan, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
6. Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan terhadap Piagam Audit Intern.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan terhadap penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
8. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
10. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
12. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
13. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit

termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.

14. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
15. Melakukan koordinasi dan rapat teknis dengan Komite Audit dan manajemen Perusahaan Anak dalam rangka pengawasan tata kelola terintegrasi.

Auditor Independen

1. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
3. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
4. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit harus mempertimbangkan:
 - a. Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
5. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi BRI dan/atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.



7. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk perusahaan anak yang dikonsolidasi. KAP untuk perusahaan anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh perusahaan anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
8. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre-approval*) atas jasa non asuransi yang akan ditugaskan kepada KAP.
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui:
 - k. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - l. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - m. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
 - n. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan
 - o. Hal lainnya.
10. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direksi BRI dan/atau Pengurus DPLK BRI.

Kepatuhan (Compliance)

1. Memonitor efektivitas kebijakan dan melakukan penelaahan serta rekomendasi perbaikan atas laporan fraud yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Pengaduan (Whistleblowing System)

Unit Pengelola *Whistleblowing System* Komite Audit memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu:

1. Menerima dan mendokumentasikan seluruh laporan indikasi pelanggaran kategori pelanggaran proses akuntansi dan laporan keuangan BRI dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BRI, Anggota Direksi BRI, SEVP dan Anggota Dewan Komisaris/Direksi Perusahaan Anak yang berasal dari aplikasi *Whistleblowing System*.
2. Menerima dan menindaklanjuti terkait laporan dari Unit Pengelola *Whistleblowing System* SKAI dengan kriteria indikasi pelanggaran proses akuntansi dan laporan keuangan BRI dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan

Komisaris BRI, Anggota Direksi BRI, SEVP dan Anggota Dewan Komisaris/Direksi Perusahaan Anak.

3. Unit Pengelola *Whistleblowing System* Komite Audit (Anggota dan Pemimpin Unit Pengelola *Whistleblowing System* Komite Audit) melakukan verifikasi dan validasi bersama dengan Dewan Komisaris terkait laporan *Whistleblowing System* yang diterima, serta mengelompokkan laporan *Whistleblowing System* yang diterima, serta mengelompokkan laporan *Whistleblowing System* yang termasuk berkomunikasi dengan pelapor untuk mengumpulkan bukti/dokumen tambahan atas pelaporan.
4. Unit Pengelola *Whistleblowing System* Komite Audit mengajukan permohonan persetujuan rekapitulasi laporan *Whistleblowing System* kategori Tindak Pidana Korupsi kepada Dewan Komisaris setiap bulan untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK melalui Aplikasi *Whistleblowing System*.
5. Melakukan pengkinian informasi pada aplikasi *Whistleblowing System* diantaranya kategori indikasi pelanggaran dan sarana pelaporan apabila tidak sesuai dengan kriteria laporan *Whistleblowing System* serta status progress tindak lanjut laporan setiap ada perubahan status.
6. Menunjuk Unit Kerja Investigasi/Pihak Independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan indikasi pelanggaran.
7. Menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Unit Kerja Investigasi/Pihak Independen kepada Unit Kerja Berwenang untuk ditindaklanjuti.
8. Memastikan hasil rekomendasi Unit Kerja Investigasi/Pihak Independen telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
9. Melakukan *update* pada aplikasi *Whistleblowing System* terhadap setiap pelaporan *Whistleblowing System* yang sudah ditindaklanjuti.
10. Menyampaikan laporan rekapitulasi *Whistleblowing System* setiap bulan kepada Dewan Komisaris.
11. Menatakerjakan seluruh dokumen tindak lanjut *Whistleblowing System* pada aplikasi *Whistleblowing System*.
12. Menatakerjakan laporan hasil pemeriksaan dari Unit Kerja investasi dan pengkinian data laporan pada aplikasi *Whistleblowing System*.
13. Menjaga seluruh kerahasiaan informasi identitas Pelaporan, informasi indikasi pelanggaran dan laporan hasil investigasi.

Perusahaan Anak

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Internal BUMN induk maupun anak perusahaan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan audit intern BRI dan kebijakan audit intern perusahaan anak.
3. Melakukan *oversight* atas pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan perusahaan anak.
4. Menelaah kecukupan pengendalian internal perusahaan anak dan secara konglomerasi keuangan.

Lain-Lain

1. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
3. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit Perseroan diatur dalam Surat Keputusan Nokep: 06-KOM/05/2022 tentang Piagam Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan prinsip GCG di Perseroan.

Isi Piagam Komite Audit antara lain:

Bab I	Pendahuluan Pengertian Umum Dasar Hukum
Bab II	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Tujuan Tugas dan Tanggung Jawab serta Kewenangan Struktur Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan Kode Etik Waktu Kerja Rapat Pelaporan Tata Cara dan Prosedur Kerja Surat/Dokumen Tindak Lanjut Hasil Rapat Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
Bab III	Penutup

Wewenang Komite Audit

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawab Komite Audit untuk:

1. Memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsi komite audit sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan Pekerja, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya. (jika diperlukan).
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:

1. Seorang Komisaris Independen.
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.



Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Periode 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023

No	Nama	Jabatan	Keahlian	Keterangan
1	Hendrikus Ivo	Ketua	Law, Banking, Audit	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Anggota	Finance, Economics, Management	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
3	Heri Sunaryadi	Anggota	Capital Market, Technology, Management	Komisaris Independen
4	Agus Riswanto	Anggota	Law, Intelligent, Regulation	Komisaris Independen
5	Sahat Pardede	Anggota	Accounting, Audit	Pihak Independen
6	Irwanto	Anggota	Accounting, Banking	Pihak Independen
7	Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	Banking, Audit	Pihak Independen

Periode 3 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Keahlian	Keterangan
1	Hendrikus Ivo	Ketua	Law, Banking, Audit	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Anggota	Finance, Economics, Management	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
3	Heri Sunaryadi	Anggota	Capital Market, Technology, Management	Komisaris Independen
4	Agus Riswanto	Anggota	Law, Intelligent, Regulation	Komisaris Independen
5	Sahat Pardede	Anggota	Accounting, Audit	Pihak Independen
6	Irwanto	Anggota	Accounting, Banking	Pihak Independen
7	Duma Riana Hutapea	Anggota	Accounting, Regulation	Pihak Independen

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Hendrikus Ivo
Ketua Komite Audit/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rofikoh Rokhim
Anggota Komite Audit/
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Heri Sunaryadi
Anggota Komite Audit/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Agus Riswanto
Anggota Komite Audit/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris



Sahat Pardede

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Balige pada tahun 1961. Usia 64 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1989)
- Master of Business Administration, Saint Mary's University (1993)



PENGALAMANKERJA

- Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat, dan Partners (2021 - sekarang)
- Financial Expert PT Telkom Indonesia (2014)
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006)
- Komite Pengawas SKK Migas (2020)



SERTIFIKASI

Certified Public Accountant (CPA)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 246-DIR/HCB/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



PERIODEMENJABAT

Periode I



MASA JABATAN

31 Maret 2020 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

- Anggota Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk (2014 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (2021 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Petrosea Tbk (2022 - sekarang)
- Tenaga Ahli PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2022 - sekarang)



Irwanto

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Padang pada tahun 1962. Usia 61 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (1988)
- Magister Akuntansi Universitas Indonesia (2000)



PENGALAMANKERJA

- Anggota Komite Audit dan Pemantau Manajemen Risiko PT Bank J Trust (2020 - Februari 2021)
- Anggota Badan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (2019 - sekarang)
- Anggota Komite Audit dan Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Resona Perdania (2018 -Maret 2021)
- Bank Indonesia (1994 – 2018)



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3 (BSMR) dan 4 (LSPP)
- Sertifikasi Komite Audit (IKAI)
- Sertifikasi Chartered Accountant (CA)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 195-DIR/HCB/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



PERIODEMENJABAT

Periode I



MASA JABATAN

26 April 2021 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



Duma Riana Hutapea

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Balige pada tahun 1961. Usia 62 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara (1986)
- Master of Science in Business Administration, University of Illinois, USA (1999)



PENGALAMAN KERJA

- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi / Pihak Independen BRI (2021 – sekarang)
- Direktur Eksekutif, Unit Kerja Pendukung Deputy Komisioner Pengawas Perbankan IV, OJK (2020 – 2021)
- Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK, Kantor OJK Regional 1, Jakarta-Banten (2015 – 2019)
- Direktur Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan, OJK (2015 – 2015)
- Deputy Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, OJK (2013 – 2014)
- Bank Indonesia, Departemen Kredit, Departemen Keuangan, Departemen Kredit dan UMKM, Departemen Penelitian dan Pengembangan Perbankan, Departemen Pengendalian Pengawasan Perbankan (1989-2013)



SERTIFIKASI

-



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 2351-DIR/HCB/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



PERIODE MENJABAT

Periode I



MASA JABATAN

3 Oktober 2023 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kemampuan
 - a. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - c. Wajib mematuhi kode etik Perseroan dan Komite Audit.
 - d. Setiap tahun wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau audit paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan. Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Hendrikus Ivo	Ketua	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam hukum, perbankan dan pengawasan bank
Rofikoh Rokhim	Anggota	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang <i>Public Finance</i> Master <i>International & Development Economics</i> Doktor bidang <i>Ekonomi</i>	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heri Sunaryadi	Anggota	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen
Agus Riswanto	Anggota	Sarjana Hukum Magister Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum, penegakan hukum dan regulasi
Sahat Pardede	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister Administrasi Bisnis	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan audit
Irwanto	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan pengawasan bank
Bardiyono Wiyatmojo*)	Anggota	Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Magister Administrasi Bisnis Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dibidang audit dan pengawasan perbankan
Duma Riana Hutapea**)	Anggota	Sarjana Akuntansi Master of Science in Business Administration	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan regulasi

*) Efektif sejak 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023

**) Efektif sejak 3 Oktober 2023 sampai sekarang

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Hendrikus Ivo	Rofikoh Rokhim	Heri Sunaryadi	Agus Riswanto	Sahat Pardede	Irwanto	Bardiyono Wiyatmojo*)	Duma Riana Hutapea**)
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√

*) efektif sejak 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023

**) efektif sejak 3 Oktober 2023 sampai sekarang

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

Pengaturan rapat Komite Audit diatur sebagai berikut:

- Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Komite Audit dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan.
- Rapat Komite Audit diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan, atau tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Komite Audit.
- Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan secara daring melalui telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta dapat berkomunikasi dan berinteraksi dalam rapat Komite Audit.
- Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan agenda dan jadwal rapat dengan mempertimbangkan permintaan dan masukan dari Komite Audit.
- Materi rapat Komite Audit tersedia dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan diluar jadwal materi rapat dapat disampaikan sebelum rapat dilaksanakan.



Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	Senin, 16 Januari 2023	Usulan Perencanaan Audit Tahunan SKAI 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
2	Selasa, 31 Januari 2023	Closing Meeting Audit Laporan Keuangan BRI Tahun 2022	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
3	Selasa, 14 Februari 2023	Evaluasi Top 50 debitur Terbesar dan/atau <i>Politically Exposed Person</i>	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
4	Selasa, 21 Maret 2023	Proses Bisnis Investigasi Desk Fraud	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
5	Kamis, 13 April 2023	Hasil Audit EY dan Rapat Teknis Terhadap Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun 2022	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
6	Kamis, 13 April 2023	Reviu SKAI atas Publikasi Laporan Keuangan Posisi 31 Maret 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
7	Kamis, 4 Mei 2023	Perspektif Independensi SEVP SKAI Tahun 2022	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Sahat Pardede 5. Irwanto 6. Bambang Harudi 7. Bardiyono Wiyatmojo
8	Kamis, 4 Mei 2023	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit SKAI Triwulan I 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Sahat Pardede 5. Irwanto 6. Bambang Harudi 7. Bardiyono Wiyatmojo
9	Selasa, 27 Juni 2023	Hasil Audit SKAI atas Kejadian Fraud dan Mitigasi Risikonya	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
10	Selasa, 4 Juli 2023	Reviu Metodologi Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
11	Selasa, 4 Juli 2023	Progress Implementasi <i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR)	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
12	Selasa, 25 Juli 2023	Penelaahan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit SKAI Semester I Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
13	Selasa, 1 Agustus 2023	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
14	Selasa, 8 Agustus 2023	Kick Off dan Progress Limited Review Laporan Keuangan BRI dan Konsolidasi posisi 30 Juni 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
15	Selasa, 15 Agustus 2023	Closing Meeting Laporan Kaji Ulang SKAI Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
16	Selasa, 22 Agustus 2023	Progress Audit Kepatuhan	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
17	Kamis, 24 Agustus 2023	Closing Meeting Limited Review Laporan Keuangan BRI Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
18	Kamis, 5 Oktober 2023	Kick Off Meeting Audit Laporan Keuangan & Laporan Keuangan PUMK Posisi 31 Desember 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea
19	Selasa, 10 Oktober 2023	Progress Tim Task Force Tindak lanjut Hasil Audit	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea
20	Rabu, 25 Oktober 2023	Reviu SKAI atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea
21	Selasa, 7 November 2023	Penelaahan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit SKAI Triwulan III 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea
22	Selasa, 12 Desember 2023	Kick Off Meeting Audit Laporan Keuangan DPLK Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi	4. Sahat Pardede 5. Irwanto 6. Duma Riana Hutapea
23	Selasa, 12 Desember 2023	Progress Laporan Hasil Audit EY	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama Tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 23 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hendrikus Ivo	Ketua	23	23	100%
Rofikoh Rokhim	Anggota	23	23	100%
Heri Sunaryadi	Anggota	23	23	100%
Agus Riswanto	Anggota	23	23	100%
Sahat Pardede	Anggota	23	23	100%
Irwanto	Anggota	23	23	100%
Bardiyono Wiyatmojo *)	Anggota	17	17	100%
Duma Riana Hutapea **)	Anggota	6	6	100%

*) efektif sejak 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023

***) efektif sejak 3 Oktober 2023 sampai sekarang



Penghasilan Komite Audit

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite. Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Hendrikus Ivo	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Rofikoh Rokhim	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Heri Sunaryadi	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Agus Riswanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Sahat Pardede	Anggota	<i>IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant</i> - Internal Audit and Risk Management Roles in ESG - BCA Sustainability Practices - Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance	Batam, 30 - 31 Agustus 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		- BSE GRS Masterclass 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo - BLMI GRC Masterclass – Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) - BLMI GRC Masterclass – Pre IPO dan Post IPO	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		- ESG for Boards - Governance of ESG - BSE GRC Masterclass - Introducing to ESG & IFC Performance Standard	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		<i>GRC Integrated Information for Supervisory Board</i>	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		<i>Joint Venture between SOE and Private Sector</i>	Jakarta, 19 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		<i>CG Methodology and Environmental and Social Management Systems</i>	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Irwanto	Anggota	GRC Masterclass – ESG for Auditor	Jakarta, 13 Juli 2023	BUMN School of Excellence
		<p>“IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit and Risk Management Roles in ESG 2. BCA Sustainability Practices 3. Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance 	Batam, 30 - 31 Agustus 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		<ul style="list-style-type: none"> - BSE GRS Masterclass 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo - BLMI GRC Masterclass - Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) - BLMI GRC Masterclass - Pre IPO dan Post IPO 	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		<ul style="list-style-type: none"> - ESG for Boards - Governance of ESG - BSE GRC Masterclass - Introducing to ESG & IFC Performance Standard 	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC Integrated Information for Supervisory Board	Jakarta , 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
Bardiyono Wiyatmojo*)	Anggota	CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di lingkungan BUMN	Jakarta, 20 Desember 2023	BUMN School of Excellence
		<p>“IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit and Risk Management Roles in ESG 2. BCA Sustainability Practices 3. Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance 	Batam, 30 - 31 Agustus 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		<ul style="list-style-type: none"> - BSE GRS Masterclass 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo - BLMI GRC Masterclass – Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) - BLMI GRC Masterclass – Pre IPO dan Post IPO 	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		State Owned Enterprises Rating	Jakarta, 20 September 2023	BUMN School of Excellence
		Governance and Integrity of Financial Reporting	Jakarta, 26 September 2023	BUMN School of Excellence
		<ul style="list-style-type: none"> - ESG for Boards - Governance of ESG - BSE GRC Masterclass - Introducing to ESG & IFC Performance Standard 	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC Integrated Information for Supervisory Board	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Duma Riana Hutapea**)	Anggota	<p>“IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit and Risk Management Roles in ESG 2. BCA Sustainability Practices 3. Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance 	Batam, 30 - 31 Agustus 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		<ul style="list-style-type: none"> - BSE GRS Masterclass 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo - BLMI GRC Masterclass - Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) - BLMI GRC Masterclass - Pre IPO dan Post IPO 	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		<ul style="list-style-type: none"> - ESG for Boards - Governance of ESG - BSE GRC Masterclass - Introducing to ESG & IFC Performance Standard 	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC Integrated Information for Supervisory Board	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		Joint Venture between SOE and Private Sector	Jakarta, 19 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence

*)Efektif sejak 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023

**)Efektif sejak 3 Oktober 2023 sampai sekarang

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan Komite pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Intern

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Menelaah dan memberikan rekomendasi persetujuan atas Perencanaan Audit Tahunan	Rekomendasi atas Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI Tahun 2023	14 Februari 2023
2	Menelaah laporan pokok-pokok hasil audit (LHA) secara triwulan	1. Evaluasi laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II 2022	31 Januari 2023
		2. Penelaahan Laporan Keuangan posisi 31 Maret 2023	13 April 2023
		3. Penelaahan Laporan Keuangan BRI Triwulan III 2023	23 Oktober 2023
		4. Penelaahan atas Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan I Tahun 2023	23 Mei 2023
		5. Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan II Tahun 2023	28 Juli 2023
		6. Penelaahan Laporan Keuangan BRI Triwulan III 2023	23 Oktober 2023
		7. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan Tahun III 2023	14 Desember 2023
3	Top 50 Debitur dan Politically Exposed Person (PEP)	Penelaahan Top 50 Debitur dan Politically Exposed Person (PEP)	28 Februari 2023

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
4	Kaji Ulang SKAI oleh Pengendali Mutu Independen	1. Rekomendasi atas Pengadaan Jasa Pengendali Mutu Independen Dari Pihak Ekstern Untuk Kaji Ulang Kinerja Satuan Kerja Audit Intern BRI Tahun 2023	24 Januari 2023
		2. Rekomendasi Konsultan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk Kaji Ulang Kinerja SKAI BRI Tahun 2023.	21 Maret 2023
		3. <i>Closing Meeting</i> Laporan Kaji Ulang Kinerja SKAI Tahun 2023	14 Agustus 2023
		4. Laporan Kaji Ulang Kinerja SKAI BRI Tahun 2023.	22 Agustus 2023
5	Tugas Komite Audit lainnya	1. Progress bisnis <i>Desk Fraud</i>	21 Maret 2023
		2. Penelaahan laporan Audit SKAI	11 Juli 2023
		3. Penelaahan laporan Audit SKAI	18 Juli 2023
		4. Permintaan Pelaksanaan Audit	21 Juli 2023
		5. Penelaahan laporan Audit SKAI	19 September 2023
		6. Penelaahan laporan Audit SKAI	29 September 2023
		7. Penelaahan <i>micro manpower planning</i>	10 Oktober 2023

2. Komite Audit dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengadaan jasa audit Kantor Akuntan Publik	1. Penunjukan Tim Pengadaan KAP dalam rangka Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PUMK BRI tahun 2023	12 Januari 2023
		2. Rekomendasi Persetujuan Atas Usulan <i>Scope Audit</i> KAP Dalam Rangka Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PUMK BRI Tahun Buku 2023.	8 Februari 2023
		3. Rekomendasi atas Persetujuan penetapan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil BRI Tahun Buku 2023.	20 Februari 2023
		4. Persetujuan awal (<i>pre-concurrence</i>) atas pemberian jasa non asuransi	11 Mei 2023
		5. Permohonan <i>Limited Review</i> pada Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2023	27 Juni 2023
		6. Pergantian Rekan Penanggung jawab dalam rangka audit laporan keuangan konsolidasian BRI Posisi 31 Desember 2023	15 Juli 2023
		7. Persetujuan awal (<i>pre-concurrence</i>) atas pemberian jasa non asuransi.	10 Oktober 2023
2	Laporan Keuangan	1. <i>Closing meeting</i> Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian BRI tahun buku 2022	31 Januari 2023
		2. Hasil Audit Laporan Keuangan Program PUMK BRI posisi 31 Desember 2022	23 Mei 2023
		3. <i>Closing Meeting Limited Review</i> Laporan Keuangan BRI posisi 30 Juni 2023	24 Agustus 2023
3	Laporan evaluasi Komite Audit	Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan BRI Tahun Buku 2022.	17 April 2023

3. Komite Audit dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas lainnya

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pemeriksaan Umum BRI Tahun 2023 oleh OJK	<i>Exit meeting</i> BRI tahun 2023	7 Desember 2023



4. Komite Audit dengan Manajemen

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Rekomendasi Komite Audit	1. Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Jasa Audit Umum KAP	7 Maret 2023
		2. Rekomendasi atas penilaian Independensi SEVP SKAI tahun 2022	9 Mei 2023
		3. Laporan evaluasi Implementasi ISO 370001:2016 SMAP	23 Mei 2023
		4. <i>Progress Implementasi Internal Control over Financial Report (ICoFR)</i>	4 Juli 2023
		5. Reviu Metodologi Perhitungan CKPN	4 Juli 2023
2	Evaluasi Komite Audit	1. Evaluasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan bulan Semester II 2022	31 Januari 2023
		2. Evaluasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan bulan Semester I 2023	1 Agustus 2023

5. Komite Audit dengan DPLK

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Laporan keuangan	1. Rekomendasi Penunjukan KAP DPLK th 2022	10 Januari 2023
		2. <i>Kick off meeting</i> Audit atas laporan keuangan DPLK BRI Tahun 2021	19 Januari 2023
		3. Laporan <i>Progress</i> Audit KAP atas laporan Keuangan DPLK BRI Posisi 31 Desember 2023	21 Maret 2023
		4. Laporan Evaluasi Komite Audit BRI terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas laporan Keuangan DPLK BRI tahun buku 2022	27 Juni 2023
2	Pengadaan jasa audit	1. Pengadaan jasa audit KAP untuk laporan Keuangan DPLK BRI th 2023	15 Agustus 2023
		2. Rekomendasi Penetapan Akuntan Publik atau KAP atas Laporan Keuangan dan laporan Investasi DPLK BRI	17 Oktober 2023

6. Internal Komite Audit

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	RKA Komite Audit	1. Pembagian Tugas dan penanggung jawab dalam Pencapaian Rencana Kerja Komite audit Tahun 2023	10 Januari 2023
		2. RKA Komite Audit 2024	29 Desember 2023

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko

Komite Audit menilai bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang berkaitan dengan

Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
10. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
11. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Surat keputusan Dewan Komisaris No. B.13-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang mengatur diantaranya:

1. Pengertian Umum
2. Dasar Hukum
3. Tujuan Pembentukan Komite
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Kewajiban, Larangan dan Kewenangan
6. Kedudukan Komite
7. Keanggotaan Komite
8. Etika dan Waktu Kerja
9. Pelaksanaan Rapat dan Laporan
10. Penutup

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2023, jabatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan melalui Surat Keputusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nokep: 1505-DIR/HCB/09/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2. Surat Keputusan Direksi Nokep: 0637-DIR/HCB/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Calon Wakil Perseroan yang akan dijadikan Pengurus Perusahaan anak yang diusulkan oleh Direksi.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penyelarasan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dengan Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk meminta informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia dari pihak internal.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi BRI adalah sebagai berikut:

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen;
3. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang menangani kebijakan SDM (*ex officio*) atau seorang perwakilan pekerja Perseroan, anggota lainnya dapat berasal dari pihak luar Perseroan;

4. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang;
5. Dewan Komisaris dapat mengangkat Pihak Independen sebagai anggota Komite, dengan ketentuan:
 - a. Wajib memenuhi syarat:
 - tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
 - b. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
 - c. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite;
7. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
8. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Masa jabatan anggota tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
10. Penggantian anggota yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Heri Sunaryadi	Ketua	Komisaris Independen	<i>Capital Market, Technology, Management</i>
2	Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	<i>Finance, Economics, Management</i>
3	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	<i>Banking, Finance, Risk Management</i>
4	Hadiyanto*	Anggota	Komisaris	<i>Law, Economics, Management</i>
5	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	<i>Statistic, Economics, Management</i>

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
6	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	Law, Banking, Audit
7	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Law, Social Politics, Regulation
8	Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	ESG, Logistics, Management
9	Agus Riswanto	Anggota	Komisaris Independen	Law, Intelligent, Regulation
10	Paripurna P. Sugarda	Anggota	Komisaris Independen	Law, Social Politics, Management
11	E.R.A. Taufiq	Anggota	Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Parter)	Banking, Human Resources

Keterangan:

*Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023

Susunan Anggota Komite Periode 14 Maret 2023 sampai dengan 3 Juli 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Heri Sunaryadi	Ketua	Komisaris Independen	Capital Market, Technology, Management
2	Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Finance, Economics, Management
3	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	Banking, Finance, Risk Management
4	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistic, Economics, Management
5	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	Law, Banking, Audit
6	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Law, Social Politics, Regulation
7	Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	ESG, Logistics, Management
8	Agus Riswanto	Anggota	Komisaris Independen	Law, Intelligent, Regulation
9	Paripurna P. Sugarda	Anggota	Komisaris Independen	Law, Social Politics, Management
10	E.R.A. Taufiq	Anggota	Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Parter)	Banking, Human Resources

Susunan Anggota Komite Periode 4 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Heri Sunaryadi	Ketua	Komisaris Independen	Capital Market, Technology, Management
2	Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Finance, Economics, Management
3	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	Banking, Finance, Risk Management
4	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistic, Economics, Management
5	Awan Nurmawan Nuh*	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit, Taxation
5	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	Law, Banking, Audit
6	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Law, Social Politics, Regulation
7	Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	ESG, Logistics, Management
8	Agus Riswanto	Anggota	Komisaris Independen	Law, Intelligent, Regulation
9	Paripurna P. Sugarda	Anggota	Komisaris Independen	Law, Social Politics, Management
10	M. Dadang K.F.	Anggota	Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Parter)	Banking, Human Resources

Keterangan:

*Efektif setelah lulus fit and proper test OJK



Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Heri Sunaryadi
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/
Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rofikoh Rokhim
Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi/
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Kartika Wirjoatmodjo
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Utama

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Hadiyanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rabin Indrajad Hattari
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Awan Nurmawan Nuh
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Hendrikus Ivo
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/
Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dwi Ria Latifa
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/
Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Nurmaria Sarosa
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/
Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Agus Riswanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/
Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Paripurna P. Sugarda
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris



M. Dadang Permana K.F.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Partner) Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, pada tahun 1973. Usia 50 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Nokep: 0673-DIR/HCB/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Sesuai Dasar Hukum Pengangkatan



PENGALAMAN KERJA

- Division Head Human Capital Business Partner (01/06/2023 - Sekarang)
- Regional Chief Audit Denpasar (01/08/2022 - 31/05/2023)
- Department Head Talent Management & Industrial Relations, Human Capital Business Partner Division (01/01/2020 - 31/07/2022)
- Wakil Kepala Divisi Bidang Manajemen Karier & Culture, Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital (01/05/2019 - 31/12/2019)
- Kepala Bagian Pengembangan Karier, Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital (01/06/2018 - 30/04/2019)
- Kepala Bagian Human Capital, Kantor Wilayah Yogyakarta (01/10/2016 - 31/05/2018)
- Kepala Bagian Human Capital, Kantor Wilayah Denpasar (01/08/2014 - 30/09/2016)
- Kepala Bagian Human Capital, Kantor Wilayah Padang (01/09/2013 - 31/07/2014)



MASA JABATAN

4 Juli 2023 - sekarang



JABATAN RANGKAP

- Komisaris PT Upaya Purnabakti Sejahtera (BRImedika) (01/09/2023 - Sekarang)
- Kepala Divisi Human Capital Business Partner (4 Juli 2023 - sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Pertanian, Universitas Winaya Mukti, Jatinangor (1996)
- Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran, Bandung (2009)



SERTIFIKASI

Manajemen Risiko level 4 - Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heri Sunaryadi	Ketua	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen
Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang <i>Public Finance</i> Master <i>International & Development Economics</i> Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Sarjana Akuntansi Master of <i>Business Administration</i>	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko



Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Hadiyanto*	Anggota	Sarjana Hukum Master of Law Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pengawasan perbankan
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Sarjana Ekonomi & Matematika Magister Manajemen Ph.D. in Economics	Memiliki pengalaman dalam bidang statistik, ekonomi dan manajemen
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Sarjana Ekonomi Master of Business Taxation	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi, audit dan perpajakan
Hendrikus Ivo	Anggota	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam hukum, perbankan dan pengawasan bank
Dwi Ria Latifa	Anggota	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas Magister of Science	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan regulasi
Nurmaria Sarosa	Anggota	Sarjana Arsitektur	Memiliki pengalaman dalam ESG, logistik dan manajemen
Agus Riswanto	Anggota	Sarjana Hukum Magister Bidang Hukum Doktor Bidang Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum, penegakan hukum dan regulasi
Pariurna P. Sugarda	Anggota	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan manajemen
M. Dadang Permana K.F.	Anggota	Sarjana Pertanian, Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan sumber daya manusia

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	HS	RR	KW	HD*	RIH	ANN	HI	DRL	NS	AR	PPS	ERT**	MDK***
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023

** Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Juli 2023

*** Mulai menjabat sejak tanggal 4 Juli 2023

Keterangan:

KW	Kartika Wirjoatmodjo	DRL	Dwi Ria Latifa	DRL	Dwi Ria Latifa
RR	Rofikoh Rokhim	HS	Heri Sunaryadi	NS	Nurmaria Sarosa
HD	Hadiyanto	PPS	Pariurna Poerwoko Sugarda	AR	Agus Riswanto
RIH	Rabin Indrajad Hattari	AR	Agus Riswanto	ERT	E.R.A. Taufiq
HI	Hendrikus Ivo	ANN	Awan Nurmawan Nuh	MDK	M. Dadang Permana K.F.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengaturan rapat Komite diatur sebagai berikut:

- Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
- Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
- Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
- Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
- Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat.
- Rapat dipimpin oleh ketua Komite.
- Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
- Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang memutuskan.
- Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
- Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
- Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
- Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1	Selasa, 14 Februari 2023	Evaluasi <i>Talent Pool</i> BRI	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Hadiyanto E.R.A. Taufiq	Nominasi
2	Selasa, 7 Maret 2023	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Konsultan	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Hadiyanto E.R.A. Taufiq	Remunerasi



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
3	Senin, 13 Maret 2023	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPS Tahunan Tahun 2023	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Hadiyanto E.R.A. Taufiq	Nominasi
4	Selasa, 21 Maret 2023	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Konsultan	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Remunerasi
5	Selasa, 21 Maret 2023	Lanjutan Evaluasi Talent Pool BRI (berasal dari Perusahaan Anak)	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
6	Selasa, 4 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
7	Selasa, 11 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
8	Senin, 17 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
9	Selasa, 23 Mei 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
10	Selasa, 30 Mei 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
11	Selasa, 25 Juli 2023	Nominasi Jabatan Corporate Secretary BRI	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
12	Selasa, 8 Agustus 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
13	Selasa, 15 Agustus 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
14	Selasa, 22 Agustus 2023	Pembahasan Ketentuan Remunerasi Komisaris Internal Direksi dan Penyesuaian terkait Dewan	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Remunerasi



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
15	Selasa, 26 September 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
16	Selasa, 10 Oktober 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
17	Selasa, 31 Oktober 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
18	Kamis, 23 November 2023	Konsultasi Anggaran Tantiem dengan Kementerian BUMN	Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa M. Dadang K.F.	Remunerasi
19	Selasa, 12 Desember 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
20	Senin, 18 Desember 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 20 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Heri Sunaryadi	Ketua	20	20	100%
Rofikoh Rokhim	Sekretaris	20	19	95%
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	20	18	90%
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	20	18	90%
Hendrikus Ivo	Anggota	20	20	100%
Dwi Ria Latifa	Anggota	20	19	95%
Nurmaria Sarosa	Anggota	20	20	100%
Paripurna P. Sugarda	Anggota	20	19	95%
Agus Riswanto	Anggota	20	18	90%
Hadiyanto*	Anggota	3	3	100%
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	18	17	94%
E.R.A. Taufiq**	Anggota	10	10	100%
M. Dadang K.F.***	Anggota	10	10	100%

Keterangan:

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023

** Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Juli 2023

*** Mulai menjabat sejak tanggal 4 Juli 2023

Program Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Heri Sunaryadi	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Hendrikus Ivo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Dwi Ria Latifa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Nurmaria Sarosa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Pariurna P. Sugarda	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Agus Riswanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
M. Dadang K.F.	Anggota	<i>Executive Education Program - High Impact Leadership</i>	Tanggal 18-22 September 2023 / <i>Columbia Business School - New York</i>	<i>Columbia Business School & BRI Corporate University</i>
		<i>BRILiaN Specialist Development Program - Dynamic Internal Audit in Agile Business Environment "Kredit Briguna"</i>	Tanggal 30 Mei - 7 Juni 2023 / <i>Online</i>	<i>Audit Standard & Quality Development Division & BRI Corporate University</i>
		<i>BRILiaN Specialist Development Program - Teknik Review Penulisan Laporan Audit, Agile Audit Proses, Consulting Process</i>	Tanggal 2-3 Maret 2023 / <i>Jakarta</i>	<i>Audit Standard & Quality Development Division & BRI Corporate University</i>

Penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite. Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan Komite pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Nominasi Calon Pengurus Perseroan

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 14 Februari 2023	Evaluasi <i>Talent Pool</i> BRI
2	Senin, 13 Maret 2023	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPS Tahunan Tahun 2023
3	Selasa, 21 Maret 2023	Lanjutan Evaluasi <i>Talent Pool</i> BRI (berasal dari Perusahaan Anak)

2. Nominasi Calon Pengurus Perusahaan Anak atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di Perusahaan Anak atau pihak terkait

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 4 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
2	Selasa, 11 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
3	Senin, 17 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
4	Selasa, 23 Mei 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
5	Selasa, 30 Mei 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
6	Selasa, 8 Agustus 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
7	Selasa, 15 Agustus 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
8	Selasa, 26 September 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
9	Selasa, 10 Oktober 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
10	Selasa, 31 Oktober 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
11	Selasa, 12 Desember 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
12	Senin, 18 Desember 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak

3. Reviu Kebijakan dan Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 7 Maret 2023	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Konsultan
2	Selasa, 21 Maret 2023	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Konsultan
3	Selasa, 22 Agustus 2023	Pembahasan Penyesuaian Ketentuan Internal terkait Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
4	Rabu, 22 November 2023	Pembahasan Anggaran Tantiem dan LTI tahun 2024
5	Kamis, 23 November 2023	Konsultasi Anggaran Tantiem dengan Kementerian BUMN

4. Nominasi dan Evaluasi Pejabat Perseroan

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 25 Juli 2023	Nominasi Jabatan Corporate Secretary BRI

5. Nominasi dan Evaluasi Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 26 September 2023	Pembaharuan Susunan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris

Keterangan: Pembahasan dilakukan dalam rapat Dewan Komisaris

Secara umum Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada penjelasan di atas telah disampaikan rincian rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali antara lain melakukan pembahasan Evaluasi Kinerja Direksi, Nominasi Calon Pengurus Perseroan, Evaluasi *Talent Pool*, Nominasi Pengurus Perusahaan Anak, Reviu Kebijakan dan Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta terkait Nominasi dan Evaluasi Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi menilai, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai contoh, dalam hal pemilihan calon Direksi, setiap calon terlebih dahulu harus mengikuti *assessment* yang dilakukan oleh pihak independen dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi calon Pengurus Perseroan berdasarkan data *Top Talent* BRI yang berasal dari Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau Direksi

Perusahaan Anak yang selanjutnya menjalani *Fit and Proper Test* oleh Dewan Komisaris dengan metode wawancara langsung.

Komite Nominasi dan Remunerasi menilai pengukuran kinerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi saat ini dinilai telah mencukupi. Khusus bagi Direksi telah diterapkan penilaian kinerja secara individu yang dapat mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dari masing-masing Direksi tanpa mengesampingkan bahwa terdapat kinerja individu Direksi yang bersifat kolegial (dipengaruhi/mempengaruhi kinerja Direksi lain atau harus dikerjakan bersama Direksi lain).

Dalam hal kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi menilai bahwa Direksi telah menerapkan sistem, kriteria dan prosedur yang *prudent*, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan remunerasi, Perusahaan dinilai telah menerapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan kinerja yang dicapai, *benchmark* ke industri dan *peers group* baik pada level domestik dan regional serta didasarkan pada evaluasi yang komprehensif yang dibantu oleh konsultan independen yang kompeten. Demikian pula dengan penetapan remunerasi bagi pekerja secara keseluruhan diterapkan secara wajar, adil dan memotivasi pekerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan remunerasi yang diberikan dalam industri.

Kebijakan Rencana Suksesi Direksi

Suksesi Direksi perusahaan dilaksanakan berdasarkan tujuan jangka panjang perusahaan. Pelaksanaan suksesi Direksi mempertimbangkan dari berbagai aspek diantaranya:

1. Integritas
2. Latar belakang bidang pekerjaan,
3. Pengalaman kerja dan
4. Kepemimpinan.

Prinsip pelaksanaan Suksesi Direksi didasarkan pada asas Tata Kelola Perusahaan yang baik sehingga dapat menjamin keberlangsungan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. BRI memiliki kebijakan *talent pool candidate* untuk menyeleksi pegawai-pegawai yang potensial untuk menduduki posisi pimpinan di Perusahaan maupun Perseroan BUMN lain. Selain itu perusahaan juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap pejabat eksekutif maupun pejabat dibawahnya untuk dapat menjadi penerus selanjutnya sehingga kepemimpinan dan karakter tetap cocok dan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan diperlukan oleh perusahaan.

Kandidat yang terpilih kemudian diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya menjalani prosedur pencalonan Direksi berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022 Tahun 2022



tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) merupakan salah satu Komite di bawah Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko

1. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
5. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beserta perubahan-perubahannya.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki Pedoman Kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 mengatur tentang:

1. Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab.
2. Pembagian kerja.
3. Waktu dan etika kerja.
4. Rapat Komite.
5. Struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

KPMR membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit risiko yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan. Tugas dan tanggung KPMR adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan.
4. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya Fraud Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan.
6. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan.
7. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan.
8. Mengevaluasi dan menganalisis Tingkat Kesehatan Bank paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank.
9. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
10. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan.
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan.
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan.
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perseroan.
8. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan.
9. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.

Masa Jabatan Komite Pemantau Manajemen Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Manajemen Risiko

Susunan Anggota Komite Periode 1 Januari 2023 – 03 Juli 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Finance, Economics, Management
Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Law, Economics, Management
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistic, Economics, Management
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Law, Social Politics, Regulation
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen	Capital Market, Technology, Management
Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	ESG, Logistics, Management
Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	Pihak Independen	ESG, Logistics, Management
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Management
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen	Banking, Management

Susunan Anggota Komite Periode 04 Juli 2023 – 02 Oktober 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Finance, Economics, Management
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistic, Economics, Management
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Law, Social Politics, Regulation
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen	Capital Market, Technology, Management
Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	ESG, Logistics, Management
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit, Taxation
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Management
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen	Banking, Management



Susunan Anggota Komite Periode 03 Oktober 2023 - Sekarang

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Finance, Economics, Management
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistic, Economics, Management
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Law, Social Politics, Regulation
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen	Capital Market, Technology, Management
Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	ESG, Logistics, Management
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit, Taxation
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen	Banking, Management
Sandra Chalik	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Risk Management

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Rofikoh Rokhim

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko/Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Heri Sunaryadi

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rabin Indrajad Hattari

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Nurmaria Sarosa

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dwi Ria Latifa

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Awan Nurmawan Nuh

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris



A. Sigid Sudahno

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/Pihak Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tahun 1961. Usia 62 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Semarang.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 245-DIR/HCB/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Pemimpin Cabang, BRI So'E Timor - Tengah Selatan (2002 – 2005)
- *Senior Account Officer* Kantor Wilayah BRI Padang (2005 – 2006)
- Kepala Bagian Kebijakan Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI (2007- 2013)
- Wakil Kepala Divisi Kebijakan Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI (2013 – 2017)
- Ketua Tim Penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (2018 – 2019)
- Komisariss Pada Bringin Sejahtera Makmur Insurance Broker (2018 – 2019)



MASA JABATAN

31 Maret 2020 s.d Sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Manajemen Pemasaran, Universitas Diponegoro Semarang (1987).
- Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Universitas Padjadjaran Bandung (2000)



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, BNSP
- Sertifikasi Gelar Profesi Broker Asuransi, APARI



Sandra Chalik

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/Pihak Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Makassar, pada tahun 1964. Usia 59 tahun Per Januari 2023. Berdomisili di Semarang.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 2349-DIR/HCB/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Group Head, Manajemen Risiko, Kantor Wilayah BRI Jakarta I (2008)
- Kepala Bagian, Manajemen Risiko Pasar dan Risiko Terpadu, Kantor Pusat BRI (2008-2012)
- Kepala Bagian, Laporan Keuangan Kantor Pusat BRI (2012-2013)
- Wakil Kepala Divisi, Bidang Kebijakan dan Manajemen Keuangan, Kantor Pusat BRI (2013-2014)
- Kepala Divisi, Manajemen Risiko, Kantor Pusat BRI (2015-2017)
- Kepala Divisi, Enterprise Risk & Portofolio Management, Kantor Pusat BRI (2017-2018)
- Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan Kantor Pusat BRI (2018-2020)



MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Akuntansi, STIE Surabaya – Surabaya (1989)
- Magister MM Manajemen Risiko, Universitas Indonesia – Jakarta (2003)



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, BSMR

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rofikoh Rokhim	Ketua	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen
Hadiyanto	Anggota	Sarjana Hukum Master of Law Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, pengawasan dan hukum
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Sarjana Ekonomi & Matematika Magister Manajemen Ph.D. in Economics,	Memiliki pengalaman dalam bidang statistik, ekonomi dan manajemen

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Dwi Ria Latifa	Anggota	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas Magister of Science	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan regulasi
Heri Sunaryadi	Anggota	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen
Nurmaria Sarosa	Anggota	Sarjana Arsitektur	Memiliki pengalaman dalam ESG, logistik dan manajemen
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Sarjana Ekonomi Master of Business Taxation	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi, audit dan perpajakan
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Sarjana Ekonomi Master of Finance	Memiliki pengalaman dalam akuntansi dan manajemen
A. Sigid Sudahno	Anggota	Sarjana Ekonomi Manajemen Pemasaran Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan dan manajemen
Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman dalam sosial politik dan manajemen risiko
Sandra Chalik	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister MM Manajemen Risiko	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan manajemen risiko

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Seluruh anggota KPMR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Syarat Independensi Anggota KPMR sebagai berikut:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota KPMR.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi.
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.
5. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain.

Tabel Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Aspek Independensi	RR	HD	RHI	DRL	HS	NS	ANN	BN	SS	RDA	SC
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

RR	Rofikoh Rokhim	NS	Nurmaria Sarosa	SC	Sandra Chalik
HD	Hadiyanto	ANN	Awan Nurmawan Nuh		
RHI	Rabin Indrajad Hattari	BN	Bintoro Nurcahyo		
DRL	Dwi Ria Latifa	SS	A. Sigid Sudahno		
HS	Heri Sunaryadi	RDA	Ridwan Darmawan Ayub		



Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

- Rapat Komite dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
- Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
- Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*email*), WA paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
- Panggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat.
- Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Rapat dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
- Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
- Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
- Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite yang memutuskan.
- Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
- Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
- Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen memberikan persetujuannya secara tertulis.

Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	Selasa, 24 Januari 2023	Evaluasi Kinerja Investasi dan Realisasi Rencana Bisnis DPLK BRI Semester II Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Nurmaria Sarosa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
2	Selasa, 24 Januari 2023	Konsultasi Kredit	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Nurmaria Sarosa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
3	Selasa, 24 Januari 2023	Profil Risiko Triwulan IV, Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2022, Strategi Anti Fraud Semester II/2022	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
4	Selasa, 31 Januari 2023	Laporan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan APU PPT Semester II Tahun 2022	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
5	Selasa, 21 Februari 2023	Tata Kelola Product Management.	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
6	Selasa, 21 Februari 2023	Evaluasi Complaint Handling	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
7	Selasa, 28 Februari 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
8	Selasa, 7 Maret 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dapen BRI 2023	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
9	Selasa, 21 Maret 2023	Trajectory Loan At Risk (LaR) Per Segmen	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
10	Selasa, 28 Maret 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
11	Selasa, 28 Maret 2023	Permohonan Persetujuan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait atas nama PT PNM	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Nurmaria Saraosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
12	Selasa, 28 Maret 2023	Liquidity Risk Management dan Balance Sheet Management	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Nurmaria Saraosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
13	Selasa, 2 Mei 2023	Rencana Penyertaan Modal KPEI dalam rangka Pengembangan <i>Central Counterparty</i> (CPP) Suku Bunga Nilai Tukar (SBNT)	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
14	Selasa, 2 Mei 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
15	Selasa, 9 Mei 2023	Update Perkembangan Restrukturisasi dan Eksposur Kredit PT Waskita Karya Grup.	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
16	Selasa, 9 Mei 2023	Profil Risiko Triwulan I Tahun 2023	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
17	Selasa, 23 Mei 2023	Reviu Pengelolaan Risiko dan Resiliensi IT	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
18	Selasa, 6 Juni 2023	Perkembangan Bisnis Segmen Konsumer	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
19	Selasa, 6 Juni 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
20	Selasa, 20 Juni 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
21	Selasa, 20 Juni 2023	Usulan <i>Threshold</i> PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani.	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
22	Selasa, 18 Juli 2023	Update Kinerja Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
23	Selasa, 18 Juli 2023	Update Kinerja Portofolio Surat Berharga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
24	Selasa, 18 Juli 2023	Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank BRI Semester I 2023, dan Strategi <i>Anti Fraud</i> BRI Semester I Tahun 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
25	Selasa, 25 Juli 2023	Realisasi Rencana Bisnis DPLK Semester I Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
26	Selasa, 25 Juli 2023	Konsultasi Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
27	Selasa, 25 Juli 2023	Konsultasi Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
28	Selasa, 1 Agustus 2023	<i>Liquidity Management</i> Reviu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
29	Selasa, 1 Agustus 2023	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Semester I 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
30	Selasa, 8 Agustus 2023	Konsultasi Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
31	Selasa, 8 Agustus 2023	Update Implementasi ESG.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
32	Selasa, 15 Agustus 2023	Update Perkembangan Bisnis Segmen Wholesale dan Institutional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
33	Selasa, 22 Agustus 2023	Konsultasi Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
34	Selasa, 19 September 2023	Konsultasi Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
35	Selasa, 19 September 2023	Konsultasi Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
36	Selasa, 26 September 2023	Pengelolaan Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) - Aset Terbengkalai BRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
37	Selasa, 26 September 2023	Portofolio Kredit Korporasi dan Debitur High Risk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
38	Selasa, 10 Oktober 2023	Identifikasi dan Manajemen Risiko Bidang Hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
39	Selasa, 24 Oktober 2023	Profil Risiko Triwulan III Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. A. Sigid Sudahno 7. Sandra Chalik

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
40	Selasa, 21 November 2023	<i>Risk Appetite Statement (RAS) BRI Tahun 2024 dan Recovery Plan (RP) BRI Tahun 2023-2024.</i>	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. A. Sigid Sudahno 7. Sandra Chalik
41	Selasa, 28 November 2023	<i>Credit Portfolio Update dan Outlook 2023-2024</i>	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
42	Selasa, 28 November 2023	Persetujuan Realisasi Rencana Bisnis DPLK Semester I 2023	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
43	Selasa, 5 Desember 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
44	Selasa, 5 Desember 2023	Penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama Danareksa Sekuritas	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Heri Sunaryadi 4. Dwi Ria Latifa 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
45	Selasa, 12 Desember 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 45 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko		
		Jumlah dan Presentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase
Rofikoh Rokhim	Ketua	45	45	100%
Hadiyanto	Anggota	8	7	88%
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	45	40	89%
Dwi Ria Latifa	Anggota	45	43	96%



Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko		
		Jumlah dan Presentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase
Heri Sunaryadi	Anggota	45	42	93%
Nurmaria Sarosa	Anggota	45	45	100%
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	36	34	94%
Bintoro Nurcahyo	Anggota	37	37	100%
A. Sigid Sudahno	Anggota	45	44	98%
Sandra Chalik	Anggota	8	7	88%

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Anggota KPMR BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; atau minimal dua tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan. Latar belakang anggota KPMR BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Rofikoh Rokhim	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Dwi Ria Latifa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Heri Sunaryadi	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Nurmaria Sarosa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Bintoro Nurcahyo	Anggota	<p><i>Training:</i> IIA Indonesia National Conference: <i>Staying Relevant</i> 1. Internal Audit and Risk Management Roles in ESG 2. BCA Sustainability Practices 3. Elevating corporate sustainability: <i>The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance</i></p>	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
		BSE GRS Masterclass 2023 - Sosialisasi peneringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		ESG for Boards - Governance of ESG	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC Integrated Information for Supervisory Board	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		Refreshing Manajemen Risiko Jenjang 6, LPPI, Desember 2023	Jakarta, 29 Desember 2023	BARa Risk Forum - LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
A. Sigid Sudahno	Anggota	<i>Training:</i> IIA Indonesia National Conference: <i>Staying Relevant</i> 1. Internal Audit and Risk Management Roles in ESG 2. BCA Sustainability Practices 3. <i>Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance</i>	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
		BSE GRS Masterclass 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		ESG for Boards - Governance of ESG	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC Integrated Information for Supervisory Board	Jakarta, 05 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
Sandra Chalik	Anggota	<i>Training:</i> IIA Indonesia National Conference: <i>Staying Relevant</i> 1. Internal Audit and Risk Management Roles in ESG 2. BCA Sustainability Practices 3. <i>Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance</i>	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
		BSE GRS Masterclass 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		ESG for Boards - Governance of ESG	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC Integrated Information for Supervisory Board	Jakarta, 05 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite. Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023

No	Tugas dan Tanggung Jawab		Pelaksanaan	
	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
1	Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Lainnya	Tanggapan atas Kebijakan Umum Operasional	25 Januari 2023	Tanggapan atas Kebijakan Umum Operasional
		Update atas Perubahan Kebijakan Penerapan APU PPT	07 Maret 2023	Persetujuan Perubahan Kebijakan Penerapan APU PPT
		Reviu dan Update Kebijakan Umum Keuangan dan Akuntansi	07 Maret 2023	Tanggapan Kebijakan Umum Keuangan dan Akuntansi



No	Tugas dan Tanggung Jawab		Pelaksanaan	
	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
		Reviu dan <i>Update</i> Kebijakan Umum Dana dan Jasa	29 September 2023	Tanggapan Kebijakan Umum Dana dan Jasa
		Reviu dan <i>Update</i> Kebijakan Umum Kerjasama BRI dengan Mitra	17 Oktober 2023	Tanggapan Kebijakan Umum Kerjasama BRI dengan Mitra
		Reviu dan <i>Update</i> Kebijakan Umum Kerjasama BRI dengan Mitra	21 November 2023	Peretujuan Kebijakan Umum Kerjasama BRI dengan Mitra
		<i>Update</i> atas Perubahan Kebijakan APU PPT - PPPSPM	28 November 2023	Peretujuan Perubahan Kebijakan APU PPT - PPPSPM
2	Persetujuan Dekom untuk disampaikan ke OJK/LPS/ KBUMN	Laporan Persetujuan Rencana Bisnis Bank 2024-2026	28 November 2023	Rencana Bisnis Bank 2024-2026
		Laporan Persetujuan Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024	28 November 2023	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024
		Laporan Persetujuan Persetujuan Penyesuaian <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS)	28 November 2023	<i>Risk Appetite Statement</i> (RAS)
		Laporan Persetujuan Persetujuan Rencana Bisnis DPLK Tahun 2024	29 November 2023	Peretujuan Rencana Bisnis DPLK Tahun 2024
3	Reviu dan Evaluasi Profil Risiko	Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2022	24 Januari 2023	Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2022
		Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2023	09 Mei 2023	Profil Risiko Triwulan I Tahun 2023
		Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2023	21 Agustus 2023	Profil Risiko Triwulan II Tahun 2023
		Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2023	21 November 2023	Profil Risiko Triwulan III Tahun 2023
4	Reviu dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2022	24 Januari 2023	Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2022
		Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2023	21 Agustus 2023	Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2023
5	Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2022	24 Januari 2023	Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2022
		Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2023	28 Agustus 2023	Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2023
6	Reviu dan Evaluasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Laporan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Semester II Tahun 2022	07 Februari 2023	Evaluasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Semester II Tahun 2022
		Laporan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Semester I Tahun 2023	28 Agustus 2023	Evaluasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Semester I Tahun 2023
7	Reviu dan Evaluasi Fungsi Kepatuhan	Laporan Penerapan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2022	07 Februari 2023	Evaluasi Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2022
		Laporan Penerapan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2023	21 November 2023	Evaluasi Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2023
8	Evaluasi dan Persetujuan Aksi Korporasi	Persetujuan Proposal Aksi Korporasi	11 Januari 2023	Rencana <i>Buyback</i> Saham 2023
			20 Februari 2023	Rencana <i>Buyback</i> Saham 2023
9	Pembahasan dan Reviu Agenda Tematik	Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	25 Januari 2023	Evaluasi <i>Complaint Handling</i> dan Strategi Penguatan Layanan Operasional
			21 Februari 2023	<i>Product Management</i>
			05 Mei 2023	Pengelolaan Likuiditas dan Struktur <i>Treasury Balance Sheets</i>

No	Tugas dan Tanggung Jawab		Pelaksanaan	
	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
10	Reviu dan Evaluasi Perkembangan Kredit dan Restrukturisasi		20 Juni 2023	Review Pengelolaan Risiko dan Resiliensi IT
			28 Juli 2023	Update Kinerja Unit Kerja Luar Negeri
			27 Juni 2023	Pengembangan Bisnis Konsumer
			02 Agustus 2023	Update Kinerja Portofolio Surat Berharga
			28 Agustus 2023	Liquidity Risk Profile dan Balance Sheet Management
			04 September 2023	Update Perkembangan Segmen Wholesale dan Institutional
			23 Agustus 2023	Update Implementasi ESG
			03 Oktober 2023	Pengelolaan Aset Tidak Bergerak (ATTB) – Aset Terbengkalai
			04 Oktober 2023	Identifikasi dan Manajemen Risiko Bidang Hukum
			17 Oktober 2023	Update Portofolio Korporasi dan Debitur High Risk
			31 Oktober 2023	Identifikasi dan Manajemen Risiko Bidang Hukum
			27 Juni 2023	Usulan Threshold di PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani
			14 April 2023	Trajectory LAS per Segmen
			15 Mei 2023	Update Restrukturisasi dan Exposure Kredit
			04 September 2023	Update Perkembangan Segmen Bisnis Wholesale dan Institutional
			06 Juni 2023	Update Portofolio Korporasi dan Debitur High Risk
28 November 2023	Credit Portfolio Update dan Outlook 2023-2024			
11	Konsultasi Kredit Direksi Kepada Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Kredit Dengan Forum Rapat Konsultasi Kredit - Konsultasi Kredit Tanpa Forum Rapat Konsultasi Kredit 	14 Februari 2023	Konsultasi Kredit (14 Februari 2023)
			04 April 2023	Konsultasi Kredit (04 April 2023)
			23 Mei 2023	Konsultasi Kredit (23 Mei 2023)
			27 Juni 2023	Konsultasi Kredit (27 Juni 2023)
			27 Juni 2023	Konsultasi Kredit (27 Juni 2023)
			02 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (02 Agustus 2023)
			05 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (05 Agustus 2023)
			15 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (15 Agustus 2023)
			15 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (15 Agustus 2023)
			24 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (24 Agustus 2023)
24 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (24 Agustus 2023)			
12	Persetujuan atas Pemberian Fasilitas Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	Proposal fasilitas penyediaan dana kepada Perusahaan Anak/Pihak Terkait	05 April 2023	Penyediaan Dana dan Penyertaan Modal pada PT Permodalan Nasional Madani
			30 Mei 2023	Penyertaan Modal pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
13	Evaluasi Kinerja dan Penerapan Tata Kelola DPLK	Laporan Realisasi Rencana Bisnis DPLK BRI Semester II 2022	25 Januari 2023	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis DPLK BRI Semester II 2022
		Laporan dan Persetujuan Realisasi Rencana Bisnis DPLK Semester I 2023	28 Juli 2023	Persetujuan Realisasi Rencana Bisnis DPLK Semester I 2023
		Laporan dan Persetujuan Rencana Bisnis DPLK Tahun 2024	21 November 2023	Persetujuan Rencana Bisnis DPLK Tahun 2024
14	Evaluasi dan Persetujuan Dana Pensiun BRI	Laporan dan Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI	7 Maret 2023	Pernyataan Pendiri Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI



Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) merupakan salah satu komite yang membantu Dewan Komisaris serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memastikan penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam konglomerasi keuangan Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran OJK Nomor 014/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
10. Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beserta perubahan-perubahannya.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nomor 04-KOM/BRI/01/2023 tanggal 31 Januari 2023. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi menjadi acuan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya membantu

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam konglomerasi keuangan Perseroan.

Isi Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

Bab I	Pendahuluan Pengertian Umum Dasar Hukum
Bab II	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Tujuan, Tugas dan Tanggung Jawab, Kewajiban, Larangan serta Wewenang Organisasi - Tujuan - Tugas dan Tanggung Jawab - Kewenangan - Etika kerja - Organisasi - Etika Kerja - Waktu Kerja - Rapat - Laporan - Mekanisme Surat Menyurat
Bab III	Penutup

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan Komite Tata Kelola Terintegrasi tertuang dalam Surat Keputusan Nokep : 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada anak perusahaan agar selaras dengan kebijakan manajemen risiko pada Entitas Utama dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama serta memberikan arahan atau nasehat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
4. Mengevaluasi penerapan Audit Intern Anak Perusahaan agar selaras dengan Kebijakan Audit Intern Entitas Utama.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.

- Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk disampaikan kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan dan penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
- Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi Entitas Utama.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk:

- Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.
- Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka peningkatan fungsi pengendalian intern, fungsi kepatuhan, dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
- Mendapatkan masukan mengenai penerapan tata kelola paling sedikit meliputi pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dari anggota konglomerasi keuangan melalui forum diskusi dan/atau rapat di level teknis.
- Melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait di Entitas Utama untuk informasi/klarifikasi terkait operasional Entitas Utama dan dengan unit yang menangani Perusahaan Anak di Entitas Utama untuk informasi/klarifikasi terkait Perusahaan Anak.
- Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.

Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Komite dapat dibantu oleh Staf dan/atau Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang dapat berasal dari kalangan intern maupun ekstern Bank.

Keanggotaan Komite

- Anggota Komite paling kurang terdiri dari satu Komisaris dari setiap anggota konglomerasi keuangan BRI, seorang pihak independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota;
 - Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota;
 - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota;
 - Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Susunan Anggota Komite Periode 1 Januari 2023 – 15 Februari 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	Finance, Economics, Management
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	Banking, Finance, Risk Management
Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI	Law, Economics, Management
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Banking, Audit
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Regulation



Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	Capital Market, Technology, Management
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Management
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Management
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI	Accounting, Regulation
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Finance
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	Economics, Management
Soegeng Hernowo	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	Economics, Management
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	Sharia, Management
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	Law, Management
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	Law, Sharia
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	Accounting, Management
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia	Economics, Management
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	Scientific Computing, Management
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	Economics, Management
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	Sharia, Management
Meidyah Indreswari	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	Accounting, Management

Susunan Anggota Komite Periode 15 Februari 2023 - 14 Maret 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	Finance, Economics, Management
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	Banking, Finance, Risk Management
Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI	Law, Economics, Management
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Banking, Audit
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Regulation
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	Capital Market, Technology, Management
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Management
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Management
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI	Accounting, Regulation
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Risk Management
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	Economics, Management
Soegeng Hernowo	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	Economics, Management
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	Sharia, Management
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	Law, Management
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	Law, Sharia
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	Accounting, Management
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia	Economics, Management

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	Scientific Computing, Management
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	Economics, Management
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	Sharia, Management
Meidyah Indreswari	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	Accounting, Management
Kahlil Rowter	Anggota	Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management	Economics, Management

Susunan Anggota Komite Periode 14 Maret 2023 - 04 Juli 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	Finance, Economics, Management
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	Banking, Finance, Risk Management
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Banking, Audit
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Regulation
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	Capital Market, Technology, Management
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Management
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Management
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI	Accounting, Regulation
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Risk Management
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	Economics, Management
Soegeng Hernowo	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	Economics, Management
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	Sharia, Management
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	Law, Management
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	Law, Sharia
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	Accounting, Management
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia	Economics, Management
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	Scientific Computing, Management
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	Economics, Management
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	Sharia, Management
Meidyah Indreswari	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	Accounting, Management
Kahlil Rowter	Anggota	Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management	Economics, Management

Susunan Anggota Komite Periode 04 Juli 2023 – 03 Oktober 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI	Finance, Economics, Management



Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	Banking, Finance, Risk Management
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Banking, Audit
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Regulation
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	Capital Market, Technology, Management
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Management
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit, Taxation
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI	Accounting, Regulation
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Risk Management
Sandra Chalik	Anggota	Pihak Independen BRI	Accounting, Risk Management
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	Economics, Management
Soegeng Hernowo	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	Economics, Management
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	Sharia, Management
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	Law, Management
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	Law, Syaria
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	Accounting, Management
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia	Economics, Management
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	Scientific Computing, Management
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	Economics, Management
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	Sharia, Management
Meidyah Indreswari	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	Accounting, Management
Kahlil Rowter	Anggota	Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management	Economics, Management

Susunan Anggota Komite Periode 03 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	Finance, Economics, Management
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	Banking, Finance, Risk Management
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Banking, Audit
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Regulation
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	Capital Market, Technology, Management
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	Law, Social Politics, Management
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Risk Management
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Audit
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen BRI	Accounting, Management
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	Economics, Management

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ayahanita K.	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	Audit, Law
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	Sharia, Management
Eko Wahyudi	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	Banking, Management
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	Law, Sharia
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	Accounting, Management
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia	Economics, Management
Agoosh Yoosran	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	Scientific Computing, Management
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	Economics, Management
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	Syaria, Management
Nurhaida*	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	Banking, Management
Kahlil Rowter	Anggota	Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management	Economics, Management

*) Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rofikoh Rokhim
Ketua/Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Kartika Wirjoatmodjo
Anggota/Komisaris Utama BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Hendrikus Ivo
Anggota/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dwi Ria Latifa
Anggota/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Heri Sunaryadi
Anggota/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Paripurna P Sugarda
Anggota/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris



Tedi Nurhikmat

Pihak Independen BRI

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1965. Usia 58 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Bekasi.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nokep: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.v



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi / Pihak Independen BRI (2021 – sekarang)
- *Senior Vice President* Mandiri University Group, Bank Mandiri (2018 -2021)
- *Senior Vice President Credit Risk and Portfolio Management*, Bank Mandiri (2010-2018)
- *Vice President Enterprise Risk Management*, Bank Mandiri (2007 – 2010)
- *Vice President Consumer Risk Scoring*, Bank Mandiri (2004 – 2007)



MASA JABATAN

28 Desember 2021 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Sumber Daya, Institut Pertanian Bogor (1989)
- *MBA Banking and Finance International*, University of Japan (1998)
- *MBA (Exchange) International Finance & Marketing*, University of Washington, Seattle, USA (1997)
- *Executive Program INSEAD*, The Wharton School



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level V (BNSP)
- Asesor Kompetensi *Risk Management Level V* (BNSP)
- *Learning Value Chain Certification*
- *Risk Management Trainers – BSMR GAARP*



Bardiyono Wiyatmojo

Pihak Independen BRI

Warga Negara Indonesia, lahir di Gunungkidul tahun 1964. Usia 58 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Tangerang Selatan.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Kepala Bidang Audit Intern Teknologi Informasi BRI (2014 -2019)
- Kepala Audit Intern Wilayah Jayapura BRI (2019)
- Kepala Divisi Audit Teknologi Informasi BRI (2019-2020)
- Anggota Komite Audit BRI (2021-2023)
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2023)



MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (1989)
- Magister of Business Administration, University of Kentucky (2000)
- Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2003)



SERTIFIKASI

- *Certified in the Governance of Enterprise Information Technology (CGEIT)*, ISACA, 2017-2024
- Sertifikasi General Banking Level 3, BNSP, 2022-2026
- Sertifikasi Audit Manager, BNSP, 2022-2026
- Sertifikasi Manajemen Risiko level 4, BNSP, 2020-2024
- Sertifikasi Asesor Kompetensi, BNSP, 2020-2023
- Sertifikasi Metodologi Pelatihan, BNSP, 2022-2025
- *Qualified Internal Auditor (QIA)*, YPIA, 2017



Bintoro Nurcahyo

Pihak Independen BRI

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1963. Usia 60 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Bekasi.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Kepala Bagian Pengembangan Organisasi, Divisi Renstra, Kantor Pusat BRI (2005-2006)
- Kepala Bagian Kebijakan Akuntansi (Tim PSAK 50/55), Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan Kantor Pusat BRI (2006-2013)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional, Kanwil BRI Banjarmasin (2013-2016)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional, Kanwil BRI Surabaya (2016-2017)
- Expert Lecturer 2 Corporate University BRI (2017)
- Ketua Tim Implementasi PSAK 71, Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan Kantor Pusat BRI (2017-2018)
- Kepala Divisi Risiko Enterprise dan Manajemen Portofolio Kantor Pusat BRI (2018-2019)



MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1988)
- *Master of Business Administration The Weatherhead School of Management (Finance) Case Western Reserve University, Cleveland. USA (1998)*



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV



Eko B. Supriyanto

**Komisaris Independen
PT Bank Raya Indonesia, Tbk**

Warga negara Indonesia, lahir di Bora, pada tahun 1964. Usia 59 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Bogor.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen Pelabuhan Maritim Learning Indonesia (Jan 2020 – Juli 2020)
- Advisor PT. Pelindo Investama Indonesia (PII) (Jan 2019 – Des 2019)
- Komisaris Utama Independen PT Bank MNC Internasional Tbk Mei 2016 – Mei 2018
- Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank MNC Internasional Tbk Mei 2016 – Mei 2018
- Direktur Utama PT Infoarta Pratama (Infobank) 2015 – Sekarang
- Komisaris Independen PT Bank Raya Indonesia, Tbk 2021 - Sekarang



MASA JABATAN

9 April 2021 – 8 April 2024



JABATAN RANGKAP

Direktur Utama PT Infoarta Pratama (Infobank)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta. 1996
- Magister Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta 2014



SERTIFIKASI

Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris



Ayahanita K

Komisaris Independen
PT BRI Asuransi Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1965. Usia 62 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta Pusat.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen PT. BRI Asuransi Indonesia (8 April 2022 – sekarang)
- *Executive Vice President* Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit Kantor Pusat BRI (Oktober 2020 – 28 Februari 2021)
- Kepala Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit Kantor Pusat BRI (Juli 2020 – September 2020)
- Kepala SKAI PT. Bank BRI Agroniaga, Tbk (Januari 2019 – Juni 2020)
- *Group Head* Satuan Kerja Audit Intern Kantor Pusat BRI (Februari 2016 – Desember 2018)



MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Direktur Utama PT Infoarta Pratama (Infobank)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 - Hukum - Universitas Indonesia
- S2 - Spesialis Hukum (Notariat) - Universitas Indonesia



SERTIFIKASI

Risk Management QRGP
Manajemen Risiko AAMAI



Abdul Ghoni

Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Tanjungkarang, pada tahun 1977. Usia 45 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Tangerang Selatan.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia (2021-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Reliance Indonesia (2020-sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Paralomas (2019-2020)
- Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019 – sekarang)
- Dosen Tidak Tetap PKN STAN Kemenkeu RI (2015 – sekarang)
- Dosen Tidak Tetap Universitas Thamrin (2015 – sekarang)



MASA JABATAN

06 Juli 2021 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, STIE Bhakti Pembangunan (2002)
- Magister Manajemen, Universitas Mercubuana (2015)
- Doktor Pengkajian Islam, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2018)



SERTIFIKASI

Tidak Ada



Eko Wahyudi

Komisaris Independen Asuransi BRI Life

Warga negara Indonesia, lahir di Baturaja, pada tahun 1963. Usia 60 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen PT. Asuransi BRI Life (25-05-2022 s/d sekarang)
- Direktur Keuangan Perum Perhutani (17-10-2019 s/d 10-02-2021)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
- Pemimpin Wilayah Surabaya (01-08-2019 s/d 17-09-2019)
- Pemimpin Wilayah Malang (01-10-2018 s/d 31-07-2019)
- Pemimpin Wilayah Palembang (01-02-2018 s/d 30-09-2018)
- Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan I (01-10-2015 s/d 31-01-2018)
- Pemimpin Wilayah Padang (01-04-2015 s/d 30-09-2015)
- Wapincasus (01-03-2014 s/d 30-03-2015)
- Wapinwil Bandung bidang bisnis (01-02-2013 s/d 31-03-2014)
- Wakadiv Hubungan Lembaga (01-04-2011 s/d 31-01-2013)
- Pemimpin Cabang Bandung Asia Afrika (01-11-2008 s/d 31-03-2011)
- Pemimpin Cabang Sragen (01-07-2007 s/d 31-10-2008)
- Pemimpin Cabang Purwakarta (01-07-2004 s/d 30-06-2007)
- Pemimpin Cabang Bantul (01-07-2001 s/d 30-06-2004)
- Pemimpin Cabang Amlapura (01-07-1998 s/d 30-06-2001)



MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2005
- Sarjana Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Tahun 1986



SERTIFIKASI

Sertifikasi Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi / CRGP LSPMR



Mohammad Hidayat

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Asuransi BRI Life

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1967. Usia 56 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi BRI Life (April 2021 – sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri (September 1991 – 2021)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BTN Syariah (Maret 2018 – 2021)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Manulife Syariah (April 2020 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Allianz Syariah (Oktober 2020 – sekarang)
- Khatib tetap Masjid Istana Presiden RI (Agustus 2005 s.d. Desember 2020)
- Khatib tetap Masjid Wakil Presiden RI (Januari 2015 s.d. Desember 2021)



MASA JABATAN

06 Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

- Anggota Dewan Pengawas Syariah Manulife Syariah (April 2020 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Allianz Syariah (Oktober 2020 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Mei 2021 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi BRI Life (April 2021 – sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1992
- Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 2004
- Magister *Islamic Economic and Finance*, Universitas Trisakti, 2014



SERTIFIKASI

- Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah
- Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perasuransian Syariah
- Ahli Syariah Pasar Modal
- Kompetensi DPS



Sumihar Manullang

Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas

Warga negara Indonesia, lahir di Bakara, pada tahun 1962. Usia 61 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas (2023)
- Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2018)
- Kepala Audit Intern Wilayah Medan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017)
- Kepala Audit Intern Wilayah Manado PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016)
- Kepala Audit Intern Wilayah Jayapura PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015).



MASA JABATAN

06 Juli 2021 s.d Oktober 2023



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Pendidikan Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran (1987)
- Magister Manajemen Keuangan Universitas Katolik Atmajaya (2000).



SERTIFIKASI

- Wakil Perantara Pedagang Efek
- Wakil Manajer Investasi
- QIA
- Kepatuhan



Sumantri Suwarno

Komisaris Independen BRI Multifinance
Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Bantul, pada
tahun 1976. Usia 47 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia (Juni 2020–Oktober 2023)
- Direktur Pengembangan Bisnis PT Rukun Raharja, Tbk (April 2021– sekarang)
- Komisaris PT Sirius Surya Sentosa (2019 – sekarang)
- Komisaris PT IPC TPK (Januari 2020 – Juli 2020)
- *General Manager* PT Usahatama Mandiri Nusantara (2013 – sekarang)



MASA JABATAN

06 Juli 2021 – 3 Oktober 2023



JABATAN RANGKAP

- Direktur Pengembangan Bisnis PT Rukun Raharja, Tbk (April 2021 – sekarang)
- Komisaris PT Sirius Surya Sentosa (2019 – sekarang)
- *General Manager* PT Usahatama Mandiri Nusantara (2013 – sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, 2002
- Magister Bisnis, Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta



SERTIFIKASI

Seminar *Online* Mengelola Risiko Ditengah ketidakpastian - 2022



Agoosh Yosran

Komisaris Independen
BRI Ventura Investama

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1969. Usia 54 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris PT Republika Media Mandiri (2019 sd. 2020)
- Direktur Utama PT Republika Media Mandiri (2016 sd. 2019)
- Direktur *Corporate Affair & Corporate Secretary* PT Mahaka Media Tbk. (2013 sd. 2016)
- Direktur Utama PT Kalyanamitra Adhara Mahardika (2017 sd. 2019)
- Komisaris PT Avabanindo Perkasa (2014 sd. 2020)



MASA JABATAN

03 Oktober 2023 – sekarang



JABATAN RANGKAP

Ketua *Project Management Office* (PMO) Tim Percepatan Implementasi Pertashop Tahun 2023 (Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK289/MBU/12/2022)



RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Ekonomi – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan & Perbankan Indonesia (STEKPI) (1995)



SERTIFIKASI

Seminar *Online* Mengelola Risiko Ditengah ketidakpastian - 2022



Yudi Priambodo Purnomo Sidi

Komisaris Independen PT Pegadaian

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1966. Usia 56 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 08-KOM/BRI/09/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen PT Pegadaian (25 April 2022 – sekarang)
- Komite Audit PT Pegadaian (Oktober 2022 – sekarang)
- Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian (Mei 2022 – September 2022)
- *Senior Vice President* pada Manado Regional Audit (Kepala Audit Wilayah Manado BRI) PT BRI (Persero) Tbk (1 Oktober 2021 – 31 Maret 2022)
- *Vice President* pada Jakarta 2 Regional Audit BRI (Wakil Kepala Audit Wilayah Jakarta 2) PT BRI (Persero) Tbk. (1 Januari 2020 – 30 September 2020)
- *Vice President* pada *Audit Standard and Quality Development* BRI (Wakil Kepala Divisi PSKA BRI) PT BRI (Persero) Tbk. (1 Januari 2019 – 31 Desember 2020)
- Anggota Pengawas YKP BRI (8 Mei 2019 – 1 April 2022)
- *Senior Vice President* pada Manado Regional Audit (Kepala Audit Wilayah Manado BRI) PT BRI (Persero) Tbk. (1 Oktober 2021 – 31 Maret 2022)
- *Vice President* pada Jakarta 2 Regional Office (Regional Risk Management Head Jakarta 2 BRI) PT BRI (Persero) Tbk. (1 Oktober 2020 – 20 September 2021)
- Asesor Kompetensi LSP-PM Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM) (4 September 2019 – sekarang)



MASA JABATAN

06 September 2022 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Asesor Lembaga Sertifikasi Pasar Modal (LSP PM) (2019-sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana *Business Management* Universitas Pancasila (1989)
- Magister *International Business* Universitas Gadjah Mada (2000)
- Doktor *Business Management* Universitas Brawijaya (2019 - saat ini)



SERTIFIKASI

- *Qualified Internal Audit* (QIA), YPIA
- *Certified Enterprise Risk Governance* (CERG), ERMA
- *Governance Risk Compliance Professional* (GRCP), OCEG
- *Banking Risk Management Level 4*, LSP Perbankan
- *Training Methodology Qualification Competency Certification Scheme 3*, LSP Kepelatihan dan Instruktur Nasional
- *Banking Risk Management Level 3*, LSP Perbankan
- *Audit Intern Bank Level Audit Supervisor*, LSP Perbankan
- *Certified Risk Professional for Risk Management*, LSP Pasar Modal
- *Certified Securities Analyst for Securities Analysis*, LSP Pasar Modal
- *Certified Investment Banker for Investment banking*, LSP Pasar Modal
- *Certified Wealth Manager* (CWM), ICWMA
- *Workplace Assessment Assessor Competency*, BNSP
- *Certified Financial Planner* (CFP), FPSB
- *Bank Risk Management Level 2*, LSP Perbankan
- Manajemen Risiko Level 1, BSMR



Muhammad Cholil Nafis

Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian

Warga negara Indonesia, lahir di Sampang, pada tahun 1975. Usia 48 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Depok.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

28 Desember 2021 - sekarang



PENGALAMAN KERJA

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian (2011 - sekarang)
- Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asyqi (2015-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Puskop Syariah DKI Jaya (2014-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Kresna Multi Finance (2012-Sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah ACE Life Assurance (2013-Sekarang).
- Staf Pengajar Ekonomi dan Keuangan Syariah Pascasarjana Universitas Indonesia (2005-Sekarang).
- Sekretaris Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (2014-2017).
- Kelompok Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK (2013-2017).
- Dosen Sekolah Tinggi Al Qur'an Al Hikam, Depok (2011-sekarang).



MASA JABATAN

2020 – 2023



JABATAN RANGKAP

- Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asyqi (2015-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Puskop Syariah DKI Jaya (2014-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Kresna Multi Finance (2012-Sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah ACE Life Assurance (2013-Sekarang).



RIWAYAT PENDIDIKAN

- LC dari *Ibnu Sa'ud Islamic University*, Jakarta (1996-2000).
- Sarjana Agama dari Sekolah Tinggi Agama Islam Az Ziyadah, Jakarta (1996-2000).
- MA dari Program Pascasarjana UIN Jakarta (2001-2003).
- Ph.D. dari University of Malaya, Malaysia (2008-2010).



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia (2012)
- Post-Doctoral di Muhammad V University, Maroko (2013)
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Nasional Multifinance Syariah (2015)
- Pelatihan Asesor Kompetensi Pengawas Syariah (2016).



Nurhaida

Komisaris Independen PNM

Warga negara Indonesia, lahir di Padang Panjang, pada tahun 1959. Usia 64 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Bogor.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota (2017 – 2022).
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK merangkap anggota (2012 – 2017).
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (2011 – 2012).



MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Kimia Tekstil (Institut Teknologi Tekstil Bandung) (1985)
- Magister Business Administration (Indiana University, USA) (1955)



SERTIFIKASI

Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2022)



Kahlil Rowter

Komisaris Independen
PT Danareksa Investama Management

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1964. Usia 64 tahun Per Desember 2023. Berdomisili Domisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 05-KOM/BRI/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Periode I



PENGALAMAN KERJA

- Chief Economist PT Danareksa (Persero) (2015 – 2018)
- Senior Advisory Real Estate Investment Trusts, AIPEG, Jakarta (2015)
- Chief Economist PT. Bakrie and Brothers, Tbk (2011 – 2013)
- Chief Executive Officer (CEO) Pefindo (2007 – 2010)
- Chief Economist Mandiri Sekuritas (2005 – 2006)



MASA JABATAN

15 Februari 2023 - sekarang



JABATAN RANGKAP

2018 – Sekarang, Senior Advisor - Prospera (Australia Indonesia Partnership for Economic Development)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia
- Masters of Economics di Michigan State University East Lansing, MI, United States



SERTIFIKASI

Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Pihak Independen yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan pengalaman.
2. Pihak Independen yang memiliki pengetahuan mengenai entitas utama dan perusahaan anak antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
5. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota.
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rofikoh Rokhim	Ketua	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Sarjana Akuntansi Master of Business Administration	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Hendrikus Ivo	Anggota	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam hukum, perbankan dan pengawasan bank
Dwi Ria Latifa	Anggota	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas <i>Magister of Science</i>	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan regulasi
Heri Sunaryadi	Anggota	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen
Paripurna P Sugarda	Anggota	Sarjana Hukum Magister Bidang Hukum Doktor Bidang Hukum	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan manajemen
Tedi Nurhikmat	Anggota	Sarjana Ekonomi Sumber Daya <i>MBA Banking and Finance International</i>	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan manajemen risiko
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	Sarjana Ilmu Ekonomi <i>Master of Business Administration</i> Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan audit
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Sarjana Akuntansi <i>Master of Business Administration</i>	Memiliki pengalaman dalam akuntansi dan manajemen
Eko B Supriyanto	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam ekonomi dan manajemen
Ayahanita K	Anggota	Sarjana Hukum Magister Hukum	Memiliki pengalaman dalam audit dan hukum
Abdul Ghoni	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Doktor Pengkajian Islam	Memiliki pengalaman dalam syariah dan manajemen
Eko Wahyudi	Anggota	Sarjana Hukum Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan manajemen
Mohammad Hidayat	Anggota	Sarjana Syariah Magister Ilmu Hukum Magister <i>Islamic Economic and Finance</i>	Memiliki pengalaman dalam hukum dan syariah
Sumihar Manullang	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman dalam akuntansi dan manajemen
Sumantri Suwarno	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Bisnis	Memiliki pengalaman dalam ekonomi dan manajemen
Agoosh Yosran	Anggota	Sarjana Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam ekonomi dan perbankan
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Management Doktor bidang Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan manajemen
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Sarjana Agama Magister Agama Ph.D	Memiliki pengalaman dalam syariah dan manajemen
Nurhaida*	Anggota	Sarjana Kimia Tekstil	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan manajemen
Kahlil Rowter	Anggota	Sarjana Ekonomi <i>Masters of Economics</i>	Memiliki pengalaman dalam ekonomi dan manajemen

*) Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KTKT tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Persyaratan independensi anggota KTKT adalah:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.



Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	RR	KW	HI	DRL	HS	PPS	TN	BW	BN	EBS
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	AK	AG	EW	MH	SM	AY	YPPS	MCN	NH	KR
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	HD	ANN	SY	DRH	SH	PFW	SS	OAT	MI	SC
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Catatan:

Rofikoh Rokhim (RR), Kartika Wirjoatmodjo (KW), Hendrikus Ivo (HI), Dwi Ria Latifa (DRL), Heri Sunaryadi (HS), Paripurna P Sugarda (PPS), Tedi Nurhikmat (TN), Bardiyono Wiyatmojo (BW), Bintoro Nurcahyo (BN), Eko B Supriyanto (EBS), Ayahanita K (AK), Abdul Ghoni (AG), Eko Wahyudi (EW), Mohammad Hidayat (MH), Sumihar Manullang (SM), Agoosh Yoosran (AY), Yudi Priambodo Purnomo Sidi (YPPS), Muhammad Cholil Nafis (MCN), Nurhaida (NH)³, Kahlil Rowter (KR), Hadiyanto (HD)¹, Awan Nurmawan Nuh (ANN)², Suindyo (SY)⁴, Duma Riana Hutapea (DRH)⁵, Soengeng Hernowo (SH)⁵, Sumantri Suwarno (SS)⁵, Premita Fifi Widiawati (PFW)⁵, Omar Arip Tirta (OAT)⁵, Meidyah Indraswari (MI)⁵, Sandra Chalik (SC)⁶.

Keterangan :

- Sdr. Hadiyanto diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023.
- Sdr. Awan Nurmawan Nuh aktif di KTKT sejak 04 Juli 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.
- Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Sdr. Suindyo aktif di KTKT sejak 01 Januari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023.
- Sdr. Duma Riana Hutapea, Sdr. Soengeng Hernowo, Sdr. Sumantri Suwarno, Sdr. Premita Fifi Widiawati, Sdr. Omar Arip Tirta, Sdr. Meidyah Indraswari aktif di KTKT sejak 01 Januari 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.
- Sdr. Sandra Chalik aktif di KTKT sejak 04 Juli 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengaturan rapat Komite diatur sebagai berikut:

- Rapat KTKT diselenggarakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan atau sesuai kebutuhan. Jenis rapat berdasarkan peserta sebagai berikut:
 - Rapat KTKT dengan Perusahaan Utama
 - Rapat KTKT Entitas Utama dengan seluruh Perusahaan Anak.
 - Rapat KTKT Entitas Utama dengan Perusahaan Anak tertentu.
 - Rapat Teknis KTKT (rapat pada level teknis)

Rapat pada level teknis adalah rapat dengan peserta anggota Komite dari Pihak Independen dengan Kepala Divisi atau pejabat dan/atau staf pada unit kerja Entitas Utama dan/atau Perusahaan Anak tertentu.

- Anggota Komite dapat menghadiri rapat yang diadakan oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko atau unit kerja lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- Anggota Komite dapat menghadiri rapat berdasarkan undangan dari eksternal auditor dan/atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) terkait dengan rencana dan hasil pemeriksaan terhadap Perusahaan Anak dan hal lainnya.
- Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.

5. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah terjadwal dilakukan dengan undangan secara tertulis, ditandatangani oleh ketua Komite dan seorang anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama. Apabila Ketua Komite berhalangan maka undangan dapat ditandatangani oleh dua orang anggota Komite berasal dari Dewan Komisaris. Apabila tidak dimungkinkan ditanda tangani oleh dua anggota Komite maka undangan dapat ditandatangani oleh seorang anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.
6. Undangan dapat ditandatangani dengan menggunakan *digital signatures* dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Dewan Komisaris yang berwenang menandatangani.
7. Bagi rapat yang dilakukan karena adanya hal-hal yang penting atau segera dan mendesak yang tidak terjadwal sebelumnya, maka undangan rapat dapat dilakukan secara lisan atau komunikasi melalui telepon atau *video call/conference*.
8. Undangan rapat pada level teknis ditandatangani oleh Ketua Komite.
9. Undangan rapat pada level teknis dapat dilakukan oleh pihak terkait yaitu Manajemen BRI atau Perusahaan Anak.
10. Rapat pada level teknis dipimpin oleh salah satu anggota KTKT dari pihak independen pada Entitas Utama.
11. Rapat Komite harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat serta daftar hadir.
12. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
13. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
14. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
15. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
16. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
17. Hasil pertemuan pada rapat yang diselenggarakan pada level teknis dituangkan dalam risalah rapat berisi poin-poin penting pembahasan dan dilaporkan dalam bentuk memo intern kepada Ketua dan anggota KTKT pada Entitas Utama.
18. Apabila berdasarkan hasil pertemuan pada Rapat Teknis terdapat hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian maka pihak Independen dapat merekomendasikan kepada Ketua Komite untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan, antara lain menyampaikan surat rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	Selasa, 28 Februari 2023	Profil Risiko Terintegrasi, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi BRI Semester II/2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Suindiyo 8. Duma Riana Hutapea 9. Tedi Nurhikmat 10. Eko B Supriyanto 11. Soegeng Hernowo 12. Abdul Ghoni 13. Premita Fifi Widhiawati 14. Mohammad Hidayat 15. Sumihar Manullang 16. Sumantri Suwarno 17. Omar Arip Tirta 18. Yudi Priambodo Purnomo Sidi 19. Muhammad Cholil Nafis 20. Meidyah Indreswari 21. Kahlil Rowter
2	Selasa, 21 Maret 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Ventura Investama (BVI) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BVI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Omar Arip Tirta
3	Selasa, 28 Maret 2023	Evaluasi Kinerja PT Danareksa Investment Management (BRI MI) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI MI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Paripurna P Sugarda 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Suindiyo 8. Duma Riana Hutapea 9. Tedi Nurhikmat 10. Kahlil Rowter



No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
4	Selasa, 28 Maret 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Finance (BRIF) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIF.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Paripurna P Sugarda 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Suindiyo 8. Duma Riana Hutapea 9. Tedi Nurhikmat 10. Sumantri Suwarno
5	Selasa, 4 April 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIDS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Sumihar Manullang
6	Selasa, 4 April 2023	Evaluasi Kinerja PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Bank Raya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Eko B Supriyanto
7	Selasa, 11 April 2023	Evaluasi Kinerja PT Asuransi BRI Life (BRI Life) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI Life.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Premita Fifi Widhiawati 12. Mohammad Hidayat

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
8	Selasa, 11 April 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRINS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Soegeng Hernowo 12. Abdul Ghoni
9	Selasa, 9 Mei 2023	Evaluasi Kinerja PT Pegadaian (Pegadaian) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Pegadaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Hendrikus Ivo 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Paripurna P Sugarda 6. Suindiyo 7. Duma Riana Hutapea 8. Tedi Nurhikmat 9. Yudi Priambodo 10. Muhammad Cholil Nafis
10	Selasa, 23 Mei 2023	Evaluasi kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Semester II tahun 2022 dan Kuartal I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris PNM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Meidyah Indreswari
11	Selasa, 27 Juni 2023	Progress Integrasi Laporan Keuangan dengan Enterprise Resource Planning System PT PNM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Meidyah Indreswari

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta	No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
12	Selasa, 22 Agustus 2023	Pembahasan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan, dan Audit Terintegrasi Semester I 2023.	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Awan Nurmawan Nuh Duma Riana Hutapea Tedi Nurhikmat Sandra Chalik Eko B Supriyanto Soengeng Hernowo Abdul Ghoni Premita Fifi Widhiawati Mohammad Hidayat Sumihar Manullang Sumantri Suwarno Omar Arip Tirta Yudi Priambodo Purnomo Sidi Muhammad Cholil Nafis Meidyah Indreswari Kahlil Rowter 	15	Selasa, 10 Oktober 2023	Update Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pengawasan Dewan Komisaris PT BRI Finance (BRIF).	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Sumantri Suwarno
13	Selasa, 03 Oktober 2023	Pembahasan Kinerja Keuangan, Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Semester I 2023 dan Tindak Lanjut Arahan Komisaris dan Direktur Pembina pada Perusahaan Anak PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS).	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Ayahanita K. Abdul Ghoni 	16	Selasa, 17 Oktober 2023	Update Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan dan Pengawasan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management (BRI MI).	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Kahlil Rowter
14	Selasa, 03 Oktober 2023	Update Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola PT Asuransi BRI Life (BRI Life)	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Eko Wahyudi Mohammad Hidayat 	17	Selasa, 17 Oktober 2023	Update Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan dan Pengawasan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management (BRI MI).	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Kahlil Rowter
15	Selasa, 10 Oktober 2023	Update Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan dan Pengawasan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (PNM).	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Nurhaida* 	18	Selasa, 31 Oktober 2023	Update Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan dan Pelaksanaan Dewan Komisaris PT Pegadaian (Pegadaian)	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Yudi Priambodo Purnomo Sidi Muhammad Cholil Nafis
16	Selasa, 17 Oktober 2023	Update Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan dan Pelaksanaan Dewan Komisaris PT Pegadaian (Pegadaian)	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Yudi Priambodo Purnomo Sidi Muhammad Cholil Nafis 	19	Selasa, 31 Oktober 2023	Update Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan dan Pelaksanaan Dewan Komisaris PT Pegadaian (Pegadaian)	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Yudi Priambodo Purnomo Sidi Muhammad Cholil Nafis



No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
20	Selasa, 7 November 2023	Update Kondisi Bisnis, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola, dan Pengawasan Dewan Komisaris PT BRI Ventura Investama (BVI)	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Agoosh Yoosran
21	Selasa, 7 November 2023	Update Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan dan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya)	<ol style="list-style-type: none"> Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Hendrikus Ivo Dwi Ria Latifa Heri Sunaryadi Paripurna P Sugarda Tedi Nurhikmat Bardiyono Wiyatmojo Bintoro Nurcahyo Eko B Supriyanto

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama Tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 21 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Rofikoh Rokhim	Ketua	21	21	100%
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	21	20	95%
Hendrikus Ivo	Anggota	21	21	100%
Dwi Ria Latifa	Anggota	21	21	100%
Heri Sunaryadi	Anggota	21	19	90%
Paripurna P Sugarda	Anggota	21	21	100%
Tedi Nurhikmat	Anggota	21	21	100%
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	9	9	100%
Bintoro Nurcahyo	Anggota	9	9	100%
Eko B Supriyanto	Anggota	4	4	100%
Ayahanita K.	Anggota	1	1	100%
Abdul Ghoni	Anggota	4	4	100%
Eko Wahyudi	Anggota	1	1	100%
Mohammad Hidayat	Anggota	4	4	100%
Sumihar Manullang	Anggota	4	4	100%
Agoosh Yoosran	Anggota	1	1	100%
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	4	4	100%
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	4	4	100%
Nurhaida ³	Anggota	1	1	100%
Kahlil Rowter	Anggota	4	4	100%
Hadiyanto ¹	Anggota	1	1	100%
Awan Nurmawan Nuh ²	Anggota	10	10	100%

Nama	Jabatan	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Suindiyo ⁴	Anggota	11	11	100%
Duma Riana Hutapea ⁵	Anggota	12	12	100%
Soegeng Hernowo ⁵	Anggota	3	3	100%
Premita Fifi Widhiawati ⁵	Anggota	3	3	100%
Sumantri Suwarno ⁵	Anggota	3	3	100%
Omar Arip Tirta ⁵	Anggota	3	3	100%
Meidyah Indreswari ⁵	Anggota	4	4	100%
Sandra Chalik ⁶	Anggota	1	1	100%

Keterangan :

- Sdr. Hadiyanto diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023.
- Sdr. Awan Nurmawan Nuh aktif di KTKT sejak 04 Juli 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.
- Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Sdr. Suindiyo aktif di KTKT sejak 01 Januari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023.
- Sdr. Duma Riana Hutapea, Sdr. Soegeng Hernowo, Sdr. Sumantri Suwarno, Sdr. Premita Fifi Widhiawati, Sdr. Omar Arip Tirta, Sdr. Meidyah Indraswari aktif di KTKT sejak 01 Januari 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.
- Sdr. Sandra Chalik aktif di KTKT sejak 04 Juli 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota KTKT BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Latar belakang anggota KTKT BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Rofikoh Rokhim	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Hendrikus Ivo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Dwi Ria Latifa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Heri Sunaryadi	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Paripurna P Sugarda	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Tedi Nurhikmat	Anggota	Audit Teknologi Informasi	Online, 27 Juni 2023	BUMN GRC Masterclass Program & FKSPI
		ESG for Auditor	Online, 13 Juli 2023	BUMN GRC Masterclass Program & FKSPI
		IPO & Peningkatan Efek	Online, 10 Agustus 2023	BUMN GRC Masterclass Program & BEI
		ESG & IFC Performance Standards	Online, 16 Agustus 2023	BUMN GRC Masterclass Program & IFC



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		<i>Risk Management Effectiveness Evaluation</i>	Online, 07 September 2023	BUMN GRC Masterclass Program & FKSPI
		<i>GRC Integrated Information For Supervisory Board</i>	Online, 05 Oktober 2023	BUMN GRC Masterclass Program & FKSPI
		<i>CG Methodology & Environmental and Social Management Systems</i>	Online, 25 Oktober 2023	BUMN GRC Masterclass Program & IFC
		Konferensi Nasional IIA Indonesia 2023	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	<i>Introduction to ESG & IFC Performance Standard</i>	Online, 07 Oktober 2023	Kementerian BUMN
		<i>Governance and Integrity of Financial Reporting</i>	Online, 26 September 2023	Kementerian BUMN
		<i>State Owned Enterprises Rating</i>	Online, 20 September 2023	Kementerian BUMN
		<i>National Conference</i>	30-31 Agustus 2023	The IIA
Bintoro Nurcahyo	Anggota	<i>IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant - Internal Audit and Risk Management Roles in ESG - BCA Sustainability Practices - Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance</i>	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
		<i>BSE GRS Masterclass 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo</i>	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		<i>ESG for Boards - Governance of ESG</i>	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		<i>GRC Integrated Information for Supervisory Board</i>	Jakarta, 05 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		<i>CG Methodology and Environmental and Social Management Systems</i>	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		<i>Refreshing Manajemen Risiko Jenjang 6, LPPI, Desember 2023</i>	Jakarta, 29 Desember 2023	BARa Risk Forum - LPPI
Eko B Supriyanto	Anggota	<i>Navigating Country Risk for Sustainable Growth : Opportunities and Challenges "Navigating Country Risk for Sustainable Growth : Opportunities and Challenges"</i>	Kamis-Jum'at, 14-15 Desember 2023, Yogyakarta	LSPMR
Ayahanita K.	Anggota	<i>Strategi Bisnis Asuransi di Era Penurunan Kapasitas Reasuransi dan Kenaikan Tarif Reasuransi</i>	Jakarta, 20 Maret 2023	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
		<i>Penjaminan Asuransi dan Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Asuransi di Indonesia</i>	Jakarta, 23 Juni 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		<i>Seminar Nasional AAMAI - Implementasi Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme di Industri Perasuransian</i>	Jakarta, 6 Juli 2023	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
		<i>Certification in Audit Committee Practices (CACP) 2023</i>	Jakarta, 25 - 27 Juli 2023	Indonesia Institute of Audite Committee (IKAI)
		<i>Workshop Manajemen Risiko - Penerapan Analisis Risiko Perusahaan Perasuransian yang Sangat Kompleks untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan</i>	Jakarta, 28 - 29 Juli 2023.	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
		<i>GRC Summit 2023 (Master Class)</i>	Jakarta, 24 Agustus 2023	IRMAPA
		<i>GRC Summit 2023 (Seminar)</i>	Jakarta, 25 Agustus 2023	IRMAPA

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Abdul Ghoni	Anggota	IFRS 17 <i>Implementation In Indonesia Sharia (Re) Insurance</i>	Jakarta, 12 Desember 2023	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
Eko Wahyudi	Anggota	<i>Finance and Accounting For Non Finance and Accounting Internal Auditor</i>	Jakarta, 13-14 Maret 2023	YPIA
		<i>Master Class Program Series XXII</i>	Bogor, 31 Agustus - 1 September 2023	LSPMR
		Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan	Yogyakarta, 26 September 2023	OJK
		DRIM AAJI TAHUN 2023	Yogyakarta, 18-20 Oktober 2023	AAJI
		Webinar "Cara Mudah Mengagregasikan Risiko Organisasi"	Jakarta, 03 November 2023	GRC
		Seminar Nasional Internal Audit " <i>Trusted Advisor: Navigating The New Frontier, Conneting Between Informasi Tecnology and Business Strategy</i> "	Denpasar, 6-7 Desember 2023	YPIA
		Konferensi Manajemen Profesional Manajemen Risiko IX	Yogyakarta, 14-15 Desember 2023	LSPMR
Mohammad Hidayat	Anggota	<i>Continuing Professional Development I : Enhancing Competitiveness through the integration of ESG and GRC Principles</i>	Bandung, 2-3 Oktober 2023	GRC Management
		<i>Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023</i>	Jakarta, 20 Oktober 2023	DSN - MUI
		<i>Workshop Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX th 2023</i>	Jakarta, 14 November 2023	DSN - MUI
Sumihar Manullang	Anggota	<i>Continuing Professional Development I : Enhancing Competitiveness through the integration of ESG and GRC Principles</i>	Bandung, 2-3 Oktober 2023	GRC Management
		Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)	Online, 13 Oktober 2023	OJK
		Wakil Manajer Investasi (WMI)	Online, 13 Oktober 2023	OJK
		Asesor Kompetensi	Jakarta, 22-26 November 2023	LSPP
		<i>Enhancing ESG Through Best Practices in Accounting</i>	7 Desember 2023	OJK
Agoosh Yoosran	Anggota	-	-	-
Sumantri Suwarno	Anggota	-	-	-
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	<i>Capacity Building - Qualified Internal Auditor Kepala SPI, Tingkat Manajerial Kepala SPI/CAE</i>	Online, 22-30 Mei 2023	YPIA
		<i>Capacity Building - Perkembangan Perusahaan Melalui Akuisisi: Aspek Akuntansi, Finansial, Perpajakan, dan Hukum</i>	Jakarta, 09 Juni 2023	Pusat Studi Akuntansi FEB Universitas Padjadjaran
		<i>Capacity Building - Pelatihan Analisa Laporan Keuangan PT Pegadaian</i>	Jakarta, 11 Agustus 2023	
		<i>Capacity Building - Managing Risk and Reputation in a Complex World</i>	USA, 20 - 25 Agustus 2023	PT Pegadaian
		<i>Capacity Building - Integrating Business Continuity Management (BCM): Enhancing Resilience Through Internal Audit and Risk Management Practices</i>	Jakarta, 30 Oktober 2023	Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Seminar Pengawasan Market Conduct dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasca Penerbitan POJK No.6/POJK.07/2022 dan UU P2SK	Online, 10 November 2023	LPPi
Nurhaida *)	Anggota	-	-	-
Kahlil Rowter	Anggota	Module 2 : <i>Assessing Strategic Performance The Board Level View</i>	Singapura, 21 - 23 Juni 2023	Singapore Management University

*) Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penghasilan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite. Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Implementasi	Agenda
1	Evaluasi Kinerja LJK Anak	<ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi kinerja finansial dan non finansial Perusahaan Anak. Mengevaluasi strategi bisnis berdasarkan pencapaian kinerja berdasarkan sektor usaha (<i>main business</i>) dan <i>issue</i> strategis pada Perusahaan Anak 	<p>21 Maret 2023</p> <hr/> <p>28 Maret 2023</p> <hr/> <p>4 April 2023</p> <hr/> <p>11 April 2023</p> <hr/> <p>09 Mei 2023</p> <hr/> <p>23 Mei 2023</p>	<p>Evaluasi Kinerja PT BRI Ventura Investama (BVI) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BVI.</p> <hr/> <p>Evaluasi kinerja PT Danareksa Investment Management (DIM) dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris DIM Semester II Tahun 2022</p> <hr/> <p>Evaluasi Kinerja PT BRI Finance (BRIF) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIF.</p> <hr/> <p>Evaluasi Kinerja PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIDS.</p> <hr/> <p>Evaluasi Kinerja PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Bank Raya.</p> <hr/> <p>Evaluasi Kinerja PT Asuransi BRI Life (BRI Life) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI Life.</p> <hr/> <p>Evaluasi Kinerja PT Pegadaian (Pegadaian) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Pegadaian</p> <hr/> <p>Evaluasi kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Semester II tahun 2022 dan Kuartal I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris PNM</p>

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Implementasi	Agenda
			27 Juni 2023	Progress Integrasi Laporan Keuangan dengan Enterprise Resource Planning System PT PNM
			3 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRINS. Evaluasi Kinerja PT Asuransi BRI Life (BRI Life) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI Life.
			10 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Finance (BRIF) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIF.
			17 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIDS. Evaluasi Kinerja PT Danareksa Investment Management (BRI MI) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI MI.
			31 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris PNM. Evaluasi Kinerja PT Pegadaian (Pegadaian) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Pegadaian.
			7 November 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Ventura Investama (BVI) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BVI. Evaluasi Kinerja PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Bank Raya.
2	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi	Mengevaluasi kecukupan pengendalian Intern terintegrasi, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menguji efektivitasnya	28 Februari 2023	1. Profil Risiko Terintegrasi Semester II/2022 2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester II/2022 3. Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi BRI Semester II / 2022
			22 Agustus 2023	1. Profil Risiko Terintegrasi Semester I/2023 2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester I/2023. 3. Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi BRI Semester I/2023
		Penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap Semester	04 Juli 2023	<i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2022 <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2023
3	Penguatan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi	Koordinasi dengan Divisi dengan memberikan masukan terhadap Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi.	24 Maret 2023	Persetujuan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023



No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Implementasi	Agenda
4	Perubahan dan penetapan anggota KTKT konglomerasi keuangan BRI	Review terhadap usulan anggota KTKT dari LJK dilakukan 5 kali selama Tahun 2023	Perubahan Anggota KTKT melalui SK Dewan Komisaris pada tanggal: 1. 15 Februari 2023 2. 14 Maret 2023 3. 04 Juli 2023 4. 03 Oktober 2023	Perubahan Anggota KTKT melalui SK Dewan Komisaris: 1. Nokep: 08-KOM/BRI/09/2022 tanggal 06 September 2022 2. Nokep: 05-KOM/BRI/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 3. Nokep: 08-KOM/BRI/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 4. Nokep : 09-KOM/BRI/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 5. Nokep : 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023

PENGUATAN FUNGSI TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pada tahun 2023, KTKT telah melakukan reviu terhadap Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Januari 2023, salah satu perubahan perubahan kategori kelompok adalah :

- *Voting Right Member* adalah anggota yang memiliki hak suara dalam menyetujui keputusan rapat. Anggota *Voting Right Member* terdiri dari Dewan Komisaris Entitas Induk dan Pihak Independen/Komite Non Dewan Komisari Entitas Induk yang memiliki hak suara.
- *Non-Voting Right Member* adalah anggota yang tidak memiliki hak suara dalam menyetujui keputusan rapat. Anggota *Non-Voting Right Member* terdiri dari Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk Bank (jika ada) dan LJK Non-Bank Syariah sebagai anggota.

Bagi KTKT sebagai penguatan pemahaman terhadap masing-masing Perusahaan Anak dan Pelaksanaan Tugas Insidental sesuai dengan arahan Dewan Komisaris seperti perlunya pemantauan terhadap kecukupan permodalan konglomerasi keuangan, manajemen likuiditas, dan transaksi intragroup. Tata Kelola Terintegrasi juga diperkuat melalui Pengkinian Kebijakan Umum BRI salah satunya melalui Persetujuan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023 untuk memastikan BRI mampu menjalankan aktivitas dengan optimal, mampu mewujudkan tujuan secara dinamis, namun tetap di dalam koridor aturan yang berlaku.

Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi mengatur tentang pelaksanaan tata Kelola kepada Entitas Utama dan seluruh Anggota Konglomerasi Keuangan BRI serta mengintegrasikan pengaturan-pengaturan di berbagai aspek utama terkait dengan hubungan BRI sebagai Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan model parenting style terhadap Anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang ditetapkan oleh BRI yang dapat berubah sesuai dengan kondisi serta strategi secara Konglomerasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dipantau melalui *dashboard* atau sistem informasi manajemen yang diantaranya memuat informasi penting terkait dengan Konglomerasi Keuangan BRI. Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi disusun berdasarkan Kerangka Kerja Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yang memuat lima

pilar utama yang meliputi *Principles Commitment, Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*.

Ruang Lingkup Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BRI adalah sebagai berikut :

1. Prinsip dan Kerangka Kerja atas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BRI
2. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi dan pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi
3. Pengelolaan Sinergi Konglomerasi Keuangan BRI

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal, khususnya dalam hal terkait keterbukaan Informasi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui pelaporan kepada instansi pemerintahan dan pengumuman dalam *website* serta media cetak (apabila diwajibkan), organisasi pelaksanaan RUPS. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak eksternal seperti regulator pasar modal, pemegang saham, media serta pemangku kepentingan lainnya.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Bagian Kesembilan mengenai Sekretaris Perusahaan.

Struktur Sekretaris Perusahaan

**Function**

- | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|
| • Media Relation & Publication | • Program Strategic & Communication TJSL & CSR | • Capital Market Governance | • BOC General Affairs, Internal BOC Activity & BOC Secretary | • BOD General Affaris, dan BOD & SEVP Secretary |
| • Corporate Brand & Digital Communication | • Execution & Program Partnership | • Public Affairs Management | • BOC Executive Assistant | • Internal Corporate & BOD Event |
| • External Corporate Event & Sponsorship | • Monitoring, Quality Control, & Reporting | • Strategic & Project Portofolio | | • BOD Executive Assistant |
| • Communication Analysis & Research | | | | |

Sekretaris Perusahaan memimpin unit kerja *Corporate Secretary Division* dalam melaksanakan fungsinya dengan jabatan setingkat *Executive Vice President*. *Corporate Secretary Division* berada di bawah binaan Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama. Organisasi *Corporate Secretary Division* membawahkan:

1. *Corporate Communication Department* yang mengelola fungsi:
 - a. *Media Relation & Publication*
 - b. *Corporate Brand & Digital Communication*
 - c. *External Corporate Event & Sponsorship*
 - d. *Communication Analysis & Research*
2. *Corporate Social Responsibility & Community Development Department* yang mengelola fungsi:
 - a. *Program Strategic & Communication TJSL & CSR*
 - b. *Execution & Program Partnership*
 - c. *Monitoring, Quality Control, & Reporting*
3. *Capital Market Governance & Public Affairs Management Department* yang mengelola fungsi:
 - a. *Capital Market Governance*.
 - b. *Public Affairs Management*.
 - c. *Strategic & Project Portofolio*.

4. *Office of the Board 1 Department* yang mengelola fungsi:
 - a. *BOC General Affairs, Internal BOC Activity & BOC Secretary*
 - b. *BOC Executive Assistant*
5. *Office of the Board 2 Department* yang mengelola fungsi:
 - a. *BOD General Affaris, dan BOD & SEVP Secretary*
 - b. *Internal Corporate & BOD Event*
 - c. *BOD Executive Assistant*

Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

1. *Pool of Candidate* calon *Corporate Secretary* melalui *Talent Committee* (Komite Human Capital).
2. Pengusulan Calon *Corporate Secretary* oleh Direksi.
3. Pembahasan Calon EVP *Corporate Secretary Division*.
4. Pembahasan usulan EVP *Corporate Secretary Division*.
5. Persetujuan oleh Dewan Komisaris.



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi, antara lain:

Tugas dan Tanggung Jawab Umum

1. Sekretaris Perusahaan paling kurang:
 - a. Memastikan Perusahaan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keterbukaan informasi dan penerapan GCG.
 - b. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - c. Memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan.
 - d. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - e. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
 - f. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan GCG Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan.
 - Penyampaian laporan kepada regulator tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris (dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris).
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
 - g. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) atau *contact person* antara Perusahaan dengan *stakeholders*.
 - h. Menatausahakan dan menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, serta RUPS.
 - i. Melakukan kegiatan komunikasi Perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan *corporate image* Perusahaan, termasuk melaksanakan program *event* eksternal, pemberian *sponsorship* Perusahaan dan pengelolaan museum Perusahaan.
 - j. Mengelola fungsi penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan, serta publikasi Laporan Keuangan dan informasi/laporan penting lainnya di media cetak,

media elektronik dan Situs Web Perusahaan kepada pihak terkait/regulator sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- k. Menyelenggarakan RUPS dan *public expose*.
 - l. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang diperlukan dalam rangka *corporate action*.
2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Komunikasi

1. Mengelola fungsi penyusunan kebijakan, implementasi dan evaluasi strategi komunikasi/publikasi Perusahaan.
2. Menyusun, mengimplementasi, dan evaluasi program *event* eksternal dan pemberian *sponsorship* Perusahaan;
3. Mengelola Museum BRI Purwokerto.

CSR dan *Community Development*

Menyusun dan menyempurnakan strategi, pemetaan sasaran penerima program, analisa usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan *website*, serta penyusunan laporan CSR dan *Community Development*.

Capital Market Governance dan *Public Affairs Management*

1. Mengelola pemenuhan dan kepatuhan/*compliance* sebagai Perusahaan Terbuka.
2. Mengelola *project portfolio Corporate Secretary Division*
3. Mengelola *stakeholder management*.
4. Mengelola aktivitas kesekretariatan, administrasi, dan dokumentasi perusahaan.

Office of The Board of Director and Commissioner

1. Mengelola fungsi komunikasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dengan pihak internal dan eksternal Perusahaan.
2. Mengelola fungsi pelaksanaan pemberian hak dan fasilitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
3. Penyusunan dan *breakdown* rencana kerja anggaran (RKA) serta evaluasi realisasi anggaran pemberian hak dan fasilitas.
4. Mengelola fungsi penyusunan dan analisis materi pidato, makalah, dengar pendapat, presentasi, wawancara dan materi pendukung lainnya untuk Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
5. Penatakerjaan agenda Dewan Komisaris, Direksi, dan SEVP, kegiatan internal BRI, serta pelaksanaan dan evaluasi protokol seluruh aktivitas Dewan Komisaris, Direksi, dan SEVP

Rapat

1. Memastikan Direksi mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Memastikan Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Memastikan Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan Rapat Direksi – Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Memastikan Rapat dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Rapat dan ketentuan lainnya.
5. Menjadi penghubung bagi Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dalam berkoordinasi perihal agenda Rapat rutin maupun insidental.
6. Memastikan bahwa agenda Rapat membutuhkan pengambilan keputusan atau hal-hal yang berdampak besar bagi kesejahteraan Perusahaan.
7. Apabila diperlukan, mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa setiap Rapat pembahasan akan difokuskan terutama pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Apabila diperlukan, mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa tingkat kewenangan untuk hal-hal yang didelegasikan benar dan dipatuhi.
9. Memastikan bahwa Risalah Rapat ditatakerjakan sesuai dengan ketentuan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Memastikan Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir atau menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
2. Memastikan rangkaian penyelenggaraan dan administrasi RUPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan penunjukan Pemimpin RUPS sebelum penyelenggaraan RUPS.
4. Memastikan bahwa kegiatan RUPS telah meliputi pengambilan keputusan untuk setiap pokok pembahasan (mata acara).
5. Berkoordinasi dengan pihak independen terkait (Notaris dan Biro Administrasi Efek) untuk kelancaran pelaksanaan RUPS.
6. Berkoordinasi dengan divisi terkait perihal rumusan dan skenario dalam mata acara RUPS.
7. Memastikan pengumuman dan pemanggilan RUPS telah dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

Pendalaman Pengetahuan

1. Memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi menerima program pengenalan (orientasi) yang memadai pada kesempatan pertama dan selanjutnya berdasarkan kebutuhan. Sasaran program ini bertujuan untuk memberikan wawasan secara ringkas kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Perusahaan agar para anggota baru dapat sesegera mungkin memberikan

kontribusi kepada Perusahaan. Khusus bagi anggota Dewan Komisaris baru, program pengenalan ditentukan oleh Komisaris Utama dan/atau ditentukan oleh kebutuhan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, untuk anggota Direksi baru, program pengenalan ditentukan oleh Direktur Utama dan/atau ditentukan oleh kebutuhan anggota Direksi. Apabila terdapat kondisi Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama adalah anggota baru, maka penentuan program orientasi ditentukan oleh Wakil Komisaris Utama atau Wakil Direktur Utama atau 2 (dua) Komisaris atau 2 (dua) Direktur sesuai ketentuan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Informasi atau pengetahuan dasar yang perlu diketahui oleh setiap anggota Sekretaris Perusahaan paling kurang:
 - a. Informasi atau pengetahuan intern, antara lain:
 - Anggaran Dasar.
 - Tugas, tanggung jawab dan kewenangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 - Visi, Misi dan tujuan Perusahaan.
 - Rencana strategis Perusahaan.
 - Kinerja keuangan Perusahaan.
 - Segmentasi usaha, produk dan jasa Perusahaan.
 - Manajemen risiko bank, profil risiko, penilaian dan pemantauan risiko.
 - Struktur Organisasi Perusahaan.
 - Fungsi Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.
 - Informasi relevan lainnya yang dapat membantu tugas dan kinerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 - b. Informasi atau pengetahuan ekstern, antara lain:
 - Perkembangan ekstern yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi, dsb.
 - Posisi Perusahaan diantara pesaing, nasabah dan *stakeholders* lainnya.
 - Peran dan hubungan dengan pihak yang berwenang di pemerintahan di bidang moneter, serta badan berwenang lainnya.
 - Peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - Informasi ekstern lainnya yang relevan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - c. Dokumen yang perlu disiapkan atau dibagikan selama masa pengenalan/orientasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang baru diangkat, antara lain:
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya.
 - Laporan Tahunan terbaru.
 - Kontrak Manajemen dan rencana Perusahaan terakhir.
 - Struktur Organisasi Perusahaan.
 - Dokumen lainnya, sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.



3. Membahas kebutuhan pengembangan diri yang berkelanjutan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan dan membuat perencanaan untuk program pelatihan bersama dengan unit kerja terkait.
4. Mengumpulkan informasi mengenai pelatihan, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan informasi dan kerjasama dengan divisi terkait.
5. Menentukan/merekomendasikan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi atau berdasarkan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Program orientasi/pengenalan perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Pelaksanaan pendidikan/pelatihan mengikuti ketentuan pendidikan yang berlaku di BRI Corporate University.

Daftar Pemegang Saham dan Kepemilikan

1. Sekretaris Perusahaan membantu Direksi untuk mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Kepemilikan Khusus Saham (Seri A Dwiwarna).
2. Sekretaris Perusahaan membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada perusahaan terbuka $\geq 5\%$ dari modal disetor perusahaan.
3. Sekretaris Perusahaan membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila atas kepemilikannya pada perusahaan terbuka terdapat perubahan $\geq 0,5\%$ (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam perusahaan, baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.
4. Laporan sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka tersebut.

Koordinasi Persiapan Laporan Tahunan

1. Laporan Tahunan diantaranya paling sedikit meliputi Ikhtisar Data Keuangan, Laporan Dewan Komisaris dan Direksi, Profil Perusahaan, Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, GCG, Informasi Keuangan dan informasi lainnya yang dianggap relevan sesuai dengan perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice* terkini.
2. Laporan Tahunan paling lambat diselesaikan maksimal bulan ke-4 (keempat) setelah akhir tahun buku berjalan dan selambat-lambatnya diterima oleh pemegang saham sebelum RUPS.

3. Persetujuan Laporan Tahunan dilaksanakan pada RUPS dan harus ada dalam salah satu mata acara RUPS.
4. Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan (*Annual Report*).

Pasar Modal

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya mengenai peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Memberikan masukan kepada Direksi untuk memenuhi ketentuan terkait dengan pasar modal dan peraturan terkait lainnya.
3. Sebagai pihak yang dapat dihubungi mewakili Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Lainnya

1. Mengelola implementasi manajemen risiko di *Corporate Secretary Division*.
2. Menyusun Rencana Kerja Fungsional (RKF) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) di *Corporate Secretary Division*.
3. Mengelola *Human Capital*, memenuhi kebutuhan rencana Pekerja, meningkatkan kompetensi dan mendorong kinerja agar pengelolaan *Human Capital* berjalan sesuai kebijakan yang berlaku di *Corporate Secretary Division*.
4. Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di *Corporate Secretary Division*.
5. Membuat laporan-laporan di tingkat Divisi/Department agar sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan unit kerja lain atau instansi terkait.
6. Mengelola logistik dan kesekretariatan di tingkat Divisi/Department, termasuk penggunaan biaya-biaya terkait logistik dan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengelola pengembangan platform/sistem aplikasi berkoordinasi dengan divisi terkait.
8. Melakukan penyempurnaan kebijakan/ketentuan terkait *output* (hasil kerja) *Corporate Secretary Division* dan unit kerja lain (termasuk antara lain: *Service Level Agreement/SLA*, Buku Prosedur Operasional/BPO, dll).
9. Melakukan koordinasi dan kerja sama di tingkat Divisi/Department, serta membina hubungan baik dengan unit kerja lain, lembaga atau instansi atau instansi atau pihak ketiga, termasuk antara lain pengadaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang terkait bidang tugas *Corporate Secretary Division*.

Profil Sekretaris Perusahaan

Periode Januari – Agustus 2023



Aestika Oryza Gunarto

Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1970. Usia 53 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 2 September 2020 berdasarkan Keputusan Direksi No. Nokep: 140.e-DIR/KHC/07/2019 22 Juli 2020 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. SR.20-KOM/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia.



PENGALAMAN KERJA

Beliau memulai karir BRI sejak tahun 1991 dengan berbagai posisi antara lain:

- Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Jakarta Jatinegara, Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Jakarta 1 (01-06- 2014 s/d 30-11-2015)
- Pj. Kepala Biro Direksi, Biro Direksi Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-12-2015 s/d 30-11-2016)
- Wakil Kepala Divisi, Bidang Kesekretariatan dan Protokoler Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-12-2016 s/d 30-04- 2019)
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kantor Wilayah Makassar, Kantor Wilayah Makassar (01- 05-2019 s/d 31-10-2019)
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kantor Wilayah Semarang, Kantor Wilayah Semarang (01- 11-2019 s/d 31-05-2020) Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kecil Kantor Wilayah Semarang, Kantor Wilayah Semarang (01-06-2020 s/d 05-08-2020)
- Pj. *Executive Vice President, Corporate Secretary Division* Kantor Pusat, Kantor Pusat (06-08-2020 s/d 05-11- 2020)
- *Executive Vice President, Corporate Secretary Division* Kantor Pusat, Kantor Pusat (06-11-2020 s/d Sekarang)



JABATAN RANGKAP

-



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (1994)
- Magister Manajemen Pemasaran, Universitas Padjajaran Bandung (2005)



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko *Level 5*



Periode Agustus 2023 – Saat Ini



Agustya Hendy Bernadi

Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tahun 1979. Usia 44 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 1 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Direksi No. 1613-DIR/HCB/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris SR.26-KOM/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Pengangkatan Corporate Secretary BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia.



PENGALAMAN KERJA

Beliau memulai karir BRI sejak tahun 2005 dengan berbagai posisi antara lain:

- *Manager, Investor Relations Desk*, Kantor Pusat (01-10-2012 s/d 28-02-2015)
- Kepala Bagian *Financial Institution Banks & Manajemen Unit Kerja Luar Negeri, International Business Division*, Kantor Pusat (01-03-2015 s/d 30-06-2018)
- *Deputy General Manager/Operations Manager*, BRI New York Agency (01-07-2018 s/d 08-05-2022)
- *Department Head International Business Division*, Kantor Pusat (09-05-2022 s/d 31-7-2023)
- *Division Head Corporate Secretary*, Kantor Pusat (1-8-2023 s/d sekarang)



JABATAN RANGKAP

-



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor (2001)
- Magister Manajemen Strategi, Institut Pertanian Bogor, Bogor (2009)
- *Master of Business Administration*, University of Florida, Amerika Serikat (2012)



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko *Level 2*

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Aestika Oryza Gunarto*	<i>Leadership in a Technology Driven World</i>	Juni 2023, London	Imperial College Business School
	<i>Risk Management Specialist - Liquidity Risk Management</i>	Juli 2023, Jakarta	BSPD
Agustya Hendy Bernadi**	BSDP <i>Upskilling Department Head "Strategy Execution 4DX"</i> (termasuk materi akuntansi dan hukum secara umum)	2023, Jakarta	Dunamis

* Berhenti menjabat sejak Agustus 2023

** Mulai menjabat sejak Agustus 2023

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Hubungan Dengan Media Massa

	Tahun 2023	Cetak	Online	TV	Total	BRI Liga 1	Grand Total	Quarter
Q1	Januari	527	10.539	19	11.085	4.144	19.373	
	Februari	432	10.296	35	10.763	5.002	20.767	63.432
	Maret	422	13.206	32	13.660	4.816	23.292	
Q2	April	268	9.117	7	9.392	3.833	17.058	
	Mei	350	8.919	19	9.288	1.035	11.358	42.419
	Juni	285	10.198	30	10.513	1.745	14.003	
Q3	Juli	387	15.594	74	16.055	7.567	31.189	
	Agustus	303	13.946	39	14.288	6.626	27.540	85.916
	September	348	15.814	45	16.207	5.490	27.187	
Q4	Oktober	355	18.635	37	19.027	5.549	30.125	
	November	318	17.661	48	18.027	4.851	27.729	86.401
	Desember	383	18.669	41	19.093	4.727	28.547	
Grand Total	4.378	162.594	426	167.398	55.385	222.783		

Pelaksanaan komunikasi korporat dilakukan dengan melibatkan berbagai media sebagai *strategic partner* yang meliputi media cetak, TV, maupun *online*. Komunikasi dilakukan melalui penerbitan *press release* yang selama tahun 2023 telah mencapai sejumlah 540 siaran pers oleh Perseroan, dengan total serapan oleh media sebanyak 222.783 pemberitaan di seluruh media.

UMKM masih menjadi tema pemberitaan utama bagi BRI. UMKM sebagai fokus bisnis BRI memiliki peranan kunci dalam membangun perekonomian nasional yang secara langsung mendorong pertumbuhan kinerja BRI. Untuk itu, narasi dalam rilis BRI lebih menekankan pada pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Selain itu, publikasi mengenai kinerja keuangan, saham dan pencapaian BRI juga menjadi tema pemberitaan utama BRI untuk meningkatkan citra positif di mata publik dan juga sebagai referensi informasi bagi investor.

Dalam kaitannya dengan BRI sebagai sponsor kasta tertinggi liga sepak bola di Indonesia yaitu BRI Liga I yang merupakan olahraga paling populer di Indonesia berkontribusi sangat besar dalam keseluruhan pemberitaan BRI. Oleh sebab itu, hingga akhir Desember 2023, total 55.385 artikel pemberitaan mengenai BRI Liga 1 menghiasi *platform* media print, TV, dan *online*.

Selain itu *Corporate Secretary* juga melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas di media sosial untuk menjaga sekaligus meningkatkan citra positif BRI. Citra positif BRI dibangun melalui konten pillar mengenai *corporate values & achievements, work at BRI*, dan *financial management* yang dikemas dengan *treatment* menarik yang sesuai dengan pengguna media sosial. Sehingga di kuartal IV citra positif BRI di media sosial mencapai 93 persen.



Corporate Secretary sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) BRI melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pelayanan informasi publik. Sepanjang di tahun 2023 PPID BRI menerima 12 permohonan informasi dari publik yang dapat dipenuhi seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kinerja pengelolaan informasi publik yang sangat baik membuat BRI mendapat predikat “Informatif Utama Kategori BUMN” dalam *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik 2022 oleh Komisi Informasi Pusat dengan nilai sebesar 97,19.

Corporate Secretary juga bertindak sebagai *spokesperson* untuk menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan, mendampingi jajaran Direksi BRI dalam kegiatan wawancara bersama media, menyelenggarakan kegiatan *press conference* untuk meningkatkan citra perusahaan, serta melakukan *monitoring* hingga klarifikasi terhadap pemberitaan negatif atau isu-isu yang dapat menurunkan reputasi Bank BRI.

KEGIATAN DENGAN MEDIA MASSA TAHUN 2023

Selama tahun 2023, BRI melaksanakan kegiatan dengan Media Massa, di antaranya:

No	Event	Waktu	Media/Lembaga	Pembahasan	Type
1	Meeting bersama Media Tempo	Rabu, 18 Januari 2023	Redaktur Tempo	Kerja Sama BRI & TEMPO.Co	Media Relation
2	Dinner bersama CNBC	Selasa, 31 Januari 2023	CNBC	Kinerja BRI & Isu Perbankan	Media Relation
3	Meeting bersama Media Tempo	Jumat, 2 Februari 2023	Direktur Utama TEMPO.Co	Agenda Fourfeo BRI	Media Relation
4	Meeting bersama Media Kontan	Jumat, 10 Februari 2023	Direktur Utama Kontan	Potensi Kerja Sama BRI - Kontan	Media Relation
5	Lunch bersama Emtek Group	Selasa, 14 Februari 2023	Emtek Group	Potensi Kerja Sama BRI - Emtek	Media Relation
6	Meeting Bersama Kontan	Selasa, 14 Februari 2023	Wapemred Kontan	Kerja Sama Regular BRI & Kontan	Media Relation
7	Meeting bersama Tribunnews.com	Senin, 20 Februari 2023	Wapemred Kontan, Marketing	Kerja Sama Periodik BRI	Media Relation
8	Meeting bersama MNC Group	Selasa, 21 Februari 2023	Direktur Pemberitaan MNC, Pemred MNC Group	Silaturahmi Media	Media Relation
9	Meeting bersama Suara.com	Rabu, 22 Februari 2023	Direktur Utama Suara.com	Pembahasan Konten KUR	Media Relation
10	Halal Bi Halal Pemred	Rabu, 1 Maret 2023	BOD BRI & Anak Perusahaan Pemred Media Nasional	Kinerja BRI & Optimisme BRI 2023	Pemred Gathering
11	Sepak bola FH BUMN Bersama Pemimpin Redaksi	Jumat, 3 Maret 2023	FH BUMN Pemred Media Nasional	Sepak Bola Activity	Media Relation
12	Golf bersama Infobank	Sabtu, 4 Maret 2023	CEO Infobank	Golf Activity	Media Relation
13	Fourfeo Cup 2023	Jumat, 10 Maret 2023	Tempo Media Group (TMG)	Sepak Bola Activity	Media Relation
14	Meeting bersama Republika	Selasa, 14 Maret 2023	Republika	KUR	Media Relation
15	Lunch bersama MNC Portal Indonesia (MPI)	Selasa, 9 Mei 2023	AE dan Tim Redaksi MPI	Evaluasi Kerja Sama	Media Relation

No	Event	Waktu	Media/Lembaga	Pembahasan	Type
16	Pendampingan Stakeholder dan Media	12-18 Mei 2023	Kementerian BUMN, Direksi BRI, Media MNC, Emtek, Republika	Liputan SEA Games	Media Relation
17	Meeting Bersama B-Univers Berita Satu	Selasa, 23 Mei 2023	Direktur Utama B-Univers	Pembahasan Kerja Sama Media & CSR	Media Relation
18	Meeting Bersama Media Olahraga (Sport Star, Bola Sport, Super Ball, Top Skor, Indo Sport)	Kamis, 25 Mei 2023	Pemred Media	Pembahasan Kerja Sama Publikasi BRI Liga 1	Media Relation
19	Meeting Bersama Bisnis Indonesia	Rabu, 7 Juni 2023	Pemred	Pembahasan Kerja Sama Program	Media Relation
20	Gathering Bersama Media (Republika, Idx Channel, Bisnis.com)	Senin, 19 Juni 2023	Pemred Media	Nonton Bareng FIFA Matchday Indonesia vs Argentina	Media Relation
21	Meeting Bersama Kompasiana	Kamis, 27 Juli 2023	Business Head	Content Plan Soceng	Media Relation
	Meeting bersama Trans TV	Rabu, 2 Agustus 2023	AE Trans TV	Pembahasan Kerja Sama	Media Relation
22	Meeting Fun Football bersama Rakyat Merdeka	Selasa, 9 Agustus 2023	Menteri BUMN, PSSI, Direksi BRI, Pemred	Pembahasan Teknis Acara Fun Football	Media Relation
23	Gathering bersama Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI)	Kamis, 24 Agustus 2023	Ketua IJTI	Pembahasan Kerja Sama	Media Relation
24	Lunch bersama Promedia	Jumat, 8 September 2023	CEO Promedia	Pembahasan Kerja Sama	Media Relation
25	Media Gathering & Trofeo Cup	Selasa, 12 September 2023	Direksi BRI, Pemred, Redaktur Media	Media Gathering & Fun Football	Media Relation
26	Media Gathering dengan TV One	Rabu, 26 September 2023	Pemred	Pembahasan Kerja Sama	Media Relation
27	Lunch Bersama Harian Kompas	Rabu, 11 Oktober 2023	GM Kompas	Pembahasan Kerja Sama jelang HUT 128	Media Relation
28	Focus Group Discussion Pemred Media	Jumat-Sabtu, 6-7 Oktober 2023	Pemred Media Nasional	Pembahasan/Insight Stakeholder	Media Gathering
29	Media Day	Rabu-Kamis, 27-28 Desember 2023	Perwakilan Media Tier 1	Program Media	Media Gathering

Selain itu, *Corporate Secretary* juga mengadakan program *BRI Fellowship Journalism 2023* yaitu program pemberian beasiswa S2 kepada jurnalis di universitas negeri di Indonesia, pada tahun 2023 melalui program ini BRI memberikan beasiswa kepada 45 jurnalis.

Penyelenggaraan RUPS

Selama tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana dilaporkan pada sub bab RUPS pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Transparansi Penyampaian Laporan dan Keterbukaan Informasi

Selama tahun 2023, *Corporate Secretary* telah melakukan laporan keterbukaan informasi, laporan rutin, laporan insidental dan/atau permintaan data oleh regulator. Rincian pelaporan telah disampaikan pada Sub Bab Transparansi Penyampaian Laporan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Satuan Kerja Audit Intern

RINGKASAN KINERJA SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Penerapan tata kelola yang baik pada industri perbankan dibutuhkan untuk menghadapi risiko, dinamika dan kompleksitas yang semakin meningkat. Salah satu bagian dari pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan adalah penerapan fungsi audit intern yang efektif. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab untuk menerapkan fungsi audit intern yang efektif di Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum yang paling sedikit meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki & meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Dalam rangka menilai efektivitas penerapan fungsi audit intern, telah dilakukan kaji ulang oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan atau PwC. Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, secara umum aktivitas yang dilakukan SKAI telah sesuai dengan ketentuan regulator dan *International Standard for The Professional Practice of Internal Auditing*. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan resertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu. Sertifikasi ISO tersebut diberikan kepada seluruh unit kerja SKAI termasuk Audit Standard & Quality Development Division, Head Office Audit, dan 18 Regional Audit Office seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa SKAI telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam setiap aktivitas SKAI, sehingga dapat mewujudkan visi SKAI BRI menjadi *strategic business partner* yang handal dalam rangka mencapai visi BRI dan menjadi *benchmark of best practice* bagi Satuan Kerja Audit Intern di Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penerapan fungsi audit intern yang efektif, SKAI melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. *Review* Efektivitas dan Strategi SKAI
Peningkatan dan *review* atas kualitas kegiatan audit dan *advisory* dengan melakukan pengkinian terhadap Strategi,

New Audit Framework, IT Audit dan *Strategic advisory* sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi *auditee*.

2. *Optimalisasi Data Analitik*
Penggunaan *audit tools* dengan memanfaatkan teknologi dalam rangka memprediksi dan mendeteksi potensi risiko yang mungkin muncul dalam suatu proses bisnis serta meningkatkan efisiensi dan kualitas audit.
3. *Audit Management System*
SKAI melakukan *enhancement* terhadap *audit management system* SKAI BRI dan SKAI Perusahaan anak sebagai berikut:
 - a. BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA)
BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA) yaitu *suite application* dalam bidang Manajemen audit yang memfasilitasi penetapan standar audit pada semua tahapan proses audit intern di BRI mulai tahap perencanaan hingga *Monitoring*. Aplikasi BRISMA bersifat *web-based* dan dapat diakses secara *online* serta terintegrasi dengan aplikasi BRISTARS dan *audit tools* lainnya yang dimiliki SKAI BRI.
 - b. BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA) SKAI Terintegrasi
Aplikasi Manajemen audit yang memfasilitasi penetapan standar audit pada semua tahapan proses audit intern untuk Perusahaan Anak yaitu BRI Life dan BRI Finance. Aplikasi BRISMA bersifat *web-based application* dan dapat diakses secara *online*.
4. Penerapan Audit *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR)
Pelaksanaan fungsi SKAI dalam menerapkan ICoFR di perusahaan untuk memastikan pengendalian intern atas Laporan Keuangan telah berjalan efektif di perusahaan.
5. Penerapan *Agile Audit*
Melaksanakan kegiatan audit terhadap perubahan proses bisnis yang semakin dinamis sehingga dapat meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.
6. Penguatan Fungsi *Advisory*
Mungkinikan *Advisory Framework* melalui penyesuaian mekanisme kegiatan *advisory* yang efektif.
7. *Enhancement Risk Control Matrix/Risk Control Library* Teknologi Informasi
Mungkinikan informasi risiko dan kontrol terkait IT *General Control* dan IT *Application Control* dengan melibatkan

1st line, 2nd line dengan 3rd line. Termasuk *enhancement mapping* data taksonomi produk dengan IT Asset/aplikasi pendukungnya untuk membantu proses *risk assessment* dan penentuan obyek audit.

8. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara 1st line, 2nd line dengan 3rd line
Pelaksanaan komunikasi secara berkala dengan 1st line dan 2nd line melalui Forum GRC (*Governance, Risk Management, dan Compliance*), *sharing tools Early Warning System*, dan *Monitoring* berkala sebagai strategi untuk peningkatan tata kelola
9. Penerapan ISO 9001:2015
SKAI telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu terhadap proses bisnis SKAI yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya.
10. *Human Capital Development*
SKAI melaksanakan program peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan melalui pelaksanaan sertifikasi profesi, BRILian *Specialist Development Program*, BRILian *Leadership Development Program*, *internship*, *guest auditor* dan Program *One Hour With You* (*sharing knowledge* yang melibatkan 1st line, 2nd line dengan 3rd line)
11. SKAI Terintegrasi
SKAI BRI memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas SKAI Perusahaan Anak yang tercermin dalam nilai

maturitas masing-masing Perusahaan Anak. Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung SKAI Terintegrasi antara lain:

- a. *Annual Audit Planning*
- b. *Individual & Joint Audit*
- c. *Quality Assurance Improvement Program*
- d. *Review* kebijakan & prosedur yang dimiliki SKAI Perusahaan Anak
- e. *Monitoring offsite financial performance* dan kinerja SKAI Perusahaan Anak.
- f. Penyampaian Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok hasil audit SKAI Perusahaan Anak kepada SKAI Terintegrasi dan Laporan SKAI Terintegrasi kepada Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi
- g. Penempatan auditor SKAI BRI di SKAI Perusahaan Anak, benchmark SKAI Perusahaan Anak ke SKAI BRI Induk dan program *secondment*.
- h. Pendampingan *enhancement audit tools* SKAI Perusahaan Anak dan penggunaan bersama *Audit Management System BRISMA 2.1*
- i. *Liaison Officer* dan *Monitoring* tindak lanjut hasil temuan audit eksternal.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2023 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK-03/2016 tanggal 22 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/ SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

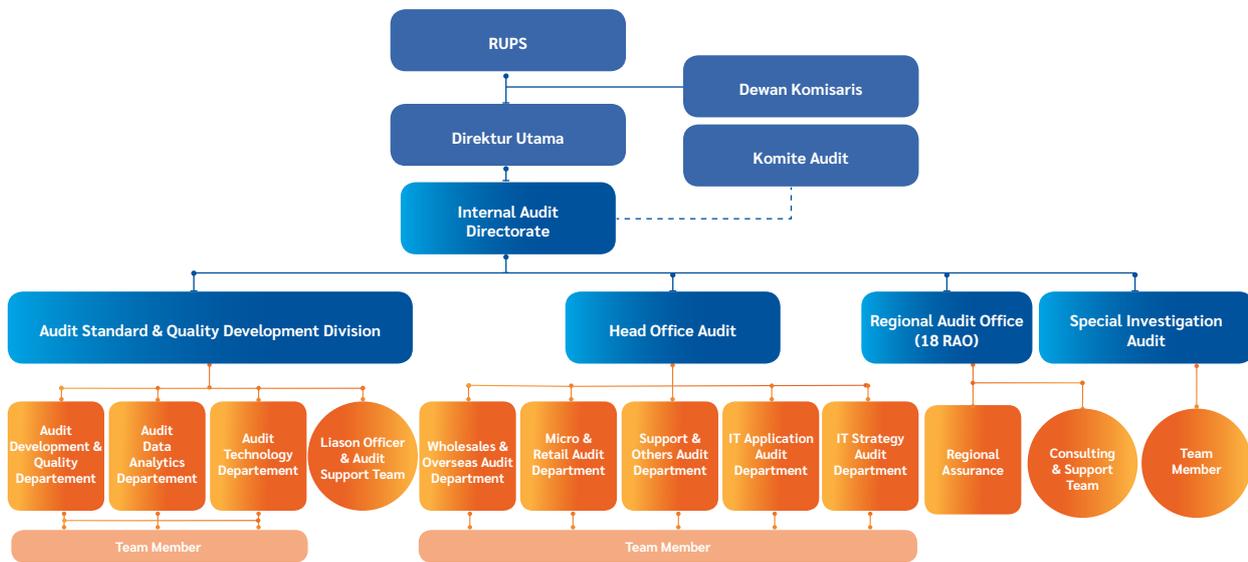
Sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance*, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BRI memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung *strategic business objective* melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* yang efektif dan sesuai dengan arah serta strategi perusahaan. Pelaksanaan fungsi SKAI yang efektif dapat memberikan jaminan kepada perusahaan terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko serta sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi perusahaan. Dalam rangka mendukung



aspirasi perusahaan sebagai *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia* dan *Champion of Financial Inclusion* pada tahun 2025, maka SKAI BRI menerapkan pendekatan audit yang lebih lincah (*agility*) agar dapat meningkatkan kinerja, kualitas, memenuhi ekspektasi *stakeholders*. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen, jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai, serta pengembangan metodologi dan *tools* audit yang *agile*. SKAI juga senantiasa meningkatkan sinergi dengan fungsi *1st line* dan *2nd line* melalui koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang teratur dan efektif dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen dan jumlah serta kompetensi Auditor yang memadai. SKAI BRI dipimpin oleh SEVP SKAI yang berada di bawah Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SEVP SKAI membawahi *Audit Standard & Quality Development Division*; *Head Office Audit*, dan 18 (delapan belas) *Regional Audit Office*, dan *Special Investigation Audit*. Berikut adalah Struktur Organisasi SKAI.



SKAI secara struktural terdiri dari Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit dan unit kerja yang melaksanakan pengembangan Standar dan Kualitas Audit sebagai berikut:

Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit

a. *Regional Audit Office*

Melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* dengan objek audit *Regional Office*, *Branch Office*, Sentra Layanan Prioritas, *Sub Branch Office*, *Cash Office*, dan BRI Unit di wilayah kerjanya. Saat ini BRI memiliki 18 (delapan Belas) *Regional Audit* merupakan salah satu strategi BRI agar peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* dan fungsi *assurance* dapat lebih efektif dan efisien mengingat struktur organisasi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab pengelolaan bisnis dan aset BRI terdesentralisasi.

b. *Head Office Audit*

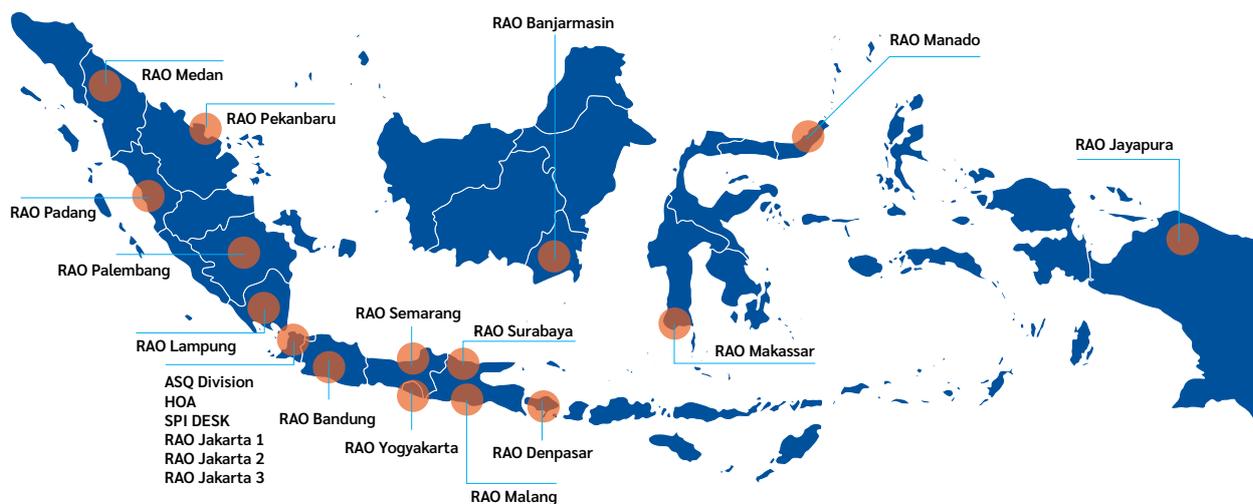
Melaksanakan seluruh kegiatan audit (*assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting*) sebagai *strategic business partner* dengan objek audit Unit Kerja Kantor Pusat, unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi (meliputi proses pengembangan dan operasional aplikasi *Core* dan *Non Core Banking*; operasional infrastruktur TSI pada *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan seluruh Unit Kerja; pengamanan informasi; aplikasi; infrastruktur TSI; strategi dan kebijakan pengembangan TSI; manajemen risiko TI; penunjang TSI serta *End User Computing*, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja Luar Negeri, LJK Konglomerasi Keuangan BRI (Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi), dan Perusahaan Anak diluar LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang di miliki BRI lebih dari 50%. *Head Office Audit* juga melaksanakan kaji ulang terhadap beberapa hal yang telah diatur oleh regulator diantaranya Strategi Anti *Fraud*, Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

c. *Special Investigation Team*

Melakukan investigasi atas indikasi *fraud* dan pengaduan *whistleblowing system* dengan kewenangan objek audit seluruh Unit Kerja BRI. *Desk Special Investigation* berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala SKAI BRI.

Audit Standard & Quality Development Division melakukan penyusunan visi, misi dan strategi SKAI BRI, melaksanakan evaluasi kualitas audit oleh jajaran SKAI BRI, pihak independen

maupun *internal quality assurance* terhadap SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan, melaksanakan pengkajian dan perancangan *software* maupun *hardware* untuk mendukung pelaksanaan audit, melakukan analisis dan penyusunan laporan hasil *audit*, *liasion officer & support team* serta melakukan pengembangan dan pengelolaan *analytical tools* data audit. Berikut adalah posisi 18 (Delapan belas) Regional Audit Office BRI yang tersebar di Seluruh Indonesia:



Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern dalam Struktur Organisasi

Secara struktural, SKAI BRI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif. Organisasi SKAI dipimpin oleh SEVP Satuan Kerja Audit Intern.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern

SEVP Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan SEVP SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



Profil Kepala Satuan Kerja Audit Intern



Triswahju Herlina

SEVP Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Warga negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tahun 1968. Usia 55 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai SEVP Satuan Kerja Audit Intern BRI sejak Maret 2022 berdasarkan Keputusan Direksi No.339-DIR/HCB/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan persetujuan Dewan Komisaris No. R.07-KOM/01/2022 tanggal 25 Januari 2022. Pengangkatan SEVP Satuan Kerja Audit Intern BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia.



PENGALAMAN KERJA

- SEVP SKAI BRI (Maret 2022 - sekarang)
- Regional CEO BRI Surabaya (November 2019 – Maret 2022)
- *Division Head of Agribusiness* (Agustus 2019 – Oktober 2019)
- *Division Head of Medium Business* (Juli 2018 – Juli 2019)
- Wakil Pemimpin Wilayah RO Yogyakarta (Maret 2016 – Juni 2018)
- Wakil Pemimpin Wilayah RO Malang (Oktober 2012 – Februari 2016)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Brawijaya, Malang (1990)
- Magister Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005)



SERTIFIKASI

- *Qualified Internal Auditor*
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4



Bangkit Ngabdianto

Division Head Audit Standard & Quality Development

Warga negara Indonesia, lahir di Tuban, pada tahun 1980. Usia 43 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi Nomor R.331-DIR/HCB/01/2022 tanggal 04 Juli 2022 *Division Head Audit Standard & Quality Development*.



PENGALAMAN KERJA

- EVP Audit Standard & Quality Development Division (Oktober 2023 - sekarang)
- SVP Audit Standard & Quality Development Division (Juni 2022 - Oktober 2023)
- VP Audit Intern Wilayah BRI Manado (Januari 2020 – September 2020)
- VP Audit Intern Wilayah BRI Denpasar (Oktober 2020 – Juni 2020)
- *Group Head* Satuan Kerja Audit Intern BRI Jakarta (Agustus 2017 – Desember 2019)



RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana *Electrical Engineering* (2004)



SERTIFIKASI

- *Certified Information Systems Auditor* (CISA)
- *Certified Fraud Examiner* (CFA)
- *Qualified Internal Auditor* (QIA)



Donny Permana

**Internal Audit Head
(Head Office Audit)**

Warga negara Indonesia, lahir di Kaban Jahe, pada tahun 1969. Usia 54 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Internal Audit Head (Head Office Audit) sejak Mei 2023 berdasarkan surat Mutasi Pejabat BRI No. R.473-DIR/HCB/05/2023 Tanggal 12 Mei 2023 TMT 1 Mei 2023



PENGALAMAN KERJA

- *Internal Audit Head (Head Office Audit)* 1 Mei 2023 – Sekarang
- *Regional Chief Audit Region* Malang Januari 2022 – 30 April 2023



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum Universitas Parahyangan, Bandung (1992)
- Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia (2000)



SERTIFIKASI

- *Qualified Internal Auditor (QIA)*
- *Certified Internal Audit Executive (CIAE)*
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Internal Audit Charter

SKAI memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sesuai Surat Keputusan Nomor BRI KU.02-DIR/ASQ/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, dan mengacu pada *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA)* dari *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

Piagam Audit Intern BRI merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), inisiasi komunikasi SKAI dengan *auditee*, pemeriksaan aktivitas bank serta kewenangan SKAI dalam mengakses catatan, dokumen, dan fisik aset bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. Dalam hal fungsi SKAI terintegrasi dalam konglomerasi keuangan, SKAI memiliki Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan audit intern terintegrasi yang harus dipatuhi oleh semua SKAI LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit di semua level Unit Kerja BRI secara independen, objektif dan profesional serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugas.
6. Menjadi *Liaison Officer* bagi pihak eksternal BRI dalam kaitannya dengan fungsi audit.

Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
3. Memastikan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.
4. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur audit intern, kecuali jika kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Intern. Setiap pertentangan yang ada akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
5. Memastikan seluruh kegiatan asurans dan konsultasi dilakukan dengan mematuhi Standar Profesional Audit Intern.
6. Menyiapkan ukuran-ukuran penilaian keberhasilan kinerja dan pencapaian tujuan Satuan Kerja Audit Intern.
7. Memastikan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi telah diterapkan dan dijunjung tinggi.



8. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
9. Menyusun rencana audit tahunan beserta dengan pembuatan rencana tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
10. Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit atas setiap perubahan sementara signifikan dalam Perencanaan Audit Tahunan.
11. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern, termasuk penetapan tujuan dan cakupan, penugasan yang tepat dan pengawasan yang memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, serta komunikasi terkait hasil penugasan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak terkait.
12. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
13. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
14. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara periodik.
15. Dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern, SKAI BRI wajib memastikan bahwa:
 - a. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI dengan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
 - b. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI dan patuh pada Piagam Audit Intern Bank.
16. SKAI BRI sebagai perusahaan induk:
 - a. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak
 - b. Merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
 - c. Memastikan fungsi audit intern pada Perusahaan Anak berjalan dengan efektif.
 - d. Melakukan audit sesuai dengan rencana audit intern, termasuk tujuan dan cakupan, penugasan yang tepat dan pengawasan yang memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian serta komunikasi hasil penugasan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi pihak terkait.
17. Memastikan dalam hal terdapat permintaan saksi ahli kepada jajaran SKAI, maka dapat memberikan penugasan kepada Auditor tertentu untuk menjadi saksi ahli dengan mempertimbangkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman sesuai dengan kasus yang dihadapi.
18. Memastikan apabila terdapat permintaan atas dokumen audit oleh pihak ekstern (terkait litigasi), telah dilakukan koordinasi dengan atau *Legal Officer*.
19. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
20. Kepala SKAI memperoleh penilaian kerja dari Direktur Utama dan Komite Audit secara tertulis dan transparan.
21. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kepala SKAI wajib memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan efektif sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Wewenang Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Audit Intern memiliki kewenangan paling sedikit:

1. Mengakses seluruh informasi secara penuh, bebas, dan tidak terbatas tentang catatan, informasi, pekerja, dana, asset, lokasi/area, dan sumber daya lain BRI terkait dengan tugas dan fungsi SKAI, termasuk terhadap perusahaan anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BRI, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara, seperti rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko, dan lainnya
6. Melakukan koordinasi dengan auditor ekstern terkait kegiatan pemeriksaan auditor ekstern.
7. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
8. Mendapatkan bantuan unit-unit kerja lain atau menggunakan jasa pihak ekstern (seperti jasa *advisory*) dalam pelaksanaan audit apabila diperlukan.

Komposisi Personil Satuan Kerja Audit Intern

SKAI terus berkomitmen mengembangkan kualitas, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi Auditor melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Berikut disajikan data jumlah Auditor jajaran SKAI.

Jabatan	Jumlah
SEVP	1
EVP	2
VP / Dept. Head	8
Team Member ASQ	49
Team Member HOA	59
Team Member SPI	6
Regional Chief Audit	16
Regional Assurance Head	15
Team Member Regional Assurance	429
Team Leader Consulting & Support	16
Team Member Consulting & Support	78
Total	679

Sertifikasi Profesi Personil Satuan Kerja Audit Intern

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, SKAI BRI didukung tenaga audit profesional yang diantaranya telah bersertifikasi nasional maupun internasional sebagai berikut:

Nama Sertifikasi	Jumlah Peserta
Certified Fraud Examiner (CFE)	21
Certified Information System Auditor (CISA)	12
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	4
Certified Qualified Internal Auditor (QIA)	57
Certified Bank Internal Audit (CBIA)	39
Certified Forensic Auditor (CFrA)	16

Dalam meningkatkan kualitas audit dalam memberikan jasa *assurance* dan konsultasi, SKAI BRI mendukung auditor dengan memberikan sertifikasi di luar audit sebagai berikut:

No	Nama Sertifikasi	Jumlah Peserta
1.	Certified Ethical Hacker (CEH)	4
2.	Certified Data Center Professional (CDCP)	1
3.	Certified Financial Planer (CFP)	1
4.	COBIT 5 Foundation Certificate (COBIT 5)	2
5.	Lead Auditor ISO 9001:2015 IRCA Approved	1



No	Nama Sertifikasi	Jumlah Peserta
6.	Lead Auditor ISO 37001:2016	1
7.	Lead Auditor ISO 27001:2013 and ISO 19011:2011	2
8.	Certified Data Center Specialist (CDCS)	1
9.	Business Continuity Certified Planner (BCCP)	1
10.	Certified Statement Analysis (CSA)	2
11.	Big Data Administrator (BIG DATA)	4
12.	Kepatuhan	1
13.	Certified Governance Risk and Compliance Professional (CGRCP)	2
14.	General Banking	98
15.	Manajemen Risiko Level 1	104
16.	Manajemen Risiko Level 2	30
17.	Manajemen Risiko Level 3	5
18.	Manajemen Risiko Level 4	2
19.	Sertifikasi LSP BRI Level Manager	1
20.	Sertifikasi LSP BRI Level Supervisor	45
21.	Sertifikasi LSP BRI Level Auditor	287

Kualifikasi Pendidikan Formal Jajaran SKAI

Pendidikan	Jumlah
S1	598
S2	69
Lainnya	679

Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Audit Intern

Selain itu dilakukan pendidikan berkelanjutan melalui *on job training*, pendidikan *development dan enhancement (Inclass, In House Training, Public Course dan Seminar)* dan sertifikasi profesional Auditor. Adapun pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Program	Jumlah Peserta
1	COP (Community Of Practice)	138
2	BLDP	69
3	BSDP (1,2,3)	2495

No	Nama Program	Jumlah Peserta
4	BLRP	10
5	SOSIALISASI	681
6	IHT SPECIAL REQUEST	160
7	FPK/FGD	55
8	PUBLIC COURSE DN	15
9	PUBLIC COURSE LN	9
10	PEMBEKALAN & UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI	263
11	SESPIBANK	1
TOTAL		3896

Partisipasi dalam Asosiasi Profesi Audit Internal

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional audit intern, SKAI telah berpartisipasi dalam asosiasi profesi audit internal salah satunya dengan keikutsertaan SKAI BRI dalam organisasi eksternal, antara lain:

No	Nama Asosiasi	Tujuan	Posisi Keanggotaan
1	Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	Wadah Komunikasi <i>Chief Auditor</i> untuk Indonesia untuk meningkatkan kualitas audit di Indonesia dan untuk memperkuat pondasi ilmu Audit pada perubahan yang terjadi di Industri Indonesia	Dewan Pengawas Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)
2	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKPSI)	Asosiasi Satuan Pengawasan Intern BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah, dan Anak Perusahaan BUMN yang bersifat profesional, independen, dan non-politik	Anggota

Sertifikasi Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern telah melakukan resertifikasi ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu dari lembaga Sertifikasi SGS Indonesia pada bulan Januari 2024 dengan hasil tidak terdapat temuan Major maupun Minor. SKAI BRI dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 yang berlaku hingga Desember 2023, dalam hal ini SKAI BRI telah mendapatkan Sertifikasi ISO selama 21 tahun sejak pertama kali dilakukannya sertifikasi ISO 9001:2000 pada tahun 2002. Sertifikasi ISO tersebut diberikan kepada seluruh unit kerja SKAI termasuk Audit Standard & Quality Development Division, Head Office Audit, dan 18 Regional Audit Office BRI Seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa SKAI BRI telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam setiap pelaksanaan audit, sehingga dapat turut mewujudkan visi SKAI BRI menjadi *strategic business partner* yang handal dalam rangka mencapai visi BRI dan menjadi *benchmark of best practice* bagi Satuan Kerja Audit Intern di Indonesia.



Kode Etik Auditor

SKAI BRI memiliki kode etik berupa prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang harus dipatuhi oleh Auditor Intern baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan audit untuk meningkatkan budaya etik dalam Profesi Audit Intern. Kode Etik Auditor BRI terdiri dari 4 (empat) prinsip, yaitu:

1. Integritas
Jujur, membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor intern dalam melaksanakannya tugas dan tanggung jawabnya.
2. Objektivitas
Auditor SKAI melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Auditor SKAI harus menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang objek yang diuji.
3. Kerahasiaan
Auditor SKAI menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkap informasi tersebut (tanpa kewenangan yang sah), kecuali diwajibkan oleh hukum atau profesi.
4. Kompetensi
Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas SKAI.



Komitmen Auditor Intern terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Audit Intern dan diperbaharui setiap tahun. Hal ini dilakukan agar setiap Auditor diingatkan kembali akan adanya Kode Etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati.

Independensi dan Objektivitas SKAI BRI

SKAI BRI sebagai *3rd line* secara struktural telah independen terhadap fungsi *1st line* (Unit Kerja Operasional) dan fungsi *2nd line* (Jajaran Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan). Kedudukan SKAI dalam perusahaan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, serta memiliki akses komunikasi (*communication line*) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit). Hal tersebut mendukung independensi dan objektivitas pelaksanaan dan pelaporan audit, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BRI. Komunikasi SKAI dengan Komite Audit dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara rutin. Untuk menjaga objektivitas Auditor Intern, dilakukan perubahan penugasan secara berkala. Selain itu, SKAI harus di *review* oleh auditor independen sesuai kebutuhan, paling tidak setiap 3 (tiga) tahun. *Review* dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Independen atau pihak independen lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama atas rekomendasi Komite Audit. Apabila terdapat gangguan independensi dan objektif, maka SKAI BRI wajib mengungkapkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Sistem Manajemen Informasi Audit

SKAI memiliki Sistem Manajemen Informasi Audit yang memadai dikenal dengan **BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA)**. BRISMA merupakan sebuah *suite application* dalam bidang Manajemen Audit yang memfasilitasi penetapan standar audit pada semua tahapan proses audit intern di BRI mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi hingga *Monitoring*.



Metodologi Audit

Satuan Kerja Audit Intern menerapkan *metode risk based audit* (RBA) dan *agile audit* dalam melaksanakan fungsi audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penetapan *audit universe* dilakukan dengan memperhatikan tujuan perusahaan, evaluasi terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan memastikan sistem pengendalian intern yang ada telah dapat memitigasi risiko. Dengan metodologi tersebut, maka pelaksanaan audit difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan *risk based audit*, SKAI menggunakan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT's) sebagai *analytical tools audit* untuk menentukan prioritas audit, ruang lingkup dan sampel audit.

Di samping kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan deteksi dini (*early warning signal*) terhadap potensi risiko melalui kegiatan *Monitoring off site* yang dilaksanakan Unit Kerja Audit. Peran audit dalam *Early Warning Signal* diharapkan dapat memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko yang terjadi di Unit Kerja. Pelaksanaan *Monitoring off site* didukung dengan pengembangan indikator risiko melalui teknologi *big data*. Untuk mewujudkan peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* telah dilakukan beberapa hal diantaranya penyampaian saran, ide dan masukan untuk penyempurnaan kebijakan, melakukan forum komunikasi antara Regional Audit Office dan Regional Office, Program Auditor Mengajar, kegiatan konsultasi, dan *sharing knowledge*, khususnya terkait dengan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. Kegiatan tersebut merupakan wujud visi SKAI sebagai SBP yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi BRI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya GCG di seluruh level unit kerja.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2023

Audit dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama. Sampai dengan Desember 2023 SKAI melaksanakan audit reguler dan kegiatan audit non reguler dengan rincian sebagai berikut:

1. *Head Office Audit* dan *Regional Audit Office* telah melaksanakan 3.115 unit kerja atau mencapai 108% dari PAT 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	Total Objek Audit (Populasi)	Total PAT 2023	Realisasi Audit Reguler (Des 23)	Pencapaian PAT 2023
Division		3	3	100%
Regional Office	18	18	18	100%
KCK	1	1	1	100%
Branch Office	447	294	322	110%
Sub Branch Office	563	333	357	107%
Cash Office	519	306	314	103%
BRI Unit	5156	1903	2.077	109%
Unit Kerja Luar Negeri	5	2	2	100%
Perusahaan Anak	10	3	3	100%
Fungsi Support & Administration RAO	18	18	18	100%
Grand Total	6.737	2.881	3.115	108%

2. *Head Office Audit*, *Regional Audit Office*, dan *Desk Special Investigasi Audit* telah melaksanakan kegiatan di luar Reguler Audit dengan rincian project audit sebagai berikut:

Unit Kerja	Realisasi Audit Non Reguler (Des 23)
Audit Spesial	402
Audit Tematik	133
Audit Investigasi	216
Surprise Audit	930
Formal Consulting	65
Informal Consulting	1.369

Di samping kegiatan reguler audit tersebut di atas, SKAI melaksanakan kegiatan *regulatory audit* (dengan ruang lingkup dan tujuan tertentu sesuai ketentuan regulator). Pada tahun 2023, SKAI melaksanakan 5 (lima) kegiatan *regulatory audit* yaitu:

1. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Bank Indonesia.
2. *Anti Money Laundering & CFT* BRI Timor Leste.
3. Pengelolaan Kas Titipan Bank Indonesia.
4. Pelaporan Data Penjaminan Nasabah (*Single Customer View*).
5. Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur (SLIK).

Selanjutnya, SKAI juga melaksanakan audit tematik dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran profil kecukupan dan efektivitas pengendalian intern secara menyeluruh (*end to end process*). Selama tahun 2023 SKAI dengan 133 (seratus tiga puluh tiga) *project* audit tematik yang terdiri dari:

1. 16 (enam belas) tema tematik terhadap Divisi Kantor Pusat dengan Jumlah *project* audit sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) *project*.
2. 4 (empat) tema tematik terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dengan jumlah *project* audit sebanyak 60 (enam puluh) *project*.

Satuan kerja Audit Intern telah melaksanakan Audit ICoFR Fase II dengan ruang lingkup meliputi aspek IT *General Control* (ITGC), IT *Application Control* (ITAC) dan *Process/Transaction Level Control* (PLC) yang meliputi proses Mikro, Ritel, Konsumer, Korporasi, *Financial Reporting* dan *Customer Deposit* terhadap unit kerja *Division*, *Office*, *Sub Branch Office*, *Cash Office*, dan *BRI Unit*.



Rapat Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern telah memiliki kebijakan rapat yaitu dapat menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Satuan Kerja Audit Intern BRI dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara, seperti rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko dan komite lainnya.

Selama tahun 2023, SKAI telah melaksanakan rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris serta Komite di bawah Direksi sebanyak 165 kali, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah Rapat
Dewan Komisaris	43
Direksi	53
Dewan Komisaris dan Direksi	19
Komite Audit	19
Komite Pemantau Manajemen Risiko	9
Komite Tata Kelola Terintegrasi	7
Komite Produk	15
Total	165

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap komitmen perbaikan kelemahan pengendalian intern sesuai rekomendasi SKAI, Pengawas maupun Auditor Eksternal. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen sampai dengan posisi Desember tahun 2023 sebagai berikut:

No	Lembaga Pemeriksa	Jumlah Komitmen			
		Total Komitmen	Selesai	Belum Selesai	
				Dalam tenggat waktu	Lewat tenggat waktu
1	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	276	271	5	0
2	Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)	458	401	57	0
3	Bank Indonesia (BI)	201	150	51	0
4	KAP Ernst & Young (E&Y)	147	138	9	0
Total		1.082	960	122	0

Auditor Internal

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen sampai dengan Desember 2023 sebagai berikut:

No	Hasil Monitoring RPM	Jumlah Rekomendasi	% Rekomendasi
1	Memadai	58.335	99,468%
2	Tidak Memadai	14	0,000%
3	Dalam Pemantauan	298	0,005%
Total		58.647	100%

Sinergi dengan Assurance Provider

SKAI melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fungsi pengendalian lainnya terutama dalam hal pemetaan cakupan asuransi (meliputi risiko signifikan, pihak yang melakukan asuransi dan lainnya). Hal tersebut dilakukan untuk membantu mengidentifikasi gap dan duplikasi cakupan asuransi serta membantu SKAI untuk mengevaluasi kecukupan jasa asuransi di masing-masing risiko. Hasil pemetaan tersebut didiskusikan dengan fungsi pengendalian lainnya untuk memperoleh kesepakatan mengenai koordinasi kegiatan dalam meminimalkan duplikasi pekerjaan, memaksimalkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas cakupan *assurance*.

Unit Manajemen Risiko**RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO 2023**

Tahun 2023, Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus menegaskan komitmennya dalam pengelolaan risiko yang proaktif dan adaptif. Sejalan dengan pencapaian di tahun 2022, BRI telah mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan bisnis, yang merupakan kunci untuk menjaga *sustainability* perusahaan di tengah tantangan pasar yang penuh dengan ketidakpastian.

BRI terus meningkatkan fokus pada pengelolaan risiko secara holistik yang termasuk peningkatan sistem pengawasan internal, *risk appetite* dan *risk profile* yang lebih sensitif, serta penguatan struktur organisasi dan teknologi yang mendukung.

Direktorat Manajemen Risiko terus berupaya menanamkan budaya sadar risiko yang kuat di setiap unit dan *level* pekerja, melalui program-program pelatihan dan *capacity building* yang intensif. Aspirasi '*Managing Risk for Sustainable Business, Operational Excellence & Banking Resilience*' terus menjadi pendorong utama untuk mencapai kinerja yang optimal.

BRI juga meningkatkan kapabilitas dalam mengidentifikasi dan merespons *early warning signals*, memungkinkan perusahaan untuk bereaksi lebih cepat dan efektif terhadap potensi risiko.

Integrasi teknologi informasi terbaru dalam sistem manajemen risiko kami telah meningkatkan kapasitas kami dalam analisis data

Strategy soft landing masih dilakukan mengingat kondisi pasca covid-19 masih memberikan tekanan terhadap kondisi nasabah untuk dapat pulih khususnya pada segmen UMKM. Optimalisasi pengelolaan risiko kredit terus dilakukan dan menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Tercatat penurunan pada *Loan at Risk* (LAR) sebesar 12,54% (turun 457 bps YTD) yang diimbangi dengan pencadangan yang memadai dengan LAR *coverage* sebesar 53,66%, yang mencerminkan efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan. Di sisi lain BRI berhasil mengoptimalkan *recovery income* ekstrakomptable dengan pencapaian sebesar Rp. 16,2 T (Recovery Rate 49,18%) yang tumbuh secara Year on Year 36,61% terhadap 2022.

Dalam menghadapi tantangan operasional dan digital yang semakin kompleks, BRI mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan risiko operasional dan digital. Keberhasilan dalam pengelolaan ini merupakan aspek kritis untuk menjaga keandalan dan keamanan layanan kami kepada nasabah. Di tahun 2023, BRI telah menerapkan serangkaian inisiatif yang dirancang untuk menekan frekuensi dan kerugian di sisi operasional serta meningkatkan mitigasi terhadap ancaman keamanan IT.



Manajemen risiko diterapkan pada seluruh aktivitas bank dengan mengacu pada ketentuan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Regulator. Proses manajemen risiko terdiri dari aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh *three lines* model.

First line menjalankan aktivitas operasional bank untuk memberikan jasa dan layanan kepada nasabah, termasuk mengelola risiko untuk mencapai tujuan perusahaan. *Second line* membantu first line dalam mengelola risiko dengan menyediakan dukungan berupa *risk and control assessment*, *Monitoring*, dan evaluasi penerapan manajemen risiko. *Third line* memberikan *assurance* atas kecukupan *control* dan efektivitas pelaksanaan internal control oleh *first line* dan *second line*.

Satuan kerja manajemen risiko Bank terdiri dari *Market, Portfolio & Enterprise Risk Division, Operational Risk Division, Digital Risk Division, dan Credit & Product Risk Policy Division*.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko *enterprise*, kredit, pasar, likuiditas, operasional, digital dan Manajemen Kelangsungan Usaha, serta Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
2. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan penetapan *Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit, dan Loan Portfolio Guideline* kepada Direksi dengan memperhatikan masukan dari Unit Kerja Operasional.
3. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
4. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
5. Memantau implementasi kebijakan, strategis, dan pedoman penerapan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh *Risk Management Committee (RMC)* dan/atau yang telah disetujui oleh Direksi.
6. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (*composite*), maupun per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
7. Melakukan stress testing setiap triwulanan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, untuk mengetahui dampak dari perubahan kondisi ekonomi terhadap portofolio atau kinerja secara keseluruhan.
8. Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko berdasarkan temuan audit dan/atau perkembangan praktik-praktik manajemen risiko yang berlaku secara internasional.
9. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru, termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.
10. Mengevaluasi akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, apabila menggunakan model untuk keperluan intern (*internal Model*) dan/atau regulator.
11. Memberikan rekomendasi kepada Unit Kerja Operasional dan/atau kepada RMC sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat diterima Bank.
12. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi dan Komisaris setiap triwulan. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
13. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan untuk memastikan kecukupan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
14. Menyusun dan menyampaikan kewajiban-kewajiban pelaporan tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku kepada regulator.

Profil Kepala Divisi yang Membidangi Manajemen Risiko



Dodo Marjanto

Operational Risk Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1972. Usia 51 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Diponegoro



PENGALAMANKERJA

- *Operational Risk Division Head* (Agustus 2023-sekarang)
- *Credit Restructuring & Recovery Division Head* (Mei 2023-Juli 2023)
- *Regional Risk Management Head* RO Semarang (November 2022-April 2023)
- *Regional Risk Management Head* RO Denpasar (September 2021-Juni 2023)
- *Regional Risk Management Head* RO Bandar Lampung (Oktober 2020-Agustus 2021)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi Nomor R.697-DIR/HCB/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Mutasi Pejabat BRI.



Nugroho Pancayogo

Digital Risk Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Pontianak pada tahun 1978. Usia 45 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 Fisika, Institut Teknologi Bandung (2001)
- S1 Mechatronics, University Fachhochschule Ravensburg - Weingarten (2003)



PENGALAMANKERJA

- *Division Head, Digital Risk Management* (2023 - sekarang)
- *Department Head, IT Enterprise Architecture Department* (2021 - 2023)
- *VP, Application Management & Operation Division* (2020 - 2021)



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
- *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)*



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai *Digital Risk Division Head* sesuai dengan Surat Keputusan NOKEP 395.e-DIR/HCB/09/2023



Ety Yuniarti

Market, Portfolio & Enterprise Risk Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Klaten pada tahun 1981. Usia 42 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Elektro UGM (2003)
- MBA Melbourne Business School (2012)



PENGALAMANKERJA

- Kepala Divisi Market, *Portfolio & Enterprise Risk* (2021)
- Kepala Divisi Micro, SME, *Consumer Credit Risk & Policy* (2020)
- Wakil Kepala Divisi Asset, *Liabilities & Management Information System* (2019)
- Kepala Bagian *Equity Management & Strategic Investment* (2018)
- Kepala Bagian *Investor Communication* (2015)



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
- Indonesian *Professional Certification Authority*



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Market, Portfolio & Enterprise Risk Division Head berdasarkan Keputusan Direksi No. 214.e-DIR/HCB/05/2022 tanggal 01 Mei 2022.



Nugroho Ari Brawono

**Credit & Product Risk Policy
Division Head**

Warga negara Indonesia, lahir di Tangerang pada tahun 1968. Usia 55 Tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 – Fakultas Peternakan Jurusan Produksi Ternak Universitas Diponegoro (1991)
- S2 – Magister Management Agribisnis Institut Pertanian Bogor (2004)



PENGALAMANKERJA

- Division Head Credit & Policy Product Risk Policy Division (2023)
- Vice President Compliance Division (2020)
- Assistant Vice President Compliance Division (2020)
- Kepala Bagian Kepatuhan Bidang Perkreditan (2017)



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2
- Sertifikasi Kepatuhan Perbankan Lever Manager
- Sertifikasi Credit Officer Level 3



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai *Credit & Product Risk Policy Division Head* sejak 1 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Direksi No.S.22.e-DIR/HCB/02/2023 tanggal 6 Februari 2023

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Program Pendidikan dan pengembangan kompetensi selama tahun 2023 sebagai berikut:

- BRILiaN *Specialist Development Program (BSDP) Risk Management Specialist*
 - Risk Data Analytics & Modelling*
 - Regulatory Risk Assessment*
 - Liquidity Risk Management*
 - Cyber Risk Management*
 - Asset and Liability Risk Management*
 - Operational Risk*
 - CRAS (Credit Risk Analysis System)*
 - GRC Integrated Risk Management*
 - Credit Risk Analyst*
 - Credit & Product Risk Policy*
 - Wholesale Credit Risk Analyst*
 - Credit Restructuring and Recovering*
 - Modul Risk Upgrade Series tahun 2023
- BRILiaN Specialist Development Program (BSDP) Market Risk Management
 - Level Basic*
 - Level Intermediate*
 - Level Advance*
- BRILiaN Specialist Development Program (BSDP) Operational Risk Management
 - Fraud Risk Management*
 - Business Continuity Planning*
- BRILiaN Specialist Development Program (BSDP) Digital Risk Management
 - Cybersecurity Risk Management – Transforming Governance Security and Compliance in Cloud Era*
 - Emerging Technology Synthesis – Archer Administration I*

- BRILiaN *Specialist Development Program (BSDP) BRC – URC*
 - Level Basic*
 - Level Intermediate*
- Pendidikan KBBUMN – *BRI Group Boosting The Attitude Program*

Sertifikasi Manajemen Risiko

Pekerja yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko di BRI tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Level Sertifikasi	Peserta
1	1	3.330
2	2	734
3	3	161
4	4	50
5	5	15
Total		4.290

Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2023

- Penetapan Risk Appetite Statement (RAS) dan Limit Risiko**
Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi BRI telah melakukan pengkinian terhadap *Risk Appetite Statement (RAS)* BRI dalam bentuk pernyataan

yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan ketidaktoleranan (*zero tolerance*). Penetapan RAS dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil maupun strategi dan target Bank secara keseluruhan. RAS BRI dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI, perubahan kondisi lingkungan bisnis serta Aspirasi Pemegang Saham. RAS BRI digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan risiko dan sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik.

Selanjutnya RAS BRI diturunkan menjadi limit risiko untuk setiap indikator risiko. Limit risiko yang ditetapkan meliputi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per-aktivitas fungsional. Penetapan limit risiko digunakan sebagai panduan bagi aktivitas Unit Kerja BRI untuk mengelola jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima.

2. Penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Bank Sistemik

Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, BRI memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang diatur dalam PLPS No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial BRI sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang berdampak pada permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset yang membahayakan kelangsungan usaha BRI. Sementara Dokumen Rencana Resolusi memuat informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi LPS dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal. Pada dokumen Rencana Aksi dan Rencana Resolusi, terdapat analisis materialitas dan pemeringkatan untuk menentukan peringkat lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak. Analisis dilakukan dengan menggunakan scorecard materialitas berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan. Pemeringkatan dilakukan untuk menentukan tingkat materialitas atas lini bisnis, peringkat perusahaan anak dan jaringan kantor.

Selain itu terdapat analisis keterkaitan usaha eksternal didasarkan pada beberapa aspek, yaitu (1) *Intra-financial system assets*, (2) *Intra-financial system liabilities*, dan (3) *securities outstanding* serta analisis counterparty signifikan (*Obligor*, *Depositor*, *Treasury Counterparties*) sesuai dengan *common practice* yang ada. Kemudian dilakukan pula analisis skenario dampak perubahan BRI dengan melakukan

Stress Testing yang dibagi dalam 3 (tiga) skenario yaitu *Idiosyncratic*, *Market-wide* dan kombinasi dari keduanya. Untuk skenario *Idiosyncratic* BRI mengembangkan skenario terkait konsentrasi pada obligor serta industri yang ada. Untuk skenario *Market-wide*, BRI mengembangkan skenario stress test berdasarkan proyeksi isu makroekonomi ke depan. Sedangkan skenario kombinasi merupakan skenario terburuk yang berasal dari kombinasi *idiosyncratic* dan *market wide*.

Berdasarkan hasil *Stress-Testing* tersebut, BRI kemudian menyusun dan menetapkan opsi pemulihan berdasarkan indikator permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset. Selain itu, BRI juga menetapkan *trigger level* dari setiap indikator yang digunakan untuk mengaktifkan implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*). *Trigger level* tersebut diurutkan berdasarkan level pencegahan, pemulihan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*). Kemudian sebagai tambahan penerapan Rencana Resolusi, BRI juga telah menyusun strategi resolusi yang akan dilakukan oleh BRI dalam hal BRI ditetapkan sebagai Bank Gagal oleh LPS. Laporan Pengungkapan Rencana Aksi dan Rencana Resolusi BRI disampaikan kepada pihak internal dan eksternal dengan tingkat pengungkapan yang disesuaikan dengan masing-masing *targeted audience*.

3. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk Bank Baru (PBB)

Product owner wajib melakukan *self assessment* pada setiap rencana penerbitan Produk Bank Baru (PBB). Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dikoordinasikan oleh Operational Risk Division melakukan penilaian kecukupan pengelolaan risiko terhadap rencana penerbitan PBB. Pada penilaian tersebut, SKMR memastikan setiap risiko yang melekat pada rencana penerbitan PBB dan kontrol pengendalian telah teridentifikasi serta terukur dengan baik. Proses penilaian kecukupan pengelolaan risiko melibatkan SKMR sesuai dengan bidang risiko yang menjadi kewenangannya. Penilaian kecukupan pengelolaan risiko juga dilakukan atas rencana penyelenggaraan Kegiatan untuk aktivitas Bank sendiri sebagai bentuk dari pelaksanaan Manajemen Risiko Bank.

Kebijakan pengelolaan risiko atas rencana penerbitan PBB diatur dalam Surat Edaran No. 58-/DIR/ORD/11/2022 Buku 6 tentang Pengelolaan Risiko Penyelenggaraan Produk. Penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari SKMR selanjutnya dipergunakan untuk proses pengelolaan produk Bank lebih lanjut, baik proses di internal bank maupun kepada Regulator sesuai POJK No.13/POJK.03/2021 mengenai Penyelenggaraan Produk Bank Umum.



4. Peningkatan Kapabilitas Regional Risk Management (RRM)

Pembentukan organisasi *Regional Risk Management* (RRM) dilakukan untuk memperkuat implementasi Manajemen Risiko di tingkat Regional dalam rangka mewujudkan aspirasi manajemen risiko “*Managing Risk for Sustainable Business, Operational Excellent, and Banking Resilience*”.

RRM di *Regional Office* berperan sebagai *control tower* yang menjaga kualitas *portfolio* dan operasional di tingkat Regional dan dipimpin oleh Pejabat setingkat Vice President (VP) yang disebut dengan RRM Head. Struktur organisasi RRM terdiri dari RRM Head yang mensupervisi *Credit Risk Analyst* (CRA) dan *Risk Management and Compliance* (RMC).

CRA berkedudukan di *Regional Office* menjalankan fungsi *credit risk management*, RMC berkedudukan di *Regional Office* mensupervisi *Branch Risk and Compliance* (BRC) dan BRI Unit *Risk and Compliance* (URC) yang berkedudukan di Kantor Cabang dan BRI Unit.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan peran RRM, selama tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

- Pelaksanaan Webinar *Risk Upgrade Series*
- Pelaksanaan program BSDP untuk CRA, RMC, BRC, dan URC
- Pelaksanaan *Refreshment Strategic Initiative* BRIVolution 2.0 untuk RRM Head, RMC *Team Leader*, dan CRA *Team Leader*
- Pengembangan *Key Risk Indicator Dashboard* (KRID)
- Pelaksanaan *Quality Assurance* di seluruh RRM

BRC dan URC sebagai mitra Pemimpin Unit Kerja memiliki tugas utama untuk memastikan pelaksanaan manajemen risiko operasional dan kepatuhan dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja, pengendalian *fraud* dan human *error*, pelaksanaan BCM dan K3, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal di masing-masing unit kerja binaan.

5. Implementasi Budaya Sadar Risiko

Risk & Governance Culture merupakan landasan pelaksanaan tema budaya nasional BRI *One Culture* untuk memastikan penerapan manajemen risiko pada setiap aktivitas perbankan. Pada tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan Budaya Risiko melalui SE.04-DIR/CTR/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal *Corporate Culture* Buku 2 Budaya Risiko sebagai panduan bagi insan BRILiaN dalam mengimplementasikan dan mendukung penerapan Budaya Risiko.

Program internalisasi budaya risiko yang telah dilaksanakan, antara lain:

- Culture Activation Program* (CAP)
Setiap unit kerja telah menetapkan CAP untuk membentuk perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai KPI secara *prudent* melalui aktivitas yang telah ditetapkan pada CAP.

- Membangun *Risk Awareness* Pekerja di Unit Kerja SKMR secara rutin menyampaikan media *risk awareness* baik dalam bentuk surat, media infografis, webinar, *podcast*, *e-learning*, akun media sosial resmi Bank dan email/WA/sms blast.
- Empowering Risk Officer*
Diperlukan keterlibatan *Risk Officer* sebagai Tim Penggerak Transformasi dalam menginternalisasi dan memastikan penerapan budaya risiko telah terlaksana. Sehingga dilakukan penguatan fungsi MR melalui penyesuaian operasional prosedur serta upgrading pengetahuan dan *technical skills* melalui pendidikan/ sosialisasi.
- Early Detection*
Penerapan budaya risiko perlu didukung oleh *tools Early Warning System* yang dapat membantu memitigasi maupun mengoreksi kejadian risiko secara lebih dini.
- Business Process Review*
Aktivitas budaya risiko tercermin melalui pelaksanaan operasional prosedur perbankan secara harian. Sehingga diperlukan reviu kecukupan kontrol atas operasional prosedur tersebut.

6. Penerapan Strategi Anti Fraud

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum, serta sebagai wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris BRI yang tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) atas segala bentuk kejadian *fraud* baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal Bank, BRI melakukan penguatan pengendalian *fraud* yang diwujudkan melalui penerapan strategi *anti fraud*. Strategi *anti fraud* BRI terdiri dari:

- Pilar 1 (Pencegahan)
Merupakan tanggung jawab dari seluruh jajaran Bank untuk meminimalkan potensi terjadinya *fraud* melalui penguatan kepedulian dan budaya anti *fraud* yang diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank yang meliputi jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh Insan BRILiaN minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Program yang diterapkan dalam pilar pencegahan meliputi: edukasi dan pengembangan kompetensi anti *fraud* bagi seluruh Pekerja, peningkatan *awareness* bagi Nasabah yang dilakukan secara berkala melalui platform sosial media Bank, identifikasi kerawanan pada aktivitas operasional dan/atau proses bisnis Bank, serta kebijakan mengenal pegawai.
- Pilar 2 (Deteksi)
Merupakan tanggung jawab dari seluruh jajaran Bank untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi di lingkungan Bank. Perangkat yang digunakan untuk melakukan deteksi *fraud* meliputi: *Whistleblowing System*, *Fraud Detection System*, kegiatan pemeriksaan insidental yang diprioritaskan pada unit atau aktivitas bisnis yang rawan, serta penerapan sistem pengawasan.

3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi)
Kegiatan investigasi dilakukan oleh Fungsi Investigasi *Fraud* dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta Regulator, termasuk didalamnya rekomendasi penyelesaian kasus baik berupa penerapan sanksi disiplin dan/atau proses hukum sesuai dengan ketentuan internal Bank dan peraturan hukum yang berlaku.
4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut)
Merupakan kegiatan *Monitoring* atas tindak lanjut dari hasil investigasi *fraud* serta upaya perbaikan sistem pengendalian internal untuk mencegah kejadian *fraud* yang sama terulang kembali. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan strategi *anti fraud*.

7. Penguatan Manajemen Risiko Digital

Seiring dengan perkembangan digitalisasi bisnis Bank, eksposur risiko dalam penggunaan platform digital untuk layanan perbankan turut meningkat. Peningkatan eksposur risiko ini menuntut adanya proses pengendalian risiko digital yang lebih adaptif dan efektif bagi Bank sesuai dengan peningkatan resiliensi infrastruktur dan keandalan layanan digital Bank. BRI telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Digital sebagai dasar pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan penilaian kecukupan penerapan risiko digital di BRI, melalui perangkat manajemen risiko digital antara lain register risiko digital, *key risk indicator*, manajemen insiden, serta forum manajemen risiko digital. Saat ini, untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnis Bank serta selaras dengan paparan risiko digital yang berpotensi meningkat akibat implementasi digitalisasi, BRI melakukan *enhancement* terhadap *Integrated Risk Management (IRMS)* untuk modul *Third Party Risk* sebagai kegiatan pengelolaan risiko pihak penyedia jasa TI. BRI juga memiliki inisiatif strategis lain, yaitu pengelolaan data histori untuk kuantifikasi proses penelolan risiko digital. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, BRI bersama Perusahaan Anak memiliki Proyek *Revamp and Scale Up Adaptive Digital Risk Management Framework* sebagai langkah peningkatan value atas pengelolaan risiko digital pada BRI dan Perusahaan Anak.

8. Penerapan *Business Continuity Management (BCM)* dan Sistem Manajemen K3

BRI menyadari dan mengetahui perannya dalam menyediakan produk dan jasa perbankan serta menjaga kelangsungan usahanya, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi terjadinya gangguan atau bencana. Hal ini mendorong BRI membuat kebijakan tertentu untuk mengidentifikasi, menguji, dan mengimplementasikan *Business Continuity Management (BCM)* yang tertuang dalam Surat Edaran No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022 serta Standar Operasional Prosedur No. SO.05a-ORD/05/2023.

BCM merupakan proses yang kritical bagi perusahaan guna mempertahankan kelangsungan operasional bisnis dan meminimalisasi dampak yang berpotensi muncul ketika terjadi bencana/krisis.

Selain itu, komitmen utama BRI terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa Pekerja dipenuhi dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk meminimalkan risiko operasional. Implementasi SMK3 di BRI dikoordinasikan oleh Departemen BCM dan K3 di *Operational Risk Division*, di bawah Direktorat Manajemen Risiko. Kebijakan SMK3 BRI diatur dalam Surat Edaran Nomor: SE.50-DIR/MPE/12/2023 Buku 1 tentang *Business Continuity Management (BCM)* dan Buku 2 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan SOP Implementasi K3 yang diatur pada ketentuan No. SO.05-ORD/05/2023.

Selama Tahun 2022, BRI melaksanakan beberapa program implementasi BCM dan SMK3 yang terdiri dari: Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB), *Business Impact Analysis (BIA)*, reviu dan pengkinian *Business Continuity Plan (BCP)*, *Disaster Recovery Plan (DRP)*, *Emergency Response Plan (ERP)*, Penilaian risiko dan bahaya K3 untuk mengidentifikasi penyebab bahaya di tempat kerja atau Indikator *Hazard Identification Risk Assessment Determining Control (HIRADC)*, sosialisasi dan pelatihan untuk *floor warden*, penyusunan materi *risk awareness* BCM dan K3 (Surat, Infografis, *Video*, *Podcast*, dan lainnya) serta melaksanakan kegiatan simulasi dan uji coba tanggap darurat di seluruh *Regional Office* dan *Branch Office* untuk memastikan pemahaman pekerja dalam menghadapi gangguan/bencana.

Selain hal tersebut, dalam rangka memastikan implementasi SMK3 di BRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka telah dilakukan sertifikasi implementasi SMK3 pada Agustus 2023. Berdasarkan hasil *Assessment* PT Multi Sertifikasi Indonesia (MSI), BRI mendapatkan nilai 94.26% atau kriteria MEMUASKAN sehingga BRI sudah berhak mendapatkan SERTIFIKAT EMAS.

9. Penerapan Modal Minimum Risiko Kredit Basel III Reform Pendekatan Standar

Per-1 Januari 2023, BRI telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Perubahan metodologi perhitungan dalam ketentuan tersebut meliputi:

- a. perubahan bobot risiko dan jumlah bucket yang lebih granular.
- b. klasifikasi kategori portofolio yang lebih beragam.
- c. keharusan pelaksanaan *due diligence* terhadap pihak lawan untuk memastikan pemahaman atas profil risiko



dan karakteristik dari pihak lawan agar penentuan bobot risiko tidak hanya bergantung pada peringkat eksternal.

Dalam implementasi penerapan standar perhitungan baru tersebut, BRI telah mengembangkan sistem otomatisasi perhitungan baru terutama untuk klasifikasi aset pinjaman dan telah dilaporkan kepada OJK setiap bulan sejak posisi Januari 2023.

10. Implementasi Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar sesuai Basel III (*Fundamental Review of The Trading Book*)

Dalam rangka penerapan SEOJK No.23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar, BRI melakukan implementasi perhitungan (sistem dan metodologi) ATMR Risiko Pasar dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) mulai posisi Januari 2024. Laporan uji coba terkait implementasi telah dilakukan untuk Posisi Juni, September dan Desember 2023. Pembaruan peraturan terkait ATMR Risiko Pasar bertujuan untuk memperkuat kapital yang dimiliki bank, mengatasi kelemahan yang didapat dari *global financial crisis* dan meminimalisir perbedaan model kapital yang dimiliki bank.

11. Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar

SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum telah diterapkan mulai Januari 2023. BRI telah mengimplementasikan perhitungan ATMR Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar yang dilaporkan kepada OJK pada tanggal 31 Maret 2023. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengukur kecukupan modal sebuah bank terhadap besaran eksposur risiko operasional selama satu tahun.

12. Credit Decision Engine & Credit Risk Model for Consumer Segment

Produk di segmen konsumen merupakan *mass product* yang membutuhkan proses *approval* cepat dan efektif, namun membutuhkan pengukuran tingkat risiko kegagalan kredit yang akurat. Untuk itu secara berkala dilakukan *review* terhadap proses *scoring* debitur berbasis risiko yang efektif baik pada tahapan *Credit Underwriting*, *Monitoring* kredit maupun *collection*, dengan *Application scoring*, *Behavior scoring* dan *Collection scoring*, yang dikelola secara terpusat pada *Credit Decision Engine* sehingga dapat dilakukan *Monitoring* dan *validasi* secara berkelanjutan.

13. Pengembangan *Early Warning Signal* untuk Kredit Korporasi dan SME

Dalam rangka peningkatan pemantauan risiko kredit, BRI mengembangkan sistem *Early Warning System* (EWS). Sistem EWS dibangun dengan menggunakan indikator risiko secara internal dan secara makro serta menerapkan analisa *forward looking*. Pengembangan Sistem EWS ini diterapkan untuk segmen Korporasi dan SME. Sistem EWS berfungsi untuk menghasilkan sinyal (*warning*) yang digunakan oleh BRI sebagai acuan dalam menentukan tindakan yang perlu diambil dalam proses pengelolaan aset.

14. Perubahan Kebijakan Kredit yang Direstrukturasikan Terdampak Covid-19

Penyebaran wabah Covid-19 telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian di Indonesia yang berakibat pada penurunan kinerja dan kapasitas usaha debitur. Menyikapi hal tersebut, BRI melakukan beberapa perubahan kebijakan untuk kredit yang direstrukturasikan terdampak Covid-19 antara lain terkait penetapan kualitas kredit setelah restrukturisasi, kebijakan restrukturisasi ulang, jangka waktu, keringanan tunggakan bunga, dan skema restrukturisasi. Adapun dalam pemberian relaksasi tersebut, BRI tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan kriteria selektif untuk debitur yang dapat menerima relaksasi restrukturisasi Covid-19.

15. Pengembangan Metodologi Validasi Model Pemeringkatan Internal (*Credit Risk Rating dan Credit Risk Scoring*)

Berdasarkan *Basel Capital Accord* dan sesuai dengan persyaratan OJK, model internal harus memenuhi serangkaian kriteria minimal. Sejalan dengan ketentuan Basel dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. OJK juga mensyaratkan agar Bank memiliki proses internal yang kuat dalam melakukan validasi seluruh komponen dari model risiko kredit yang digunakan.

16. Pengembangan *Real Time Basis* pada Proses Valuasi (*Marked to Market*) serta pengembangan otomatisasi *VaR* dan *Backtesting VaR* pada aplikasi *Guava*

Berdasarkan Basel II, seluruh aset *Treasury* yang berada pada portofolio *FVOCI* dan *FVTPL* wajib dilakukan valuasi atau proses *mark to market* secara harian sebagai langkah untuk mitigasi risiko adanya risiko suku bunga dan risiko nilai tukar yang berdampak pada modal dan pendapatan laba rugi perusahaan. Mengingat pentingnya perhitungan dan informasi atas valuasi/MTM aset *Treasury* maka dilakukan pengembangan aplikasi agar diperoleh *market rate* secara otomatis *straight through processing* ke dalam aplikasi *Guava* sehingga perhitungan MTM/valuasi dan informasi menjadi lebih akurat, lebih cepat, dan meminimalisir risiko operasional yaitu *human error*.

Komite di Bawah Direksi

Direksi telah membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank. Per 31 Desember 2023, BRI memiliki 10 (sepuluh) Komite di bawah Direksi sebagai berikut:

1. *Asset and Liability Committee (ALCO)*
2. Risk Management and ESG Committee (RMC)
3. Komite Kredit
4. Komite *Capital & Investment*
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi & Tata Kelola Data
7. Komite Pengadaan Barang & Jasa
8. Komite *Human Capital*
9. Komite Produk
10. *Project Management Office Steering Committee*

Asset and Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggungjawab menyusun dan menetapkan kebijakan aset (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) berikut penetapan tarif *Fund Transfer Price* (FTP).

Piagam *Asset and Liability Committee (ALCO)*

Dalam melaksanakan tugasnya ALCO mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 1564-DIR/PPM/07/2023 tentang *Asset and Liability Committee (ALCO)* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang mengatur terkait Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Tata Kerja serta Rapat ALCO Terbatas.

Tugas dan Tanggung Jawab *Asset and Liability Committee (ALCO)*

Asset and Liability Committee (ALCO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan *asset and liability* yang optimum dengan memperhatikan *potential risk, optimum yield generation* dan *cost efficiency*.
2. Menetapkan suku bunga simpanan, suku bunga produk pinjaman, suku bunga dasar kredit (SBDK), metodologi dan suku bunga *fund transfer price* (FTP) termasuk *pricing* lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian *net interest income* (NII). ALCO dapat memberikan kewenangan kepada pihak yang ditunjuk untuk menetapkan hal-hal dimaksud sesuai putusan ALCO.
3. Menetapkan kewenangan Pejabat Pemutus dalam memutus suku bunga khusus simpanan, pinjaman dan/atau produk bank lainnya.
4. Menentukan kebijakan *Net Open Position* (NOP).
5. Memonitor bahwa pengelolaan *asset and liability* di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan Rapat ALCO.

Struktur Keanggotaan *Asset and Liability Committee (ALCO)*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti I (Merangkap anggota tetap dengan hak suara)	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti II (Merangkap anggota tetap dengan hak suara)	√
Desk Head, Assets & Liabilities Management	Sekretaris (Merangkap anggota tetap dengan hak suara)	√



Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting	Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan • Direktur Bisnis Kecil & Menengah • Direktur Bisnis Konsumer • Direktur Bisnis Mikro • Direktur Jaringan & Layanan • Direktur Digital & Teknologi Informasi • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Human Capital • SEVP Treasury & Global Services Business • SEVP Bisnis Komersial • SEVP Bisnis Ultra Mikro • SEVP Operations • SEVP Strategi Human Capital • SEVP Change Management & Transformation Office • SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan • Division Head, Agribusiness • Division Head, Manufacturing & Property • Division Head, Institutional Business • Division Head, Energy & Mining • Division Head, Infrastructure, Transportation, Oil & Gas • Division Head, Syndication & FI Non-Bank • Division Head, Transaction Banking • Division Head, Treasury Business • Division Head, Investment Services • Division Head, International Business & Performance Management 	<p>Anggota Tetap Dengan Hak Suara</p>	<p>√</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Division Head, Value Chain & Assets Product Development • Division Head, Small & Medium Sales Management 1 • Division Head, Small & Medium Sales Management 2 • Division Head, Card, Digital Lending, & Assets Product Development • Division Head, Consumer Sales Management 1 • Division Head, Consumer Sales Management 2 • Division Head, Wealth Management • Division Head, Micro Business Development • Division Head, Micro Sales Management • Division Head, Ultra Micro Business • Division Head, BRILink Business • Division Head, Social Entrepreneurship & Incubation • Division Head, Funding & Retail Payment Strategy • Division Head, Funding & Retail Payment Sales Management 1 • Division Head, Funding & Retail Payment Sales <p>Management 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Division Head, Market, Portfolio & Enterprise Risk • Division Head, Credit & Product Risk Policy • Division Head, Wholesale Credit Risk Analyst • Division Head, Credit Restructuring & Recovery • Division Head, Planning, Budgeting • Division Head, Financial & Management Accounting • Division Head, Subsidiary Management • Division Head, Investor Relation • Division Head, Change Management • Division Head, Project Management Office • Division Head, Credit Operation 		<p>√</p> <p>√</p>

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Kepatuhan SEVP Internal Audit	Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	-
Assets & Liabilities Management Desk	ALCO Supporting	-

Profil Anggota Asset and Liability Committee (ALCO)

Profil anggota ALCO dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Asset and Liability Committee (ALCO)

Seluruh anggota ALCO tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Asset and Liability Committee (ALCO) Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi ALCO dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Asset and Liability Committee (ALCO) Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

- Sekurangny 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan *Asset and Liability Committee* (ALCO) menyelenggarakan Rapat ALCO untuk membahas pengelolaan *asset and liability* Perusahaan yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan dalam hal:
 - Perkembangan kinerja bank dan perbandingan peers.
 - Komposisi dan pertumbuhan portofolio bank.
 - Alokasi aset produktif, diversifikasi *funding*, dan *capital management*.
 - Pengelolaan risiko antara lain risiko pasar dan risiko likuiditas.
 - Suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, suku bunga dasar kredit (SBDK), metodologi dan suku bunga *Fund Transfer Price* (FTP) termasuk *pricing* lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian *net interest income* (NII).
- Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan maka Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO Pengganti.

- Koordinasi dalam penyelenggaraan Rapat ALCO menjadi tanggung jawab Sekretaris ALCO diantaranya berupa:
 - Mempersiapkan Rapat ALCO.
 - Menyusun dan mempresentasikan materi Rapat ALCO.
 - Memastikan Rapat ALCO dihadiri sekurangny 2/3 (dua per tiga) Anggota ALCO untuk dapat diselenggarakan.
 - Menyusun dan mendistribusikan notulen Rapat ALCO.
- Rapat ALCO harus dihadiri oleh sekurangny 2/3 (dua per tiga) Anggota ALCO. Dalam hal Pemimpin Unit Kerja yang menjadi Anggota ALCO berhalangan hadir maka yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya setingkat Department Head.
- Untuk efisiensi administrasi terkait perubahan organisasi, atas Anggota tambahan dapat diusulkan tersendiri kepada Ketua ALCO melalui Sekretaris ALCO dimana surat persetujuan usulan keanggotaan menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ALCO.
- Keputusan Rapat ALCO diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penuh maka keputusan Rapat ALCO dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota ALCO yang memiliki hak suara ditambah dengan 1 (satu) orang Anggota ALCO, termasuk anggota Direksi yang salah satunya adalah Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti.
- Sekretaris ALCO dapat mengundang peserta yang relevan untuk mengikuti ALCO sesuai dengan topik pembahasan di dalam ALCO.
- Dalam hal kondisi yang sangat mendesak (*contingency*) untuk dilaksanakannya ALCO, namun Ketua dan/atau Ketua Pengganti berhalangan untuk memimpin rapat, maka Ketua ALCO dapat melakukan pendelegasian kepada salah satu Direktur untuk memimpin ALCO yang surat keputusannya disetujui oleh Ketua ALCO dan ditatakerjakan oleh Sekretaris ALCO.
- Pelaksanaan ALCO UKLN (Unit Kerja Luar Negeri) mengacu pada SK tersendiri yang disusun oleh masing-masing UKLN mempertimbangkan beberapa hal seperti organisasi, strategi pengelolaan asset-liabilitas, dll yang dikoordinasi oleh Unit Kerja yang membidangi UKLN. Hasil pelaksanaan ALCO UKLN dilaporkan kepada Direktur dan Unit Kerja yang membidangi.

Rapat ALCO Terbatas

- Asset and Liability Committee* (ALCO) secara insidental dapat menyelenggarakan Rapat ALCO Terbatas untuk membahas pengelolaan *asset and liability* yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan BRI dalam hal terdapat *issue* khusus yang harus segera mendapatkan hasil putusan Rapat ALCO.
- Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti dan Sekretaris ALCO berwenang menetapkan Anggota ALCO yang diminta hadir di dalam Rapat ALCO Terbatas di dalam suatu Surat undangan tersendiri.
- Rapat ALCO Terbatas harus dihadiri oleh seluruh Anggota ALCO yang diminta hadir di dalam Rapat ALCO Terbatas.



REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO) TAHUN 2023

Selama tahun 2023, ALCO telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun pembahasan rapat ALCO adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	Senin, 9 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update</i>: <i>Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management</i> <i>Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
2	Rabu, 8 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update</i> <i>Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management</i> <i>Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
3	Kamis, 09 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update</i> <i>Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management</i> <i>Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
4	Senin, 10 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update</i> <i>Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management</i> <i>Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
5	Rabu, 10 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update</i> <i>Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management</i> <i>Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
6	Senin, 12 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update</i> <i>Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management</i> <i>Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
7	Senin, 10 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update</i> <i>Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management</i> <i>Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
8	Rabu, 9 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update</i> <i>Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management</i> <i>Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
9	Senin, 21 Agustus 2023 (ALCO Terbatas)	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi <i>Balance Sheet</i> & Likuiditas Kondisi B/S, <i>Update</i>, dan limit likuiditas terkini • <i>Balance Sheet Management</i> Strategi normalisasi likuiditas & evaluasi putusan ALCO dan Rapat Direksi • Akselerasi Pelayanan DHE Potensi DHE untuk mobilisasi simpanan valas dan penguasaan transaksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat
10	Kamis, 7 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
11	Rabu, 11 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
12	Kamis, 9 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI
13	Senin, 11 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Update Update</i> terkait makro ekonomi global & domestik • <i>Balance Sheet Management Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations</i> • <i>Market Update</i> Perkembangan harga saham BBRI

Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Piagam Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Dalam melaksanakan tugasnya *Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee* mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 872-DIR/PPM/06/2022 tentang *Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee* yang mengatur terkait Organisasi, Utusan dan Kehadiran, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

Profil Anggota Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Risk Management Committee

Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta Perubahannya termasuk penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee (RMC) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
2. Menetapkan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya.
3. Menetapkan limit dan perubahannya.
4. Menetapkan Nilai Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta tindak lanjut apabila diperlukan.

Risk Management Committee Terintegrasi (RMCT) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perubahannya.



2. Menetapkan langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam bentuk:
 - a. Laporan profil risiko terintegrasi.
 - b. Laporan profil risiko individual Perusahaan Anak anggota konglomerasi keuangan BRI.
 - c. Analisis permodalan terintegrasi.
 - d. Simulasi *stress testing* terintegrasi dan/atau individual serta *contingency plan*.

STRUKTUR KEANGGOTAAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee memiliki susunan pengurus dan anggota sebagai berikut:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (merangkap Anggota tetap)	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	√
<i>Division Head, Market, Portfolio & Enterprise Risk</i>	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	-
Tim Penunjang Komite		
<i>Market, Portfolio & Enterprise Risk Division</i>	<i>Risk Coordinator</i> Kredit, Pasar, Likuiditas dan Strategik/Finansial	-
<i>Operational Risk Division</i>	<i>Risk Coordinator</i> risiko Operasional, Hukum, Kepatuhan dan Reputasi serta sebagai <i>risk owner</i> atas risiko operasional	-
<i>Credit & Product Risk Policy Division</i>	<i>Risk owner</i> risiko kredit	-
<i>Digital Risk</i>	<i>Risk Owner</i> risiko digital	-
<i>Treasury Division</i>	<i>Risk Owner</i> Risiko Pasar	-
<i>Asset & Liability Management Desk</i>	<i>Risk Owner</i> Risiko Likuiditas	-

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
<i>Compliance Division</i>	<i>Risk Owner</i> Risiko Kepatuhan	-
Satuan Kerja Audit Internal Kantor Pusat	Pemberi masukan atas evaluasi kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko	-
<i>Legal Division</i>	<i>Risk Owner</i> risiko hukum	-
<i>Corporate Secretary Division</i>	<i>Risk Owner</i> risiko reputasi	-
<i>Service & Contact Center Division</i>	<i>Risk Owner</i> risiko reputasi	-
<i>Planning, Budgeting & Performance Management Division</i>	<i>Risk Owner</i> risiko stratejik/ finansial	-

Risk Management Committee Terintegrasi (RMCT) memiliki susunan pengurus dan anggota sebagai berikut:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	√
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Direktur Utama Bank Raya	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Life	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Finance	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Ventura	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Insurance	Anggota Tetap	-
Direktur Utama Pegadaian	Anggota Tetap	-
Direktur Utama PNM	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Manajemen Investasi	Anggota Tetap	-

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur/SEVP yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko di Perusahaan Anak Anggota Konglomerasi Keuangan BRI	Anggota Tetap	-
Division Head, Market, Portfolio & Enterprise Risk	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	-
Tim Penunjang Komite		
Subsidiary Management Division	Pengelola dalam Monitoring risiko Perusahaan Anak	-
Satuan Kerja Manajemen Risiko BRI	MPE, ORD, KR D dan DRD sebagai oversight function	-
Satuan Kerja Audit Intern	Fungsi independent assurance	-

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS RISK MANAGEMENT COMMITTEE TAHUN 2023

Kebijakan Rapat

- Rapat RMC diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali per Triwulan. Rapat RMCT diselenggarakan berkala sekurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- Penyelenggaraan rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) dapat dilakukan di luar jadwal berkala apabila terdapat *issue* penting dan mendesak, antara lain:
 - Terjadi perubahan pada Profil Risiko BRI secara signifikan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis, faktor makro ekonomi, pelanggaran limit risiko internal, atau faktor lain.
 - Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan atau sikap cepat dan segera dari organisasi.
 - Terjadi kondisi *force majeure* yang disebabkan faktor alam, faktor manusia, gangguan eksternal, faktor disruptif lain.
 - Terdapat faktor yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat RMC atau RMCT.
- Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) membahas, mengkaji ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan di dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi dimaksud diantaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.
- Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti.

- Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.
- Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
- Hasil keputusan pada Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) dapat dianulir oleh Direksi melalui Rapat Direksi.
- Koordinasi penyelenggaraan Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) menjadi tanggung jawab Sekretaris *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT).

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS RISK MANAGEMENT COMMITTEE TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	16 Januari 2023	RMC : Profil Risiko TW IV 2022 Mandatory Report & Monitoring Pembahasan Risk Issue
2	27 Februari 2023	RMCT : RAS Terintegrasi 2023 Mandatory Report MR Terintegrasi Profil Risiko Terintegrasi, Profil Risiko PA & Risk Issue PA Risk Maturity Index
3	24 Maret 2023	RMC : Mandatory Report & Monitoring Pembahasan Risk Issue
4	17 April 2023	RMC : Profil Risiko TW I 2023 Mandatory Report & Monitoring Pembahasan Risk Issue
5	15 Mei 2023	RMC : Mandatory Report & Monitoring Pembahasan Risk Issue
6	15 Juni 2023	RMC : Mandatory Report & Monitoring Pembahasan Risk Issue
7	26 Juli 2023	RMC : Profil Risiko TW II 2023 Mandatory Report & Monitoring Pembahasan Risk Issue
8	16 Agustus 2023	RMCT : Monitoring RAS Terintegrasi Mandatory Report MR Terintegrasi Profil Risiko Terintegrasi, Profil Risiko PA & Risk Issue PA Risk Maturity Index
9	27 September 2023	RMC : Mandatory Report & Monitoring Pembahasan Risk Issue
10	17 Oktober 2023	RMC : Profil Risiko TW III 2023 Mandatory Report & Monitoring Pembahasan Risk Issue
11	22 November 2023	RMC : Risk Appetite Statement 2024 Mandatory Report & Monitoring Pembahasan Risk Issue



Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Environmental, Social & Governance (ESG) Committee adalah Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan, implementasi, *Monitoring* dan evaluasi strategi, kebijakan, program/inisiatif ESG.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) COMMITTEE

- Melakukan *review* dan evaluasi terkait implementasi kebijakan atau tata kelola (*governance*) parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSJ yang telah disusun oleh Unit Kerja terkait yang kemudian diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
- Menetapkan dan merekomendasikan program kerja (baik eksisting maupun baru) untuk dikategorikan sebagai inisiatif ESG dan inisiatif TJSJ sesuai dengan parameter yang ada kepada ESG Committee maupun persetujuan sirkuler.
- Melakukan *review* dan evaluasi terkait implementasi program kerja yang masuk ke dalam parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSJ serta pelaporan data dan informasi terkait ESG.
- Melakukan *review* atas laporan ESG Rating, *Investor concerns* atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSJ BRI.
- Merekomendasikan isu material yang didapat dari hasil *review* atas laporan ESG Rating, *Investor concerns* atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSJ BRI.
- Menetapkan rencana tindak lanjut atas hasil *review* dan evaluasi untuk kemudian dapat diusulkan menjadi program kerja baru yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait.
- Memberikan informasi terkini kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai seluruh isu yang terus berkembang terkait ESG dan TJSJ, termasuk peraturan perundang-undangan, inisiatif global, praktek bisnis, serta informasi penting lain terkait ESG dan TJSJ.

STRUKTUR KEANGGOTAAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) COMMITTEE

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Division Head, Environmental, Social & Governance atau Unit Kerja Pengelola ESG	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota Tetap	√

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	√

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) COMMITTEE TAHUN 2023

Kebijakan Rapat

- Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisis sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Rapat Komite Bidang ESG diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- Penyelenggaraan rapat Komite Bidang ESG dapat dilakukan di luar jadwal berkala apabila terdapat *issue* penting dan mendesak, antara lain:
 - Terjadi perubahan ESG Rating BRI secara signifikan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis, faktor makro ekonomi, pelanggaran terhadap kepatuhan dan kebijakan/*governance* ESG, atau faktor penyebab lainnya.
 - Terjadi perubahan Regulasi terkait ESG yang membutuhkan tanggapan atau sikap cepat dan segera dari Perusahaan.
 - Terdapat faktor yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Bidang ESG.
- Rapat Komite Bidang ESG dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti.
- Rapat Komite Bidang ESG dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.

Keputusan rapat Komite Bidang ESG diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite Bidang ESG dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

Realisasi Rapat dan Pelaksanaan Tugas Environmental, Social & Governance (ESG) Committee Tahun 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	Senin, 17 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Overview Implementasi Sustainability BRI Tahun 2023 Disclosure to BRI's Website Penerbitan TCFD Report Sustainability Indicators

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Piagam Komite Kredit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kredit mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: S.469-DIR/KRD/03/2022 beserta perubahannya tentang Komite Kredit yang mengatur terkait Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

1. Memberikan putusan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk penetapan/perubahan struktur dan syarat kredit.
2. Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
3. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas atau di luar asas-asas perkreditan yang sehat.
4. Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit (atau media lain yang ditentukan oleh Direksi dan berfungsi sebagai putusan kredit) sebagai bukti pemberian putusan kredit serta sebagai wujud tanggung jawab Komite Kredit.

Struktur Keanggotaan Komite Kredit

1. Sesuai dengan jenis kewenangan yang dimilikinya, Komite Kredit terbagi menjadi:
 - a. Komite Kredit Non-Restrukturisasi, yaitu komite kredit yang memiliki kewenangan untuk memutus prakarsa kredit baru, perpanjangan, suplesi, perubahan syarat, dan putusan kredit lainnya bukan dalam rangka restrukturisasi; dan
 - b. Komite Kredit Restrukturisasi, yaitu komite kredit yang memiliki kewenangan untuk memutus prakarsa kredit dalam rangka restrukturisasi *performing loan* maupun *non-performing loan*, penyelesaian kredit, penghapusbukuan kredit, hapus tagih.
2. Masing-masing komite kredit terdiri dari jajaran fungsi *Risk* dan fungsi *Bisnis*.
3. Struktur dan anggota komite kredit sesuai dengan SE Kewenangan Memutus Kredit yang berlaku.
4. Masing-masing komite kredit tersebut berkedudukan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Adapun struktur keanggotaan Komite Kredit adalah sebagai berikut.

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Fungsi	Hak Suara
Direktur Utama	Anggota Tetap	Risk	√
Wakil Direktur Utama	Anggota Tetap	Risk	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	Risk	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	Risk	√
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	Anggota Tetap	Risk	√
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	Risk	√
SEVP <i>Change Management & Transformation Office</i>	Anggota Tetap	Risk	√
SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan	Anggota Tetap	Risk	√
SEVP <i>Operations</i>	Anggota Tetap	Risk	√
SEVP Strategi Human Capital	Anggota Tetap	Risk	√
Direktur <i>Bisnis Wholesale</i> dan Kelembagaan	Anggota Tetap	Bisnis	√
Direktur <i>Bisnis Mikro</i>	Anggota Tetap	Bisnis	√
Direktur <i>Bisnis Kecil dan Menengah</i>	Anggota Tetap	Bisnis	√
Direktur <i>Bisnis Konsumer</i>	Anggota Tetap	Bisnis	√
Direktur Jaringan dan Layanan	Anggota Tetap	Bisnis	√
SEVP <i>Bisnis Komersial</i>	Anggota Tetap	Bisnis	√
SEVP <i>Treasury & Global Services Business</i>	Anggota Tetap	Bisnis	√
SEVP <i>Bisnis Ultra Mikro</i>	Anggota Tetap	Bisnis	√

Profil Anggota Komite Kredit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Kredit

Seluruh anggota Komite Kredit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.



Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Kredit Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Rapat Komite Kredit sah apabila dihadiri oleh sekurangnya anggota Komite Kredit sesuai susunan Komite Kredit pada ketentuan PDWK, baik dari jumlah dan komposisi dari jajaran fungsi Risk maupun fungsi Bisnis serta anggota Komite Kredit yang mandatory wajib hadir.
2. Rapat Komite Kredit dapat dilaksanakan secara fisik, maupun dengan cara konferensi melalui sarana media elektronik yang disepakati oleh setiap anggota Komite Kredit yang ikut serta.
3. Sekretaris Komite Kredit bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan Rapat Komite Kredit (RKK) seperti waktu dan tempat pelaksanaan termasuk mendokumentasikan/ menyusun Berita Acara RKK dan penyediaan Risalah RKK.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT TAHUN 2023

Bulan	Tanggal	Pelaksanaan RKK (Kali)	Jumlah Putusan	Agenda	Kuorum Kehadiran & Putusan
Januari	25, 31	2	10	Pembahasan dan pemberian putusan kredit segmen korporasi	Kuorum
Februari	7, 28	2	11		Kuorum
Maret	7, 14, 21	3	21		Kuorum
April	4, 11, 18	3	27		Kuorum
Mei	3, 9, 15, 23, 29	5	27		Kuorum
Juni	6, 13, 20, 27	4	26		Kuorum
Juli	11, 18, 25	3	16		Kuorum
Agustus	8, 9, 22, 29	4	18		Kuorum
September	5, 12, 18, 19, 26	5	14		Kuorum
Oktober	3, 4, 10, 17, 23, 30, 31	7	22		Kuorum
November	21, 28	2	18		Kuorum
Desember	5, 12, 19, 28	4	28		Kuorum
TOTAL		44	238		

Komite Capital & Investment

Komite Capital & Investasi merupakan Komite yang bertanggung jawab terhadap kegiatan aksi korporasi dan pengelolaan perusahaan anak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Capital & Investment

Tugas dan tanggung jawab *Capital & Investment Committee*, berdasarkan pada Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nokep: 871 -DIR/PPM/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang *Capital & Investment Committee* adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan *Corporate Action*
 - a. Melakukan *review* atas *Corporate Action* yang diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
 - b. Menetapkan dan merekomendasikan langkah korporasi untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui Rapat Direksi atau persetujuan sirkuler.

2. Terkait Pengelolaan Perusahaan Anak:
 1. Menetapkan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Perusahaan Anak, termasuk *Key Performance Indicator* dan rencana dividen Perusahaan Anak;
 2. Melakukan *review* kinerja dan menetapkan langkah – langkah perbaikan kinerja bersama Direksi Perusahaan Anak;
 3. Mengevaluasi dan merekomendasikan *Corporate Action* Perusahaan Anak BRI (Initial Publik *Offering*, penawaran umum terbatas, akuisisi, merger, tambahan modal dan rencana divestasi) untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama / Wakil Direktur Utama baik melalui Rapat Direksi atau persetujuan sirkuler.
 4. Menetapkan putusan apabila terjadi *deadlock* inisiatif sinergi Perusahaan Anak dengan BRI yang bersifat strategis.

Struktur Keanggotaan Komite *Capital & Investment*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
<i>Division Head, Subsidiary Management</i>	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	-
Direktur atau SEVP Pembina Bisnis Perusahaan Ana	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP terkait	Anggota tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Profil Anggota Komite *Capital & Investment*

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite *Capital & Investment*

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite *Capital & Investment* Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite *Capital & Investment* Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisa sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
2. Kajian dipresentasikan pada rapat Komite oleh Anggota Komite dan atau Anggota Tim Penunjang dan/atau perwakilan Perusahaan Anak sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
3. Komite menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) kali per Triwulan untuk membahas usulan, kajian dan analisa yang berasal dari Tim Penunjang Komite.
4. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum bila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti. Rapat hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.
5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti
6. Ketua Komite memimpin Rapat Komite *Capital & Investment* dan mempunyai hak suara.
7. Sekretaris Komite bertanggung jawab mengoordinasi penyelenggaraan Rapat Komite *Capital & Investment*, berupa antara lain:
 - a. Mempersiapkan agenda, jadwal dan tempat rapat.
 - b. Menyusun Risalah Rapat.
 - c. memantau implementasi putusan rapat
8. Rekomendasi dan/atau putusan Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh Ketua dan seluruh anggota Komite. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, maka rekomendasi dan/atau putusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
5. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *CAPITAL & INVESTMENT* TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Komite *Capital & Investment* telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian sebagai berikut.



No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	Kamis, 08 Juni 2023	Performance Review TW I 2023 & Revisi KPI BRINS 2023
2.	Kamis, 08 Juni 2023	Performance Review TW I 2023 & Revisi KPI BRILIFE 2023
3.	Selasa, 27 Juni 2023	Rencana Pengalihan Portofolio New Business Model Bank Raya
4.	Senin, 24 Juli 2023	Pembahasan <i>Project Blossom</i> (Pengembangan Perusahaan Anak yang Bergerak di Bidang Multifinance).
5.	Rabu, 2 Agustus 2023	Performance Review Q2 2023 BRI Finance
6.	Rabu, 2 Agustus 2023	Performance Review Q2 2023 BRI Insurance
7.	Rabu, 20 September 2023	Penataan PA PT Pegadaian
8.	Senin, 09 Oktober 2023	Parenting Style Tata Kelola Terintegrasi BRI Group
9.	Jumat, 27 Oktober 2023	Rencana Bisnis 2024 - 2026, RKAP 2024, dan KPI BRI Finance 2024
10.	Jumat, 27 Oktober 2023	Rencana Bisnis 2024 - 2026, RKAP 2024, dan KPI BVI 2024
11.	Jumat, 27 Oktober 2023	Rencana Bisnis 2024 - 2026, RKAP 2024, dan KPI BRINS 2024

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan BRI dan memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan perkreditan.

Piagam Komite Kebijakan Perkreditan

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kebijakan Perkreditan mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 655-DIR/PPM/10/2021 tentang Komite Kebijakan Perkreditan (KPP) yang mengatur terkait Organisasi, Utusan dan Kehadiran, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) OJK.
- Mengawasi penerapan KPB dilaksanakan secara bertanggung jawab dan penuh kesinambungan serta merumuskan alternatif dan solusi penerapan bila terdapat kendala.
- Melakukan *review* berkala KPB BRI minimal 3 tahun sekali.
- Melakukan evaluasi terhadap:
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau penyediaan dana.

- Kebenaran menjalankan proses pemberian kredit atau penyediaan dana, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada Pihak yang Terkait dengan Bank dan Debitur besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
 - Kecukupan penyisihan cadangan kerugian karena penurunan nilai kredit (CKPN) dan cadangan penghapusbukuan.
 - Debitur besar tertentu dan kredit dalam daftar Kredit Dalam Perhatian Khusus.
- Melakukan kajian penilaian efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
 - Menyampaikan laporan berkala minimal 1 tahun sekali dan memberikan masukan perbaikan kepada Direksi dengan tembusan/tindakan kepada Komisaris mengenai:
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
 - Hasil evaluasi pada poin 4.
 - Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
<i>Division Head, Credit & Product Risk Policy</i> atau Unit Kerja yang Mengelola Fungsi Kebijakan Kredit	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	✓
Direktur atau SEVP sesuai Bidang/Pembina terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tidak Tetap	✓
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-
<i>Division Head</i> di bawah Direktur Manajemen Risiko terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tidak Tetap	-
<i>Division Head/Desk Head</i> lainnya, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tidak Tetap	-

Profil Anggota Komite Kebijakan Perkreditan

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Kebijakan Perkreditan

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Perubahan atau revisi KPB wajib dibahas terlebih dahulu di dalam rapat. KKP wajib melakukan rapat pembahasan final Draft perubahan atau revisi KPB sebelum diteruskan untuk mendapat putusan Direksi.
2. Rapat KKP dilakukan dalam rangka pertemuan mengusulkan penyusunan, perubahan, revisi KPB maupun terkait isu penting dan mendesak yang memerlukan tanggapan cepat dan segera dari Perusahaan.
3. Apabila terdapat masalah mendesak untuk dibahas di dalam KKP maka Unit Kerja terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris KKP untuk melakukan Rapat KKP.
4. Rapat KKP dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua KKP. Dalam hal Ketua KKP berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Surat Keputusan ini.
5. Rapat KKP kuorum bila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti.
6. Terhadap setiap perubahan isi KPB BRI yang tidak bersifat materil, agar dapat dilakukan secara sirkuler ke seluruh Direktur dan untuk selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada seluruh anggota KKP.

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah bila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang hadir ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	6 April 2023	- Pemaparan Group Limit - Pemaparan Kebijakan Restrukturisasi Covid-19 pasca 31 Maret 2023
2	28 Agustus 2023	- Penambahan Jajaran Risk & Bisnis dalam KK Direksi - Penambahan Daftar Penerima PDWK KK Direksi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi tentang perencanaan, tata kelola, pengembangan dan operasional teknologi informasi.

PIAGAM KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 870-DIR/PPM/06/2022 tentang *Information Technology Steering Committee* dan *Data Governance Committee* yang mengatur terkait Tujuan, Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi jangka panjang yang sejalan dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang dituangkan di dalam ITSP BRI.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan ITSP BRI.
4. Kesesuaian arsitektur teknologi saat ini (*baseline*) dengan target arsitektur Teknologi Informasi BRI dalam mendukung kapabilitas bisnis.
5. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
6. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
7. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
8. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja



Pengguna dan Penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Digital & Teknologi Informasi	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
Department Head, IT Governance Management	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	-
<ul style="list-style-type: none"> Direktur Manajemen Risiko SEVP, Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan Division Head, IT Strategy & Governance Division Head, Enterprise Data Management Division Head, Application Management & Operation Division Head, Digital Banking Development & Operation Division Head, IT Infrastructure & Operation Division Head, Information Security Division Head, Operational Risk Division Head, Digital Risk Division Head, Distribution Network Division Head, Service & Contact Center 	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP Bidang Terkait; atau Division Head Bidang Terkait	Anggota tidak tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2023

Kebijakan Rapat

- Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data mengadakan rapat berkala setidaknya 3 (tiga) kali per tahun
- Rapat Komite dipimpin oleh Direktur Digital & Teknologi Informasi. Dalam hal Direktur Digital & Teknologi Informasi berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan 4 pada Surat Keputusan ini.
- Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite
- Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite (baik tetap maupun tidak tetap) yang hadir ditambah 1 (satu) suara Anggota Komite
- Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data menjadi tanggungjawab Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - Mempersiapkan dan mengundang rapat
 - Mempersiapkan dan mempresentasikan materi rapat
 - Menyusun dan mendistribusi Risalah Rapat kepada Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - Memonitor putusan Komite Pengarah yang ditindaklanjuti di Unit Kerja yang terkait
- Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Realisasi Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	03 April 2023	Application Performance Rencana untuk peningkatan kapasitas host core banking system Collaboration tools
2	09 Oktober 2023	Persetujuan upgrade terhadap operating system mesin AS/400

No.	Tanggal	Agenda Rapat
3	27 Desember 2023	IT Strategic Plan Review 2023 IT Resilience Strategy IT Demand & Budget Posture FY2024

Komite Tata Kelola Data

Komite Tata Kelola Data adalah suatu forum yang memberikan arahan terkait data *governance*, serta memberikan putusan terkait dengan *leading issue* pada data yang tidak dapat diselesaikan di level *Data Owners* dan *Data Stewards* maupun di level *Data Management Office*.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA DATA

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Data mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 870-DIR/PPM/06/2022 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) dan Komite Tata Kelola Data yang mengatur terkait Tujuan, Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA DATA

Komite Tata Kelola Data memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan data seluruh *stakeholder* BRI.
2. Proteksi terhadap data sebagai aset strategis Perusahaan.
3. Pelaksanaan kebijakan dan standar data untuk menegakkan kerangka kerja proses data managemen yang baik, dan kualitas data secara *enterprise*.
4. Perlindungan aspek privasi dan kerahasiaan data Nasabah dan Perusahaan.
5. Perlindungan dari akses data yang ilegal, manipulasi data serta penggunaan data dan informasi yang tidak sesuai.
6. Penggunaan data secara efektif serta mendatangkan *value* bagi Perusahaan
7. *Leading issue* pada data yang tidak dapat diselesaikan di level *Data Owner* dan *Data Steward* maupun di level *Data Management Function*.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA DATA

Organisasi Komite Tata Kelola Data terdiri dari:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Digital & Teknologi Informasi	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Department Head, Data Strategy & Governance	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	-
Direktur Keuangan Division Head, Enterprise Data Management	Anggota Tetap	√
Direksi atau SEVP Bidang terkait	Anggota tidak tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA DATA

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA DATA

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA DATA TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA DATA TAHUN 2023

Kebijakan Rapat

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data mengadakan rapat berkala setidaknya 3 (tiga) kali per tahun
2. Rapat Komite dipimpin oleh Direktur Digital & Teknologi Informasi. Dalam hal Direktur Digital & Teknologi Informasi berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan 4 pada Surat Keputusan ini.
3. Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite
4. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite (baik tetap maupun tidak tetap) yang hadir ditambah 1 (satu) suara Anggota Komite



5. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 0. Mempersiapkan dan mengundang rapat
 - a. Mempersiapkan dan mempresentasikan materi rapat
 - b. Menyusun dan mendistribusi Risalah Rapat kepada Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - c. Memonitor putusan Komite Pengarah yang ditindaklanjuti di Unit Kerja yang terkait
6. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Realisasi dan Rapat Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Data Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Data telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian sebagai berikut

No.	Tanggal	Agenda
1	29 November 2023	Update matrix stewardship data domain party reference

Komite Human Capital

Komite *Human Capital* merupakan Komite di Kantor Pusat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis dan operasional di bidang *Human Capital* dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi di dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan human capital serta meningkatkan kualitas pengelolaan human capital berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Organisasi Komite Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terdiri dari:

1. Bidang *Human Capital Planning & Policy*
2. Bidang *Talent*
3. Bidang *Performance Management*
4. Bidang *Ethics & Discipline*
5. Bidang *Job Evaluation*

Piagam Komite Human Capital

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Human Capital mengacu SK Direksi SK Direksi BRI Nokep: 603-DIR/PPM/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Human Capital Committee PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang mengatur terkait Tujuan, Organisasi, Ruang Lingkup, dan Tata Kerja.

Profil Anggota Komite Human Capital

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Human Capital

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Human Capital Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

1. Rapat Komite *Human Capital* dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite *Human Capital* dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti.
2. Seluruh Anggota Komite *Human Capital* memiliki tugas dan tanggung jawab yang sarna.
3. Penyelenggaraan rapat Komite *Human Capital* menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite yaitu yang antara lain:
 - Mempersiapkan agenda rapat;
 - Mempresentasikan materi rapat;
 - Menyusun Risalah Rapat;
 - Menindaklanjuti dan/atau meneruskan hasil rapat kepada Unit Kerja yang terkait sesuai kebutuhan.
4. Apabila terdapat *issue* penting dan mendesak yang membutuhkan jalan keluar dan/atau sikap dari Komite *Human Capital* maka Unit Kerja yang terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris Komite melakukan Rapat Komite *Human Capital*.
5. Rapat memenuhi kuorum bila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti.
6. Keputusan Komite *Human Capital* ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh Anggota yang hadir. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Komite *Human Capital* dinyatakan sah dan mengikat apabila 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite memberikan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal Pengurus atau Anggota Komite terdapat Direksi maka Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti dan Direktur Human Capital memberikan suara setuju.
 - Dalam hal Pengurus atau Anggota Komite tidak terdapat Direksi maka Ketua Komite memberikan suara setuju
7. Persetujuan Komite dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite yang hadir.
8. Dalam hal rapat Komite *Human Capital* tidak dapat diselenggarakan maka Komite *Human Capital* dapat

- mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.
- Apabila diperlukan maka Komite *Human Capital* dapat menghadirkan Pihak Lain yang terkait sebagai narasumber.
 - Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Komite Human Capital Bidang Human Capital Planning & Policy

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG HUMAN CAPITAL PLANNING & POLICY

- Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas *human capital* BRI dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* BRI.
- Menetapkan kebijakan strategis, manajemen karier dan *corporate culture* dibidang *human capital*.
- Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG HUMAN CAPITAL PLANNING & POLICY

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua (Merangkap anggota tetap)	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
<i>Division Head Human Capital</i> yang membidangi Kebijakan terkait	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
1. Direksi atau SEVP Bidang terkait 2. <i>Division Head</i> , fungsi <i>Human Capital Strategy</i> 3. <i>Division Head</i> , fungsi <i>Human Capital Development</i> 4. <i>Division Head</i> , fungsi <i>Human Capital Business Partner</i> 5. <i>Division Head</i> , <i>Corporate Culture</i> 6. <i>Division Head</i> , fungsi <i>Learning</i>	Anggota tidak tetap	√

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG HUMAN CAPITAL PLANNING & POLICY TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	1 Februari 2023	Usulan Pembayaran Bonus Pool Tahun 2022
2.	3 April 2023	<i>Strategic Workforce Planning</i>
3.	8 Mei 2023	Usulan <i>Salary Increase</i> Pekerja BRI

No.	Tanggal	Agenda Rapat
4.	5 Juni 2023	<i>Evaluasi Corporate Title</i>
5.	12 Juni 2023	<i>Human Capital Strategic Issues & Responses</i>
6.	3 November 2023	Penetapan Remunerasi Komisaris Perusahaan Anak
7.	21 November 2023	Rejuvenasi Ketentuan Pekerja Kinerja Tidak Cakap

Komite Human Capital Bidang Talent

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG TALENT

- Penetapan mutasi pekerja, termasuk penetapan kepengurusan Perusahaan Anak dan Terafiliasi.
- Penetapan *Talent Cluster*, termasuk identifikasi dan penetapan *top talent*.
- Penetapan *Succession Plan* untuk seluruh jabatan.
- Penetapan *Talent Pool* berdasarkan bidang keahlian Pekerja.
- Melakukan *Talent Review*.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG TALENT

Bidang *Talent 1* (untuk Pekerja dengan *Corporate Title Senior Executive Vice President, Executive Vice President, Senior Vice President, Vice President* dan Pemimpin Cabang Kelas I termasuk Pekerja yang akan ditugaskan sebagai Direktur Perusahaan Anak)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
<i>Division Head Human Capital Business Partner</i>	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
1. Seluruh Direktur (<i>Talent Committee 1</i> untuk Pekerja <i>Level Senior Executive Vice President</i>) 2. Seluruh Direktur dan SEVP (<i>Talent Committee 1</i> untuk Pekerja <i>Level Executive Vice President, Senior Vice President</i> termasuk Pekerja yang akan ditugaskan sebagai Direktur Perusahaan Anak) 3. Direktur <i>Human Capital</i> dan Direktur atau SEVP sesuai Bidang/ Pembina yang akan melepas dan yang dituju oleh talent sesuai pembahasan Komite (<i>Talent Committee 1</i> untuk Pekerja <i>Level Vice President</i> dan Pemimpin Cabang Kelas I)	Anggota Tetap	√



Bidang Talent 2 (untuk Pekerja level dengan *Corporate Title Assistant Vice President* dan *Senior Manager*)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur <i>Human Capital</i>	Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	√
<i>Division Head, Human Capital Business Partner</i>	Sekretaris	√
Direktur atau SEVP sesuai Bidang/ Pembina yang akan melepas dan yang dituju oleh <i>talent</i> sesuai pembahasan Komite	Anggota Tetap	√

Bidang Talent 3 (untuk Pekerja dengan *Corporate Title Manager*)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
<i>Division Head, Human Capital Business Partner</i>	Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	√
<i>Team Leader, Human Capital Business Partner</i> yang membidangi Pengelolaan <i>Talent</i>	Sekretaris	√
<i>Department Head, Human Capital Business Partner</i> yang membidangi Pengelolaan <i>Talent</i>	Anggota Tetap	√

Bidang Talent 4 (untuk Pekerja level jabatan dengan *Corporate Title Assistant Manager, Officer, dan Assistant* di Unit Kerja *Divisi/ Regional Office/ KCK/ Regional Audit Office* dan *Supervisinya*)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
<i>Division Head/Regional CEO/ Pemimpin Cabang Khusus/Regional Audit Head</i>	Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	√
<i>Human Capital Business Partner Regional Kantor Pusat</i>	Sekretaris	-
<i>Department Head/ Regional Head/ Regional Assurance Head</i> sesuai Bidang/ Pembina terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tetap	√

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG TALENT TAHUN 2023

Talent Committee	Rapat yang telah dilaksanakan
Talent Committee 1	26 kali
Talent Committee 2	40 kali
Talent Committee 3	126 kali
Talent Committee 4	740 kali

Komite Human Capital Bidang Performance Management

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG PERFORMANCE MANAGEMENT

- Menetapkan KPI Direktorat, Unit Kerja 1 Level di bawah BOD (termasuk *Regional Office*), Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit.
- Mengevaluasi tantangan kinerja unit kerja 1 Level di bawah BOD (termasuk Kantor Wilayah).
- Mengevaluasi Orientasi *Leader* Pemimpin Unit Kerja 1 Level di bawah BOD (termasuk Kantor Wilayah) dan *Department Head* di Kantor Pusat.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG PERFORMANCE MANAGEMENT

Sub Bidang *Planning* 1 (untuk KPI Direktorat, Sub-Direktorat, *Regional Office*, Kantor Cabang, KCP dan BRI Unit)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
<i>Division Head Planning, Budgeting, & Performance Management Division</i>	Sekretaris (Merangkap anggota Tetap)	-
Seluruh Direktur atau SEVP	Anggota Tetap	√

Sedangkan Sub Bidang *Planning* 2 (Untuk KPI *Divisi/Desk/Team BOD-1*) diketuai oleh Direktur Keuangan dengan Hak Suara.

Sub Bidang Evaluasi terdiri dari:

Sub Bidang *Challenge Evaluation and method Used* 1 (untuk Kinerja *Regional Office, Regional Audit Office* dan *Divisi/Desk/Team BOD-1*)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua (Merangkap anggota tetap)	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	-
1. <i>Division Head Planning, Budgeting, & Performance Management Division</i> 2. <i>Division Head Human Capital Strategy & Policy Division</i>	Sekretaris (Merangkap anggota Tetap)	√
Seluruh Direktur atau SEVP	Anggota Tetap	√

Sedangkan Sub Bidang *Challenge Evaluation and Method Used* 2 (Untuk Kinerja Kanca) diketuai oleh CEO.

Sub Bidang *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Individu 1 (Untuk *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Pemimpin Unit Kerja BOD-1)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua (Merangkap anggota tetap)	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
1. <i>Division Head Human Capital Strategy & Policy</i> 2. <i>Division Head, Planning, Budgeting & Performance Management</i>	Sekretaris (merangkap anggota Tetap tanpa Hak Suara)	-
Seluruh Direktur atau SEVP	Anggota Tetap	√

Sub Bidang *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Individu 2 (Untuk *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Pekerja *Corporate Bank 2*) Diketahui oleh Direktur atau SEVP Bidang, sedangkan Sub Bidang *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Individu 3 (Untuk *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Pemimpin Cabang) diketuai oleh Regional CEO.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG PERFORMANCE MANAGEMENT TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	6 Februari 2023	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Individu Band 1 Tahun 2022
2.	7 – 9 Februari 2023	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Individu Band 2 Tahun 2022
3.	7 – 10 Februari 2023	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Individu Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang Pembantu Tahun 2022

Komite Human Capital Bidang *Ethics & Discipline*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG *ETHICS & DISCIPLINE*

Memutus kasus Pelanggaran Disiplin dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa menurut cara atau prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Disiplin yang berlaku.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG *ETHICS & DISCIPLINE*

Komite *Ethics & Discipline* 1 untuk Pekerja level jabatan *Corporate Band 1* dan *Corporate Band 2* dengan *Corporate Title* : *Executive Vice President, Senior Vice President* dan *Vice President*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua (merangkap anggota tetap)	-
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (merangkap anggota tetap)	-
<i>Division Head, Human Capital Business Partner</i>	Sekretaris	-
Direktur <i>Human Capital</i> Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite *Ethics & Discipline* 2 untuk Pekerja level jabatan *Corporate Band 3* dengan *Corporate Title Assistant Vice President* dan *Senior Manager*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Human Capital	Ketua (merangkap anggota tetap)	-
<i>Division Head, Human Capital Business Partner</i> atau Pejabat lain setingkat Band 1 yang di tunjuk	Ketua Pengganti	-
1. Direktur/SEVP Bidang Terkait 2. Direktur/SEVP Pembina	Anggota Tetap	√

Komite *Ethics & Discipline* 3 untuk Pekerja level jabatan *Corporate Band 5* sampai dengan *Corporate Band 7* dengan *Corporate Title Manager, Assistant Manager, Officer* dan *Assistant*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
<i>Division Head Human Capital Business Partner, Regional CEO, Pemimpin Cabang Khusus, Regional Audit Head</i>	Ketua (merangkap anggota tetap)	-
<i>Department Head Human Capital Business Partner Division, Department Head Regional Human capital Business Partner</i> atau Pejabat lain yang ditunjuk/ membidangi <i>Human capital</i>	Sekretaris	-
1. <i>Division Head</i> bidang terkait, <i>Regional Banking Head</i> terkait, Wakil Audit Intern Wilayah 2. <i>Division Head</i> Pekerja Ybs, <i>Regional Operation Head, Department Head Human Capital Business Partner Division</i>	Anggota Tetap	√



RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *ETHICS & DISCIPLINE* TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	30 Januari 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
2	7 Februari 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
3	15 Februari 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
4	28 Februari 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
5	02 Maret 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
6	6 Maret 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
7	17 Maret 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
8	13 April 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
9	12 April 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
10	10 Mei 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
11	11 Mei 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
12	16 Mei 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
13	27 Juni 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
14	5 Juli 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
15	17 Juli 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
16	3 Agustus 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
17	4 Agustus 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
18	6 Agustus 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
19	16 Agustus 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
20	15 September 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
21	21 September 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
22	27 September 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
23	29 September 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
24	2 November 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
25	13 November 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
26	23 November 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
27	14 Desember 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
28	21 Desember 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
29	29 Desember 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin

Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *JOB EVALUATION*

Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation* memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan Golongan Jabatan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *JOB EVALUATION*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur <i>Human Capital</i>	Ketua Pengganti	√
<i>Department Head, Organization Development, Planning, Budgeting & Performance Management Division</i>	Sekretaris	-
1. <i>Direktur Manajemen Risiko</i> 2. <i>Division Head, Planning, Budgeting & Performance Management</i> 3. <i>Division Head, Human capital Strategy & Policy</i>	Anggota Tetap	√

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *JOB EVALUATION* TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	28 Februari 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation Transaction Banking Division</i>
2.	08 Maret 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation Institutional Business Division</i>
3.	09 Maret 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation</i> dalam rangka implementasi perubahan organisasi Desember 2022 Tahap 1
4.	10 April 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation</i> dalam rangka implementasi perubahan organisasi Desember 2022 Tahap 2
5.	14 April 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation</i> dalam rangka implementasi perubahan organisasi Desember 2022 Tahap 3
6.	04 Mei 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation</i> Dalam Rangka Penyesuaian Job Grade Divisi Bisnis Korporasi dan Divisi <i>Treasury Business</i>
7.	19 Mei 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation</i> dalam rangka implementasi perubahan organisasi Desember 2022 Tahap 4
8.	16 Juni 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation Small Business Head</i> dan Pemimpin Cabang Area Metro
9.	15 Agustus 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation</i> dalam rangka implementasi perubahan organisasi Agustus 2023
10.	13 November 2023	Komite <i>Human Capital</i> Bidang <i>Job Evaluation</i> untuk Organisasi Regional <i>Micro Banking</i> dan Kantor Cabang Khusus

Komite Produk

Komite Produk adalah komite di Kantor Pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa baru, pengembangan produk dan jasa *existing*, penghentian produk dan jasa *existing*, memutus produk dan jasa *bundling* di atas kewenangan Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Produk, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan jasa.

Piagam Komite Produk

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Produk mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 213-DIR/CDS/06/2021 tentang Komite Produk yang mengatur terkait Organisasi, dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

1. Memberikan putusan atas usul pengembangan produk/jasa baru atau pengembangan produk/jasa yang sudah berjalan, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
2. Memberikan putusan atas penghentian produk/jasa yang sudah berjalan, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
3. Memberikan putusan atas produk dan/atau jasa bundling, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan/atau jasa.

Struktur Keanggotaan Komite Produk

Komite Produk 1 Segmen *Wholesale*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
<i>Division Head, Corporate Development & Strategy</i>	Sekretaris	-
1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Jaringan & Layanan 3. Direktur Digital & Teknologi Informasi 3. <i>SEVP Operation</i> 4. <i>SEVP Change Management & Transformation Office</i>	Anggota Tetap	√

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
1. Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN* 2. <i>SEVP Treasury & Global Services*</i> 3. SEVP Bisnis Korporasi	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Komite Produk 1 Segmen *Non Wholesale*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
<i>Division Head, Corporate Development & Strategy</i>	Sekretaris	-
1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Jaringan & Layanan 3. Direktur Digital & Teknologi Informasi 4. <i>SEVP Operation</i> 5. <i>SEVP Change Management & Transformation Office</i>	Anggota Tetap	√
1. Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN* 2. <i>SEVP Treasury & Global Services*</i> 3. SEVP Bisnis Korporasi	Anggota Tidak Tetap	√
4. Direktur Kepatuhan 5. SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Komite Produk 2 Segmen *Wholesale*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
<i>Division Head, Corporate Development & Strategy</i>	Sekretaris	-



Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
1. Direktur Kelembagaan & BUMN* 2. Direktur Digital & Teknologi Informasi 3. Direktur Jaringan & Layanan 4. SEVP Bisnis Korporasi 5. SEVP <i>Treasury & Global Services</i> * 6. SEVP <i>Operation</i> 7. SEVP <i>Change Management & Transformation Office</i>	Anggota Tidak Tetap	√
1. Direktur Kepatuhan 2. SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Komite Produk 2 Segmen Non *Wholesale*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
<i>Division Head, Corporate Development & Strategy</i>	Sekretaris	-
1. Direktur Bisnis Mikro 2. Direktur Bisnis Konsumer 3. Direktur Bisnis Kecil & Menengah* 4. Direktur Jaringan dan Layanan 5. Direktur Digital & Teknologi Informasi 6. SEVP <i>Operation</i> 7. SEVP <i>Change Management & Transformation Office</i>	Anggota Tidak Tetap	√
1. Direktur Kepatuhan 2. SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Profil Anggota Komite Produk

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Produk

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Produk Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Produk Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

- Rapat Komite Produk diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis.
- Rapat di luar rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Terjadi perubahan kondisi bisnis secara signifikan yang membutuhkan pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
 - Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan respon dalam pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
 - Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Produk.
- Rapat Komite Produk dipimpin oleh Ketua Komite Produk.
- Dalam hal Anggota Komite Produk berhalangan, maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Produk dimaksud digantikan oleh Direktur Pengganti sesuai Surat Keputusan yang berlaku. Direktur Pengganti memiliki dua kapasitas dalam Komite Produk yakni selaku Direktur Pengganti dan selaku Anggota Komite Produk dalam melakukan keputusan.
- Rapat Komite Produk dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite dan dihadiri oleh Anggota dengan Hak Suara dengan kriteria sebagai berikut:

No	Komite Produk	Syarat Kehadiran
1	Komite Produk 1	Minimal 3 (tiga) Anggota Dengan Hak Suara
2	Komite Produk 2	Minimal 2 (dua) Anggota Dengan Hak Suara

* Dari Anggota dengan Hak Suara yang hadir dimaksud minimal terdapat 1 (satu) Direktur

- Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota Komite yang memiliki Hak Suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
- Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Produk menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite.
- Dalam hal rapat Komite Produk tidak dapat diselenggarakan, maka Komite Produk dapat mengambil keputusan melalui

Nota Dinas Sirkuler dengan Persetujuan Ketua Komite dan Anggota Komite Lainnya. Proses pengambilan keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler ditatakerjakan oleh Sekretaris Komite Produk.

- Risalah Rapat Komite Produk ditandatangani oleh Sekretaris Komite Produk serta Ketua Komite Produk, dan disampaikan kepada Seluruh Direksil SEVP dan Unit Kerja di Kantor Pusat BRI yang terkait dengan putusan Komite Produk dimaksud.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	16 Februari 2023	Evaluasi <i>Rollout</i> Tahap 1 dan Permohonan <i>Rollout</i> Selindo Kupedes s.d. Rp 500 Juta
2	2 Maret 2023	1. Usulan Integrasi Fitur Agen Gadai di BRILink Mobile 2. <i>Update</i> Penutupan Internet Banking Web
3	30 Maret 2023	1. <i>Update Progress</i> Tindak Lanjut Komite Produk 2. Evaluasi Produk Tabungan 3. Usulan Kredit Talangan (Fitur Talangan Hari Sama & Talangan Khusus)*
4	27 Juni 2023	Sabrina 3.0
5	24 Juli 2023	1. <i>Update Progress</i> Tindak Lanjut Komite Produk 2. Usulan Pengembangan Fitur Investasi Emas di BRImo 3. Usulan Pengembangan BRImo Epayment
6	20 November 2023	<i>Debit Contactless</i>
7	22 November 2023	1. <i>Review</i> Produk Ceria (CDD). 2. Laporan Monitoring Evaluasi Produk (LMEP) 2023 dan Daftar Rencana Pengembangan Produk Bank (RPPB) 2024.

Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Komite Pengadaan Barang dan Jasa adalah komite di Kantor Pusat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas permohonan hasil dari suatu pengadaan dengan nilai tertentu.

Piagam Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 656-DIR/PPM/10/2021 tentang Komite Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur terkait Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan Barang dan Jasa

- Melaksanakan pemberian putusan pengadaan secara profesional, jujur, bertanggung jawab, objektif, akuntabel dan seksama.
- Menghindari benturan kepentingan dalam pemberian persetujuan pengadaan.
- Mengevaluasi, memberi masukan atas usul pengadaan yang diajukan.
- Memberi putusan setuju atau menolak pengadaan sesuai limit wewenangnya dalam hal diselenggarakan melalui rapat Komite.
- Memberikan putusan pengadaan, melalui:
 - Risalah Rapat Direksi, atau
 - Risalah Rapat Komite Pengadaan, atau
 - Nota Dinas Sirkuler.

Struktur Keanggotaan Komite Pengadaan Barang & Jasa

KOMITE PENGADAAN I (NILAI PENGADAAN > RP.200 MILIAR)

Struktur Keanggotaan ¹	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
<i>Division Head, Procurement & Logistic Operation</i> atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP User ²	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Direktur/SEVP terkait ³	Anggota Tetap	Tidak √

KOMITE PENGADAAN II (NILAI PENGADAAN > RP.100 MILIAR SD. RP.200 MILIAR)

Struktur Keanggotaan ¹	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
<i>Division Head, Procurement & Logistic Operation</i> atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√



Struktur Keanggotaan ¹	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP User ²	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP terkait ³	Anggota Tidak Tetap	√

KOMITE PENGADAAN III (NILAI PENGADAAN > RP 30 MILIAR SD. RP.100 MILIAR)

Struktur Keanggotaan ¹	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Ketua	√
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP User ²	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP terkait ³	Anggota Tidak Tetap	√

KOMITE PENGADAAN IV (NILAI PENGADAAN > RP.7,5 MILIAR SD. RP.30 MILIAR)

Struktur Keanggotaan ¹	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Ketua	√
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur/SEVP User ²	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP terkait ³	Anggota Tidak Tetap	√

Keterangan:

- 1) Dalam kedudukannya sendiri maupun selaku pejabat pengganti
- 2) Dalam hal Direktur Kepatuhan atau SEVP yang membidangi Audit Intern bertindak sebagai User, maka pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan adalah Direktur Manajemen Risiko
- 3) Direktur atau SEVP Bidang/Pembina Unit Kerja terkait sesuai dengan jenis objek pengadaan.

Profil Anggota Komite Pengadaan Barang & Jasa

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Pengadaan Barang & Jasa

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Keputusan Komite Pengadaan diambil dalam rapat Komite Pengadaan. Rapat Komite Pengadaan dilaksanakan di Kantor Pusat atau tempat lainnya dengan fasilitator Unit Kerja Pengadaan yang terkait.
2. Putusan Komite Pengadaan diambil secara unanimous dan dianggap disetujui apabila seluruh Anggota Komite dengan hak suara yang hadir atau yang mewakili menyatakan setuju.
3. Dalam hal Anggota Komite Pengadaan berhalangan maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Pengadaan dimaksud digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pengganti. Direktur atau SEVP Pengganti dapat bertindak di dalam Komite sebagai dua kapasitas yaitu selaku Pejabat Pengganti dan dalam kapasitasnya selaku Anggota Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Dalam hal rapat Komite Pengadaan tidak dapat diselenggarakan, maka Komite Pengadaan dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.
5. Dalam hal pengadaan barang dan jasa sudah diputus oleh Direksi melalui Rapat Direksi, maka putusan dimaksud dipersamakan dengan putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuktikan dengan Risalah Rapat Direksi.
6. Tugas dan tanggung jawab fasilitator untuk rapat Komite Pengadaan dilaksanakan oleh Sekretaris Komite Pengadaan antara lain:
 - a. Mengkoordinasikan persiapan materi rapat Komite.
 - b. Mempersiapkan agenda rapat, jadwal dan tempat rapat.
 - c. Melaksanakan fungsi surat menyurat, memperbanyak dokumen, dan fungsi pengarsipan dokumen Komite.

- d. Membuat Risalah Rapat dan Berita Acara Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. Mendistribusikan keputusan Komite untuk ditindaklanjuti Unit Kerja terkait.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023

Nama Komite Pengadaan	Nilai Pengadaan (Rp,-)	Jumlah Pengadaan
Komite Pengadaan I	1.809.170.116.000	3
Komite Pengadaan II	789.692.437.000	6
Komite Pengadaan III	2.235.127.346.395	43
Komite Pengadaan IV	2.660.121.741.828	168

Project Management Office Steering Committee

Project Management Office Steering Committee adalah komite di Kantor Pusat. Unit Kerja yang bertugas melakukan kajian dan penetapan aturan serta *Monitoring* terhadap tahap tahap proyek mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi terhadap pengelolaan proyek strategi berdasarkan kriteria tertentu, serta memberikan dukungan terhadap proses, sistem dan sumber daya manusia yang menjalankan proyek strategik dimaksud.

Piagam Project Management Office Steering Committee

Dalam melaksanakan tugasnya *Project Management Office Steering Committee* mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: B.869-DIR/PPM/06/2022 tentang *Project Management Office Steering Committee* yang mengatur terkait Organisasi, dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Project Management Office Steering Committee

1. Memberikan arahan di tingkat korporat terhadap strategi proyek-proyek di BRI.
2. Mengambil keputusan atas usul penyelesaian masalah dalam pengelolaan proyek yang tidak dapat diputuskan oleh *Division Head, Project Management Office*.
3. Mengambil keputusan terhadap usul re-alokasi anggaran antar proyek yang tercantum di dalam Rencana Kerja Proyek dan selanjutnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
4. Mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan *Project Management (PP PM)*.
5. Menyetujui dan mengesahkan proyek yang diusulkan setelah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) mendapat persetujuan.

6. Memberi arahan dan putusan terkait akselerasi penyelesaian proyek.
7. Menetapkan kriteria untuk proyek yang dimonitor *Project Management Office (PMO)*.
8. Memutuskan proyek-proyek yang masuk dan yang dikeluarkan dari *Monitoring PMO*.
9. Menetapkan prioritas proyek untuk dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemilik Proyek dan Unit Kerja Pendukung Proyek.
10. Memberikan keputusan terkait dengan proyek, diantaranya menyetujui, mengubah atau membatalkan rencana dan pelaksanaan proyek.
11. Memberikan arahan terhadap hasil *Post Implementation Review (PIR)* yang sudah dilaksanakan sebagai bagian dari *lessons learned* dalam pelaksanaan proyek selanjutnya.

Struktur Keanggotaan Project Management Office Steering Committee

Struktur Keanggotaan	Jabatan
Direktur Utama/Wakil Direktur	Ketua
SEVP CMT (merangkap sebagai Anggota Tetap dengan Hak Suara)	Ketua Pengganti
<i>Division Head PMO</i> (merangkap sebagai Anggota Tetap tanpa Hak Suara)	Sekretaris
1. Direktur Digital & Teknologi Informasi 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Keuangan 4. Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap dengan Hak Suara
1. Direktur atau SEVP bidang Pemilik Proyek 2. Direktur atau SEVP Pendukung Proyek 3. Pemimpin Unit Kerja Pemilik Proyek 4. Pemimpin Unit Kerja Pendukung Proyek	Anggota Tidak Tetap

Profil Anggota Project Management Office Steering Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Project Management Office Steering Committee

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.



Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi *Project Management Office Steering Committee* Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas *Project Management Office Steering Committee* Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Rapat PMO SC diadakan berkala sekurangnya 3 (tiga) kali per tahun.
2. Rapat di luar dari rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat perubahan kondisi bisnis secara signifikan yang membutuhkan perubahan secara cepat dan segera terkait pelaksanaan proyek atau penghentian proyek.
 - b. Terdapat perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan secara cepat dan segera dari organisasi, khususnya dalam pelaksanaan proyek atau penghentian proyek.
 - c. Terdapat kondisi yang mendorong dilakukannya Rapat PMO SC.
3. Rapat PMO SC dipimpin oleh Direktur Utama/Wakil Direktur Utama sebagai Ketua PMO SC. Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama berhalangan hadir maka posisi di rapat sebagai Ketua PMO SC dapat digantikan oleh Ketua Pengganti.
4. Kehadiran Anggota dengan Hak Suara di dalam Rapat PMO SC tidak dapat diwakilkan. Apabila Anggota dengan Hak Suara berhalangan hadir maka posisinya rapat dapat digantikan oleh Direktur Pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rapat PMO SC dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite serta dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota dengan Hak Suara. Dari 3 (tiga) Anggota Komite dengan Hak Suara yang hadir tersebut minimal terdapat 1 (satu) orang Direktur.
6. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh

50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

7. Keputusan di dalam rapat PMO SC didokumentasikan pada Risalah PMO SC.
8. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Komite antara lain:
 - a. Mengkoordinasikan Persiapan materi rapat Komite.
 - b. Mempersiapkan Agenda rapat, jadwal dan tempat rapat.
 - c. Melaksanakan Fungsi surat menyurat, memperbanyak dokumen, dan fungsi pengarsipan dokumen Komite.
 - d. Membuat Risalah Rapat Komite dan Berita Acara.
 - e. Mendistribusikan keputusan Komite untuk ditindaklanjuti Unit Kerja yang terkait.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS *PROJECT MANAGEMENT OFFICE STEERING COMMITTEE* TAHUN 2023

Selama tahun 2023, *Project Management Office Steering Committee* telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	Kamis, 06 April 2023	1. <i>Portfolio Highlights</i> 2. <i>Moonshot Update</i> 3. <i>Brivolution 2.0 Value Tracking</i> 4. Penetapan Komitmen dan Putusan oleh seluruh Anggota PMO SC yang hadir.
2	Kamis, 23 November 2023	Pemaparan materi Preventive Action Bisnis dan Operasional Penetapan Komitmen dan Putusan oleh seluruh Anggota PMO SC yang hadir
3	Senin, 27 November 2023	1. <i>Strategic Initiative Portfolio - update Oktober 2023</i> 2. <i>Transformation Effectiveness Assessment</i> 3. <i>Post Implementation Review</i> 4. <i>Update Progress : Migrasi NIK sebagai NPWP</i> Penetapan Komitmen dan Putusan oleh seluruh Anggota PMO SC yang hadir.

Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada Sub Judul Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Proses penyusunan kebijakan remunerasi meliputi:

1. Latar belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi
Dalam rangka menjaga dan mempertahankan Pekerja, maka perlu diatur kebijakan Remunerasi yang dapat memelihara dan meningkatkan motivasi Pekerja serta mendorong terciptanya iklim kerja kondusif. Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi dengan tujuan untuk menarik calon Pekerja potensial, mempertahankan Pekerja kompeten dan memelihara motivasi Pekerja untuk berkinerja unggul.
2. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya.
Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi berdasarkan praktek di pasar tenaga kerja bidang perbankan serta selalu mengkaji dan memperbaruinya sesuai dengan perubahan dan perkembangan bisnis dengan tetap memperhatikan kemampuan Perseroan. Pada tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pembahasan mengenai Penyesuaian Ketentuan Internal terkait Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana KPI Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.

Dalam mendukung aspirasi BRI untuk membangun *Performance Driven Culture*, implementasi sistem remunerasi BRI dilaksanakan dengan memperhatikan keselarasannya dengan pencapaian kinerja unit kerja dan individu yang berbasis KPI. Penyusunan KPI tersebut dilaksanakan melalui penurunan sasaran kinerja (*cascading*) baik secara penuh, parsial maupun kontributif sehingga sasaran kinerja unit kerja binaan akan berbeda namun mendukung pencapaian sasaran kinerja unit kerja kontrol. Selain itu guna memastikan objektivitas penilaian maka evaluasi kinerja unit kerja di BRI juga dilaksanakan secara berjenjang melalui *Performance Management Committee* oleh unit kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya penilaian kinerja individu akan disesuaikan dengan pencapaian kinerja individu maupun unit kerja yang akhirnya akan berdampak pada besarnya remunerasi yang didapatkan.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang Yang Berlokasi di Luar Negeri

Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perseroan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium. Perseroan mengadakan peninjauan terhadap Tunjangan Premium apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah dan kemampuan Perseroan. Perusahaan Anak memiliki Kebijakan Remunerasi terpisah dan disusun sendiri oleh Perusahaan Anak. Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perseroan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Remunerasi dikaitkan dengan risiko dan disusun berdasarkan pertimbangan *Person Grade* dan/ atau *Job Grade* Pekerja dalam suatu struktur upah yang menggambarkan Remunerasi Pekerja dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Pada setiap jabatan ditentukan suatu rentang upah tertentu yang menggambarkan upah minimum, upah *midpoint* (nilai tengah) sampai dengan upah maksimum. Besaran remunerasi yang diterima oleh Pekerja mempertimbangkan/setara dengan beban dan potensi risiko jabatan yang melekat pada jabatan tersebut. Semakin tinggi jabatan tersebut maka akan semakin tinggi tugas dan tanggung jawab Pekerja dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil/eksposur risiko Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka Perusahaan akan menangguhkan pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat variabel. Dalam pembayaran tantiem atau insentif kinerja terdapat sejumlah nominal yang ditangguhkan dan nominal tersebut dapat dilakukan malus atau *clawback* apabila terdapat peringkat risiko pada triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran tantiem atau insentif kinerja yang ditangguhkan dengan peringkat risiko 4 (*moderate to high*) atau lebih buruk.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi meliputi:

1. Kebijakan remunerasi terhadap penilaian kinerja.
Guna mendorong Pekerja untuk berkinerja unggul, Perseroan memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, Pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.
2. Metode remunerasi individu dengan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.
Dalam pemberian kompensasi variabel bagi Pekerja, besarnya nilai kompensasi yang diterima oleh Pekerja tergantung dari pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja unit kerja dan kinerja individu dimana masing-masing komponen tersebut memiliki indikator pencapaian target, bobot, dan faktor pengali yang berdiri sendiri.
3. Metode penyesuaian remunerasi terhadap kinerja yang tidak tercapai.
Pada awal tahun Perusahaan telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja untuk memperoleh kompensasi variabel, salah satunya adalah kinerja yang harus dicapai. Bagi Pekerja yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak akan memperoleh kompensasi variabel.



Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:

- Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/ BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
 - Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah setinggi-tingginya 20% dari tantiem.
- Kebijakan remunerasi terhadap variabel yang ditangguhkan yang ditunda atau dibatalkan pembayarannya (Malus)
Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada MRT apabila terjadi kondisi berupa:
 - Terbukti adanya *Individual Fraud*.
 - Restatement* laporan keuangan perseroan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel.
 - Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan adalah 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Salah satu prinsip remunerasi Perseroan adalah kompetitif secara eksternal dimana Remunerasi diberikan pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan *Willis Towers Watson* yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris*	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	367.512	11	140.065

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris*	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	12	16.714	11	12.560
Total	12	384.227	11	152.625

* Termasuk Sdr. Hadiyanto yang diberhentikan dengan hormat sesuai keputusan RUPST BRI Tahun 2023 pada tanggal 13 Maret 2023.

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan Dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris**
Di atas Rp2 miliar	12	10
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Keterangan:

* yang diterima secara tunai

** Termasuk Sdr. Hadiyanto yang diberhentikan dengan hormat sesuai keputusan RUPST BRI Tahun 2023 pada tanggal 13 Maret 2023.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

- Bentuk dan alasan pemilihan remunerasi yang bersifat variabel.
Kompensasi kepada Pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan.
 - Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut:
 - Insentif Jangka Pendek.
Insentif Jangka Pendek merupakan kompensasi variabel yang dijanjikan oleh Perusahaan di awal tahun kepada Tenaga Pemasar. Insentif Jangka Pendek bertujuan untuk mendorong motivasi Tenaga Pemasar, memberikan *reward* secara langsung dalam mencapai dan melampaui target individu, target unit kerja maupun target perusahaan.

- Bonus.
Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perusahaan. Bonus diberikan kepada Pekerja dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.
2. Alasan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel (Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja).
- a. BRI menerapkan konsep Kelompok Jabatan, yang terdiri dari *Support*, *Bisnis*, *Pembina Pemasar*, dan *Pembina Pemasar*. Pemberian remunerasi bersifat variabel akan berbeda antara kelompok jabatan, yang menyesuaikan dengan besaran konstanta per kelompok jabatan dimaksud.
 - b. Perusahaan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar bagi Tenaga Pemasar, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
 - Tenaga Pemasar merupakan pencetak laba.
 - Mendorong Tenaga Pemasar untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
 - Apresiasi kepada Tenaga Pemasar.

Faktor penyebab perbedaan pemberian kompensasi yang bersifat variabel berdasarkan pertimbangan pencapaian kinerja dan kompetensi termasuk pencapaian kinerja unit kerja dan kinerja perusahaan.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris*		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	12	306.949	11	117.069	77.007	5.819.797

* Termasuk Sdr. Hadiyanto yang diberhentikan dengan hormat sesuai keputusan RUPST BRI Tahun 2023 pada tanggal 13 Maret 2023.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) yang ditetapkan berdasarkan jumlah manajemen pada periode tahun laporan adalah sebagai berikut:

1. Direksi (12 orang)
2. Dewan Komisaris (10 orang)
3. *Senior Executive Vice President* (SEVP) (7 orang)

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Keterangan>Nama	Jumlah Saham Yang Dimiliki (lembar saham) Yang Diberikan (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Vested
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi*	-	-	-	-	-
Dewan Komisaris*	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	Achmad Royadi	290.400	290.400	2.240	30/11/2021
	Triswahju Herlina	290.400	290.400	2.240	30/11/2021
Total	580.800	580.800	580.800	2.240	

* Direksi dan Dewan Komisaris tidak memperoleh *share option*.



Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2023	2022
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	66,2	47,14
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,18	1,25
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11	1,11
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3,16	2,36

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Belum terdapat pemberian kompensasi variabel yang dijamin tanpa syarat.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	80
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	757
Rp500 juta ke bawah	708

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

No	Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan	
		Tunai (Rp Juta Nett)	Saham (lembar saham)
1	SEVP	2.405	-
2	Dewan Komisaris	12.676*	1.197.600**
3	Direksi	-	14.522.365

* Untuk Komisaris Independen
** Untuk Komisaris Non Independen

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

No	Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan	
		Tunai dalam Juta Rupiah (Unlock) 2023	Lembar Saham (Unlock) 2023
1	SEVP	845	-
2	Dewan Komisaris	1.822*	280.400**
3	Direksi	-	4.304.601

* Untuk Komisaris Independen
** Untuk Komisaris Non Independen

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam Satu Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai		Rp 77.086
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		-
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp381.617	Rp7.936
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank **	-	Rp34.465

Keterangan:
*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	12.413	-	-	-

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel(*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	11.154.964 lembar saham	-	-	-
Jumlah				

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja dilaksanakan dalam bentuk *Long Term Incentif* (LTI) dan kepemilikan saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen. Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (*Management Stock Option Plan* (MSOP)).

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Untuk meningkatkan engagement pekerja dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Perusahaan dan untuk memberikan motivasi/ insentif jangka panjang agar mencapai target-target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan, BRI juga memiliki Program Kepemilikan Saham bagi Pekerja BRI yang diberikan secara periodik, yaitu:

a. *Employee Stock Allocation* (ESA)

Program kepemilikan saham dalam bentuk *Stock Allocation* Program diberikan pada Tahun 2016 dan 2020 melalui 4 Tahap, kepada seluruh level Pekerja yang memenuhi kriteria yang terdiri dari masa kerja, kinerja individu, dan *track record* pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya.

b. *Employee Stock Option Plan* (ESOP)

Program kepemilikan saham dalam bentuk opsi pembelian saham dengan harga khusus yang diberikan di Tahun 2020. Program ini diberikan kepada para Pekerja Level tertentu yang termasuk *Top Talent* BRI dan memenuhi kriteria *performance* maupun *Capacity/Potential*.

Sebagai komitmen Perusahaan untuk meningkatkan *engagement*, produktivitas, dan menciptakan *sense of ownership* Pekerja terhadap Perusahaan, maka Perusahaan akan melakukan implementasi program kepemilikan saham untuk Pekerja yang serupa di tahun depan.

Jumlah Saham dan/atau Opsi

Program	Jumlah Lembar Saham (Tahun 2021)	Penambahan pada Tahun 2023*
ESA 1	589.800	21.100
ESA 2	1.554.300	32.300
ESA 3	268.953.200	33.900
ESA 4	283.113.000	414.300
ESA Khusus	30.720.900	-
ESOP 1	72.029.200	-
ESOP 2	76.896.900	-
<i>Discretionary Pool</i>	674.600	-

* Pemberian ESA atau Penambahan saham Tahun 2023 sebagai lanjutan dari Program Sebelumnya

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu *vesting period* atau periode dimana hak Pekerja atas saham masih tergantung pada persyaratan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program	Vesting Period
ESA 1	Vesting 1 1 Januari 2017 – 31 Januari 2018 (Berlaku untuk seluruh Corporate Title)
	Vesting 2 1 Januari 2019 – 31 Januari 2019 (Hanya berlaku untuk Corporate Title VP, EVP & SEVP)
ESA 2	2 Januari 2020 s.d 31 Januari 2020
ESA 3	2 Januari 2020 s.d 31 Maret 2021
ESA 4	2 Januari 2020 s.d 31 Desember 2021
ESOP 1	15 Mei 2020 – 31 Oktober 2020
ESOP 2	15 Mei 2020 – 31 Mei 2021
ESA 2023	2 Januari – 31 Desember 2024



Persyaratan Pekerja dan/atau Manajemen yang Berhak

Program pemberian sejumlah saham Perseroan berupa ESA diberikan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan *grant* dan *vesting program*, seperti salah satunya memenuhi masa kerja minimum, tercapainya kinerja Perusahaan dan kinerja Individu pada periode yang ditentukan, serta *track record* Pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya. Sementara untuk program kepemilikan saham Pekerja lainnya yang diberikan dalam bentuk pemberian hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan, yakni berupa ESOP, ditujukan kepada Pekerja yang termasuk ke dalam kategori *High Potential Talent & Value Creator* BRI yakni yang memenuhi kriteria *performance maupun Capacity/Potential*.

Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Pada program *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) yang diberikan BRI kepada Pekerja yang memenuhi syarat, akan ditetapkan harga perolehan saham pada waktu tertentu, yakni untuk program ESA 1 sebesar Rp3.630 per lembar saham, ESA 2, 3, dan 4 sebesar Rp4.410,- per lembar saham, ESOP sebesar Rp2.240,- per lembar saham.

Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik

Prosedur pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

1. Proses pengadaan jasa audit KAP dilaksanakan oleh Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS, dan Tim Pengadaan.
2. Komite Audit bertugas sebagai Koordinator Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS, dan Tim Pengadaan serta bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan pengadaan jasa audit KAP kepada Dewan Komisaris.
3. Metode pengadaan jasa audit KAP dilakukan dengan Metode Seleksi Langsung berpedoman kepada ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BRI.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit*	Izin AP
2023	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 8	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 4	Rp15.922.000.000	AP.1681
2022	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 7	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 3	Rp13.925.000.000	AP.1681
2021	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 6	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 2	Rp13.715.296.000	AP.1681
2020	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 5	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 1	Rp15.523.800.000	AP.1681
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 4	Danil Setiadi Handaja, CPA	Periode ke 3	Rp10.700.000.000	AP.1008
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 3	Danil Setiadi Handaja, CPA	Periode ke 2	Rp8.200.000.000	AP.1008
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 2	Danil Setiadi Handaja, CPA	Periode ke 1	Rp7.300.000.000	AP.1008

* Fee sudah termasuk OPE, PPN 11%, dan pajak-pajak lainnya

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Fee jasa lain yang diberikan akuntan sebesar Rp950.000.000.

Adapun jasa non audit yang diberikan yaitu:

- Prosedur yang disepakati atas perhitungan pencapaian KPI Direksi (kolegial dan individual), posisi 31 Desember 2023
- Prosedur yang disepakati atas data yang dikirim BRI untuk Kompilasi Laporan keuangan Kementerian BUMN tahun buku 2023
- Prosedur yang disepakati atas ketaatan terhadap peraturan yang berlaku untuk pendanaan usaha mikro kecil tahun buku 2023 (apabila diperlukan)

Opini Audit

Tahun	Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
2023	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2022	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2021	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Sistem Pengendalian Internal

BRI telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 (lima) komponen:

- Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian.
- Identifikasi dan penilaian risiko.
- Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.

- Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi.
- Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Seluruh manajemen dan pekerja BRI memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BRI. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BRI antara lain *1st line* (Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI), *2nd line* (Jajaran Manajemen Risiko termasuk Fungsi Manajemen Risiko, Jajaran Kepatuhan, *Branch Risk Compliance* dan Unit *Risk Compliance*), dan *3rd line* (Jajaran SKAI).

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris dan Direksi telah berperan aktif melakukan pengawasan dan membentuk budaya pengendalian di perusahaan.

- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh seluruh pekerja.

Adapun implementasi dari pengawasan oleh manajemen, diantaranya:

- BRI telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank. Dewan Komisaris ikut berperan dalam menetapkan tingkat toleransi risiko perusahaan.
- BRI memiliki struktur organisasi yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- BRI telah memiliki arsitektur kebijakan yang di dalamnya terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional.
- Melakukan *Monitoring* terhadap perbaikan temuan audit internal dan eksternal.
- Melaksanakan komunikasi pada seluruh jenjang organisasi secara berkala, termasuk komunikasi antara Direksi dan Komisaris.
- Pemantauan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
- Pelaksanaan Kaji Ulang Sistem Pengendalian Intern.



Direksi dan Dewan Komisaris menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya pengendalian intern. Adapun implementasinya meliputi:

1. Seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh seluruh pekerja, antara lain melalui:
 - a. Aplikasi BRIPEDIA
 - b. Aplikasi BRISHARE
 - c. Pustaka SDM pada aplikasi BRISTARS
2. Kebijakan terkait Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam *core value* BRI, Kebijakan GCG BRI, Kode Etik BRI, Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Benturan Kepentingan yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
3. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan human capital BRI mencakup perencanaan, *rekrutmen*, pengembangan & pelatihan, remunerasi, manajemen kinerja dan hukuman disiplin.
4. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

BRI secara periodik dan berkelanjutan melakukan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Penilaian risiko juga dilakukan oleh jajaran audit internal dalam pelaksanaan kegiatan audit melalui *risk based* audit. Identifikasi dan penilaian risiko secara lebih rinci disampaikan pada BAB Manajemen Risiko. Pengendalian intern dilaksanakan kaji ulang oleh SKAI setiap tahunnya melalui kegiatan Kaji Ulang Manajemen Risiko.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Pengendalian Keuangan dan Operasional)

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi BRI.

KAJI ULANG MANAJEMEN (TOP LEVEL REVIEW)

BRI secara berkala setiap tahunnya melaksanakan *top level review* terkait Strategi *Anti Fraud*. Hasil kaji ulang tersebut meliputi evaluasi menyeluruh terkait pilar penerapan strategi *anti fraud* perusahaan sehingga dapat mendeteksi permasalahan yang ada untuk selanjutnya dirumuskan perbaikan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

KAJI ULANG OPERASIONAL (FUNCTIONAL REVIEW)

Satuan Kerja Audit Intern melakukan kegiatan *assurance* dan pemberian jasa konsultasi terhadap kecukupan dan efektivitas

sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan *corporate governance*. Kegiatan audit dilakukan secara berkala untuk setiap level Unit Kerja BRI. SKAI menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama, dan Komite Audit dengan tindasan kepada Direktur Kepatuhan. SKAI melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang disampaikan oleh Auditee. Selain pelaksanaan kegiatan audit, secara berkala SKAI BRI telah melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko dan penerapan Strategi *Anti Fraud*.

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Satuan Kerja Teknologi Informasi (TI) menerapkan praktik-praktik pengendalian yang memadai sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko TI secara keseluruhan dengan memperhatikan diantaranya:

1. Hasil penilaian risiko.
2. Kriteria penanganan risiko dan rekomendasi bentuk penanganan risiko.
3. Ketentuan perundang-undangan dan persyaratan hukum atau kontrak lainnya.
4. Praktik-praktik pengendalian antara lain:
 - a. Penerapan kebijakan, standar, prosedur dan struktur organisasi termasuk alur kerjanya.
 - b. Pengendalian intern yang efektif yang dapat memitigasi risiko dalam proses TI.
 - c. Penetapan kebijakan, standar, prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan BRI untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI.
 - d. Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas Disaster Recovery Plan.
 - e. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.
 - f. Evaluasi kemampuan penyedia jasa TI untuk menjaga tingkat keamanan yang diterapkan oleh BRI dari kerahasiaan, integritas data dan ketersediaan informasi.
 - g. Pengawasan dan pemantauan sebagai tanggung jawab manajemen BRI dengan melakukan alih daya (*outsourcing*) operasional TI kepada pihak penyedia jasa TI.
 - h. Pemakaian asuransi sebagai upaya dalam mitigasi potensi kerugian dalam penyelenggaraan TI.

PENGENDALIAN ASET FISIK

Pengendalian aset fisik BRI tertuang dalam Kebijakan Umum Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik (KATALOG). KATALOG memuat kebijakan manajemen aktiva tetap dan pengelolaan logistik BRI secara terpadu yang meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, pendanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, asuransi, pemeliharaan, optimalisasi aset, administrasi dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

DOKUMENTASI

Perseroan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut di-Update secara berkala untuk menggambarkan kegiatan operasional Perseroan dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Akurasi dan ketersediaan dokumen juga dilaksanakan penilaian pada pelaksanaan audit oleh auditor intern.

PEMISAHAN FUNGSI (*SEGREGATION OF DUTIES*)

Pemisahan dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di seluruh jenjang organisasi dan seluruh kegiatan operasional. Implementasinya meliputi:

1. Penerapan fungsi *Dual Control* dalam kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
2. Penetapan kewenangan limit dalam akses dan pemberian keputusan atas transaksi.
3. Menghindari pemberian tanggung jawab dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
4. Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan *Signer* ke beberapa orang dalam mitigasi risiko operasional dan bisnis.

PENGENDALIAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Fungsi Kepatuhan. Tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan sistem pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, tanggung jawab Fungsi Kepatuhan antara lain melakukan identifikasi, pengukuran, Monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum termasuk melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BRI telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, secara berkala Fungsi Kepatuhan memiliki program kerja penilaian efektivitas budaya kepatuhan. BRI telah memiliki parameter pengukuran efektivitas penerapan budaya kepatuhan untuk unit kerja yang dilakukan sekali dalam satu tahun. Penilaian tersebut memberikan gambaran kepada manajemen untuk mengetahui

tingkat kepatuhan masing-masing unit kerja yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai KPI masing-masing unit kerja.

Penilaian terhadap kecukupan implementasi Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh Direksi secara berkala melalui Laporan Fungsi Kepatuhan yang secara per semester juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan pelaksanaan implementasi yang tertuang dalam Laporan Fungsi Kepatuhan memuat informasi yang cukup menyeluruh antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, program pengendalian gratifikasi, program APU-PPT, dan lainnya.

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Bertujuan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pekerja. Implementasinya meliputi:

1. Sistem akuntansi telah didukung dengan penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.
2. BRI memiliki sistem informasi yang memadai diantaranya BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM), *Loan Approval System* (LAS) yang merupakan sistem informasi meliputi kegiatan usaha Bank di bidang perkreditan, aplikasi BRIOPRA yang merupakan sistem informasi terkait manajemen risiko, aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA), Sistem Informasi *Human Capital* BRISTARS, dll.
3. BRI telah memiliki *Disaster Recovery Plan* dan sistem *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Secara berkala dilakukan pengujian untuk memastikan sistem dapat bekerja secara efektif.
4. Sistem Komunikasi dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* baik pihak ekstern maupun intern dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif.
 - a. BRI telah memiliki Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yang berisikan pedoman dalam memberikan layanan informasi kepada pihak yang berkepentingan.
 - b. Tersedia media komunikasi untuk sosialisasi kebijakan kepada seluruh pekerja (BRISHARE, BRIPEDIA dan Pustaka SDM).
 - c. Pelaksanaan forum komunikasi (informasi ke atas, ke bawah dan lintas unit kerja) terkait informasi eksposur risiko, kinerja operasional, dan strategi perusahaan seperti Forum *Risk Management Committee*, *Business Performance Review*, *Support Performance Review*, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, *Focus Group Discussion* dan Forum Peningkatan Kinerja.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

BRI secara terus menerus melaksanakan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pengendalian intern baik yang dilakukan oleh unit kerja operasional maupun jajaran Satuan Kerja Audit Intern. SKAI telah melaksanakan pemantauan terhadap sistem pengendalian intern yang disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.



Kesesuaian dengan Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)

BRI telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan COSO Internal Control Framework yaitu *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication and Monitoring*.

Internal Environment

Elemen pertama dari struktur pengendalian intern BRI mencakup komitmen, kebijakan, perilaku termasuk kepedulian Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja BRI terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Dewan Komisaris BRI memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern melalui pertemuan berkala secara berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pekerja. Dalam melakukan pengawasan, manajemen BRI membentuk budaya pengendalian meliputi:

1. Pembentukan struktur organisasi BRI yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan human capital BRI mencakup perencanaan, *recruitment*, pengembangan dan pelatihan, remunerasi dan manajemen kinerja.
3. Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam core value BRI dan Kode Etik BRI yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris senantiasa memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*.

Risk Assessment

Merupakan rangkaian kesadaran seluruh pekerja BRI terhadap budaya sadar risiko meliputi tindakan evaluasi, menilai dan memitigasi risiko. Penjelasan lebih rinci terkait Sistem pengendalian internal terhadap seluruh jenis risiko Bank disampaikan pada pilar 4 Bab Manajemen Risiko. BRI melakukan evaluasi terhadap profil risiko secara periodik sebagai mitigasi risiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, BRI melakukan pengelolaan termasuk penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu:

1. Risiko kredit
Penilaian dilakukan dengan internal model menggunakan model *standart* yaitu menghitung *probability of default* dan *loss given default* untuk masing – masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitasnya. Selain itu, serangkaian *stress test* juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi *stress*.
2. Risiko pasar
Dilakukan penilaian secara berkala (harian, mingguan, bulanan) dengan menghitung risiko pasar meliputi

pendekatan dengan metode standar dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA dan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil *maturity* surat berharga. Pendekatan dengan metode standar dilakukan dengan melakukan perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

3. Risiko Likuiditas
Identifikasi, pengukuran dan pemantauan dilakukan melalui *dashboard* profil likuiditas harian sedangkan pengendalian dilakukan melalui *protocol liquidity contingency plan*. Penilaian risiko likuiditas meliputi penilaian rasio likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas, NSFR dan LCR, penetapan limit risiko likuiditas dan *stress test*.
4. Risiko Operasional
Menilai risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum
Meliputi penilaian terhadap risiko yang disebabkan adanya kelemahan yuridis meliputi tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.
6. Risiko Stratejik
Penilaian meliputi penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif pada bank terhadap perubahan eksternal.
7. Risiko Reputasi
Meliputi risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Pengukuran bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan risiko reputasi yang dihadapi BRI. Penilaian meliputi parameter berupa pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank dan frekuensi serta materialitas pemberitaan negatif bank dan keluhan nasabah.
8. Risiko Kepatuhan
Merupakan risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan terhadap parameter jenis, signifikansi, nominal dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
9. Risiko Asuransi
Menilai risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidak cukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.
10. Risiko Transaksi Intra Group
Menilai risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas

lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Selain melakukan penilaian risiko secara berkala, manajemen juga melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko perusahaan untuk ditetapkan tindakan dan kontrol terhadap penilaian risiko tersebut. Manajemen telah menetapkan *Early Warning System* pada setiap proses bisnis yang berisiko dan berpotensi merugikan perusahaan.

Control Activities

Mencakup tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan suatu risiko pada semua tingkatan organisasi dan berbagai proses bisnis yang ada di BRI. Aktivitas pengendalian dapat membantu Direksi dan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Bentuk aktivitas pengendalian BRI antara lain:

1. Kegiatan pengendalian secara umum melibatkan seluruh pekerja BRI di semua jenjang organisasi. Aktivitas pengendalian BRI tertuang dalam seluruh kebijakan dan prosedur BRI seperti yang tertuang dalam Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BRI. Sistem pengendalian pada setiap proses bisnis, meliputi:
 - a. Penerapan fungsi MCS (*maker, checker, signer*) dalam aktivitas otorisasi dan verifikasi.
 - b. Penerapan *segregation of duties* berupa pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas sehingga tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Penerapan *Four Eyes Principles* dalam proses kredit seluruh segmen; pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus.
 - d. Penerapan *three line* untuk aktivitas pertahanan berlapis.
2. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*)
 - b. Kegiatan pengendalian pada penerapan Manajemen Risiko, meliputi:
 - Pengendalian risiko kredit meliputi prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur meminimalkan kerugian kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur penghapusan kredit bermasalah.
 - Pengendalian risiko pasar meliputi penyusunan desain manajemen risiko pasar, menyusun dan menganalisa laporan berkala atas *output* yang dihasilkan model internal seperti analisa laporan harian posisi devisa netto, laporan eksposur risiko pasar, pelaksanaan forum *Market Risk Management Committee* dan forum *Asset & Liability Committee* (ALCO).
 - Pengendalian risiko likuiditas meliputi *Protocol Liquidity Contingency Plan*.

- Pengendalian risiko operasional meliputi prosedur asesmen produk, *Protocol Liquidity Contingency Plan* untuk kejadian yang bersifat katastrofik.
- Pengendalian risiko hukum dengan melakukan telaah terhadap aspek hukum pada produk dan aktivitas baru.
- Pengendalian risiko strategik tertuang pada kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang, Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Pengendalian risiko reputasi tertuang pada Surat Edaran Direksi BRI mengenai Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
- Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap setiap regulasi eksternal dan dilakukan analisa dampak bagi perusahaan untuk selanjutnya dituangkan pada setiap ketentuan internal perusahaan.
- Pengendalian risiko asuransi sebagai bagian dari risiko yang melekat pada BRI sebagai entitas utama yang membawahi perusahaan anak yang bergerak pada bidang asuransi adalah melalui pelaksanaan Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak.
- Pengendalian risiko intra grup dilaksanakan oleh *Desk Subsidiary* yang ditunjuk oleh manajemen sebagai unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

Information & Communication

BRI telah memiliki sistem informasi yang relevan dan berkualitas terkait kondisi keuangan, kegiatan usaha, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, kondisi pasar, dan kondisi lainnya dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan komunikasi secara internal dan eksternal juga dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendukung pengendalian internal perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Monitoring

Meliputi proses penilaian secara berkelanjutan atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen telah dilaksanakan dan berfungsi. *Monitoring* sistem pengendalian intern BRI dilakukan melalui *Three line of defence*, yaitu:

1. *1st line* selaku risk owner yaitu Unit Kerja yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional serta mengelola risiko yang dihadapi (antara lain Unit Kerja Operasional).
2. *2nd line* yaitu Unit Kerja yang melakukan pengawasan fungsional (antara lain Jajaran MR Kantor Pusat & Wilayah, Divisi Kepatuhan dan Divisi Kebijakan & Prosedur).
3. *3rd line* yaitu Unit Kerja yang melakukan *assurance*. SKAI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang melakukan fungsi pengawasan atas *Monitoring* sistem pengendalian intern.



Hasil pelaksanaan pengawasan dan *Monitoring* SKAI terhadap sistem pengendalian intern disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggungjawab memastikan penerapan sistem pengendalian intern (SPI) yang handal dan efektif serta berkewajiban meningkatkan dan memastikan budaya sadar risiko melekat di setiap jenjang organisasi. SKAI bertanggungjawab melaksanakan evaluasi kecukupan, efektivitas dan efisiensi SPI serta berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan BRI. SKAI melaksanakan evaluasi SPI melalui kegiatan pemeriksaan dan review secara periodik di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi SKAI disampaikan kepada Direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait. Dewan Komisaris khususnya Komite Audit turut berperan aktif dalam mengevaluasi SPI dengan melakukan telaah terhadap hasil evaluasi yang dilaksanakan SKAI. Hasil evaluasi selama tahun 2023 menunjukkan bahwa SPI di BRI telah berjalan secara memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian intern dan manajemen risiko perusahaan TELAH MEMADAI dalam mengidentifikasi risiko, sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang akan terjadi/dihadapi perusahaan. Ke Depan, Perusahaan agar senantiasa memperhatikan, mereview dan melakukan penyempurnaan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan.

Manajemen Risiko

BRI melakukan pengelolaan risiko secara proaktif dan prudent pada setiap proses bisnis dan operasional untuk mencapai *profitability* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditentukan. BRI berkomitmen dalam menjalankan manajemen risiko yang baik dengan memiliki kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan dan teknologi pendukung yang bertujuan agar pengelolaan risiko Bank BRI senantiasa berjalan efektif dan efisien.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

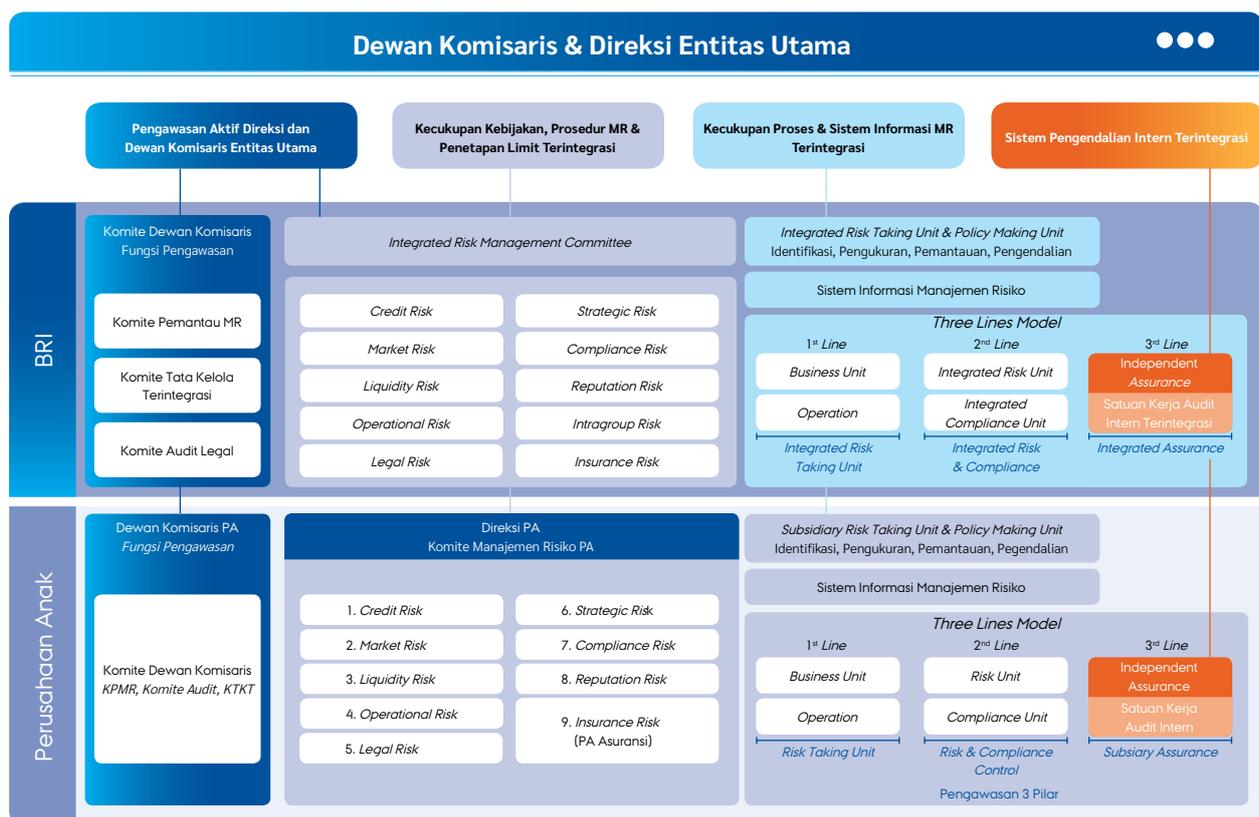
Dasar penerapan manajemen risiko Perseroan mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.03/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK/03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.03/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko.
19. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: KB.03 DIR/MPE/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kerangka Kerja dan Tata Kelola Manajemen Risiko

Kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko BRI yang dilakukan melalui pendekatan pengelolaan modal dan pengelolaan risiko dalam operasional dan bisnis yang meliputi seluruh jajaran organisasi BRI dan anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Secara sederhana, kerangka kerja manajemen risiko BRI digambarkan sebagai berikut:



Dalam mendukung pengendalian risiko dan memastikan kepatuhan pelaksanaan pilar bisnis serta *support*, sehingga kinerja BRI tetap sehat dan *sustain* dengan didukung oleh *operational excellence* guna peningkatan *value*, pelaksanaan manajemen risiko BRI memiliki 4 (empat) pilar pendukung yaitu:

- a. Pilar 1 : Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- b. Pilar 2 : Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit terintegrasi.



- c. Pilar 3 : Kecukupan proses dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi; dan
- d. Pilar 4 : Sistem pengendalian intern terintegrasi yang menyeluruh.

Terakhir, dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi dilakukan sinergi antar organ pengelola risiko perusahaan anak dan organ pengelola risiko entitas utama.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan manajemen risiko antara lain meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) yang dilakukan paling sedikit secara triwulanan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, yang dimaksud dengan transaksi adalah transaksi yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan transaksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal BRI yang berlaku.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko di tingkat Dewan Komisaris, yaitu Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR). Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan BRI tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima.

Komite Pemantau Manajemen Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulensi. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko secara individu telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 24 Januari 2023, 28 Maret 2023, 9 Mei 2023, 23 Mei 2023, 18 Juli 2023, 1 Agustus 2023 dan 26 September 2023.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain meliputi:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu

jika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.

2. Mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Untuk itu Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan, dan mengembangkan budaya risiko dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan BRI serta penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama secara berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban Direksi Entitas Utama.

Adapun untuk pertemuan membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 27 Februari 2023 dan 16 Agustus 2023.

Pengawasan Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi BRI berkaitan dengan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi BRI serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan.
2. Menetapkan KMR BRI berikut perubahannya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, prosedur, dan kerangka serta penetapan limit Risiko dan ambang batas (*threshold*) manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha, eksposur risiko, dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR BRI termasuk laporan mengenai profil Risiko.
5. Menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
6. Memutus transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, yang antara lain meliputi transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
7. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan

- yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.
8. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur, alat dan sistem informasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
 9. Mengembangkan budaya risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
 10. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
 11. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen.
 12. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
 13. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha yang ditemukan oleh SKAI BRI.
 14. Menyetujui usulan produk dan/atau aktivitas baru dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Divisi dalam SKMR BRI yang membidangi.
 15. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal.

BRI sebagai Entitas Utama menetapkan Direktur Manajemen Risiko BRI sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan dibantu oleh Direktur bidang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi BRI. Wewenang dan tanggung jawab Direksi BRI dalam manajemen risiko terintegrasi mencakup paling sedikit:

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan serta mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan BRI secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, Profil Risiko, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat Profil Risiko Konglomerasi Keuangan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atas usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada setiap anggota Konglomerasi Keuangan.
5. Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi dalam Konglomerasi Keuangan agar dipahami secara jelas.
6. Mengembangkan budaya sadar risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, antara lain dilakukan dengan memupuk kesadaran risiko (*risk awareness*) melalui komunikasi yang memadai dalam Konglomerasi Keuangan tentang pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian intern yang efektif.
7. Memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko.
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala.
9. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia di Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain dilakukan dengan cara:
 - a. Penetapan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten untuk penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - c. kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit kerja bisnis, Manajemen Risiko, maupun unit kerja support yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - d. Peningkatan kompetensi SDM melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - e. Meningkatkan pemahaman seluruh SDM terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan kerangka risiko secara terintegrasi serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang dilakukan.
10. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen dan bebas dari benturan kepentingan antara Entitas Utama dengan Perusahaan Anak.
11. Mengevaluasi hasil kaji ulang yang dilakukan oleh Divisi dalam SKMRT yang membidangi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.
12. Menetapkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko secara terintegrasi.
13. Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.

Selama tahun 2023 Direksi BRI telah menetapkan komite-komite pengelola risiko antara lain mengenai:

1. *Risk Management Committee* dilaksanakan sekurang-kurangnya secara triwulanan mengenai pembahasan eksposur risiko secara bank wide telah dilaksanakan selama periode 2023 meliputi:



No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	16 Januari 2023	Profil Risiko TW IV 2022 <i>Mandatory Report & Monitoring</i> Pembahasan <i>Risk Issue</i>
2	24 Maret 2023	<i>Mandatory Report & Monitoring</i> Pembahasan <i>Risk Issue</i>
3	17 April 2023	Profil Risiko TW I 2023 <i>Mandatory Report & Monitoring</i> Pembahasan <i>Risk Issue</i>
4	15 Mei 2023	<i>Mandatory Report & Monitoring</i> Pembahasan <i>Risk Issue</i>
5	15 Juni 2023	<i>Mandatory Report & Monitoring</i> Pembahasan <i>Risk Issue</i>
6	26 Juli 2023	Profil Risiko TW II 2023 <i>Mandatory Report & Monitoring</i> Pembahasan <i>Risk Issue</i>
7	27 September 2023	<i>Mandatory Report & Monitoring</i> Pembahasan <i>Risk Issue</i>
8	17 Oktober 2023	Profil Risiko TW III 2023 <i>Mandatory Report & Monitoring</i> Pembahasan <i>Risk Issue</i>
9	22 November 2023	<i>Risk Appetite Statement 2024</i> <i>Mandatory Report & Monitoring</i> Pembahasan <i>Risk Issue</i>

2. *Risk Management Committee* Terintegrasi mengenai pembahasan eksposur risiko secara Konglomerasi Keuangan dilaksanakan secara semesteran telah dilaksanakan selama periode 2023 meliputi:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	27 Februari 2023	RAS Terintegrasi 2023 <i>Mandatory Report MR</i> Terintegrasi Profil Risiko Terintegrasi, Profil <i>Risiko PA & Risk Issue PA</i> <i>Risk Maturity Index</i>
2	16 Agustus 2023	<i>Monitoring RAS Terintegrasi</i> <i>Mandatory Report MR</i> Terintegrasi Profil Risiko Terintegrasi, Profil <i>Risiko PA & Risk Issue PA</i> <i>Risk Maturity Index</i>

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK/2016 Direksi BRI telah menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif yang disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari proses pengukuran dan pengendalian, BRI memiliki dan melakukan *review* secara berkala atas kebijakan limit Risiko keseluruhan maupun limit risiko fungsional untuk area bisnis yang lebih spesifik misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional secara berkala. Beberapa Kebijakan yang telah dikinikan sepanjang tahun 2023 antara lain:

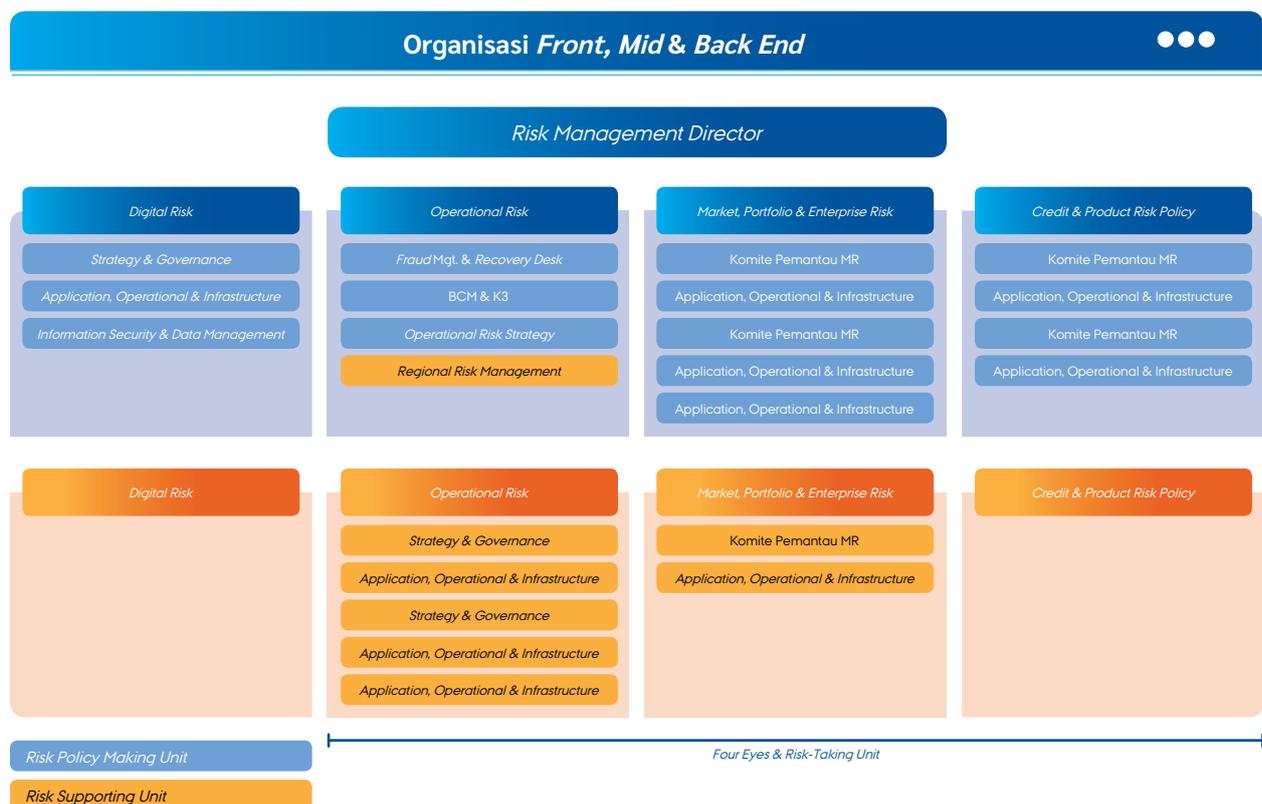
1. Pengelolaan Risiko secara *Enterprise*
 - a. Pemutakhiran kebijakan Pengelolaan Risiko melalui Permodalan
 - b. Pemutakhiran parameter dan limit RAS Individu dan Terintegrasi BRI serta pada masing-masing perusahaan anak
 - c. Pemutakhiran parameter profil risiko, rentabilitas dan permodalan BRI
 - d. Pemutakhiran kebijakan penentuan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan metodologi perhitungan profil risiko yang baru
 - e. Pemutakhiran Rencana Aksi (*Recovery Plan*) BRI
 - f. Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) BRI
2. Risiko Kredit
 - a. Pemutakhiran Kebijakan *Value Chain Financing*
 - b. Pemutakhiran Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 - c. Pemutakhiran *Credit Risk Rating* (CRR) Korporasi
 - d. Pemutakhiran Perlakuan khusus terhadap Kredit bagi Daerah Bencana
 - e. Pemutakhiran Pelaksanaan perlakuan khusus terhadap Debitur KUR terdampak COVID-19
 - f. Pemutakhiran Kebijakan Pendapatan atas Pemberian Kredit
 - g. Pemutakhiran Kewenangan Memutus Kredit
 - h. Pemutakhiran *Credit Risk Rating* (CRR) SME
 - i. Pemutakhiran Produk KKB *Joint Financing*
 - j. Pemutakhiran PPK SME
 - k. Pemutakhiran Produk BRIGUNA
 - l. Pemutakhiran Produk Pinjaman dengan Jaminan Resi Gudang
 - m. Pemutakhiran & Harmonisasi CRS Mikro (KUR, Kupedes)
 - n. Pemutakhiran & Harmonisasi CRS Konsumer (BRIGUNA, KPP, KKB, Kartu Kredit, CERIA, KMG)
3. Risiko Pasar & Likuiditas
 - a. Penetapan Limit Transaksi dan Limit Risiko Pasar Instrumen Aset Keuangan Terkait Aktivitas *Treasury* PT. BRI (Persero), Tbk.
 - b. Penetapan Limit untuk Pengelolaan Likuiditas PT. BRI (Persero), Tbk.
 - c. Penetapan MRCF Transaksi *Treasury* PT. BRI (Persero), Tbk.
 - d. Penetapan limit SR Valas
 - e. Penetapan Surat Edaran Direksi Tentang Perubahan Pertama Atas Pedoman Perhitungan *Asset Tertimbang Menurut Risiko* (ATMR) Buku 3 ATMR Risiko Pasar
4. Risiko Operasional
 - a. Pemutakhiran Kebijakan Umum Operasional dan Teknologi Informasi
 - b. Penyusunan Kebijakan *Corporate Culture*
 - c. Pemutakhiran Kebijakan Pengelolaan Jaringan Elektronik
 - d. Pemutakhiran Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. Pemutakhiran Kebijakan Pengelolaan Jaringan Elektronik (*E-channel*)
 - f. Pemutakhiran Kebijakan *Human Capital Development* dan *Talent Management*

5. Risiko Hukum
 - a. Penyusunan Legal Manual Kegiatan Usaha
 - b. Penyusunan Legal Manual Penanganan Perkara
6. Risiko Strategik
 - a. Pemutakhiran Segmentasi Bisnis
 - b. Pemutakhiran Pengelolaan Jaringan Kantor
 - c. Pengkinian Kebijakan Simpedes, Britama dan Deposito BRI
7. Risiko Kepatuhan
 - a. Kebijakan *Corporate Governance*
 - b. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
8. Risiko Reputasi
 - a. Pemutakhiran Kebijakan Pelaksanaan Program Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Pendukung

Dalam menyusun strategi pengelolaan risiko dalam kegiatan bisnis bank sehari-hari BRI mengacu kepada kerangka kerja *Enterprise Risk Management* dengan *Two-Prong Approach* yang mengelola risiko melalui proses bisnis dan operasional sehari-hari dan mengelola risiko melalui pencadangan modal. Dengan pendekatan tersebut, penerapan ERM BRI mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pilar pendukung dalam penerapan ERM dengan pendekatan *two-prong*, antara lain:

1. Organisasi *Front, Mid & Back End*



SKMR BRI terdiri dari *Risk Policy making Unit* dan *Risk Supporting Unit*. SKMR merupakan Divisi yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan manajemen risiko dan mengawasi jalannya proses manajemen risiko serta bersifat independen dari UKO, Satuan Kerja Audit Intern, dan Unit Kerja Kepatuhan. Struktur organisasi SKMR BRI bersifat *agile* dan dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BRI serta risiko yang melekat pada BRI. Divisi SKMR BRI yang membidangi ditetapkan oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada

Direktur bidang Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab SKMR BRI meliputi:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko;
- b. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan penetapan *Risk Appetite*, *Risk Tolerance*, dan limit risiko kepada Direksi;
- c. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;



- d. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMC dan/atau yang telah disetujui oleh Direksi;
- e. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (*composite*), maupun per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan;
- f. Melakukan *stress testing* setiap secara berkala, untuk mengetahui dampak dari perubahan kondisi ekonomi terhadap portofolio atau kinerja secara keseluruhan;
- g. Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko, berdasarkan temuan audit dan/atau perkembangan praktek-praktik manajemen risiko yang berlaku secara internasional (*best practice*);
- h. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan BRI untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur;
- i. Mengevaluasi akurasi model dan validitas data yang digunakan mengukur risiko;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Unit Kerja Operasional dan/atau kepada RMC sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara BRI;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko.

Selain SKMR, untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, maka BRI juga meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan Unit Kerja Operasional, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman (*track record*), kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko dengan cara:

- a. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam pengelolaan risiko melalui pelatihan di *Corporate University* atau melalui program sertifikasi maupun *public course*.

- b. Peningkatan *risk awareness* di seluruh UKO.
- c. Sosialisasi, forum diskusi maupun forum lainnya untuk menginternalisasi budaya sadar risiko.

Khusus untuk pejabat dan staf yang ditempatkan di Satuan Kerja Manajemen Risiko harus memiliki:

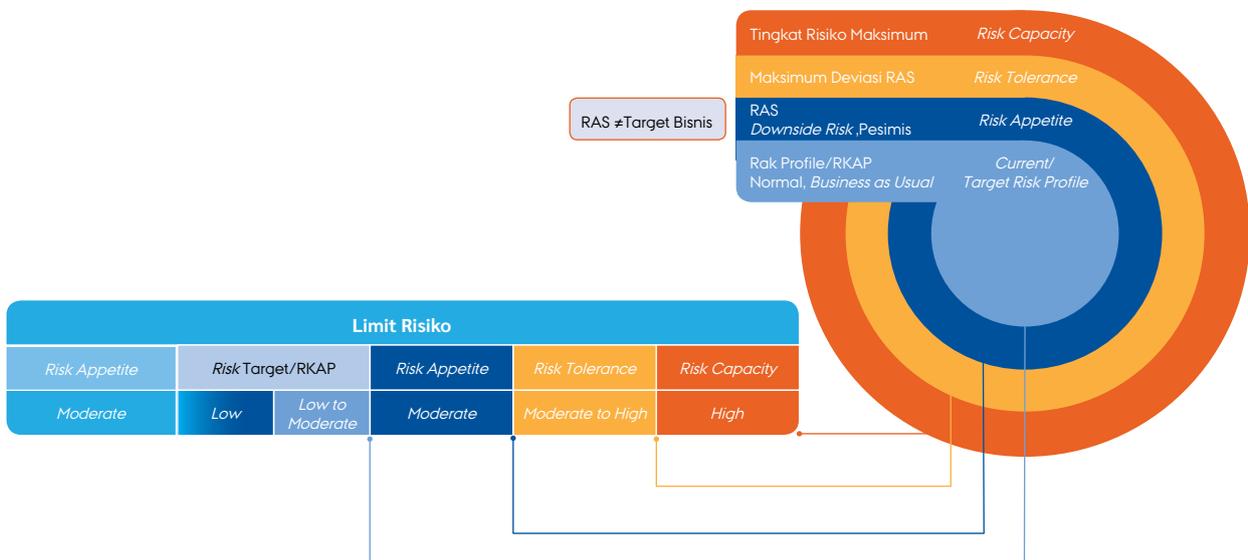
- a. Pemahaman mengenai risiko-risiko yang terkandung dalam setiap produk/aktivitas fungsional bank.
- b. Pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk dan/atau aktivitas fungsional BRI, serta mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha BRI.
- c. Pengalaman dan kemampuan untuk memahami dan mengomunikasikan implikasi eksposur risiko BRI kepada Direksi dan RMC secara tepat waktu.

2. Kebijakan dan Prosedur

BRI telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal yang menjadi panduan dalam:

- a. Kebijakan umum dalam penetapan jenis risiko, filosofi risiko, peranan, sasaran, dan kaji ulang penerapan manajemen risiko BRI.
- b. Kebijakan perkreditan bank, pedoman pelaksanaan perkreditan, SE dan SOP mengenai aktivitas perkreditan.
- c. Kebijakan operasional non perkreditan, pedoman pelaksanaan aktivitas operasional non perkreditan, SE dan SOP mengenai aktivitas operasional non perkreditan.
- d. Organisasi manajemen risiko, meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan unit kerja dalam proses manajemen risiko BRI.
- e. Penetapan *Risk Appetite* dan Limit Risiko.

Penetapan *Risk Appetite* dan Limit Risiko. ●●●



- f. Mengatur proses manajemen risiko, meliputi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang wajib dikelola BRI serta Mengatur Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - g. Mengatur *Enterprise Risk Management*, meliputi proses pengelolaan secara terintegrasi berbagai jenis risiko, validasi dan evaluasi, serta penilaian peringkat risiko.
 - h. Mengatur sistem informasi manajemen risiko.
 - i. Mengatur penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
 - j. Mengatur permodalan meliputi kecukupan perencanaan dan pengelolaan permodalan.
 - k. Mengatur pengelolaan risiko produk dan/atau aktivitas baru.
 - l. Mengatur Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/ *Business Continuity Management* (BCM) dan *Strategi Anti Fraud*.
 - m. Mengatur Penerapan Manajemen Risiko secara Terintegrasi.
3. Sistem *Rating*, *Limit* dan *Database*
Sistem *rating* dan *limit* risiko yang dipergunakan untuk memastikan tingkat akurasi serta ketepatan dalam pengambilan keputusan diantaranya meliputi:

Sistem	Tujuan
<i>Loan Portfolio Guideline</i>	Penetapan limit kualitas portfolio kredit berdasarkan sektor industri
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Loan Approval System</i> • <i>Consumer Loan Approval System</i> • <i>Loan Origination System</i> • <i>BRISPOT</i> 	Efisiensi dan mitigasi proses putusan kredit

Sistem	Tujuan
<i>Early Warning System</i>	Memprediksi Kemungkinan gagal bayar dari debitur eksisting
<i>Risk Performance Analysis Dashboard</i>	Dealer Profitability analysis
<i>Overseas Branches Transaction Monitoring Dashboard</i>	Sistem <i>Monitoring</i> aktivitas Unit Kerja Luar Negeri
<i>Daily Market & Liquidity Risk Dashboard</i>	<i>Monitoring</i> aktivitas <i>treasury</i> harian
<i>Early Warning Indicator</i>	Liquidity early warning signal dashboard
<i>BRISIM Dashboard Pengawasan Operasional</i>	<i>Monitoring</i> aktivitas operasional rekening suspend, kas, dsb
<i>BRISIM Dashboard Pengawasan Kredit</i>	<i>Monitoring</i> Kredit dengan tunggakan
<i>BRISIM Dashboard Regional Office Risk Profile</i>	<i>Monitoring</i> profil risiko per <i>Regional Office</i>

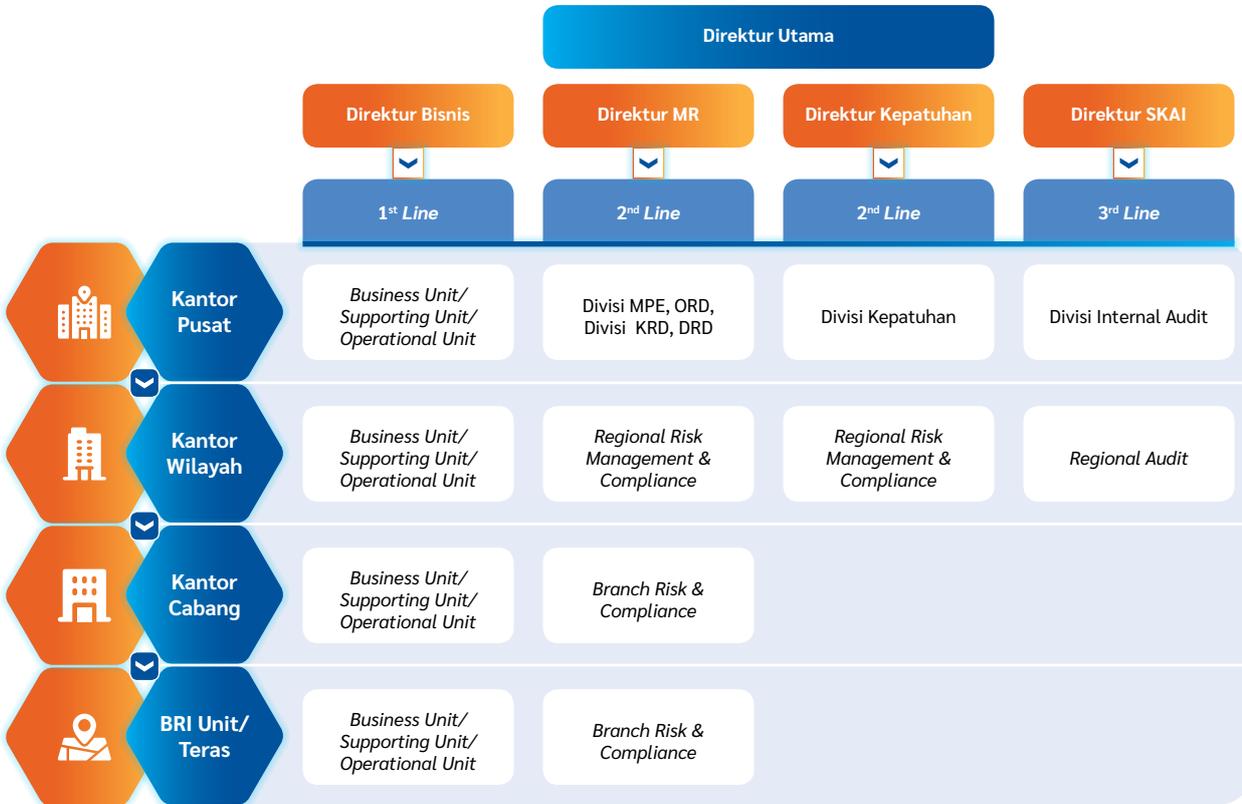
Database yang dipergunakan untuk memastikan tingkat akurasi serta ketepatan dalam pengambilan keputusan yang digunakan BRI diantaranya meliputi:

Sistem	Tujuan
<i>Credit Risk Analysis System</i>	<i>Monitoring Loan at Risk</i> per segmen per divisi, per provinsi, per unit kerja dan per sektor ekonomi
<i>GUAVA System</i>	<i>Market risk middle office treasury System & Database</i>
<i>BRIOPRA</i>	<i>Database</i> pencatatan human error, insiden, dan bencana <i>Database</i> Pencatatan <i>Fraud</i>
<i>BRISIM</i>	<i>Database</i> BRI



Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BRI mengadopsi konsep *Three Line of Model* yang merupakan implementasi dari strategi pengendalian dalam *framework* COSO, dengan rincian sebagai berikut:



Dengan konsep *Three Line of Model* maka kegiatan pengendalian internal dilakukan dengan pemisahan fungsi yang jelas dalam mengelola risiko. Selain itu pemantauan atas eksposur risiko dilakukan secara berkala dan tindakan koreksi dilakukan segera sehingga risiko dapat terjaga sesuai dengan Batasan *risk appetite* dari Bank. Kaji ulang dan penilaian efektivitas terhadap sistem pengendalian internal dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal secara berkala.

Sistem Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko

Direksi BRI menetapkan Filosofi Risiko BRI sebagai dasar dari strategi penerapan manajemen risiko BRI untuk pengembangan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi. Filosofi risiko akan mendasari kegiatan-kegiatan dalam penetapan tujuan perusahaan, pelaksanaan aktivitas bisnis bank dan pemenuhan harapan *stakeholders*. Filosofi Risiko BRI terdiri dari empat komponen, sebagai berikut:

1. Integritas
 Sesuai dengan Nilai Budaya Kerja BRI, dengan penekanan pada:
 Secara tegas membedakan yang benar dengan yang salah serta melakukan kegiatan yang diyakini kebenarannya, demi kepentingan BRI dan nasabah.
2. Profesional
 Sesuai dengan Nilai Budaya Kerja BRI, dengan penekanan pada:
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan serta tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dengan mengutamakan kepentingan BRI.
 - b. Optimalisasi hubungan *risk-return*, yaitu mengoptimalkan potensi pendapatan pada suatu tingkat risiko tertentu.
3. Prinsip Kehati-hatian
 Menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam mendukung bisnis BRI dengan cara menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

4. Peningkatan Kompetensi yang Berkelanjutan
 - a. Menginvestasikan waktu dan sumberdaya dalam rangka mengembangkan perangkat, sistem dan pelatihan praktis yang dapat mendukung pengelolaan risiko yang efektif.
 - b. Terus menerus meningkatkan kemampuan dan kecakapan dalam rangka membangun kemampuan pengelolaan risiko yang sesuai dengan praktik terbaik (*best practices*).

Filosofi risiko tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam mengembangkan kemampuan manajemen risiko dengan cara:

1. Memahami dan mengelola eksposur risiko secara proaktif,
2. Mengoptimalkan hubungan *risk-return* yang konsisten dengan strategi bisnis, dan
3. Menetapkan kebijakan dan menjamin pelaksanaan *good corporate governance*.

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko BRI dilaksanakan secara lengkap yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material, yaitu faktor-faktor risiko kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BRI. Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko.

1. Identifikasi Risiko

BRI mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha BRI yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Proses identifikasi risiko akan sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BRI dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas BRI serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BRI sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis BRI. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya.

Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BRI, produk, transaksi, dan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BRI.

3. Pemantauan Risiko

Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha BRI serta efektivitas proses manajemen risiko. Pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan BRI antara lain dapat didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Penyempurnaan proses pelaporan risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BRI, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

BRI menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.

4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern BRI yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BRI. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatu hasil evaluasi atas eksposur risiko yang terdapat pada seluruh portofolio produk dan aktivitas fungsional BRI.

Prosedur dan metodologi pengendalian risiko ditetapkan oleh Direksi BRI dengan memperhatikan kompleksitas usaha, kondisi implementasi dan kemampuan sistem manajemen risiko internal serta ketentuan yang berlaku.

Penetapan prioritas dan cara pengendalian risiko harus mempertimbangkan pemetaan risiko inheren BRI melalui analisis terhadap besarnya potensi kerugian finansial dan kemungkinan kejadian risiko serta pertimbangan asas manfaat dan biaya.



Prioritas utama dalam mitigasi adalah terhadap risiko yang memiliki dampak kerugian tinggi atau frekuensi kejadian tinggi. Mitigasi dalam bentuk penyempurnaan dan pelaksanaan pengendalian risiko.

Selain melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, terdapat proses pendukung lainnya dalam proses manajemen risiko, seperti:

1. Komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja perusahaan sehingga setiap individu dalam perusahaan memahami kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko, Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut.
2. Konsultasi, untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan dapat tercapai dan tepat sasaran.
3. *Monitoring* dan *review* (sistem pengendalian intern), yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko.

Risk Appetite Statement

Risk Appetite/tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil BRI dalam rangka mencapai sasarnya. Penetapan *Risk Appetite* digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan Risiko, sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik serta sebagai panduan dari Manajemen kepada Unit Kerja mengenai jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima dan dikelola.

Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis (Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank), serta mencakup seluruh jenis risiko yang bersifat material dalam operasional bisnis BRI. Direksi BRI menetapkan Risk Appetite dalam bentuk pernyataan yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan intoleransi (*zero tolerance*) yang terkait dengan sasaran dan

tujuan bisnis BRI. *Risk Appetite* dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI serta perubahan kondisi lingkungan bisnis.

Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka pengukuran risiko secara lebih menyeluruh, BRI telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan BRI adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok dengan BRI karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. BRI sebagai perusahaan induk merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BRI. Konglomerasi Keuangan BRI memiliki struktur yang terdiri dari BRI sebagai Entitas Utama serta perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi.

Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi dalam pengelolaan risiko di BRI diantaranya:

1. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi
Direksi Entitas Utama berwenang untuk menetapkan limit risiko untuk Konglomerasi Keuangan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), toleransi risiko, dan strategi Konglomerasi Keuangan BRI secara keseluruhan. Penetapan limit risiko harus sejalan dengan strategi bisnis, Profil Risiko, kemampuan modal Konglomerasi Keuangan BRI untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, serta ketentuan regulator yang berlaku.

Penyusunan limit dilakukan oleh Divisi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi BRI yang membidangi dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup:

- a. limit secara keseluruhan (Terintegrasi)
- b. limit setiap jenis risiko
- c. limit setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko

Limit tersebut direview secara berkala oleh Divisi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi BRI yang membidangi untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Limit harus dipahami oleh setiap pihak terkait dalam Konglomerasi Keuangan BRI dan dikomunikasikan dengan baik termasuk jika terjadi perubahan.

Jenis risiko-risiko yang dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:



2. Penyediaan Permodalan Modal Minimum Terintegrasi

BRI sebagai Entitas Utama memiliki Perusahaan Anak yang berbentuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga membentuk Konglomerasi Keuangan BRI, bahwa dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, Konglomerasi Keuangan BRI perlu memiliki kecukupan permodalan yang memadai.

Modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas Konglomerasi Keuangan BRI secara keseluruhan, cushion untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis. Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga mendukung kondisi dan kestabilan Konglomerasi Keuangan BRI. BRI selalu memastikan bahwa Konglomerasi Keuangan telah memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi minimum sebesar 100%.

Pelaksanaan Implementasi Basel

Perseroan telah menerapkan beberapa Pilar Basel dalam implementasi Manajemen Risiko, antara lain:

1. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)

Sesuai dengan POJK No. 27/POJK.03/2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BRI telah memastikan bahwa modal BRI telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), yang meliputi *Capital Conversation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik, di samping itu BRI telah memenuhi persyaratan minimum Leverage Ratio yang telah dilaporkan kepada regulator secara triwulanan.

Selain itu dalam rangka *Supervisory review process* BRI telah melaksanakan *Bottom Up Stress Testing* dalam mendukung penerapan kerangka pengelolaan stabilitas sistem perbankan di Indonesia, yang meliputi pengujian *solvency stress test* dan *liquidity assessment*.



2. Kredit

Perhitungan modal minimum untuk risiko kredit dilakukan dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan SE OJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Namun demikian, terhitung mulai Tahun 2023 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko kredit wajib menggunakan Pendekatan Standar dengan berpedoman pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021.

3. Operasional

Perhitungan modal minimum untuk risiko operasional dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar. Namun demikian, terhitung mulai Tahun 2023 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional wajib menggunakan Pendekatan Standar dengan berpedoman pada SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020.

4. Pasar dan Likuiditas

a. Perhitungan modal minimum untuk risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan POJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Namun demikian, terhitung mulai Tahun 2024 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar wajib menggunakan Pendekatan Standar dengan berpedoman pada SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022.

b. Pengukuran ketahanan Likuiditas Bank dengan menggunakan *Basel III Approach: Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding Ratio*, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum. Sebagai tambahan pilar Basel dalam pengukuran ketahanan likuiditas, terhitung mulai Tahun 2023 akan dilakukan implementasi *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP).

c. Pengukuran *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) sesuai dengan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*).

Profil Risiko dan Pengelolannya

Terdapat 10 (sepuluh) Risiko yang dikelola BRI yaitu:

Risiko Kredit

Risiko kredit terjadi akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank yang pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*) dan dapat diakibatkan juga oleh terkonsentrasinya penyediaan dana debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Dalam penerapan manajemen risiko kredit, BRI melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemisahan pejabat kredit bidang:

- Relationship Management/RM* yang bertanggung jawab melakukan asesmen *Business Feasibility* serta melakukan upaya penagihan pinjaman *performing loan*.
- Credit Risk Management/CRM* yang bertanggung jawab melakukan asesmen *Business Risk* dalam proses pemberian kredit serta memantau *Early Warning System*.
- Credit Restructuring and Recovery/CRR* yang bertanggung jawab mengelola kredit bermasalah dengan mengoptimalkan pengembalian pinjaman bermasalah.

2. Pengembangan *Internal Risk Rating* sebagai alat bantu pada proses identifikasi dan pengukuran tingkat risiko calon debitur.

3. Pengembangan *Early Warning System* sebagai alat bantu pada proses pemantauan tingkat risiko kredit secara portofolio.

4. Penetapan kebijakan manajemen risiko kredit, di antaranya tata kelola, pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit berdasarkan geografis dan pengelolaan limit konsentrasi per industri/sektor.

Pengembangan sistem informasi berupa *Dashboard Monitoring Credit Risk Analisis Sistem* (CRAS) untuk mengukur kualitas kredit (LAR, CL, SML, NPL) hingga level unit kerja, segmen bisnis dan sektor industri debitur untuk membantu proses pengelolaan risiko kredit secara portofolio.

Risiko Pasar

Risiko yang muncul pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari variabel pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas dan Risiko Komoditas. Untuk Risiko Nilai Tukar dan Risiko Suku Bunga dapat berasal dari posisi *trading book* dan *banking book*.

Pengukuran risiko pasar di BRI dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulanan) antara lain dengan:

- Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode pengukuran *standardized* dan pengukuran internal model (VaR),

2. Melakukan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar maupun *benchmark rate* serta *repricing gap* atas aset dan liabilitas.
3. Mengimplementasikan sistem terintegrasi untuk *treasury and market risk*, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*.

Dalam manajemen risiko pasar, BRI secara rutin menyelenggarakan forum *Risk Management Committee* yang membahas profil risiko pasar, *market risk issue* baik internal maupun eksternal, dan *stress testing risiko pasar*. Selain itu BRI juga melakukan rapat ALCO yang dilakukan setiap bulan untuk membahas kondisi *asset* dan *liability* antara lain *maturity profile*, *interest rate risk*, *NII simulation*, dan pengelolaan *PDN*.

Fungsi manajemen risiko pasar terbagi menjadi tiga fungsi yang terdiri dari unit kerja *front office (Treasury Business Division)*, *middle office (Market, Portfolio & Enterprise Risk Division)*, dan *back office (Payment Operation Division)*. *Front office* memantau pergerakan harga pasar dan melakukan aktivitas *Treasury*, menyesuaikan portofolio sesuai dengan arah pergerakan *market*, *middle office* menetapkan dan memantau limit risiko pasar, limit transaksi dan secara berkala memastikan data pasar (*market price*) yang digunakan untuk *mark to market (MTM)*, sedangkan *back office* melakukan *settlement* dan secara harian dan menetapkan *MTM* pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman pekerja.

Kebijakan, prosedur dan limit risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan *Treasury* serta Surat Edaran Manajemen Risiko Pasar dan Ketentuan Penetapan Limit atas Transaksi dan Limit Risiko Pasar Instrumen Keuangan terkait aktivitas *Treasury* BRI. Adapun limit yang tercantum dalam kebijakan tersebut seperti limit *open position* untuk *trading*, limit transaksi dealer, limit *cut loss* dan *stop loss*, limit *uncommitted credit line*, *counterparty* limit serta limit *value at risk (VaR)*.

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* risiko pasar yang bertujuan untuk mengukur potensi risiko pada portofolio yang dimiliki pada kondisi *stress*. Dalam *stress testing*, *shock* dapat berasal dari nilai tukar maupun suku bunga yang berdampak pada eksposur risiko pasar yang mencakup Posisi Devisa Neto (PDN), Surat Berharga kategori *Fair Value through Other Comprehensive Income (FVTOCI)* dan *Fair Value through Profit or Loss (FVTPL)*.

Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Guna mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas dalam Surat Edaran Manajemen Risiko Likuiditas yang mencakup:

1. Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas
2. Limit Pengelolaan Likuiditas
3. *Liquidity Coverage Ratio*
4. *Net Stable Funding Ratio*
5. *Early Warning Indicators Liquidity*
6. *Contingency Funding Plan*

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan risiko likuiditas yang memadai antara lain kecukupan dana harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Strategi pendanaan diutamakan berasal dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI memiliki mekanisme sistem peringatan dini likuiditas (*Liquidity Early Warning Indicators/EWI*) yang merupakan indikator untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas dan memberikan sinyal sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional yang dilakukan secara harian. Pemantauan *EWI* dilakukan agar BRI dapat melakukan *self assessment* terhadap kondisi likuiditas dan melakukan mitigasi atau *action plan* sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun salah satu *action plan* yang tersedia adalah menyiapkan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan/CFP*). Simulasi *stress testing* risiko likuiditas dilakukan secara reguler untuk mengukur ketahanan atau kemampuan pemenuhan kebutuhan likuiditas dan permodalan selama kondisi krisis.

Untuk memenuhi penerapan Basel III, BRI melakukan *Monitoring* terhadap dua rasio utama likuiditas yaitu Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/ LCR*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio/ NSFR*). Hasil *Monitoring* terhadap kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa posisi BRI berada di atas batas minimum rasio yang ditetapkan Basel III.

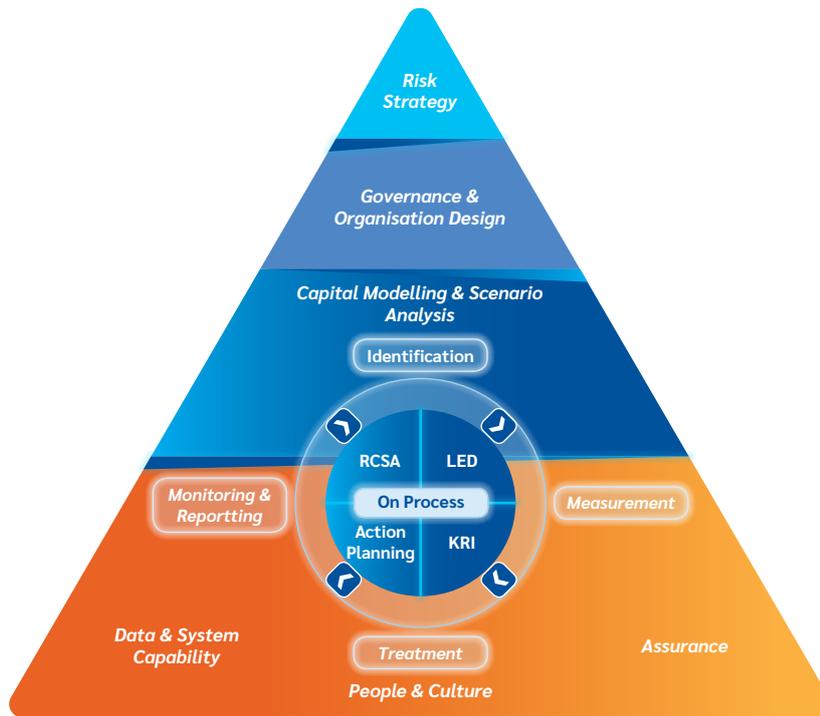
Risiko Operasional

Risiko Operasional terjadi karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional merupakan risiko yang melekat pada setiap aktivitas proses bisnis dan operasional yang dijalankan Bank sehingga Risiko Operasional seringkali disebut sebagai *mother of risk* karena dapat dapat memicu terjadinya Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, serta Risiko lainnya apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik.

Dalam rangka menunjang penerapan Manajemen Risiko Operasional (MRO), BRI menyusun *Framework* MRO yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Manajemen Risiko pada ISO



31000:2018 sebagai pedoman implementasi MRO di setiap lini. *Framework* MRO secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) komponen utama yaitu *Business Strategy*, *Business Management*, dan *Business Enablers* yang digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar tersebut, maka penerapan MRO harus ditunjang dengan penetapan strategi pengelolaan risiko operasional, dalam hal ini BRI menetapkan strategi MRO melalui *Risk Appetite Statement* (RAS) Risiko Operasional, *Key Performance Indicator* (KPI), Parameter dan Limit Profil Risiko Operasional, *Key Risk Indicator*, dan Daftar Risiko Utama. Selanjutnya, penerapan MRO di BRI juga ditopang dengan Struktur Organisasi MRO yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan risiko operasional yaitu dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) baik di Kantor Pusat maupun sampai di tingkat regional dan di setiap Unit Kerja BRI. Selain itu, BRI menetapkan tatakelola Manajemen Risiko yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Direksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Selanjutnya, Strategi dan Tatakelola yang telah disusun dijadikan sebagai acuan dalam implementasi proses Manajemen Risiko Operasional yaitu Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian dan Pemantauan. Pelaksanaan proses manajemen risiko operasional di setiap Unit kerja didukung dengan penggunaan Perangkat MRO. Perangkat MRO digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi dan menilai eksposur risiko operasional sehingga BRI dapat menentukan mitigasi yang efektif dan melakukan perbaikan kualitas aktivitas bisnis dan operasional. Perangkat MRO terdiri dari:

a. Risk & Control Self Assessment (RCSA)

RCSA merupakan perangkat MRO yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan menggunakan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadi (*likelihood*).

b. Loss Event Database (LED)

Merupakan kumpulan data *loss event* risiko operasional yang terkonfirmasi memiliki kerugian dan didapatkan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi potensial insiden dan/atau insiden yang dicatatkan dan dikelola oleh masing-masing Unit Kerja.

c. Key Risk Indicator (KRI)

Merupakan modul untuk memantau indikator risiko operasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan/unit kerja. KRI telah disusun sampai level unit kerja operasional untuk membantu pemimpin unit kerja mengelola risiko sejak dini.

Pengendalian risiko operasional di BRI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan/atau *Signer* (MCS) dalam setiap aktivitas operasional bank sesuai dengan tingkat risiko dengan tujuan untuk memastikan kebenaran aktivitas Bank. Pemisahan fungsi MCS ditetapkan dalam ketentuan Bank dan diimplementasikan pada semua sistem Bank, antara lain: *Branch Delivery System*, *Fixed Asset Management System*, *Human Capital System* dan sebagainya. Pengendalian internal dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana aktivitas sebagai *first line*.
2. Satuan Kerja *Manajemen Risiko Operasional* (SKMRO) sebagai *second line* melakukan *continuous Monitoring* untuk

memastikan pelaksanaan pengendalian internal oleh first line, antara lain melalui kegiatan *control verification*, *control improvement* dan internalisasi budaya risiko dan kepatuhan guna mencapai *zero fraud*.

3. Identifikasi Risiko dilaksanakan melalui penilaian *Risk Control Self Assessment* (RCSA) yang dilakukan pada setiap awal semester dengan mempertimbangkan *Key Performance Indicator* (KPI), *Concern Management*, rencana bisnis Ke Depan, data historis kejadian risiko operasional dan kelemahan kontrol.
4. Pengukuran risiko dilakukan bersamaan dengan identifikasi risiko pada saat penyusunan RCSA.
5. Pemantauan risiko dilakukan oleh Unit Kerja selaku Risk Owner dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) dengan menggunakan *tools continuous Monitoring* yang tersedia, antara lain *Key Risk Indicator Dashboard* (KRID), dan aplikasi *reporting* lain yang tersedia di Unit Kerja.
6. Pengendalian Risiko aspek *people*, *process* dan *technology*. Upaya pengendalian tersebut dilakukan untuk memperbaiki desain kontrol maupun implementasi kontrol. Beberapa aktivitas pengendalian risiko antara lain:
 - a. Penyusunan dan/atau pengkinian kebijakan dan SOP yang berisi penetapan *internal control* untuk setiap aktivitas Bank.
 - b. Pelaksanaan *internal control* oleh pekerja yang menjalankan aktivitas Bank di Unit Kerja sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Pengendalian risiko pada Produk Bank Baru (PBB) dalam bentuk *risk self assessment* oleh *Product Owner* dan penilaian kecukupan pengelolaan risiko oleh SKMRO.
 - d. Pengawasan pengelolaan risiko dan internalisasi Budaya Risiko oleh (*Branch Risk and Compliance*) dan URC (BRI *Unit Risk and Compliance*) melalui pelaksanaan kegiatan *Briefing*, *Verification* dan *Coaching* (BVC) secara harian.
 - *Briefing*
Kegiatan sosialisasi/ *sharing session* kepada seluruh atau kelompok Pekerja
 - *Verification*
Kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kontrol dengan tujuan mengetahui kelemahan kontrol sehingga dapat menentukan upaya perbaikan untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak risiko.
 - *Coaching*:
Kegiatan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada Pejabat MCS yang belum melaksanakan kontrol dengan baik, dengan tujuan mengajak pejabat MCS memperbaiki kelemahan dan melaksanakan kontrol sesuai ketentuan agar tidak terjadi kelemahan kontrol yang berulang.
 - e. Implementasi program-program *Business Continuity Management* (BCM) dan SMK3 antara lain sosialisasi dan uji coba BCM secara berkala minimal satu tahun sekali untuk memastikan kesiapan resiliensi Bank dalam menghadapi bencana/krisis.

BRI berkomitmen mengembangkan Teknologi dan Sistem Informasi dalam penerapan manajemen risiko operasional. BRI telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional yaitu:

- a. Aplikasi BRIOPRA
Pada aplikasi BRIOPRA mengakomodir beberapa perangkat MRO yaitu RCSA, LED, Forum Manajemen Risiko, dan Penilaian Maturitas
- b. *Key Risk Indicator* (KRI) *Dashboard*
Dashboard yang dikembangkan pada aplikasi BRISIM yang berisi KRI dan data *anomaly* yang berfungsi sebagai *tools continuous Monitoring* bagi *1st line* dan *2nd*.
- c. Profil Risiko Regional Office
Dashboard profil risiko untuk *regional Office* yang dikembangkan pada aplikasi BRISIM yang berfungsi sebagai *tools* pemantauan dan pelaporan profil risiko bagi *1st line* dan *2nd line*.

Risiko Hukum

Manajemen risiko hukum dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran adanya potensi risiko hukum pada setiap aktivitas operasional dan bisnis BRI sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin, membantu memecahkan permasalahan hukum, dan meminimalkan potensi kerugian akibat risiko hukum.

Unit kerja Hukum beserta jajarannya merupakan unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas bidang hukum/*legal watch* untuk menyediakan analisis dan advis hukum kepada seluruh pekerja pada setiap jenjang organisasi.

Dalam rangka meminimalisasi potensi kejadian risiko hukum, secara berkala dilakukan sosialisasi aspek-aspek hukum yang berlaku untuk meningkatkan *awareness* pekerja dan unit kerja operasional terhadap konsekuensi hukum yang terdapat dalam setiap aktivitas yang dijalankan.

Divisi Legal secara aktif mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di Unit Kerja Operasional. Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

1. Divisi Legal sebagai koordinator Risiko Hukum di BRI melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal BRI tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Divisi Legal memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerjasama (PKS)/*agreement* antara BRI dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum BRI sebelum perjanjian/*agreement* ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.
3. Setiap transaksi perbankan di BRI yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai



4. Divisi Legal bekerja sama dengan *Legal Officer* (LO) di *Regional Office* memantau risiko hukum di seluruh Unit Kerja BRI dengan mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum.
5. Divisi Legal menyusun pedoman-pedoman hukum misalnya pedoman penyusunan PKS dan buku saku hukum baik untuk bidang operasional maupun bidang perkreditan.
6. Pembinaan staf pada Unit Kerja Operasional (UKO) di *Regional Office* dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dalam mengendalikan risiko hukum di wilayah kerja yang bersangkutan diantaranya berupa sosialisasi, diskusi mengenai opini atas suatu kejadian dari sisi hukum yang berlaku.
7. *Legal Officer* (LO) di *Regional Office* memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya kepada UKO apabila terjadi kasus hukum di UKO dan berkoordinasi dengan Divisi Legal.
8. Divisi Legal memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus.
9. Apabila diperlukan, UKO dapat berkonsultasi dengan Divisi Legal mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat teknis.
10. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Bank dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi BRI, maka sebagai *contingency plan* harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi.
11. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, Divisi Legal berkoordinasi dengan Divisi *Operation Risk* terkait dengan pelaporan profil risiko hukum BRI setiap bulan kepada Direksi melalui *Dashboard* Profil risiko

Implementasi perangkat manajemen risiko seperti RCSA, MI dan KRI digunakan juga untuk menunjang pelaksanaan proses manajemen risiko hukum dalam mengidentifikasi, memantau dan Monitoring atas tuntutan/gugatan hukum terhadap BRI sehingga langkah-langkah pengendalian risiko hukum dapat dilakukan sedini mungkin. Saat ini telah dilakukan pengembangan sistem untuk dapat memudahkan dalam melakukan pemantauan dan Monitoring aspek legal BRI seperti: laporan MR hukum, data perkembangan perkara, dokumen legalitas perusahaan, dan lainnya.

Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Evaluasi risiko strategik BRI dilakukan Direksi secara berkala melalui forum yang membahas tentang strategi dan kebijakan risiko strategik, antara lain forum *Bisnis Performance Review*, ALCO, *Risk Management Committee*, dan Rapat Direksi yang digunakan untuk menyelaraskan strategi BRI. Perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk di dalamnya Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*), RBB, dan RKAP.

RBB dan RKAP direview kembali setiap tahun berdasarkan perubahan lingkungan usaha dan rencana perusahaan. Sementara itu, Rencana Jangka Panjang menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan setiap tahun dan dapat direview apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis dan sumber daya.

Dalam rangka memitigasi risiko strategik, BRI telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala melalui parameter yang tercermin pada profil risiko strategik. Pengukuran risiko strategik antara lain dilakukan dengan menganalisis eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi pinjaman, dana pihak ketiga, BOPO dan *fee-based income*. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut atas eksposur risiko strategik didokumentasikan dalam Rapat *Risk Management Committee*.

Risiko Kepatuhan

Perbankan merupakan suatu industri yang *highly regulated*, sehingga BRI senantiasa melakukan *Monitoring* atas kepatuhan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh Regulator maupun instansi berwenang lainnya. Sanksi regulator terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dimaksud bervariasi dari teguran, denda/penalti, hingga pencabutan lisensi. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan pada seluruh aktivitas BRI sesuai ketentuan yang berlaku.

BRI menerapkan metodologi *Risk Based Approach* yang terangkum dalam kebijakan dan SOP (*Standard Operational Procedure*) terkait APU dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Selain itu, adanya sistem AML (*Anti Money Laundering*) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari *Customer Due Diligence* (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC).

Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Fungsi pengendalian risiko reputasi dilakukan oleh Unit kerja *Corporate Secretary* sebagai *public relations* BRI. Langkah yang dilakukan BRI dalam manajemen risiko reputasi antara lain melalui komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholder*, serta

menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama BRI secara korporat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan atau *complain* dari *stakeholder* yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap BRI.

Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek sisi publik, BRI juga mengelola risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. BRI segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Mitigasi risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan risiko reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas materialitas permasalahan dan biaya.

Dalam rangka pengendalian risiko reputasi yang lebih besar di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan risiko reputasi yang telah dilakukan diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi. Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk *Corporate Secretary Division* untuk menangani setiap informasi negatif.

Risiko Intra-grup

Risiko Transaksi Intragrup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan Risiko Intra-grup di BRI adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Intra-grup dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif untuk eksposur yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Direksi BRI membentuk *Risk Management Committee* Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risiko Intra-grup, Kebijakan Risiko Intra-grup serta Pemantauan dan Pengendalian Risiko Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BRI untuk membahas *Risk Issue* Risiko Intra-grup dan rencana tindak lanjutnya.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intra-grup.

BRI telah mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan limit risiko Intra-grup meliputi:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Penetapan parameter & limit risiko intragroup konglomerasi keuangan.
3. *Risk Management Committee* Terintegrasi.

Risiko Asuransi

Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan Risiko Asuransi di BRI adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Asuransi secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI terhadap Anak Perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi.
2. Direksi BRI membentuk *Risk Management Committee* Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Asuransi dan kebijakan Risiko Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Asuransi.
5. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas *Risk Issue* Risiko Asuransi dan rencana tindak lanjutnya.

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan limit risiko asuransi meliputi:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Penetapan parameter & limit risiko asuransi konglomerasi keuangan.
3. *Risk Management Committee* Terintegrasi.

Pelaksanaan Edukasi Manajemen Risiko

Untuk menerapkan manajemen risiko yang berkualitas, dibutuhkan pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tugasnya. Untuk mendapatkan SDM yang andal dalam bidang manajemen risiko sekaligus memenuhi ketentuan regulator tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, maka BRI melaksanakan edukasi manajemen risiko antara lain:



1. Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*
Pendidikan Sertifikasi Manajemen Risiko diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja BRI dengan *corporate title* Senior Manager ke atas. Bagi yang telah mendapat Sertifikasi Manajemen Risiko, maka BRI tetap melaksanakan edukasi dengan program *refreshment* agar yang bersangkutan tetap mendapatkan informasi terkini mengenai manajemen risiko.
2. Metode *e-learning*
Edukasi manajemen risiko juga dilaksanakan melalui metode pembelajaran interaktif melalui *e-learning*. *E-learning* ditujukan untuk seluruh pekerja BRI sebagai media edukasi mandiri agar memahami filosofi dan penerapan manajemen risiko.
3. Sosialisasi
Sosialisasi rutin dilakukan oleh unit kerja manajemen risiko kepada seluruh jajaran pekerja BRI seluruh Indonesia. Sosialisasi terutama dilakukan mengenai perangkat manajemen risiko yang digunakan di BRI.
4. Pendidikan
Pendidikan bagi pekerja BRI melalui seminar dan *training* yang diselenggarakan pihak eksternal maupun internal.
5. Webinar Risk Upgrade Series
Webinar *Risk Upgrade Series* diselenggarakan secara rutin sekali seminggu (*weekly*) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses manajemen risiko pada aktivitas dan proses bisnis tertentu. Tema, pembicara dan peserta Webinar *Risk Upgrade Series* disesuaikan dengan kebutuhan dan *issue* yang sedang menjadi perhatian baik oleh *product owner*, Unit Kerja pembuat kebijakan, maupun SKMR.

Top Emerging Risk

Bank dihadapkan pada berbagai risiko yang diidentifikasi diperkirakan akan mempengaruhi bisnis ke depan. Berdasarkan hasil kajian, terdapat 5 (lima) kategori risiko yang akan dihadapi oleh BRI di jangka panjang atau dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu terkait Geopolitik, Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Teknologi yang dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. *Responsible AI (Artificial Intelligence)*, *Blockchain Governance*, *Cloud Concentration Risk* : risiko terkait Teknologi.
2. Ketidakpastian Makroekonomi dan Risiko Geopolitik Global : risiko terkait Geopolitik dan Ekonomi.
3. Perubahan Preferensi Nasabah : risiko terkait Sosial.
4. Risiko Lingkungan : risiko terkait Lingkungan.
5. Risiko Politik : risiko terkait Ekonomi.

Adapun penjelasan masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

1. *Responsible AI (Artificial Intelligence)*

Penggunaan AI yang diintegrasikan pada layanan perbankan, baik untuk *use case* internal maupun untuk berkomunikasi dengan nasabah. AI dapat digunakan untuk *use case* antara lain:

- a. *Chatbot* dan *virtual assistant* untuk pelayanan ke nasabah berbasis teks.
- b. *Robocall*, digunakan untuk komunikasi berbasis suara baik satu arah, maupun dua arah secara *realtime*.
- c. *Anti Money Laundering*, digunakan untuk pencegahan tindak pencucian uang berdasar *behavior* transaksi nasabah (*future plan*).
- d. Rekomendasi transaksi berdasar *behavior*, digunakan untuk menganalisa pola transaksi nasabah untuk kemudian dapat memberikan rekomendasi transaksi yang kerap dilakukan (*future plan*).

Penggunaan AI tanpa dilakukan pengelolaan dan *governance* yang sesuai maka akan memproses dan memberikan *output* yang tidak diharapkan sehingga berdampak secara finansial dan reputasi bagi bank. Untuk itu, BRI melakukan pengembangan dan penggunaan AI dengan pendekatan *responsible AI* agar dapat dipastikan proses sampai dengan *output* yang dihasilkan AI bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan risiko bagi bank maupun nasabah.

2. *Blockchain Governance*

Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan transmisi data secara aman dan terdesentralisasi. Data yang disimpan di *blockchain* tidak dapat diubah atau dihapus tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat dalam teknologi tersebut. Penggunaan teknologi *blockchain* di Indonesia antara lain inisiasi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) oleh Bank Indonesia, yaitu mata uang Rupiah dalam bentuk digital dan platform *Carbon Xchange* Rakyat. Jika tata kelola bank belum siap seperti *segregation of duty*, metode *role based access* dalam pengelolaan keamanan operasional *blockchain*, maka risiko siber yang mungkin bisa menyerang bank. Dalam mengantisipasi hal tersebut, BRI saat ini dalam tahap penyusunan *governance* secara internal sebagai persiapan implementasi CBDC dan regulasi *carbon credit* untuk integrasi dengan produk dan layanan perbankan termasuk sistem yang redundan sebagai verifikator dan otentifikasi pada *blockchain* untuk menghindari *single point of failure* agar transaksi yang berjalan pada *blockchain* tidak mengalami gangguan.

3. *Cloud Concentration Risk*

Penggunaan *cloud computing* melalui *cloud service provider* sebagai solusi yang lebih modern untuk memberikan kemudahan saat konfigurasi maupun deployment dibandingkan server on premise yang berbentuk fisik. Saat ini telah digunakan pada aplikasi antara lain Brismartbilling, Delima, Stroberi. Apabila sudah terdapat banyak aplikasi yang berjalan di suatu platform akan muncul ketergantungan terhadap suatu *cloud service provider* tertentu. Selain itu, apabila ditemukan celah keamanan yang belum dilakukan perbaikan pada *cloud provider* yang sedang digunakan, maka muncul risiko keamanan karena kesulitan migrasi ke *cloud provider* lain. Sehingga perlunya agreement saat awal kerjasama dengan *cloud provider* untuk kepastian kemudahan migrasi antar *cloud provider* sebagai sarana *Business Continuity Plan* bagi Bank.

4. Ketidakpastian Makroekonomi dan Risiko Geopolitik Global

Ketidakpastian makroekonomi dan risiko geopolitik merupakan penyebab terjadinya perubahan arah ekonomi global yang juga dapat mempengaruhi ekonomi domestik. Selama tahun 2023 beberapa *trigger event* berpengaruh terhadap makroekonomi yaitu kebijakan US dalam menurunkan inflasi yang menaikkan suku bunga acuan, krisis perbankan US dan Eropa, konflik Rusia vs Ukraina, konflik Israel vs Palestina dan pertumbuhan ekonomi negara maju yang stagnan di tahun 2023. BRI yang memiliki eksposur luas baik domestik maupun internasional dimungkinkan terkena dampak tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

Ketidakpastian makroekonomi global berpengaruh terhadap kondisi ekonomi domestik, seperti penurunan ekspor, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kenaikan inflasi, *capital outflows*, penurunan harga Surat Berharga Negara, depresiasi Rupiah, penurunan IHSG serta berdampak kepada perubahan kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia seperti menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR).

Sebagai mitigasi untuk mengurangi sensitivitas dan meminimalisir risiko terhadap volatilitas makroekonomi global, BRI melakukan langkah-langkah strategis dengan mengurangi sensitivitas terhadap instrumen keuangan yang terekspos risiko suku bunga dan nilai tukar, seperti pengelolaan *interest rate risk in the banking book*, *maturity gap*, pengelolaan konsentrasi deposit dan debitur, pengelolaan posisi devisa neto, dan pengelolaan *asset trading* dan investasi yang sesuai dengan kondisi pasar. Dari sisi *governance*, BRI secara regular melakukan *assessment* portofolio melalui *stress testing (solvency, credit, market & liquidity)*, *Monitoring risk appetite statement*, *contingency funding plan* serta pengkinian *recovery plan*.

5. Perubahan Preferensi Nasabah

Konflik antara Israel dan Palestina menyebabkan gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) meningkat. Preferensi dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia berubah yang mempengaruhi daya beli terhadap produk-produk yang masuk ke dalam list BDS. Masyarakat mulai mencari alternatif produk dan bergeser konsumsinya ke produk lokal. Hal ini dapat mempengaruhi portofolio BRI pada nasabah yang terafiliasi pada list BDS. Sebagai mitigasi, BRI melakukan *Monitoring* terhadap debitur yang terafiliasi pada list BDS.

6. Risiko Perubahan Iklim

Perubahan iklim sebagai ancaman bagi seluruh penduduk di Indonesia. Peningkatan intensitas dan frekuensi peristiwa cuaca buruk, misalnya El Nino, banjir dan kebakaran hutan memiliki potensi kerusakan properti dan gangguan operasional. Perubahan iklim yang ekstrim tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami debitur BRI di daerah bencana tersebut secara material maupun immaterial sehingga mempengaruhi kualitas kredit yang diberikan. Sebagai langkahantisipasi, BRI telah melakukan kajian dan evaluasi secara berkala terhadap daerah-daerah yang rawan bencana dengan pertimbangan data eksternal dan informasi dari unit kerja di daerah tersebut. Atas kajian tersebut, BRI menambahkan pencadangan atas kredit debitur yang berada di daerah rawan bencana untuk menutup potensi kerugian yang tidak diharapkan yang timbul akibat perubahan iklim.

7. Risiko Politik

Tahun 2024 adalah tahun pemilihan umum sehingga perubahan pemerintahan berpotensi meningkatkan ketidakpastian keberlangsungan ketentuan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun regulator sektor keuangan. Hal tersebut akan meningkatkan ketidakpastian di kalangan pelaku bisnis dan investor. Ketidakpastian ini dapat menghambat pengambilan keputusan investasi dan pengeluaran konsumen karena menunggu untuk melihat bagaimana kebijakan akan berkembang dimana pelaku bisnis dan investor memerlukan kepastian ketentuan dan peraturan dalam bisnis yang dijalankan. Sikap *wait and see* tersebut selalu ada saat memasuki tahun politik seperti tahun 2024 sehingga berpengaruh pada pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga bagi BRI. Selain itu, BRI juga mengoptimalkan pengelolaan likuiditas sebagai mitigasi terhadap volatilitas pasar yang terjadi selama masa transisi pemerintahan dan selektif dalam penyaluran kredit terutama bagi *high politically exposed person/entity*.



Penilaian Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three line of model*, yaitu seluruh risk taking unit selaku *first line*, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit internal audit selaku *third line*. Hasil penilaian profil risiko pada triwulan IV 2023, peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat *Low to Moderate*. Selain penilaian risiko secara individu, BRI sebagai Konglomerasi Keuangan juga melakukan penilaian risiko secara terintegrasi. Hasil penilaian profil risiko terintegrasi pada semester II 2023, peringkat profil risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI berada pada tingkat *Low to Moderate*. Hasil *Self Assessment* tersebut menunjukkan bahwa BRI mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

Self Assessment

Profil Risiko Individu dan Konsolidasi

Profil Risiko BRI Triwulan IV – 2023 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2023. Secara komposit, Profil Risiko BRI Triwulan IV – 2023 mendapatkan peringkat *Low to Moderate*. Dari 8 (delapan) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *Low to Moderate* meliputi: Risiko Kredit, Pasar Strategis dan Kepatuhan. Adapun yang mendapatkan peringkat *Low* yaitu Risiko Hukum, dan Reputasi dan yang mendapat peringkat *Moderate* yaitu Risiko Likuiditas dan Operasional.

No	Jenis Risiko	Triwulan IV 2023		
		Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
1	Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
2	Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
3	Likuiditas	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
4	Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
5	Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
6	Stratejisk	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
7	Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
8	Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Predikat Komposit		<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i> (Peringkat 2)	<i>Low to Moderate</i> (Peringkat 2)

Profil Risiko Terintegrasi

Profil Risiko Terintegrasi BRI Semester II-2023 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2023. Secara komposit, Profil Risiko Terintegrasi BRI posisi Semester II Tahun 2023 mendapatkan peringkat *Low to Moderate*. Dari 10 (sepuluh) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *Low to Moderate* meliputi: Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Strategik, Kepatuhan, Transaksi Intra-grup, dan Asuransi. Adapun yang mendapatkan peringkat risiko *Moderate* yaitu Risiko Operasional sedangkan peringkat *Low* yaitu Risiko Hukum dan Reputasi.

No	Jenis Risiko	Semester II 2023		
		Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
1	Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
2	Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
3	Likuiditas	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
4	Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
5	Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
6	Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
7	Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
8	Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
9	Transaksi Intra-grup	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>
10	Asuransi	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Predikat Komposit		<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate (Peringkat 2)</i>



Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko



Sejak terbentuk Direktorat Manajemen Risiko pada tahun 2017, secara berkala dilakukan pengujian efektivitas sistem manajemen risiko melalui kaji ulang manajemen risiko yang dilakukan oleh satuan terpisah dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun pihak eksternal untuk menjaga objektivitas dan *independency* penilaian efektivitas sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi penilaian tingkat maturitas Manajemen Risiko BRI pada tahun 2023 dengan skala 1-5 berada pada skor 4,03 yaitu kriteria telah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait aktivitas manajemen risiko telah menjadi bagian dalam proses, budaya, struktur manajemen risiko.

Strategi Manajemen Risiko Tahun 2024

Strategi pengelolaan risiko akan berfokus pada 5 (lima) aspek yaitu peningkatan kualitas kredit, kesadaran data, keunggulan operasional, budaya sadar risiko serta implementasi regulasi baru di area *market risk*. Peningkatan pada 5 (lima) aspek tersebut diupayakan melalui langkah-langkah strategis berikut:

1. Pengelolaan risiko kredit melalui penggunaan *credit risk rating* dan *credit risk scoring*, *Monitoring portfolio risk analysis*, *stress test* dan *review* model *loan portfolio guideline*, analisis dan *review* kondisi keuangan debitur, *Monitoring* nasabah yang telah direstrukturisasi, *selective unflagging strategy*, pencadangan biaya CKPN, serta pengembangan *tools* pengelolaan kredit bermasalah.
2. Proyek pemetaan dan asesmen pengendalian internal atas laporan keuangan (*Internal Control over Financial Reporting*) terus dilanjutkan untuk *scope* di luar bisnis Mikro dan Kecil, untuk mendukung integritas dan kehandalan proses pelaporan keuangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada proses bisnis yang mempengaruhi laporan keuangan.
3. Implementasi perhitungan beban risiko pasar dengan metode *Standardized Approach* untuk pengukuran yang lebih sensitif terhadap risiko, memperkuat permodalan bank serta memenuhi perubahan regulasi OJK dan Basel III.
4. Program peningkatan budaya sadar risiko, yang ditujukan untuk meningkatkan *risk based mindset*, perilaku sadar risiko yang konsisten, kolaborasi dengan akuntabilitas yang jelas, praktik tata Kelola yang baik, dan strategi komunikasi yang efektif.
5. Program pengembangan *talent* (pelatihan, sertifikasi, *e-learning*, pengembangan modul dan lainnya), serta melalui pemanfaatan teknologi.
6. Program peningkatan kesadaran akan kualitas data, antara lain pentingnya data yang baik dan berkualitas sebagai dasar analisa untuk mengeliminasi bias dan mempercepat proses dalam pengambilan Keputusan (model dan kebijakan).
7. Pemanfaatan kecerdasan buatan serta penguatan kapabilitas risiko digital melalui *review* dan implementasi tata kelola IT maupun *IT Security* secara *end-to-end*.
8. Perbaiki tata Kelola asesmen risiko untuk produk dan aktivitas baru untuk membangun layanan operasional yang unggul.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai manajemen risiko perusahaan telah memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut.

Fungsi Kepatuhan

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT

Direktorat Kepatuhan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk menerapkan Fungsi Kepatuhan di Perseroan sesuai dengan peraturan OJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang paling sedikit meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan;
3. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan BRI terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator.

Sejalan dengan itu, Direktorat Kepatuhan bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan regulator yang berlaku, pemberian *advis* hukum dan penanganan perkara hukum, pengelolaan dan harmonisasi Kebijakan & Prosedur Perusahaan, serta implementasi aspek *Environmental, Social & Governance* dalam aktivitas operasional dan bisnis perusahaan.

Key Performance Indicator Direktorat Kepatuhan

Dalam rangka mendukung aspirasi BRI tahun 2023, Direktorat Kepatuhan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Penilaian *Self Assessment Good Corporate Governance* peringkat komposit 2 (baik).
2. Pencapaian skor Profil Risiko Hukum pada peringkat Low.
3. Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2022 dengan kategori “*Most Trusted Company*” dengan skor 95,21.
4. Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi peringkat komposit 2 (baik).
5. Penilaian dari Lembaga Pemeringkat ESG, yaitu MSCI dengan predikat “A” dan dari Lembaga pemeringkat S&P Global CSA (*Corporate Sustainability Assessment*) dengan ESG score 63 dan rank *percentile* 92nd.
6. Bergabung ke dalam *United Nations Global Compact* (UNGC) sejak tanggal 12 Maret 2023, sebagai bentuk komitmen BRI untuk menjalankan aktivitas bisnis dan operasional yang berkelanjutan.



7. Pencapaian skor Profil Risiko Kepatuhan pada peringkat *low to moderate*.
8. Perkara hukum yang telah *In Kracht Menang* mencapai 98.92%.
9. Jumlah temuan audit yang disebabkan ketidakpahaman Kebijakan dan Prosedur menurun 10% dari tahun sebelumnya.

Program Kerja Direktorat Kepatuhan

Selain itu, untuk mendukung pencapaian KPI di atas, Direktorat Kepatuhan memiliki beberapa Program kerja yaitu sebagai berikut:

1. Standardisasi Proses Aspek Kepatuhan
BRI melakukan standarisasi proses terkait pengelolaan aspek kepatuhan dan tata kelola melalui sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Standar Manajemen Mutu dan ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan di *Compliance Division*, serta sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Pusat BRI.
2. Peningkatan *Awareness*
Direktorat Kepatuhan meningkatkan *awareness* Pekerja terhadap implementasi budaya kepatuhan, program APU PPT, pengetahuan hukum, serta kebijakan dan prosedur, antara lain melalui:
 - 1) Harmonisasi, penyusunan dan atau *review* terhadap ketentuan internal termasuk ketentuan terkait dengan bidang kepatuhan, tata kelola, ESG serta hukum.
 - 2) Update pengetahuan pekerja BRI dengan narasumber *eksternal* yang *expert* di bidangnya, melalui *Workshop*, Diskusi Taman, dan lain sebagainya.
 - 3) Diseminasi materi komunikasi dalam rangka peningkatan pemahaman pekerja baik melalui media digital maupun fisik.
3. Pengkinian dan penyempurnaan atas Struktur Tata Kelola BRI yang mencakup Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perusahaan.
4. Pelaksanaan pengukuran atas tingkat kematangan/maturitas Tata Kelola dan Kepatuhan secara individu serta secara terintegrasi.
5. Sinergi Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur BRI Group yang merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan dan kecukupan Kebijakan dan Prosedur di BRI Group.
6. Penguatan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*) serta teknologi informasi, menyebabkan peningkatan risiko TPPU, TPPT dan PPSM yang dihadapi oleh Perseroan. Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, Perseroan melakukan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM secara memadai.

Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penyempurnaan Penilaian Risiko TPPU & TPPT dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach* (RBA)
- 2) Penyempurnaan Kebijakan Penerapan Program APU PPT untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Lembaga Jasa Keuangan.
- 3) Optimalisasi penerapan program APU PPT di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang melalui peningkatan peran *Regional Risk Management & Compliance* dan *Branch Risk & Compliance*.
7. *Review* terhadap Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur untuk memperkuat implementasi tata kelola yang meliputi:
 - 1) Hierarki Kebijakan dan Prosedur;
 - 2) *Framework* pembentukan dan pengelolaan Kebijakan dan Prosedur;
 - 3) Kewenangan dalam pengelolaan Kebijakan dan Prosedur; dan
 - 4) *Guidance* sinergi tata kelola Kebijakan dan Prosedur BRI Group.
8. Harmonisasi Kebijakan dan Prosedur melalui unifikasi, kodifikasi, simplifikasi, maupun bentuk lainnya dalam rangka mengatasi *overlapping* dan/atau benturan kepentingan/kewenangan dalam Kebijakan dan Prosedur.
9. *Policy & Procedure Excellence* untuk memastikan Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki Perusahaan memadai sehingga meminimalkan potensi risiko dikemudian hari serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis .
10. *Enhancement platform* pengelolaan Kebijakan dan Prosedur (BRIPEDIA) secara kontinyu untuk mendorong literasi dan aksesibilitas pekerja terhadap Kebijakan dan Prosedur.
11. Pemberian Layanan Hukum
Dalam rangka melakukan pemberian layanan hukum, Direktorat kepatuhan melalui *Legal Division* melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengkajian terhadap perundang-undangan dan/atau kondisi Internal/eksternal yang mempunyai implikasi hukum terhadap BRI termasuk penyempurnaan strategi penanganan permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa lainnya.
 - 2) Penanganan permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan dan lainnya (litigasi).
 - 3) Pemberian advis hukum berupa konsultasi hukum, opini hukum, dan informasi hukum serta layanan hukum kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja serta seluruh Unit Kerja BRI.
 - 4) Pendampingan dalam pelaksanaan *Corporate Project* BRI.
 - 5) Pembinaan/penyuluhan/pengajaran Hukum kepada Unit Kerja BRI.
12. Mengimplementasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam aktivitas operasional dan bisnis BRI antara lain meliputi:
- 1) Mengimplementasikan *environmental initiatives* melalui:
 - i. Mengintegrasikan *climate-related risk* ke dalam *risk management* BRI melalui *pilot project Climate Risk Stress Testing* (CRST).
 - ii. Melakukan pengelolaan emisi (*emissions management*) dalam aktivitas operasional melalui inisiatif *green network*, meliputi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, penyediaan SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) di lingkungan Kantor Pusat BRI, dan melakukan instalasi solar *panel* di unit kerja BRI.
 - iii. Menjalankan strategi dekarbonisasi melalui *green banking*
 - iv. Berkomitmen kepada *Science Based Target Initiatives* (SBTi) untuk menetapkan target *Net Zero Emission* di tahun 2050.
 - 2) Menjalankan *social initiatives* melalui:
 - i. Menunjukkan komitmen untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan
 - ii. Menerbitkan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - iii. Menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
 - 3) Bergabung ke dalam *United Nations Global Compact* (UNGC), menunjukkan komitmen BRI terhadap Keberlanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
 - 4) Ketiga bentuk implementasi inisiatif ESG di atas, didukung oleh pilar *culture & communication*, melalui bentuk internalisasi *Sustainability Culture Program* (SCP), penerbitan Laporan Keberlanjutan, Laporan *Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD), Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2024-2028, serta *review* kebijakan secara berkala.
13. *Business process Reengineering*
- Melakukan penyederhanaan proses bisnis untuk mendukung efisiensi dan perkembangan bisnis melalui pengembangan sistem antara lain:
- 1) *Integrated AML CFT Screening* (*Watchlist Screening* pada *Platform* Pembukaan Rekening & Transaksi).
 - 2) *AI for Monitoring Transaction System through Graph Technology*.
 - 3) *RBA Bankwide*.
 - 4) *RBA Customer*.
 - 5) *AML CFT Sistem* (Menu STR, CTR, IFTI *Reporting*).
 - 6) *Sipemat Reporting Tools*.
 - 7) Melakukan digitalisasi proses bisnis serta *digitalisasi database legal Division* untuk mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan kinerja *Legal Division*, melalui pengembangan Aplikasi DELEGASI (Data dan Informasi Legal Terintegrasi).
 - 8) *BRIPEDIA Mobile* agar pekerja dapat mengakses Kebijakan dan Prosedur kapanpun dan dimanapun untuk mendukung peningkatan literasi pekerja.



BRI berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan baik di tingkat korporasi maupun Unit Kerja Operasional. Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum. BRI memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang terdiri dari dari Direktur Kepatuhan, Compliance Division Kantor Pusat serta fungsi kepatuhan di *Regional Office* BRI yang berada di bawah *Regional Risk Management & Compliance Team*, fungsi kepatuhan di BRI unit yang dilaksanakan oleh BRI

Unit Risk Management & Compliance, serta fungsi kepatuhan Kantor Cabang Luar Negeri yang berada di bawah garis koordinasi *Compliance Division* Kantor Pusat. Jajaran kepatuhan bersifat Independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. BRI telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Regulator dan *best practice* terkini.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 13 Maret 2023, A. Solichin Lutfiyanto di angkat sebagai Direktur Kepatuhan dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BRI dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE.56-DIR/KEP/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan, diantaranya:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI.

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk sistem ketentuan dan pedoman internal BRI.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan BRI.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi BRI atau BRI sebagai entitas tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan/ atau otoritas pengawas yang berwenang beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris minimal secara triwulan.
8. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Independensi Direktur Kepatuhan

Independensi Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi dengan mengacu Peraturan OJK 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Tidak rangkap jabatan dan hubungan afiliasi.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali
3. Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi:
 - a. Bisnis dan operasional.
 - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan bagi kegiatan usaha Bank.
 - c. *Treasury*.
 - d. Keuangan dan Akuntansi.
 - e. Logistik dan pengadaan barang dan jasa.
 - f. Teknologi dan informasi.
 - g. Audit intern.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari unit kerja lain, bebas dari benturan kepentingan, bertindak profesional dan objektif.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan



Kris Hananto

Compliance Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Surakarta pada tahun 1972. Usia 51 Tahun per Desember 2023. Berdomisili di Cibubur, Bogor.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum Universitas Diponegoro (1995)
- Master of Laws (LLM) Melbourne University – Australia (2004)



PENGALAMANKERJA

- Kepala Bagian Dokumentasi & Administrasi Kredit, Divisi Administrasi Kredit BRI (2013 - 2017)
- *Group Head Legal Advice, Legal Division* BRI (2017 – 2018)
- *Vice President Legal Assessment & Advice, Legal Division* BRI (2019 – 2021)
- *Division Head, Compliance Division* BRI (2021 – sekarang)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. R.268-DIR/HCB/05/2021 tanggal 7 Mei 2021.



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 & Level 2
- Sertifikasi Kepatuhan Level 1
- *Banking Compliance Level Manager*
- *Governance Risk Management Compliance Professional* (GRCP)
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)



PELATIHAN SELAMA 2023

- *Oxford Bank Governance Programme – Oxford Said Business School, UK*
- *The Role of Governance Risk & Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance – Otoritas Jasa Keuangan*



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan BRI diantaranya:

1. Menyusun, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi dan kebijakan/ketentuan di bidang kepatuhan antara lain Uji Kepatuhan, Analisa Dampak, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
2. Menyusun, mengimplementasikan, beserta mengevaluasi program GCG, Budaya Kepatuhan, Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP), Program Pengendalian Gratifikasi, dan APU PPT.
3. Menganalisa transaksi keuangan mencurigakan, memantau dan mengevaluasi penerapan Program APU PPT secara *bank wide*.
4. Melakukan kegiatan Uji Kepatuhan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, kebijakan eksternal dan internal yang berlaku terhadap rencana kebijakan dan/atau keputusan Direksi dan/atau SEVP beserta memantau tindak lanjutnya.
5. Melakukan pemenuhan komitmen BRI terhadap regulator dan/atau otoritas pengawas yang berwenang.
6. Melakukan analisa dampak terhadap kebijakan regulator dan/atau otoritas pengawas lainnya yang memiliki dampak terhadap operasional dan bisnis BRI. Hasil Analisa dampak tersebut menjadi dasar BRI untuk melakukan pengkinian kebijakan internal BRI yang terkena dampak.
7. Melakukan pelaporan yang bersifat berkala dan/atau insidental kepada regulator dan/atau otoritas pengawas yang berwenang yang terkait bidang kepatuhan.

8. Melaksanakan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BRI.
9. Melakukan *Monitoring* dan evaluasi terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan yang dilakukan oleh *Regional Office*, Unit Kerja Luar Negeri (UKLN), dan Perusahaan Anak serta bisnis Jasa Kustodian BRI.

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Satuan Kerja Kepatuhan, Perusahaan memfasilitasi dan mendorong pekerja Satuan Kerja Kepatuhan untuk mengikuti Sertifikasi Kepatuhan beserta sertifikasi profesi lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan terdiri dari 60 (enam puluh) Pekerja yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Pekerja Organik dan 23 (dua puluh tiga) Pekerja Anorganik. Terhadap Pekerja *organic* Satuan Kerja Kepatuhan memfasilitasi dan mendorong pekerja untuk mengikuti Sertifikasi Kepatuhan beserta sertifikasi profesi lainnya. Adapun data pendukung pengembangan kompetensi satuan kerja kepatuhan adalah sebagai berikut

Jenis Sertifikasi	Jumlah Orang
Sertifikasi Kepatuhan	33
Sertifikasi Manajemen Risiko	17
Sertifikasi Profesi Lainnya	53

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan

1. Program Penguatan Budaya Kepatuhan.

Dalam rangka mewujudkan penguatan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BRI senantiasa melaksanakan upaya berkelanjutan sekaligus *improvement* dalam mewujudkan penguatan budaya kepatuhan yang dituangkan ke dalam Program Penguatan Budaya Kepatuhan BRI. Program Penguatan Budaya Kepatuhan BRI disusun berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas Kepatuhan BRI (*Bankwide*) dan Hasil Penilaian Budaya Kepatuhan Regional BRI (*Regional Office, Branch Office, dan BRI Unit*). Beberapa program penguatan budaya kepatuhan yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Pengkinian Kebijakan Budaya Kepatuhan sesuai dengan Buku 3 tentang Budaya Kepatuhan pada Surat Edaran Direksi BRI Nomor : SE.04-DIR/CTR/01/2023 Tanggal 31 Januari 2023.
- b. Penyusunan serta pengkinian *database* kewajiban laporan kepada regulator secara berkelanjutan untuk mendukung Aplikasi *Compliance Reminder* yang digunakan untuk memberikan notifikasi atau *reminder* kepada Divisi terkait mengenai laporan yang harus dilaporkan kepada regulator melalui sarana *digital office* (aplikasi surat menyurat digital).
- c. Pengembangan Aplikasi *Compliance Reminder* (BRI *Compliance Reminder*) melalui sarana Aplikasi WhatsApp kepada Pekerja/PIC laporan di masing-masing Divisi.
- d. Pelaksanaan sosialisasi, *workshop* serta webinar dalam rangka mendukung penguatan budaya kepatuhan kepada pekerja di seluruh Unit Kerja BRI.
- e. Peningkatan *awareness* pekerja melalui diseminasi materi komunikasi budaya kepatuhan berupa Landing Page BRISTARS, poster dan/atau banner di seluruh Unit Kerja BRI, penyusunan *Compliance Awareness of Regulatory Sanction* (CARS), *Self Learning* Budaya Kepatuhan.

2. Peningkatan Kualitas Kepatuhan Melalui Implementasi *Compliance Reminder*



Denda atas keterlambatan pelaporan kepada regulator memiliki dampak secara finansial dan reputasi bagi BRI. Untuk itu diperlukan upaya dalam menghindari keterlambatan dengan membangun sistem pengingat yang efektif. Oleh sebab itu *Compliance Division* melakukan peningkatan kapabilitas pada sistem *Compliance Reminder* yang mencakup 3 aspek yaitu:

- a. **Pengelolaan** : Peningkatan pada *user interface* yang mudah digunakan dalam *input* data dan pengaturan parameter pengingat seperti periode dan jam sehingga memudahkan pekerja *Compliance Division* dalam mengelola data kewajiban pelaporan kepada regulator. Selain itu fitur lainnya yang ditambahkan adalah kapabilitas sistem dalam menyortir, menyaring, serta mengelompokkan data.
- b. **Pemantauan** : Terdapat *dashboard Monitoring* yang meningkatkan kemudahan dalam melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban pelaporan kepada regulator. *Monitoring progress* dapat dilakukan secara *realtime* terhadap suatu kewajiban berdasarkan *feedback* dari PIC. Untuk meningkatkan transparansi, *dashboard Monitoring* juga dapat diakses oleh PIC sehingga PIC dapat mengetahui apa saja kewajibannya dan status *progress*-nya.
- c. **Pengingat** : Meningkatkan efektivitas fungsi pengingat kepada PIC pelaporan, sistem secara otomatis mengingatkan PIC berdasarkan *time line* (periode, jam dan pengulangan) yang ditetapkan sehingga PIC tidak akan lupa dan memiliki cukup waktu untuk melakukan pemenuhan. Sistem dapat menjangkau lebih personal kepada PIC karena telah terintegrasi dengan WA *Bussiness* sehingga sistem dapat mengirimkan pesan pengingat melalui WhatsApp ke nomor PIC. Selain itu sistem juga memiliki kapabilitas untuk membaca balasan pesan WhatsApp yang dikirim oleh PIC sehingga memudahkan PIC dalam memberikan *feedback* berupa *Update progress* dan konfirmasi pemenuhan pelaporan melalui aplikasi WhatsApp.

3. Kepatuhan atas peraturan perundang-undangan

a. Analisa Dampak Kebijakan Eksternal

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan untuk mengetahui dampak atas Peraturan Perundang-undangan terbaru terhadap operasional BRI. *Compliance Division* telah melakukan Analisa Dampak terhadap 28 Peraturan Perundang-Undangan sepanjang tahun 2023.

b. Pelaksanaan Pengujian Prinsip Kehati-hatian

Dalam rangka mencegah penyimpangan dari ketentuan kehati-hatian baik di bidang perkreditan maupun bidang non perkreditan, Direktur Kepatuhan BRI telah melakukan Proses Pengujian Prinsip Kehati-hatian terhadap Rencana Kebijakan, Keputusan dan Perjanjian dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi. Selama tahun 2023 *Compliance Division* telah melakukan pengujian prinsip kehati-hatian sebanyak 284 dokumen pengujian, dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Kredit Wewenang Direksi	159
Perjanjian Kerjasama	36
Rencana Kebijakan	86
Corporate Action	1
Putusan Pengelolaan	2

c. Tanggapan Aspek Kepatuhan

Divisi Kepatuhan menyampaikan tanggapan/opini aspek kepatuhan kepada unit kerja terkait yang mengajukan permohonan kepada Divisi Kepatuhan. Tanggapan aspek kepatuhan dapat diberikan dalam hal terdapat rencana kebijakan/putusan Direksi, rencana perubahan mekanisme operasional, rencana penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru serta hal lain yang membutuhkan pendapat dari satuan kerja kepatuhan. Selama 2023 *Compliance Division* telah menyampaikan tanggapan/opini aspek kepatuhan sebanyak 362 dengan rincian sebagai berikut:



- Tanggapan aspek kepatuhan terhadap rencana kebijakan, rencana pengambilan keputusan dan aktivitas/kegiatan lainnya yang dimintakan oleh Unit kerja BRI berjumlah 115 tanggapan.
- Tanggapan aspek kepatuhan terhadap pengembangan produk BRI berjumlah 102 tanggapan
- Tanggapan aspek kepatuhan terhadap rencana kerja sama BRI dan lainnya berjumlah 124 tanggapan.
- Tanggapan aspek kepatuhan terhadap *Corporate Action* berjumlah 21 tanggapan.

d. Pelaporan Produk dan/atau Aktivitas baru (PAB)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, Bank wajib melakukan pelaporan atas produk atau aktivitas baru yang akan dipasarkan kepada konsumen. Pelaporan rencana penerbitan PAB kepada regulator (dhi. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dalam rangka mendapatkan persetujuan regulator yang di koordinasikan melalui Divisi Kepatuhan. Sepanjang tahun 2023 BRI telah mendapatkan 16 persetujuan atas pengembangan produk bank baru dan telah melaporkan realisasi produk atas 20 produk bank baru kepada Regulator.

4. Peningkatan Awareness Kepatuhan

a. Compliance and Regulatory Awareness

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan yang baik berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan perubahannya serta mendukung *corporate strategy* BRI yaitu “*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*”, *Compliance Division* memiliki strategi yang mengusung tema *Compliance Culture and GCG Through Digital Transformation*. Tujuan dari tema strategi itu antara lain adalah memperkuat kesadaran insan BRILian terhadap ketentuan eksternal yg memiliki dampak penting bagi BRI sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BRI telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, *Compliance Division* menerbitkan “*Compliance & Regulatory Awareness (CARE)*” *Newsletter* setiap triwulan.



b. Compliance Awareness of Regulatory Sanction

Dalam rangka meningkatkan *awareness* pekerja untuk mencegah adanya potensi peneraan sanksi administratif dari regulator, serta sebagai bagian dari upaya penguatan Budaya Kepatuhan BRI maka Divisi *Compliance* menginisiasi materi komunikasi dengan judul *Compliance Awareness of Regulatory Sanction*.

c. ComPlayGames

ComPlayGames merupakan salah satu program penguatan budaya kepatuhan untuk meningkatkan *awareness* seluruh Insan BRILiaN agar senantiasa patuh pada peraturan. *ComPlayGames* terdiri dari beberapa pertanyaan terkait dengan fungsi kepatuhan yang dikemas ke dalam sebuah permainan yang menarik. *ComPlayGames* dapat diikuti oleh seluruh Insan BRILiaN menggunakan *handphone* nya masing-masing dengan terlebih dahulu melakukan *scan barcode* yang terpasang dalam poster “Patuh itu Prinsip” yang terpasang di seluruh Unit Kerja BRI.



d. Aspirasi Asistensi Diskusi Bersama Compliance

Aspirasi Asistensi Diskusi bersama *Compliance* merupakan program yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) untuk fungsi kepatuhan di unit kerja melalui *Risk Management and Compliance* (RMC), *Branch Risk and Compliance* (BRC) dan *Unit Risk and Compliance* (URC).

5. Digitalisasi Proses Kepatuhan

Untuk mendukung program *go-green* BRI, Satuan Kerja Kepatuhan mengkonversi beberapa proses kegiatan menjadi digitalisasi dengan tujuan meminimalkan penggunaan kertas, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Board of Commissioners Dashboard

Sebagai bentuk pengawasan aktif dewan komisaris dalam mengawasi aktivitas bank, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Anggota Direksi dan Manajemen Bank untuk selalu melakukan perbaikan yang efektif dan efisien. Dengan adanya *dashboard* ini, Divisi Kepatuhan dapat memantau setiap rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi atau Unit Kerja terkait secara optimal.

b. Digitalisasi Uji Kepatuhan Kebijakan Internal

Sebagaimana yang dimandatkan dalam POJK No. 46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, untuk mengawal kebijakan yang dikeluarkan Direksi agar tidak bertentangan dengan ketentuan regulator, maka Satuan Kerja Kepatuhan menginisiasi aplikasi untuk mempermudah proses uji kepatuhan analisis internal.

c. Digitalisasi Proses Resume dan Analisa Dampak Kebijakan Eksternal

Untuk mendukung program *go-green* Bank BRI, satuan kerja kepatuhan mengkonversi proses kegiatan resume dan analisis dampak menjadi digitalisasi dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan kertas dalam kegiatan *resume* dan analisis dampak kebijakan *external*.

6. Penerapan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan

Sebagai komitmen BRI dalam memenuhi (*comply*) terhadap peraturan perundangan dan regulasi, pada tahun 2022 Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti sertifikat ISO 37301:2021 dan telah lulus sertifikasi.



7. Penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

Untuk meningkatkan kualitas proses di Satuan Kerja Kepatuhan pada 2022 Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan *Surveillance* Audit ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015

8. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi

BRI melakukan penyempurnaan *framework* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi keuangan BRI yang mencakup Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Audit Intern Terintegrasi dan *Performance Management*.

9. Penguatan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kompleksitas produk, layanan jasa keuangan dan pola pemasaran (*multichannel marketing*) serta teknologi perbankan, Bank BRI senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan program APU PPT baik di internal maupun *group wide*. Beberapa inisiatif perbaikan sistem AML CFT BRI yang telah dilakukan antara lain:

a. Integrated AML CFT Screening (Watchlist Screening pada Platform Pebukaaan Rekening & Transaksi)

Integrated AML CFT Screening merupakan *service/API* yang berfungsi untuk melakukan proses *screening* berdasarkan *Watchlist Database* kepada nasabah, calon nasabah dan WIC dalam memitigasi risiko BRI dimanfaatkan

sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.

b. AI for Monitoring Transaction System through Graph Technology

Sistem pemantauan transaksi nasabah dan *Walk in Customer* memanfaatkan *Artificial Intelligence* memanfaatkan teknologi *Graph Database*

c. RBA Bankwide

Sistem penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPSPM di Bank BRI menggunakan data *modeling* berdasarkan *historical & present data*

d. RBA Customer

Sistem penilaian Risiko Nasabah atas terjadinya TPPU, TPPT dan PPSPM pada saat *open account* dan *on-going Monitoring*

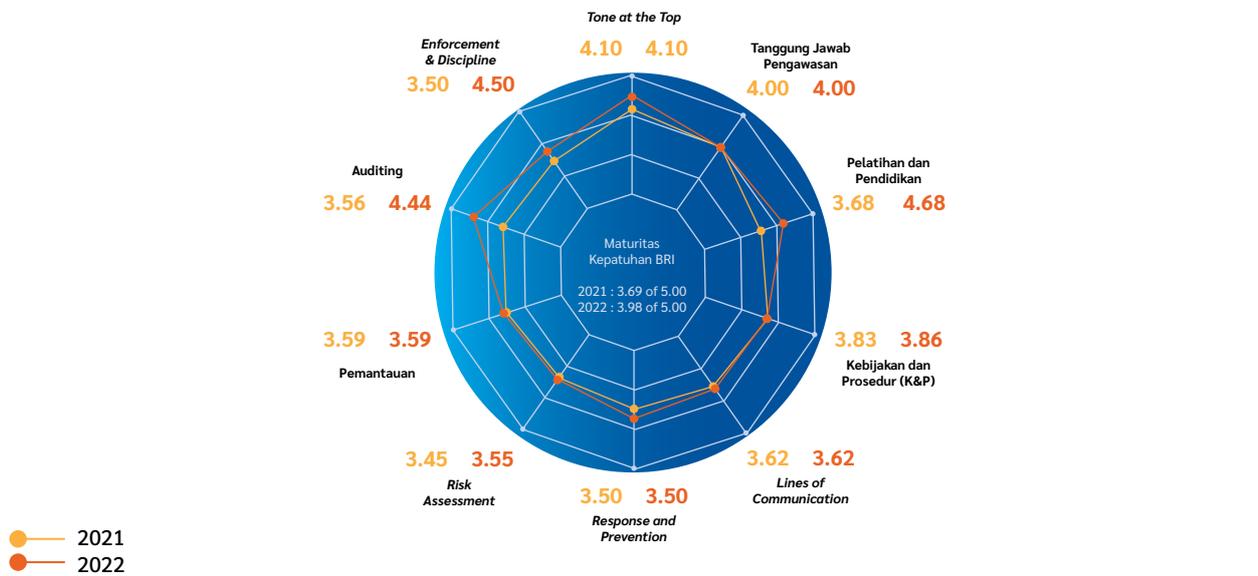
e. AML CFT Sistem (Menu STR, CTR, IFTI Reporting)

Sistem pemantauan anomali transaksi nasabah dan *reporting tools* atas laporan mandatori APU PPT (LTKL dan LTKT)

10. Penilaian Maturitas Kepatuhan BRI (Bankwide) dan Penilaian Budaya Kepatuhan Regional.

Dalam rangka mengukur tingkat kematangan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha, BRI telah melakukan penilaian Maturitas Kepatuhan BRI (*Bankwide*) dan Penilaian Budaya Kepatuhan Regional, dengan hasil sebagai berikut:

Penilaian Maturitas Kepatuhan BRI



Peringkat Maturitas Tata Kelola	Peringkat 1	Peringkat 2	Peringkat 3	Peringkat 4	Peringkat 5
Keterangan	Forming	Developing	Standardized	Establish	Optimize

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Penilaian terhadap kecukupan implementasi Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh Direksi secara berkala melalui Laporan Fungsi Kepatuhan yang secara semesteran juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan pelaksanaan implementasi yang tertuang dalam Laporan Fungsi Kepatuhan memuat informasi yang menyeluruh antara lain Penguatan Budaya Kepatuhan, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Kehati-Hatian atas Kebijakan Internal, Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Kehati-Hatian Terhadap Kebijakan Eksternal, Pemantauan Terhadap Peraturan/Ketentuan Eksternal, Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan Bank Terhadap Komitmen Eksternal, Pelaksanaan Program APU dan PPT dan lainnya.

Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*) serta teknologi informasi, menyebabkan peningkatan risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang dihadapi oleh Perseroan. Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, Perseroan melakukan Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM secara memadai.

Dasar Hukum

Ketentuan Eksternal

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Nomor 5 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang identitasnya tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/SEOJK.01/2019 tanggal 23 Desember 2019 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang identitasnya tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pedoman Pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 11/1.02/PPATK/09/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan.
10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
11. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.



12. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan
13. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 02/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
14. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 14/1.02/PPATK/11/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.
15. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
16. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Tata cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*.
17. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Jasa Keuangan.
18. Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor.
19. Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.
20. Surat Edaran PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
21. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
22. Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pedoman Pemilihan jenis Transaksi (*Transmode*

Code) dan Instrumen Transaksi (*Funds Code*) dalam Aplikasi GoAML Bagi Bank Umum.

23. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme.
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

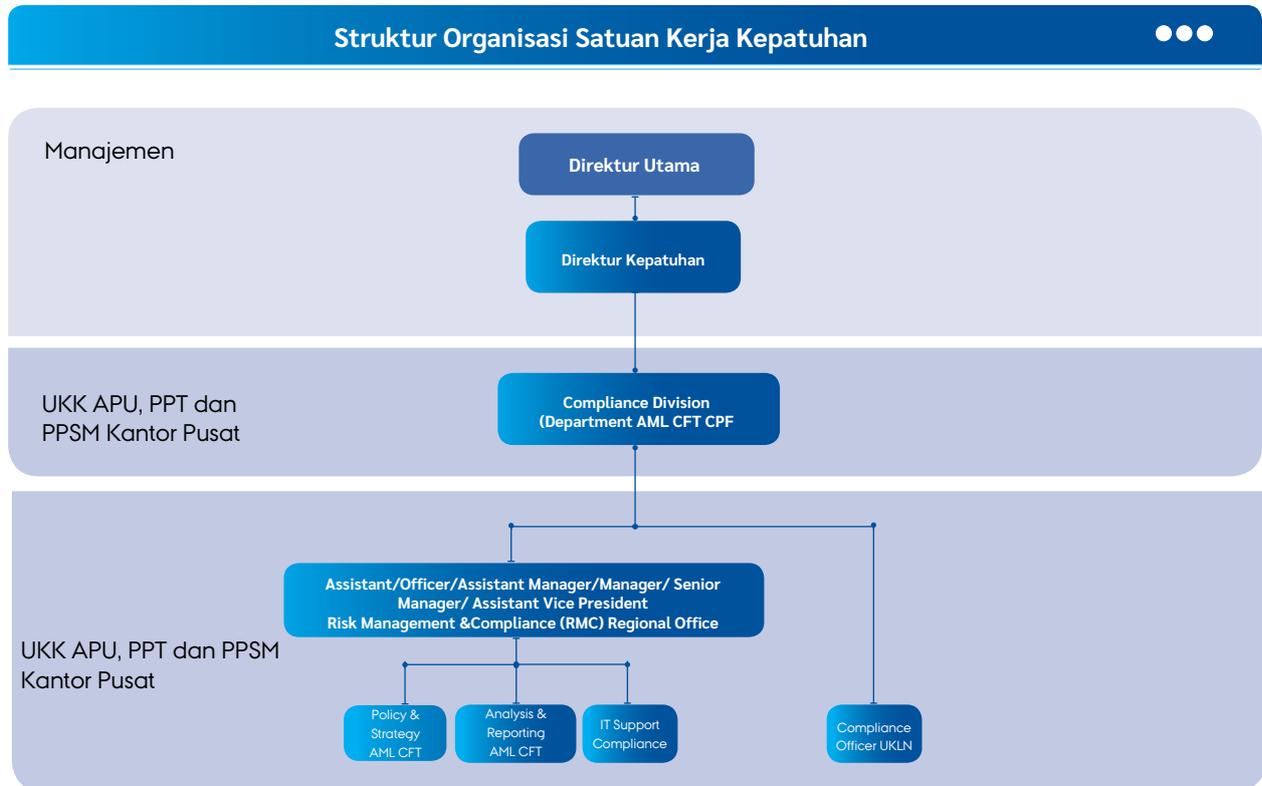
Ketentuan Internal

1. Surat Edaran Direksi BRI No.: SE.41-DIR/KEP/11/2023 Tanggal 30 November 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) No.: 92-KEP/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Implementasi Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Pengelola APU, PPT dan PPPSPM

Penanggung jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang berada di setiap level organisasi. UKK Kantor Pusat BRI dilaksanakan oleh *Compliance Division* KP BRI yang merupakan unit kerja struktural dalam struktur organisasi BRI. Dalam menjalankan tugasnya, *Compliance Division* KP BRI melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan BRI. Sedangkan Penanggung jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Unit Kerja Operasional dilakukan oleh Pejabat Penanggung Jawab APU, PPT, dan PPPSPM Unit Kerja Operasional. Dalam hal ini dilaksanakan oleh *staff* Kepatuhan *Regional Office* serta BRC (*Branch Risk & Compliance*) & URC (*Unit Risk & Compliance*), dimana *staff* tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada *Compliance Division* KP BRI.

Struktur Organisasi APU, PPT dan PPPSPM



Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola APU, PPT dan PPPSPM

Tugas dan tanggung jawab UKK Kantor Pusat BRI cq. Divisi Kepatuhan KP BRI terhadap penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk dimintakan pertimbangan Direksi.
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi BRI, dan/atau modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah.
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
9. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah, termasuk dengan cara melakukan koordinasi dengan Unit Kerja BRI terkait untuk pengkinian data dimaksud.
10. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur BRI serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan



program APU, PPT, dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*.

12. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait, termasuk mengawasi satuan kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas untuk mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM,
13. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai.
14. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja.
15. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
16. Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
17. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai BRI.
18. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik.
19. Memantau rekening efek serta pelaksanaan transaksi nasabah kustodian dan aktivitas hubungan usaha nasabah wali amanat.
20. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi efek.
21. Melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
22. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum).

Dalam hal sesuai dengan kebutuhan BRI berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional BRI, pelaksanaan analisis penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan PPPSPM, termasuk yang didalamnya mengatur mengenai ketentuan tindak lanjut DTTOT dan DPPSPM sebagai berikut:

1. Peraturan bersama yang mengatur mengenai pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi

yang tercantum dalam DTTOT yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. Peraturan bersama yang mengatur mengenai pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam DPPSPM dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam DPPSPM yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Unit Kerja Operasional terhadap Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah sebagai berikut:

1. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah di Unit Kerja Operasional.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
3. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
4. Memonitor pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
5. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*.
6. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Unit Kerja Operasional supervisi.
7. Menerima, melakukan analisis, memverifikasi dan/atau menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja supervisi.
8. Memantau secara berkala dan memonitor tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM di Unit Kerja Operasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai BRI Unit Kerja Operasional supervisi.
10. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Unit Kerja Operasional terlaksana dengan baik.
11. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum).

Sosialisasi APU, PPT dan PPPSPM

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU, PPT, dan PPPSPM di BRI, Pengelola APU, PPT, dan PPPSPM melakukan internalisasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi materi APU, PPT, dan PPPSPM secara *online* melalui media Webinar dan *Zoom Meeting*, serta sosialisasi tatap muka kepada pekerja BRI dan perusahaan anak baik dari jajaran operasional maupun pemasaran.
2. Melaksanakan *self-learning* materi APU, PPT, dan PPPSPM.

Implementasi APU, PPT dan PPPSPM 2023

Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan berdasarkan 5 (lima) pilar, sebagai berikut:

I. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

1. Pengawasan aktif Direksi, sebagai berikut:

- a. Direksi BRI harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh aktivitas operasional Bank, sehingga Direksi mampu mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang timbul sesuai dengan profil risiko Bank.
- b. Pada penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Direksi khususnya Direktur Kepatuhan melakukan pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup:
 - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris.
 - Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
 - Membentuk unit kerja khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
 - Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM.
 - Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSM.
 - Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT,

dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi Memastikan BRI memiliki kebijakan dan prosedur program APU, PPT, dan PPPSPM.
 - c. Untuk Kantor Cabang BRI yang berkedudukan di luar negeri, yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan aktif mewakili direksi adalah pimpinan kantor cabang luar negeri yakni pemimpin kantor cabang luar negeri dan/atau pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
 - d. Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan BRI berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional BRI.
 - e. Satuan kerja terkait antara lain satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau *Walk-In Customer* (WIC), seperti petugas pelayanan Nasabah (*frontliner*), petugas pemasaran, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta *internal auditor*.
 - f. Dalam hal terdapat kebutuhan BRI berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional BRI, pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, sebagai berikut:
- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
 - Memastikan BRI memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
 - Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.
 - Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Evaluasi dilakukan secara tertulis melalui rekomendasi forum yang dihadiri Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
 - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan



- tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
- Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Frekuensi pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSM BRI atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

II. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM

1. Kebijakan dan Prosedur
 - a. Ketentuan Kebijakan dan Prosedur terkait APU, PPT, dan PPPSPM
 - b. Kebijakan Pendekatan Berdasarkan Risiko
 - c. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
 - d. Penetapan Toleransi Risiko
 - e. Penyusunan Langkah-langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko
 - f. Evaluasi Risiko Residual (*Residual Risk*)
 - g. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko
 - h. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko
 - i. Penilaian *Customer Risk Rating*
2. Prosedur *Customer Due Diligence* (CDD)
 - a. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah/Nasabah/*Walk-In Customer* (WIC)
 - b. Permintaan Data dan Informasi pada Calon Nasabah dan *Walk-in Customer* (WIC)
 - c. Permintaan Dokumen Pendukung pada Calon Nasabah dan WIC
 - d. Proses Verifikasi Calon nasabah
 - e. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner*
 - f. Prosedur CDD Sederhana
 - g. Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga
 - h. Bank sebagai Agen Penjual Produk Lembaga Keuangan Non-Bank
3. Prosedur *Enhanced Due Diligence* (EDD)
 - a. Uji Tuntas Lanjut atau *Enhanced Due Diligence* (EDD)
 - b. EDD terhadap Jasa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)
 - c. Prosedur EDD Terhadap Kategori Berisiko Tinggi
4. Pengelolaan Hubungan Usaha Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan/atau Transaksi
 - a. Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi
 - b. Penolakan Hubungan Usaha Calon Nasabah
 - c. Penolakan Transaksi, Pembatalan Transaksi, dan/atau Penutupan Hubungan Usaha dengan Nasabah atau WIC
 - d. Pengembalian Sisa Dana Nasabah

5. Pengkinian dan Pemantauan
 - a. Pemantauan terhadap Profil Calon Nasabah
 - b. Pemantauan terhadap Profil dan Transaksi Nasabah
 - c. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM)
 - d. Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut dari Pemantauan
 - e. LTKM atau STR Hasil Pemantauan
6. *Cross Border Correspondent Banking*
 - a. Prosedur Pengelolaan *Cross Border Correspondent Banking*
 - b. *Payable Through Account*
7. Transfer Dana
 - a. Prosedur Transfer Dana
 - b. Permintaan Informasi dan Pelaporan pada Transfer Dana

III. Pengendalian Intern

1. Tersedianya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai; Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
2. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
3. Pemeriksaan dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

IV. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

- Tahun 2023
1. *Integrated AML CFT Screening (Watchlist Screening pada Platform Pembukaan Rekening & Transaksi)*.
 2. *AI for Monitoring Transaction System through Graph Technology*.
 3. *RBA Bankwide*.
 4. *RBA Customer*.
 5. *AML CFT Sistem (Menu STR, CTR, IFTI Reporting)*.
 6. *Sipemat Reporting Tools*.
 7. *Tools untuk Tanggapan dan Analisis Dampak dalam Pengujian Kepatuhan pada BRIPEDIA*.

Tahun 2024

1. *AI for Monitoring Transaction System (Integrasi Sistem AML CFT dengan Graph DB)*.
2. *Integrated Database AML CFT (BRIFAST, QLOLA, MAO)*.
3. Pengembangan *Regulatory Technology* – INTEGRA.
4. Report Mutasi Rekening Lawan Transaksi pada BRISIM.
5. *Dashboard Monitoring untuk Bad data*.
6. Aplikasi RBA Tools OJK.
7. *Dashboard Reporting CRS*.

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka pencegahan penggunaan BRI sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BRI melakukan prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pekerja baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).

Dalam meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU, PPT, dan PPPSPM di BRI, Pengelola APU, PPT, dan PPPSPM melakukan pendidikan dan/atau pelatihan sebagai berikut:

1. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagai materi wajib (*Mandatory*) dalam pelaksanaan pendidikan terhadap pekerja baru di BRI maupun pendidikan regular lainnya yang diselenggarakan BRI.
2. *Compliance Division* bekerja sama dengan BRI *Corporate University* menyelenggarakan *self-learning* kepada Unit Kerja Operasional (UKO) level jajaran operasional dan petugas agen brilink, BRC/URC, *Risk Management & Compliance Team Regional Office*, pekerja audit intern wilayah serta divisi-divisi terkait seperti *Operational Risk Division*, *Investment Service Division* dan *Audit Standard & Quality Division*. Adapun tema *self-learning* mencakup materi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tipologi Korupsi dan *Politically Exposed Person*.
3. *Compliance Division* bekerja sama dengan BRI *Corporate University* menyelenggarakan *In House Training* (IHT) dengan rincian sebagai berikut:

No.	In House Training	Peserta
1	Peningkatan Kualitas Data Nasabah BRI dan Pelaporan APU PPT	<i>Compliance Division</i> , <i>Distribution Network Division</i> , <i>Card & Digital Lending Division</i> , <i>Credit Operation Risk</i> , <i>Enterprise Data Management Division</i> , <i>International Business Division</i> , <i>Treasury Business Division</i> , <i>It Strategy & Governance Division</i> , <i>Investment Services Division</i> , <i>Consumer Lending</i> , <i>Sales & Development Division</i> , <i>Wealth Management Division</i> , <i>Funding & Retail Payment Strategy Division</i> , <i>Application Management & Operation Division</i> , dan <i>Ultra Micro Business Division</i> .
2	Diskusi RBA Penerapan Program APU PPT pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konglomerasi Keuangan (KK) BRI	<i>Compliance Division</i> , Bank Raya, BRI <i>Insurance</i> , BRI <i>Life</i> , BRI Danareksa Sekuritas, BRI <i>Multifinance</i> , BRI <i>Venture Investama</i> , Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI <i>Management Investasi</i> .
3	Hasil <i>Mapping</i> RBA dan Penyusunan Roadmap LJK KK BRI	<i>Compliance Division</i> , Bank Raya, BRI <i>Insurance</i> , BRI <i>Life</i> , BRI Danareksa Sekuritas, BRI <i>Multifinance</i> , BRI <i>Venture Investama</i> , Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI <i>Management Investasi</i> .
4	RPOJK APU, PPT, dan PPPSPM Penilaian Risiko TPPU/TPPT	<i>Compliance Division</i> , <i>Investment Services Division</i> , Bank Raya, BRI <i>Insurance</i> , BRI <i>Life</i> , BRI Danareksa Sekuritas, BRI <i>Multifinance</i> , BRI <i>Venture Investama</i> , Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI <i>Management Investasi</i> .
5	Penyelarasan Strategi Penguatan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM pada LJK KK BRI	<i>Compliance Division</i> , <i>Investment Services Division</i> , <i>Subsidiary Management Division</i> , Bank Raya, BRI <i>Insurance</i> , BRI <i>Life</i> , BRI Danareksa Sekuritas, BRI <i>Multifinance</i> , BRI <i>Venture Investama</i> , Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI <i>Management Investasi</i> .
6	Modus-Modus Terkini Tindak Pidana Narkotika dan Perjudian, serta Pembahasan Ketentuan Penundaan Transaksi dan Pemutusan Hubungan Usaha	<i>Compliance Division</i> , <i>Operational Risk Division</i> , <i>Legal Division</i> , <i>Policy & Procedure Division</i> , <i>Application Management & Operation Division</i> , <i>It Strategy & Governance Division</i> , <i>Enterprise Data Management Division</i> , <i>Service & Contact Center Division</i> , <i>Operation Center Division</i> , <i>Funding & Retail Payment Strategy Division</i> , <i>Transaction Banking Division</i> , <i>Investment Services Division</i> , <i>International Business Division</i> , <i>Brilink Business Division</i> , <i>Card</i> , <i>Digital Lending & Assets Product Development</i> , <i>Governance Department</i> , Bank Raya, BRI <i>Insurance</i> , BRI <i>Life</i> , BRI Danareksa Sekuritas, BRI <i>Multifinance</i> , BRI <i>Venture Investama</i> , Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI <i>Management Investasi</i> .

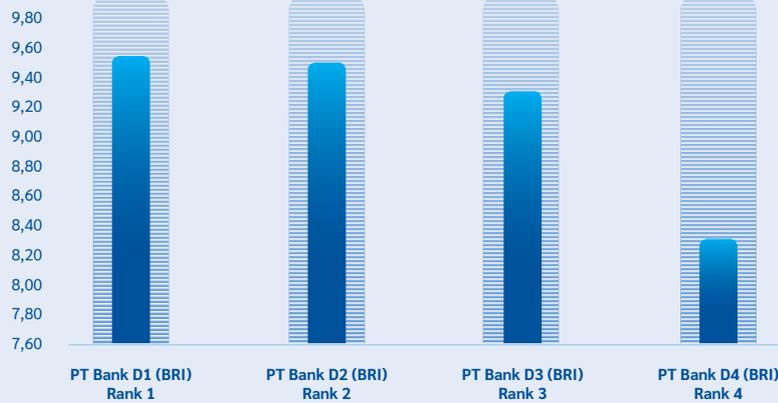
4. *Compliance Division* Bekerja sama dengan BRI *Corporate University* menyelenggarakan Webinar tentang Sistem AML CFT 3.1 dan Pencatatan *Field EDD* dan BO pada Aplikasi NDS dalam rangka mengoptimalkan peran pekerja baru dalam penerapan *Compliance* di BRI.
5. *Compliance Division* Bekerja sama dengan BRI *Corporate University* menyelenggarakan Webinar tentang Undanguan Sosialisasi dan Diskusi terkait Penerapan Prosedur CDD/EDD Transfer Dana yang Melibatkan Perusahaan *Remittance* dalam rangka mengoptimalkan peran pekerja baru dalam penerapan *Compliance* di BRI.
6. *Compliance Division* juga berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kepatuhan Level 1 maupun Level 2 kepada jajaran pekerja *Compliance* baik di Kantor Pusat maupun Regional Office dan Unit Kerja Operasional.

Penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF)

FIR on ML/TF merupakan penilaian oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap integritas dan efektivitas pihak pelapor dalam menjalankan program APU, PPT, dan PPPSPM yang meliputi aspek komitmen, implementasi dan kepatuhan. Pada tahun 2023, BRI memperoleh Skor FIR on ML/TF 9,56 dengan Kategori Sangat Baik (*Highest Score* FIR on ML/TF pada KBMI 4).



Perbandingan Score FIR 2023



Pengawasan Transaksi untuk Menghadapi Pemilu

Dalam rangka mendukung terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil, dengan ini BRI senantiasa memberikan layanan perbankan terhadap Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memenuhi kewajiban pelaporan dan pemantauan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan PPATK. Dalam menindaklanjuti hal tersebut kami melakukan perbaikan sbb:

- Pilar *People*: Penguatan *resources* SDM.
- Pilar *Process*: Membuat kebijakan terkait mekanisme dan prosedur RKDK sesuai dengan ketentuan.
- Pilar *Platform*: *Enhancement* sistem AML CFT baik untuk pelaporan dan pemantauan.

Dengan jangkauan Unit Kerja BRI yang luas dan terpercaya sehingga jumlah RKDK paling banyak dibandingkan dengan Bank lainnya berdasarkan hasil evaluasi PPATK.

Perkara Hukum

Perkara hukum yang dihadapi oleh BRI pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	92	13
Dalam proses penyelesaian	371	33
Total	463	46

Secara rinci per Perkara hukum material selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 283
2. Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 052
3. Perkara Operasional & Jasa : 022
4. Perkara *Support* (SDM, Logistik, dll) : 013
5. Perkara *Treasury, Trade Finance & IT* : 001

Dengan rincian sebagai berikut:

2023					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	60	52	91	80	283
Kredit Non Lelang	12	11	12	17	52
Ops & Jasa	9	4	3	6	22
<i>Support</i>	8	2	2	1	13
<i>Treasury, Trade Finance & IT</i>	0	0	0	1	1
GRAND TOTAL					371

1. Perkara *Inkracht* Menang

Perkara *Inkracht* Menang pada tahun 2023 sebanyak 92 Perkara, yang terdiri dari:

- Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 68 perkara
- Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 15 perkara
- Perkara Operasional & Jasa : 08 perkara
- Perkara *Support* (SDM, Logistik, dll) : 01 perkara
- Perkara *Treasury, Trade Finance & IT* : 00 perkara

Inkracht Menang	2023				
	Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kredit (Penundaan Lelang)	9	9	16	34	68
Kredit Non Lelang	0	3	3	9	15
Ops & Jasa	1	3	1	3	08
Support	1	0	0	0	01
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	00
GRAND TOTAL					92

Inkracht Kalah	2023				
	Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kredit (Penundaan Lelang)	0	0	0	0	0
Kredit Non Lelang	0	0	0	0	0
Operasional dan Jasa	0	0	0	0	0
Support	0	0	0	0	0
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL					0

2. Perkara Inkracht Kalah

Perkara Inkracht Kalah pada tahun 2023 sebanyak **0 Perkara**, yang terdiri dari:

- Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 0 perkara
- Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 0 perkara
- Perkara Operasional & Jasa : 0 perkara
- Perkara Support (SDM, Logistik, dll) : 0 perkara
- Perkara Treasury, Trade Finance & IT : 0 perkara

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PKPU PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO) dengan rincian proses perkara sebagai berikut: 1. Proses PKPU PT PMO: <ul style="list-style-type: none"> • 26 Jan 2023 – Permohonan Pencabutan PKPU; • 01 Feb 2023 – Rapat Kreditur; • 27 Feb 2023 – Rapat Kreditur Lanjutan; • 01 Mar 2023 – Putusan Perpanjangan PKPU; • 12 Jun 2023 – Rapat Proposal Perdamaian; • 06 Sep 2023 – Voting Proposal Perdamaian. 	PKPU Berakhir dengan Perdamaian, atas Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak putusan tanggal 20 September 2023.	-	-	BRI wajib menjalankan (memberikan) restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut.



Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
<p>2. BRI telah mendaftarkan tagihan senilai Rp790.652.147.027,00 yang terdiri atas tagihan pokok Rp511.299.093.532,00, bunga Rp247.126.665.859,00 dan denda Rp32.226.387.636,00 dengan keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Pokok dan Bunga berjalan akan dibayarkan setiap akhir bulan untuk Hari Kerja; • Pembayaran Pokok akan dilakukan dari hasil efisiensi Perusahaan sejak tahun 2024 bersama dengan calon mitra/ investor. Nilai pembayaran pokok diasumsikan akan meningkat secara nominal dari tahun ke tahun sampai di proyeksikan lunas pada tahun 2042; • Sehubungan dengan KSO baru akan dimulai pada tahun 2025, maka pembayaran pokok dan bunga pada periode tahun 2023 dan 2024 akan berasal dari hasil penjualan TBS Kebun Non-KSO dan Kas yang diterima dari KSO PKS dari Mitra. Sehingga Debitur berkewajiban untuk mencari Mitra lain. 				
<p>3. Ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian bagi Kreditur Bank (termasuk BRI) al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atas suku bunga dan denda berjalan dapat di review sewaktu-waktu oleh Kreditur Perbankan dan Perusahaan dengan memperhatikan kondisi usaha Perusahaan dan dapat dirubah dengan persetujuan Perusahaan. • Atas suku bunga dan denda berjalan yang ditangguhkan ditentukan sbb: • Pembayaran Pokok, Bunga dan Denda akan dibayarkan setiap akhir bulan untuk Hari Kerja; • Atas bunga dan denda berjalan Yang Ditanggungkan tersebut diatas tidak dikenakan bunga/fee atau denda. • Jumlah penangguhan akan disesuaikan dengan perhitungan Kreditur pada saat pembukuan transaksi. • Bunga dan denda akan dihapuskan apabila Prestasi atau Pembayaran Pokok Kreditur Perbankan telah dilaksanakan atau dibayarkan lunas oleh Debitur. 				
<p>4. Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pemeriksa pada tanggal 20 September 2023.</p>				

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Nama Anak Perusahaan	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PT BRI Multifinance Indonesia	PT Tritama Niaga Berjaya - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	BRIF Menang, Gugatan Debitur Tidak Diterima	Rp111.210.000.000	-	-
PT Pegadaian	Penggugat Sdri. Amalia Komalasari menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu PT Pegadaian melakukan perbuatan melawan hukum pada saat melakukan pengambilan aset milik Ybs dalam rangka mengurangi Kerugian Perusahaan, oleh karena itu ybs mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri	Close	Rp186.947.891.300,00	PT Pegadaian tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga terhindar dari tuntutan ganti rugi sebesar 186,9 Milyar	tidak ada
PT BRI Danareksa Sekuritas	Penggugat : PT BRIDS Tergugat : PT Evio Securities ("Evio") Pokok Perkara : Gugatan perdata wanprestasi terkait Perjanjian Pinjaman Dana Talangan.	Forum Penyelesaian Sengketa : PN Jakpus Putusan Tingkat Pertama : Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O) Putusan Tingkat Banding : Menguatkan putusan PN	Nilai Tuntutan Materil : Rp 10M dan Kerugian Immateril Rp 10M	-	Tidak berdampak pada kegiatan usaha BRIDS. Penyelesaian sengketa ini merupakan bagian dari proses recovery piutang bermasalah sejak tahun 2019. Untuk mengoptimalkan proses penyelesaian, BRIDS sedang mengajukan permohonan bantuan hukum ke Jamdatun Kejaksaan Agung RI
PT BRI Asuransi Indonesia	Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Gresik Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait ketidakpahaman nasabah atas isi polis asuransi kebakaran	Putusan Pengadilan Tingkat Pertama: 12 Desember 2023 (Gugatan ditolak seluruhnya) (Belum ada upaya hukum selanjutnya)	Risiko Financial (materil & immateril) dan Reputasi Perusahaan	Tidak Ada	Tidak Signifikan
PT Permodalan Nasional Madani	Nihil	-	-	-	-
PT Asuransi BRI Life	Perkara Perdata Wanprestasi dengan Nomor perkara 13/Pdt.G/2023/PN Kng di PN Kuningan BRI Life sebagai Tergugat II - Penggugat a.n Hj. Cich Sutinsih sebagai ahli waris dari nasabah alm. H. Aan Heriana yang memiliki kredit di BRI - Menuntut pengembalian objek yang menjadi jaminan berupa 3 bidang tanah - Menuntut Uang Pertanggungungan sebagai pelunasan dari kredit ybs	Proses Banding	Tidak terdapat risiko. Penggugat menuntut pelunasan kredit di BRI melalui cover asuransi BRI Life, tetapi Penggugat tidak memiliki asuransi di BRI Life.	Nihil	Menurunnya citra dan reputasi perusahaan



Nama Anak Perusahaan	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PT Bank Raya Indonesia Tbk.	Nihil	-	-	-	-
PT BRI Manajemen Investasi	Nihil	-	-	-	-
PT BRI Ventura Investama	Nihil	-	-	-	-

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif material oleh Regulator yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

BRI secara transparan menyediakan informasi laporan keuangan dan informasi perusahaan terkini yang dapat diakses publik melalui berbagai media cetak dan elektronik termasuk diantaranya situs Perusahaan, Sosial Media, Bursa Efek Indonesia, dan portal BUMN.

Sekretaris Perusahaan

Agustya Hendy Bernadi

Telepon: (+62 21) 575 1966

Faksimil: (+62 21) 570 0916

Email: humas@bri.co.id

Alamat Perusahaan

Kantor Pusat Bank BRI

Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 1210, Indonesia

Telp: (+62 21) 251 0244, 251 0254

Fax: (+62 21) 250 0065, 250 0077

Situs Perusahaan

www.bri.co.id

Call Centre

1500017, (+62 5798 7400)

Customer Care

callbri@bri.co.id

Media Sosial

Facebook: Bank BRI

Instagram: @bankbri_id

Twitter: @kontakBRI, @promo_

BRI, @bankbri_id

Youtube: BANK BRI

Chatbot: Sabrina

Melalui facebook messenger dan whatsapp/telegram: 081-212-14017

Investor Relation

Investor Relation Division BRI memiliki peranan khusus untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi perusahaan kepada Investor. Selain itu, *Investor Relation* Division BRI berperan dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

Contact Investor Relation

Siaga Ridha Utama

Temporary Replacement of Division Head of Investor Relation

Gedung BRI II lantai 7

Jl. Jendral Sudirman No-44-46 Jakarta Pusat 10210

Telp.: +62 21 575 2019

Fax: +62 21 575 2010

Email: ir@bri.co.id

Website: www.ir-bri.com

Tugas dan Tanggung Jawab Investor Relation

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan peraturan serta meningkatkan komunikasi yang efektif, *Investor Relation Division* BRI melakukan beragam kegiatan yaitu:

1. *Analyst Meeting*
Merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para *analyst*/perusahaan sekuritas yang bertujuan agar *analyst*/perusahaan sekuritas tersebut dapat menyajikan *report* dengan data terkini kepada para investor.
2. *Analyst Gathering*
Merupakan kegiatan pertemuan dengan para *analyst* maupun investor untuk memaparkan materi *current issue* atau materi khusus dengan tema tertentu, dengan tujuan untuk memberikan *update* terkait *current issue* maupun informasi perusahaan terkini.
3. *Company Visit - Field Visit*
Menerima kunjungan dari investor/*analyst* yang ingin meng-*Update* kinerja terkini serta ingin mengetahui dan melihat secara langsung operasi perusahaan baik di kantor pusat maupun di unit kerja operasional.
4. *Conference Call*
Melakukan kegiatan *teleconference* untuk mengakomodasi kebutuhan para investor/*analyst* dalam mendapatkan informasi perusahaan maupun kondisi perekonomian yang memberikan pengaruh ke bisnis dan operasional perusahaan.

5. *Investor Newsletter*
Update informasi terkini melalui penerbitan *newsletter* pada website *Investor Relation* BRI.
6. *Investor Conference* dan *Non-deal Roadshow*
Melakukan kegiatan komunikasi melalui *1-on-1 meeting* maupun *group meeting* dengan para investor baik di dalam dan luar negeri terutama di kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika.
7. *Rating Review*
Melakukan kegiatan komunikasi dan penyampaian data BRI dalam rangka pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang digunakan BRI, baik lembaga pemeringkat internasional (*Moody's, Fitch Rating, S&P*) maupun lembaga pemeringkat domestik (*Pefindo*).
8. Pengelolaan *Website Investor Relation* (www.ir-bri.com)
Melakukan pengelolaan informasi pada website *Investor Relation* agar pemegang saham, pemegang surat utang, menganalisis pemeringkat serta masyarakat umum memiliki kemudahan dalam mengakses informasi terkini dari perusahaan. *Website* yang dikelola oleh *Investor Relation Division* tersebut juga terkoneksi dengan *website* perusahaan yaitu www.bri.co.id.
9. *Advisory Report*
Melakukan penyusunan materi *advisory* yang berisi hasil valuasi saham BRI dan hasil identifikasi gap antara *intrinsic value* dan *target price* analisis maupun hasil analisa lainnya untuk dikomunikasikan secara internal kepada *Board of Management*.
10. *Market Update Advisory*
Melakukan penyusunan materi berupa *Update* kondisi pasar saham, harga saham BRI dan *peers* untuk dikomunikasikan secara internal kepada *Board of Management*.
11. *Financial Update*
Melakukan penyusunan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para *analyst*/perusahaan sekuritas pada kegiatan *Analyst Meeting*.
12. *Financial Brief*
Melakukan penyusunan ringkasan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka mengkomunikasikan kinerja BRI kepada para pekerja BRI.
13. *BBRI News*
Melakukan penyusunan materi terkait *issue* terkini yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan untuk dikomunikasikan secara internal baik kepada *Board of Management* ataupun pekerja BRI.

Profil Head of Investor Relation

Periode Januari – Juli 2023



Rustarti Suri Pertiwi

Investor Relation Executive

Warga negara Indonesia, lahir di Kebumen. Usia 46 Tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1999)
- MBA dari Monash Business School, Monash University, Melbourne – Australia (2005)



PENGALAMANKERJA

Memulai karir di BRI pada tahun 2006 dengan beberapa jabatan yaitu:

- *Head of Internal Report, Financial and Management Accounting Division* (Oktober 2015 – Juni 2018)
- *Head of Investor Communication Department, Investor Relation Division* (Juli 2018 – Mei 2020)
- *Head of Asset & Liabilities Management Desk* (Juni 2020 – Januari 2021)
- *Head of Subsidiary Management Division* (Februari 2021 – September 2021)
- *Head of Investor Relation Division* (Oktober 2021 – Juli 2023))



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

SK No. R.509-DIR/HCB/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4



Periode Juli - Desember 2023



Siaga Ridha Utama

Temporary Replacement of Division Head of Investor Relation

Warga negara Indonesia, lahir di Solo. Usia 37 Tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Depok (2009)
- MBA dari Alliance Manchester Business School, University of Manchester, Manchester – UK (2019)



PENGALAMANKERJA

Memulai karir di BRI pada tahun 2010 dengan beberapa jabatan sebagai berikut :

- *Banking and Finance Team Leader, Subsidiary Management Division* (Juli 2020 – Maret 2021)
- *Head of Change Management Division, PT. Bank Raya Indonesia, Tbk* (April 2021 – Februari 2023)
- *Head of Advisory, Analytics, Valuation and Market Intelligence Department, Investor Relations Division* (Maret 2023 – Juni 2023)
- *Temporary Replacement of Head of Investor Relations Division* (Juli 2023 – sekarang)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

S.271.e-DIR/HCB/07/2023 tanggal 24 Juli 2023



SERTIFIKASI

Tidak Ada

Kegiatan Investor Relation Selama Tahun 2023

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham di luar RUPS, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Investor selama tahun 2023 meliputi:

1. Penyelenggaraan *Analyst Meeting* yang dilaksanakan setiap triwulan.
2. Penyelenggaraan *Analyst Gathering* membahas topik-topik khusus, yaitu KUR Tahun 2022 serta Ekosistem Ultra Mikro
3. Kegiatan komunikasi berupa 27 *Non Deal Roadshow* dan 183 *meeting* baik secara *onsite* maupun virtual.
4. *Conference* sebanyak 13 kali dan *Non Deal Roadshow* sebanyak 19 kali.
5. Penyelenggaraan BRI BISA (Bincang Saham) kepada pekerja BRI sebanyak 7 (tujuh) kali.
6. *ESG Rating*.
7. Penyelenggaraan *Annual Rating Review* untuk *Fitch*, *Moody's*, *S&P* serta *Pefindo*.
8. Penyelenggaraan *Public Expose*, RUPS, RUPSLB dan *Investor Newsletter* yang telah *publish* sebanyak 5 *newsletter*.
9. Pengelolaan informasi terkini pada *website Investor Relations* (www.ir-bri.com) meliputi:
 - a. Informasi Perusahaan.
 - b. Kinerja Keuangan dan Presentasi Perusahaan.
 - c. *Corporate Governance*.
 - d. Informasi Terkait RUPS.
10. *Disclosure* atas *Regulatory Filings*, *Events Calender*, *Release*, Kinerja Saham dan Informasi Surat Berharga yang diterbitkan.

Siaran Pers

Selama tahun 2023, BRI telah melaksanakan siaran *pers* sebanyak 540 kali yang dapat diakses pada *website* Perseroan dengan kategori sebagai berikut.

Kategori	Total
Kinerja Keuangan	48
Aksi Korporasi & Saham	27
Pencapaian & Penghargaan	58
Pemberdayaan UMKM	53
Corporate Event & Sponsorship	45
Kerja Sama Antarlembaga	27
ESG	18
Human Capital	13
Ekonomi Kerakyatan/Program Pemerintah	14
Transformasi	24
Edukasi Perbankan	19
Layanan & Operasional Perbankan	52
Inklusi Keuangan & Agen BRILink	22
Produk & Promo	35
CSR/BRI Peduli	49
Lainnya	36
Grand Total	540

Transparansi Penyampaian Laporan

Salah satu bentuk transparansi Perseroan yaitu menyampaikan laporan-laporan kepada regulator. BRI telah menyampaikan laporan-laporan secara tepat waktu pada regulator terkait diantaranya:

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
1	B.280a.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	20 Desember 2023	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen Interim	OJK
2	B.280.e-CSC/CSM/CGC/12/2023	18 Desember 2023	Jadwal <i>Dividen</i> Tunai Interim	OJK
3	B.274.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	8 Desember 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
4	B.272.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	8 Desember 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
5	B.270.e-CSC/CSM/CGC/011/2023	8 Desember 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham November 2023	Bursa Efek
6	B.269.e-CSC/CSM/CGC/12/2023	5 Desember 2023	Laporan Hasil <i>Public Expose</i> - Tahunan	Bursa Efek
7	B.259.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	27 November 2023	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> - Tahunan	Bursa Efek
8	B.250.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	16 November 2023	Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> - Tahunan	Bursa Efek
9	B.239.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	10 November 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Oktober 2023	Bursa Efek
10	B.241.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	10 November 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
11	B.242.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	10 November 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
12	B.237.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	8 November 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	OJK
13	B.235.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	6 November 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Permintaan Waktu Diskusi	OJK
14	B.233.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	27 Oktober 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	OJK
15	B.231.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	24 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
16	B.225.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	11 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
17	B.224.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	10 Oktober 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham September 2023	Bursa Efek
18	B.223.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	10 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
19	B.222.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	10 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
20	B.220.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	5 Oktober 2023	Perubahan Komite Audit	OJK
21	B.0557-DIR/FMA/03/2023	2 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
22	B.2275-DIR/INV/TCS/CPD/09/2023	25 September 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Tambahan Ringkas Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023	OJK
23	B.2274-DIR/INV/TCS/CPD/09/2023	25 September 2023	Penyampaian Prospektus	OJK
24	B.2273-DIR/INV/TCS/CPD/09/2023	25 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
25	B.211.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	14 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Permintaan Waktu Diskusi	OJK
26	B.209.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	12 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
27	B.446.e-CSC/CSM/PAF/09/2023	10 September 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Agustus 2023	Bursa Efek
28	B.206.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	10 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
29	B.203.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	10 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
30	B.205.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	7 September 2023	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	OJK
31	B.197.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	1 September 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	OJK
32	B.195.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	29 Agustus 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK



No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
33	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(14)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
34	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(13)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
35	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(12)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
36	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(11)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
37	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(10)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
38	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(9)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
39	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(8)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
40	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(7)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
41	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(6)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
42	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(5)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
43	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(4)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
44	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(3)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
45	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(2)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
46	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
47	B.185.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	11 Agustus 2023	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	OJK
48	B.180.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	4 Agustus 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Juli 2023	Bursa Efek
49	B.181.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	10 Agustus 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
50	B.179.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	10 Agustus 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
51	B.13-CSC/CSM/CGC/08/2023	1 Agustus 2023	Perubahan <i>Corporate Secretary</i>	OJK
52	B.12-CSC/CSM/CGC/07/2023	28 Juli 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
53	B.11-CSC/CSM/CGC/07/2023	28 Juli 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
54	B.174.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	27 Juli 2023	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2023 Ditelaah secara terbatas	OJK
55	B.168.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	20 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
56	B.164.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	13 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
57	B.164.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	12 Juli 2023	Laporan Pembelian Kembali Saham (<i>Buyback</i>)	OJK
58	B.161.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	10 Juli 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A	OJK
59	B.155.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	10 Juli 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Juni 2023	Bursa Efek
60	B.335.e-CSC/CSM/PAF/07/2023	10 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
61	B.156.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	10 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
62	B.152.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	4 Juli 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas Penawaran Umum Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	OJK
63	B.153.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	4 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
64	B.154.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	4 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
65	B.148.e-CSC/CSM/CGC/06/2023	22 Juni 2023	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	OJK
66	B.146.e-CSC/CSM/CGC/06/2023	16 Juni 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
67	B.140/CSC/CSM/CGC/06/2023	13 Juni 2023	Penyampaian Bukti Iklan Prospektus Ringkas Penawaran Umum Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	OJK
68	B.133/CSC/CSM/CGC/06/2023	9 Juni 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Mei 2023	Bursa Efek
69	B.134/CSC/CSM/CGC/06/2023	9 Juni 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
70	B.138/CSC/CSM/CGC/06/2023	9 Juni 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
71	R.0572-DIR/ALM/06/2023	5 Juni 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
72	B.125.e-CSC/CSM/CGC/05/2023	31 Mei 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	OJK
73	B.116/CSC/CSM/CGC/05/2023	10 Mei 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
74	B.114/CSC/CSM/CGC/05/2023	10 Mei 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham April 2023	Bursa Efek
75	B.113/CSC/CSM/CGC/05/2023	10 Mei 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
76	B.112/CSC/CSM/CGC/05/2023	10 Mei 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
77	B.109.e-CSC/CSM/CGC/05/2023	4 Mei 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
78	B.106.e-CSC/CSM/CGC/04/2023	28 April 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	OJK
79	B.104.e-CSC/CSM/CGC/04/2023	26 April 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
80	B.101.e-CSC/CSM/CGC/04/2023	12 April 2023	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	OJK
81	B.183/CSC/CSM/PAF/04/2023	10 April 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Maret 2023	Bursa Efek
82	B.99/CSC/CSM/CGC/04/2023	10 April 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
83	B.98/CSC/CSM/CGC/04/2023	10 April 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
84	B.93.e-CSC/CSM/CGC/04/2023	3 April 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Informasi atau Fakta Material Penambahan Modal pada PT BRI Ventura Investama	OJK
85	B.90.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	28 Maret 2023	Laporan Hasil Pemingkatan Pemingkatan Tahunan	OJK
86	B-77.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	15 Maret 2023	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 15032023	OJK
87	B.77-CSC/CSM/CGC/03/2023	15 Maret 2023	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	OJK
88	B.77.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	14 Maret 2023	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	OJK
89	B.69.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Maret 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Februari 2023	Bursa Efek
90	B.73.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Maret 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
91	B.75.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Maret 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
92	B.68.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	6 Maret 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Kepemilikan Saham pada PT Asuransi BRI Life	OJK
93	B.62.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	1 Maret 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
94	B.5-CSC/CSM/CGC/02/2023	24 Februari 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
95	B-58/CSC/CSM/CGC/02/2023	21 Februari 2023	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	OJK



No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
96	B59e/CSC/CSM/CGC/02/2023	17 Februari 2023	Penyampaian Laporan Tahunan dan Berkelanjutan	OJK
97	B.58/CSC/CSM/CGC/02/2023	10 Februari 2023	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK
98	B.46/CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Februari 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Januari 2023	Bursa Efek
99	B.48/CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Februari 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
100	B.45/CSC/CSM/CGC/03/2023	9 Februari 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
101	B.49.e-CSC/CSM/CGC/02/2023	8 Februari 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	OJK
102	B.294-DIR/FMA/02/2023	3 Februari 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan	OJK
103	B.41.e/CSC/CSM/CGC/02/2023	2 Februari 2023	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	OJK
104	B.40.e-CSC/CSM/CGC/02/2023	2 Februari 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Pembelian Kembali Saham	OJK
105	B.41.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	2 Februari 2023	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK
106	B.42.e-CSC/CSM/CGC/02/2023	31 Januari 2023	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	OJK
107	B.37.e-CSC/CSM/CGC/01/2023	30 Januari 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	OJK
108	B.36.e-CSC/CSM/CGC/01/2023	26 Januari 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengakhiran Periode Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan Perseroan (<i>Buyback</i>)	OJK
109	R.57-DIR/CSC/01/2022	17 Januari 2023	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK
110	B.4-CSC/CSM/CGC/01/2023	17 Januari 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
111	B.78DIR/INV/01/2023	16 Januari 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
112	B.78-DIR/INV/01/2023	13 Januari 2023	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	OJK
113	B.52-CSC/CSM/CGC/01/2023	13 Januari 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
114	B.53-CSC/CSM/CGC/01/2023	13 Januari 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
115	B.23.e-CSC/CSM/CGC/01/2023	13 Januari 2023	Laporan Pembelian Kembali Saham (<i>Buyback</i>)	OJK

Kode Etik

BRI memiliki Kode Etik yang merupakan nilai dasar bagi Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya secara profesional. Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh Insan BRI di seluruh jenjang organisasi perusahaan. Penerapan Kode Etik BRI secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya perusahaan. Kebijakan yang mengatur mengenai Kode Etik Perusahaan dan implementasinya tertuang dalam Surat Edaran Direksi BRI No. SE.09.a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama atas *Corporate Governance* Buku 6 (Kode Etik).

Prinsip Kode Etik

1. **Komitmen dan Keteladanan Pemimpin**
Komitmen dari pemimpin dicerminkan dari kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik melalui Surat Pernyataan Kode Etik. Di samping itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga menjadi teladan bagi seluruh Insan BRILiaN dalam mempedomani serta mengimplementasikan Kode Etik.
2. **Transparansi**
Prinsip Transparansi tercermin dari keterbukaan dan publikasi yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan, implementasi dan pelanggaran Kode Etik yang terjadi di BRI sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban
Tanggung jawab BRI sebagai Bank atas implementasi Kode Etik antara lain dicerminkan dari hubungan BRI dengan nasabah, pesaing, mitra kerja, regulator, *stakeholder* serta masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab untuk mematuhi Kode Etik bagi Insan BRI terdokumentasi dalam Surat Pernyataan Kode Etik serta penerapan perilaku yang sesuai dengan Kode Etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Pengendalian
Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dilaporkan melalui sarana pelaporan *Whistleblowing System* (WBS). Apabila berdasarkan hasil investigasi pelanggaran Kode Etik tersebut terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Disiplin BRI.
5. Pengawasan
Terhadap implementasi kebijakan Kode Etik di BRI dilakukan Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan Kode Etik di BRI telah dipahami oleh Insan BRI serta diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat selalu menjadi pedoman bagi Insan BRI. Kebijakan Kode Etik juga senantiasa dilakukan perbaikan sesuai dengan kondisi terkini

Pokok-Pokok Kode Etik

Penerapan Kode Etik Perusahaan dibagi menjadi Kode Etik Bank dan Kode Etik Insan BRI. Elemen Kode Etik Bank adalah sebagai berikut:

<p>1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Regulator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan regulator yang berlaku dalam segala aktivitas bisnis Bank. Ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan bisnis Bank adalah peraturan perundang yang berlaku bagi Bank baik peraturan di bidang perbankan, pasar modal, perseroan terbatas, BUMN, Keuangan Negara maupun ketentuan dan kebijakan regulator lainnya. 2. Kepatuhan terhadap ketentuan <ol style="list-style-type: none"> a. Bank berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. b. Bank bertanggung jawab sepenuhnya atas laporan, informasi dan/atau tanggapan atas permintaan penjelasan dari regulator. 3. Bank berkomitmen untuk menerapkan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<p>2. Hubungan Bank dengan Insan BRI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlakuan yang setara untuk seluruh pekerja <ol style="list-style-type: none"> a. Bank senantiasa memperlakukan setiap pekerja secara obyektif, transparan, adil dan setara. b. Bank senantiasa menyediakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas kerja. 2. Pengembangan bakat pekerja Bank senantiasa menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan bakat pekerja dengan tujuan dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja pekerja. 3. Mengutamakan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja Bank senantiasa menyediakan lingkungan kerja sesuai dengan nilai-nilai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4. Bank mendukung terwujudnya hubungan baik antar pekerja Bank berkomitmen memfasilitasi terbentuknya hubungan yang baik antara sesama pekerja antara lain melalui kebijakan tentang berperilaku saling menghargai di tempat kerja (<i>Respectful Workplace Policy</i>), implementasi BRI <i>One Culture</i> dan pelaksanaan BRILiAN <i>Improvement Forum</i> (BIF). 5. Bank menyediakan tempat kerja yang mendukung <i>Respectful Workplace Policy</i> Bank senantiasa menyediakan tempat kerja yang mendukung <i>Respectful Workplace Policy</i> guna mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam rangka menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif untuk mendorong keberlanjutan perusahaan.
<p>3. Hubungan dengan nasabah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan kebutuhan nasabah Bank berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap bank dengan menyediakan produk dan/atau jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Perlakuan yang adil kepada nasabah Bank senantiasa memberikan perlakuan yang adil kepada nasabah dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Disamping itu, dalam berhubungan dengan nasabah, bank senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia. 3. Memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah Bank senantiasa memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah dengan memahami kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank. Di samping itu, bank menerapkan perilaku sesuai dengan market conduct yaitu menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan. 4. Keterbukaan dan transparansi informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dalam komunikasi dengan nasabah Bank berkomitmen untuk mendesain, menyusun informasi, melakukan keterbukaan serta transparansi dalam menyampaikan informasi kepada nasabah dengan mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran, dan tidak menyesatkan. Keterbukaan dan transparansi informasi dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 5. Perlindungan dan kerahasiaan terhadap data dan/atau informasi pribadi Bank berkomitmen untuk menjaga seluruh informasi terkait data nasabah dan tidak menyebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan, baik internal maupun eksternal serta menerapkan praktik perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



<p>4. Hubungan dengan Pesaing dan Mitra Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan pesaing <ol style="list-style-type: none"> a. Bank berkomitmen untuk melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan/atau jasa layanan yang berkualitas dalam menjalankan bisnis Bank. b. Bank berkomitmen senantiasa menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing. c. Bank berkomitmen menjunjung tinggi praktik anti monopoli sesuai dengan perundang-undangan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. d. Dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan, Bank memperhatikan kewajaran biaya atau harga, dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial serta persaingan sehat dalam melakukan usaha. 2. Hubungan dengan mitra kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Bank berkomitmen bahwa dalam berhubungan dengan mitra kerja didasarkan pada praktik-praktik usaha yang sah, wajar serta memberikan manfaat yang optimal bagi bank dan mitra kerja dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. b. Bank wajib melakukan evaluasi yang objektif terhadap vendor dan menghindari adanya benturan kepentingan. c. Bank senantiasa memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada Mitra Kerja yang bekerja sama dengan BRI. d. Bank senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia dalam berhubungan dengan Mitra Kerja.
<p>5. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Investor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kontribusi dan <i>value</i> yang optimal bagi pemegang saham dan investor Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi serta <i>value</i> yang optimal bagi pemegang saham dan investor. 2. Melindungi hak pemegang saham <ol style="list-style-type: none"> a. Bank senantiasa memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham untuk menggunakan hak-hak sesuai anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Bank senantiasa menghargai dan menjalankan keputusan RUPS dengan baik. c. Bank senantiasa memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemegang saham. d. Bank senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia dalam berhubungan dengan pemegang saham. 3. Transparansi dan keterbukaan informasi Bank berkomitmen untuk menyusun, menyampaikan laporan ataupun pengungkapan dengan jelas, akurat dan komprehensif kepada pemegang saham, nasabah dan <i>stakeholders</i>, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<p>6. Hubungan dengan Regulator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan regulator Bank berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik dengan regulator sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Integritas serta akurasi pelaporan dan informasi bank Bank berkomitmen untuk menghasilkan laporan Bank yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, regulator dan pihak berwenang lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<p>7. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghormati Hak Asasi Manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam berhubungan dengan stakeholder, bank senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia. b. Bank senantiasa memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada masyarakat. 2. Melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim Bank wajib menciptakan paradigma kinerja keuangan Perusahaan dengan tetap menyeimbangkan kepentingan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) yang baik untuk menghasilkan nilai tambah (<i>Value Added</i>) bagi <i>stakeholder</i> dalam jangka Panjang (<i>Sustainability</i>) dan kontribusi pada kemajuan bangsa dan kelestarian lingkungan. 3. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan Bank wajib memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang akan ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a. Bank senantiasa menjalankan dan meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan Bank dengan mendukung langkah-langkah positif yang diambil oleh masyarakat setempat serta mendorong keterlibatan Insan BRI ke dalamnya. b. Bank senantiasa mendukung program-program Pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 5. Kontribusi pada bantuan amal (<i>Charity</i>) dan <i>sponsorship</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Kontribusi Bank dalam bentuk apapun terhadap bantuan amal (<i>Charity</i>) dan <i>sponsorship</i> selalu dilakukan sesuai dengan kode etik bank serta ketentuan yang berlaku, tidak dalam kapasitas kegiatan yang mengandung politik, serta tidak dijadikan sarana suap dan korupsi. b. Kontribusi Bank pada bantuan amal (<i>Charity</i>) dan <i>sponsorship</i> wajib disampaikan kepada publik. 6. Larangan keterlibatan dalam aktivitas politik Bank berkomitmen untuk tidak memperkenankan dana, fasilitas dan sumber daya Bank untuk disumbangkan kepada dan/atau digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan politik termasuk bantuan amal (<i>charity</i>) dan <i>sponsorship</i> dalam kegiatan politik.
<p>8. Etika sebagai Kelompok Usaha (BRI Group)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi nilai perusahaan dalam grup <ol style="list-style-type: none"> a. Bank senantiasa berusaha untuk memaksimalkan potensi BRI Group. b. Dalam hal memaksimalkan potensi bisnis BRI Group, Bank wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan, ketentuan regulator dan peraturan internal. 2. Sikap saling menghormati dalam hubungan dengan BRI Group Bank senantiasa berperilaku hormat dalam menjalin hubungan dengan Entitas BRI Group. 3. Menjaga kerahasiaan informasi grup Dalam melakukan pertukaran informasi/kebijakan antara BRI Group dilakukan sesuai dengan ketentuan kerahasiaan perusahaan di Bank maupun Entitas BRI Group dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 4. Menjalinkan kerjasama dan hubungan baik dengan dengan Entitas BRI Group Bank senantiasa menjalin kerja sama dan hubungan baik melalui koordinasi yang efektif dan efisien.
<p>9. Pengendalian Gratifikasi, Anti Penyuapan dan Anti Korupsi</p>	<p>Bank berkomitmen untuk selalu melaksanakan pengendalian gratifikasi, anti penyuapan dan anti korupsi melalui Kebijakan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi serta pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).</p>

Elemen Kode Etik Insan BRI adalah sebagai berikut:

<p>1. Kepatuhan Terhadap Hukum, Kebijakan Regulator dan Kebijakan Internal Bank</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan BRI menjunjung tinggi kepatuhan bank terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal bank yang berlaku. 2. Kepatuhan terhadap ketentuan Insan BRI berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator dan Internal Bank. 3. Insan BRI senantiasa patuh terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<p>2. Kode Etik sebagai Insan BRI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan penyalahgunaan jabatan <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI wajib untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. b. Insan BRI berkomitmen untuk tidak melakukan segala bentuk perbuatan yang melanggar dan/atau bertentangan dengan fungsi, tugas dan wewenang sesuai Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan internal Bank, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat merugikan Perusahaan. 2. Mencegah benturan kepentingan <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI wajib menghindari seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. b. Insan BRI wajib melaporkan apabila terdapat dalam situasi benturan kepentingan. c. Insan BRI dilarang untuk memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas seluruh fasilitas bank yang bersifat khusus dan bertujuan untuk diri sendiri, afiliasinya dan kelompoknya. d. Insan BRI dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali telah mendapatkan penugasan atau izin tertulis dari Perusahaan. 3. Larangan insider trading <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI yang memiliki dan menerima informasi rahasia terkait perusahaan tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, afiliasi dan pihak ketiga lainnya. b. Insan BRI dilarang menyalahgunakan posisinya untuk mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya maupun orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan. 4. Melindungi aset bank <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI wajib memelihara dan melindungi seluruh aset bank (termasuk data yang dimiliki oleh bank). b. Insan BRI wajib menggunakan aset Bank hanya untuk keperluan kedinasan dan tidak menggunakan untuk keperluan Pribadi. 5. Menjaga keamanan informasi Bank dan Perusahaan Anak <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI dilarang untuk menyampaikan informasi internal Bank yang mencakup rahasia bank dan rahasia jabatan, kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Informasi internal Bank tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada informasi terkait rencana strategis bisnis Bank, hasil riset internal perbankan, pengembangan produk perbankan, data ketenagakerjaan, hasil audit, dokumen-dokumen internal serta informasi penting lainnya. b. Insan BRI wajib melindungi kerahasiaan informasi internal Bank, baik pada saat masih bekerja dengan Bank maupun setelah berhenti dari Bank atau setelah tidak berhubungan lagi dengan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Insan BRI wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank termasuk distribusi kebijakan/prosedur kepada pihak eksternal (termasuk BRI Group dan entitas perusahaan lain di luar BRI Group) sesuai ketentuan yang berlaku. d. Insan BRI berkomitmen untuk tidak mengungkapkan, melaporkan, menyebarluaskan, mentransfer, membocorkan maupun dengan cara lainnya yang menyebabkan data pribadi dan/atau informasi rahasia diketahui oleh pihak lain untuk tujuan apapun yang dapat merugikan bank dan atau tidak sejalan dengan kebijakan bank. 6. Kewajiban pelaporan atas pelanggaran Kode Etik Apabila mengetahui pelanggaran atas Kode Etik di lingkungan bank, Insan BRI wajib untuk melaporkan melalui sarana <i>whistleblowing system</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Mematuhi ketentuan dalam menggunakan media sosial Insan BRI wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di BRI dalam penggunaan media sosial. 8. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan Fraud Insan BRI berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan <i>Fraud</i> serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan <i>Fraud</i>, salah satunya melalui <i>Whistleblowing System</i> (WBS).
<p>3. Hubungan dengan nasabah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan kebutuhan nasabah <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI wajib memperhatikan serta mengutamakan kebutuhan setiap nasabah melalui hubungan yang baik kepada nasabah, dengan tetap memperhatikan kewajaran dan menghindari adanya benturan kepentingan. b. Insan BRI berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap bank dengan menyediakan produk dan/atau jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah. 2. Menghormati nasabah Insan BRI senantiasa menghormati nasabah dalam melakukan pelayanan dan selalu memberikan pelayanan prima dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 3. Perlakuan yang adil kepada nasabah Insan BRI senantiasa memberikan perlakuan dan pelayanan yang adil serta setara kepada setiap nasabah. Disamping itu, dalam berhubungan dengan nasabah, Insan BRI senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia. 4. Memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah Insan BRI senantiasa memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah dengan memahami kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank. 5. Keterbukaan dan transparansi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam komunikasi dengan nasabah Insan BRI senantiasa mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada nasabah. 6. Perlindungan dan kerahasiaan terhadap aset, data pribadi, dan transaksi nasabah <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI berkomitmen untuk menjaga seluruh informasi Bank dan tidak menyebarluaskannya kepada pihak yang tidak berkepentingan. Insan BRI diperbolehkan memberikan informasi Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BRI yang berlaku. b. Insan BRI wajib melakukan verifikasi terhadap informasi bank sebelum memberikannya kepada pihak berkepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BRI yang berlaku.



<p>4. Hubungan dengan Pesaing dan Mitra Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan pesaing <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI senantiasa melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan/atau jasa layanan yang berkualitas. b. Insan BRI senantiasa menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing. c. Insan BRI senantiasa selalu mengedepankan persaingan yang sehat dalam menjalankan bisnis Bank, baik terhadap kompetitor maupun perusahaan anak. d. Insan BRI berkomitmen menjunjung tinggi praktik anti monopoli sesuai dengan perundang-undangan terkait larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat. 2. Hubungan dengan mitra kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Mematuhi ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yang berlaku b. Insan BRI senantiasa mematuhi prosedur dan mekanisme serta ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. c. Insan BRI memastikan mitra kerja patuh terhadap kebijakan bank dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
<p>5. Hubungan Antar Sesama Pekerja termasuk dengan Pekerja BRI Group</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja (<i>Respectful Workplace Policy</i>) Insan BRI wajib mematuhi kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja (<i>Respectful Workplace Policy</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menghindari persaingan yang tidak sehat antar pekerja Insan BRI senantiasa menghindari persaingan yang tidak sehat dalam bekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 3. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam hal-hal yang positif Insan BRI senantiasa berperilaku saling membantu dan memotivasi antar pekerja serta bekerja sama dalam hal-hal yang positif.
<p>6. Hubungan dengan Regulator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan regulator Insan BRI berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik dengan regulator berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 2. Integritas serta akurasi Pelaporan dan informasi Bank <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI berkomitmen untuk menghasilkan laporan Bank yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham, nasabah dan <i>stakeholder</i>. b. Insan BRI bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan resmi mengenai kegiatan Bank secara akurat, jujur, lengkap dan tepat waktu.
<p>7. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghormati Hak Asasi Manusia Dalam berhubungan dengan masyarakat, Insan BRI senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia. 2. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan Insan BRI wajib memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang akan ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI senantiasa terlibat dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan Bank dengan mendukung langkah-langkah positif yang diambil oleh masyarakat setempat. b. Insan BRI senantiasa mendukung program-program Pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Larangan keterlibatan dalam aktivitas politik Insan BRI menjunjung tinggi etika untuk tidak mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya pribadinya bagi aktivitas politik sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Berpartisipasi terhadap pemilihan calon legislatif, calon eksekutif, anggota partai politik, ataupun berhubungan dan ikut serta di dalam suatu organisasi dan/atau individu yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada partai politik atau kandidat. b. Ikut serta dalam kampanye politik, penggalangan dana politik atau untuk tujuan partisipasi politik. c. Melakukan kegiatan partai politik atau kegiatan sejenis lainnya.
<p>8. Pengendalian Gratifikasi, Anti Penyuapan dan Anti Korupsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan BRI dan/atau keluarganya wajib menolak dan dilarang menerima gratifikasi dari pihak manapun yang memiliki hubungan dengan jabatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta yang bersifat menyimpang dari ketentuan BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Insan BRI dan/atau keluarganya dilarang memberi dan atau menawarkan gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai yang bersifat menyimpang dari ketentuan BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Larangan menerima hadiah <ol style="list-style-type: none"> a. Insan BRI menjunjung tinggi etika untuk tidak meminta atau menerima hadiah atau imbalan apapun untuk memperkaya diri pribadi maupun keluarganya. b. Insan BRI dilarang menawarkan, menjanjikan, memberikan keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), kepada Penyelenggara Negara dan atau Pegawai Negeri, baik secara langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, sebagai bujukan atau hadiah untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri tersebut; dan c. Insan BRI dilarang memberi atau menawarkan hadiah, kemurahan hati, donasi politik atau amal, sponsor dan keuntungan lain yang dapat dipersepsikan oleh pihak lain sebagai penyuapan meskipun pemberian atau penerimaan tidak dimaksudkan untuk tujuan penyuapan.

Komitmen Terhadap Kode Etik

Seluruh Insan BRI yaitu, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh Insan BRI wajib membuat Surat Pernyataan Kode Etik setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen dalam kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan. Surat Pernyataan Kode Etik merupakan syarat keberlanjutan hubungan kerja dengan Perseroan.

Sosialisasi Kode Etik

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Insan BRI akan Kode Etik Perusahaan, BRI melakukan komunikasi kebijakan Kode Etik kepada seluruh Insan BRI antara lain melalui:

1. *Website* Perseroan.
2. *Landing Page* pada aplikasi BRISTARS.
3. Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Perseroan dengan Manajemen Perseroan.
4. Poster, video dan media *advertising* lain pada kantor Perseroan.

Media Konsultasi Kode Etik

Konsultasi berupa pertanyaan mengenai penerapan Kode Etik dapat dilakukan melalui sarana *E-mail* ke alamat: kode-etik@corp.bri.co.id

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Dalam upaya penegakan kode etik di perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Seluruh Pekerja BRI memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis Bank dengan menerapkan etika dalam sistem perbankan. Wujud komitmen tersebut dilakukan dalam:

1. Surat Pernyataan Kode Etik
Seluruh Insan BRI wajib mengetahui dan memahami dengan baik serta menyatakan "Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik" setiap tahun.
2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI
Komitmen manajemen dan seluruh Pekerja untuk tidak menerima dan memberi gratifikasi dalam bentuk uang dan/atau barang yang berhubungan dengan kewajiban atau tanggung jawabnya yang dipublikasikan pada media massa dan *website* Perseroan
3. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan
Seluruh Insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tidak memiliki benturan kepentingan setiap tahun, serta seluruh unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap bulan.
4. Pakta Integritas
Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh panitia pengadaan, unit kerja *user*, *vendor* atau rekanan pada seluruh proses pengadaan barang dan jasa di BRI. Selain itu, setiap tahun Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani GCG *Statement* sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sedangkan seluruh pekerja menandatangani komitmen Anti *Fraud* dan Pengendalian Gratifikasi pada BRILiaN *Improvement Forum* yang diselenggarakan setiap tahun.

5. Whistleblowing System

Seluruh pelanggaran terhadap kode etik BRI dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Apabila berdasarkan hasil investigasi pelanggaran Kode Etik tersebut terbukti, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pelanggaran disiplin BRI.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Kategori Sanksi
Pemutusan Hubungan Kerja
Peringatan Tertulis
Teguran Tertulis
Turun Jabatan 1 Grade
Turun Jabatan 2 Grade

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Jumlah pelanggaran internal yang terjadi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Pelanggaran Internal	Jumlah Pelanggaran		
	Pekerja Tetap	Non Pekerja Tetap	
		Kontrak	Outsourcing
Telah Diselesaikan	1.953	124	74
Dalam Proses Penyelesaian	2.315	41	22
Total	4.268	165	96

Selama tahun 2023, pelanggaran internal yang telah selesai diproses sebanyak 1.209. Adapun rincian sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut.

Kategori Sanksi	Jumlah	
	Pekerja Tetap	Non Pekerja Tetap
Pemutusan Hubungan Kerja	58	198
Peringatan Tertulis	534	-
Teguran Tertulis	305	-
Turun Jabatan 1 Grade	241	-
Turun Jabatan 2 Grade	71	-
Grand Total	1.209	198



Whistleblowing System

Dalam meningkatkan implementasi penerapan *Good Corporate Governance* di BRI, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan kode etik dan *corporate culture*. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Insan BRI, manajemen telah menyediakan media pelaporan yang dikelola secara transparan dan adil yaitu melalui *Whistleblowing System*.

Kebijakan *Whistleblowing System* BRI telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal *Corporate Governance* Buku 2 tentang *Whistleblowing System* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

Dalam rangka mempertahankan kualitas pengelolaan *Whistleblowing System*, BRI melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi penerapan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan korupsi.
2. Pengkinian struktur pengelolaan serta evaluasi penerapan *Whistleblowing System* BRI sesuai dengan kondisi terkini.
3. Diseminasi materi komunikasi terkait *Whistleblowing System*, baik ke pekerja, *vendor*, maupun nasabah.
4. Evaluasi pemahaman pekerja terkait *Whistleblowing System* melalui *e-learning* atau *e-survey*.
5. Pendidikan tersertifikasi kepada pekerja yang terlibat dalam pengelolaan WBS yaitu Pelatihan Pembelajaran Interaktif Untuk Pengelolaan *Whistleblowing System* Yang Berintegritas (PELUIT INTEGRITAS)

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Sarana pelaporan *Whistleblowing System* dapat dilaporkan melalui:

1. SMS: 08118200600
2. Whatsapp: 08118200600
3. Surat Tertulis: PO BOX 1895 JKP 10900
4. *Webmail*: whistleblower@corp.bri.co.id
5. *Website*: <https://whistleblowing-system.bri.co.id>

Reward & Punishment

BRI menyadari secara penuh akan pentingnya implementasi *whistleblowing system* dalam pencegahan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. Untuk itu, BRI memberikan apresiasi kepada pekerja yang memberanikan diri untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi melalui *whistleblowing system*.

Seluruh laporan *whistleblowing system* yang diterima akan ditindaklanjuti secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam

proses pengelolaan laporan *whistleblowing system*, baik berupa pembocoran identitas pelapor maupun penyampaian laporan palsu, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Sebagaimana diatur dalam kebijakan internal perusahaan, BRI berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan, pelapor dapat memilih untuk membuat laporan secara anonim. Pemberian perlindungan juga diberikan kepada pelapor yang berasal dari internal perusahaan (pekerja perusahaan) dari adanya ancaman pembalasan dari pihak terlapor berupa tekanan dari atasan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan dan mutasi sepihak. Di samping itu, BRI juga memberikan perlindungan berupa bantuan hukum kepada pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Whistleblowing System

1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana *Whistleblowing System*.
2. Pelapor yang menyampaikan laporan indikasi pelanggaran memperoleh kode laporan dan kata kunci untuk melihat proses tindak lanjut laporan pada *website whistleblowing system* (www.whistleblowing-system.bri.co.id).
3. Pelapor yang menyampaikan indikasi pelanggaran melalui sarana selain *website* (SMS,Whatsapp, Surat dan Email), maka Petugas *Whistleblowing System* (WBS) memberikan kode laporan dan kata kunci kepada Pelapor yang menyampaikan identitas diri atau surel.
4. Petugas *Whistleblowing System* mencatat seluruh laporan indikasi pelanggaran pada aplikasi *whistleblowing system*.
5. Petugas WBS melakukan analisa awal (verifikasi) laporan indikasi pelanggaran sesuai kriteria laporan *whistleblowing system*.
6. Apabila diperlukan, Petugas WBS dapat meminta informasi tambahan dan konfirmasi kepada Pelapor dalam memenuhi informasi dan data laporan.
7. Pemimpin Unit Pengelola WBS melakukan validasi terhadap hasil verifikasi laporan indikasi pelanggaran dan memutuskan tindak lanjut laporan yaitu:
 - a. Menindaklanjuti untuk dilakukan investigasi; atau
 - b. Tidak dilakukan tindak lanjut (laporan ditolak) karena tidak sesuai kriteria laporan WBS.
8. Unit Pengelola WBS menunjuk Unit Kerja Investigasi untuk melakukan investigasi laporan WBS.
9. Unit Pengelola WBS membuat surat penugasan dan menyampaikan surat tugas kepada Unit Kerja Investigasi.
10. Unit Kerja Investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi (termasuk rekomendasi atas tindak lanjut perbaikan) apabila:
 - a. Investigasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Laporan investigasi disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit kepada Unit Kerja berwenang dengan tindakan Unit Pengelola WBS. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan hasil investigasi dilakukan oleh Unit Kerja Investigasi.

- b. Investigasi dilakukan oleh konsultan atau pihak independen. Laporan hasil investigasi disampaikan kepada Unit Pengelola WBS. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan hasil investigasi dilakukan oleh Unit Pengelola WBS.
11. Laporan tindak lanjut perbaikan diantaranya memuat:
- a. Tindak lanjut terhadap pelaku indikasi pelanggaran dan perbaikan terhadap kelemahan yang terjadi serta mitigasi risiko yang dilakukan.
 - b. Memberikan informasi kepada atasan terlapor dalam rangka menjaga nama baik terlapor apabila laporan WBS tidak terbukti.
12. Unit kerja berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Unit kerja berwenang menyampaikan laporan tindak lanjut perbaikan kepada Unit Pengelola WBS.

Alur Penyampaian Whistleblowing System



Alur Mekanisme Pelaporan Whistleblowing System (WBS)





Kriteria Indikasi Pelanggaran

Informasi pelaporan indikasi pelanggaran yang dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) yaitu:

1. *Fraud*;
2. Gratifikasi atau menerima dan/atau pemberi suap;
3. Pelanggaran Etika;
4. Pelanggaran Kode Etik (termasuk didalamnya pelanggaran ketentuan, dll);
5. Pelanggaran terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan BRI;
6. Indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BRI, Anggota Direksi BRI, SEVP dan Anggota Dewan Komisaris/Direksi Entitas Anak.

Kelengkapan Laporan *Whistleblowing System*

Laporan indikasi pelanggaran paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang Dilaporkan
Pokok pelaporan/informasi pelanggaran yang terjadi disertai perkiraan jumlah kerugian (apabila diketahui).
2. Pihak yang Terlibat
BRI maupun seluruh pihak yang diketahui terlibat melakukan indikasi pelanggaran yang dilaporkan.
3. Waktu Terjadinya Pelanggaran
Periode waktu terjadinya indikasi pelanggaran.
4. Tempat Terjadinya Pelanggaran
Lokasi/tempat unit kerja terjadinya pelanggaran.
5. Kronologi Kejadian
Deskripsi peristiwa/kronologi kejadian indikasi pelanggaran.
6. Bukti Pelanggaran
Dokumentasi terjadinya indikasi pelanggaran berupa dokumen, foto, video, dan informasi pendukung lainnya.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Pengelolaan laporan *Whistleblowing System* dilakukan oleh Unit Pengelola WBS yang berada di bawah Direktur Utama dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Unit Pengelola WBS yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran.

Independensi Pengelolaan *Whistleblowing System*

Dalam menjaga independensi dan kerahasiaan dalam penerapan *Whistleblowing System*, Unit Kerja yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran wajib untuk:

1. Patuh terhadap kode etik BRI yang dibuktikan dengan penandatanganan pernyataan kode etik dan pakta integritas.

2. Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, informasi dan dokumen atas laporan indikasi pelanggaran.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam tindak lanjut terhadap seluruh laporan indikasi pelanggaran.
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam tindak lanjut laporan indikasi pelanggaran.
5. Melakukan pencatatan dan pengkinian terhadap seluruh aktivitas dalam tindak lanjut laporan indikasi pelanggaran *whistleblowing system*.
6. Menatakerjakan seluruh data dan dokumen laporan *whistleblowing system* dan disimpan ditempat yang aman.
7. Dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan maka unit kerja yang ditunjuk harus mengedepankan independensi dan kerahasiaan laporan dan pelapor WBS.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Pelaksanaan sosialisasi WBS BRI telah dilakukan kepada Pihak Internal (Pekerja BRI) dan Eksternal diantaranya:

1. Menyampaikan kebijakan WBS yang dapat oleh seluruh pekerja melalui portal internal BRI.
2. Menyampaikan materi WBS pada *program development* dan *enhancement* Pekerja BRI.
3. Sosialisasi WBS ke Unit Kerja melalui materi komunikasi yang efektif.
4. Memasang *message from CEO* pada *landing page* aplikasi Bristars (portal internal BRI).
5. Melaksanakan *e-learning* WBS untuk seluruh pekerja BRI.
6. Penyampaian informasi WBS melalui *website* Perseroan.



Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Selama tahun 2023 diterima 30 (tiga puluh) laporan pengaduan pelanggaran (WBS) yang memuat 50 (lima puluh) sub indikasi pelanggaran, adapun tren perkembangan laporan WBS 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	2021	2022	2023
Jumlah pengaduan	54	56	30
Sub Indikasi Pelanggaran	116	107	50

Berdasarkan data tersebut, sub indikasi pelanggaran yang paling banyak dilaporkan dan terbukti pada tahun 2023 adalah pelanggaran ketentuan/prosedur dan kecurangan (*fraud*) sebagaimana data berikut:

Indikasi Pelanggaran	Pengaduan Diterima	Status		
		Terbukti	Tidak Terbukti	Dalam Proses
<i>Fraud</i>	19	12	6	1
Gratifikasi atau Menerima dan/atau Pemberi Suap	6	3	3	
Pelanggaran Etika	6	4	1	1
Pelanggaran Kode Etik (Termasuk Di dalamnya Pelanggaran Ketentuan dan lainnya)	19	9	6	4

Media pelaporan WBS yang paling banyak digunakan selama tahun 2023 adalah melalui whatsapp sejumlah 12 (dua belas) pelaporan (40%), *e-mail* sebanyak 8 (delapan) pelaporan (30%), *website* sebanyak 8 (delapan) pelaporan (27%). Tren Penggunaan media pelaporan WBS selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Media Pelaporan	2021	2022	2023
Email	10	19	9
SMS	5	3	0
Surat	1	1	1
<i>Website</i>	30	18	8
Whatsapp	8	15	12

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2023

Keterangan/Jenis Sanksi	Jumlah
Tidak Cukup Bukti	2
Surat Pembinaan	15
Peringatan Tertulis	4
Teguran tertulis	4
Turun Jabatan 2 Golongan Jabatan	1
Pemutusan Hubungan Kerja	2
Total	28

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi

BRI menjaga kualitas penerapan pengendalian dan pengelolaan gratifikasi melalui sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. BRI telah memiliki Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang bertugas untuk mengawal dan memastikan Sistem Anti Penyuapan berjalan sesuai standar ISO 37001:2016. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan diatur di dalam Surat Edaran Direksi Kebijakan *Corporate Governance* nomor SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 Buku 3 tentang Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi.

Strategi Anti *Fraud*

Strategi anti *Fraud* merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di Bank, dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern. Penerapan strategi anti *Fraud* BRI memuat 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi.
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.



PENCEGAHAN

Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

1. Kesadaran Anti *Fraud*
Kesadaran anti *Fraud* yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*. Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud*
 - b. Program Budaya Anti *Fraud* bagi Pegawai
 - c. Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Nasabah
2. Identifikasi Kerawanan
Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam hal terdapat indikasi *Fraud*.
3. Kebijakan Mengenal Pegawai
Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, Bank menerapkan kebijakan mengenai pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM.

DETEKSI

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup:

1. Kebijakan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*)
2. Pemeriksaan Dadakan (*Surprised Audit*)
3. Sistem Pengawasan

INVESTIGASI, PELAPORAN, DAN SANKSI

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan peneraan sanksi terhadap kejadian *Fraud*, yang mencakup:

1. Investigasi
Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi selalu diproses sesuai standar investigasi dan pelaku diproses sesuai ketentuan.
2. Pelaporan
Bank menyusun mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *Fraud* yang ditemukan.

3. Peneraan Sanksi

Bank menyusun kebijakan peneraan sanksi secara intern yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku *Fraud*

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, paling sedikit mencakup:

1. Pemantauan
Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* yaitu memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap *Fraud*, baik sesuai ketentuan intern Bank maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Evaluasi
Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank memelihara data kejadian *Fraud*. Data kejadian dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* dilakukan secara berkala.
3. Tindak lanjut
Bank menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

Untuk mendukung efektivitas peneraan strategi anti *Fraud*, Perseroan membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani peneraan strategi anti *Fraud* dalam organisasi, dalam hal ini dikelola oleh *Operational Risk Division* yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi merupakan satu-satunya Unit Kerja yang bertugas dalam melakukan pengelolaan pengendalian gratifikasi di BRI. Unit Pengendalian Gratifikasi sendiri merupakan suatu unit atau fungsi di lingkungan BRI yang menjalankan fungsi pengendalian praktik penerimaan maupun pemberian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi di BRI dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibentuk pada tahun 2017 dan melekat pada Satuan Kerja Kepatuhan BRI, yaitu *Compliance Division* BRI.

Unit Pengendalian Gratifikasi di *Compliance Division* memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

1. Menyusun ketentuan pengendalian gratifikasi.
2. Melakukan sosialisasi ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BRI.

3. Melakukan pengelolaan laporan gratifikasi berupa menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi Insan BRI.
4. Menjadi admin aplikasi GCG *Online System* dan Gratifikasi *Online* KPK.
5. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui sistem gratifikasi *online*.
6. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status terhadap barang gratifikasi dimaksud.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengendalian gratifikasi.
8. Melakukan identifikasi titik rawan dan mitigasi risiko gratifikasi.
9. Menginisiasi terobosan dalam pengendalian gratifikasi di BRI
10. Menyampaikan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi kepada Direksi yang paling sedikit memuat hal-hal antara lain : Rencana dan atau hasil Diseminasi Program Pengendalian Gratifikasi serta hasil evaluasi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi.
11. Memastikan tindak lanjut atas laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi telah sesuai dengan ketentuan.
12. Memberikan persetujuan surat penetapan kepemilikan barang gratifikasi.
13. Meminta data dan informasi kepada Unit Kerja berkaitan dengan pemantauan Program Pengendalian Gratifikasi di tingkat unit kerja operasional.
14. Berkoordinasi dengan Audit Internal apabila terdapat pelanggaran kode etik atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPG
15. Memberikan konsultasi berupa saran dan rekomendasi kepada Insan BRI terkait dengan pengendalian gratifikasi di BRI.

Regional *Risk Management & Compliance* sebagai fungsi pendukung dalam aktivitas pengendalian gratifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

1. Menjalankan program-program pengendalian gratifikasi yang disusun oleh *Compliance Division*.
2. Melakukan *monitoring* terhadap kepatuhan pelaporan gratifikasi di Regional Offices dan Unit Kerja Supervisinya melalui GCG *Online System* 2.0
3. Melakukan sosialisasi ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BRI di Regional Offices.

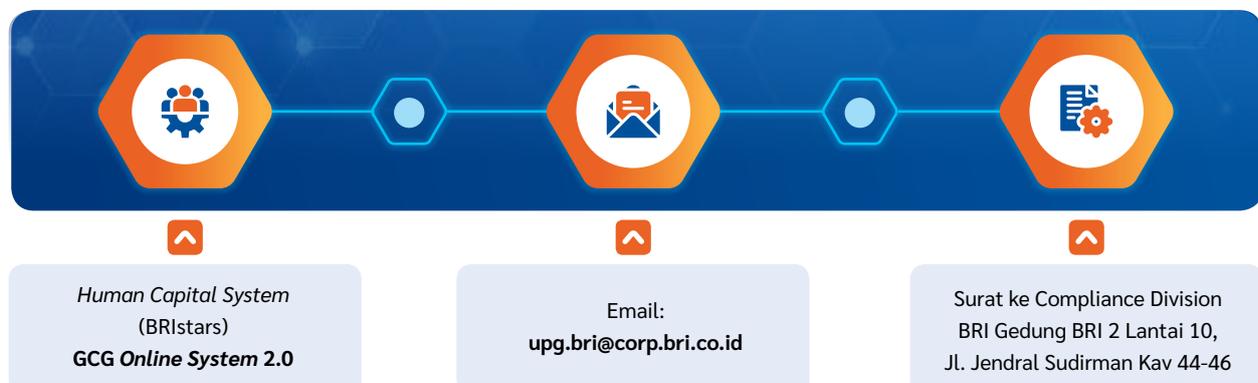
Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi di *Compliance Division* merupakan satu-satunya pengelola pelaporan gratifikasi di BRI yang untuk selanjutnya melakukan analisa dan administrasi terhadap Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh pekerja BRI. Sesuai dengan kebijakan BRI terkait dengan Gratifikasi, terdapat dua jenis gratifikasi yaitu:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan
Penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan BRI berdasarkan/terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah pemberian yang diterima oleh Insan BRI, tidak terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

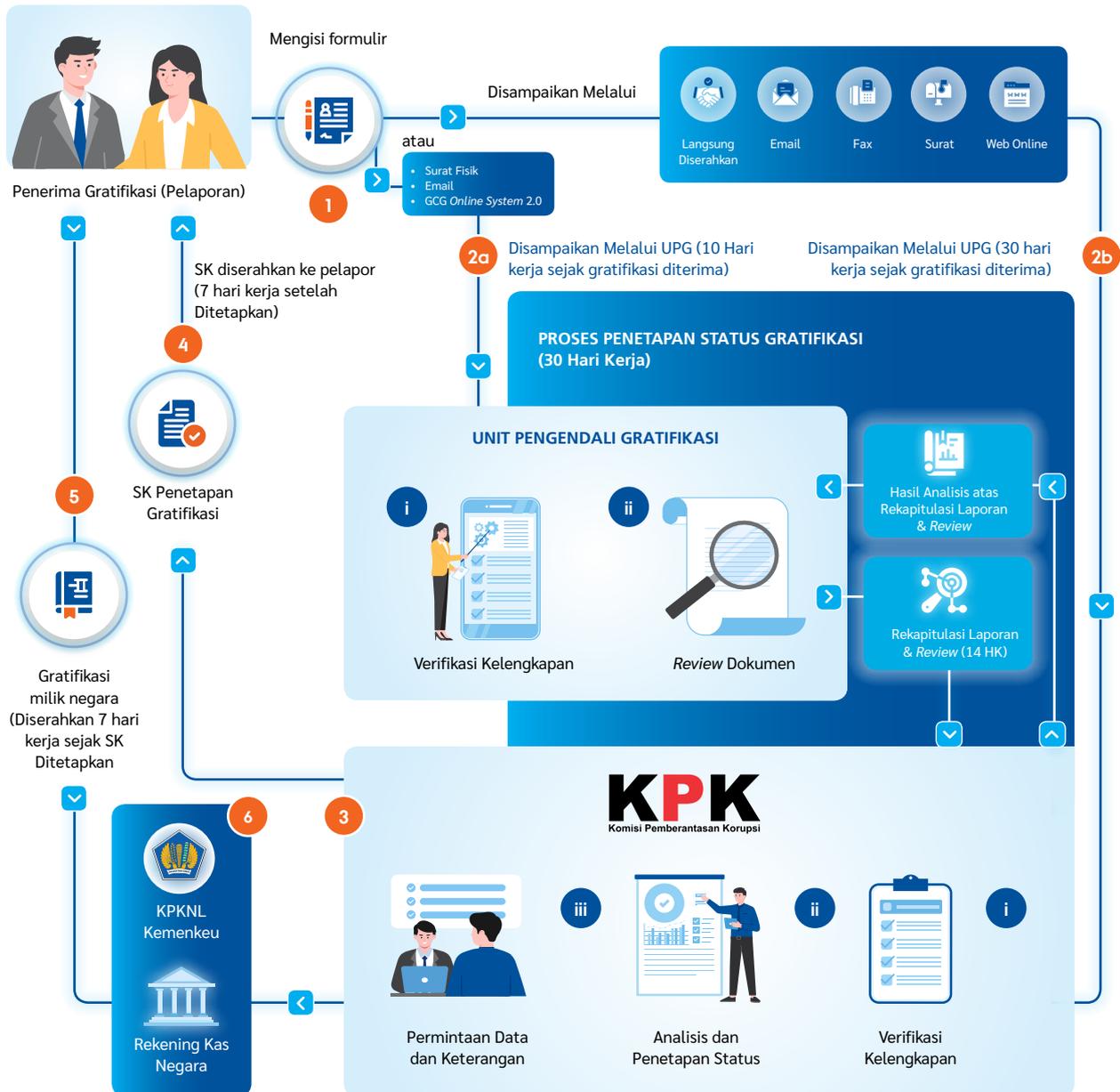
Dalam melakukan pelaporan gratifikasi, seluruh Insan BRI wajib melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi BRI melalui media pelaporan yang telah disediakan yaitu GCG *online system* 2.0





Penjelasan mekanisme pelaporan gratifikasi adalah sebagai berikut.

Mekanisme Penanganan Pelaporan Gratifikasi



Penerapan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, BRI telah menjalankan program-program pengendalian gratifikasi antara lain yaitu:

Komitmen Pengendalian Gratifikasi

1. Penandatanganan komitmen anti gratifikasi dalam pernyataan kode etik yang dilakukan oleh Insan BRI baik Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja BRI di seluruh Indonesia.
2. *Self Assessment* anti penyuapan yang dilakukan oleh seluruh pekerja BRI Selindo dalam rangka pemetaan titik rawan gratifikasi.
3. Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan barang dan jasa BRI serta vendor/rekanan BRI untuk menjaga integritas dan independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pengkinian Kebijakan Gratifikasi

Pada tahun 2023 BRI telah melakukan pengkinian kebijakan gratifikasi yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Direksi nomor SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diganti dengan Surat Edaran Direksi Kebijakan *Corporate Governance* nomor SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 Buku 3 tentang Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi.

Laporan Gratifikasi Tahun 2023

Adapun sebagai bentuk dukungan pekerja terhadap program pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan, laporan gratifikasi yang telah disampaikan oleh pekerja BRI kepada UPG BRI selama tahun 2023 sebanyak 61 laporan. Adapun, terdapat 10 laporan yang diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai laporan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sedangkan, 51 laporan lainnya termasuk dalam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Pekerja

Beberapa bentuk aktivitas, program pendidikan, dan sosialisasi yang telah dilakukan UPG BRI selama tahun 2023, antara lain:

1. Pelaksanaan *self learning* Anti Penyuapan dan Gratifikasi bagi seluruh pekerja BRI secara *online* melalui BRISMART (Media pembelajaran *online* BRI).
2. Penyampaian materi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan melalui Program Pendidikan BRILiaN *Specialist Development Program* (BSDP) bagi jajaran *Regional Risk Management Team* seluruh unit kerja.
3. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan kepada Divisi di Kantor Pusat.
4. Penyampaian materi komunikasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan di *Landing Page* pada halaman utama BRISTars.
5. Pelaksanaan Webinar bersama dengan KPK RI bertemakan “Membangun Budaya Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BUMN”.
6. Sertifikasi *awareness* ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada pekerja Divisi yang menjadi lingkup Sertifikasi ISO.





Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BRI juga mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan

- Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN
Sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan transparansi, pencegahan korupsi dan mendukung budaya bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, anggota Komisaris, Direksi, SEVP, EVP dan VP di BRI wajib untuk melaporkan harta kekayaan sesuai dalam ketentuan internal perusahaan yang diatur pada Surat Edaran Direksi BRI No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* Buku 5 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data yang dilaporkan dalam laporan tersebut meliputi posisi harta kekayaan sebelum saat dan setelah selesai menjabat. Ketentuan pelaporan tersebut senantiasa diperbaharui agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- Koordinator Pelaporan LHKPN
Koordinator pelaporan yang ditunjuk oleh BRI untuk mengelola dan memonitor proses pelaporan LHKPN adalah Kepala Bidang Kesekretariatan dan Protokol dan Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan *Human Capital*. Berdasarkan struktur organisasi saat ini, terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) Wajib Lapor LHKPN yang wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Dari seluruh pejabat tersebut, mayoritas telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan kewajiban pelaporan pada LHKPN.

Pelaporan LHKPN

BRI telah menyampaikan laporan LHKPN untuk periode laporan tahun 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023 sebagai berikut.

Kewajiban	Jabatan	Satuan	2023
Wajib LHKPN	Dewan Komisaris	Orang	11
	Direksi	Orang	12
	Orang BRI	Orang	105
Wajib LKHPN yang telah melaporkan	Dewan Komisaris	Orang	11
		%	100
	Direksi	Orang	12
		%	100
	Orang BRI	Orang	105
		%	100
Wajib LKHPN yang belum melaporkan	Dewan Komisaris	Orang	0
		%	0
	Direksi	Orang	0
		%	0
	Orang BRI	Orang	0
		%	0

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah <i>fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Total <i>Fraud</i>	-	-	468	169	16	4
Telah Diselesaikan	-	-	459	79	10	3

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah <i>fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	16	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	4	65	-	1
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	5	9	6	8

Keterangan:

Internal Fraud dengan nilai lebih dari Rp100 Juta.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian dana kegiatan sosial BRI telah disajikan pada Laporan Keberlanjutan. Selama tahun 2023, BRI tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal kode etik BRI.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Buyback Saham

Kebijakan Dalam Pelaksanaan *Buyback*

Sebagai upaya strategi pengelolaan permodalan Perusahaan yang optimal, bentuk komitmen untuk meningkatkan *value* kepada Pemegang Saham, serta sejalan dengan strategi Perusahaan dalam meningkatkan *engagement* Pekerja melalui Program Kepemilikan Saham oleh Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris, BRI telah melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*) dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Perseroan telah melaksanakan *Buyback* pada tahun 2015 dan tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Perseroan telah mengalihkan seluruh saham yang diperoleh dari *Buyback* tahun 2015 dan sebagian saham yang diperoleh dari *Buyback* tahun 2020 melalui program kepemilikan saham

Pekerja. Pada tahun 2022 Perseroan melaksanakan *Buyback* dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023. Saham hasil *Buyback* tahun 2022 sebagian telah dialihkan untuk program kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan bagian dari remunerasi variabel Direksi dan Dewan Komisaris (insentif tahunan, insentif jangka panjang dan/atau insentif lainnya yang dibayarkan dalam bentuk saham).

Pada tahun 2023 Perseroan melaksanakan *Buyback* dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 yang akan diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham. Perseroan secara bertahap akan melaksanakan pengalihan seluruh sisa saham hasil *Buyback* (*Treasury Stock*) melalui Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris (Program Kepemilikan Saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buyback dilaksanakan oleh Perseroan sebagai (i) upaya pengelolaan permodalan yang optimal; (ii) bentuk komitmen untuk meningkatkan *value* kepada Pemegang Saham; serta (iii) upaya peningkatan *engagement* Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris untuk mencapai target kinerja jangka panjang Perseroan melalui Program Kepemilikan Saham.

Harga Pembelian Kembali dan Jumlah Lembar Saham yang Dibeli Kembali

Pada bulan September hingga Desember 2023, BRI telah melakukan *Buyback* sebanyak 118.833.600 lembar dengan rata-rata harga perolehan sebesar Rp5.264,13. Sehingga per tanggal 31 Desember 2023, total saham treasury yang dimiliki oleh BRI sebanyak 768.144.900 lembar saham.



Peningkatan Laba Per Lembar Saham

Keterangan	Jumlah Lembar Saham
Treasury Stock sampai dengan 30 Juni 2023	656,253,400
Pengalihan Treasury Stock sampai dengan 31 Desember 2023	(6,942,100)
Tambahan Treasury Stock (Hasil Buyback) sampai dengan 31 Desember 2023	118,833,600
Total Treasury Stock	768,144,900
Jumlah Saham Beredar	151,559,001,604
Jumlah Saham Beredar di luar Treasury Stock (Lbs) per 30 Juni 2023	150,902,748,204
Jumlah Saham Beredar di luar Treasury Stock (Lbs) per 31 Desember 2023	150,790,856,704

Keterangan	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Laba bersih yang Diatribusikan untuk Induk (Audited Consolidation Desember 2023) (Rp Miliar)	60.100	-	60.100
EPS (Treasury Stock 31 Desember 2023) (Rp)	398.26	0,07	398.33

Pelaksanaan *Buyback* berdampak pada kenaikan EPS dari Rp398,26 menjadi Rp398,33.

Buyback Obligasi

Selama tahun 2023, tidak terdapat *buyback* obligasi.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2023 tidak ada perselisihan internal antar pekerja yang terjadi.

Rencana Strategis Bank

Informasi terkait Rencana Strategis Bank telah disajikan pada Sub Bab Strategi Bank pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada pihak terkait	643	16.238.267
2.	Kepada debitur inti:		
	a. Individu	50	130.408.842
	b. Grup	50	178.925.740

Informasi lebih rinci terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah disajikan pada Sub Bab Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi/situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimiliki BRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif. Bank BRI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 1 terkait Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)). Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan adalah:

1. Mengutamakan kepentingan publik.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menanggapi benturan kepentingan.

Laporan Transaksi Benturan Kepentingan 2023

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*)Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Insider Trading merupakan perdagangan saham perusahaan atau surat berharga lainnya (obligasi atau opsi saham) yang dilakukan individu perusahaan yang memiliki akses informasi non publik terhadap perusahaan. Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur kegiatan *insider trading* bagi seluruh insan BRI. Kebijakan *insider trading* tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 1 terkait Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)) dan Surat Edaran Direksi No. SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama Atas *Corporate Governance* (Buku 6 terkait Kode Etik).

Kebijakan terkait kegiatan *insider trading* mengatur bahwa:

1. Setiap insan BRI harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau

Komitmen

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan BRI berkomitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Sebagai wujud komitmen insan BRI dalam implementasi kebijakan dan pengungkapan benturan kepentingan diantaranya:

1. Seluruh insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclosure*) tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan perilaku yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Setiap unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan.

Sosialisasi

BRI senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan GCG dan benturan kepentingan kepada pekerja BRI melalui program pendidikan, *In House Training* dan pembelajaran secara *online*, dan pernyataan benturan kepentingan yang dibuat oleh masing-masing pekerja BRI.

informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.

2. Seluruh insan BRI tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan.
3. Seluruh insan BRI dilarang melakukan segala aktivitas yang terkait dengan *insider trading* yang merujuk pada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan/aksi korporasi yang dipublikasikan.
4. Pelanggaran terhadap kegiatan di atas akan dikenakan sanksi disiplin sesuai yang berlaku di BRI.

Dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, seluruh insan BRI diwajibkan membuat pernyataan tahunan



(*Annual Disclosure*) diantaranya pengungkapan terhadap transaksi *insider trading* yang dilakukan oleh insan BRI. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat *insider trading*.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank BRI secara transparan melakukan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan dan melaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi kondisi keuangan dan non keuangan disampaikan kepada publik baik melalui media cetak atau situs perusahaan (www.bri.co.id/laporan) sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada situs perusahaan.
2. Laporan Keuangan Triwulan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
3. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
4. Informasi tata kelola perusahaan meliputi:
 - a. Visi dan Misi Perusahaan
 - b. Komposisi dan profil Dewan Komisaris
 - c. Komposisi dan profil Direksi
 - d. Penerapan Tata Kelola BRI
5. Transparansi informasi produk Bank yang disampaikan melalui media cetak, elektronik, dan situs perusahaan.

Pengadaan Barang dan Jasa

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait Pengelolaan Vendor BRI sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor

SE.18-DIR/PLM/05/2023 perihal Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Buku 11). Saat ini BRI mengembangkan aplikasi *Vendor Management System* yang terintegrasi dengan aplikasi BRISMILE, dimana dalam aplikasi tersebut mencakup proses pendaftaran dan seleksi calon vendor, *monitoring*, pemeliharaan rekanan (*vendor maintenance*) sampai dengan evaluasi kinerja vendor sehingga BRI mempunyai *database* vendor yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BRI.

Secara rinci informasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dijelaskan pada Laporan Keberlanjutan BRI Tahun 2023.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai salah satu bentuk dukungan BRI terhadap Keuangan Berkelanjutan, BRI telah memiliki roadmap dan strategi di bidang Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) baik pada kegiatan operasional maupun bisnis Bank. BRI secara konsisten mempertahankan kinerja perusahaan dengan baik dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan serta berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya percepatan pencapaian hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan strategi korporat, pemenuhan harapan *stakeholder* dan inisiasi LST yang mengacu pada standar nasional, regional, maupun global.

Secara rinci informasi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijelaskan pada Laporan Keberlanjutan BRI Tahun 2023.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulator antara lain:

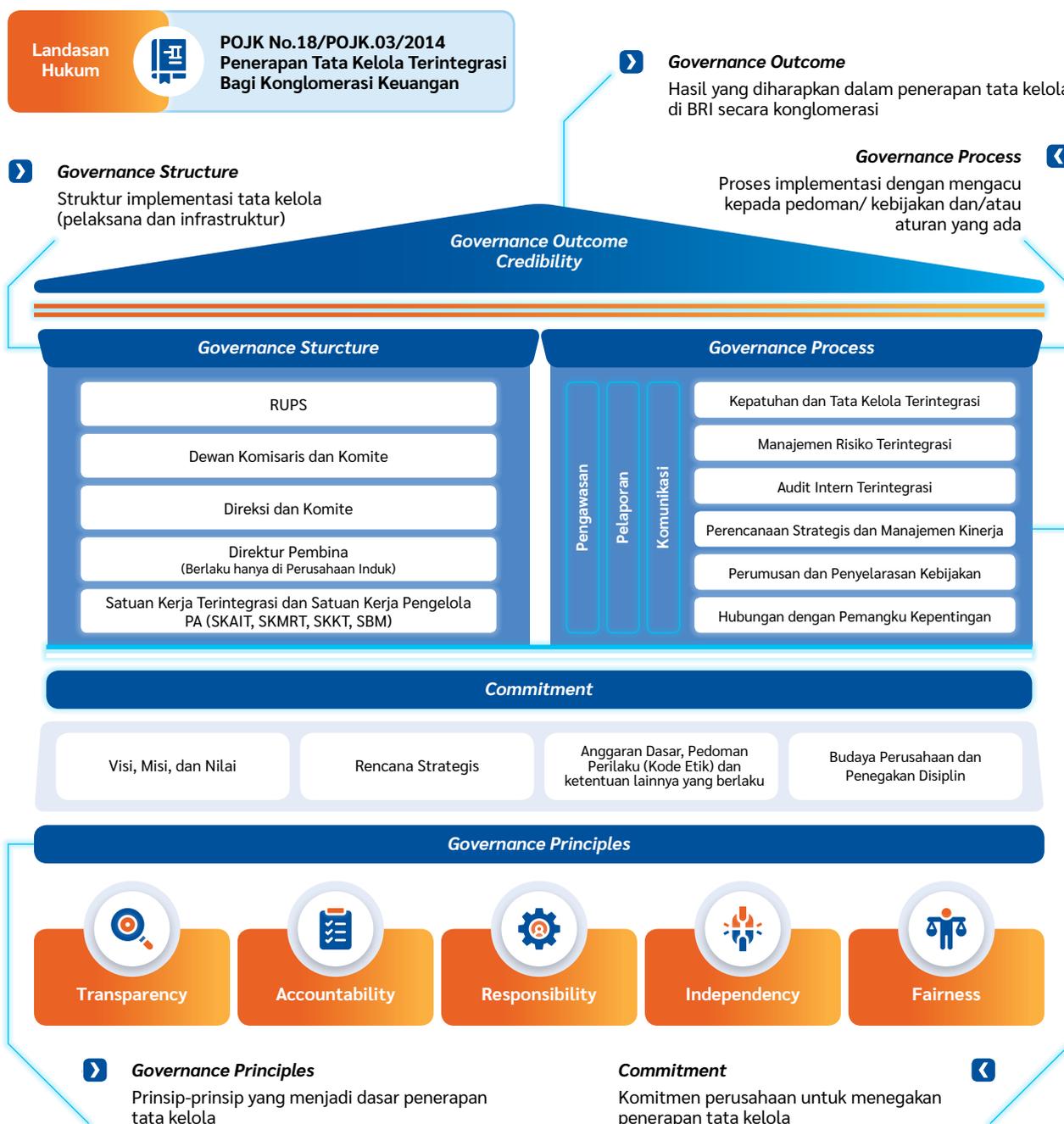
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

BRI merupakan Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BRI dengan 9 (sembilan) Entitas Anak yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.

Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, BRI dan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BRI mengacu pada ketentuan internal berupa Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI. Selain itu, dalam implementasi Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan BRI memiliki organ Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

- a. Organ Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Direksi Entitas Utama (dhi. *Risk Management Committee* Terintegrasi dan *Capital and Investment Committee*), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Terintegrasi serta Satuan Kerja Pengelola Perusahaan Anak.
- b. Organ Tata Kelola Terintegrasi Anggota Konglomerasi Keuangan BRI yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.

Secara umum, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dijelaskan dalam *framework* berikut:





Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dilakukan pada setiap semester dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi yaitu struktur, proses dan hasil dari Tata Kelola Terintegrasi atas paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Berikut hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Periode Penilaian	Peringkat	Keterangan
Semester I Tahun 2023	Peringkat 2 (Baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK
Semester II Tahun 2023	Peringkat 2 (Baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK

Konglomerasi Keuangan BRI telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum “Baik”, tercermin dari telah terpenuhinya aspek struktur, proses dan hasil secara memadai.

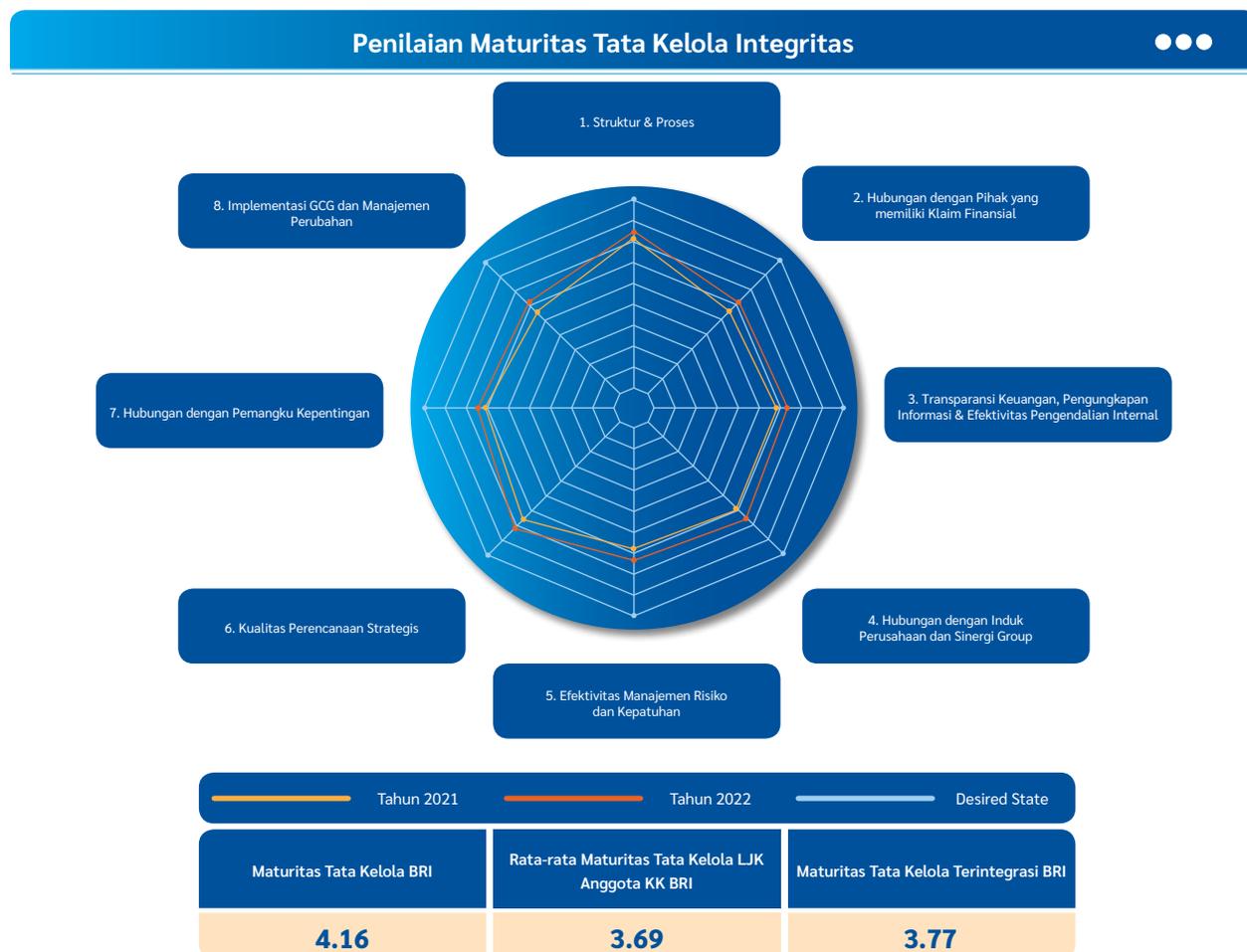
Secara aspek struktur, BRI telah melakukan penyempurnaan atas Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: KU.02-DIR/KEP/10/2023 Tanggal 10 Oktober 2023. Selain itu, telah dilakukan *updating* dan penyesuaian keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Nokep: 11-KOM/BRI/10/2023 Tanggal 3 Oktober 2023.

Secara aspek proses, BRI telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) secara rutin melebihi jumlah rapat yang diatur dalam ketentuan. Pembahasan rapat KTKT antara lain terkait dengan hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (termasuk Profil Risiko Terintegrasi), Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan Pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi.

Secara aspek hasil, BRI dan LJK Anggota KK BRI telah menyampaikan baik pelaporan yang bersifat triwulanan, semesteran maupun tahunan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi terkait dengan penerapan tata kelola terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, audit intern terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi secara tepat waktu. Selain itu, beberapa LJK dalam Konglomerasi Keuangan BRI telah mengikuti penilaian kualitas pelaksanaan GCG oleh pihak independen, *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), yaitu program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023 dengan hasil 2 (dua) perusahaan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pegadaian berhasil memperoleh predikat “*Most Trusted*” dan 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Asuransi BRI Life, PT BRI Asuransi Indonesia, dan PT Permodalan Nasional Madani berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan “*Trusted*”.

Tingkat Maturitas Tata Kelola Terintegrasi

BRI telah melakukan pengukuran atas tingkat kematangan (maturitas) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI untuk tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023 dengan hasil tingkat kematangan (maturitas) sebesar 3.77 dari skala 5 yang menggambarkan struktur dan proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah memadai dan sesuai dengan ketentuan serta hasil pengelolaan Konglomerasi Keuangan telah efektif dijalankan.



No	Building Block Maturitas Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian Tahun 2021	Penilaian Tahun 2022
1	Struktur dan Proses	4.04	4.17
2	Hubungan dengan Pihak yang mempunyai Klaim Finansial	3.31	3.51
3	Transparansi Keuangan, Pengungkapan Informasi & Efektivitas Pengendalian Internal	3.46	3.61
4	Hubungan dengan Induk Perusahaan dan Sinergi Group	3.46	3.71
5	Efektivitas Manajemen Risiko dan Kepatuhan	3.35	3.60
6	Kualitas Perencanaan Strategis	3.78	4.04
7	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	3.59	3.72
Maturitas Tata Kelola Terintegrasi		3.57	3.77



Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Kepemilikan Konglomerasi Keuangan BRI

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nokep: B.2110-DIR/SBM/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. struktur Konglomerasi Keuangan BRI pada posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



Secara rinci, informasi terkait dengan struktur Konglomerasi Keuangan (KK) BRI adalah sebagai berikut:

Nama Entitas	Bidang Usaha	Tanggal Investasi (Mayoritas) BRI	% Saham	Alamat	
BRI	Entitas Utama	Bank Umum	-	Pemerintah: 53,19% Publik: 46,81%	Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta
Bank Raya	Anggota Konglomerasi Keuangan BRI	Bank Umum	03/03/2011	BRI: 86,85% Publik: 13,15%	Menara BRILian Lantai 18 dan 20 Jl. Gatot Subroto No.177 A Jakarta 12870
BRI Insurance		Perusahaan Asuransi Umum	26/09/2019	BRI: 90% BRI YKP: 10%	Graha BRI Insurance Jl. Mampang Prapatan Raya No 18 Jakarta Selatan 12790
BRI Life		Perusahaan Asuransi Jiwa	29/12/2015	BRI: 54,77% FWD: 39,82% BRI YKP: 5,84%	Graha Irama Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
BRI Danareksa Sekuritas		Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek	21/12/2018	BRI: 67% Danareksa (Persero): 33%	Gedung BRI II Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
BRI Finance		Perusahaan Pembiayaan	30/09/2016	BRI: 99,88% BRI YKP: 0,12%	Menara BRILian Lantai GF, 21, 22 Jl. Gatot Subroto No. 177A Kav. 64 Jakarta
BRI Ventures		Perusahaan Modal Ventura	20/12/2018	BRI: 99,97% BRI YKP: 0,03%	District 8 Office, Prosperity Tower Lt 16 Unit F, SCBD Lot 28 Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190
Pegadaian		Perusahaan Gadai	13/09/2021	BRI: 99,99% Pemerintah: 0,01%	Jl. Kramat Raya No.162, RT.2/RW.2, Kel. Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
PNM		Perusahaan Pembiayaan	13/09/2021	BRI: 99,99% Pemerintah: 0,01%	Menara PNM Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center
BRI Manajemen Investasi		Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi	30/11/2022	BRI: 65% Danareksa (Persero): 35%	Gedung BRI II Lantai 22, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210



Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI Posisi 31 Desember 2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
	Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
	Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
	Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
	Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda
	Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
	Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa
	Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
	Komisaris Independen	: Agus Riswanto
Direksi	Direktur Utama	: Sunarso
	Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
	Direktur Bisnis Mikro	: Supari
	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
	Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
	Direktur Human Capital	: Agus Winardono
	Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu R. K
	Direktur Jaringan dan Layanan	: Andrijanto
	Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Digital and Teknologi Informasi	: Arga M. Nugraha	
Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto	

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Muhamad Sidik Heruwibowo
	Komisaris	: Achmad F.C. Barir
	Komisaris Independen	: Eko B. Supriyanto
	Komisaris Independen	: Johanes Kuntjoro Adisardjono*
	Komisaris Independen	: Retno Wahyuni Wijayanti
Direksi	Direktur Utama	: Ida Bagus Ketut Subagia
	Direktur Digital dan Operasional	: Bhimo Wikan Hantoro
	Direktur Keuangan	: Rustarti Suri Pertiwi
	Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resource	: Danar Widyantoro
	Direktur Ritel Agri dan Pendanaan	: Dedy Hendrianto

*) Dalam proses Fit & Proper Test OJK

PT Asuransi BRI Life

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Muhammad Syafriz Rozi
	Komisaris	: Lau Soon Liang*
	Komisaris Independen	: Hari Siaga Amijarso
	Komisaris Independen	: Ubaidillah Nugraha
	Komisaris Independen	: Eko Wahyudi

Direksi	Direktur Utama	: (vacant)
	Direktur Kepatuhan & Legal	: I Dewa Gede Agung (Plt Dirut)
	Direktur Pemasaran	: Sutadi
	Direktur Operasional	: Yosie William Iroth
	Direktur Keuangan	: Lim Chet Ming
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: Mohamad Hidayat
	Anggota	: Agus Haryadi
	Anggota	: Siti Haniatunnisa

*) Dalam proses Fit & Proper Test OJK

PT BRI Multifinance Indonesia

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Sigit Murtiyoso
	Komisaris	: Dhoni Ramadi Saharto Putra
	Komisaris Independen	: Diah Defawati Ande*
Direksi	Direktur Utama	: Wahyudi Darmawan*
	Direktur Bisnis	: Primartono Gunawan
	Direktur Manajemen Risiko	: Ari Prayuwana
	Direktur Operasional	: Willy Halim Sugardi

*) Dalam proses Fit & Proper Test OJK

PT BRI Asuransi Indonesia

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Kris Hananto
	Komisaris Independen	: Ayahanita Kusetyaningsih
	Komisaris Independen	: (vacant)
Direksi	Direktur Utama	: R. Budi Legowo
	Direktur Keuangan & Operasional	: Sony Harsono W.S
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Heri Supriyadi
	Direktur Teknik	: Ade Zulfikar
	Direktur Bisnis	: (vacant)
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: Hj.Nilmayetty Yusri
	Anggota	: Abdul Ghoni

PT BRI Ventura Investama

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Ety Yuniarti
	Komisaris Independen	: Henri*
	Komisaris Independen	: Agoosh Yoosran
Direksi	Direktur Utama	: Nicko Widjaja
	Direktur Keuangan	: Indra Bayu Gunawan
	Direktur Venture Investment	: Markus Liman Rahardja

*) Dalam proses Fit & Proper Test OJK

PT BRI Danareksa Sekuritas

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Ahmad Royadi
	Komisaris	: R Muhammad Irwan
	Komisaris Independen	: Donsuwan Simatupang



Direksi	Direktur Utama	: Laksono Widito Widodo
	Direktur Retail & Information Technology	: Fifi Virgantria
	Direktur Investment Banking Advisory	: Hendra Hermawan
	Direktur Investment Banking Capital Market	: Kevin Praharyawan
	Direktur Finance & Risk Management	: (vacant)

PT Pegadaian

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Loto Srinaita Ginting
	Komisaris	: Umiyatun Hayati T.
	Komisaris	: Sudarto
	Komisaris	: Rini Widyantini
	Komisaris Independen	: Makmur Keliat
	Komisaris Independen	: Nezar Patria
	Komisaris Independen	: Yudi Priambodo P.
Direksi	Komisaris Independen	: Muhammad Isnaini*
	Direktur Utama	: Damar Latri Setiawan
	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk	: Elvi Rofiqotul Hidayah
	Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan	: Eka Pebriansyah
	Direktur Teknologi Informasi dan Digital	: Teguh Wahyono
	Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan	: Udin Salahudin
	Direktur Human Capital	: Erry Rizal Achmad Taufiq
	Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	: Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Umum	: Gunawan Sulistyio	
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: Muhammad Cholil Nafis
	Anggota	: Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh

*) Dalam proses Fit & Proper Test OJK

PT Permodalan Nasional Madani

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Arif Rahman Hakim
	Komisaris Independen	: Veronica Colondam
	Komisaris	: Parman Nataatmadja
	Komisaris	: Iwan Taufiq Purwanto
	Komisaris Independen	: Nurhaida
Direksi	Direktur Utama	: Arief Mulyadi
	Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	: (vacant)
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris
	Direktur Bisnis	: Prasetya Sayekti
	Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi	: Sunar Basuki
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: (vacant)
	Anggota	: (vacant)

PT BRI Manajemen Investasi

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Tri Hartono
	Komisaris Independen	: Rowter Kahlil
Direksi	Direktur Utama	: (vacant)
	Direktur Marketing	: Upik Susiyawati
	Direktur Operasional dan Keuangan	: Ira Irmalia Sjam (Plt Dirut)
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: Muhamad Nadratuzzaman
	Anggota	: Elsa Febiola Aryanti

Tugas dan Tanggung Jawab Organ Tata Kelola Terintegrasi BRI

Berdasarkan pada POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan serta mengacu pada Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan BRI, seluruh organ Tata Kelola Terintegrasi pada Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris Entitas Utama

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris BRI memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anggota LJK Konglomerasi Keuangan BRI agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko Entitas Utama.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh LJK Konglomerasi keuangan BRI sesuai dengan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi maupun kebijakan turunannya.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi aspek antara lain:
 - a. Kepatuhan Terintegrasi;
 - b. Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - c. Audit Intern Terintegrasi;
 - d. Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
 - e. Perumusan dan Penyelarasan Kebijakan; dan
 - f. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan pelaporan oleh Direktur dan/atau Kepala Satuan Kerja terkait serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi setiap semester.
4. Melakukan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memberikan arahan serta rekomendasi dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
5. Mengawasi penerapan Audit Intern pada Anggota Konglomerasi Keuangan agar selaras dengan kebijakan Audit Intern Entitas Utama.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal.
7. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada setiap LJK Konglomerasi Keuangan BRI berdasarkan laporan dan evaluasi yang disampaikan oleh Direktur dan/atau Kepala Satuan Kerja terkait BRI dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi setiap semester.
8. Mengawasi, mengevaluasi dan memastikan Komite Tata Kelola Terintegrasi menjalankan tugas secara efektif.
9. Memberikan persetujuan atas tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar BRI

yang berkaitan dengan pengelolaan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.

10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi Entitas Utama

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan arahan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas dalam rangka evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi meliputi kepatuhan terintegrasi, audit intern terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, kinerja Perusahaan Anak, serta aspek terintegrasi lainnya.
5. Memberikan arahan dan rekomendasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi termasuk evaluasi kinerja.
6. Memastikan keselarasan rencana strategis antara Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
7. Menyelenggarakan RUPS dalam hal terdapat aksi korporasi atau hal lainnya terkait dengan pengelolaan Perusahaan Anak yang wajib mendapatkan putusan RUPS.
8. Menyusun RJPP dan RKAP BRI termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan atas Anggota Konglomerasi Keuangan.
9. Memastikan terlaksananya sinergi di lingkungan Konglomerasi Keuangan BRI antara BRI dan Anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau antar Anggota Konglomerasi Keuangan.
10. Memastikan temuan audit dan rekomendasi satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau otoritas lainnya ditindaklanjuti oleh Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan atas Anggota Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, serta pelaksanaan aspek terintegrasi lainnya yang relevan, termasuk pemenuhan prinsip syariah dari LJK Konglomerasi Keuangan yang memiliki bisnis syariah.



2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam hal diperlukan;
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk disampaikan kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan hasil evaluasi atas Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self-Assessment* TKT) setiap semester kepada Direksi Entitas Utama.
5. Menyampaikan hasil evaluasi atas Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama.
6. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Terintegrasi melalui Direksi terkait yang membawahi fungsi, untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dan laporan yang diperlukan.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama dalam melakukan penerapan fungsi kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Menyampaikan rekomendasi atas perbaikan penerapan fungsi kepatuhan pada LJK Konglomerasi Keuangan BRI berdasarkan hasil evaluasi laporan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan di masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
4. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan *Self-Assessment* Tata Kelola Terintegrasi setiap semester dalam rangka pelaporan kepada OJK.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada regulator secara tepat waktu.
6. Melakukan penilaian tingkat kematangan pelaksanaan fungsi kepatuhan di LJK Konglomerasi Keuangan BRI secara periodic.
7. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.
8. Menyampaikan ketentuan/regulasi terbaru yang relevan kepada anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai informasi dan untuk ditindaklanjuti.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan BRI atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
10. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan anggota Konglomerasi Keuangan BRI secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
11. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal terdapat eskalasi permasalahan terkait kepatuhan yang memerlukan dukungan Entitas Utama dalam penyelesaiannya.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko.
2. Memberikan masukan kepada RMCT dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
4. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
5. Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMCT dan yang telah disetujui oleh Direksi Entitas Utama.
6. Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko terintegrasi berdasarkan perkembangan praktik-praktik manajemen risiko yang berlaku.
7. Melakukan evaluasi atas usulan *Risk Appetite Statement* (RAS) anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang memiliki *Parenting Style Active Management* untuk dibahas di dalam RMCT.
8. Melakukan evaluasi atas laporan profil risiko LJK Konglomerasi Keuangan BRI untuk anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang memiliki *Parenting Style Active Management* secara berkala atau paling kurang secara semesteran.
9. Melakukan *Monitoring* Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Konglomerasi Keuangan BRI.
10. Melakukan kajian dan analisis kecukupan permodalan terintegrasi dalam rangka pemenuhan ketentuan regulasi dan melaporkannya kepada RMCT.
11. Melaksanakan simulasi *stress testing* terintegrasi untuk mengetahui ketahanan BRI Group dalam menghadapi kondisi krisis.
12. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko terintegrasi kepada Direktur Utama atau Direktur bidang Manajemen Risiko LJK Konglomerasi Keuangan BRI dan RMCT secara berkala atau paling kurang secara semesteran.
13. Melaporkan profil risiko dan permodalan terintegrasi kepada regulator secara tepat waktu.
14. Melakukan kajian internal dan eksternal untuk memberikan gambaran dampak terhadap bisnis dan operasional dalam rangka mengantisipasi *emerging risk*.
15. Melakukan penilaian kematangan pelaksanaan fungsi manajemen risiko di LJK Konglomerasi Keuangan BRI secara periodik.
16. Melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi manajemen risiko di LJK Konglomerasi Keuangan secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

17. Mendukung dan melakukan penilaian faktor Manajemen Risiko Terintegrasi yang merupakan bagian dari *Self-Assessment* Tata Kelola Terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi secara semesteran.
18. Memberikan informasi kepada RMCT terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
19. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal terdapat eskalasi permasalahan terkait manajemen risiko yang memerlukan dukungan Entitas Utama dalam penyelesaiannya.
20. Melakukan kajian usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Membantu tugas Direktur Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam Konglomerasi Keuangan BRI minimal meliputi:
 - a. Laporan Kegiatan Audit dan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit anggota Konglomerasi Keuangan BRI;
 - b. Area-area yang mengalami peningkatan risiko secara signifikan dan kejadian *fraud* signifikan yang terjadi di anggota Konglomerasi Keuangan BRI;
 - c. Kualitas SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang meliputi namun tidak terbatas pada metode dan prosedur audit, *Human Capital*, dan *tools audit*.
 - d. Penilaian tingkat Kematangan (maturitas) fungsi audit intern anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
 - e. Pelaksanaan *Quality Assurance* dan *Monitoring* tindak lanjut perbaikannya
3. Melaksanakan audit atau joint audit dengan SKAI anggota Konglomerasi Keuangan BRI Konglomerasi Keuangan BRI atau berdasarkan laporan dari internal audit anggota Konglomerasi Keuangan BRI Konglomerasi Keuangan BRI secara independen, objektif, dan profesional dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha anggota Konglomerasi Keuangan BRI setelah mendapatkan persetujuan Direktur Utama Entitas Utama.
4. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur di dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Audit Intern dalam melaksanakan tugas.
5. SKAI Terintegrasi berkomunikasi dengan SKAI anggota Konglomerasi Keuangan BRI secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun terkait hasil audit SKAI anggota Konglomerasi Keuangan BRI, isu ataupun permasalahan yang berdampak signifikan terhadap kondisi pada anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan pengembangan yang dilakukan oleh SKAI anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.

6. SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.
7. Menginformasikan semua temuan audit yang terkini dan signifikan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama Entitas Utama melalui Komite Audit Entitas Utama pada kesempatan pertama, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur yang melakukan pengawasan terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan Direktur Utama anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
8. SKAI Terintegrasi dapat bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, antara lain Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepatuhan Terintegrasi pada perusahaan dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.
9. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Perusahaan, anggota Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Anak (apabila diperlukan) untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas serta tersedia sumber daya yang memadai.
10. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal terdapat eskalasi permasalahan terkait audit intern yang memerlukan dukungan Entitas Utama dalam penyelesaiannya.
11. SKAI Terintegrasi berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan audit dan tingkat maturitas di SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.

Dewan Komisaris LJK Anggota KK BRI

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI, Pedoman dan Tata Tertib Kerja pada anggota Konglomerasi Keuangan BRI, ketentuan internal anggota Konglomerasi Keuangan BRI lainnya, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola, kebijakan, tugas dan tanggung jawab Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI serta tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern.
2. Memberikan nasihat kepada Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI terkait rencana pengembangan anggota Konglomerasi Keuangan BRI, RJPP, RKAP, Kebijakan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Membentuk komite dan/atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung



jawab Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang meliputi paling sedikit antara lain:

- a. Pemantauan Audit;
 - b. Pemantauan Kepatuhan; dan
 - c. Pemantauan Manajemen Risiko
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan/atau ketentuan internal anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang mencakup frekuensi, kehadiran anggota Dewan Komisaris, serta tata cara pengambilan keputusan.
 5. Membentuk Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
 6. Memberikan persetujuan atas tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI sesuai Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
 7. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI, Keputusan RUPS anggota Konglomerasi Keuangan BRI, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi LJK Anggota KK BRI

Tugas dan wewenang Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI, Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Konglomerasi Keuangan BRI, ketentuan internal anggota Konglomerasi Keuangan BRI, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan anggota Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan maksud dan tujuan anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Melakukan pengelolaan anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal operasional, bisnis, human capital, manajemen risiko, keuangan, teknologi informasi, sistem pengendalian internal, serta aspek manajemen lainnya yang berkaitan dengan usaha anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Menyelenggarakan RUPS anggota Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.
4. Menyusun RJPP dan RKAP anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola termasuk pemenuhan prinsip syariah dari Perusahaan Anak Konglomerasi Keuangan BRI yang merupakan entitas syariah.
6. Menindaklanjuti temuan hasil audit oleh pihak intern dan ekstern.
7. Memastikan ketersediaan peraturan tata tertib kerja di anggota Konglomerasi Keuangan BRI;
8. Menyelaraskan strategi anggota Konglomerasi Keuangan BRI dengan strategi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

9. Melaksanakan kebijakan sinergi di lingkungan anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
10. Melaksanakan kebijakan BRI yang berkaitan dengan anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
11. Membentuk komite-komite di bawah Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal diperlukan.
12. Menyelenggarakan rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan/atau ketentuan internal anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang mencakup frekuensi, kehadiran anggota Direksi, serta tata cara pengambilan keputusan.
13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI, Keputusan RUPS anggota Konglomerasi Keuangan BRI, atau peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan prinsip syariah
2. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan Transaksi Intra Group (Mengidentifikasi, Mengelola dan Memitigasi Transaksi Intra Grup)

Risiko Transaksi Intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Manajemen Risiko Intra grup

1. Identifikasi Risiko Intra grup
 - a. Entitas Utama melakukan identifikasi seluruh risiko intra grup Konglomerasi Keuangan secara berkala dengan metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada Konglomerasi Keuangan. Risiko transaksi intra grup antara lain dapat timbul dari :
 - Kepemilikan silang antar entitas dalam KK BRI.
 - Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
 - Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh BRI dari Perusahaan Anak.
 - Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
 - Pembelian atau penjualan aset BRI kepada Perusahaan Anak.
 - Transfer risiko melalui reasuransi.
 - Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara entitas dalam KK BRI.
 - b. Proses identifikasi risiko intra grup dilakukan dengan melakukan analisis terhadap setiap jenis transaksi intra

- grup dalam bisnis KK BRI, antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.
2. Pengukuran Risiko Intra grup
 - a. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko Intra grup, Entitas Utama melakukan:
 - evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan; dan
 - penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara material dan signifikan mempengaruhi risiko, antara lain apabila ada penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan.
 - b. Metode dan sistem pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko KK BRI sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
 - c. Pemilihan metode dan sistem pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan.
 - d. Metode dan sistem pengukuran paling sedikit harus dapat mengukur:
 - sensitivitas Konglomerasi Keuangan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
 - kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
 - tingkat risiko secara individual;
 - eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar jenis risiko; dan
 - seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi KK BRI yang dapat diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen.
 - e. Proses pengukuran risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, sebelum suatu metodologi diaplikasikan oleh KK BRI.
 3. Pemantauan Risiko Intra grup
 - a. Entitas Utama melakukan pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit, dan hasil *stress test* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan.
 - b. Entitas Utama menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up*.
 - c. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, Entitas Utama melakukan:
 - evaluasi terhadap eksposur risiko melalui pemantauan dan pelaporan eksposur risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan KK BRI; dan
 - penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan antara lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang bersifat material.
 4. Pengendalian Risiko Intra grup
 - a. Entitas Utama menetapkan *Risk Appetite* dan limit Risiko Intragrup yang sesuai dengan filosofi risiko serta ketentuan yang berlaku. Penetapan limit risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
 - b. Pengendalian risiko lainnya dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, perumusan metode perhitungan transaksi intragrup, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.
- Posisi semester II 2022 dan semester I tahun 2023, risiko intra grup BRI berada pada peringkat risiko *low to moderate*.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

1. Penguatan Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan

Di tahun 2023, dilakukan penyempurnaan dan penguatan implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI diantaranya terkait dengan:

- a. Pengkinian dan penyempurnaan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan BRI
- b. Pengukuran tingkat kematangan (maturitas) Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BRI

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2023 dibahas dalam Sub Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Bank BRI Tahun 2023.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Selama Tahun 2023, rincian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program *Compliance Exchange* yaitu kegiatan kunjungan *on-site* SKKT ke Satuan Kerja Kepatuhan di LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan/atau sebaliknya dalam rangka meningkatkan pemahaman pekerja terkait praktik bidang kepatuhan di masing-masing industri LJK serta mengidentifikasi peluang *improvement* yang dapat diterapkan pada masing-masing LJK KK BRI.



- b. Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI ke Otoritas Jasa Keuangan
 - c. *Monitoring* pemenuhan struktur Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan regulator diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Terintegrasi dan Kebijakan/ Prosedur.
 - d. Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI yang dilakukan secara semesteran dan penyampaian laporan dimaksud ke Otoritas Jasa Keuangan
 - e. Penilaian *Self Assessment* GCG secara individu dan konsolidasi yang dilakukan secara semesteran.
 - f. Penyampaian Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ke LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
 - g. Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang dilaksanakan setiap triwulan dengan aspek evaluasi dan pemantauan antara lain:
 - 1) Penerapan *Good Corporate Governance*.
 - 2) Pemantauan prinsip kehati-hatian.
 - 3) Pengelolaan komitmen.
 - 4) Pengelolaan risiko kepatuhan.
 - 5) Pelaksanaan Program APU PPT & PPPSPM
 - 6) Analisa Dampak Ketentuan Eksternal.
 - 7) Laporan Transaksi/Putusan yang Mengandung Benturan Kepentingan
 - 8) Aspek lainnya
 - h. Penyelenggaraan *Compliance* BRI Group Forum diantaranya sosialisasi penerapan POJK yang baru diterbitkan.
 - i. Pengukuran tingkat kematangan (maturitas) Kepatuhan Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BRI.
 - j. Pelaksanaan *In House Training* BRI Group terkait penerapan APU PPT & PPPSPM
4. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi**
- Dalam mendorong konglomerasi keuangan BRI memiliki fungsi audit intern yang handal sehingga dapat menjadi *strategic business partner*. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI Terintegrasi didukung struktur organisasi yang independen serta kompetensi Auditor yang memadai, maka selama Tahun 2023 SKAI Terintegrasi telah melaksanakan berbagai program kerja, antara lain:
1. Pengembangan penggunaan bersama Aplikasi *Sistem Management Audit* BRISMA Terintegrasi 2.1 (SKAI BRI Life & SKAI BRI Finance).
 2. Pelaksanaan audit tematik tata kelola terintegrasi BRI Group yang dilakukan bersama antara SKAI Terintegrasi dan SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan.
 3. Pengembangan Dashboard SKAI Terintegrasi untuk *Monitoring* program SKAI Terintegrasi.
 4. Melakukan *alignment* dan evaluasi atas fokus, strategi audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan sesuai Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2023 SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan.
 5. Melakukan *Monitoring* terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan kinerja Perusahaan Anak secara berkala yang dilakukan setiap triwulan dengan *scope Monitoring* antara lain:
 - a. *Monitoring* pencapaian kinerja Anggota Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Anak BRI;
 - b. *Monitoring* Laporan Hasil Audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan
 - c. *Monitoring* tindak lanjut temuan signifikan Anggota Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Anak BRI.
 - d. *Monitoring* pemenuhan *resource human capital* SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan.
 6. Pelaksanaan Audit Individual *Head Office Audit* BRI terhadap PNM, BRI Life, BRI Insurance dan BRI Remittance.
 7. Pelaksanaan *joint audit* antara SKAI BRI dengan SKAI BRI Life.
 8. Melaksanakan *Quality Assurance Review and Improvement Program* (QAIP) di SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka mengembangkan dan program peningkatan kualitas audit yang mencakup seluruh aktivitas audit internal. Selama tahun 2023, SKAI Terintegrasi telah melaksanakan *Quality Assurance Review and Improvement Program* terhadap SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan (Bank Raya, BRILife, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Finance, BRI Insurance, PNM, Pegadaian, BRI Venture).
 9. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan melalui program sebagai berikut:
 - a. Pendidikan BSDP NWOL Auditor Modular *Entry Level*.
 - b. *Training Internal* Audit ISO 37001: 2016 dan ISO 27001:2022
 - c. *Certified Anti Fraud Manager* (CAFM)
 - d. *Certified Qualified Internal Auditor* (QIA)
 - e. *Certified Ethical Hacker* (CEH)
 - f. *Certified Hacking Forensic Investigator* (CHFI)
 - g. Sertifikasi BSMR
 - h. *Certified in Risk Governance Professional* (CRGP)

- i. Ajun Ahli Asuransi Jiwa (AAAIJ)
 - j. *Certified Forensic Auditor* (CfrA)
 - k. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Manager Investasi (WMI), Wakil Penjaminan Emisi Efek (WPEE)
 - l. *Program Secondment Quality Assurance*, Kaji ulang MR dan Strategi Anti *Fraud* yang diikuti SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan (SKAI BRI Life, SKAI BRI Insurance, SKAI BRI Manajemen Investasi, SPI Pegadaian, SPI PNM dan SKAI BRI Finance).
 - m. *Program Secondment* penyusunan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) yang diikuti SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan (SKAI BRI Ventures, SKAI BRI Finance, SKAI BRI Life, SKAI BRI Insurance, SKAI Bank Raya, SPI PNM, SPI Pegadaian, SKAI BRI Manajemen Investasi, SKAI BRI Danareksa Sekuritas).
10. Pelaksanaan *Workshop* penyusunan Pedoman Pengelolaan Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.
 11. Penyusunan Laporan SKAI Terintegrasi yang dilakukan setiap semester.
 12. Pelaksanaan *benchmark* SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan (SKAI Bank Raya dan SPI PNM) ke SKAI Terintegrasi (Entitas Utama).
 13. Penilaian tingkat kematangan (maturitas) SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan BRI Tahun 2023.
 14. *Review of Policy*, pelaksanaan review atas kebijakan dan prosedur audit intern anggota konglomerasi keuangan BRI sesuai dengan piagam audit intern terintegrasi dan ketentuan terkini.
 15. Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap semester.
 16. Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Terintegrasi.
 17. *Monitoring* Tindak Lanjut perbaikan atas Temuan hasil Audit Eksternal terhadap Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
 18. Dalam rangka akselerasi proses *transfer knowledge* dari SKAI Terintegrasi (Entitas Utama) kepada SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan, telah ditempatkan Auditor BRI di SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan sebagai berikut:
 - a. SKAI Bank Raya: Kepala *Group Auditor* (1 Pekerja), Auditor (2 Pekerja)
 - b. SKAI BRILife: Kepala Bagian (1 Pekerja), Auditor (2 Pekerja)
 - c. SKAI BRI Finance: Kepala SKAI (1 Pekerja), Group Head (2 Pekerja)
 - d. SKAI BRI Insurance: Grup Head (2 Pekerja)
 - e. SKAI BRI Venture: Kepala SKAI (1 Pekerja)
5. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi**
Selama Tahun 2023, rincian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan forum *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2023 yaitu pada tanggal 27 Februari 2023 dan 16 Agustus 2023.
 - b. Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) Terintegrasi dan Perusahaan Anak yang telah disesuaikan dengan *parenting style* masing-masing Entitas Perusahaan Anak.
 - c. Melakukan *self assessment* penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Terintegrasi dan Perusahaan Anak yang kemudian dimintakan putusan pada Forum RMCT.
 - d. Penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi (semesteran) dan Konsolidasi (triwulanan) ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Melakukan *Monitoring* Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Konglomerasi Keuangan secara periodik.
 - f. Melakukan analisis dan pembuatan laporan kecukupan permodalan Terintegrasi (semesteran) yang disampaikan pada forum RMCT kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - g. Melakukan simulasi *stress test* terintegrasi (semesteran) yang kemudian disampaikan pada forum RMCT.
 - h. Melakukan koordinasi dengan SKMRT terkait manajemen risiko terintegrasi dalam hal sbb:
 - *Modelling credit scoring* Perusahaan Anak
 - *Modelling* CKPN
 - *Project Digital risk* Perusahaan Anak dan Terintegrasi (*Revamp and Scale up Adaptive Digital Risk Management Framework*)
 - *Risk culture* Perusahaan Anak dan Terintegrasi (Penilaian *Risk Culture Maturity*)
 - i. Pelaksanaan *In House Training* BRI Group terkait penerapan manajemen risiko (*digital risk, stress testing, cyber risk*) yang berkoordinasi langsung dengan *Corporate University* BRI.
 - j. *Monitoring* perbaikan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Perusahaan Anak sesuai dengan *roadmap* Tata Kelola Terintegrasi dari Konsultan PwC.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan





PILAR SOSIAL

Program BRI Peduli TJSJL berfokus pada tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pada tahun 2023 BRI telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat sebesar Rp236.169.653.579 melalui pelaksanaan program-program unggulan antara lain:

1. Program Ini Sekolahku
Program ini fokus pada perbaikan infrastruktur sekolah yang sudah tidak layak untuk mendukung proses belajar mengajar sehingga melalui program ini diharapkan mampu memberikan ruang belajar yang nyaman bagi siswa dan guru.
2. Beasiswa untuk Anak-Anak Berprestasi di Desa BRILiaN dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia
BRI memberikan bantuan beasiswa khusus untuk anak-anak berprestasi di Desa BRILiaN. Bantuan beasiswa tersebut diberikan kepada 1.800 anak-anak berprestasi di 109 Desa BRILiaN di 17 Regional Office BRI Selindo.



3. BRI Peduli Pemberdayaan Kelompok Perempuan
BRI menyelenggarakan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Perempuan dan melaksanakan Program BRINITA yang merupakan program usaha pertanian di perkotaan dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia sehingga bermanfaat dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan lokasi padat penduduk menjadi lebih baik dari sisi lingkungan dan kesehatan, sehingga dapat memberdayakan masyarakatnya dan diharapkan dapat menjadikan Kawasan tersebut menjadi kawasan edukasi dan wisata. Program BRINITA terdiri dari Pembangunan Sarana & Prasarana Urban Farming, Pelatihan Penanaman dan Perawatan Tanaman dan Perikanan, Pembentukan Kelompok, serta bantuan alat usaha.



PILAR EKONOMI

Program BRI Peduli TJSJL berfokus untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pada tahun 2023 BRI telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat sebesar Rp21.366.015.076 melalui pelaksanaan program-program unggulan antara lain:

1. Bantuan Pembangunan Rumah Produksi dan Patung Tugu Jeruk Di Desa BRILiaN Karang Bunga, Barito Kuala. BRI memberikan bantuan berupa pembangunan rumah produksi jeruk dan pembuatan tugu jeruk sebagai simbol desa sebagai penghasil buah jeruk. BRI juga membantu peralatan yang digunakan untuk pembuatan es krim dan jus jeruk.
2. Bantuan Pembangunan Lapak Pedagang Kuliner di Halaman Parkir Pasar Manis Purwokerto. BRI memberikan bantuan berupa Pembangunan Lapak Pedagang Kuliner di Halaman Parkir Pasar Manis Purwokerto. BRI Purwokerto memberikan branding BRI di setiap lapak dan memberikan sarana pembayaran dengan *echannel* BRI.
3. Program Sertifikasi Halal dan Pelatihan Digitalisasi Marketing UMKM BRI memberikan bantuan berupa sertifikasi halal kepada 200 UMKM. UMKM yang ikut serta dalam program ini berasal dari nasabah mikro BRI dan UMKM peserta pelatihan Rumah BUMN BRI.



PILAR LINGKUNGAN

Program BRI Peduli TJSL didalam Pilar Lingkungan berfokus untuk pengelolaan penataan dan pelestarian ekosistem lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. BRI telah menyalurkan bantuan sebesar Rp84.461.843.580 pada tahun 2023 melalui program-program antara lain:

1. Program BRI Menanam *Grow & Green*. BRI melakukan program penanaman pohon dan penyediaan bibit mangrove, durian, pala, kopi dan lainnya untuk mengembalikan fungsi lahan sekaligus pemberdayaan masyarakat di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan dan Kelompok Tani yang sudah lama berkecimpung dalam kegiatan pelestarian lingkungan.
2. Bantuan Pengadaan Sarana & Prasarana Bank Sampah Induk Ciamis. BRI memberikan bantuan berupa sarana & prasarana pengelolaan sampah kepada Bank Sampah Induk Ciamis di

daerah Ciamis, Jawa Barat. Bank Sampah juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah sebelum membuang ke tempat sampah sehingga dapat mengurangi residu yang dibuang ke pembuangan akhir. Bantuan yang diberikan oleh BRI berupa mesin *press* dan kendaraan pengangkut sampah.

3. BRI Peduli Bersih-Bersih Kali. Kegiatan pada program ini meliputi normalisasi sungai, pembangunan sarana fisik, dan edukasi lingkungan sehat. Di dalam program ini juga terdapat program pemberdayaan kepada masyarakat berupa pelatihan cara pengolahan sampah dan bantuan mesin pengolah sampah.



PELAKSANAAN SROI ATAS PROGRAM BRI PEDULI TJSL

Untuk mengukur dampak sosial sekaligus sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Program BRI Peduli TJSL, BRI telah melakukan perhitungan *Social Return On Investment (SROI)* dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas program-program unggulan pada pilar Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. Adapun untuk rincian program dan hasil perhitungan SROI serta IKM dapat dilihat pada laporan keberlanjutan perusahaan (*Sustainability Report*).



Indeks OJK



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
UMUM			
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		✓	POJK 29
KILAS KINERJA			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Pendapatan/penjualan.	27	SEOJK 16
	2. Laba bruto.	27	
	3. Laba Operasional.	27	SEOJK 9
	4. Laba sebelum pajak.	28	
	5. Laba bersih.	28	
	6. Laba (rugi).	28	SEOJK 16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	28	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	28	SEOJK 16
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	28	SEOJK 16
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	28	
	11. Laba (rugi) per saham.	29	SEOJK 9 SEOJK 16
	12. Jumlah aset.	26	
	13. Jumlah liabilitas.	26	
	14. Jumlah ekuitas.	27	
	15. Dana pihak ketiga.	26	SEOJK 9
	16. Pinjaman yang diterima.	26	
	17. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	31	SEOJK 16
	18. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	31	
	19. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	31	
	20. Rasio lancar.	31	
21. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	31		
22. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	31		



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	23. Rasio KPMM.	31	SEOJK 9
	24. Aset produktif.	31	
	25. Rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL).	31	
	26. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	31	
	27. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR).	31	
	28. Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM).	31	
	29. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	31	
	30. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	32	
	31. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	32	
	32. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	32	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	34-35	
	a. Jumlah saham yang beredar.		
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	d. <i>Volume</i> perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	35	SEOJK 16
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.		
	b. Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham.		
	c. bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.		
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	e. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).		
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	35	SEOJK 16
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	35	SEOJK 16

KRITERIA

PENJELASAN

HALAMAN

REGULASI

LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	49	SEOJK 9 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	49	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	49	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	51	SEOJK 9 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	53	
	f. Struktur organisasi.	47	SEOJK 9
	g. Aktivitas utama.	47	
	h. Teknologi informasi.	47	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	47	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	50	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	48	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	47	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	47	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	56	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	56	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	53	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	47	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	53-54	SEOJK 9 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	54-56	
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	62-64	SEOJK 16 SEOJK 9
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	64-65	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	65-69	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	71	SEOJK 9
	5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	62	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	74-75	SEOJK 16 POJK 29



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: 1. Alamat 2. Nomor telepon 3. Alamat surat elektronik 4. Alamat situs web	78	SEOJK 9 SEOJK 16
Nama dan alamat entitas anak dan/ atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	79-80	SEOJK 9 SEOJK 16
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.	82-85	SEOJK 9 SEOJK 16
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi Perusahaan 2. Misi Perusahaan 3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.	86-88	SEOJK 9 SEOJK 16
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir. 2. Kegiatan usaha yang dijalankan. 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	89-94	SEOJK 9 SEOJK 16
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	96-99	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	100-101	SEOJK 9 SEOJK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	102-103	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat: 1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. 2. Foto terbaru. 3. Usia.	104-118	SEOJK 9 SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	<p>4. Kewarganegaraan.</p> <hr/> <p>5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.</p> <hr/> <p>6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:</p> <p>a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan</p> <hr/> <p>b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <hr/> <p>c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <hr/> <p>7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut.</p> <p>Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.</p> <hr/> <p>8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>		<p>SEOJK 9</p> <p>SEOJK 16</p> <p>POJK 13</p> <p>SEOJK 16</p>
Profil Dewan Komisaris	<p>Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <p>1. Nama dan jabatan.</p> <hr/> <p>2. Foto terbaru.</p> <hr/> <p>3. Usia.</p> <hr/> <p>4. Kewarganegaraan.</p> <hr/> <p>5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.</p> <hr/> <p>6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:</p> <p>a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris</p> <hr/> <p>b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.</p> <hr/> <p>c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <hr/> <p>d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <hr/> <p>7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi.</p> <p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut.</p> <p>Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.</p>	119-131	<p>SEOJK 9</p> <p>SEOJK 16</p> <p>SEOJK 9</p> <p>SEOJK 13</p> <p>SEOJK 16</p> <p>POJK 17</p>



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.		SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	132-136	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	137-139	SEOJK 9 SEOJK 16
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan institusi lokal. Kepemilikan institusi asing. Kepemilikan individu lokal. Kepemilikan individu asing. Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	140-145	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	139	SEOJK 9 SEOJK 16
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	146-153	SEOJK 9 SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	<p>Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:</p> <p>Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i>. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian. 	155	SEOJK 9
Kronologis pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	156-159	SEOJK 16
Informasi pencatatan efek lainnya	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).	160-165	SEOJK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	<p>Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama dan alamat. Periode penugasan. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan. Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. <p>Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	165	SEOJK 16
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	166-167	SEOJK 16
Penghargaan dan Sertifikasi.	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional). Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi. Masa berlaku (untuk sertifikasi). 	168-182	SEOJK 9



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (<i>corporate plan</i>). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (<i>business plan</i>).	198-201	SEOJK 13 POJK 17
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	206-265	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	207-261, 264-265	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	207-261, 264-265	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	261-265	
	d. Profitabilitas.	261-265	
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	267-268, 270-276	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	268-269, 276-279	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset.	268, 275	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	268-269, 277	
	5. Ekuitas.	269, 279-280	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	280-289	
	7. Arus kas.	289-291	
	8. Suku bunga dasar kredit.	295-296	SEOJK 9
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		296-297	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	292-294	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	294-295	
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>).	Penjelasan atas:		SEOJK 16
	1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas.	301	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>).	300	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	300	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama pihak yang melakukan ikatan. Tujuan dari ikatan tersebut. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut. Mata uang yang menjadi denominasi. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</p>	368	SEOJK 16
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis investasi barang modal. Tujuan investasi barang modal. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</p>	368 369 368	SEOJK 9 SEOJK 16
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	370-371	SEOJK 16
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	<p>Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan/penjualan. Laba (rugi). Struktur modal (<i>capital structure</i>). Pemasaran. Pengembangan SDM. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. <p>Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan/penjualan. Laba (rugi). Struktur modal (<i>capital structure</i>). Kebijakan dividen. Pemasaran. Pengembangan SDM. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 	372 372 372-373 373-374 374 372 375 375 375 376 376 376 375	SEOJK 16
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	201-204	SEOJK 9 SEOJK 16



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	377	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	377-378	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	377-378	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	377-378	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	1. Total perolehan dana.	379	
	2. Rencana penggunaan dana.	379	
	3. Rincian penggunaan dana.	379	
	4. Saldo dana.	379	
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	-	
	<p>a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.</p> <p>b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.</p>		
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.		
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.	379-387	
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.		
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).		
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.		
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.		
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>).		
2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms length principle</i>).			

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	<p>g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.</p> <p>Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.</p>		
	<p>h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.</p>		SEOJK 16 SEOJK 13
	<p>i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>		
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan. 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	387-389 387-389	SEOJK 16
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi. 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi. 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	389-390	SEOJK 16
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	<p>Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.</p>	301-367	SEOJK 9
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS.	<p>Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku. b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan. <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	468-483	SEOJK 16
Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. 2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi. 3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	485-487 485 488-500	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17 SEOJK 16 SEOJK 16



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	<p>4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:</p> <p>a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).</p> <p>b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).</p>	500-502	SEOJK 16
	<p>5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:</p> <p>a. Prosedur penilaian kinerja.</p> <p>b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.</p> <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	502	SEOJK 16
	<p>6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:</p> <p>a. Bank yang bersangkutan.</p> <p>b. Bank lain.</p> <p>c. Lembaga keuangan bukan bank.</p> <p>d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.</p>	552-553	SEOJK 13 POJK 17
Dewan Komisaris.	<p>1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p>	504-505	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	<p>2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris.</p>	507-508	SEOJK 16
	<p>3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	513-521	SEOJK 13 SEOJK 16
	<p>4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:</p> <p>a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).</p> <p>b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).</p>	521-523	SEOJK 16
	<p>5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <p>a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.</p> <p>b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.</p> <p>c. Pihak yang melakukan penilaian.</p>	526-537	SEOJK 16
	<p>6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:</p> <p>a. Prosedur penilaian kinerja.</p> <p>b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.</p>	537-544	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 	544-546	SEOJK 16
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. 	546-551	SEOJK 16
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:	N/A	SEOJK 16
	<ol style="list-style-type: none"> a. Nama. b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah. d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. 		
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	564-566	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite. b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada). c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. 		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.		
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	560-563	
	8. Pernyataan independensi komite audit.	567	
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	570-572	
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	567-569	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit.	572-574	



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:	578-579	
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		SEOJK 16
	2. Usia.		POJK 17
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	580	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	585-586	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	575	
10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>).	575		
11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	581-585		
12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	586-587		
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:	590-592; 609-624	SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
7. Pernyataan independensi komite.	593; 625-626		
8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	600-601; 631-634		
9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	588; 604-605		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite.	588; 604	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	594-600; 626-631	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	601-603; 634-636	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	641-642	SEOJK 16
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	642	
	6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	643-645	
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	650-651	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).		
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	653	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	654	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	648-649	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	651-652	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal.	651	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	656-659	
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	698	POJK 17
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	699	
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal Control</i>) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	700-701	SEOJK 13 SEOJK 16
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	704	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	704	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	712-716	SEOJK 16 SEOJK 13
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	716-721	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	726	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	727	SEOJK 16
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	727-737	SEOJK 13 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	744-748	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.		
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		SEOJK 13
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		748	SEOJK 16
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	755-758	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	759	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	758	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	692	POJK 45
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	692-693	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	693	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
4.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	693	
5.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	693	
6.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>malus</i>), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (<i>clawback</i>).	694	
7.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	694	
8.	Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	694	
9.	Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	694-695	
10.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	695	
11.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material <i>risk takers</i> .	695	
12.	<i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	695	
13.	Rasio gaji tertinggi dan terendah	696	
14.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	696	
15.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	696	
16.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	696	
17.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	696	
18.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	696	



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	19. Informasi kuantitatif mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan. 	696-697	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock Ownership program/MSOP</i>) dan/ atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock Ownership program/ESOP</i>). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah saham dan/atau opsi. Jangka waktu pelaksanaan. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. 	697-698	SEOJK 16
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	<ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud. 	553-555	SEOJK 16
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik.	<ol style="list-style-type: none"> Cara penyampaian laporan pelanggaran. Perlindungan bagi pelapor. Penanganan pengaduan. Pihak yang mengelola pengaduan. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku. Tindak lanjut pengaduan. <p>Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	760 760 760-761 762 763	SEOJK 16
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	<ol style="list-style-type: none"> Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik. <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.</p>	763-767 767	SEOJK 16 POJK 17
Penanganan benturan kepentingan		771	SEOJK 13 POJK 17
Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan kepada debitur inti (<i>individu atau grup</i>) per posisi laporan	770-771	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		772	SEOJK 13 POJK 17
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		770	SEOJK 13

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (<i>internal fraud</i>) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	768-769	SEOJK 13
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	769-770	SEOJK 13
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	769	SEOJK 13
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		772	POJK 17
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau 2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	456-463	SEOJK 16

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) Penjelasan strategi keberlanjutan. b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup). c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik. d) Penjelasan Direksi. e) Tata kelola keberlanjutan. f) Kinerja keberlanjutan. g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada. h) Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada. i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. 2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 3. Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat: a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	790-791	SEOJK 16
-----------------------------------	---	---------	----------



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	<p>b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.</p>		
	<p>4. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.</p>		
	<p>5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:</p>		
	<p>a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan</p>		
	<p>b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>		
	<p>6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.</p>		
	<p>7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.</p>		

Keterangan

- SEOJK 16** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SEOJK 9** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SEOJK 13** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK 45** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- POJK 17** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Laporan Tahunan
2023



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Head Office

Jl Jend Sudirman Kav 44-46

Jakarta 10210

Tel. : (62-21) 251-0244, 251-0254,
251-0264, 251-0269, 251-0279

Fax. : (62-21) 250-0077

www.bri.co.id

Corporate Secretary

Gedung BRI 1 lantai 15

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46

Jakarta 10210, Indonesia

Tel. : (62-21) 575 1966

Fax. : (62-21) 570 0916

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
dan Entitas Anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tropic Pos 1094/1000 Jakarta 10210
 Telepon: 021 2510244, 2510254, 2510264, 2510269, 2510279
 Faksimili: 021 2500077 Kawat: KANPUSBRJ
 Telex: 65293, 65456, 65459, 65461

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sunarso
 Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
 Alamat Domisili : Jl. At Taqwa II No. 4 Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat
 Nomor Telepon : 021 - 575 1705
 Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Viviana Dyah Ayu R.K.
 Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
 Alamat Domisili : Jl. Bumi Serpong Damai Blok L. 10/3 Serpong, Tangerang Selatan
 Nomor Telepon : 021 - 575 1751
 Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Januari 2024

Atas nama dan mewakili Direksi

Sunarso
 Direktur Utama

Viviana Dyah Ayu R.K.
 Direktur Keuangan

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	i - vii
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 - 4
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	5 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	8 - 9
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	10 - 11
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	12 - 357

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, pada tanggal 31 Desember 2023, saldo cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp79.924.211 juta. Lihat informasi kebijakan akuntansi material untuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang diungkapkan dalam Catatan 2e, penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan dalam Catatan 2ao, dan pengungkapan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Kami berfokus pada area ini karena saldo kredit yang diberikan dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir. Selain itu, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi termasuk dalam penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (untuk eksposur yang dinilai secara individu atau kolektif), termasuk faktor-faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan (lanjutan)

Respons audit:

Kami melakukan pengujian pengendalian utama atas pemberian kredit, penilaian kualitas kredit internal secara reguler, serta pencatatan dan pengawasan kredit yang diberikan. Kami memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, serta melakukan validasi atas model pencadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Grup dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, serta menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (*staging*) yang disusun oleh Grup untuk kredit yang diberikan. Kami menguji apakah pengalaman historis mewakili keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian berorientasi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk kredit yang diberikan. Untuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara individual, kami menguji sampel kredit yang diberikan untuk mengevaluasi identifikasi secara tepat waktu oleh Grup atas eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai; untuk kasus-kasus dimana penurunan nilai telah diidentifikasi, kami menilai asumsi Grup atas arus kas masa depan ekspektasian, termasuk nilai agunan yang dapat direalisasikan berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dan internal.

Kami memeriksa keakuratan perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunannya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilai yang dinilai secara individual berdasarkan sampel. Kami melakukan penilaian atas asumsi utama yang digunakan dalam penyesuaian pasca model/*management overlay* yang diterapkan untuk mengantisipasi risiko yang tidak dapat ditangkap sepenuhnya oleh model. Kami menilai apakah pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. Kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini audit kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681

31 Januari 2024



00035

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET			
Kas	2a,2c,3	31.603.784	27.407.478
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2f,4	101.909.121	150.935.150
Giro pada Bank Lain	2a,2c,2d, 2e,2f,5,44	22.331.919	21.488.434
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9.984)	(18.577)
		<u>22.321.935</u>	<u>21.469.857</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	2a,2c,2d, 2e,2g,6,44	65.225.260	70.401.901
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.860)	(1.981)
		<u>65.223.400</u>	<u>70.399.920</u>
Efek-efek	2a,2c,2d, 2e,2h,7,44	331.091.304	330.324.818
Cadangan kerugian penurunan nilai		(81.510)	(82.835)
		<u>331.009.794</u>	<u>330.241.983</u>
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	2c,2d,2e, 2i,8,44	53.895.404	39.067.375
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.323.916)	(1.638.929)
		<u>51.571.488</u>	<u>37.428.446</u>
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c,2u, 9	33.595.231	51.014.678
Tagihan Derivatif	2c,2aj,10	911.683	911.405
Kredit yang Diberikan	2c,2d,2e, 2j,11,44	1.197.752.706	1.079.274.819
Cadangan kerugian penurunan nilai		(79.924.211)	(88.323.830)
		<u>1.117.828.495</u>	<u>990.950.989</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET (lanjutan)			
Pinjaman Syariah	2c,2e,2k, 12	13.668.220	10.514.329
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.093.762)	(1.286.203)
		<u>12.574.458</u>	<u>9.228.126</u>
Piutang Pembiayaan	2c,2d,2e, 2l,13,44	55.008.321	49.287.917
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4.483.915)	(3.477.948)
		<u>50.524.406</u>	<u>45.809.969</u>
Tagihan Akseptasi	2c,2d,2e, 2m,14,44	10.217.408	7.167.600
Cadangan kerugian penurunan nilai		(249.698)	(136.536)
		<u>9.967.710</u>	<u>7.031.064</u>
Penyertaan Saham	2c,2d,2e, 2n,15,44	7.308.167	6.515.095
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.676)	(8.192)
		<u>7.305.491</u>	<u>6.506.903</u>
Aset Tetap	2d,2o,2p, 16		
Biaya perolehan		81.463.777	73.951.201
Akumulasi penyusutan		(21.785.658)	(18.735.154)
Nilai buku - neto		<u>59.678.119</u>	<u>55.216.047</u>
Aset Pajak Tangguhan - neto	2ak,38c	15.605.462	18.712.994
Aset Lain-lain - neto	2c,2e,2p, 2q,2r,17	53.376.453	42.374.001
TOTAL ASET		<u>1.965.007.030</u>	<u>1.865.639.010</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2c,2s,18	30.651.807	24.910.579
Simpanan Nasabah	2c,2d,2t,44		
Giro	19	346.124.372	349.755.590
Tabungan	20	527.945.550	522.647.920
Deposito Berjangka	21	484.258.839	435.480.503
Total Simpanan Nasabah		<u>1.358.328.761</u>	<u>1.307.884.013</u>
Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	2c,2d,2t,22,44	11.958.319	9.334.547
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2c,2d,2u,23,44	19.079.458	9.997.592
Liabilitas Derivatif	2c,2aj,10	925.210	783.921
Liabilitas Akseptasi	2c,2d,2m,14,44	10.217.408	7.167.600
Utang Pajak	2ak,38a	2.546.839	3.053.782
Surat Berharga yang Diterbitkan	2c,2v,24	49.637.581	63.611.761
Pinjaman yang Diterima	2c,2d,2w,25,44	98.850.813	79.371.200
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2d,2e,26,44	6.117.768	6.458.343
Liabilitas Imbalan Kerja	2d,2ae,27,42,44	23.059.624	21.296.487
Liabilitas Lain-lain	2c,2y,2ad,28,45b	36.664.617	27.871.880
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	2c,2x,29	496.683	501.988
TOTAL LIABILITAS		<u>1.648.534.888</u>	<u>1.562.243.693</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 151.559.001.603 lembar saham Seri B)	1,31a	7.577.950	7.577.950
Tambahan modal disetor	31b	75.853.127	75.637.083
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	2o,16	20.216.505	20.267.952
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2ai,31c	(253.744)	(127.954)
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	2h	(2.221.745)	(4.464.483)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h,7	128.230	139.978
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	2ae	(2.134.699)	(689.473)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	1d	(3.614.321)	(2.202.178)
Opsi saham	2af,30	54.769	16.356
Cadangan kompensasi atas saham bonus	31f	287.482	210.266
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	31g	1.758.580	1.758.580
Saldo laba	31d,31e		
Telah ditentukan penggunaannya		3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya		210.688.737	198.147.249
Total Saldo Laba		<u>213.711.422</u>	<u>201.169.934</u>
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk		311.363.556	299.294.011
Kepentingan non-pengendali	31h	5.108.586	4.101.306
TOTAL EKUITAS		<u>316.472.142</u>	<u>303.395.317</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1.965.007.030</u>	<u>1.865.639.010</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2023	2022 ^{*)}
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga dan Syariah	32		
Pendapatan bunga	2z	166.052.387	141.756.773
Pendapatan syariah	2k,2ab	12.943.607	10.118.043
Total Pendapatan Bunga dan Syariah		<u>178.995.994</u>	<u>151.874.816</u>
Beban Bunga dan Syariah	33		
Beban bunga	2z	(42.658.864)	(26.269.701)
Beban syariah	2ab	(1.153.643)	(1.008.042)
Total Beban Bunga dan Syariah		<u>(43.812.507)</u>	<u>(27.277.743)</u>
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto		<u>135.183.487</u>	<u>124.597.073</u>
Pendapatan premi	2ac	9.078.853	8.936.995
Beban klaim	2ac	(6.917.461)	(7.359.672)
Pendapatan premi - neto		<u>2.161.392</u>	<u>1.577.323</u>
Pendapatan penjualan emas	2am	7.982.888	8.175.106
Beban harga pokok penjualan emas	2am	(7.663.244)	(7.875.955)
Pendapatan penjualan emas - neto		<u>319.644</u>	<u>299.151</u>
Pendapatan Operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2aa	20.737.913	18.794.964
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		16.833.578	12.468.321
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	2h,7	1.898.653	1.518.191
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2ah,2ai	402.526	1.132.079
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	2h,7	214.435	145.520
Lain-lain		5.538.680	5.068.619
Total Pendapatan Operasional Lainnya		<u>45.625.785</u>	<u>39.127.694</u>
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	2e,34	(29.523.426)	(27.384.906)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	26d	341.994	543.145
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	2p	(497.848)	(137.431)
Beban Operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	2d,2ae,35,		
Umum dan administrasi	42,44	(37.850.275)	(39.390.133)
Lain-lain	36,16	(28.484.209)	(25.958.686)
Lain-lain		(10.447.807)	(8.967.193)
Total Beban Operasional lainnya		<u>(76.782.291)</u>	<u>(74.316.012)</u>

*) Setelah reklasifikasi (Catatan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2023	2022 ^{*)}
LABA OPERASIONAL		76.828.737	64.306.037
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	37	(399.025)	290.664
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		76.429.712	64.596.701
BEBAN PAJAK	2ak,38b	(16.004.664)	(13.188.494)
LABA BERSIH		60.425.048	51.408.207
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2ae	(1.787.840)	902.754
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		348.975	(176.671)
Surplus revaluasi aset tetap	16	(82.365)	3.297.304
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2ai	(125.790)	(11.979)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	1.782.067	(7.946.514)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	(9.105)	(413.197)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		502.669	1.509.279
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak		628.611	(2.839.024)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		61.053.659	48.569.183

*) Setelah reklasifikasi (Catatan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2023	2022 ^{*)}
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		60.099.863	51.170.312
Kepentingan non-pengendali		325.185	237.895
TOTAL		60.425.048	51.408.207
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		60.708.390	48.333.349
Kepentingan non-pengendali		345.269	235.834
TOTAL		61.053.659	48.569.183
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)			
Dasar	2ag,49	398	338
Dilusian		398	338

^{*)} Setelah reklasifikasi (Catatan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal disetor	Cadangan penurunan nilai atas efek-efek nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham Treasuri	Opsi saham dan cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus Revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali	Saldo Laba		Total Ekuitas pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
											Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	7.577.950	76.242.898	547.026	(115.975)	1.949.387	(1.423.685)	(45.997)	229.521	17.006.230	1.758.580	3.022.685	181.986.363	288.734.983	3.051.821	291.786.804
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.170.312	51.170.312	237.895	51.408.207
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2ae, 2ah	-	(407.048)	(11.979)	(6.413.870)	734.212	-	-	3.261.722	-	-	-	(2.836.963)	(2.061)	(2.839.024)
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	(407.048)	(11.979)	(6.413.870)	734.212	-	-	3.261.722	-	-	51.170.312	48.333.349	235.834	48.569.183
Pembagian laba															
- Dividen atas laba bersih tahun 2021	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.406.603)	(26.406.603)	(18.569)	(26.425.172)
- Dividen interim atas laba bersih tahun 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.602.823)	(8.602.823)	-	(8.602.823)
Saham bonus	1d	-	(1.341)	-	-	-	31.363	-	-	-	-	-	30.022	-	30.022
Opsi saham		-	-	-	-	-	-	(2.899)	-	-	-	-	(2.899)	(483)	(3.382)
Perubahan kepentingan non-pengendali pada entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.765	153.765
Saham treasuri	1d	-	-	-	-	-	(2.187.544)	-	-	-	-	-	(2.187.544)	-	(2.187.544)
Tambahan modal disetor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.298	616.298
Akuisisi dengan entitas sepengendali	31b	-	(604.474)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(604.474)	62.640	(541.834)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		7.577.950	75.637.083	139.978	(127.954)	(4.464.483)	(2.202.178)	226.622	20.267.952	1.758.580	3.022.685	198.147.249	299.294.011	4.101.306	303.395.317

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal disetor	Cadangan penurunan nilai atas efek-efek nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham Treasuri	Opsi saham dan cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali	Saldo Laba		Total ekuitas pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
												Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		7.577.950	75.637.083	139.978	(127.954)	(4.464.483)	(689.473)	(2.202.178)	226.622	20.267.952	1.758.580	3.022.685	198.147.249	299.294.011	4.101.306	303.395.317
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.099.863	60.099.863	325.185	60.425.048
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2ae, 2ai	-	-	(11.748)	(125.790)	2.242.738	(1.445.226)	-	-	(51.447)	-	-	-	608.527	20.084	628.611
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan		-	-	(11.748)	(125.790)	2.242.738	(1.445.226)	-	-	(51.447)	-	-	60.099.863	60.708.390	345.269	61.053.659
Pembagian laba																
- Dividen atas laba bersih tahun 2022	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34.891.943)	(34.891.943)	(25.861)	(34.917.804)
- Dividen interim atas laba bersih tahun 2023	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.666.432)	(12.666.432)	-	(12.666.432)
Saham bonus	31b	-	216.044	-	-	-	-	31.305	77.216	-	-	-	-	324.565	-	324.565
Opsi saham	30	-	-	-	-	-	-	-	38.413	-	-	-	-	38.413	(9)	38.404
Perubahan kepentingan non-pengendali pada entitas anak	1f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.910	133.910
Saham treasuri	1d	-	-	-	-	-	-	(1.443.448)	-	-	-	-	-	(1.443.448)	-	(1.443.448)
Tambahan modal disetor	1f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.971	553.971
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		7.577.950	75.853.127	128.230	(253.744)	(2.221.745)	(2.134.699)	(3.614.321)	342.251	20.216.505	1.758.580	3.022.685	210.688.737	311.363.556	5.108.586	316.472.142

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	Catatan	2023	2022
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Pendapatan yang diterima			
Penerimaan bunga dan investasi		169.068.778	130.501.831
Pendapatan syariah		12.922.019	10.118.043
Pendapatan premi		8.996.516	8.936.995
Pendapatan penjualan emas		7.982.888	8.175.106
Beban yang dibayar			
Beban bunga		(42.461.798)	(25.762.613)
Beban syariah		(1.161.971)	(1.008.042)
Beban klaim		(6.549.595)	(7.359.672)
Beban harga pokok penjualan emas		(7.663.244)	(7.875.955)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		16.833.578	12.468.321
Pendapatan operasional lainnya		29.267.943	27.534.502
Beban operasional lainnya		(75.776.851)	(70.993.349)
Beban non-operasional - neto		(568.000)	(52.531)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan		(14.279.292)	(15.762.408)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		96.610.971	68.920.228
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
(Kenaikan) penurunan aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain		(505.646)	(195.110)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		(1.277.298)	(2.114.619)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya		(14.828.029)	(9.403.150)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		17.419.447	3.900.820
Kredit yang diberikan		(152.128.249)	(106.917.972)
Pinjaman syariah		(3.335.688)	(1.354.828)
Piutang pembiayaan		(5.720.404)	(9.996.487)
Aset lain-lain		(16.170.249)	(2.941.947)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		5.741.228	6.175.192
Simpanan:			
Giro		(3.631.218)	129.165.393
Tabungan		5.297.630	24.971.180
Deposito berjangka		48.778.336	15.004.224
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya		2.623.772	(3.994.882)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		9.081.866	(19.410.916)
Liabilitas lain-lain		7.072.077	5.698.879
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan operasi		(4.971.454)	97.506.005

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2023	2022
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil penjualan aset tetap		168.975	343.195
Penjualan (penambahan) penyertaan saham		36.137	(145.649)
Penerimaan dividen	15	75.572	144.069
Perolehan aset tetap		(8.177.296)	(10.538.233)
Penurunan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi		2.907.520	37.424.578
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan investasi		(4.989.092)	27.227.960
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman yang diterima	50	31.573.410	20.079.547
Pembayaran pinjaman yang diterima	50	(12.212.871)	(9.011.013)
Saham yang dibeli kembali		(1.382.284)	(2.187.544)
Pembagian laba untuk dividen		(43.494.766)	(26.406.603)
Penerimaan pinjaman subordinasi	50	494.142	-
Pembayaran pinjaman subordinasi	50	(500.000)	-
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	24,50	14.112.994	21.739.525
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	24,50	(28.141.850)	(14.650.023)
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		(39.551.225)	(10.436.111)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(49.511.771)	114.297.854
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		(2.663)	(30.287)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		268.192.168	153.924.601
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		218.677.734	268.192.168
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas	2a		
Giro pada Bank Indonesia	3	31.603.784	27.407.478
Giro pada bank lain	4	101.909.121	150.935.150
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	5	22.331.919	21.488.434
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	6	62.678.940	68.361.106
		153.970	-
Total Kas dan Setara Kas		218.677.734	268.192.168

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI" atau "Bank") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan Akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-Undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai Bank Umum Devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021. Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta modal disetor.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Program Rekapitalisasi

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000.

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa total kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Liabilitas Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan total rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001.

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531.

c. Penawaran Umum Saham Perdana, Pemecahan Saham (*Stock Split*) dan Penawaran Umum Terbatas Saham

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering (IPO)*) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI atas nama seri B, yang terdiri dari 2.047.060.000 lembar milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan 1.764.705.000 lembar atas nama Seri B baru, serta bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih.

Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan "S") dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Bapepam-LK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (nilai penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (nilai penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga telah dicatatkan (Catatan 31b).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham Perdana, Pemecahan Saham (*Stock Split*) dan Penawaran Umum Terbatas Saham (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 24 November 2010, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (nilai penuh) per lembar saham menjadi Rp250 (nilai penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2011 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp500 (nilai penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru atau Rp250 (nilai penuh) per lembar saham adalah tanggal 11 Januari 2011.

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp250 (nilai penuh) per saham menjadi Rp50 (nilai penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2017 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp250 (nilai penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 9 November 2017 dan tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru atau Rp50 (nilai penuh) per lembar saham adalah tanggal 10 November 2017.

Dalam rangka pembentukan *Holding* Ultra Mikro, BRI meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I), sesuai hasil keputusan RUPSLB tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 61 tanggal 22 Juli 2021, Notaris Fathiah Helmi S.H., serta telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan Surat OJK No. S-152/D.04/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Dalam PMHMETD I tersebut, BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 saham baru Seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp50 (nilai penuh) dalam bentuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan harga pelaksanaan per lembar saham Rp3.400 (nilai penuh). Tanggal perdagangan dan eksekusi HMETD tersebut mulai dari 13 September 2021 sampai dengan 22 September 2021.

Dari penawaran umum terbatas ini, BRI telah meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 28.213.191.604 lembar saham sehingga mengakibatkan komposisi kepemilikan saham BRI adalah 56,82% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 43,18% dimiliki oleh publik.

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri)

Pada tanggal 5 Februari 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 84.600 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp184.597.481 (nilai penuh), harga wajar program diskresi saham bonus sebesar Rp3.240 (nilai penuh) atau setara Rp274.104.000 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp89.506.518 (nilai penuh).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebesar 2.096.400 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara total Rp4.574.351.773 (nilai penuh), dimana implementasi ini terdiri dari ESA 1 sebanyak 831.000 lembar saham dengan harga wajar Rp3.630 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp3.016.530.000 (nilai penuh) dan ESA 2 sebanyak 1.265.400 lembar saham dengan harga wajar Rp4.410 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp5.580.414.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp4.022.592.226 (nilai penuh).

Pada tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 17 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 11.613.900 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp25.341.568.431 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp26.015.136.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp4.680.363.069 (nilai penuh).

Pada tanggal 25 Oktober 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 590.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara total Rp1.287.381.963 (nilai penuh), harga wajar *Discretionary Pool* sebesar Rp3.750 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp2.212.500.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp925.118.037 (nilai penuh).

Pada tanggal 27 Oktober 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 263.904.800 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp575.841.151.426 (nilai penuh), harga wajar ESA 3 sebesar Rp4.020 (nilai penuh) atau setara Rp1.060.897.296.000 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp485.056.144.574 (nilai penuh).

Pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 124.565.200 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp271.801.680.741 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp279.026.048.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp7.224.367.259 (nilai penuh).

Pada tanggal 17 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 282.159.300 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp615.672.531.146 (nilai penuh), harga wajar ESA 4 sebesar Rp3.926 (nilai penuh) atau setara Rp1.107.757.411.800 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp492.084.880.654 (nilai penuh).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

Pada tanggal 17 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 11.004.400 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp24.011.637.404 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp24.649.856.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp4.660.603.096 (nilai penuh).

Pada tanggal 27 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 6.049.800 lembar saham terdiri dari ESA 1 sebanyak 16.000 lembar saham dengan harga wajar Rp3.630 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp58.080.000 (nilai penuh), ESA 2 sebanyak 266.400 lembar saham dengan harga wajar Rp4.410 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp1.174.824.000 (nilai penuh), ESA 3 sebanyak 4.813.700 lembar saham dengan harga wajar Rp4.020 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp19.351.074.000 (nilai penuh), dan ESA 4 sebanyak 953.700 lembar saham dengan harga wajar Rp3.926 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp3.744.226.200 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp11.127.520.477 (nilai penuh).

Pada tanggal 28 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 1.742.600 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp3.802.358.996 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp3.903.424.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp732.402.204 (nilai penuh).

Pada tanggal 30 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 30.720.900 lembar saham dengan rincian sebanyak 30.252.500 lembar dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp66.011.055.629 (nilai penuh) dan sebanyak 468.400 lembar dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.881 (nilai penuh) atau setara Rp1.349.460.400 (nilai penuh), harga wajar ESA Khusus sebesar Rp4.080 (nilai penuh) atau setara Rp125.341.272.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp57.980.755.971 (nilai penuh). Atas transaksi yang terjadi pada tahun 2021, total saham treasuri yang dimiliki oleh BRI adalah sebanyak 15.931.900 lembar saham.

BRI melalui surat No. R.0034-DIR/ALM/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp3.000.000. Pembelian kembali saham BRI tersebut telah disetujui oleh OJK melalui Surat No.S-29/PB.31/2022 tanggal 21 Februari 2022 dan telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2022. BRI juga telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000 melalui surat No.B.7-CSC/CSM/CGC/01/2022 tanggal 21 Januari 2022. Pembelian kembali tersebut secara bertahap dalam periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Pada bulan April hingga Juli 2022, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 184.245.400 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp818.380 dengan rata-rata harga pembelian Rp4.442 (nilai penuh) per lembar saham.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

Pada tanggal 12 Agustus 2022 terdapat implementasi program kepemilikan saham BRI yang bersumber dari saham treasuri hasil pembelian kembali tahun 2022. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 7.064.100 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp4.440 (nilai penuh) atau setara Rp31.363 per lembar saham. Harga pelaksanaan program sebesar Rp4.250 (nilai penuh) atau setara Rp30.022. Selisih antara nilai perolehan saham treasuri dan biaya program berdasarkan harga wajar dicatat dalam pos agio sebesar Rp1.341 (Catatan 31b).

Pada bulan Agustus hingga Desember 2022, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 295.208.700 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga perolehan sebesar Rp1.365.888 dan rata-rata harga pembelian sebesar Rp4.627 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada bulan Januari 2023, BRI melanjutkan pembelian saham sebanyak 167.931.800 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp815.732 dan rata-rata harga pembelian sebesar Rp4.858 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tanggal 14 Juli 2023 terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI yang bersumber dari saham treasuri hasil pembelian kembali tahun 2020. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 501.600 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.881 (nilai penuh) atau setara Rp1.445. Pelaksanaan program ini terdiri dari ESA 1 sebanyak 21.100 lembar saham dengan nilai wajar Rp3.630 (nilai penuh), ESA 2 sebanyak 32.300 lembar saham dengan nilai wajar Rp4.410 (nilai penuh), ESA 3 sebanyak 33.900 lembar saham dengan nilai wajar Rp4.020 (nilai penuh), dan ESA 4 sebanyak 414.300 lembar saham dengan nilai wajar Rp3.926 (nilai penuh), dimana secara total harga pelaksanaan program setara dengan Rp1.982. Selisih antara nilai perolehan saham treasuri dan biaya program berdasarkan harga wajar dicatat dalam pos agio sebesar Rp537 (Catatan 31b).

Pada tanggal 18 Agustus 2023 terdapat implementasi program kepemilikan saham BRI yang bersumber dari saham treasuri hasil pembelian kembali tahun 2022. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 6.440.500 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp4.636 (nilai penuh) atau setara Rp29.860. Harga pelaksanaan program sebesar Rp5.450 (nilai penuh) atau setara Rp35.101. Selisih antara nilai perolehan saham treasuri dan biaya program berdasarkan harga wajar dicatat dalam pos agio sebesar Rp5.241 (Catatan 31b).

Pada bulan September sampai dengan Desember 2023, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 118.833.600 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp625.555 dan rata-rata harga pembelian sebesar Rp5.264 (nilai penuh) per lembar saham.

Adapun harga perolehan di atas merupakan harga perolehan dan tidak termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap pembelian saham treasuri.

Sehingga per tanggal 31 Desember 2023, total saham treasuri yang dimiliki oleh BRI sebanyak 768.144.900 lembar saham.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Kantor Wilayah	18	18
Kantor Audit Intern Pusat	1	1
Kantor Audit Intern Wilayah	18	18
Kantor Cabang Dalam Negeri	453	448
Kantor Cabang Khusus ^{*)}	-	1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	6	6
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri ^{**)}	7.155	7.611
Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Luar Negeri	3	3
Teras Keliling	115	117
Teras Kapal	4	4

^{*)} Sesuai dengan Nota Dinas B.63.e-PPM/ODV/OD2/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 Perihal Penyampaian persetujuan perubahan supervisi KCK

^{**)} Sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum, penyajian Unit Kerja Kantor Kas, BRI Unit dan Teras Kantor dicatatkan sebagai Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 BRI memiliki 5 (lima) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di New York, Cayman Islands, Singapura, Timor-Leste dan Taipei, serta 1 (satu) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di Hong Kong.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 BRI memiliki 10 (sepuluh) entitas anak yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk, BRI Global Financial Services Co. Ltd. (dahulu BRI Remittance Co. Ltd.) Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BRI Ventura Investama, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management).

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, *senior executive vice president*, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala satuan kerja audit intern dan kepala audit intern wilayah, pemimpin wilayah, pemimpin cabang khusus dan pemimpin cabang.

Total pekerja BRI dan entitas anak masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60.084	60.209
Entitas Anak	20.081	18.870
	<u>80.165</u>	<u>79.079</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1 tanggal 2 Mei 2023. Adapun Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Komisaris Utama/Komisaris	Kartika Wirjoatmodjo	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	Hendrikus Ivo	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	Agus Riswanto	Agus Riswanto
Komisaris Independen	Dwi Ria Latifa	Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	Nurmaria Sarosa	Nurmaria Sarosa
Komisaris Independen	Heri Sunaryadi	Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	Paripurna Poerwoko	Paripurna Poerwoko
	Sugarda	Sugarda
Komisaris	Rabin Indrajad	Rabin Indrajad
	Hattari	Hattari
Komisaris	Awan Nurmawan Nuh	Hadiyanto

Susunan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1 tanggal 2 Mei 2023. Adapun Susunan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Direktur Utama	Sunarso	Sunarso
Wakil Direktur Utama	Catur Budi Harto	Catur Budi Harto
Direktur	Viviana Dyah Ayu R.K	Viviana Dyah Ayu R.K
Direktur	Amam Sukriyanto	Amam Sukriyanto
Direktur	Andrijanto	Andrijanto
Direktur	Handayani	Handayani
Direktur	Supari	Supari
Direktur	Arga Mahanana	Arga Mahanana
	Nugraha	Nugraha
Direktur	Agus Sudiarto	Agus Sudiarto
Direktur	Agus Noorsanto	Agus Noorsanto
Direktur	Agus Winardono	Agus Winardono
Direktur	Ahmad Solichin	Ahmad Solichin
	Lutfiyanto	Lutfiyanto

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Komite Audit BRI pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 2351-DIR/HCB/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun susunan Komite Audit BRI pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 1503-DIR/HCB/09/2022 tanggal 7 September 2022:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ketua :	Hendrikus Ivo	Hendrikus Ivo
Anggota :	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Anggota :	Heri Sunaryadi	Heri Sunaryadi
Anggota :	Agus Riswanto	Agus Riswanto
Anggota :	Sahat Pardede	Sahat Pardede
Anggota :	Irwanto	Irwanto
Anggota :	Duma Riana Hutapea	Bardiyono Wiyatmojo

Aestika Oryza Gunarto menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kep 524-DIR/HCB/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Adapun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023, Sekretaris Perusahaan BRI dijabat oleh Agustya Hendy Bernadi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 1616 DIR/HCB/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dijabat oleh Triswahju Herlina sesuai Surat Keputusan Direksi BRI No. Kep 339-DIR/HCB/03/2022 tanggal 7 Maret 2022.

f. Entitas Anak

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya)

Pada tanggal 19 Agustus 2010, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat (PPJB) dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) selaku pemegang 95,96% saham PT Bank Agroniaga Tbk ("Bank Agro") untuk mengakuisisi saham Bank Agro dengan total nominal sebesar Rp330.296 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109 (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 37 tanggal 24 November 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap Bank Agro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat No. 13/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan akta akuisisi No. 14 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Agro, sebagaimana dimuat dalam akta No. 68 tanggal 29 Desember 2009, Notaris Rusnaldy, S.H. Hal tersebut diatas telah mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang "Pengambilalihan Perusahaan Terbuka", BRI sebagai pengendali baru Bank Agro diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender terhadap saham Bank Agro yang dimiliki pemegang saham publik. Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4985/BL/2011 dan telah diumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Investor Daily*, keduanya pada tanggal 5 Mei 2011. Masa Penawaran Tender dimulai pada tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2011. Pada tanggal penutupan masa Penawaran Tender, terdapat 113.326.500 lembar saham (3,15% dari seluruh saham Bank Agro) yang dibeli oleh BRI. Harga Penawaran Tender yang digunakan adalah sebesar Rp182 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tanggal 1 Juli 2011, telah dilaksanakan penjualan saham kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar saham atas eksekusi opsi beli Dapenbun dengan harga Rp109 (nilai penuh) per lembar saham. Selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, jangka waktu pengembalian *tender offer* adalah selama 2 (dua) tahun. Namun, khusus untuk Bank Agro maka BRI wajib memenuhi kepemilikan saham publik minimal adalah sebesar 10% dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 24 Mei 2013. Hal ini untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011. Sampai dengan 31 Desember 2011, saham Bank Agro yang berhasil dijual ke publik sebesar 500.000 lembar saham sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Agro per 31 Desember 2011 menjadi 79,78% dan Dapenbun 14%. Selama tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat penjualan saham, kemudian pada tahun 2014 terdapat penjualan saham sebesar 130.000 lembar saham, sehingga per tanggal 31 Desember 2014, kepemilikan saham publik untuk memenuhi surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011 sebesar 10% pada tanggal 24 Mei 2013 belum dapat dipenuhi BRI karena tidak aktifnya harga saham Bank Agro di pasar modal.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012, Notaris Rusnaldy, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("BRI Agro") dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Pada tanggal 10 Mei 2013, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 26 Juni 2013, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-186/D.04/2013 menyetujui Pernyataan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.832.685.599 lembar saham.

Hasil dari PUT IV menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 30 Juli 2013, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 80,43%, Dapenbun 14,02% dan publik 5,55%. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074249.AH.01.09 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Pada tanggal 11 Mei 2015, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 5.588.085.883 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 17 Juni 2015, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-259/D.04/2015 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.028.934.521 lembar saham.

Hasil dari PUT V menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 87,23%, Dapenbun 9,10% dan publik 3,67%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0951264 tanggal 14 Juli 2015.

Pada tanggal 17 Oktober 2016, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham dan menerbitkan Waran Seri II sebanyak 616.908.103 lembar. Pada tanggal 25 November 2016, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-695/D.04/2016 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.845.996.122 lembar saham. Waran Seri II dapat dikonversi menjadi saham BRI Agro dengan nilai Rp130 (nilai penuh) per lembar saham dengan periode pelaksanaan dari 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

Hasil dari PUT VI menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 27 Desember 2016, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro tetap sebesar 87,23%, Dapenbun 7,08% dan publik 5,69%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0112637 tanggal 27 Desember 2016.

Sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 (akhir dari konversi waran), jumlah waran yang telah dikonversi menjadi saham sejumlah 612.937.654 lembar sehingga meningkatkan modal saham BRI Agro sebesar Rp61.294.

Pada tanggal 2 Mei 2017, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 2.515.555.707 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 12 Juni 2017, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-293/D.04/2017 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.515.555.707 lembar saham.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Hasil dari PUT VII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Juli 2017, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,16%, Dapenbun 6,44% dan publik 6,39%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0154825 tanggal 21 Juli 2017.

Pada Akta RUPS Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. 51 tanggal 26 Juni 2018 telah memberikan Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) sebagaimana diatur dalam POJK NO. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka Program *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP), sebanyak-banyaknya 350.000.000 lembar saham dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 249.376.451 lembar saham.

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VIII ("PUT VIII") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 30 Agustus 2018, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-113/D.04/2018 memberitahukan mengenai Efektifnya PUT VIII sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.889.085.049 lembar saham.

Hasil dari PUT VIII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 2 Oktober 2018, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,10%, Dapenbun 5,00% dan publik 7,90%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0249178 tanggal 4 Oktober 2018.

Hasil dari MESOP tahun 2021 dengan Periode Pelaksanaan yang terhitung 30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 September 2021 menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 tanggal 27 September 2021 dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 85,70% dan publik 14,30%. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0453530 tanggal 27 September 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 27 September 2021, Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk ("Bank Raya") yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU0052731.AH.01.02 tahun 2021, tanggal 27 September 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. Kep-65/PB.1/2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Raya Indonesia Tbk pada tanggal 1 November 2021. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan diterbitkan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 17 Desember 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Pada Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Raya Indonesia Tbk No. 23 tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., telah memberikan Persetujuan untuk Penerbitan Saham Baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IX (“PUT IX”).

Pada tanggal 30 September 2021 melalui surat No. B.562/DIR.01/SKP/09/2021, Bank Raya menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD IX kepada Dewan Komisiner OJK sebanyak-banyaknya 2.150.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 18 November 2021, Dewan Komisiner OJK melalui surat No.S-207/D.04/2021 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 1.054.545.185 lembar saham.

Hasil dari PMHMETD IX menyebabkan Anggaran Dasar Bank Raya mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 17 Desember 2021, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Raya sebesar 85,72% dan publik 14,28%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Raya Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0487031 tanggal 17 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 30 September 2022, Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn., dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Raya Indonesia Tbk tentang perubahan alamat kantor pusat Bank Raya dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Raya guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-0070827.AH.01.02 Tahun 2022, tanggal 30 September 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2022 melalui surat No. B.681/DIR.03/CSC/10/2022, Bank Raya menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD X kepada Dewan Komisiner OJK sebanyak-banyaknya 2.320.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 30 November 2022, Dewan Komisiner OJK melalui surat No.S-250/D.04/2022 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 1.993.201.832 lembar saham.

Hasil dari PMHMETD X menyebabkan Anggaran Dasar Bank Raya mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 26 Desember 2022, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Bank Raya berubah menjadi sebanyak 24.740.107.814 lembar saham sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Raya meningkat menjadi 86,85% dan publik 13,15%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Raya Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0410365 tanggal 26 Desember 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Bank Raya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Raya Indonesia Tbk No. 14 tanggal 23 Mei 2023 telah memberikan persetujuan untuk PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK NO. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka program *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP), sebanyak-banyaknya 350.000.000 lembar saham dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Raya Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0066677 tanggal 23 Mei 2023. Atas PMTHMETD untuk program MESOP, jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Bank Raya berubah menjadi sebanyak 24.740.494.294 lembar saham sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Raya sebesar 86,85% dan publik 13,15%.

Total aset Bank Raya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp12.492.372 dan Rp13.949.884 atau 0,64% dan 0,75% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp890.959 dan Rp542.437 atau 0,50% dan 0,64% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Bank Raya adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan. Bank Raya berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/1037/UUps/Ps6D tanggal 26 Desember 1989, telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum.

Kantor pusat Bank Raya berlokasi di Menara BRILiaN, Jl. Gatot Subroto No. 177A, Jakarta, dan memiliki 5 kantor cabang, 13 *community branch*, 6 kantor cabang pembantu, 2 kantor kas dan 1 E-Buzz.

BRI Global Financial Services Co. Ltd. Hong Kong (dahulu BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance))

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 lembar saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270 (nilai penuh). Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong dengan *stamp duty* pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya Certificate of Change Name No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Berdasarkan Keputusan RUPS BRIngin Remittance Company Limited tanggal 14 November 2019, serta dengan diterbitkannya Certificate of Change of Name No. 961091 tanggal 31 Oktober 2023 oleh Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region, maka nama BRI Remittance Company Limited Hong Kong secara resmi berubah menjadi BRI Global Financial Services Company Limited Hong Kong (BRI Global Financial Services).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

BRI Global Financial Services Co. Ltd. Hong Kong (dahulu BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance)) (lanjutan)

Total aset RI Global Financial Services pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp24.232 dan Rp17.982 atau 0,00123% dan 0,00096% dari total aset konsolidasian.

Sesuai dengan izin usaha resmi dari Regulator Hong Kong sebagai *Money Service Operator* (MSO) dan *Money Lender Business*, maka ruang lingkup kegiatan BRI Global Financial Services adalah menjalankan layanan remitansi, *money exchange*, dan *financing* (baik untuk perusahaan maupun perorangan, dalam hal ini pekerja migran Indonesia) serta lingkup layanan operasional lain terkait dengan BRI Group yang dimiliki oleh nasabah BRI Group yang berdomisili di Hong Kong sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan oleh otoritas Hong Kong.

BRI Global Financial Services *Local Management Office* (LMO)/Kantor pusat berlokasi di RM1202, 12/F, Park Avenue Tower, No 5 Moreton Terrace, Causeway Bay, Hong Kong dan memiliki 4 (empat) kantor cabang yang tersebar di wilayah Causeway Bay, Mongkok, Yuen Long dan Tsuen Wan.

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Pada tanggal 6 Oktober 2015, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BRI Life") untuk mengakuisisi 91,001% saham BRI Life dengan harga pembelian sebesar Rp1.626.643. Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 14 tanggal 14 Desember 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Life tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-151/PB.31/2015 tanggal 23 Desember 2015. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan akta Pengambilalihan Saham dalam PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No. 41 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 91,001% dari total saham yang dikeluarkan BRI Life dan sebesar 8,999% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., notaris pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta, dilakukan perubahan nama dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi PT Asuransi BRI Life dan sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-140/NB.11/2017 tanggal 20 Maret 2017, BRI Life memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013073.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021, diatur mengenai perubahan nomenklatur, susunan Pengurus, dan perubahan Anggaran Dasar yang salah satunya terkait dengan adanya peningkatan modal dan perubahan struktur kepemilikan BRI Life melalui penerbitan sebanyak 936.458 lembar saham baru untuk diambil bagian oleh FWD Financial Services Pte. Ltd.. Sebagai akibat dari penerbitan saham baru tersebut, maka terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi BRI 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 6,31%, dan FWD Financial Services Pte. Ltd 29,86%. Adapun Perubahan struktur kepemilikan ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-12/NB.1/2021 tanggal 4 Februari 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi BRI Life Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asuransi BRI Life No. AHU.AH.01.03-0460422 tanggal 13 Oktober 2021, Pemegang Saham BRI Life menyetujui Pengalihan Saham FWD Financial Services Pte. Ltd. kepada FWD Management Holdings Limited. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2021 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi: BRI 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 6,31%, dan FWD Management Holding Limited 29,86%. Adapun perubahan struktur kepemilikan ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari OJK IKNB melalui Surat No S.93/NB.1/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Persetujuan Atas Perubahan Kepemilikan BRI Life.

Struktur Kepemilikan BRI Life mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi BRI Life Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asuransi BRI Life No. AHU.AH.01.03-0033868 tanggal 2 Maret 2023, Pemegang Saham BRI Life memutuskan dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp339.200 menjadi Rp365.559, dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 263.580 lembar saham atau dalam nilai nominal yaitu sebesar Rp26.359 yang diambil seluruhnya oleh FWD Management Holdings Limited. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi BRI 54,77%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 5,42% dan FWD Management Holdings Limited 39,82%. Adapun perubahan struktur kepemilikan ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari OJK IKNB melalui Surat No. S.315/NB.02/2023 tanggal 26 Februari 2023 tentang Persetujuan Atas Perubahan Kepemilikan BRI Life.

Anggaran Dasar BRI Life telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life, yang dibuat di hadapan notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life No. AHU-AH.01.03-9978922 tanggal 16 Juni 2023 serta telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0033982.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI Life yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI Life adalah melakukan usaha di bidang perasuransian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BRI Life mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-181/KMK.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

BRI Life mendapatkan izin pembukaan kantor cabang dan unit Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) (lanjutan)

Total aset BRI Life pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp23.678.043 dan Rp21.627.641 atau 1,20% dan 1,16% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga dan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.506.402 dan Rp4.488.650 atau 4,52% dan 5,27% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat BRI Life berlokasi di Gedung Graha Irama Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 dan 2, Jakarta, dan memiliki 26 kantor pelayanan.

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)

Pada tanggal 12 Juli 2016, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") dalam rangka peningkatan kepemilikan saham BRI pada PT BTMU-BRI Finance ("BBF") dari semula sebesar 45% menjadi 99%, dengan harga pembelian sebesar Rp378.548, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-102/PB.31/2016 tanggal 21 September 2016. Pengalihan saham ini diselesaikan pada tanggal 30 September 2016, berdasarkan akta No. 75 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 99% dari total saham yang dikeluarkan PT BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance") dan sebesar 1% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Atas akuisisi BRI Finance, BRI mencatat *goodwill* sebesar Rp51.915 yang diklasifikasikan dalam akun aset lain-lain.

Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 67 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama dari PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia, dan sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-771/NB.11/2016 tanggal 17 Oktober 2016, sehubungan dengan perubahan nama tersebut maka BRI Finance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan pembiayaan atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sanwa-BRI Finance, yang selanjutnya berubah nama menjadi PT UFJ-BRI Finance dan PT BTMU-BRI Finance.

Anggaran Dasar BRI Finance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan selanjutnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BRI Multifinance Indonesia No. 237 tanggal 23 April 2019, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023113.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 29 April 2019, dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0223685 tanggal 29 April 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2019, Tambahan Berita Negara No. 35668/2019, antara lain berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan BRI Finance dari semula di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Selatan, perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan tindak lanjut atas arahan dari Pemegang Saham Pengendali untuk penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) (lanjutan)

Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 16 Juni Tahun 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BRI Multifinance Indonesia, yang dibuat di hadapan Notaris Arry Supratno, S.H., di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0034000.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam rangka penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar BRI Finance dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Finance adalah melakukan usaha dalam bidang pembiayaan.

Total aset BRI Finance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.057.071 dan Rp7.321.870 atau 0,46% dan 0,39% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.168.441 dan Rp397.047 atau 0,65% dan 0,47% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat BRI Finance berlokasi di Menara Brilian Lantai 22, 21 & 1, Jalan Gatot Subroto No. 177A Kav. 64 Jakarta Selatan dan memiliki 26 kantor cabang.

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)

Pada tanggal 29 Juni 2018, BRI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Dalam PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura ("Sarana NTT Ventura") dengan PT Bahana Artha Ventura ("BAV") dalam rangka pengambilalihan seluruh kepemilikan saham BAV dalam Sarana NTT Ventura menjadi milik BRI sebanyak 97,61%, dengan harga pembelian sebesar Rp3.090, dan telah mendapatkan persetujuan masing-masing dari Dewan Komisaris BRI selaku wakil dari pemegang saham lewat suratnya No. R. 67-KOM/09/2018 tanggal 26 September 2018 serta persetujuan dari OJK melalui surat No. S-112/PB.31/2018 tanggal 25 September 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 70 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana BRI memiliki 97,61% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT BRI Ventura Investama (dahulu Sarana NTT Ventura).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Zantje Mathilda Voss Tomasowa, S.H., M.Kn., di Kupang, telah dilakukan perubahan nama dari PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura menjadi PT BRI Ventura Investama ("BRI Ventures"), beserta perubahan tempat kedudukan Perusahaan dari semula di kota Kupang menjadi di kota Jakarta. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0030398.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018. Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-189/NB.11/2019 tanggal 1 April 2019, sehubungan dengan perubahan nama tersebut, BRI Ventures telah memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan modal ventura atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) (lanjutan)

Anggaran Dasar BRI Ventures diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta No. 65 tanggal 25 April 2022 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., antara lain dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar BRI Ventures dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI 2020) dan dicatat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0030721.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 27 April 2022 ("Anggaran Dasar").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BRI Ventures diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2023 terkait dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh. Keputusan ini telah dicatat dalam Akta Notaris No. 45 Tanggal 31 Maret 2023 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0048199 tanggal 31 Maret 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI Ventures adalah menyelenggarakan usaha modal ventura konvensional termasuk mengelola dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK serta kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu pasangan usaha dan atau debitur yang memiliki usaha produktif dan atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Total aset BRI Ventures pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.672.050 dan Rp2.176.790 atau 0,14% dan 0,12% dari total aset konsolidasian.

Kantor pusat BRI Ventures berlokasi di District 8 Office SCBD, Prosperity Tower Lantai 16 Unit F, Jalan Jenderal Sudirman No 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS)

Pada tanggal 27 September 2018, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa Sekuritas") dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 67%, dengan harga pembelian sebesar Rp446.888, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-1496/PM.21/2018 tanggal 21 Desember 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengambilalihan Saham No. 53 yang dibuat di hadapan Notaris Masjuki, S.H., pengganti dari Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., di Jakarta, dimana BRI memiliki 67% dari total saham Danareksa Sekuritas dan sebesar 33% dimiliki oleh PT Danareksa (Persero).

Anggaran Dasar BRIDS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar BRIDS dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor BRIDS yang dituangkan dalam Akta No. 91 Notaris Imas Fatimah, S.H., tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 Tambahan No. 9870 tanggal 7 April 2009.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (lanjutan)

Pada tahun 2017 terdapat perubahan pada maksud dan tujuan BRIDS sesuai ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta No. 1 Notaris Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., tanggal 5 Juli 2017. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013998.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Pada tahun 2020 terdapat perubahan nama BRIDS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., di Jakarta, yaitu perubahan nama PT Danareksa Sekuritas menjadi PT BRI Danareksa Sekuritas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0069706.AH.01.02 Tahun 2020. Sehubungan dengan perubahan nama PT BRI Danareksa Sekuritas telah dicatatkan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-1210/PM.212/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Berdasarkan Akta No. 168 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., di Jakarta, terkait dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh BRI sesuai dengan persetujuan dari OJK melalui surat OJK No. S-555/PM.21/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 27 Juni 2022 sehingga kepemilikan saham BRI menjadi 71% dari total saham BRIDS dan sebesar 29% dimiliki oleh PT Danareksa (Persero). Perubahan ini diberitahukan pada Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256545 tanggal 27 Juni 2022.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BRIDS dituangkan dalam Akta No. 86 tanggal 17 April 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0024267.AH.01.02.Tahun 2023, serta pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0058587 tanggal 2 Mei 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BRI Danareksa Sekuritas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRIDS adalah sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek serta kegiatan usaha penunjang lainnya yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

BRIDS memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-291/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 dan No. KEP-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992.

Sebagai bagian dari perizinan yang telah dimiliki, BRIDS juga telah memperoleh persetujuan kegiatan usaha penunjang sebagai Penatalaksana (*Arranger*) *Medium Term Notes* (MTN), *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Hybrid Product* seperti *Perpetuity Notes*, pinjaman sindikasi, *Global Medium Term Notes* (GMTN), *Global Bond* dan Penasihat Keuangan (*Financial Advisory*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-143/PM.21/2017 tanggal 16 Maret 2017.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (lanjutan)

Total aset BRIDS pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.059.172 dan Rp1.648.173 atau 0,05% dan 0,09% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp42.065 dan Rp8.264 atau 0,02% dan 0,01% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat BRIDS berlokasi di Gedung BRI II Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta dan memiliki 10 cabang, 24 Gerai dan 3 kemitraan.

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)

Pada tanggal 20 Juni 2019, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJBSB") dengan Dana Pensiun BRI dalam rangka pengambilalihan kepemilikan saham Dana Pensiun BRI dalam PT BRI Asuransi Indonesia (dahulu bernama PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur) menjadi milik BRI sebanyak 90%, dengan harga pembelian sebesar Rp1.041.000 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-135/NB.1/2019 tanggal 16 September 2019. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 26 September 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta Akuisisi Saham No. 31 yang dibuat di hadapan Notaris Dina Chozie, SH., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta, dimana BRI memiliki 90% dari total saham PT BRI Asuransi Indonesia ("BRI Insurance") dan sebesar 10% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI.

Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyuwidayati, S.H., M.Kn., di Jakarta, pada Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan dilakukan perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menjadi PT BRI Asuransi Indonesia ("BRI Insurance"). Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0011603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020.

Anggaran Dasar BRI Insurance mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir tertuang dalam Akta No. 26 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Zun Nur Ain Fauzia, S.H., M.Kn., di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00388682.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023, serta pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0089063 tanggal 6 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BRI Asuransi Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Insurance adalah melaksanakan kegiatan usaha asuransi kerugian, membuat dan menutup perjanjian dari segala asuransi kerugian, asuransi kerugian non-konvensional, termasuk pula perjanjian-perjanjian, reasuransi, terkecuali pertanggungan jiwa.

BRI Insurance memperoleh izin usaha di bidang asuransi kerugian pada tanggal 26 Agustus 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.-128/KM.13/1989. Sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-105/NB.11/2020 tanggal 6 Maret 2020, BRI Insurance memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur yang selanjutnya berubah nama menjadi PT BRI Asuransi Indonesia.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (lanjutan)

BRI Insurance mendapatkan izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-006/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Insurance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.465.609 dan Rp4.891.250 atau 0,33% dan 0,26% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga, syariah, dan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.681.620 dan Rp577.558 atau 0,89% dan 0,68% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat BRI Insurance berlokasi di Graha BRI Insurance, Jl. Mampang Prapatan Raya No.18, Jakarta Selatan dan memiliki 21 kantor cabang, 2 kantor cabang syariah, 19 kantor perwakilan *marketing*, 2 kantor perwakilan *marketing* syariah, 50 *marketing channel* dan 21 *marketing office* syariah

PT Pegadaian (Pegadaian)

Pada tanggal 13 September 2021, Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri BUMN dan BRI menandatangani perjanjian pengalihan hak atas saham Negara Republik Indonesia pada PT Pegadaian (Persero) (Pegadaian) dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham BRI, yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 13 September 2021. Melalui perjanjian tersebut, Negara Republik Indonesia mengalihkan kepada BRI berupa hak atas seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Pegadaian dengan jumlah sebanyak 6.249.999 saham seri B yang seluruhnya senilai Rp48.670.528. Dengan demikian, sejak tanggal 13 September 2021, BRI adalah pemilik saham yang dialihkan dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pemilik dari saham-saham yang dialihkan.

Anggaran Dasar Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 serta telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian No. AHU-AH.01.03-0454524, tanggal 29 September 2021.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Pegadaian adalah melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa usaha pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis teknologi informasi/*platform digital* (untuk selanjutnya disebut "TI") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pegadaian untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Pegadaian dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Total aset Pegadaian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp82.151.803 dan Rp72.920.622 atau 4,18% dan 3,91% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga, syariah dan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.861.162 dan Rp10.197.407 atau 8,30% dan 11,98% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat Pegadaian berlokasi di Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat 10430 dan mempunyai 12 kantor wilayah, 61 kantor area, 642 kantor cabang, dan 3.443 kantor unit pelayanan cabang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

Pada tanggal 13 September 2021, BRI menandatangani perjanjian pengalihan hak atas saham Negara Republik Indonesia pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam rangka penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham BRI. Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri BUMN mengalihkan kepada BRI berupa hak atas seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PNM dengan jumlah sebanyak 3.799.999 saham seri B yang seluruhnya senilai Rp6.100.068. Dengan demikian, sejak tanggal 13 September 2021, BRI adalah pemilik saham yang dialihkan dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pemilik dari saham-saham yang dialihkan.

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, yang pendiriannya dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor: 1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah Nomor: 4758/BH.09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 ("Akta No. 1").

Akta No.1 tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 18 tanggal 7 Juni 2023 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan No. AHU-0037792.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023. Pemberitahuan perubahannya telah dicatat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani No. AHU-AH.01.09-0134474 tertanggal 5 Juli 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan PNM adalah jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng, penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) serta jasa manajemen dan kemitraan.

Total aset PNM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp51.106.905 dan Rp46.744.758 atau 2,60% dan 2,51% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.509.236 dan Rp5.548.145 atau 8,11% dan 6,52% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat PNM berlokasi di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan memiliki 62 kantor cabang, 3.849 kantor unit Mekaar, 641 kantor unit ULaMM (termasuk 20 kantor unit representatif).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM))

Pada tanggal 27 September 2018, BRI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PJBS") dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham PT Danareksa Investment Management ("DIM") dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 10.500.000 lembar saham atau setara dengan 35% dari keseluruhan saham beredar DIM, dengan harga pembelian sebesar Rp371.959 yang telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-1453/PM.21/2018 tanggal 14 Desember 2018. Transaksi jual beli saham ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 47 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., Notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.

Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2022, BRI telah menandatangani PJBS kembali dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham DIM dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 9.000.000 lembar saham atau setara dengan 30% dari keseluruhan saham beredar DIM, dengan harga pembelian sebesar Rp360.000 yang telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-889/PM.21/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Persetujuan Atas Rencana Perubahan Komposisi Kepemilikan Pemegang Saham PT Danareksa Investment Management. Transaksi jual beli saham ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 30 November 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sehingga BRI memiliki 19.500.000 lembar saham atau setara dengan 65% dari total saham beredar DIM.

Perubahan secara keseluruhan anggaran dasarnya telah dimuat dalam akta tertanggal 1 Februari 2019 No. 01 dibuat di hadapan M. Nova Faisal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Februari 2019 No. AHU-0006825.AH.01.02 Tahun 2019 serta pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 11 Februari 2019 No. AHU-AH.01.03-0079597 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 Maret 2019 No. 26, Tambahan No. 10084.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0083200.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Anggaran Dasar DIM telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Berdasarkan Akta Pernyataan tentang Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Danareksa Investment Management No. 4 tanggal 4 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., di Jakarta Pusat, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan meliputi perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management menjadi bernama PT BRI Manajemen Investasi ("BRI-MI"), perubahan tempat kedudukan Perseroan, yang semula berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza BP Jamsostek Lantai 11, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B Jakarta 12910, berubah menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang beralamat di Gedung BRI II Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210 dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Anggaran Dasar, maksud dan tujuan BRI-MI adalah melakukan kegiatan usaha pengelolaan portofolio investasi untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (manajer investasi) termasuk tetapi tidak terbatas pada reksa dana, melakukan kegiatan memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian aset investasi, melakukan kegiatan usaha untuk merintis atau berusaha memperoleh izin usaha untuk suatu reksa dana (promotor reksa dana), melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada *private equity* dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Total aset BRI-MI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp288.820 dan Rp276.520 atau 0,01% dan 0,01% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp501 dan Rp144 atau 0,0000028% dan 0,00000085% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

BRI-MI berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung BRI II Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam grup kecuali entitas anak dan kantor cabang tertentu yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Dolar Hongkong dan Dolar Taiwan Baru. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh BRI.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas anak dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan maka hasil usaha entitas anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian diperoleh ketika BRI terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

BRI mengendalikan entitas anak jika dan hanya jika BRI memiliki hal berikut ini:

- a) Kekuasaan atas entitas anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak).
- b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak.
- c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil BRI.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dimana selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh dicatat sebagai bagian akun tambahan modal disetor di ekuitas.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BRI dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba neto dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak tersebut.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, pinjaman syariah, piutang pembiayaan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain serta pinjaman dan surat berharga subordinasi.

(i) Klasifikasi

Untuk menentukan kategori dan klasifikasi, BRI dan entitas anak menilai seluruh aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, berdasarkan kombinasi dari model bisnis pengelolaan aset dan karakteristik arus kas kontraktual instrument terkait. Berikut klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan, dalam hal ini instrumen utang, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dengan keuntungan/kerugian diakui pada laba rugi pada saat pelepasan;
- Aset keuangan, dalam hal ini instrumen ekuitas, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan/kerugian tidak diakui pada laba rugi pada saat pelepasan; atau
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

BRI dan entitas anak mengklasifikasi dan mengukur instrumen derivatif dan portofolio *trading* pada aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal BRI dan entitas anak dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, BRI dan entitas anak dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- a. Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci BRI dan entitas anak;
- b. Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- c. Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, BRI dan entitas anak mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage*;
- c. Persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

BRI dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori:

- a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua sub-kategori:

- a. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan.
- b. Liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BRI dan entitas anak untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

BRI dan entitas anak mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;
- Kontrak jaminan keuangan;
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar; atau
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal transaksi.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajarnya dan perubahan atas nilai wajar tersebut dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya dan perubahan diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- 1) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- 2) BRI dan entitas anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*); dan antara (a) BRI dan entitas anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI dan entitas anak tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika BRI dan entitas anak telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan BRI dan entitas anak yang berkelanjutan atas aset tersebut.

BRI dan entitas anak melepaskan aset keuangan, seperti kredit yang diberikan, ketika syarat dan kondisi telah direnegosiasi hingga secara substansial, kredit yang diberikan tersebut menjadi baru, dengan perbedaan akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dari pelepasan, jika kerugian penurunan nilai belum dicatat. Kredit yang diberikan tersebut akan diklasifikasikan sebagai *Stage 1* untuk penilaian *Expected Credit Losses* (ECL), kecuali kredit yang diberikan tersebut dianggap aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or Originated Credit-Impaired financial assets - POCI*).

Jika modifikasi tidak akan menghasilkan arus kas yang secara substansi berbeda, maka modifikasi tidak akan berujung pada pelepasan aset. Berdasarkan perbedaan arus kas yang didiskonto pada *Effective Interest Rate* (EIR) awal, Bank akan mencatat keuntungan atau kerugian akibat modifikasi, sampai dengan jumlah kerugian penurunan nilai yang belum diakui.

Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan entitas anak dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau terjadi penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan lainnya atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

BRI dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah. Tidak terdapat reklasifikasi untuk liabilitas keuangan.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika BRI dan entitas anak memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

BRI dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan, dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, BRI dan entitas anak menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

BRI dan entitas anak untuk tujuan pengungkapan nilai wajar telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hierarki nilai wajar (Catatan 40).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No. 110, BRI dan entitas anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK No. 110, BRI dan entitas anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai berikut (lanjutan):

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika:

- 1) Secara langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan BRI dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan entitas anak;
- 2) Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan BRI dan entitas anak;
- 3) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan entitas anak sebagai *venturer*;

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika (lanjutan):

- 4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan entitas anak;
- 5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- 6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- 7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan entitas anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan entitas anak.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi yang dilakukan BRI telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E..1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan entitas anak dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah RI diungkapkan juga pada Catatan 44 tersebut.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

BRI dan entitas anak mengakui cadangan kerugian penurunan nilai pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

BRI dan entitas anak mengukur cadangan kerugian penurunan nilai sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- a. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- b. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

BRI dan entitas anak menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit) maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berjalan.

Cadangan kerugian penurunan nilai untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak mengurangi nilai tercatat di dalam aset keuangan di laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu nilai wajar. Cadangan kerugian penurunan nilai diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan.

Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar tidak dilakukan penilaian penurunan nilai sesuai PSAK No. 71.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada BRI dan entitas anak sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh BRI dan entitas anak);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh BRI dan entitas anak; dan
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan yang Direstrukturasikan

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, BRI dan entitas anak menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi; atau
- Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Berdasarkan proses di atas, BRI dan entitas anak melakukan pembagian atas aset keuangan atas *Stage 1*, *Stage 2*, *Stage 3*, dan POCI, sebagai berikut:

- *Stage 1* : Mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk instrumen-instrumen keuangan ini akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan. Aset keuangan di dalam *Stage 1* termasuk fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan dapat direklasifikasi dari *Stage 2*.
- *Stage 2* : Mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali BRI dan entitas anak merasa risiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk instrumen-instrumen ini akan berlaku perhitungan ECL Seumur Hidup. ECL Seumur Hidup adalah kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. *Stage 2* juga mencakup fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan telah direklasifikasi dari *Stage 3*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*) (lanjutan)

Berdasarkan proses di atas, BRI dan entitas anak melakukan pembagian atas aset keuangan atas *Stage 1*, *Stage 2*, *Stage 3*, dan *POCI*, sebagai berikut (lanjutan):

- *Stage 3* : Mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Kelompok ini biasanya terdiri atas debitur yang mengalami gagal bayar. BRI dan entitas anak mencatat cadangan ECL Seumur Hidup.
- *POCI* : Aset *POCI* adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian risiko kredit pada saat pengakuan awal. Aset tersebut dicatat pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, dan pendapatan bunga akan diakui selanjutnya berdasarkan metode suku bunga efektif yang disesuaikan. Cadangan ECL hanya dicatat atau dilepaskan jika ada perubahan selanjutnya pada kerugian kredit ekspektasian.

Terdapat kriteria kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan aset keuangan tercakup dalam *stage* tertentu.

Perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan untuk aset keuangan yang signifikan dan pernah mengalami gagal bayar ataupun restrukturisasi. Selain itu, perhitungan penurunan nilai akan dilakukan secara kolektif.

Penurunan nilai individual

Metode perhitungan penurunan nilai secara individual akan mempertimbangkan 3 (tiga) skenario kemungkinan pengembalian, yaitu: (i) skenario dasar (*Base*), (ii) skenario buruk (*Bad*), dan (iii) skenario terburuk (*Worst*). Pembuatan skenario dilakukan dengan menggunakan metode *discounted cash flow* (DCF) dan mempertimbangkan *confidence level* yang menggambarkan kondisi industri dan perusahaan terkait. Nantinya ECL yang dihasilkan oleh masing-masing skenario akan dirata-ratakan secara tertimbang terhadap bobot skenario yang telah diatur.

Penurunan nilai kolektif

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

BRI dan entitas anak menggunakan model (i) *Skalar Bayesian*, (ii) *Credit Index* dan (iii) *Vasicek* maupun pendekatan lainnya dalam menentukan nilai PD dari setiap debitur.

BRI dan entitas anak menggunakan metode (i) *Historical*, (ii) *Diminish Balance* dan (iii) *Value to Loan* dalam menentukan nilai LGD dari setiap debitur. LGD menggambarkan persentase nominal fasilitas yang tidak akan dapat di-*recover* oleh Bank terhadap debitur *default*. LGD biasa dihitung dengan *1-Recovery Rate*. *Recovery rate* dihitung mempertimbangkan *Time Value of Money* dari pengembalian dari kewajiban yang telah *default*. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *Time Value of Money* dari *Recovery* adalah EIR awal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*) (lanjutan)

EAD merupakan estimasi nilai buku pada saat terjadi gagal bayar, dengan mempertimbangkan arus kas instrumen keuangan terkait, serta kemungkinan penarikan tambahan dari limit kredit sampai dengan tanggal gagal bayar. EAD juga mempertimbangkan jadwal pembayaran dan amortisasi serta perubahan dalam utilisasi saldo yang belum ditarik menjelang terjadinya kegagalan bayar. Pemodelan EAD akan dilakukan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan terkait, yang dibagi ke dalam beberapa kategori: (i) kredit angsuran, (ii) kredit *revolving*, (iii) *trade finance*, dan (iv) *treasury*.

Pengukuran ECL berdasarkan PSAK No. 71 mewajibkan BRI dan entitas anak untuk memodelkan ECL sesuai dengan skenario *forward-looking* yang ada, dengan mempertimbangkan kemungkinan ekonomi baik dan buruk. Oleh karena itu, nilai ECL yang dihasilkan BRI dan entitas anak harus berdasarkan hasil probabilitas dari tiga skenario (kasus ekonomi normal, baik/*good*, dan buruk/*bad*). PD dan LGD akan dihitung menurut tiga skenario dengan nilai makro-ekonomi sesuai dengan skenario-skenario tersebut. Untuk segmentasi beragunan (*secured*), LGD juga akan dihitung berdasarkan tiga skenario ketika data sudah mencukupi. Bobot dari skenario baik, normal dan buruk dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan diskresi BRI dan entitas anak.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, cadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, cadangan kerugian penurunan nilai tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang nilai tercatat karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian, cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika BRI dan entitas anak menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur BRI dan entitas anak dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI dan entitas anak menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *Deposit Facility*, dan *Term Deposit*, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (*inter-bank call money*), deposito berjangka, *deposit on call*, dan *banker's acceptance*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Efek-efek

Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang dan modal seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi Pemerintah, obligasi subordinasi, unit penyertaan reksadana, *Medium-Term Notes*, *U.S. Treasury Bonds*, *U.S Treasury Bills*, *Singapore Government Securities*, *Negotiable Certificate of Deposits*, *Monetary Authority of Singapore (MAS) bills*, Obligasi Pemerintah Taiwan, dan surat berharga komersial lainnya serta obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Termasuk di dalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif.
- 2) Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi pemerintah tersebut dijual.
- 3) Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminan oleh bank lainnya sedangkan wesel tagih merupakan tagihan ataupun dokumen penagihan dalam bentuk wesel/*bill of exchange* kepada pihak tertagih/*drawee* atas dasar diskonto ataupun suatu pembiayaan tertentu. Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BRI dan entitas anak.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai kini penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

k. Pinjaman syariah

Pinjaman yang diberikan terutama terdiri dari piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan entitas anak, dimana entitas anak membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pinjaman syariah (lanjutan)

Mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama antara entitas anak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

l. Piutang pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan.

Pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Entitas anak sebagai lessor

Dalam sewa pembiayaan, entitas anak, sebagai *lessor*, mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan sewa pembiayaan neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan pembiayaan.

Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto entitas anak sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Dalam sewa menyewa operasi, entitas anak mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Rental kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas metode garis lurus selama masa sewa.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Piutang pembiayaan (lanjutan)

Entitas anak sebagai lessor (lanjutan)

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah down payment.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi di laporan keuangan.

Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen neto merupakan total piutang setelah dikurangi pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi *yield enhancing income* yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah *down payment*.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi di laporan keuangan.

Tagihan anjak piutang

Anjak piutang dicatat menggunakan PSAK terkait dan diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, setelah dikurangi pendapatan anjak piutang ditangguhkan. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran ke konsumen diakui sebagai pendapatan anjak piutang ditangguhkan, yang akan diakui sebagai pendapatan anjak piutang berdasarkan proporsi waktu selama periode kontrak menggunakan tingkat suku bunga efektif.

Anjak piutang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep (*accepting bank*).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi sedangkan liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

n. Investasi pada entitas asosiasi

Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi BRI. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Investasi BRI pada entitas asosiasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan di bawah 20% dicatat pada nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 71.

o. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
- (ii) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15
Kendaraan bermotor	5
Kapal	15
Komputer dan mesin	3 - 8
Perlengkapan kantor	3 - 8
<i>E-Channel</i>	3 - 5
Satelit	15
<i>Main system</i>	5
<i>Non main system</i>	3

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 16).

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif maka perlu dilakukan revaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "surplus revaluasi aset tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap terkait, bila besar kemungkinan bagi BRI dan entitas anak manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "aset tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "aset tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

BRI dan entitas anak menerapkan PSAK No. 73 tentang Sewa untuk seluruh sewa dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas terkait. BRI menerapkan sewa yang termasuk PSAK No. 73 atas kelas aset tanah bangunan (*landed*) dan kendaraan roda empat dengan aset pendasar bernilai di atas Rp75.000.000 (nilai penuh) dan mempunyai jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan.

Pada tanggal insepri suatu kontrak, BRI dan entitas anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, BRI dan entitas anak menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian;
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dalam bentuk:
 - a. BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset.
 - b. BRI dan entitas anak mempunyai hak untuk menetapkan tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepri atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, BRI dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- a. Pembayaran lunas di muka;
- b. Pembayaran angsuran tetap; dan
- c. Pembayaran angsuran sewa berubah yang bergantung pada fluktuasi pembayaran sewa yang ditetapkan oleh *counterpart*.

BRI dan entitas anak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Setelah tanggal permulaan, aset hak guna diukur dengan model biaya. Aset hak guna diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. BRI dan entitas anak akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan diperlukan penurunan atas nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis), maka BRI dan entitas anak akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "aset lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

BRI dan entitas anak mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (*reconditioning cost*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI dan entitas anak kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI dan Bank Raya. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, *deposit on call*, dan *inter-bank call money* dengan promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

v. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan oleh BRI, BRI Multifinance, Pegadaian dan PNM adalah Obligasi, *Medium Term Notes* (MTN), *Long Term Notes* (LTN) dan Sukuk *Mudharabah*. Surat berharga yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman dan surat berharga subordinasi

Pinjaman dan surat berharga subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

y. Provisi

Provisi diakui jika BRI dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling terkini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan entitas anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

aa. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ab. Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode *margin* efektif. *Margin* efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung *margin* efektif, entitas anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Pendapatan premi dan beban klaim

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Premi kontrak asuransi bukan jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Premi yang diterima sebelum diterbitkannya polis asuransi atau tanggal premi jatuh tempo dicatat sebagai titipan premi.

Premi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai deposit melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

Premi reasuransi bruto diakui sebagai beban pada saat dibayarkan atau pada tanggal di mana polis tersebut efektif.

Klaim dan manfaat asuransi merupakan klaim-klaim yang telah disetujui (*approved claim*). Klaim dan manfaat tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai klaim reasuransi pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Klaim dan manfaat asuransi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai penarikan (*withdrawal*) melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi

Liabilitas kontrak asuransi

a. Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi bukan jangka pendek.

Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

b. Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan klaim dalam proses penyelesaian yang ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported (IBNR)*).

Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi (lanjutan)

Liabilitas kontrak asuransi (lanjutan)

c. Premi yang belum merupakan pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian premi yang telah dilunasi, namun belum merupakan pendapatan karena masa pertanggungan asuransi masih berjalan pada akhir tahun. Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi jangka pendek.

Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggungan yang besarnya ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah proteksi yang diberikan selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi asuransi jangka pendek.

Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas ini dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

Reasuransi

BRI Life dan BRI Insurance mensesikan risiko asuransi dalam bisnis normal pada setiap lini bisnisnya.

Manfaat BRI Life dan BRI Insurance atas kontrak reasuransi yang dimiliki diakui sebagai aset reasuransi. Aset ini terdiri dari piutang yang bergantung pada klaim yang diperkirakan dan manfaat yang timbul dalam kontrak reasuransi terkait. Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 62, aset reasuransi tidak saling hapus dengan liabilitas kontrak asuransi terkait.

Piutang reasuransi diestimasi secara konsisten dengan klaim yang disetujui terkait dengan kebijakan reasuradur dan sesuai dengan kontrak reasuransi terkait.

BRI Life dan BRI Insurance mereasuransikan sebagian risiko atas ekspektasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dibukukan sehubungan dengan kontrak asuransi tersebut.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim, dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti objektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa BRI Life dan BRI Insurance tidak dapat menerima seluruh jumlah karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi (lanjutan)

Reasuransi (lanjutan)

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, BRI Life dan BRI Insurance mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

Aset atau liabilitas reasuransi dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktualnya hilang atau berakhir, atau ketika kontrak dialihkan kepada pihak lain.

ae. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Merupakan iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pekerja yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pekerja-pekerja tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS dan program manfaat lain manfaat dana tambahan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pekerja yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan peraturan yang berlaku.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

af. Opsi saham

Biaya kompensasi saham pada tanggal penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun “Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan” berdasarkan program hak yang diakui pada tahun berjalan (*cliff-vesting scheme*) dengan metode garis lurus selama masa tunggu (*vesting period*). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai “opsi saham” dalam bagian ekuitas. Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Black-Scholes*.

ag. Laba per lembar saham

Labanya per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk BRI dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Labanya per lembar saham dilusian dihitung setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.

ah. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

BRI dan entitas anaknya menyelenggarakan catatan akuntansi dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1 Dolar Amerika Serikat	15.397,00	15.567,50
1 Pound Sterling Inggris	19.626,56	18.786,09
1 Yen Jepang	108,88	117,81
1 Euro Eropa	17.038,32	16.581,72
1 Dolar Hong Kong	1.970,73	1.996,55
1 Riyal Arab Saudi	4.106,00	4.139,00
1 Dolar Singapura	11.676,34	11.592,88
1 Ringgit Malaysia	3.355,20	3.533,66
1 Dolar Australia	10.520,77	10.557,88
1 Renminbi	2.170,06	2.238,91
1 Baht Thailand	449,75	450,71
1 Franc Swiss	18.299,27	16.827,00
1 Dolar Kanada	11.629,59	11.486,39
1 Dolar Brunei Darussalam	11.581,05	11.538,75
1 Kroner Denmark	2.285,87	2.229,65
1 Won Korea Selatan	11,88	12,35
1 Dolar Selandia Baru	9.765,55	9.851,12
1 Kina Papua Nugini	4.131,03	4.421,19
1 Dirham Uni Emirat Arab	4.192,40	4.238,88
1 Kroner Swedia	1.541,54	1.487,84
1 Kroner Norwegia	1.509,55	1.572,28
1 Rupee India	185,18	188,11
1 Peso Filipina	277,98	279,44
1 Dolar Taiwan Baru	503,50	506,13
1 Dong Vietnam	0,64	0,66

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ai. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri

BRI memiliki 1 (satu) Entitas Anak di Hong Kong, 5 (lima) Kantor Cabang di New York, Cayman Islands, Singapura, Timor-Leste dan Taipei serta 1 (satu) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah.

Untuk tujuan penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun entitas anak, kantor cabang dan perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs sebagai berikut:

- a. Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.
- b. Pendapatan, beban, laba dan rugi menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Saldo akhir periode merupakan penjumlahan saldo bulanan pendapatan, beban, laba dan rugi selama tahun yang bersangkutan.
- c. Modal saham dan tambahan modal disetor menggunakan kurs historis.
- d. Laporan arus kas menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai "selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing".

aj. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

Derivatif melekat tidak lagi dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif yang merupakan aset keuangan/liabilitas keuangan, BRI dan entitas anak mengklasifikasikan aset/liabilitas keuangan secara keseluruhan berdasarkan model bisnis dan jangka waktu kontraktualnya sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2c.

ak. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Perpajakan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika BRI dan entitas anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

al. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari BRI dan entitas anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen operasi), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen operasi) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi, lainnya dan entitas anak, serta berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Timor-Leste dan Taipei.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

am. Pendapatan dan Beban Penjualan Emas

Pendapatan dari penjualan emas diakui pada saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi entitas anak pada waktu tertentu, yaitu pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan bisnis emas juga diakui ketika suatu produk telah diserahkan kepada pelanggan atau memenuhi skema "penjualan ketika pengiriman ditunda". Pengakuan pendapatan tersebut menerapkan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

an. Saham Treasuri

Instrumen ekuitas BRI yang diperoleh kembali (saham treasuri) diakui pada harga perolehan kembali dan dikurangi dari ekuitas. Tidak ada laba atau rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas BRI. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan, bila diterbitkan kembali, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas.

ao. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak sebagai berikut:

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Kontinjensi

Manajemen BRI dan entitas anak sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI dan entitas anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen BRI dan entitas anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ao. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. BRI dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan, pinjaman syariah serta piutang pembiayaan

Manajemen BRI dan entitas anak menelaah portofolio kredit yang diberikan, pinjaman syariah serta piutang pembiayaan setiap tahun, untuk menilai penurunan nilai dengan memperbarui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas terkait.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, BRI dan entitas anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan entitas anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk efek-efek

Manajemen BRI menentukan bahwa efek-efek memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penurunan nilai aset non-keuangan

BRI dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ao. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Manajemen BRI dan entitas anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

BRI dan entitas anak menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas imbalan kerja

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Dikarenakan program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan liabilitas yang disisihkan untuk memenuhi liabilitas klaim yang terjadi dan yang masih dalam proses penyelesaian atas polis-polis asuransi yang masih berlaku (*policies in force*). Pertimbangan manajemen BRI diperlukan untuk menentukan jumlah estimasi liabilitas klaim yang dapat diakui.

Liabilitas manfaat polis masa depan

BRI mencatat liabilitas kontrak asuransi jangka panjang dengan metode nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu dan tingkat diskonto.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ap. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- a. Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 1, "*Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies*". Amandemen ini mengklarifikasi bahwa tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material adalah material terhadap laporan keuangan.
- b. Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 16, "*Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use*". Amandemen ini mengklarifikasi contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sebagai biaya perolehan aset tetap.
- c. Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 8, "*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates*". Amandemen ini menjelaskan definisi estimasi akuntansi dan mengklarifikasi perubahan dalam estimasi akuntansi.
- d. Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 12, "*Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*". Amandemen ini menjelaskan deskripsi dan pengecualian pengakuan awal untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan.
- e. Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 12, "*Income Taxes: International Tax Reform - Pillar Two Model Rules*". Amandemen ini mengatur pengecualian sementara atas perlakuan akuntansi pajak tangguhan terkait dengan penerapan ketentuan model perpajakan Pilar Dua beserta pengungkapannya.

Penerapan PSAK di atas tidak berdampak material terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

aq. Tanggung jawab sosial dan lingkungan

Berdasarkan PER-05/MBU/04/2021, istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak digunakan lagi dan diganti menjadi TJSL (Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan). Alokasi dana tidak dialokasikan dari saldo laba berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan tetapi diakui dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Rupiah</u>		29.764.399		25.980.803
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	79.872.638	1.229.799	41.494.434	645.965
Riyal Arab Saudi	45.839.472	188.217	15.344.795	63.512
Dolar Singapura	15.547.692	181.540	17.835.516	206.765
Dolar Australia	6.439.502	67.749	13.146.160	138.796
Euro Eropa	3.620.283	61.684	10.089.844	167.307
Ringgit Malaysia	12.365.562	41.489	31.255.724	110.447
Pound Sterling Inggris	603.196	11.839	1.360.951	25.567
Dirham Uni Emirat Arab	2.817.265	11.811	5.329.735	22.592
Franc Swiss	581.040	10.633	238.930	4.020
Yen Jepang	83.669.794	9.110	42.609.961	5.020
Renminbi	2.797.142	6.070	1.795.579	4.020
Dolar Brunei Darussalam	455.095	5.270	810.707	9.355
Dolar Hong kong	2.630.075	5.183	4.555.056	9.094
Dolar Kanada	273.691	3.183	351.860	4.042
Dolar Selandia Baru	207.298	2.024	575.438	5.669
Peso Filipina	4.522.830	1.257	6.075.560	1.698
Dolar Taiwan Baru	1.725.199	869	575.978	292
Baht Thailand	1.864.080	838	3.277.430	1.477
Won Korea Selatan	27.524.387	327	19.834.591	245
Dong Vietnam	415.104.461	266	899.812.000	593
Rupiah India	729.257	135	600.712	113
Kina Papua Nugini	22.277	92	19.540	86
		1.839.385		1.426.675
Total		31.603.784		27.407.478

Saldo kas sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebesar Rp4.208.492 dan ASD905.640 (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2023 serta Rp4.554.211 dan ASD809.680 (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo kas yang tidak dapat digunakan dan yang dijamin oleh BRI dan entitas anak.

Kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun disajikan sebagai bagian dari Aset Lain-lain (Catatan 17).

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		93.630.203		141.071.603
Dolar Amerika Serikat	537.696.816	8.278.918	633.598.631	9.863.547
Total		101.909.121		150.935.150

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, GWM dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11 tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui PADG No. 11 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG KLM).

Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dihitung sesuai dengan PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah PADG No. 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023.

Pemenuhan rasio-rasio tersebut di atas masing-masing ditentukan sebesar sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah</u>		
GWM Primer	6,05%	7,00%
(i) GWM secara harian	0,00	0,00
(ii) GWM secara rata-rata ^{*)}	6,05	7,00
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	5,00	6,00
<u>Mata uang asing</u>	4,00	4,00
(i) GWM secara harian	2,00	2,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,00	2,00

^{*)} Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, sehingga Bank mendapatkan insentif pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah pada Desember 2023 dan Desember 2022 sebesar 2,95% dan 2,00%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, penyebutan *Loan to Funding Ratio* (LFR) berubah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan kewajiban pemenuhan Giro RIM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Giro RIM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara RIM yang dimiliki oleh Bank dan RIM Target. Giro RIM dikenakan jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia yang sebesar 14%. Peraturan tersebut telah disempurnakan sebanyak 4 (empat) kali dengan perubahan terakhir PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022. PBI tersebut dijelaskan melalui PADG No. 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023.

Rasio GWM BRI (entitas induk) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah</u>		
GWM Primer*)	8,05%	12,11%
(i) GWM secara harian	0,00	0,00
(ii) GWM secara rata-rata ¹⁾	8,05	12,11
PLM (d/h GWM Sekunder)	14,24	14,40
<u>Mata uang asing</u>	4,22	4,24
(i) GWM secara harian	2,00	2,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,22	2,24

*) Setelah dikurangi insentif sesuai PADG No. 11 Tahun 2023.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang rasio-rasio tersebut di atas.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	<u>31 Desember 2023</u>		<u>31 Desember 2022</u>	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		269.629		328.752
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.080.512.301	16.636.648	1.057.828.412	16.467.742
Dolar Singapura	123.042.799	1.436.690	99.800.149	1.156.971
Euro Eropa	72.038.920	1.227.422	27.256.867	451.966
Yen Jepang	6.075.048.703	661.421	3.474.319.128	409.310
Renminbi	254.652.528	552.611	310.302.142	694.739
Dolar Hong Kong	158.345.706	312.057	100.637.976	200.929
Pound Sterling Inggris	14.631.778	287.171	21.217.574	398.595
Dolar Australia	23.562.642	247.897	27.828.214	293.807
Dolar Selandia Baru	13.356.004	130.429	19.893.130	195.970
Dolar Kanada	3.057.119	35.553	2.587.730	29.724
Franc Swiss	1.412.688	25.851	5.783.698	97.322
Ringgit Malaysia	5.199.682	17.446	798.540	2.822

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>				
Riyal Arab Saudi	3.102.100	12.737	6.228.883	25.781
Dirham Uni Emirat Arab	2.490.560	10.441	2.909.039	12.331
Dolar Taiwan Baru	17.082.759	8.601	8.615.531	4.361
Kroner Norwegia	3.498.713	5.281	4.024.099	6.327
Kroner Swedia	2.436.698	3.756	8.466.273	12.596
Baht Thailand	4.488.551	2.019	911.145	411
		21.614.031		20.461.704
		21.883.660		20.790.456
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		414.931		670.798
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Hong Kong	12.002.281	23.653	5.517.809	11.017
Dolar Amerika Serikat	628.351	9.675	1.038.224	16.163
		33.328		27.180
		448.259		697.978
Total		22.331.919		21.488.434
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9.984)		(18.577)
Total - Bersih		22.321.935		21.469.857

b) Berdasarkan Bank:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Standard Chartered Bank	91.007	41.470
PT Bank Central Asia Tbk	56.298	64.628
PT Bank DKI	24.892	52.809
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	20.957	38.497
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	12.962	16.861
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	8.664	16.263
PT Bank Ganesha Tbk	6.223	3.678
Lainnya	48.626	94.546
	269.629	328.752

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Bank (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	10.505.921	13.015.929
Standard Chartered Bank	2.265.496	1.920.914
Citibank N.A.	2.238.494	1.141.030
Bank of America	1.953.570	930.161
Bank of China, Ltd	628.607	682.272
OCBC Bank Singapore	579.359	622.220
Banco Central de Timor Leste	578.544	91.205
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	391.992	143.644
HSBC Holdings PLC	376.078	303.490
ING Belgium NV/SA	353.682	56.071
Lainnya	1.742.288	1.554.768
	<u>21.614.031</u>	<u>20.461.704</u>
	<u>21.883.660</u>	<u>20.790.456</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	124.538	200.538
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	118.928	205.434
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	113.847	127.372
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	57.615	137.390
PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)	3	49
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	15
	<u>414.931</u>	<u>670.798</u>
<u>Mata uang asing</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.155	18.819
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.173	8.361
	<u>33.328</u>	<u>27.180</u>
	<u>448.259</u>	<u>697.978</u>
Total	22.331.919	21.488.434
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.984)	(18.577)
Bersih	<u>22.321.935</u>	<u>21.469.857</u>

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah	0,08%	0,08%
Mata uang asing	3,73	2,63

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Nilai tercatat awal	21.488.434	-	-	21.488.434
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	710.407	-	-	710.407
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	338.949	-	-	338.949
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(205.871)	-	-	(205.871)
Nilai tercatat akhir	22.331.919	-	-	22.331.919
	31 Desember 2022			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Nilai tercatat awal	14.065.097	-	-	14.065.097
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	7.423.337	-	-	7.423.337
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	21.488.434	-	-	21.488.434

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	18.577	-	-	18.577
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(13.558)	-	-	(13.558)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	5.016	-	-	5.016
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(51)	-	-	(51)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	9.984	-	-	9.984
31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	29.078	-	-	29.078
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(10.722)	-	-	(10.722)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	221	-	-	221
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	18.577	-	-	18.577

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat giro pada bank lain yang dibatasi penggunaannya.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, giro pada bank lain dilakukan penilaian secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Bank Indonesia				
<i>Deposit Facility</i>		30.440.561		5.873.912
<i>Term Deposit</i>		-		14.995.561
		<u>30.440.561</u>		<u>20.869.473</u>
<i>Inter-bank call money</i>				
Standard Chartered Bank		400.000		-
PT Bank DKI		400.000		400.000
PT BPD Sumatera Utara		250.000		200.000
PT Bank UOB Indonesia		230.000		-
PT BPD Maluku dan Maluku Utara		150.000		-
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung		150.000		-
PT BPD Sulawesi Tenggara		150.000		-
PT BPD Sulawesi Tengah		100.000		-
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo		100.000		-
PT BPD Yogyakarta		100.000		-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		-		200.000
PT Bank OCBC NISP Tbk		-		250.000
		<u>2.030.000</u>		<u>1.050.000</u>
<i>Deposito Berjangka</i>				
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung		79.700		-
PT BTPN Syariah Tbk.		56.500		-
PT BPD Jambi		54.800		-
PT Bank DKI		54.800		89.000
PT Bank Permata Tbk		40.000		40.000
PT Bukopin Syariah		28.500		13.000
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo		25.900		20.600
PT Bank Muamalat Indonesia		22.050		-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		19.500		35.800
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		16.000		195.000
PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah		11.000		10.000
PT BPD Jawa Tengah		-		18.000
PT Bank Mega Tbk		-		22.500
PT Bank MNC Internasional Tbk		-		75.000
PT Bank Mayapada Internasional Tbk		-		59.500
Lembaga Keuangan Lainnya		167.270		58.659
		<u>576.020</u>		<u>637.059</u>
		<u>33.046.581</u>		<u>22.556.532</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Bank Indonesia				
<i>Term Deposit</i>	1.200.000.000	18.476.400	2.204.538.946	34.319.160
		18.476.400		34.319.160
<i>Inter-bank call money</i>				
Federal Reserve Bank	246.470.482	3.794.906	309.356.898	4.815.913
The Hongkong and Shanghai Banking Co., Ltd	151.800.565	2.337.273		-
Wells Fargo Bank, N.A	59.500.000	916.122	70.896.213	1.103.677
The Bank of New York Mellon Corporation	43.100.000	663.611	87.500.000	1.362.156
Standard Chartered Bank	17.225.979	265.228	22.854.648	355.790
Bangkok Bank	10.000.000	153.970		-
State Bank of India	10.000.000	153.970		-
First Commercial Bank Co., Ltd	9.500.000	146.272		-
JP Morgan Chase Bank, N.A		-	1.830.000	28.489
Lembaga Keuangan Lainnya	723.517	11.139	28.029.023	436.342
		8.442.491		8.102.367
<i>Deposito berjangka</i>				
U.S. Bankcorp	19.346.399	297.877	803.060	12.502
Lembaga Keuangan Lainnya	103.370	1.592	294.638	4.587
		299.469		17.089
<i>Penempatan lainnya</i>				
<i>(Banker's Acceptance)</i>				
PT Bank KEB Hana Indonesia	50.000.000	769.850		-
PT Bank Mega Tbk	30.000.000	461.910		-
PT Bank IBK Indonesia Tbk	30.000.000	461.910		-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	14.000.000	215.558	75.000	1.167.562
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk		-	40.000	622.700
<i>(Margin Deposit)</i>				
JP Morgan Chase Bank, N.A	1.000.000	15.397		-
		1.924.625		1.790.262
		29.142.985		44.228.878
<u>Euro Eropa</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
ING Bank N.V		-	34.000.000	563.778
		-		563.778
<u>Dolar Taiwan Baru</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
Sinopac Financial Holdings Co. Ltd	215.000.000	108.253		-
		108.253		-
		29.251.238		44.792.656
		62.297.819		67.349.188

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		100.000		200.000
PT Bank Mandiri Taspen		100.000		-
		200.000		200.000
<i>Deposito berjangka</i>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		589.084		502.857
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		331.028		125.250
Lembaga Keuangan Lainnya		13.550		45.156
		933.662		673.263
		1.133.662		873.263
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	110.000.000	1.693.670	90.000.000	1.401.075
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	5.000.000	76.985		-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		-	50.000.000	778.375
		1.770.655		2.179.450
<i>Deposito Berjangka</i>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.501.851	23.124		-
		23.124		-
		1.793.779		2.179.450
		2.927.441		3.052.713
Total		65.225.260		70.401.901
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.860)		(1.981)
Bersih		65.223.400		70.399.920

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	32.918.731	22.488.062
> 1 bulan - 3 bulan	73.600	51.500
> 3 bulan - 1 tahun	54.250	16.970
	<u>33.046.581</u>	<u>22.556.532</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	27.418.995	43.516.829
> 1 bulan - 3 bulan	1.062.393	497.452
> 3 bulan - 1 tahun	769.850	778.375
	<u>29.251.238</u>	<u>44.792.656</u>
	<u>62.297.819</u>	<u>67.349.188</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	998.612	867.707
> 1 bulan - 3 bulan	106.500	5.506
> 3 bulan - 1 tahun	28.550	50
	<u>1.133.662</u>	<u>873.263</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	100.109	934.050
> 3 bulan - 1 tahun	1.693.670	1.245.400
	<u>1.793.779</u>	<u>2.179.450</u>
	<u>2.927.441</u>	<u>3.052.713</u>
Total	65.225.260	70.401.901
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.860)	(1.981)
Bersih	<u>65.223.400</u>	<u>70.399.920</u>

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain diklasifikasikan "Lancar".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Rupiah</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia	5,25%	5,04%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	6,17	5,38
<u>Mata Uang Asing</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia	5,34%	4,32%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	5,48	3,17

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain</u>				
Nilai tercatat awal	70.401.901	-	-	70.401.901
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	63.493.567	-	-	63.493.567
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(68.654.629)	-	-	(68.654.629)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(15.579)	-	-	(15.579)
Nilai tercatat akhir	65.225.260	-	-	65.225.260
31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain</u>				
Nilai tercatat awal	58.982.842	-	-	58.982.842
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	70.395.245	-	-	70.395.245
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(58.976.186)	-	-	(58.976.186)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	70.401.901	-	-	70.401.901

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga</u>				
<u>Keuangan Lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	1.981	-	-	1.981
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	994	-	-	994
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.117)	-	-	(1.117)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2	-	-	2
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	1.860	-	-	1.860
31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga</u>				
<u>Keuangan Lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	6.177	-	-	6.177
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2.270	-	-	2.270
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(6.177)	-	-	(6.177)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(289)	-	-	(289)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	1.981	-	-	1.981

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya dilakukan penilaian secara kolektif.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat jumlah dana yang diblokir.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain yang dibatasi penggunaannya.

7. EFEK-EFEK

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Sertifikat Bank Indonesia Reksadana		1.240.835		-
Obligasi		820.109		2.091.040
Obligasi Subordinasi		372.724		148.223
Lainnya		15.783		47.633
		1.312.688		1.619.738
		3.762.139		3.906.634
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	135.349.949	2.083.983		-
Sertifikat Bank Indonesia Reksadana	14.891.839	229.290		-
Lainnya	591.432	9.106	569.718	8.869
	982.009	15.120		-
		2.337.499		8.869
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia Reksadana		8.733.403		10.389.097
Obligasi		5.135.418		4.985.002
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		159.351		170.826
Obligasi Subordinasi		-		18.554
Lainnya		-		2.036
		1.311.929		1.257.373
		15.340.101		16.822.888
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	51.052.819	786.060	13.927.146	216.811
Obligasi	10.870.450	167.372	10.320.912	160.671
		953.432		377.482
		22.393.171		21.115.873

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Sertifikat Bank Indonesia		30.260.840		-
Reksadana		8.481.689		6.972.076
Obligasi		2.874.965		3.377.496
Obligasi Subordinasi		-		93.617
Lainnya		38.810		86.002
		41.656.304		10.529.191
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	143.115.132	2.203.544	112.707.139	1.754.568
Reksadana	50.670.000	780.166	50.620.000	788.027
Obligasi	46.767.998	720.087	24.845.860	386.788
Sertifikat Bank Indonesia	9.983.699	153.719	56.127.490	873.765
<i>U.S. Treasury Bills</i>	2.989.945	46.036		-
		3.903.552		3.803.148
<u>Dolar Singapura</u>				
<i>Monetary Authority of Singapore (MAS) Bills</i>	132.290.443	1.544.668	145.317.508	1.684.648
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	48.952.967	571.591	48.848.395	566.294
Obligasi	979.338	11.435	939.204	10.888
		2.127.694		2.261.830
<u>Dolar Taiwan Baru</u>				
Obligasi Pemerintah Taiwan	252.349.250	127.058	302.445.950	153.075
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	100.000.000	50.350	435.000.000	220.164
		177.408		373.239

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>				
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia		61.213.197		75.152.636
Obligasi		6.472.903		7.564.070
Reksadana		4.699.264		3.662.568
Medium-Term Note		216.023		285.543
Negotiable Certificate of Deposit		85.250		9.277
Obligasi Subordinasi		-		25.454
Lainnya		69.700		106.778
		72.756.337		86.806.326
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	2.492.886.098	38.382.967	2.704.497.254	42.102.261
Obligasi	248.000.904	3.818.470	263.039.300	4.094.864
Negotiable Certificate of Deposit		-	20.300.000	316.020
		42.201.437		46.513.145
<u>Yen Jepang</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	2.383.695.877	259.537	2.329.747.301	274.468
		259.537		274.468
<u>Euro Eropa</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	15.077.525	256.896	14.547.325	241.220
		256.896		241.220
		163.339.165		150.802.567

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi		25.130		25.161
		25.130		25.161
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	9.000.000	138.573	7.943.535	123.661
Obligasi	2.996.946	46.144	2.994.680	46.620
Lainnya	1.290.438.254	19.868.876	1.466.142.152	22.824.168
		20.053.593		22.994.449
<u>Dolar Singapura</u>				
Obligasi	9.508.394	111.023	9.575.258	111.005
		111.023		111.005
<u>Pound Sterling Inggris</u>				
Lainnya	20.211.422	396.681		-
		396.681		-
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia		94.665.750		102.477.479
Obligasi		531.824		628.726
<i>Medium-Term Note</i>		11.000		11.000
Obligasi Subordinasi		-		7.000
		95.208.574		103.124.205
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	1.820.018.749	28.022.829	1.981.372.686	30.845.019
Obligasi	19.743.499	303.991	27.249.237	424.202
Lainnya	40.670.455	626.203	15.000.000	233.513
		28.953.023		31.502.734
<u>Euro Eropa</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	35.857.084	610.944	39.128.846	648.824
		610.944		648.824
		145.358.968		158.406.378
Total		331.091.304		330.324.818
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(81.510)		(82.835)
Bersih		331.009.794		330.241.983

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua efek-efek diklasifikasikan “Lancar”.

c) Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo:

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	45.418.442	14.435.825
> 3 bulan - 1 tahun	10.000	-
> 1 tahun	15.131	25.161
	<u>45.443.573</u>	<u>14.460.986</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	14.690.430	14.760.973
> 1 bulan - 3 bulan	6.122.743	6.107.782
> 3 bulan - 1 tahun	8.044.730	8.526.161
> 1 tahun	249.547	157.624
	<u>29.107.450</u>	<u>29.552.540</u>
	<u>74.551.023</u>	<u>44.013.526</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	88.096.438	103.629.214
> 1 bulan - 3 bulan	2.500.656	153.953
> 3 bulan - 1 tahun	7.187.961	8.689.228
> 1 tahun	85.519.957	94.281.024
	<u>183.305.012</u>	<u>206.753.419</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	46.360.125	48.032.461
> 1 bulan - 3 bulan	375.606	481.486
> 3 bulan - 1 tahun	2.928.198	1.678.235
> 1 tahun	23.571.340	29.365.691
	<u>73.235.269</u>	<u>79.557.873</u>
	<u>256.540.281</u>	<u>286.311.292</u>
Total	331.091.304	330.324.818
Dikurangi		
cadangan kerugian penurunan nilai	(81.510)	(82.835)
Bersih	<u>331.009.794</u>	<u>330.241.983</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit:

d.1. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds*, *U.S. Treasury Bills*, *Singapore Government Securities* dan Obligasi Pemerintah Taiwan. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Rupiah</u>		
Surat Perbendaharaan Negara	4.328.423	7.246.094
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>	3.103.592	2.456.006
Obligasi Pemerintah Sukuk	1.196.634	488.608
Obligasi Republik Indonesia	104.754	198.389
	8.733.403	10.389.097
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat	417.469	111.056
Obligasi Pemerintah Sukuk	368.591	105.755
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	2.083.983	-
	2.870.043	216.811
	11.603.446	10.605.908
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>	45.488.821	49.232.653
Obligasi Pemerintah Sukuk	14.902.982	22.700.073
Obligasi Republik Indonesia	821.394	3.022.520
Surat Perbendaharaan Negara	-	197.390
	61.213.197	75.152.636

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds*, *U.S. Treasury Bills*, *Singapore Government Securities* dan Obligasi Pemerintah Taiwan. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>(lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat	20.348.541	22.920.721
Obligasi Pemerintah Sukuk	18.034.426	19.181.540
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	2.203.544	1.754.568
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	571.591	566.294
Obligasi Pemerintah Yen Jepang	259.537	274.468
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	256.896	241.220
Obligasi Pemerintah Taiwan	127.058	153.075
<i>U.S. Treasury Bills</i>	46.036	-
	41.847.629	45.091.886
	103.060.826	120.244.522
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>		
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>	81.493.975	83.781.068
Obligasi Pemerintah Sukuk	13.151.748	18.676.160
Obligasi Republik Indonesia	20.027	20.251
	94.665.750	102.477.479
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat	15.677.291	17.863.289
Obligasi Pemerintah Sukuk	12.345.538	12.981.730
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	610.944	648.824
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	138.573	123.661
	28.772.346	31.617.504
	123.438.096	134.094.983
Total	238.102.368	264.945.413

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Rupiah				
Surat Perbendaharaan Negara	Beragam	Beragam	Beragam	Beragam
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>				
FR0070	8,38	15 Mar 2024	8,38	15 Mar 2024
FR0077	8,13	15 Mei 2024	8,13	15 Mei 2024
FR0081	6,50	15 Jun 2025	6,50	15 Jun 2025
FR0082	7,00	15 Sep 2030	7,00	15 Sep 2030
FR0084	7,25	15 Feb 2026	7,25	15 Feb 2026
FR0085	7,75	15 Apr 2031	7,75	15 Apr 2031
FR0086	5,50	15 Apr 2026	5,50	15 Apr 2026
FR0087	6,50	15 Feb 2031	6,50	15 Feb 2031
FR0090	5,13	15 Apr 2027	5,13	15 Apr 2027
FR0091	6,38	15 Apr 2032	6,38	15 Apr 2032
Obligasi Pemerintah Sukuk				
PBS003	6,00	15 Jan 2027	6,00	15 Jan 2027
PBS004	6,10	15 Feb 2037	6,10	15 Feb 2037
PBS017	6,13	15 Okt 2025	6,13	15 Okt 2025
PBS026	6,63	15 Okt 2024	6,63	15 Okt 2024
PBS029	6,38	15 Mar 2034	6,38	15 Mar 2034
PBS030	5,88	15 Jul 2028	5,88	15 Jul 2028
PBS031	4,00	15 Jul 2024	4,00	15 Jul 2024
PBS032	4,88	15 Jul 2026	4,88	15 Jul 2026
PBS036	5,38	15 Agu 2025	5,38	15 Agu 2025
SR017	5,90	10 Sep 2025	5,90	10 Sep 2025
Obligasi Republik Indonesia				
ORI019	5,57	15 Feb 2024	5,57	15 Feb 2024
ORI020	4,95	15 Okt 2024	4,95	15 Okt 2024
ORI021	4,90	15 Feb 2025	4,90	15 Feb 2025
ORI022	5,95	15 Okt 2025	5,95	15 Okt 2025
ORI023	5,90	15 Jul 2026	-	-
ORI018	-	-	5,70	15 Okt 2023
Mata uang asing				
Obligasi Pemerintah Sukuk				
INDOIS 24	4,35	10 Sep 2024	4,35	10 Sep 2024
INDOIS 24A	3,90	20 Ags 2024	3,90	20 Ags 2024
INDOIS 25	4,33	28 Mei 2025	4,33	28 Mei 2025
INDOIS 25A	2,30	23 Jun 2025	2,30	23 Jun 2025
INDOIS 26	4,55	29 Mar 2026	4,55	29 Mar 2026
INDOIS 27	4,15	29 Mar 2027	4,15	29 Mar 2027
INDOIS 28	4,40	1 Mar 2028	4,40	1 Mar 2028
INDOIS 29	4,45	20 Feb 2029	4,45	20 Feb 2029
INDOIS 30	2,80	23 Jun 2030	2,80	23 Jun 2023

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Mata uang asing (lanjutan)				
<i>Obligasi Pemerintah Fixed Rate</i>				
<i>Dolar Amerika Serikat</i>				
RI0126	4,75	8 Jan 2026	4,75	8 Jan 2026
RI0124	5,88	15 Jan 2024	5,88	15 Jan 2024
RI0125	4,13	15 Jan 2025	4,13	15 Jan 2025
RI0727	3,85	18 Jul 2027	3,85	18 Jul 2027
RI0128	3,50	11 Jan 2028	3,50	11 Jan 2028
RI0929	3,40	18 Sep 2029	3,40	18 Sep 2029
RI0127	4,35	8 Jan 2027	4,35	8 Jan 2027
RI0229	4,75	11 Feb 2029	4,75	11 Feb 2029
RI0224	4,45	11 Feb 2024	4,45	11 Feb 2024
<i>Obligasi Pemerintah Euro Eropa</i>				
RIEUR0725	3,38	30 Jul 2025	3,38	30 Jul 2025
RIEUR0227	0,90	14 Feb 2027	0,90	14 Feb 2027
RIEUR0729	1,00	28 Jul 2029	1,00	28 Jul 2029
RIEUR0334	1,35	23 Mar 2034	1,35	23 Mar 2034
RIEUR0623	-	-	2,63	14 Jun 2023
<i>Obligasi Pemerintah Yen Jepang</i>				
RIJPY0524	0,33	27 Mei 2024	0,33	27 Mei 2024
RIJPY0624	0,26	7 Jun 2024	0,26	7 Jun 2024
RIJPY0526	0,57	27 Mei 2026	0,57	27 Mei 2026
<i>Obligasi Pemerintah Taiwan</i>				
A08101	0,63	14 Jan 2024	0,63	14 Jan 2024
A10109	-	-	0,25	26 Agu 2023
A11106	1,00	23 Jun 2027	1,00	23 Jun 2027
A95107	2,13	10 Nov 2026	2,13	10 Nov 2026
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	Beragam	Beragam	Beragam	Beragam
<i>U.S. Treasury Bills</i>	Beragam	Beragam	Beragam	Beragam
<i>Singapore Government Securities</i>				
SIGB 0625	2,38	1 Jun 2025	2,38	1 Jun 2025
SIGB 1125	0,50	1 Nov 2025	0,50	1 Nov 2025
SIGB 0626	2,13	1 Jun 2026	2,13	1 Jun 2026
SIGB 0528	2,36	1 Mei 2028	2,36	1 Mei 2028

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain" berkisar dari 95,89% sampai dengan 133,01% dan 89,19% sampai dengan 128,35% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar melalui laba rugi		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Merdeka Copper Gold Tbk	92.548	20.250
PT Oki Pulp & Paper	53.803	-
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	52.820	19.143
PT Bumi Serpong Damai Tbk	50.171	-
PT Astra Sedaya Finance	49.950	19.854
PT Federal International Finance	25.148	-
PT Indonesia Infrastructure Finance	14.179	-
PT Medco Power Indonesia	13.490	15.000
PT Indosat Tbk	10.564	10.636
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	10.051	-
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	-	59.424
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	3.916
	372.724	148.223
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	89.095	-
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	30.086	5.037
PT Waskita Beton Precast Tbk	15.900	-
PT Mandiri Tunas Finance	10.000	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	9.259	150.434
PT Timah (Persero) Tbk	5.011	5.046
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	10.309
	159.351	170.826
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	167.372	160.671
	167.372	160.671
	699.447	479.720

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Astra Sedaya Finance	779.564	763.352
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	617.968	514.923
PT Federal International Finance	375.964	331.205
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	298.707	294.263
PT Maybank Indonesia Finance	191.657	183.595
PT Indosat Tbk	180.964	204.187
PT Bank CIMB Niaga Tbk	109.884	161.482
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	95.047	90.552
PT Bank BTPN Tbk	68.507	121.103
PT Bank Maybank Indonesia	51.735	153.182
Lainnya	104.968	559.652
	2.874.965	3.377.496
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Indonesia Infrastructure Finance	174.963	66.500
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	145.600	-
Toronto-Dominion Bank, N.A	117.739	115.259
CIMB Bank Berhad	56.344	54.634
US Bank	44.926	-
PT Freeport Indonesia	30.375	-
Bank of America	8.825	8.529
Citigroup, Inc.	7.815	7.756
The Royal Bank of Canada	5.875	5.825
JP Morgan Chase Bank, N.A	5.796	7.303
Lainnya	121.829	120.982
	720.087	386.788
<u>Dolar Singapura</u>		
House and Development Board Singapore	11.435	10.888
	11.435	10.888

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>		
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.530.173	1.280.122
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.082.390	1.344.197
PT Pupuk Indonesia (Persero)	604.488	945.463
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	599.069	905.677
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	549.390	697.645
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	412.848	558.095
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	362.450	352.945
PT Mandiri Tunas Finance	334.683	159.486
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	194.477	194.446
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	185.013	226.456
Lainnya	617.922	899.538
	6.472.903	7.564.070
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.048.442	1.043.810
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	718.227	397.304
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	685.304	490.180
PT Pertamina (Persero)	518.981	1.233.446
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	414.489	417.438
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	197.534	196.433
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	182.835	162.883
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	38.204	139.262
PT Utama Karya (Persero)	14.454	14.108
	3.818.470	4.094.864
	13.897.860	15.434.106

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Indosat Tbk	10.000	15.161
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15.130	10.000
	25.130	25.161
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
United Overseas Bank	46.144	46.620
	46.144	46.620
<u>Dolar Singapura</u>		
House and Development Board Singapore	111.023	111.005
	111.023	111.005
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	276.891	294.662
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	79.287	79.681
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	75.000	75.000
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	35.000	35.000
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	30.000	30.000
PT Bank Mandiri Taspen	17.331	17.677
PT Industri Kereta Api (Persero)	10.000	10.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	5.160	5.161
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	3.155	3.511
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	5.123
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	72.911
	531.824	628.726
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	176.091	177.877
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	61.972	62.466
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	41.813	41.904
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	24.115	24.501
PT Pertamina (Persero)	-	117.454
	303.991	424.202
	1.018.112	1.235.714
Total	15.615.419	17.149.540

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{*)}	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Astra Sedaya Finance				
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2019 Seri C	7,95	23 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri B	6,35	15 April 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2021 Seri B	5,30	22 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022 Seri B	5,70	22 Maret 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2022 Seri B	6,35	26 Agustus 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023 Seri B	6,00	6 Juli 2026	idAAA	-
Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023 Seri B	6,40	26 Oktober 2026	idAAA	-
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk				
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri E	9,25	16 Agustus 2023	-	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019 Seri C	9,50	23 Januari 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019 Seri C	9,15	16 April 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019 Seri C	8,10	4 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020 Seri B	7,90	7 Juli 2023	-	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri B	5,50	23 Juli 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 Seri B	5,60	22 Maret 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 Seri C	6,25	22 Maret 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023 Seri B	6,50	9 November 2026	idAAA	-
PT Federal International Finance				
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 Seri B	7,25	7 Oktober 2023	-	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 Seri B	6,25	8 Juni 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri B	5,30	27 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2023 Seri B	6,80	24 Februari 2026	idAAA	-
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri C	9,00	1 Maret 2025	-	idAA-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2021 Seri B	8,50	15 April 2026	idAA-	idAA-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2022 Seri A	7,20	8 Maret 2027	idAA-	idAA-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2022 Seri B	8,10	8 Maret 2029	idAA-	idAA-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 Seri A	8,00	9 Agustus 2027	idAA-	idAA-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 Seri A	8,40	28 Februari 2028	idAA-	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{*)}	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Rupiah (lanjutan)</u>				
PT Indosat Tbk				
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	11,20	8 Desember 2025	idAAA	idAAA(sy)
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri D	11,20	8 Desember 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri E	9,25	31 Mei 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri E	8,65	9 November 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	8,70	3 Mei 2028	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 Seri D	10,00	23 Juli 2029	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 Seri A	7,00	26 Oktober 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 Seri B	7,70	26 Oktober 2027	idAAA	idAAA
PT Maybank Indonesia Finance				
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021	6,30	23 Juni 2024	AAA(idn)	AA+(idn)
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022	5,80	30 Maret 2025	AAA(idn)	AA+(idn)
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk				
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri C	10,00	5 Agustus 2027	idA	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2022 Seri B	8,75	24 Februari 2025	idA+	idA+
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri A	6,00	21 Oktober 2023	-	idA+
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 Seri A	7,00	26 Desember 2023	-	idA+
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 Seri A	6,00	21 Oktober 2023	-	idA+(sy)
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 Seri A	7,00	26 Desember 2023	-	idA+
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri B	10,25	11 Juli 2026	idA+	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 Seri B	10,25	25 Agustus 2026	idA+	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2022 Seri B	8,75	24 Februari 2025	idA+(sy)	idA+(sy)
PT Merdeka Copper Gold Tbk				
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 Seri B	10,25	9 September 2023	-	idA+
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 Seri A	5,50	8 September 2023	-	idA+
Berkelanjutan IV Tahap I tahun 2022	10,30	13 Desember 2025	idA+	idA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri A	7,80	28 April 2025	idA+	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk				
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C	8,25	21 Agustus 2024	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C	7,80	19 Desember 2024	idAAA	idAAA
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 Seri C	7,25	27 Maret 2025	idAAA	idAAA
PT Bank BTPN Tbk				
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 Seri B	7,75	26 November 2024	idAAA	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ¹⁾	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga (lanjutan)				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
PT Indonesia Infrastructure Finance				
Tahun 2026	1,50	27 Januari 2026	BBB***)	BBB***)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk				
Tahun 2031	3,40	9 Juni 2031	BBB-***)	-
Toronto-Dominion Bank, N.A.				
Tahun 2024	1,25	13 Desember 2024	A1**)	A1**)
Tahun 2027	2,80	10 Maret 2027	A**)	A**)
CIMB Bank Berhad				
Tahun 2027	2,13	20 Juli 2027	A3**)	A3**)
United Overseas Bank				
Tahun 2025	3,06	7 April 2025	AA-	AA-
Bank of America				
Tahun 2026	1,32	19 Juni 2026	A1**)	A2**)
Tahun 2026	3,50	19 April 2026	A1**)	A2**)
Tahun 2031	2,50	13 Februari 2031	A1**)	A2**)
Tahun 2031	1,92	24 Oktober 2031	A1**)	A2**)
Citigroup, Inc.				
Tahun 2024	3,75	16 Juni 2024	A3**)	A3**)
Tahun 2028	3,52	27 Oktober 2028	A3**)	A3**)
Tahun 2031	2,67	29 Januari 2031	A3**)	A3**)
The Royal Bank of Canada				
Tahun 2024	2,55	16 Juli 2024	A1**)	A2**)
Tahun 2025	1,15	10 Juni 2025	A1**)	A2**)
Tahun 2026	4,65	27 Januari 2026	A3**)	Baa1**)
JP Morgan Chase Bank, N.A.				
Tahun 2026	2,01	13 Maret 2026	A1**)	A2**)
Tahun 2029	4,45	5 Desember 2029	A1**)	A2**)
The Bank of Nova Scotia				
Tahun 2024	0,70	15 April 2024	A2**)	A2**)
Tahun 2025	1,30	11 Juni 2025	A2**)	A2**)
Tahun 2025	4,50	16 Desember 2025	Baa1**)	Baa1**)
<u>Dolar Singapura</u>				
Housing and Development Board Singapore				
Tahun 2025	2,63	17 September 2025	AAA***)	AAA***)
Tahun 2028	2,32	24 Januari 2028	AAA***)	AAA***)
Tahun 2028	1,54	12 Oktober 2028	AAA***)	AAA***)
Tahun 2029	1,97	25 Januari 2029	AAA***)	AAA***)
Tahun 2029	3,95	29 Januari 2029	AAA***)	AAA***)
Tahun 2029	3,44	13 September 2028	AAA***)	AAA***)
Pihak berelasi (Catatan 44)				
<u>Rupiah</u>				
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)				
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019				
Seri C	9,25	12 Februari 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019				
Seri B	8,10	28 Agustus 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2020				
Seri B	7,50	18 Februari 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2020				
Seri B	8,10	14 Juli 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap I tahun 2021				
Seri B	5,75	10 Februari 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap V tahun 2021				
Seri B	6,40	8 Juli 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VII Tahap I tahun 2023				
Seri B	5,95	12 Juli 2026	idAAA	-
Berkelanjutan VII Tahap II tahun 2023				
Seri C	6,75	20 Oktober 2028	idAAA	-
Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2021	6,00	17 November 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2022	6,95	21 September 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023	6,85	22 Februari 2028	idAAA	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{*)}	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (lanjutan)				
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021	5,60	8 Juli 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2023	6,90	22 Desember 2028	idAAA	-
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016				
Seri C	8,65	18 November 2026	idAAA	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019				
Seri D	8,50	28 Agustus 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2019				
Seri C	7,95	30 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Seri D	8,30	30 Oktober 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019				
Seri B	8,10	28 Agustus 2024	idAAA	idAAA
Sukuk Mudharabah I Tahap II Tahun 2019				
Seri D	8,55	28 Agustus 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2020				
Seri B	7,60	21 Juli 2023	-	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2020				
Seri A	6,30	11 Desember 2023	-	idAAA
Seri B	6,70	11 Desember 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022	6,98	8 November 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022				
Seri B	5,75	5 Agustus 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2023				
Seri B	6,70	17 Mei 2026	idAAA	-
Seri C	6,80	17 Mei 2027	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2023				
Seri B	6,70	14 Desember 2026	idAAA	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)				
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017				
Seri C	8,50	11 Juli 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017				
Seri D	8,70	3 November 2032	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018				
Seri C	7,25	22 Februari 2028	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018				
Seri B	9,00	10 Oktober 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2019				
Seri B	9,10	19 Februari 2024	idAAA	idAAA
Seri D	9,60	19 Februari 2029	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019				
Seri A	8,00	1 Agustus 2024	idAAA	idAAA
Seri B	8,50	1 Agustus 2026	idAAA	idAAA
Seri C	8,70	1 Agustus 2029	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019				
Seri A	7,90	1 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Seri B	8,40	1 Oktober 2026	idAAA	idAAA
Seri D	9,40	1 Oktober 2034	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020				
Seri A	7,20	18 Februari 2025	idAAA	idAAA
Seri B	7,70	18 Februari 2027	idAAA	idAAA
Seri C	8,00	18 Februari 2030	idAAA	idAAA
Seri D	8,70	18 Februari 2035	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2020				
Seri D	9,10	6 Mei 2030	idAAA	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020				
Seri A	6,70	8 September 2025	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60	10 Desember 2023	-	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,50	11 Juli 2027	idAAA	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{*)}	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (lanjutan)				
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,70	3 November 2032	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri B	7,25	22 Februari 2028	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,00	10 Oktober 2025	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 Seri A	7,90	1 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri B	8,50	1 Agustus 2026	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 Seri C	8,75	18 Februari 2035	idAAA	idAAA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,50	30 September 2023	-	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,65	30 September 2026	idBBB-	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	8,50	15 Juni 2024	idBBB-	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,65	15 Juni 2027	idBBB-	idAAA
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018 Seri A	8,50	21 September 2023	-	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri A	7,75	12 Mei 2025	idBBB-	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri B	8,30	12 Mei 2027	idBBB-	-
PT Pupuk Indonesia (Persero)				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,60	12 Juli 2024	AAA***)	AAA***)
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri A	7,00	3 September 2023	-	AAA(idn)
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri B	7,70	3 September 2025	AAA(idn)	AAA(idn)
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri C	8,30	3 September 2027	AAA(idn)	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri A	5,60	10 Maret 2024	AAA(idn)	AAA(idn)
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri B	6,20	10 Maret 2026	AAA(idn)	AAA(idn)
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri C	7,20	10 Maret 2028	AAA(idn)	AAA(idn)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk				
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri D	10,50	8 Juli 2025	idAA+	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri C	8,70	13 Juli 2024	idAA+	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri D	8,90	13 Juli 2027	idAA+	idAA+
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 Seri C	9,00	28 Juni 2024	idAA+	idAA+
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 Seri B	7,80	19 Agustus 2023	-	idAA+
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022 Seri A	5,50	24 Mei 2025	idAA+	idAA+
PT Kereta Api Indonesia (Persero)				
Berkelanjutan II Tahun 2017 Seri B	8,25	21 November 2024	idAAA+	idAAA+
Berkelanjutan II Tahun 2019 Seri A	7,75	13 Desember 2024	idAAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahun 2019 Seri B	8,20	13 Desember 2026	idAAA+	idAAA+
Berkelanjutan I Tahun 2022 Seri A	7,10	5 Agustus 2027	idAA+	idAA+
PT Mandiri Tunas Finance				
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019 Seri B	9,50	26 Juli 2024	idAAA+	idAAA+
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 Seri A	5,90	23 Februari 2025	idAAA+	idAAA+
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 Seri B	6,75	23 Februari 2027	idAAA+	idAAA+

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{*)}	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>				
<u>Rupiah (lanjutan)</u>				
PT Mandiri Tunas Finance (lanjutan)				
Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023				
Seri A	6,50	27 September 2026	idAAA+	idAAA+
Seri B	6,75	27 September 2029	idAAA+	idAAA+
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)				
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019				
Seri C	8,70	9 Juli 2024	idAAA	idAAA
Seri D	9,20	9 Juli 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017				
Seri C	8,25	15 Agustus 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018				
Seri C	6,90	14 Februari 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018				
Seri C	8,30	6 Juni 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019				
Seri D	8,50	29 Oktober 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VIII Tahun 2019				
Seri C	8,20	6 Desember 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019				
Seri E	9,50	23 April 2029	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019				
Seri E	8,75	29 Oktober 2029	idAAA	idAAA
PT Bank Mandiri Taspen				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019				
Seri B	8,20	26 November 2024	idAAA	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021				
Seri A	6,50	28 April 2024	idAAA	idAA+
Seri B	7,25	28 April 2026	idAAA	idAA+
<u>Mata uang asing</u>				
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)				
Tahun 2023	5,71	15 November 2023	-	BBB-***)
Tahun 2025	4,75	15 Mei 2025	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2028	3,02	15 November 2028	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2030	5,45	15 Mei 2030	BBB-***)	BBB-***)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Tahun 2024	3,75	11 April 2024	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2025	4,75	13 Mei 2025	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2026	2,00	19 April 2026	BBB-***)	BBB-***)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)				
Tahun 2027	4,13	15 Mei 2027	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2028	5,45	21 Mei 2028	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2029	5,38	25 Januari 2029	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2030	3,38	5 Februari 2030	BBB-***)	BBB-***)
PT Pertamina (Persero)				
Tahun 2029	3,65	30 Juli 2029	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2030	3,10	21 Januari 2030	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2031	2,30	9 Februari 2031	BBB-***)	BBB-***)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk				
Tahun 2024	5,13	16 Mei 2024	BBB-***)	BBB-***)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)				
Tahun 2025	4,25	5 Mei 2025	BBB-***)	BBB-***)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)				
Tahun 2026	2,05	11 Mei 2026	BBB-***)	BBB-***)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)				
Tahun 2024	4,88	1 Oktober 2024	BBB-***)	BBB-***)
PT Utama Karya (Persero) Tbk				
Tahun 2030	3,75	11 Mei 2030	BBB-***)	BBB-***)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Peningkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	603.060	-
PT Trimegah Asset Management	208.569	701.222
PT BNP Paribas Investment Partners	8.480	11.686
PT Syailendra Capital	-	750.803
PT Schroder Investment Management Indonesia	-	604.108
PT Sucorinvest Asset Management	-	12.880
PT Avrist Asset Management	-	10.341
	<u>820.109</u>	<u>2.091.040</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Schroder Investment Management Indonesia	9.106	8.869
	<u>9.106</u>	<u>8.869</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	2.413.552	3.527.388
PT PNM Investment Management	1.757.635	570.178
PT Bahana TCW Investment Management	964.231	635.716
PT Mandiri Manajemen Investasi	-	251.720
	<u>5.135.418</u>	<u>4.985.002</u>
	<u>5.964.633</u>	<u>7.084.911</u>
<u>Nilai Wajar melalui Penghasilan</u>		
<u>Komprehensif Lain</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Trimegah Asset Management	2.683.934	2.254.051
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	2.278.298	1.515.150
PT Syailendra Capital	2.369.004	2.116.666
PT Berdikari Manajemen Investasi	577.171	577.330
PT Sinarmas Asset Management	165.927	169.610
PT Sucorinvest Asset Management	85.826	318.540
PT Mega Asset Management	20.160	20.729
PT Bank Central Asia	100.217	-
PT BNP Paribas Investment Management	201.152	-
	<u>8.481.689</u>	<u>6.972.076</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	780.166	788.027
	<u>780.166</u>	<u>788.027</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana (lanjutan)

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Nilai Wajar melalui Penghasilan</u>		
<u>Komprehensif Lain (lanjutan)</u>		
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PR BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	2.458.668	1.875.482
PT Bahana TCW Investment Management	1.331.873	878.835
PT BNI Asset Management	759.176	756.788
PT PNM Investment Management	149.547	149.382
PT Mandiri Manajemen Investasi	-	2.081
	<u>4.699.264</u>	<u>3.662.568</u>
	<u>13.961.119</u>	<u>11.422.671</u>
Total	<u>19.925.752</u>	<u>18.507.582</u>

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*

	<u>Nilai/Nominal</u>	<u>Tingkat Bunga per Tahun (%)</u>	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Nilai wajar/Nilai tercatat</u>	
				<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 Seri A	20.000	5,90	6 Jun 2023	-	18.554
				<u>-</u>	<u>18.554</u>
<u>Nilai wajar melalui penghasilan</u>					
<u>komprehensif lain</u>					
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Mata Uang Asing</u>					
Central Bank Of China					
111121602811N	130	0,97	13 Jan 2023	-	65.796
111122102811N	100	0,97	18 Jan 2023	-	50.613
111122801411N	95	0,71	11 Jan 2023	-	48.082
111123002811N	100	0,97	30 Jan 2023	-	50.613
111123000711N	10	0,58	6 Jan 2023	-	5.060
112121302811N	100	1,09	10 Jan 2024	50.350	-
				<u>50.350</u>	<u>220.164</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.					
Tahun 2022 Seri C	10.000	6,20	8 Des 2023	-	9.277
Tahun 2023 Tahap I Seri C	90.000	6,53	21 Okt 2024	85.250	-
				<u>85.250</u>	<u>9.277</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan)

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* (lanjutan)

	Nilai/Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/Nilai tercatat	
				31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>(lanjutan)</u>					
<u>Mata uang asing</u>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.					
Tahun 2022 Seri A	20	5,90	6 Juni 2023	-	316.020
				-	316.020
Total				135.600	564.015

d.5. Obligasi Subordinasi

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar melalui laba rugi		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank KEB Hana Indonesia Seri I Tahun 2016	-	32.001
PT Bank Central Asia Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	15.783	15.632
	<u>15.783</u>	<u>47.633</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	-	2.036
	<u>15.783</u>	<u>49.669</u>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Pan Indonesia Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	-	40.304
PT Bank UOB Indonesia Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	-	20.740
PT Bank KEB Hana Indonesia Seri I Tahun 2016	-	9.290
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	-	18.283
PT Bank Central Asia Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri A	-	5.000
	<u>-</u>	<u>93.617</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>(lanjutan)</u>		
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	-	25.454
	-	119.071
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>		
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	-	7.000
	-	7.000
Total	15.783	175.740

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{*)}	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank KEB Hana Indonesia				
Seri I Tahun 2016	9,95	21 Des 2023	-	AA(idn)***)
PT Bank Central Asia Tbk				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018	7,75	5 Jul 2025	-	idAA
Seri A	8,00	5 Jul 2030	idAA	idAA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk				
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	9,63	10 Jun 2023	-	AA(idn)***)
PT Bank Pan Indonesia Tbk				
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	10,25	17 Mar 2024	-	idA+
PT Bank UOB Indonesia				
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	9,25	17 Okt 2024	-	AA(idn)***)
<u>Pihak berelasi</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk				
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	9,25	16 Nov 2023	-	idA+

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.6. *Medium-Term Note* (MTN)

	Nilai/Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/Nilai tercatat	
				31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)					
MTN I Tahun 2022 ¹⁾	200.000	9,00	2 Nov 2027	153.503	223.023
Perum Perumnas					
Tahap III Tahun 2018 Seri A ¹⁾	60.000	11,25	10 Des 2023	-	62.520
Tahap III Tahun 2018 Seri B [*])	65.000	11,85	10 Des 2026	62.520	-
				<u>216.023</u>	<u>285.543</u>
Biaya perolehan diamortisasi					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Perkebunan Nusantara II					
VIII Seri A ¹⁾	10.000	11,00	26 Jun 2024	10.000	10.000
VIII Seri B ¹⁾	1.000	11,00	31 Okt 2024	1.000	1.000
				<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
Total				<u>227.023</u>	<u>296.543</u>

¹⁾ Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali

e) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah	6,61%	6,82%
Dolar Amerika Serikat	3,80	3,54
Euro Eropa	2,31	1,67
Dolar Singapura	2,67	2,87
Dolar Taiwan Baru	1,39	1,03
Yen Jepang	0,61	0,61

f) BRI mengakui kerugian yang belum direalisasi-neto dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam "nilai wajar melalui laba rugi" sebesar Rp214.435 dan Rp145.520 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang dilaporkan dalam akun "keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

g) BRI mengakui keuntungan neto atas penjualan efek-efek sebesar Rp1.898.653 dan Rp1.518.191 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang dilaporkan dalam akun "keuntungan dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- h) Efek-efek sejumlah nominal Rp20.563.516 dan Rp10.867.140 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 23).
- i) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Nilai tercatat awal	150.802.567	-	-	150.802.567
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	15.393.453	-	-	15.393.453
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	9.682.747	-	-	9.682.747
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(12.201.857)	-	-	(12.201.857)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(337.745)	-	-	(337.745)
Nilai tercatat akhir	163.339.165	-	-	163.339.165

	31 Desember 2023			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	158.406.378	-	-	158.406.378
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.763.236)	-	-	(1.763.236)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	6.247.397	-	-	6.247.397
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.664.875)	-	-	(9.664.875)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(7.866.696)	-	-	(7.866.696)
Nilai tercatat akhir	145.358.968	-	-	145.358.968

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- i) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Nilai tercatat awal	201.526.369	-	-	201.526.369
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(14.482.901)	-	-	(14.482.901)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	20.265.482	-	-	20.265.482
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(59.349.780)	-	-	(59.349.780)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2.843.397	-	-	2.843.397
Nilai tercatat akhir	150.802.567	-	-	150.802.567

31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	151.521.026	-	-	151.521.026
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	1.467.824	-	-	1.467.824
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.879.708	-	-	10.879.708
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(7.860.448)	-	-	(7.860.448)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2.398.268	-	-	2.398.268
Nilai tercatat akhir	158.406.378	-	-	158.406.378

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- i) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

31 Desember 2023				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	141.559	-	-	141.559
Pengalihan ke	-	-	-	-
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(2.464)	-	-	(2.464)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	12.050	-	-	12.050
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(18.764)	-	-	(18.764)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(4.151)	-	-	(4.151)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir^{*)}	128.230	-	-	128.230

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain sehingga nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

31 Desember 2023				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	82.835	-	-	82.835
Pengalihan ke	-	-	-	-
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(5.757)	-	-	(5.757)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3.365	-	-	3.365
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(7.235)	-	-	(7.235)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	8.302	-	-	8.302
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	81.510	-	-	81.510

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- i) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	554.756	-	-	554.756
Pengalihan ke	-	-	-	-
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(282.698)	-	-	(282.698)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	23.722	-	-	23.722
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(154.223)	-	-	(154.223)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2	-	-	2
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir^{*)}	141.559	-	-	141.559

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain sehingga nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	311.120	-	-	311.120
Pengalihan ke	-	-	-	-
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(161.213)	-	-	(161.213)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	21.444	-	-	21.444
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(90.586)	-	-	(90.586)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2.070	-	-	2.070
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	82.835	-	-	82.835

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Wesel Tagih		6.366.822		5.575.972
Surat Kredit Berdokumen				
Dalam Negeri (SKBDN)		5.225.499		4.286.069
Wesel Ekspor		948.474		3.355.392
Tagihan Lainnya		355.533		506.167
		<u>12.896.328</u>		<u>13.723.600</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Surat Kredit Berdokumen				
Dalam Negeri (SKBDN)				
Dolar Amerika Serikat	1.920.785	29.574		-
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	569.043.299	8.761.560	400.745.904	6.238.612
Renminbi	347.287.381	753.635	36.117.545	80.864
Euro Eropa		-	194.897	3.232
		<u>9.515.195</u>		<u>6.322.708</u>
Wesel Tagih				
Dolar Amerika Serikat	1.671.338.459	25.733.598	603.556.630	9.395.868
Euro Eropa	2.643.272	45.037	11.562.854	191.732
Renminbi	4.837.899	10.499	2.759.864	6.179
Yen Jepang	5.707.955	621		-
		<u>25.789.755</u>		<u>9.593.779</u>
Tagihan Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	38.072.991	586.210	29.212.471	454.765
Renminbi	14.353.420	31.148	24.531.085	54.923
Yen Jepang	64.121.200	6.981	52.414.886	6.175
Euro Eropa	68.625	1.169		-
		<u>625.508</u>		<u>515.863</u>
		<u>35.960.032</u>		<u>16.432.350</u>
		<u>48.856.360</u>		<u>30.155.950</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Wesel Tagih		2.909.367		4.552.374
Surat Kredit Berdokumen				
Dalam Negeri (SKBDN)		359.966		951.749
Tagihan Lainnya		340.411		158.541
Wesel Ekspor		38.666		89.703
		<u>3.648.410</u>		<u>5.752.367</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Wesel Tagih				
Dolar Amerika Serikat	69.242.781	1.066.131	150.101.816	2.336.710
Pound Sterling Inggris	4.541	89		-
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	96.636	1.488	113.946	1.774
		<u>1.067.708</u>		<u>2.338.484</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>				
Tagihan Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	14.993.050	230.848	51.501.356	801.747
Euro Eropa	5.002.350	85.232	637.745	10.575
Yen Jepang	62.880.000	6.846	62.880.000	7.408
Pound Sterling Inggris		-	44.900	844
		322.926		820.574
		1.390.634		3.159.058
		5.039.044		8.911.425
Total		53.895.404		39.067.375
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.323.916)		(1.638.929)
Bersih		51.571.488		37.428.446

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 semua wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan "Lancar", kecuali senilai Rp599.732 dengan kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus" pada tanggal 31 Desember 2022.

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	26.851.284	9.363.195
> 1 bulan - 3 bulan	15.250.996	11.037.276
> 3 bulan - 1 tahun	6.754.080	9.755.479
	48.856.360	30.155.950
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
≤ 1 bulan	2.221.008	2.480.729
> 1 bulan - 3 bulan	798.625	3.792.441
> 3 bulan - 1 tahun	2.019.411	2.638.255
	5.039.044	8.911.425
	53.895.404	39.067.375
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.323.916)	(1.638.929)
Bersih	51.571.488	37.428.446

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

31 Desember 2023				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Nilai tercatat awal	38.376.387	690.988	-	39.067.375
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	(945.043)	945.043	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	43.385.603	1.074.429	-	44.460.032
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(28.406.723)	(1.197.707)	-	(29.604.430)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(27.522)	(51)	-	(27.573)
Nilai tercatat akhir	52.382.702	1.512.702	-	53.895.404
31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Nilai tercatat awal	29.338.221	325.350	654	29.664.225
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	38.193.005	692.648	-	38.885.653
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(29.338.221)	(325.350)	(654)	(29.664.225)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	183.382	(1.660)	-	181.722
Nilai tercatat akhir	38.376.387	690.988	-	39.067.375

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Cadangan atas kerugian kredit				
kredit ekspektasian akhir	1.108.792	530.137	-	1.638.929
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	(58.346)	58.346	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan				
kerugian	-	734.771	-	734.771
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	1.067.552	463.664	-	1.531.216
Aset keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(1.050.447)	(530.546)	-	(1.580.993)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	1	(8)	-	(7)
Cadangan atas kerugian				
 kredit ekspektasian akhir	1.067.552	1.256.364	-	2.323.916
31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Cadangan atas kerugian kredit				
kredit ekspektasian akhir	979.763	161.932	654	1.142.349
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan				
kerugian	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	1.109.971	530.137	-	1.640.108
Aset keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(979.763)	(161.932)	(654)	(1.142.349)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	(1.179)	-	-	(1.179)
Cadangan atas kerugian				
 kredit ekspektasian akhir	1.108.792	530.137	-	1.638.929

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

- a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
VR0054	6,00%	28 Des 2023	04 Jan 2024	9.546.172	9.552.536
VR0036	6,16	04 Okt 2023	03 Jan 2024	2.876.476	2.920.281
VR0052	6,16	11 Okt 2023	10 Jan 2024	1.925.750	1.952.770
VR0064	6,43	15 Nov 2023	15 Feb 2024	1.920.082	1.936.200
VR0044	6,46	29 Nov 2023	28 Feb 2024	1.920.096	1.931.466
VR0056	6,16	18 Okt 2023	17 Jan 2024	480.157	486.319
VR0082	6,40	04 Agu 2023	03 Mei 2024	144.282	148.130
VR0094	6,67	13 Jan 2023	12 Jan 2024	92.694	98.757
VR0061	6,50	28 Apr 2023	26 Jan 2024	93.600	97.791
VR0049	6,45	09 Jun 2023	08 Mar 2024	93.476	96.926
VR0037	6,41	16 Jun 2023	14 Jun 2024	93.069	96.367
PT Bank OCBC NISP Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0070	5,85	29 Des 2023	02 Jan 2024	2.016.348	2.017.331
FR0077	5,85	29 Des 2023	02 Jan 2024	996.165	996.651
PT Bank UOB Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
IDSR041224364S	6,50	22 Des 2023	05 Jan 2024	1.405.969	1.408.508
FR0095	6,70	20 Des 2023	19 Jan 2024	483.251	484.330
IDSR131124364S	6,27	28 Des 2023	04 Jan 2024	94.173	94.239
PT Bank Central Asia Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0095	5,85	29 Des 2023	02 Jan 2024	972.060	972.534
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0086	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	942.176	942.825
FR0090	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	924.632	925.269
FR0065	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	467.930	468.252
FR0091	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	463.996	464.315
PT Bank Mega Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0086	6,20	28 Des 2023	02 Jan 2024	942.176	942.825
PT BPD Jawa Timur					
Obligasi Pemerintah					
FR0090	6,30	22 Des 2023	02 Jan 2024	739.365	740.659
FR0081	6,50	21 Des 2023	04 Jan 2024	570.879	572.013
FR0086	6,30	22 Des 2023	02 Jan 2024	188.444	188.774
PT Bank Pan Indonesia Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0087	6,70	20 Des 2023	19 Jan 2024	470.212	471.262
FR0086	6,67	13 Des 2023	12 Jan 2024	469.383	471.035
PT Bank Permata Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0090	6,15	28 Des 2023	02 Jan 2024	462.316	462.632
PT Bank DKI					
Obligasi Pemerintah					
FR0095	6,15	28 Des 2023	02 Jan 2024	291.517	291.716
FR0091	6,53	21 Des 2023	04 Jan 2024	277.645	278.199
FR0088	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	272.478	272.666
FR0095	6,15	28 Des 2023	02 Jan 2024	194.345	194.477
FR0091	6,53	21 Des 2023	04 Jan 2024	92.548	92.733
FR0090	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	92.463	92.527
FR0088	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	90.826	90.889

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJDI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

- a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari (lanjutan):

31 Desember 2023					
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>					
<u>Rupiah (lanjutan)</u>					
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Obligasi Pemerintah FR0096	6,27	28 Des 2023	04 Jan 2024	246.560	246.732
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Obligasi Pemerintah IDSR081124364S	6,70	20 Des 2023	19 Jan 2024	94.085	94.295
Total				33.447.796	33.595.231

31 Desember 2022					
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Indonesia Obligasi Pemerintah					
VR0046	5,50	30 Des 2022	06 Jan 2023	9.583.874	9.585.338
VR0058	5,50	27 Des 2022	03 Jan 2023	9.521.920	9.527.739
VR0062	5,50	28 Des 2022	04 Jan 2023	7.609.509	7.612.996
VR0036	5,75	30 Des 2022	13 Jan 2023	4.782.695	4.783.459
VR0035	5,50	29 Des 2022	05 Jan 2023	4.781.733	4.783.195
FR0057	6,05	18 Nov 2022	17 Feb 2023	3.276.051	3.299.725
VR0038	5,50	26 Des 2022	02 Jan 2023	2.878.666	2.880.865
VR0044	6,26	23 Des 2022	24 Mar 2023	961.918	963.256
VR0068	5,79	07 Des 2022	04 Jan 2023	462.705	464.490
VR0068	5,78	07 Des 2022	04 Jan 2023	462.704	464.487
FR0088	3,28	07 Jan 2022	06 Jan 2023	215.997	223.042
FR0052	4,05	29 Jul 2022	28 Jul 2023	116.041	118.064
FR0052	4,20	26 Agu 2022	24 Feb 2023	112.814	114.486
FR0079	4,30	26 Agu 2022	26 Mei 2023	106.312	107.925
FR0058	3,95	29 Jul 2022	27 Jan 2023	99.311	101.000
VR0042	6,48	23 Des 2022	23 Jun 2023	96.192	96.330
VR0052	6,62	23 Des 2022	22 Sep 2023	95.826	95.967
VR0085	6,34	18 Nov 2022	19 Mei 2023	93.416	94.123
VR0053	6,70	23 Des 2022	22 Des 2023	93.326	93.465
FR0065	4,35	26 Agu 2022	25 Agu 2023	91.478	92.882
FR0065	4,00	29 Jul 2022	28 Apr 2023	88.270	89.790
FR0073	5,35	23 Sep 2022	24 Mar 2023	52.702	53.477
FR0073	5,35	23 Sep 2022	24 Mar 2023	52.702	53.476
FR0058	5,54	23 Sep 2022	23 Jun 2023	50.540	51.310
FR0058	5,53	23 Sep 2022	23 Jun 2023	50.540	51.309
FR0070	6,23	01 Des 2022	02 Mar 2023	49.742	50.001
FR0074	6,65	18 Nov 2022	17 Nov 2023	48.194	48.577
VR0057	6,04	21 Okt 2022	21 Jul 2023	46.561	47.116
VR0085	5,85	21 Okt 2022	27 Apr 2023	46.516	47.053
VR0076	6,16	21 Okt 2022	20 Okt 2023	46.382	46.945
FR0096	6,53	18 Nov 2022	18 Agu 2023	46.456	46.818
FR0088	5,65	23 Sep 2022	22 Sep 2023	43.008	43.678
FR0088	5,65	23 Sep 2022	22 Sep 2023	43.008	43.677

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari (lanjutan):

	31 Desember 2022				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>					
<u>Rupiah (lanjutan)</u>					
PT Bank OCBC NISP Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0077	5,35	29 Des 2022	02 Jan 2023	1.984.142	1.984.732
FR0081	5,35	29 Des 2022	02 Jan 2023	1.924.557	1.925.129
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0087	5,75	28 Des 2022	04 Jan 2023	462.887	463.108
PT Bank Nationalnobu Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0088	5,73	08 Nov 2022	07 Feb 2023	213.388	215.188
PT BPD Jawa Timur					
Obligasi Pemerintah					
FR0070	6,23	29 Nov 2022	28 Feb 2023	199.031	200.133
PT BPD Sulawesi Tengah					
Obligasi Pemerintah					
FR0070	5,80	27 Des 2022	03 Jan 2023	50.294	50.327
Total				50.941.408	51.014.678

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua kolektibilitas atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan "Lancar".

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, karena Manajemen berkeyakinan bahwa efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dapat ditagih.

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

Transaksi	31 Desember 2023	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap suku bunga	381.607	369.374
Pembelian dan penjualan <i>forward</i> mata uang asing	284.050	108.496
Swap mata uang asing	223.308	403.003
Swap mata uang dan suku bunga	18.045	37.444
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	4.673	6.893
Total	911.683	925.210

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut (lanjutan):

Transaksi	31 Desember 2022	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
<i>Swap</i> suku bunga	548.024	510.221
<i>Swap</i> mata uang asing	194.939	118.076
Pembelian dan penjualan <i>forward</i> mata uang asing	153.074	134.666
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	15.368	20.958
Total	911.405	783.921

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif:

	Nilai Nosional (mata uang asing nilai penuh, Rupiah dalam jutaan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<i>Swap</i> mata uang dan suku bunga		
Rupiah	1.596.707	-
Dolar Amerika Serikat	38.849.458	-
<i>Swap</i> suku bunga		
Dolar Amerika Serikat	836.544.325	991.572.073
<i>Option</i> mata uang		
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	70.337.283	316.378.967
<i>Spot</i> mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	134.500.000	190.550.000
Pound Sterling Inggris	20.000.000	1.000.000
Euro Eropa	23.500.000	-
Dolar Australia	6.000.000	-
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	103.000.000	201.300.000
Renminbi	34.380.488	-
Pound Sterling Inggris	16.000.000	-
Euro Eropa	14.500.000	-
Dolar Australia	2.000.000	-
<i>Forward</i> mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Yen Jepang	2.157.313.167	-
Dolar Amerika Serikat	483.866.974	205.870.175
Renminbi	19.250.000	-
Euro Eropa	15.268.092	7.262.813
Dolar Australia	-	1.000.000
Rupiah	-	260.860
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	2.003.452.579	1.509.881.189
Dolar Australia	10.004.640	1.000.000
Euro Eropa	1.683.154	2.000.000
Yen Jepang	-	357.794.464

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif (lanjutan):

	Nilai Nosional (mata uang asing nilai penuh, Rupiah dalam jutaan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<i>Swap</i> mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	883.785.000	607.013.305
Euro Eropa	21.700.000	11.000.000
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	1.666.985.952	2.305.422.839
Euro Eropa	136.500.000	119.000.000
Pound Sterling Inggris	30.400.000	13.000.000
Dolar New Zealand	15.000.000	20.000.000
Renminbi	16.500.000	16.500.000

Para pihak yang melakukan kontrak derivatif dalam bentuk *swap* suku bunga ataupun *swap* mata uang dan suku bunga dengan BRI berkewajiban membayar bunga tetap (*fixed rate*) atau bunga mengambang (*floating rate*) antara lain SOFR 3 (tiga) bulanan atau 6 (enam) bulanan ditambah dengan margin tertentu.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Modal kerja	665.301.670	584.022.730
Konsumsi	291.855.160	272.227.246
Investasi	84.839.826	77.766.122
<i>Cash Collateral</i>	120.980	134.783
	<u>1.042.117.636</u>	<u>934.150.881</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Investasi	60.649.004	47.253.484
Modal kerja	32.456.813	33.128.457
Konsumsi	1.248.783	992.241
	<u>94.354.600</u>	<u>81.374.182</u>
	<u>1.136.472.236</u>	<u>1.015.525.063</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Investasi	25.328.993	29.109.589
Modal kerja	22.570.722	19.006.439
Konsumsi	202.992	198.703
	<u>48.102.707</u>	<u>48.314.731</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Modal kerja	8.246.770	11.569.451
Investasi	4.930.993	3.865.574
	<u>13.177.763</u>	<u>15.435.025</u>
	<u>61.280.470</u>	<u>63.749.756</u>
Total	1.197.752.706	1.079.274.819
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(79.924.211)	(88.323.830)
Bersih	<u>1.117.828.495</u>	<u>990.950.989</u>

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekivalen Rp
<u>Rupiah</u>		1.090.220.343		982.465.612
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	6.983.904.314	107.531.174	6.214.866.162	96.749.930
Euro Eropa	62.891	1.072	125.228	2.076
Dolar Singapura	9.992	117	4.011.742	46.508
Yen Jepang	-	-	90.763.955	10.693
		<u>107.532.363</u>		<u>96.809.207</u>
Total		1.197.752.706		1.079.274.819
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(79.924.211)		(88.323.830)
Bersih		<u>1.117.828.495</u>		<u>990.950.989</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	380.541.641	348.689.024
Pertanian	170.821.987	147.030.128
Perindustrian	68.538.993	64.764.099
Jasa dunia usaha	62.285.323	54.625.353
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	19.005.972	11.478.168
Konstruksi	13.822.884	12.543.433
Pertambangan	12.039.085	2.522.711
Jasa pelayanan sosial	6.492.786	5.634.752
Listrik, gas dan air	3.515.414	4.825.989
Lain-lain	305.053.551	282.037.224
	<u>1.042.117.636</u>	<u>934.150.881</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	28.886.861	28.295.501
Pertambangan	18.668.806	8.222.920
Listrik, gas dan air	16.010.011	17.416.378
Pertanian	10.209.149	8.482.101
Perdagangan, perhotelan dan restoran	7.101.727	6.651.811
Jasa dunia usaha	5.777.586	5.676.005
Konstruksi	5.144.603	4.594.455
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.206.064	800.905
Jasa pelayanan sosial	240	233.280
Lain-lain	1.349.553	1.000.826
	<u>94.354.600</u>	<u>81.374.182</u>
	<u>1.136.472.236</u>	<u>1.015.525.063</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Konstruksi	15.844.765	15.002.419
Perdagangan, perhotelan dan restoran	8.660.446	3.476.021
Listrik, gas dan air	7.226.951	9.346.356
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	6.758.265	7.202.288
Pertanian	3.432.207	4.430.088
Perindustrian	3.375.970	5.217.969
Jasa dunia usaha	1.792.749	2.008.930
Jasa pelayanan sosial	500.000	275.117
Pertambangan	306.903	1.156.277
Lain-lain	204.451	199.266
	<u>48.102.707</u>	<u>48.314.731</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
Listrik, gas dan air	3.669.593	4.784.350
Perindustrian	3.462.758	3.633.650
Jasa dunia usaha	2.690.443	2.773.946
Jasa pelayanan sosial	1.207.001	305.304
Perdagangan, perhotelan dan restoran	855.325	891.584
Pertambangan	826.582	2.578.518
Pertanian	462.551	467.673
Konstruksi	3.510	-
	<u>13.177.763</u>	<u>15.435.025</u>
	<u>61.280.470</u>	<u>63.749.756</u>
Total	1.197.752.706	1.079.274.819
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(79.924.211)	(88.323.830)
Bersih	<u>1.117.828.495</u>	<u>990.950.989</u>

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	26.794.841	21.581.736
> 1 bulan - 3 bulan	44.774.886	33.795.541
> 3 bulan - 1 tahun	220.564.802	201.388.156
> 1 tahun - 2 tahun	135.697.545	139.063.100
> 2 tahun - 5 tahun	371.132.518	322.623.148
> 5 tahun	243.153.044	215.699.200
	<u>1.042.117.636</u>	<u>934.150.881</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	1.405.710	5.295.404
> 1 bulan - 3 bulan	2.596.463	2.774.762
> 3 bulan - 1 tahun	18.457.013	18.556.620
> 1 tahun - 2 tahun	14.169.802	10.803.847
> 2 tahun - 5 tahun	33.109.853	8.526.613
> 5 tahun	24.615.759	35.416.936
	<u>94.354.600</u>	<u>81.374.182</u>
	<u>1.136.472.236</u>	<u>1.015.525.063</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	1.172.046	2.739.614
> 1 bulan - 3 bulan	2.599.116	1.136.900
> 3 bulan - 1 tahun	11.375.557	4.187.901
> 1 tahun - 2 tahun	1.864.276	3.609.695
> 2 tahun - 5 tahun	10.933.850	12.147.069
> 5 tahun	20.157.862	24.493.552
	<u>48.102.707</u>	<u>48.314.731</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	887.427	3.938.414
> 1 bulan - 3 bulan	772.182	8.930
> 3 bulan - 1 tahun	-	552.530
> 1 tahun - 2 tahun	462.551	220.447
> 2 tahun - 5 tahun	4.254.138	-
> 5 tahun	6.801.465	10.714.704
	<u>13.177.763</u>	<u>15.435.025</u>
	<u>61.280.470</u>	<u>63.749.756</u>
Total	1.197.752.706	1.079.274.819
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(79.924.211)	(88.323.830)
Bersih	<u>1.117.828.495</u>	<u>990.950.989</u>

d) Berdasarkan Kolektibilitas:

Kolektibilitas BRI, Bank Raya, dan Pegadaian di luar usaha gadai:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Individual	33.829.500	50.799.698
Kolektif		
Lancar	1.042.712.719	931.823.518
Dalam perhatian khusus	46.754.108	32.629.744
Kurang lancar	4.605.023	2.350.338
Diragukan	7.049.578	3.371.555
Macet	15.921.659	14.916.272
	<u>1.117.043.087</u>	<u>985.091.427</u>
Total	<u>1.150.872.587</u>	<u>1.035.891.125</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d) Berdasarkan Kolektibilitas (lanjutan):

Kolektibilitas BRI, Bank Raya, dan Pegadaian di luar usaha gadai (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Individual	(25.415.117)	(33.601.412)
Kolektif	(53.072.775)	(53.385.883)
	<u>(78.487.892)</u>	<u>(86.987.295)</u>
Bersih	<u>1.072.384.695</u>	<u>948.903.830</u>

Kolektibilitas usaha gadai Pegadaian (entitas anak):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kolektif		
Lancar	44.856.257	42.241.998
Dalam perhatian khusus	1.827.385	898.268
Kurang lancar	20.712	30.905
Diragukan	10.115	23.817
Macet	165.650	188.706
Total	<u>46.880.119</u>	<u>43.383.694</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Kolektif	(1.436.319)	(1.336.535)
Bersih	<u>45.443.800</u>	<u>42.047.159</u>

e) Berdasarkan Segmen Operasi:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Mikro	504.116.776	502.967.076
Ritel	491.361.723	397.589.654
Korporasi	46.639.137	33.594.151
	<u>1.042.117.636</u>	<u>934.150.881</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	91.341.135	78.277.579
Ritel	3.013.465	3.096.603
	<u>94.354.600</u>	<u>81.374.182</u>
	<u>1.136.472.236</u>	<u>1.015.525.063</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e) Berdasarkan Segmen Operasi (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Korporasi	46.538.169	46.480.305
Ritel	1.564.538	1.834.426
	<u>48.102.707</u>	<u>48.314.731</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	13.177.763	15.435.025
	<u>13.177.763</u>	<u>15.435.025</u>
	61.280.470	63.749.756
Total	1.197.752.706	1.079.274.819
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(79.924.211)	(88.323.830)
Bersih	1.117.828.495	990.950.989

f) Informasi Penting Lainnya:

1) Tingkat suku bunga rata-rata:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Bunga Kontrak		
Rupiah	11,01%	10,01%
Mata uang asing	4,80	3,87
Bunga Efektif		
Rupiah	11,79%	11,37%
Mata uang asing	5,07	4,28

- 2) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan (Catatan 19, 20 dan 21), serta barang jaminan berupa emas (entitas anak).
- 3) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya.
- 4) Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepada pekerja dan pensiun, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lainnya.
- 5) Kredit program merupakan kredit yang disalurkan BRI berdasarkan petunjuk dari Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia khususnya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

- 6) Kredit Kupedes merupakan kredit yang disalurkan BRI melalui kantor BRI Unit dengan sasaran usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon Kupedes. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran adalah pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.
- 7) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi yang diberikan BRI adalah sebesar Rp69.273.881 dan Rp64.091.492 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Keikutsertaan BRI sebagai pimpinan sindikasi berkisar dari 5% sampai dengan 68% dan 2% sampai dengan 77% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar dari 1% sampai dengan 69% dan 1% sampai dengan 68% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
- 8) Pinjaman pekerja adalah pinjaman yang diberikan kepada pekerja dengan tingkat bunga berkisar 4,5% sampai dengan 5,5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 4 (empat) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman pekerja dan *Base Lending Rate* (BLR) ditanggungkan dan dicatat sebagai beban yang ditanggungkan untuk pinjaman pekerja, bagian dari Aset Lain-lain. Besarnya akun beban yang ditanggungkan untuk pinjaman pekerja sebesar Rp5.190.672 dan Rp4.785.093 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 17).
- 9) Kredit yang diberikan BRI kepada pihak berelasi di luar kredit yang diberikan kepada manajemen kunci (Catatan 44) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perusahaan Umum BULOG	8.050.411	2.806.206
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	7.223.106	9.346.356
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.493.912	4.526.884
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.176.593	3.069.554
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2.270.033	1.332.717
PT Pertamina EP Cepu	2.263.613	2.573.381
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.033.162	2.119.335
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	2.025.180	2.140.183
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1.773.059	2.217.674
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	1.719.923	1.761.099
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.008.656	945.183
Lain-lain	25.038.474	30.711.916
Total	61.076.122	63.550.488

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

10) Informasi mengenai restrukturisasi yang dilakukan BRI dan entitas anak

Tabel berikut merupakan informasi atas kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi (termasuk restrukturisasi dampak Covid-19) sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BRI (Entitas Induk)	102.508.133	147.780.529
Bank Raya	2.688.077	3.978.156
Pegadaian	72.192	308.266
Total	105.268.402	152.066.951

Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI dan Bank Raya, sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp53.498.210 dan Rp45.290.460. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi (BRI Entitas Induk, Bank Raya dan Pegadaian) akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, serta Siaran Pers OJK No. SP 85/DHMS/OJK/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan secara *Targeted* dan Sektorial Atasi Dampak Lanjutan Pandemi Covid-19, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp51.770.192 dan Rp106.776.491 dengan skema perpanjangan jangka waktu.

Tabel berikut merupakan informasi atas kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI berdasarkan jenis dan kolektibilitas:

	31 Desember 2023					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
<u>Jenis</u>						
Modal kerja	36.346.567	24.980.213	2.139.015	3.439.273	6.417.016	73.322.084
Investasi	13.785.578	4.224.453	329.997	837.300	5.635.785	24.813.113
Konsumsi	4.586.499	1.498.244	186.617	275.195	586.650	7.133.205
Total	54.718.644	30.702.910	2.655.629	4.551.768	12.639.451	105.268.402

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

10) Informasi mengenai restrukturisasi yang dilakukan BRI dan entitas anak (lanjutan)

Tabel berikut merupakan informasi atas kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI berdasarkan jenis dan kolektibilitas (lanjutan):

31 Desember 2022						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
<u>Jenis</u>						
Modal kerja	71.894.781	18.066.488	926.618	2.439.008	4.669.392	97.996.287
Investasi	29.105.543	5.006.592	774.133	1.008.727	6.232.052	42.127.047
Konsumsi	9.494.384	1.461.144	98.274	208.012	681.803	11.943.617
Total	110.494.708	24.534.224	1.799.025	3.655.747	11.583.247	152.066.951

Pada tanggal 27 Juni 2022, putusan homologasi terkait dengan restrukturisasi atas kredit yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") telah disepakati bersama dengan seluruh kreditur. Putusan homologasi tersebut baru efektif tanggal 28 Desember 2022 setelah Garuda telah memenuhi seluruh persyaratan homologasi. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai tercatat kredit yang diberikan kepada Garuda setelah memperhitungkan kerugian modifikasi akibat restrukturisasi adalah sebesar Rp945.183, dimana nilai ini akan terpulihkan secara bertahap sesuai dengan konsep akuntansi setelah tanggal restrukturisasi hingga tanggal jatuh tempo. Kerugian modifikasi sebesar Rp3.258.079 dicatat pada akun pendapatan bunga. BRI tetap memiliki nilai tagih atas kredit yang diberikan kepada Garuda sebesar Rp4.613.060 sesuai nilai kontraktual pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga tidak terdapat penghapusan (*haircut*) jumlah tagihan pokok dan bunga yang ditangguhkan oleh BRI terhadap Garuda.

11) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.

12) Rincian kredit yang mengalami penurunan nilai merupakan kredit yang mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individual dan kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perdagangan, perhotelan dan restoran	18.396.123	16.223.885
Perindustrian	11.150.487	12.180.672
Pertanian	9.537.399	14.347.105
Konstruksi	6.755.177	7.449.492
Jasa dunia usaha	6.233.964	5.943.884
Pertambangan	2.314.227	2.854.041
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2.027.334	6.361.874

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

12) Rincian kredit yang mengalami penurunan nilai merupakan kredit yang mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individual dan kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jasa pelayanan sosial	408.163	548.657
Listrik, gas dan air	143.026	2.186.265
Lain-lain	4.636.337	3.585.416
Total	61.602.237	71.681.291
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(44.332.414)	(46.969.837)
Bersih	17.269.823	24.711.454

13) Rasio-rasio

- a. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) BRI (entitas induk) berdasarkan peraturan terkait adalah sebesar 3,12% dan 2,82% masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Sedangkan rasio NPL neto BRI (entitas induk) adalah sebesar 0,76% dan 0,73% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
- b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BRI adalah sebesar 58,55% dan 58,56% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umumnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umumnya kredit memburuk	
Kredit yang Diberikan				
Nilai tercatat awal	886.345.387	163.185.724	29.743.708	1.079.274.819
Pengalihan ke				
Stage 1	21.040.875	(20.820.091)	(220.784)	-
Stage 2	(34.436.838)	35.656.368	(1.219.530)	-
Stage 3	(10.274.806)	(16.090.208)	26.365.014	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(97.260.723)	(15.756.199)	306.176	(112.710.746)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	519.987.258	9.842.164	2.180.123	532.009.545
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(225.427.993)	(38.514.125)	(2.296.006)	(266.238.124)
Penghapusbukuan	(4.529.486)	(11.339.217)	(18.013.542)	(33.882.245)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(562.369)	(94.062)	(44.112)	(700.543)
Nilai tercatat akhir	1.054.881.305	106.070.354	36.801.047	1.197.752.706

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Kredit yang Diberikan				
Nilai tercatat awal	857.473.265	106.378.838	30.564.420	994.416.523
Pengalihan ke				
Stage 1	6.952.548	(6.816.563)	(135.985)	-
Stage 2	(27.178.139)	28.253.113	(1.074.974)	-
Stage 3	(3.885.398)	(6.699.257)	10.584.655	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(78.848.410)	(19.148.330)	(637.130)	(98.633.870)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	277.978.012	98.615.584	7.670.730	384.264.326
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(142.543.459)	(32.245.292)	(5.078.026)	(179.866.777)
Penghapusbukuan	(3.615.157)	(6.136.117)	(12.308.402)	(22.059.676)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	12.125	983.748	158.420	1.154.293
Nilai tercatat akhir	886.345.387	163.185.724	29.743.708	1.079.274.819

31 Desember 2023				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Kredit yang Diberikan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	24.926.263	41.732.088	21.665.479	88.323.830
Pengalihan ke				
Stage 1	2.457.102	(2.299.325)	(157.777)	-
Stage 2	(1.168.243)	2.187.739	(1.019.496)	-
Stage 3	(403.480)	(3.058.759)	3.462.239	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(3.950.058)	12.992.963	20.819.240	29.862.145
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	9.871.230	2.237.589	1.409.324	13.518.143
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(5.690.458)	(9.927.728)	(1.519.801)	(17.137.987)
Penghapusbukuan	(4.529.486)	(11.339.217)	(18.013.542)	(33.882.245)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(578.523)	(223.964)	42.812	(759.675)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	20.934.347	32.301.386	26.688.478	79.924.211

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Kredit yang Diberikan</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	19.874.035	41.476.057	23.483.642	84.833.734
Pengalihan ke				
Stage 1	738.878	(654.994)	(83.884)	-
Stage 2	(1.167.188)	1.925.755	(758.567)	-
Stage 3	(252.936)	(1.118.719)	1.371.655	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.617.817)	918.977	6.460.113	5.761.273
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	15.379.150	10.501.753	8.073.317	33.954.220
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(4.380.375)	(5.109.088)	(4.495.955)	(13.985.418)
Penghapusbukuan	(3.615.157)	(6.136.117)	(12.308.402)	(22.059.676)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(32.327)	(71.536)	(76.440)	(180.303)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	24.926.263	41.732.088	21.665.479	88.323.830

Termasuk dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai BRI (entitas induk) adalah cadangan kerugian untuk daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah rawan bencana atau yang pernah mengalami bencana sebesar Rp108.286 dan Rp2.018.000 dengan nilai tercatat sebesar Rp1.130.368 dan Rp15.688.470 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Jumlah minimum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif kredit yang diberikan BRI (Entitas Induk), yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Catatan 2e) adalah sebesar Rp43.526.965 dan Rp34.522.709 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat kredit entitas anak (PT Pegadaian) digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Bank masing-masing sebesar Rp29.600.000 dan Rp48.538.586 (Catatan 25).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN SYARIAH

a) Pinjaman syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
Lancar	12.454.636	9.632.737
Dalam perhatian khusus	966.673	602.297
Kurang lancar	47.774	28.781
Diragukan	55.172	35.639
Macet	143.965	214.875
Total	13.668.220	10.514.329
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.093.762)	(1.286.203)
Bersih	12.574.458	9.228.126

b) Pinjaman syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	17.091	15.365
> 1 bulan - 3 bulan	84.009	22.165
> 3 bulan - 1 tahun	8.227.108	7.379.222
> 1 tahun - 2 tahun	2.388.081	1.087.575
> 2 tahun - 5 tahun	2.799.958	1.821.751
> 5 tahun	151.973	188.251
Total	13.668.220	10.514.329
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.093.762)	(1.286.203)
Bersih	12.574.458	9.228.126

Pinjaman syariah terdiri dari *arrum haji*, *amanah*, *arrum*, *arrum emas baru*, dan *rhan tasjily tanah*.

Jumlah pinjaman syariah yang telah direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 serta Siaran Pers OJK No. SP 85/DHMS/OJK/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan Secara *Targeted* dan Sektoral Atasi Dampak Lanjutan Pandemi Covid sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp234.507 dan Rp530.846.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN SYARIAH (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian pinjaman syariah:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	1.286.203	1.410.907
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	(192.441)	(124.704)
Saldo akhir	1.093.762	1.286.203

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

Jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur atas pinjaman syariah antara lain berupa emas, fidusia dan barang jaminan non-emas lainnya.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh pinjaman syariah digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Bank (Catatan 25).

13. PIUTANG PEMBIAYAAN

a) Piutang Pembiayaan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 tahun	31.552.191	33.630.939
> 1 tahun - 2 tahun	16.332.478	8.398.988
> 2 tahun - 5 tahun	7.037.409	7.034.845
> 5 tahun	22.257	100.625
	<u>54.944.335</u>	<u>49.165.397</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
≤ 1 tahun	28.304	95.363
> 1 tahun - 2 tahun	5.331	15.868
> 2 tahun - 5 tahun	-	4.084
	<u>33.635</u>	<u>115.315</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 tahun	5.872	7.205
> 1 tahun - 2 tahun	12.812	-
> 2 tahun - 5 tahun	11.667	-
	<u>30.351</u>	<u>7.205</u>
Total	55.008.321	49.287.917
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.483.915)	(3.477.948)
Bersih	50.524.406	45.809.969

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

b) Piutang Pembiayaan berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Pembiayaan Pola Angsuran Mingguan		
<u>Kolektibilitas</u>		
Lancar	40.351.215	35.244.605
Dalam perhatian khusus	1.221.134	512.184
Kurang lancar	168.592	20.909
Diragukan	60.028	8.224
Macet	100.932	26.018
	<u>41.901.901</u>	<u>35.811.940</u>
Pembiayaan Pola Angsuran Non Mingguan		
<u>Kolektibilitas</u>		
Lancar	11.746.901	11.985.624
Dalam perhatian khusus	1.013.319	1.044.244
Kurang lancar	43.498	122.894
Diragukan	39.335	31.746
Macet	263.367	291.469
	<u>13.106.420</u>	<u>13.475.977</u>
Total	55.008.321	49.287.917
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.483.915)	(3.477.948)
Bersih	50.524.406	45.809.969

c) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Piutang Pembiayaan</u>				
Nilai tercatat awal	47.142.455	367.725	1.777.737	49.287.917
Pengalihan ke				
Stage 1	728.092	(721.325)	(6.767)	-
Stage 2	(1.960.800)	1.977.343	(16.543)	-
Stage 3	(1.485.014)	(1.002.216)	2.487.230	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	5.347.188	70.962	5.633	5.423.783
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	71.899.653	522.836	50.369	72.472.858
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(69.613.543)	(153.986)	(746.273)	(70.513.802)
Penghapusbukuan	(57.431)	(13.291)	(1.589.853)	(1.660.575)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(1.860)	-	-	(1.860)
Nilai tercatat akhir	51.998.740	1.048.048	1.961.533	55.008.321

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

- c. Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Piutang Pembiayaan</u>				
Nilai tercatat awal	37.766.589	1.057.696	467.144	39.291.429
Pengalihan ke				
Stage 1	303.644	(291.046)	(12.598)	-
Stage 2	(1.208.342)	1.208.650	(308)	-
Stage 3	(819.253)	(1.778.506)	2.597.759	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	23.798.297	1.063.840	454.048	25.316.185
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(12.569.790)	(887.969)	(1.409.336)	(14.867.095)
Penghapusbukuan	(19.290)	(4.940)	(318.972)	(343.202)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(109.400)	-	-	(109.400)
Nilai tercatat akhir	47.142.455	367.725	1.777.737	49.287.917
31 Desember 2023				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Piutang Pembiayaan</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	1.376.178	1.223.654	878.116	3.477.948
Pengalihan ke				
Stage 1	167.035	(162.293)	(4.742)	-
Stage 2	(940.187)	951.545	(11.358)	-
Stage 3	(551.475)	(619.661)	1.171.136	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	1.942.679	25.781	2.046	1.970.506
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	4.424.581	3.676	3.525	4.431.782
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.645.464)	(9.540)	(46.235)	(3.701.239)
Penghapusbukuan	(57.431)	(13.291)	(1.589.853)	(1.660.575)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(34.507)	-	-	(34.507)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	2.681.409	1.399.871	402.635	4.483.915

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

- c. Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Piutang Pembiayaan</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	643.221	534.404	407.151	1.584.776
Pengalihan ke				
Stage 1	1.530.567	(1.518.317)	(12.250)	-
Stage 2	(432.484)	432.738	(254)	-
Stage 3	(121.748)	(185.447)	307.195	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(2.124.829)	1.963.144	(302.110)	(463.795)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2.496.271	28.620	846.856	3.371.747
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(540.846)	(26.548)	(49.500)	(616.894)
Penghapusbukuan	(19.290)	(4.940)	(318.972)	(343.202)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(54.684)	-	-	(54.684)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	1.376.178	1.223.654	878.116	3.477.948

- d) Dalam piutang pembiayaan, termasuk informasi terkait piutang sewa pembiayaan (BRI Finance) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
Piutang pembiayaan-bruto	9.855.031	8.270.596
Nilai sisa yang terjamin	1.582.769	1.713.964
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(1.971.918)	(1.578.276)
Simpanan jaminan	(1.582.769)	(1.713.964)
	<u>7.883.113</u>	<u>6.692.320</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
Piutang pembiayaan-bruto	37.460	7.503
Nilai sisa yang terjamin	7.427	4
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(7.109)	(298)
Simpanan jaminan	(7.427)	(4)
	<u>30.351</u>	<u>7.205</u>
Total	7.913.464	6.699.525
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(215.309)	(236.874)
Bersih	7.698.155	6.462.651

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat piutang pembiayaan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang Bank masing-masing sebesar Rp31.789.102 dan Rp16.523.795.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat piutang pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah masing-masing sebesar Rp31.668.616 dan Rp27.585.665.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		7.394.694		4.399.391
<u>Mata uang asing</u>				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	94.495.087	1.454.941	68.880.542	1.072.298
Yen Jepang	762.730.478	83.046	176.722.210	20.820
Euro Eropa	2.447.950	41.709	1.799.292	29.835
Renminbi	13.304.733	28.872	15.404.713	34.490
Pound Sterling Inggris	29.751	584	42.325	795
		1.609.152		1.158.238
		9.003.846		5.557.629
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
L/C Impor dan SKBDN		1.167.584		1.599.368
<u>Mata uang asing</u>				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	2.986.171	45.978	681.080	10.603
		1.213.562		1.609.971
Total		10.217.408		7.167.600
Cadangan kerugian penurunan nilai		(249.698)		(136.536)
Bersih		9.967.710		7.031.064

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan "Lancar".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	2.419.023	1.844.875
> 1 bulan - 3 bulan	4.288.211	2.282.625
> 3 bulan - 1 tahun	2.296.612	1.430.129
	<u>9.003.846</u>	<u>5.557.629</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
≤ 1 bulan	66.652	305.002
> 1 bulan - 3 bulan	444.464	534.165
> 3 bulan - 1 tahun	702.446	770.804
	<u>1.213.562</u>	<u>1.609.971</u>
Total	10.217.408	7.167.600
Cadangan kerugian penurunan nilai	(249.698)	(136.536)
Bersih	<u>9.967.710</u>	<u>7.031.064</u>

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Tagihan Akseptasi</u>				
Nilai tercatat awal	7.145.070	22.530	-	7.167.600
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.301.960	23.811	-	10.325.771
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(7.250.703)	(22.530)	-	(7.273.233)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(2.730)	-	-	(2.730)
Nilai tercatat akhir	<u>10.193.597</u>	<u>23.811</u>	<u>-</u>	<u>10.217.408</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

- d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Tagihan Akseptasi</u>				
Nilai tercatat awal	8.956.013	598.225	-	9.554.238
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.119.924	22.530	-	7.142.454
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(8.956.013)	(598.225)	-	(9.554.238)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	25.146	-	-	25.146
Nilai tercatat akhir	7.145.070	22.530	-	7.167.600

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Tagihan Akseptasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	123.052	13.484	-	136.536
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	244.269	5.581	-	249.850
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(121.373)	(13.484)	-	(134.857)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(1.831)	-	-	(1.831)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	244.117	5.581	-	249.698

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

- d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Tagihan Akseptasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	134.047	354.186	-	488.233
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	123.650	13.484	-	137.134
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(134.047)	(354.186)	-	(488.233)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(598)	-	-	(598)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	123.052	13.484	-	136.536

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

15. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	31 Desember 2023			Nilai Tercatat
		Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	
Metode Ekuitas					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan	15,38	3.546.381	1.933.244	5.479.625
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	15,10	71.325	8.115	79.440
			<u>3.617.706</u>	<u>1.941.359</u>	<u>5.559.065</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2023					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Nilai Wajar					
Pihak ketiga					
Grab Holding	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,05			111.355
PT Bukalapak.com	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,18			39.106
PT Pefindo Biro Kredit	Perusahaan informasi pengkreditan	13,88			20.060
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	0,18			32.278
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	3,00			4.650
PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional	Lembaga Services Pembayaran	17,50			3.500
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	1,92			1.340
Investasi lain-lain	Beragam	Beragam			783.555
Pihak berelasi (Catatan 44)					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan	12,57			753.258
Total					1.749.102
Cadangan kerugian penurunan nilai					7.308.167 (2.676)
Bersih					7.305.491

31 Desember 2022					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Ekuitas					
Pihak berelasi (Catatan 44)					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan	15,38	3.546.381	1.116.254	4.662.635
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	15,10	71.325	6.521	77.846
			3.617.706	1.122.775	4.740.481

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2022					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Nilai Wajar					
<u>Pihak ketiga</u>					
Grab Holding	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,07			108.572
PT Bukalapak.com	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,18			47.434
PT Pefindo Biro Kredit	Perusahaan informasi pengkreditan	16,09			20.060
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	7,97			38.261
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	4,25			4.650
PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional	Lembaga <i>Services</i> Pembayaran	17,50			3.500
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	1,92			2.868
Investasi lain-lain	Beragam	Beragam			1.011.721
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan	12,57			537.548
					1.774.614
Total					6.515.095
Cadangan kerugian penurunan nilai					(8.192)
Bersih					6.506.903

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua penyertaan diklasifikasikan "Lancar".

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan laba tahun berjalan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Total aset	353.624.125	305.727.438
Total liabilitas	87.222.910	73.655.791
Total dana <i>syirkah</i> temporer	227.662.092	198.566.037
PT Bahana Artha Ventura		
Total aset	1.642.983	1.723.887
Total liabilitas	838.813	926.497

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan laba tahun berjalan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut (tidak diaudit) (lanjutan):

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Total pendapatan	22.251.743	19.622.865
Total laba bersih	5.703.743	4.260.182
PT Bahana Artha Ventura		
Total pendapatan	145.401	154.768
Total laba bersih	10.553	4.212

Rincian penerimaan dividen adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
<u>BRI</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	65.504	130.554
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	-	7.088
	<u>65.504</u>	<u>137.642</u>
<u>Entitas Anak</u>		
PT BRI Danareksa Sekuritas	9.693	-
PT Bank Raya Indonesia Tbk	202	44
PT BRI Asuransi Indonesia	127	19
PT Permodalan Nasional Madani	46	-
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	-	6.364
	<u>10.068</u>	<u>6.427</u>
Total	<u>75.572</u>	<u>144.069</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP

Aset tetap terdiri atas:

31 Desember 2023						
Keterangan	Saldo Awal	Revaluasi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan						
Hak atas tanah	33.406.372	-	1.086.300	1.134.834	(40.411)	33.317.427
Bangunan	12.219.677	-	1.522.462	699.119	2.084.832	15.127.852
Kendaraan bermotor	3.900.285	-	2.015.071	706.759	12.801	5.221.398
Komputer dan mesin ^{*)}	12.175.552	-	2.588.752	435.387	2.534.962	16.863.879
Perlengkapan kantor	3.357.863	-	677.264	102.384	45.608	3.978.351
Aset tetap museum	184	-	-	-	-	184
Satelit	3.284.668	-	25	-	4.185	3.288.878
Aset dalam penyelesaian	5.606.600	-	2.719.584	18.399	(4.641.977)	3.665.808
	<u>73.951.201</u>	<u>-</u>	<u>10.609.458</u>	<u>3.096.882</u>	<u>-</u>	<u>81.463.777</u>
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	4.158.159	-	1.302.878	224.927	(10.318)	5.225.792
Kendaraan bermotor	1.846.266	-	243.852	161.713	429	1.928.834
Komputer dan mesin	9.276.125	-	1.514.294	194.805	(882)	10.594.732
Perlengkapan kantor	2.247.030	-	444.481	94.342	10.771	2.607.940
Satelit	1.207.574	-	220.786	-	-	1.428.360
	<u>18.735.154</u>	<u>-</u>	<u>3.726.291</u>	<u>675.787</u>	<u>-</u>	<u>21.785.658</u>
Nilai buku - Bersih	<u>55.216.047</u>					<u>59.678.119</u>

*) Termasuk *software*

31 Desember 2022						
Keterangan	Saldo Awal	Revaluasi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan						
Hak atas tanah	30.014.425	3.296.712	337.950	206.667	(36.048)	33.406.372
Bangunan	9.420.713	-	3.747.043	1.745.445	797.366	12.219.677
Kendaraan bermotor	3.612.022	-	1.153.328	915.890	50.825	3.900.285
Komputer dan mesin ^{*)}	10.595.357	-	1.296.684	434.729	718.240	12.175.552
Perlengkapan kantor	3.908.928	-	707.388	571.618	(686.835)	3.357.863
Aset tetap museum	184	-	-	-	-	184
Satelit	3.284.664	-	250	-	(246)	3.284.668
Aset dalam penyelesaian	4.202.191	-	3.295.590	1.047.879	(843.302)	5.606.600
	<u>65.038.484</u>	<u>3.296.712</u>	<u>10.538.233</u>	<u>4.922.228</u>	<u>-</u>	<u>73.951.201</u>
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	3.313.244	-	1.094.220	262.287	12.982	4.158.159
Kendaraan bermotor	2.120.861	-	572.000	855.688	9.093	1.846.266
Komputer dan mesin	7.666.009	-	1.344.986	275.523	540.653	9.276.125
Perlengkapan kantor	2.981.185	-	383.015	554.450	(562.720)	2.247.030
Satelit	986.998	-	220.584	-	(8)	1.207.574
	<u>17.068.297</u>	<u>-</u>	<u>3.614.805</u>	<u>1.947.948</u>	<u>-</u>	<u>18.735.154</u>
Nilai buku - Bersih	<u>47.970.187</u>					<u>55.216.047</u>

*) Termasuk *software*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 pada tabel di atas termasuk juga nilai Aset Hak Guna (AHG) BRI dan entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo awal 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31 Desember 2023
<u>Biaya Perolehan Aset Hak Guna</u>				
Bangunan	1.840.211	1.124.412	498.447	2.466.176
Kendaraan bermotor	331.406	437.631	128.139	640.898
Perlengkapan kantor	13.246	119.100	226	132.120
	<u>2.184.863</u>	<u>1.681.143</u>	<u>626.812</u>	<u>3.239.194</u>
<u>Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna</u>				
Bangunan	794.664	752.694	396.904	1.150.454
Kendaraan bermotor	169.110	169.784	124.782	214.112
Perlengkapan kantor	1.780	19.139	141	20.778
	<u>965.554</u>	<u>941.617</u>	<u>521.827</u>	<u>1.385.344</u>
Nilai buku - Bersih	<u>1.219.309</u>			<u>1.853.850</u>
	Saldo awal 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31 Desember 2022
<u>Biaya Perolehan Aset Hak Guna</u>				
Bangunan	1.411.229	1.135.501	706.519	1.840.211
Kendaraan bermotor	372.382	99.740	140.716	331.406
Perlengkapan kantor	20.856	12.686	20.296	13.246
	<u>1.804.467</u>	<u>1.247.927</u>	<u>867.531</u>	<u>2.184.863</u>
<u>Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna</u>				
Bangunan	457.367	552.101	214.804	794.664
Kendaraan bermotor	62.545	190.007	83.442	169.110
Perlengkapan kantor	20.304	2.460	20.984	1.780
	<u>540.216</u>	<u>744.568</u>	<u>319.230</u>	<u>965.554</u>
Nilai buku - Bersih	<u>1.264.251</u>			<u>1.219.309</u>

Tabel berikut menyajikan beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
	Beban penyusutan aset hak guna	Beban bunga atas liabilitas sewa
Bangunan	752.694	8.883
Kendaraan bermotor	169.784	17.981
Perlengkapan kantor	19.139	369
Total	<u>941.617</u>	<u>27.233</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian (lanjutan):

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	
	Beban penyusutan aset hak guna	Beban bunga atas liabilitas sewa
Bangunan	552.101	6.986
Kendaraan bermotor	190.007	21.188
Perlengkapan kantor	2.460	116
Total	744.568	28.290

Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki BRI adalah lebih dari 2 (dua) tahun.

BRI dan entitas anak memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah, dimana dikecualikan dari pengakuan sewa berdasarkan PSAK No. 73.

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebesar Rp3.726.291 dan Rp3.614.805 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 36).

BRI dan Entitas Anak telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah dan satelit) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, vandalisme, *force majeure*, dan lain-lain kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (Entitas Anak), PT Askrindo (Pihak Berelasi), dan Maritme Mutual Insurance New Zealand dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp22.124.061 dan Rp20.269.005 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

BRI telah mengasuransikan aset tetap satelit kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (Entitas Anak) dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar ASD130.736.666 (nilai penuh) dan ASD160.000.000 (nilai penuh), masing-masing polis asuransi tersebut berakhir pada tanggal 19 Juni 2024 dan 2023.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki BRI yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Nilai tercatat bruto aset tetap yang telah terdepresiasi penuh, namun masih digunakan oleh BRI adalah masing-masing sebesar Rp9.986.999 dan Rp9.019.619 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 1 April 2016, BRI mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran hak atas tanah menjadi model revaluasi dari sebelumnya menggunakan model biaya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" bagian 27 huruf e, dengan mempertimbangkan nilai buku tanah yang telah dilakukan revaluasi pada tahun 2016. Selanjutnya, BRI dan entitas anak telah melakukan penilaian kembali atas tanah hanya untuk memenuhi ketentuan Bapepam-LK tersebut dan bukan untuk tujuan perpajakan, dimana berdasarkan penilaian terakhir menggunakan nilai wajar pada tanggal 1 April 2022.

Penilaian dilakukan berdasarkan POJK No. 28/POJK.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang "Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal" dan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya.

Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:

1. KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, dengan laporan No. 01042/2.0131-00/PI/07/0375/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp1.679.046 ditandatangani oleh Budi Prasodjo.
2. KJPP Dino Farid dan Rekan, dengan laporan No. 00526/2.0164-00/PI/07/0447/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp2.006.196 ditandatangani oleh Dino Suharianto.
3. KJPP Sapto, Kasmodiand dan Rekan, dengan laporan No. 01957/2.0084-00/PI/07/0274/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp9.866.380 ditandatangani oleh Sapto Haji.
4. KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan, dengan laporan No. 00522/2.0018-00/PI/07/0496/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp1.429.569 ditandatangani oleh Budi Muhammad Haikal.
5. KJPP Susan Widjojo dan Rekan, dengan laporan No. 00400/2.0068-00/PI/07/0198/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp2.865.437 ditandatangani oleh Susan Widjojo.
6. KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, dengan laporan No. 00121/2.0014-00/PI/07/0080/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp1.152.233 ditandatangani oleh Okky Danuza.
7. KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, dengan laporan No. 00282/2.0051-00/PI/07/0152/1/IX/2022 tanggal 1 September 2022 sebesar Rp1.056.302 dan Rp654.858 ditandatangani oleh Abdullah Fitriantoro.
8. KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, dengan laporan No. 01155/2.0027-00/PI/07/0196/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp1.524.861 ditandatangani oleh Muhammad A. Muttaqin.
9. KJPP Iwan Bachron dan Rekan, dengan laporan No. 00066/2.0047-00/PI/07/0108/1/IX/2022 tanggal 14 September 2022 sebesar Rp730.970 ditandatangani oleh Iwan Bachron.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali atas hak atas tanah BRI (Entitas induk) pada tanggal 1 April 2022 sebesar Rp2.963.485 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2.984.488, sedangkan penurunan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali sebesar Rp21.003 diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nilai wajar hak atas tanah termasuk pada hierarki nilai wajar level 2.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jika tanah diukur menggunakan model biaya, nilai tercatatnya masing-masing adalah sebesar Rp14.489.235 dan Rp13.402.935.

BRI dan entitas anak tidak memiliki aset tetap yang tidak terpakai sementara, tidak memiliki aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif, dan aset tetap yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset dalam penyelesaian, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		
	Akumulasi biaya	Persentase penyelesaian	Estimasi penyelesaian
Bangunan dalam penyelesaian:			
Bangunan <i>Tier 3 Uptime Institute</i> DC GTI	89.930	85,00%	Maret 2024
Renovasi Menara BRI Medan	44.017	85,00%	Maret 2024
Kontraktor <i>Contact Center</i> Kebayoran Baru	26.439	95,00%	Januari 2024
<i>Main Campus BRI Corporate University</i>	28.738	95,00%	Januari 2024
Lain-lain	1.525.702	Beragam	Beragam
	1.714.826		
Software dalam penyelesaian:			
Pengadaan Konsultan IT-Fase Implementasi <i>Product</i>	302.176	85,00%	Juni 2024
Pengadaan <i>Secure Branch</i> Fase II	161.441	95,00%	Maret 2024
Switch DC Workload ODC Tahun 2022-2024	47.548	95,00%	Desember 2024
Pengadaan Implementasi Integrasi <i>New Finance System</i>	39.964	95,00%	Maret 2024
Lain-lain	966.662	Beragam	Beragam
	1.517.791		
Hardware dalam penyelesaian	433.191	Beragam	Beragam
	433.191		
Total	3.665.808		
	31 Desember 2022		
	Akumulasi biaya	Persentase penyelesaian	Estimasi penyelesaian
Bangunan dalam penyelesaian:			
Menara BRI Medan	287.349	93,40%	Februari 2023
Gedung BRI Kanwil Malang	118.892	95,05%	Februari 2023
Lain-lain	2.037.598	Beragam	Beragam
	2.443.839		
Software dalam penyelesaian:			
Pengadaan <i>Software</i> BRIFIRST	236.670	84,53%	Desember 2023
Pengadaan Infrastruktur BRIFIRST	168.337	71,40%	Desember 2023
Pengadaan Konsultan <i>System Integrator</i>	141.409	78,13%	Februari 2023
Aplikasi <i>Desktop</i> BRIBOX	62.599	90,57%	Mei 2023
Lain-lain	2.549.547	Beragam	Beragam
	3.158.562		
Hardware dalam penyelesaian	4.199	Beragam	Beragam
	4.199		
Total	5.606.600		

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap selain yang disebutkan di atas dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri atas:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah</u>		
Tagihan kepada Pemerintah terkait pemberian KUR	9.710.595	12.458.257
Biaya dibayar di muka	9.618.292	5.089.056
Beban yang ditanggungkan untuk pinjaman pekerja (Catatan 11f)	5.190.672	4.785.093
Piutang bunga:		
Efek-efek	2.579.374	2.740.624
Usaha gadai	2.099.520	2.290.259
Lain-lain	336.005	281.084
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	4.713.968	1.938.258
Aset reasuransi	2.697.126	2.242.873
Uang muka pajak (Catatan 38)	2.089.356	-
Piutang lain-lain	1.764.184	1.461.712
Aset atas sewa operasi - net	952.001	517.238
Kas yang dibatasi penggunaannya	534.474	1.268.339
Persediaan emas	508.699	439.088
Piutang premi	286.622	204.285
Properti investasi	199.635	195.526
Persekot intern	112.588	184.386
Aset tetap belum didistribusikan	52.939	1.014.197
Agunan yang diambil alih	52.230	67.569
Uang muka pengadaan	50.240	338.967
Setoran jaminan	33.437	82.403
Lain-lain	3.629.617	3.640.890
	<u>47.211.574</u>	<u>41.240.104</u>
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Term deposit</i> valas devisa hasil ekspor (TD Valas DHE) Bank Indonesia	5.839.312	-
Piutang Bunga:		
Efek-efek	1.280.545	1.257.503
Lain-lain	184.708	157.823
Lain-lain	542.340	489.742
	<u>7.846.905</u>	<u>1.905.068</u>
Total	55.058.479	43.145.172
Dikurangi cadangan penurunan nilai	(1.682.026)	(771.171)
Bersih	53.376.453	42.374.001

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS SEGERA

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah</u>		
Titipan pembayaran dividen (Catatan 31d)	12.666.432	8.602.823
Titipan <i>advance payment</i>	7.114.058	8.921.299
Titipan kerja sama pihak ketiga	1.121.776	520.966
Titipan setoran pajak	792.368	716.779
Titipan ATM dan kartu kredit	788.468	638.305
Titipan biaya operasional	696.501	-
Titipan uang elektronik	518.049	456.179
Titipan dana pihak ketiga	751.038	778.838
Titipan pinjaman kelolaan	289.945	121.539
Titipan <i>recovery claim</i> asuransi	279.530	-
Titipan asuransi	252.718	264.235
Utang kepada nasabah	232.719	170.138
Titipan setoran kliring	33.687	28.053
Titipan pengiriman uang	30.767	20.042
Lain-lain	3.496.949	3.331.158
	<u>29.065.005</u>	<u>24.570.354</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Titipan setoran kliring	538.895	-
Titipan setoran pajak	140.178	51.182
Titipan dana pihak ketiga	139.955	21.935
Titipan <i>advance payment</i>	36.911	65.926
Titipan ATM dan kartu kredit	4.958	5.205
Lain-lain	725.905	195.977
	<u>1.586.802</u>	<u>340.225</u>
Total	<u>30.651.807</u>	<u>24.910.579</u>

19. GIRO

Giro terdiri atas:

	<u>31 Desember 2023</u>		<u>31 Desember 2022</u>	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		116.731.749		111.967.188
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	3.455.537.572	53.204.912	3.290.805.117	51.229.608
Euro Eropa	36.944.483	629.472	27.522.824	456.376
Renminbi	165.406.408	358.942	156.774.479	351.004
Dolar Singapura	10.534.380	123.003	131.638.705	1.526.072
Dolar Australia	7.821.325	82.286	1.887.328	19.926
Yen Jepang	402.507.348	43.825	239.441.887	28.209
Dolar Hong Kong	10.897.029	21.475	1.569.861	3.134
Dolar Taiwan Baru	31.426.075	15.823	7.820.781	3.958
Pound Sterling Inggris	484.595	9.511	169.333	3.181
Dirham Uni Emirat Arab	1.537.723	6.447	267.241	1.133
Riyal Arab Saudi	503.509	2.067	8.615	36
Ringgit Malaysia	4.894	16	3.894	14
		<u>54.497.779</u>		<u>53.622.651</u>
		<u>171.229.528</u>		<u>165.589.839</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. GIRO (lanjutan)

Giro terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		80.392.091		112.553.235
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	6.124.984.673	94.306.389	4.593.131.861	71.503.580
Euro Eropa	10.413.081	177.421	5.485.114	90.953
Yen Jepang	168.148.421	18.308	151.956.054	17.902
Pound Sterling Inggris	29.196	573		-
Dolar Singapura	5.331	62	6.986	81
		94.502.753		71.612.516
		174.894.844		184.165.751
Total		346.124.372		349.755.590

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah	2,72%	2,07%
Mata uang asing	2,62	0,61

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp850.977 dan Rp551.325 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

20. TABUNGAN

Tabungan terdiri atas:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Simpedes		319.178.769		318.984.036
Britama		192.007.308		188.378.315
Lain-lain		10.278.739		9.528.215
		521.464.816		516.890.566
<u>Mata uang asing</u>				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	225.570.890	3.473.115	252.725.208	3.934.300
Yen Jepang	19.294.792.433	2.100.817	4.384.269.662	516.511
Euro Eropa	13.837.154	235.762	9.012.989	149.451
Dolar Singapura	13.100.685	152.968	14.646.981	169.801
Pound Sterling Inggris	1.350.486	26.505	3.445.779	64.733
Dolar Australia	1.879.683	19.776	1.872.993	19.775
Renminbi	6.809.463	14.777	2.911.422	6.518
Dolar Taiwan Baru	10.713.878	5.394	14.962.922	7.555
Riyal Arab Saudi	1.078.598	4.429	142.770	591
Dirham Uni Emirat Arab	93.443	392	11.629	49
Dolar Hong Kong	139.868	276	267.651	534
Won Korea Selatan	8.094.523	96		-
		6.034.307		4.869.818

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. TABUNGAN (lanjutan)

Tabungan terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>				
Lain-lain				
Dolar Amerika Serikat		-	1.463.998	22.791
		6.034.307		4.892.609
		527.499.123		521.783.175
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Britama		348.734		728.459
Simpedes		10.421		14.265
Lain-lain		64.826		100.691
		423.981		843.415
<u>Mata uang asing</u>				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	1.432.215	22.052	1.307.634	20.357
Pound Sterling Inggris	7.255	142	8.924	168
Euro Eropa	6.094	104	14.380	238
Yen Jepang	589.677	64	603.841	71
Dolar Singapura	4.679	55	37.678	437
Riyal Arab Saudi	6.880	28	6.226	26
Renminbi	417	1	14.546	33
		22.446		21.330
		446.427		864.745
Total		527.945.550		522.647.920

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah	0,26%	0,22%
Mata uang asing	0,19	0,12

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp157.317 dan Rp114.649 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka terdiri atas:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		294.911.189		258.965.235
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.981.751.726	30.513.031	2.241.433.076	34.893.509
Yen Jepang	18.089.520.575	1.969.587	682.150.000	80.364
Renminbi	147.108.266	319.234	145.122.178	324.915
Dolar Singapura	12.215.745	142.635	146.313.062	1.696.190
Dolar Australia	7.264.028	76.423	27.247.937	287.680
Pound Sterling Inggris	926.345	18.181	74.572	1.401
Euro Eropa	424.354	7.230	1.874.588	31.084
Dolar Taiwan Baru	6.056.320	3.049	6.170.038	3.123
Riyal Arab Saudi	5.010	21	5.007	21
		33.049.391		37.318.287
		327.960.580		296.283.522
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		132.688.743		121.105.033
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.532.609.511	23.597.589	1.159.818.087	18.055.468
Euro Eropa	700.000	11.927	2.200.000	36.480
		23.609.516		18.091.948
		156.298.259		139.196.981
Total		484.258.839		435.480.503

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	12.472.551	11.198.794
Deposito		
1 bulan	59.222.509	87.324.795
3 bulan	130.209.788	98.169.540
6 bulan	73.085.816	32.731.596
12 bulan	18.908.368	28.145.069
Lebih dari 12 bulan	1.012.157	1.395.441
	294.911.189	258.965.235

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	79.599	418.420
Deposito		
1 bulan	11.626.617	13.903.695
3 bulan	9.093.651	4.184.207
6 bulan	6.322.343	7.211.600
12 bulan	5.487.363	10.706.367
Lebih dari 12 bulan	439.818	893.998
	<u>33.049.391</u>	<u>37.318.287</u>
	<u>327.960.580</u>	<u>296.283.522</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	2.960.717	7.839.292
Deposito		
1 bulan	19.903.738	23.511.996
3 bulan	39.290.928	32.628.975
6 bulan	49.502.287	14.064.025
12 bulan	21.030.281	43.030.745
Lebih dari 12 bulan	792	30.000
	<u>132.688.743</u>	<u>121.105.033</u>
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	1.593.312	1.871.945
Deposito		
1 bulan	8.637.377	11.545.591
3 bulan	10.618.440	1.837.484
6 bulan	2.195.315	2.328.533
12 bulan	565.072	469.476
Lebih dari 12 bulan	-	38.919
	<u>23.609.516</u>	<u>18.091.948</u>
	<u>156.298.259</u>	<u>139.196.981</u>
Total	<u>484.258.839</u>	<u>435.480.503</u>
Tingkat suku bunga rata-rata:		
	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rupiah	4,71%	3,06%
Mata uang asing	3,18	0,93

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah sebesar Rp261.350 dan Rp262.798 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Deposito on call		4.268.250		145.200
Giro		1.263.075		1.406.913
Deposito berjangka		302.655		750.521
Tabungan		9.052		9.787
		5.843.032		2.312.421
<u>Mata uang asing</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Deposito berjangka	180.000.000	2.771.460	161.000.000	2.506.368
Inter-bank call money	56.671.033	872.564	117.000.000	1.821.398
Giro	21.435.803	330.047	29.643.680	461.478
Deposito on call	10.000.000	153.970		-
		4.128.041		4.789.244
<u>Dolar Singapura</u>				
Inter-bank call money	130.546.301	1.524.303	121.729.108	1.411.191
		5.652.344		1.411.191
		11.495.376		8.512.856
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro		15.755		42.617
Deposito berjangka		41		40
		15.796		42.657
<u>Mata uang asing</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Inter-bank call money	29.000.000	446.513	50.000.000	778.375
Giro	41.162	634	42.334	659
		447.147		779.034
		462.943		821.691
Total		11.958.319		9.334.547

Tingkat suku bunga rata-rata:

	Rupiah		Mata Uang Asing	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Deposits on call	4,25%	3,12%	4,07%	-%
Deposito berjangka	2,66	2,50	1,50	1,50
Giro	1,22	1,34	0,11	0,06
Tabungan	0,66	0,47	-	-
Inter-bank call money	-	-	5,07	3,83

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023			Total
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	
Pihak ketiga				
Rupiah				
Deposits on call	4.268.250	-	-	4.268.250
Giro	1.263.075	-	-	1.263.075
Deposito berjangka	80.455	218.200	4.000	302.655
Tabungan	9.052	-	-	9.052
	5.620.832	218.200	4.000	5.843.032
Mata Uang Asing				
Dolar Amerika Serikat				
Deposito berjangka	307.940	1.616.685	846.835	2.771.460
Inter-bank call money	195.096	-	677.468	872.564
Giro	330.047	-	-	330.047
Deposito on call	153.970	-	-	153.970
	987.053	1.616.685	1.524.303	4.128.041
Dolar Singapura				
Inter-bank call money	1.524.303	-	-	1.524.303
	8.132.188	1.834.885	1.528.303	11.495.376
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Giro	15.755	-	-	15.755
Deposito berjangka	41	-	-	41
	15.796	-	-	15.796
Mata Uang Asing				
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	446.513	-	-	446.513
Giro	634	-	-	634
	447.147	-	-	447.147
	462.943	-	-	462.943
Total	8.595.131	1.834.885	1.528.303	11.958.319
31 Desember 2022				
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga				
Rupiah				
Giro	1.406.913	-	-	1.406.913
Deposito berjangka	230.204	407.217	113.100	750.521
Deposits on call	145.200	-	-	145.200
Tabungan	9.787	-	-	9.787
	1.792.104	407.217	113.100	2.312.421

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022			Total
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata Uang Asing</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Deposito berjangka	311.350	1.572.318	622.700	2.506.368
Inter-bank call money	980.753	560.430	280.215	1.821.398
Giro	461.478	-	-	461.478
	1.753.581	2.132.748	902.915	4.789.244
<u>Dolar Singapura</u>				
Inter-bank call money	1.411.191	-	-	1.411.191
	4.956.876	2.539.965	1.016.015	8.512.856
<u>Pihak berelasi (Catatan 4)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro	42.617	-	-	42.617
Deposito berjangka	40	-	-	40
	42.657	-	-	42.657
<u>Mata Uang Asing</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Inter-bank call money	778.375	-	-	778.375
Giro	659	-	-	659
	779.034	-	-	779.034
	821.691	-	-	821.691
Total	5.778.567	2.539.965	1.016.015	9.334.547

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas:

	31 Desember 2023			
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
<u>Bank lain</u>				
<u>Obligasi Pemerintah</u>				
FR0081	10 Jul 2023	13 Jun 2025	1.500.000	1.322.032
FR0086	18 Jul 2023	15 Apr 2026	1.150.000	1.001.549
FR0081	11 Jul 2023	13 Jun 2025	1.098.000	999.680
FR0081	04 Apr 2023	12 Jun 2025	1.000.000	887.065
FR0081	12 Jul 2023	13 Jun 2025	600.000	547.677
FR0081	14 Des 2023	13 Jun 2025	500.000	491.298
FR0086	06 Des 2023	05 Jan 2024	100.000	93.789
			5.948.000	5.343.090
				5.373.992

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

31 Desember 2023					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>					
<u>Mata uang asing</u>					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
RI0126	09 Nov 2023	09 Mei 2024	1.539.700	1.473.269	1.486.066
RI0125	20 Des 2023	18 Jan 2024	1.539.700	1.475.895	1.478.714
RI0126	06 Des 2023	04 Jun 2024	1.539.700	1.433.947	1.439.840
RI1129	20 Des 2023	18 Jan 2024	923.820	896.902	898.616
FR0086	22 Jun 2023	15 Apr 2026	900.000	836.356	845.855
FR0086	21 Jun 2023	15 Apr 2026	900.000	810.493	819.698
FR0086	16 Des 2021	15 Apr 2026	815.000	770.448	779.199
FR0081	16 Des 2021	13 Jun 2025	791.500	769.460	771.389
RI0731	29 Nov 2023	29 Mei 2024	846.835	643.612	646.993
RI0827	29 Nov 2023	29 Mei 2024	692.865	641.695	645.066
RI0929	20 Des 2023	18 Jan 2024	615.880	551.706	552.760
RI0126	16 Jun 2023	18 Mar 2024	461.910	425.946	438.896
RI0124	02 Nov 2023	02 Jan 2024	292.543	297.651	300.454
RI0126	02 Nov 2023	02 Feb 2024	307.940	292.921	295.694
RI0229	30 Nov 2023	29 Feb 2024	292.543	276.355	277.765
RI0727	27 Okt 2023	29 Jan 2024	230.955	208.840	211.015
RI0125	27 Okt 2023	29 Jan 2024	200.161	189.761	191.737
RI0428	30 Nov 2023	29 Feb 2024	138.573	140.728	141.446
RI0727	30 Agu 2023	26 Feb 2024	76.985	67.957	69.331
RI0927	30 Agu 2023	26 Feb 2024	61.588	55.652	56.777
			13.168.198	12.259.594	12.347.311
Suku Berharga Syariah Negara					
INDOIS 27	21 Agu 2023	20 Feb 2024	423.418	396.764	405.192
INDOIS 25	30 Nov 2023	29 Feb 2024	207.860	195.144	196.140
INDOIS 26	08 Nov 2023	07 Feb 2024	184.764	173.319	174.791
INDOIS 24	30 Nov 2023	29 Feb 2024	153.970	146.808	147.557
INDOIS 28	30 Nov 2023	26 Feb 2024	92.382	84.514	86.222
INDOIS 24	30 Nov 2023	26 Feb 2024	61.587	55.943	57.074
			1.123.981	1.052.492	1.066.976
Obligasi Korporasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
Tahun 2024	23 Okt 2023	23 Jan 2024	107.779	96.032	97.097
Tahun 2025	23 Okt 2023	23 Jan 2024	76.985	69.363	70.134
PT Pertamina (Persero)					
Tahun 2029	23 Okt 2023	23 Jan 2024	76.985	65.432	66.158
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)					
Tahun 2029	23 Okt 2023	23 Jan 2024	61.588	57.156	57.790
			323.337	287.983	291.179
Total			20.563.516	18.943.159	19.079.458

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

31 Desember 2022					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
	FR0088	08 Nov 2022	07 Feb 2023	250.000	213.388
	FR0070	01 Des 2022	02 Mar 2023	50.000	49.742
				300.000	263.130
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
	FR0063	08 Mar 2021	15 Mei 2023	1.593.000	1.424.873
	FR0063	07 Nov 2017	15 Mei 2023	500.000	446.090
	FR0095	28 Des 2022	02 Jan 2023	208.061	223.777
	FR0090	26 Des 2022	09 Jan 2023	115.000	105.977
	FR0093	01 Des 2022	03 Jan 2023	60.000	54.253
	FR0070	01 Des 2022	02 Mar 2023	51.284	50.526
	FR0093	13 Des 2022	13 Jan 2023	50.000	45.418
	FR0092	07 Des 2022	06 Jan 2023	30.000	28.907
				2.607.345	2.379.821
<u>Mata uang asing</u>					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
	FR0086	16 Des 2021	15 Apr 2026	815.000	778.980
	FR0091	21 Jun 2022	21 Jun 2023	900.000	778.466
	FR0081	16 Des 2021	13 Jun 2025	791.500	777.980
	RI0731	25 Feb 2022	17 Feb 2023	622.700	497.961
	RI0727	25 Feb 2022	17 Feb 2023	467.025	421.385
	RI0127	16 Nov 2022	13 Jan 2023	342.485	332.615
	RI0727	29 Nov 2022	28 Feb 2023	311.350	288.835
	RI0128	16 Des 2022	16 Mar 2023	311.350	272.509
	RI0229	29 Nov 2022	28 Feb 2023	249.080	236.301
	RI0126	16 Nov 2022	16 Feb 2023	233.512	223.168
	RI0124	25 Feb 2022	17 Feb 2023	233.513	214.305
	RI0423	25 Feb 2022	17 Feb 2023	233.513	204.619
	RI0125	16 Nov 2022	16 Feb 2023	202.377	192.066
	RI1030	25 Feb 2022	17 Feb 2023	155.675	143.955
	RI1023	25 Feb 2022	17 Feb 2023	155.675	142.751
	US TREASURY 0523	16 Des 2022	16 Mar 2023	108.973	105.956
	RI0126	21 Nov 2022	21 Feb 2023	90.291	86.853
	US TREASURY 0526	16 Des 2022	16 Mar 2023	77.837	71.772
	RI0127	21 Nov 2022	21 Feb 2023	73.167	69.149
				6.375.023	5.839.626
Sukuk Berharga Syariah Negara					
	INDOIS 25	16 Nov 2022	16 Feb 2023	264.647	253.678
	INDOIS 27	16 Nov 2022	13 Jan 2023	249.080	236.775
	INDOIS 27	21 Nov 2022	21 Feb 2023	202.378	187.643
	INDOIS 24	16 Nov 2022	13 Jan 2023	186.810	183.257
	INDOIS 26	23 Des 2022	23 Mar 2023	186.810	170.298
	INDOIS 24	23 Des 2022	23 Mar 2023	124.540	113.353
	INDOIS 25	23 Des 2022	23 Mar 2023	101.189	91.288
	INDOIS 28	23 Des 2022	23 Mar 2023	93.405	84.552
	INDOIS 24	23 Des 2022	23 Mar 2023	62.270	56.267
				1.471.129	1.377.111
Obligasi Korporasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
	Tahun 2025	29 Nov 2022	28 Feb 2023	82.508	75.976
	Tahun 2026	29 Nov 2022	28 Feb 2023	31.135	26.039
				113.643	102.015
Total				10.867.140	9.961.703
					9.997.592

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Berkelanjutan II BRI		
Tahap I Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.052 dan Rp1.443 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	896.601	1.034.049
Pihak berelasi (Catatan 44)	1.316.647	1.630.725
Tahap II Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp372 dan Rp466 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	799.145	776.924
Pihak berelasi (Catatan 44)	459.835	480.561
Tahap III Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp204 dan Rp493 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	1.452.730	1.420.027
Pihak berelasi (Catatan 44)	1.065.535	1.075.928
Tahap IV Tahun 2018		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp118 dan Rp272 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	285.333	2.110.455
Pihak berelasi (Catatan 44)	309.930	316.201
Obligasi Berkelanjutan III BRI		
Tahap I Tahun 2019		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp704 dan Rp1.471 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	1.616.903	2.136.693
Pihak berelasi (Catatan 44)	523.599	984
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I BRI		
Tahap I Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.201 dan Rp8.126 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	2.031.414	4.274.286
Pihak berelasi (Catatan 44)	349.102	610.612

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I BRI (lanjutan)		
Tahap II Tahun 2023		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp7.273 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	5.506.549	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	489.677	-
MTN BRI Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.531 dan Rp3.719 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	4.994.194	4.996.281
LTN BRI Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.852 dan Rp148 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	48.564	52.184
LTN BRI Tahun 2023		
setelah dikurangi biaya diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp203 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	59.377	-
MTN II BRI Finance Tahun 2021		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp261 dan Rp354 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	186.644	186.489
Pihak berelasi (Catatan 44)	137.955	137.839
Obligasi I BRI Finance Tahun 2022		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.268 dan Rp1.277 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	338.969	425.001
Pihak berelasi (Catatan 44)	210.922	124.400
Obligasi II BRI Finance Tahun 2023		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.889 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022		
Pihak ketiga	415.962	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	57.067	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Berkelanjutan II PNM		
Tahap II Tahun 2018		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp137 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	-	1.207.067
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	38.796
Obligasi Berkelanjutan III PNM		
Tahap I Tahun 2019		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp152 dan Rp491 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	598.848	388.681
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	209.828
Tahap II Tahun 2019		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp110 dan Rp220 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	705.399	646.314
Pihak berelasi (Catatan 44)	57.991	116.966
Tahap III Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp164 dan Rp302 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	179.749	234.719
Pihak berelasi (Catatan 44)	14.987	14.979
Tahap IV Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp91 dan Rp454 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	281.912	818.551
Pihak berelasi (Catatan 44)	9.997	9.995
Tahap V Tahun 2021		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp279 dan Rp631 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	458.448	473.096
Pihak berelasi (Catatan 44)	39.473	24.473

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Berkelanjutan IV PNM		
Tahap I Tahun 2021		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.783 dan Rp4.172 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	1.979.241	1.976.383
Pihak berelasi (Catatan 44)	17.976	-
Obligasi Berkelanjutan IV PNM (lanjutan)		
Tahap II Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp966 dan Rp3.481 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	420.060	2.540.992
Pihak berelasi (Catatan 44)	165.408	299.597
Obligasi Berkelanjutan V PNM		
Tahap I Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp267 dan Rp2.779 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	115.733	987.248
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	9.973
MTN III PNM Venture Capital		
Pihak ketiga	339.900	-
Sukuk <i>Mudharabah</i> III PNM		
Tahun 2019		
Pihak ketiga	300.000	1.000.000
Sukuk <i>Mudharabah</i> IV PNM		
Tahun 2020		
Pihak ketiga	-	200.000
Tahun 2021		
Pihak ketiga	1.800.000	2.000.000
Sukuk <i>Mudharabah</i> V PNM		
Tahun 2022		
Pihak ketiga	466.000	492.500
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I PNM Tahap I		
Tahun 2021		
Pihak ketiga	801.000	842.000
Pihak berelasi (Catatan 44)	41.000	-
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I PNM Tahap II		
Tahun 2023		
Pihak ketiga	1.441.274	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	280.626	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian		
Tahap II Tahun 2018		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp72 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	-	1.118.213
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	644.974
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian		
Tahap I Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp49 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	-	69.951
Tahap II Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp50 dan Rp166 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	121.950	364.866
Pihak berelasi (Catatan 44)	19.992	79.968
Tahap III Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp296 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	-	895.332
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	149.958
Tahap IV Tahun 2021		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp96 dan Rp459 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	735.439	868.427
Pihak berelasi (Catatan 44)	204.005	74.964
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian		
Tahap I Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp499 dan Rp2.463 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	349.580	2.373.345
Pihak berelasi (Catatan 44)	227.903	604.425
Tahap II Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp217 dan Rp1.805 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	199.243	1.083.732
Pihak berelasi (Catatan 44)	76.540	771.432

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian (lanjutan)		
Tahap III Tahun 2023		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi		
yang belum diamortisasi masing-masing		
sebesar Rp1.712 dan RpNihil pada tanggal		
31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	1.622.766	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	315.803	-
Tahap IV Tahun 2023		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi		
yang belum diamortisasi masing-masing		
sebesar Rp2.364 dan RpNihil pada tanggal		
30 September 2023 dan 31 Desember 2022		
Pihak ketiga	2.390.840	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	39.956	-
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Pegadaian		
Tahap I Tahun 2020		
Pihak ketiga	-	49.000
Tahap II Tahun 2020		
Pihak ketiga	70.500	166.500
Pihak berelasi (Catatan 44)	10.000	17.000
Tahap III Tahun 2020		
Pihak ketiga	-	121.000
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	10.000
Tahap IV Tahun 2021		
Pihak ketiga	127.800	130.800
Pihak berelasi (Catatan 44)	38.000	35.000
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan II Pegadaian		
Tahap I Tahun 2022		
Pihak ketiga	284.000	969.000
Pihak berelasi (Catatan 44)	36.000	22.000
Tahap II Tahun 2022		
Pihak ketiga	115.100	992.000
Pihak berelasi (Catatan 44)	49.288	131.000
Tahap III Tahun 2023		
Pihak ketiga	533.000	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	72.000	-
Tahap IV Tahun 2023		
Pihak ketiga	215.040	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	20.000	-
	<u>41.942.421</u>	<u>48.064.684</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
<i>Senior Unsecured Notes Due 2023</i> (<i>Global Bond BRI</i>) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp6.834 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Pihak ketiga	-	7.776.915
<i>Senior Unsecured Notes Due 2024</i> (<i>Sustainability Bond BRI Tahun 2019</i>) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.670 dan Rp13.588 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Pihak ketiga	7.695.160	7.770.162
	<u>7.695.160</u>	<u>15.547.077</u>
Total	<u>49.637.581</u>	<u>63.611.761</u>

Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp35.358 dan Rp56.168.

Manajemen BRI dan entitas anak telah melakukan pembayaran bunga dan obligasi sesuai ketentuan dan berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam penerbitan surat berharga di atas telah dipenuhi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan:

a) Obligasi Berkelanjutan II BRI

Pada tanggal 22 November 2016, Obligasi Berkelanjutan II BRI dengan jumlah pokok sebesar Rp20.000.000 telah dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan S-678/D.04/2016 tanggal 22 November 2016.

Pada tanggal 2 Desember 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.600.000 dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp616.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp964.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp193.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp477.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023.
- Seri E: Nilai pokok sebesar Rp2.350.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

a) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Maret 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Pada tanggal 12 April 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.100.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.131.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2018.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.743.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp1.300.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 11 Juli 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Pada tanggal 25 Agustus 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.150.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp980.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.652.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.517.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 22 Februari 2018, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp2.442.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.837.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp605.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 21 Mei 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

a) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan II BRI adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan II BRI tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
- b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri C, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri D, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri B, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II seri C, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Seri A, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Seri B, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp616.000, Rp964.000, Rp193.000, Rp477.000, Rp1.131.000, Rp1.743.500, Rp925.000, Rp980.500, Rp1.652.500 dan Rp1.837.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

b) Obligasi Berkelanjutan III BRI

Pada tanggal 30 Oktober 2019, Obligasi Berkelanjutan III BRI dengan jumlah pokok sebesar Rp20.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan S-159/D.04/2019 Tanggal 30 Oktober 2019.

Pada tanggal 7 November 2019, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp737.850 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.089.350 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.172.800 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2024.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

b) Obligasi Berkelanjutan III BRI (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Februari 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III BRI memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRI adalah untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRI adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III BRI tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
- b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Seri A dan Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Seri B dengan nilai Rp737.850 dan Rp2.089.350 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

c) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 12 Juli 2022, Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI dengan jumlah pokok sebesar Rp15.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan S-122/D.04/2022 Tanggal 12 Juli 2022.

Pada tanggal 20 Juli 2022, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,70% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2025.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2027.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 20 Oktober 2022. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

c) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berwawasan Lingkungan I BRI Tahap I memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai Rp2.500.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
- b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.

d) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 12 Juli 2022, Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI dengan jumlah pokok sebesar Rp15.000.000 telah dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan S-122/D.04/2022 Tanggal 12 Juli 2022.

Pada tanggal 17 Oktober 2023, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp6.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.345.650 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2024.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp4.154.350 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2025.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2026.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 17 Januari 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

d) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 (lanjutan)

Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
- b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.

e) *Medium-Term Note* Bank BRI Tahun 2022

Pada tanggal 24 November 2022, BRI menerbitkan *Medium-Term Note* Bank BRI Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2024.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,68% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2025.

Bunga *Medium-Term Note* Bank BRI Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 Februari 2023. Pada saat diterbitkan, *Medium-Term Notes* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Tidak ada persyaratan penting dalam perjanjian Penerbitan *Medium-Term Note* Bank BRI Tahun 2022.

Penerimaan neto dari penerbitan *Medium-Term Note* BRI tersebut dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas Rupiah.

f) *Long-Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022

Pada tanggal 27 Desember 2022, BRI menerbitkan *Long-Term Notes* Bank BRI Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp52.332.

Bunga sebesar 0,55% per tahun dan Pokok *Long Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk I Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 Februari 2023 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2036.

Pada saat diterbitkan, *Long-Term Notes* ini tidak dilakukan pemeringkatan dan tidak menggunakan Jasa Agen Pemantau.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

- f) *Long-Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 (lanjutan)

Tidak ada persyaratan penting dalam perjanjian Penerbitan *Long-Term Notes* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022.

Penerimaan neto dari penerbitan *Long-Term Notes* BRI tersebut dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas Rupiah.

- g) *Long-Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk II Tahun 2023

Pada tanggal 25 Oktober 2023, BRI menerbitkan *Long-Term Notes* Bank BRI II Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp59.485.

Bunga sebesar 0,55% per tahun dan Pokok *Long Term Notes* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk II Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Januari 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2037.

Pada saat diterbitkan, *Long-Term Notes* ini tidak dilakukan pemeringkatan dan tidak menggunakan Jasa Agen Pemantau.

Tidak ada persyaratan penting dalam perjanjian Penerbitan *Long-Term Notes* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk II Tahun 2023.

Penerimaan neto dari penerbitan *Long-Term Notes* BRI tersebut dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas Rupiah.

- h) *Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)*

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2018 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2023 dengan tingkat bunga tetap 4,63% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,696% atau setara dengan ASD498.480.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 20 Januari 2019. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan peringkat masing-masing Baa2 dan BBB-.

Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI) tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
- b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 *Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)* Tahun 2018 memperoleh peringkat Baa2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

h) *Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)* (lanjutan)

Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI) menggunakan Jasa *Paying Agent* dan *Trustee* The Bank Of New York Mellon.

Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI) dengan nilai ASD500.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

i) *Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019)*

Pada tanggal 28 Maret 2019, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2019 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024 dengan tingkat bunga tetap 3,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,713% atau setara dengan ASD498.565.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2019.

Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI) tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
- b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan peringkat masing-masing Baa2 dan BBB-. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai *Eligible Project* sesuai dengan *Sustainability Framework*.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, *Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019)* memperoleh peringkat BAA2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019) menggunakan Jasa *Paying Agent* dan *Trustee* The Bank Of New York Mellon.

j) MTN II BRI Finance Tahun 2021

Pada tanggal 17 September 2021, BRI Finance menerbitkan MTN II BRI Finance Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2024 dengan tingkat suku bunga tetap 6,40% per tahun. Bunga MTN Tahap II dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 17 Desember 2021. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAA. Penerbitan MTN ini tidak melalui penawaran umum.

Agen pemantau untuk penerbitan MTN adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BRI Finance telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

j) MTN II BRI Finance Tahun 2021 (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, MTN II BRI Finance Tahun 2021 memperoleh peringkat AA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran pinjaman jangka pendek perbankan dan memperkuat struktur pendanaan perseroan. Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI Finance tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

BRI Finance juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan antara lain *gearing ratio* paling rendah nol kali dan paling tinggi 10 kali, rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%, rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan modal kerja paling sedikit 10% dari total saldo piutang pembiayaan, rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%, rasio *non-performing financing* paling tinggi sebesar 5%, memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000, mempertahankan nilai jaminan minimal 50% dari nilai pokok MTN dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

k) Obligasi I BRI Finance Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp700.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-152/D.04/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Pada tanggal 9 Agustus 2022, BRI Finance menerbitkan Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp700.000 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2025 dengan tingkat suku bunga tetap 6,95% per tahun. Bunga Obligasi I dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 9 November 2022. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAA.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BRI Finance telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 memperoleh peringkat AA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk ekspansi bisnis perusahaan, dalam hal ini adalah pembayaran pembiayaan baru.

BRI Finance juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan antara lain *gearing ratio* paling rendah nol kali dan paling tinggi 10 kali, rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%, rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan modal kerja paling sedikit 10% dari total saldo piutang pembiayaan, rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%, rasio *non-performing financing* paling tinggi sebesar 5%, mempertahankan nilai jaminan minimal 50% dari nilai pokok Obligasi dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

l) Obligasi II BRI Finance Tahun 2023

Pada tanggal 27 Juni 2022, Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-152/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023.

Pada tanggal 11 Juli 2023, BRI Finance menerbitkan Obligasi II BRI Finance 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp197.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp303.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2026.

Bunga Obligasi I dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 11 Oktober 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAA.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BRI Finance telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 memperoleh peringkat idAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk ekspansi bisnis perusahaan, dalam hal ini adalah ekspansi pembiayaan di segmen konsumen (multiguna).

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan menjaga rasio-rasio keuangan berada dalam batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2018.

m) Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Obligasi Berkelanjutan II PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-345/D.04/2014 tanggal 21 Juni 2017. Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II tahun 2018 adalah sebesar Rp2.500.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.254.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2021.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.246.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2023.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan II PNM memperoleh peringkat idA (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan II PNM memperoleh peringkat idAA (Double AA) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.254.000 dan Rp1.246.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

m) Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 (lanjutan)

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal disetor.

n) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.000.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.401.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp599.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2024.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.401.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

n) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

o) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II tahun 2019 adalah sebesar Rp1.350.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp586.500, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp763.500, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2024.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Pada saat penerbitan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA+.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II tahun 2019 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp586.500 telah dilunasi oleh PNM pada saat jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

p) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap III tahun 2020 adalah sebesar Rp250.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp55.100, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp194.900, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA+.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III tahun 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp55.100 telah dilunasi oleh PNM pada saat jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

q) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap IV tahun 2020 adalah sebesar Rp1.733.800.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp904.800, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2021.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2023.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk obligasi Seri C.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA+.

Pada tanggal-tanggal Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp904.800 dan Rp537.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

r) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap V tahun 2021 adalah sebesar Rp666.200.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp168.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA+.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp168.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

s) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 30 November 2021, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.000.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Desember 2021 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2026.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

t) Obligasi Berkelanjutan IV PNM tahap II tahun 2022

Pada tanggal 22 April 2022, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM tahap II tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Obligasi Berkelanjutan IV tahap II tahun 2022 adalah sebesar Rp3.000.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 April 2022 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp2.373.500, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp626.500, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal Rp2.373.500 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

u) Obligasi Berkelanjutan V PNM tahap I tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp884.000, tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp116.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal Rp884.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

v) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahun 2021 pada tanggal 8 Juli 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.000.000 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.158.000, nisbah sebesar 37,740% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000, nisbah sebesar 18,025% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000, nisbah sebesar 13,080% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2026.

Pembayaran nisbah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 8 Juli 2021.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 memperoleh peringkat idAA_(sy) dari Pefindo.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 memperoleh peringkat idAA_(sy) dari Pefindo.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2022 untuk Sukuk Seri A dan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan.
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi perusahaan.
3. Melakukan akuisisi saham atau aset.
4. Mengubah bidang usaha perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah.
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material.
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nominal Rp1.158.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

w) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 17 Maret 2023. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.721.900 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp626.000, nisbah sebesar 18,467% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.095.900, nisbah sebesar 36,987% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2026.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2024 untuk Sukuk Seri A dan 1 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2026 untuk Sukuk seri B.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023 memperoleh peringkat idAA_(sy) dari Pefindo.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023 memperoleh peringkat idAA_(sy) dari Pefindo.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan.
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi perusahaan.
3. Melakukan akuisisi saham atau aset.
4. Mengubah bidang usaha perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah.
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material.
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

x) Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap I : Nilai pokok sebesar Rp300.000 dengan nisbah sebesar 19,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024.
- Tahun 2019 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp435.000 dengan nisbah sebesar 25,48% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021.
- Tahun 2019 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp65.000 dengan nisbah sebesar 3,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Tahun 2019 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp322.000 dengan nisbah sebesar 17,94% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2019 Seri D: Nilai pokok sebesar Rp350.000 dengan nisbah sebesar 20,50% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan 24 (dua puluh empat) hari dan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

x) Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 (lanjutan)

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2019 Seri E: Nilai pokok sebesar Rp100.000 dengan nisbah sebesar 6,00% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan 10 (sepuluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Tahap II Seri E: Nilai pokok sebesar Rp50.000 dengan nisbah sebesar 3,00% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan 25 (dua puluh lima) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Tahun 2019 Seri F: Nilai pokok sebesar Rp120.000 dengan nisbah sebesar 6,69% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2019 Seri H: Nilai pokok sebesar Rp50.000 dengan nisbah sebesar 3,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023.
- Tahun 2021 Tahap II Seri F: Nilai pokok sebesar Rp208.000 dengan nisbah sebesar 11,59% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan 16 (enam belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.

Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk *Mudharabah* III dan Wali Amanat untuk penerbitan Sukuk *Mudharabah* III adalah Bank Syariah Mandiri. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan dan tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* III PT PNM Tahun 2019 memperoleh peringkat idA_(sy) dari Pefindo.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* III PNM Tahun 2019 memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) idAA_(sy).

Sukuk *Mudharabah* III PNM Tahun 2019 Seri A, B, C, D, dan E dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp435.000, Rp65.000, Rp322.000, Rp350.000, dan Rp100.000 serta Tahap II Seri E, F dan H sebesar Rp50.000, Rp120.000 dan Rp50.000 dan Tahap II Tahun 2021 Seri F dengan nominal sebesar Rp208.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

y) Sukuk Mudharabah IV PNM

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2020 Tahap I Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Tahun 2021 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp712.000 dengan nisbah sebesar 37,38% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.
- Tahun 2021 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp780.000 dengan nisbah sebesar 40,95% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024.
- Tahun 2021 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023.
- Tahun 2021 Seri D: Nilai pokok sebesar Rp308.000 dengan nisbah sebesar 16,17% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* IV memperoleh peringkat idAA_(sy) dari Pefindo.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

y) Sukuk Mudharabah IV PNM (lanjutan)

Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk *Mudharabah* IV. Wali Amanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Indonesia dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA+ (Double A Plus). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan Wali Amanat dengan usaha entitas anak. Penerbitan sukuk tercatat di Bursa KSEI.

Sukuk *Mudharabah* IV PNM Tahun 2020 Tahap I Seri A dengan nilai nominal Rp200.000 dan Sukuk *Mudharabah* IV PNM Tahun 2021 Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp200.000 telah dilunasi masing-masing oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

z) Sukuk Mudharabah V PNM

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* V PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2022 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp216.000 dengan *nisbah* sebesar 45% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2024.
- Tahun 2022 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp276.500 dengan *nisbah* sebesar 39,375% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023.
- Tahun 2022 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp250.000 dengan bunga sebesar 48,75%, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2024.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* V memperoleh peringkat idAA_(sy) dari Pefindo.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* V memperoleh peringkat idAA_(sy) dari Pefindo.

Sukuk *Mudharabah* V PNM Tahun 2022 Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp276.500, telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk *Mudharabah* V. Wali Amanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

aa) Medium Term Notes III PNM Venture Capital

Pada tanggal 16 November 2022, Medium Term Notes III PNM Venture Capital dengan jumlah pokok sebesar Rp339.900 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-990/PM.21/2022.

PNM menerbitkan *Medium Term Notes* III PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2023 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp189.900 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2026.
- Tahun 2022 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp150.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tahun) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2026.

Pada saat diterbitkan, Medium Term Notes III PNM Venture Capital memperoleh peringkat idA- dari Pefindo.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Medium Term Notes III PNM Venture Capital memperoleh peringkat idA- dari Pefindo.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ab) Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian

Pada tanggal 16 Maret 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp3.500.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-415/D.04/2017 tanggal 20 September 2017.

Pada tanggal 16 Maret 2018, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp3.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp450.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,80% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2019.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.050.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2021.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2023.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 Juni 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2017 Seri A, B dan C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp450.000, Rp1.050.000, dan Rp2.000.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. Pegadaian telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

ac) Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian

Pada tanggal 13 Mei 2020, Obligasi Berkelanjutan IV tahap I Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-135/D.04/2020 tanggal 04 Mei 2020. Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II tahun 2020 adalah sebesar Rp1.055.000. Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III tahun 2020 adalah sebesar Rp2.420.000. Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV tahun 2021 adalah sebesar Rp3.280.000.

Pada tanggal 13 Mei 2020, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp400.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp330.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp70.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2023.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 13 Agustus 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ac) Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp330.000 dan Rp70.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp1.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.055.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp303.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2023.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp142.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 18 Oktober 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri A, Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.055.000 dan Rp303.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 22 September 2020, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp2.420.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.295.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.125.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2023.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 22 Desember 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.295.000 dan Rp1.125.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 6 April 2021, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp3.280.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.172.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.107.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 April 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 6 Juli 2021. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ac) Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.172.500 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. Pegadaian telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

ad) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian

Pada tanggal 26 April 2022, Obligasi Berkelanjutan V tahap I Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp3.029.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-67/D.04/2022 tanggal 19 April 2022. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II tahun 2022 adalah sebesar Rp1.877.000. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III tahun 2023 adalah sebesar Rp1.995.000.

Pada tanggal 26 April 2022, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp3.029.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.431.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp598.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,35% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 26 Juli 2022. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.431.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 16 Agustus 2022, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp1.877.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.601.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,95% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp276.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 November 2022. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.601.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ad) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian (lanjutan)

Pada tanggal 16 Juni 2023, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp1.995.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.595.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,80% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2024.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp400.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2026.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 September 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Pada tanggal 24 Agustus 2023, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp2.433.160 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.205.135 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 04 September 2024.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp228.025 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk.

ae) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian

Pada tanggal 08 Juli 2020, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-135/D.04/2020 tanggal 04 Mei 2020. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Pegadaian tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp316.500. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Pegadaian tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp835.000. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap IV Pegadaian tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp765.000.

Pada tanggal 13 Mei 2020, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp100.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp51.000 dengan bagi hasil sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp49.000 dengan bagi hasil sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2023.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 13 Agustus 2020. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ae) Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp51.000 dan Rp49.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp316.500 dengan bagi hasil sebesar 6,75% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp103.000 dengan bagi hasil sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2023.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp80.500 dengan bagi hasil sebesar 7,95% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2025.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp316.500 dan Rp103.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 8 Oktober 2020. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 memperoleh peringkat idAA dari Pefindo

Pada tanggal 22 September 2020, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp835.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp704.000 dengan bagi hasil sebesar 5,50% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp131.000 dengan bagi hasil sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2023.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp704.000 dan Rp131.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 22 Desember 2020. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 6 April 2021, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp765.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp599.200 dengan bagi hasil sebesar 4,85% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp165.800 dengan bagi hasil sebesar 6,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 April 2024.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap IV Tahun 2020 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp599.200 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ae) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian (lanjutan)

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 6 Juli 2021. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2020 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk.

af) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian

Pada tanggal 26 April 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp991.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-67/D.04/2022 tanggal 19 April 2022. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Pegadaian tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.123.000. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Pegadaian tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp605.000.

Pada tanggal 26 April 2022, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp991.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp671.000 dengan bagi hasil sebesar 3,60% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp320.000 dengan bagi hasil sebesar 3,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2025.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 26 Juli 2022. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp671.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 16 Agustus 2022, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp1.123.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp878.000 dengan bagi hasil sebesar 3,95% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp245.000 dengan bagi hasil sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2025.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 November 2022. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

af) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp878.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 16 Juni 2023, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp605.000 sebagai berikut:

- Nilai pokok sebesar Rp605.000 dengan bagi hasil sebesar 3,95% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2024.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 September 2023. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2023 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Pada tanggal 24 Agustus 2023, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp235.040 sebagai berikut:

- Nilai pokok sebesar Rp235.040 dengan bagi hasil sebesar 5,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2026.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2023. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2023 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri atas:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Bank Indonesia		
Pinjaman likuiditas	15.589	15.596
Pinjaman lainnya	4.293	4.274
Pinjaman lainnya	30.494.075	21.635.785
	<u>30.513.957</u>	<u>21.655.655</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Pinjaman <i>sustainability linked loan</i> setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	12.240.042	15.415.980
Pinjaman sindikasi <i>club loan</i> setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	4.600.226	4.641.098
Pinjaman dari BNP Paribas setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	173.416	299.122
Pinjaman lainnya	25.220.514	18.510.309
	<u>42.234.198</u>	<u>38.866.509</u>
	<u>72.748.155</u>	<u>60.522.164</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Pinjaman dari		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.287.085	7.805.029
Pusat Investasi Pemerintah	7.300.588	6.051.154
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.518.885	2.804.614
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	914.403	1.063.029
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	718.026	918.812
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	337.724	94.906
PT Danareksa Finance	25.000	-
PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)	947	1.365
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	110.127
	<u>26.102.658</u>	<u>18.849.036</u>
Total	<u>98.850.813</u>	<u>79.371.200</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	20.340.495	12.487.103
> 1 bulan - 3 bulan	1.822.112	925.834
> 3 bulan - 1 tahun	5.877.585	3.726.208
> 1 tahun - 5 tahun	2.468.152	4.510.916
> 5 tahun	5.613	5.594
	<u>30.513.957</u>	<u>21.655.655</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	5.551.192	704.408
> 1 bulan - 3 bulan	19.358.816	17.378.730
> 3 bulan - 1 tahun	-	3.510.990
> 1 tahun - 5 tahun	17.318.975	17.266.283
> 5 tahun	5.215	6.098
	<u>42.234.198</u>	<u>38.866.509</u>
	<u>72.748.155</u>	<u>60.522.164</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	15.530.752	9.084.202
> 1 bulan - 3 bulan	420.371	277.398
> 3 bulan - 1 tahun	2.180.139	1.480.314
> 1 tahun - 5 tahun	7.956.760	7.991.522
> 5 tahun	14.636	15.600
	<u>26.102.658</u>	<u>18.849.036</u>
Total	<u>98.850.813</u>	<u>79.371.200</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

Pinjaman lainnya

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Bank Indonesia				
Lainnya		4.293		4.274
Lainnya				
PT Bank Central Asia Tbk		12.890.155		8.319.015
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		2.387.528		653.974
PT Bank BTPN Tbk		2.000.000		-
PT Bank Permata Tbk		1.504.000		883.333
PT Bank HSBC Indonesia		1.299.992		299.950
PT Bank DKI		1.228.127		2.395.009
PT Bank DKI - unit usaha syariah		750.000		750.000
PT Bank of India Indonesia Tbk		742.761		149.585
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		720.508		989.943
PT Bank Victoria International Tbk		662.222		518.160
Citibank N.A.		649.995		-
PT Bank CIMB Niaga Tbk		506.028		703.219
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		500.000		650.000
PT Bank SBI Indonesia		399.670		149.696
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta		391.215		377.032
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk		374.115		118.689
PT Bank Permata Tbk - unit usaha syariah		350.000		496.858
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk		304.167		608.333
PT Bank CIMB Niaga Tbk - unit usaha syariah		300.000		200.000
PT Bank IBK Indonesia Tbk		274.659		417.103
PT Bank Oke Indonesia Tbk		257.399		418.407
PT Bank Pan Indonesia Tbk		203.969		628.868
PT Bank of China		200.000		-
Bank Mizuho		200.000		-
PT Bank ICBC Indonesia		200.000		-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah		198.911		256.315
PT Bank Resona Perdania		162.328		-
PT Bank BCA Syariah		152.446		68.311
PT Bank JTrust Indonesia Tbk		110.541		51.084
PT Bank NationalNobu Tbk		150.000		150.000
PT Bank QNB Indonesia Tbk		100.000		349.467
PT Bank Aladin Syariah Tbk		100.000		-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan		74.871		-
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		74.596		34.112
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		47.473		79.128
PT Bank Ina Perdana Tbk		13.662		23.363
Lembaga Pengelola Dana Bergulir		7.937		16.937
PT Bank Danamon Indonesia - unit usaha syariah		4.800		500.000
PT Bank Mega Syariah		-		128.222
PT Bank UOB Indonesia		-		249.991
Lainnya		-		1.681
		30.494.075		21.635.785
		30.498.368		21.640.059

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman lainnya (lanjutan)

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak Ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Standard Chartered Bank, Jakarta	392.186.984	6.038.503	195.868.180	3.049.178
MUFG Bank Ltd.	314.000.000	4.834.658	-	-
DBS Bank, Ltd.	200.000.000	3.079.400	225.000.000	3.502.688
The Bank of New York Mellon Corporation	150.000.000	2.309.550	-	-
OCBC Ltd.	115.000.000	1.770.655	-	-
United Overseas Bank Limited	100.000.000	1.539.700	225.000.000	3.502.688
Emirates NBD	86.284.991	1.328.530	-	-
CTBC Bank Co, Ltd.	86.263.883	1.328.205	-	-
Citibank N.A	50.000.000	769.850	75.000.000	1.167.563
Mashreq Bank	50.000.000	769.850	-	-
Wells Fargo Bank, N.A.	30.000.000	461.910	80.000.000	1.245.400
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	27.627.395	425.379	4.900.915	76.295
BNP Paribas	19.675.000	302.936	144.018.885	2.242.014
Bank Pembangunan Asia	338.702	5.215	391.714	6.098
JP Morgan Chase Bank N.A.	38.839	598	487.554	7.590
CoBank USA	-	-	75.000.000	1.167.563
Bank of America	-	-	80.000.000	1.245.400
PT Bank HSBC Indonesia	-	-	80.000.000	1.245.400
PT Bank Shinhan Indonesia	-	-	2.989.112	46.533
		24.964.939		18.504.410
<u>Euro Eropa</u>				
PT Bank HSBC Indonesia	15.000.000	255.575	-	-
JP Morgan SE	-	-	354.141	5.852
JP Morgan Chase Bank N.A.	-	-	1.171	20
		255.575		5.872
<u>Pound Sterling Inggris</u>				
JP Morgan Chase Bank N.A.	-	-	1.531	27
		-		27
		25.220.514		18.510.309
Total		55.718.882		40.150.368

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman likuiditas

Pinjaman ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,02%.

b) Pinjaman sindikasi *club loan*

Pada tanggal 14 Oktober 2020, telah dilakukan penarikan untuk sisa fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* sebesar ASD300.000.000 (nilai penuh) yang difasilitasi oleh Citicorp International Limited (*agent*), sebagai berikut:

Fasilitas C sebesar ASD300.000.000 (nilai penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2025. Bank yang berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:

- China Development Bank, sebesar ASD150.000.000 (nilai penuh);
- CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD25.000.000 (nilai penuh);
- MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
- Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, sebesar ASD50.000.000 (nilai penuh);
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura sebesar ASD50.000.000 (nilai penuh); dan
- United Overseas Bank Limited, sebesar ASD5.000.000 (nilai penuh).

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%.
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

c) Pinjaman dari BNP Paribas

Pada tanggal 7 Juni 2016, BRI telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan skema *Export Credit Financing* (ECF) untuk membiayai komponen dan jasa peluncuran BRI-sat yang dilakukan oleh *Arianespace* Perancis. Pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu:

- Fasilitas *Tranche Banque Publique d'Investissement* (BPI) senilai ASD49.961.501,23 (nilai penuh), dengan suku bunga tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.
- Fasilitas *Tranche Hermes* senilai ASD9.901.308,77 (nilai penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

c) Pinjaman dari BNP Paribas (lanjutan)

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025. Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas *Tranche BPI*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD3.330.767 (nilai penuh) sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas *Tranche Hermes*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD660.087 (nilai penuh) sampai dengan jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%.
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

d) Pinjaman sindikasi *Sustainability Linked Loan*

Pada tanggal 30 Agustus 2022, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Sustainability-Linked Loan* dengan total pinjaman sebesar ASD1.000.000.000 (nilai penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh PT Bank HSBC Indonesia (*agent*), penarikan yang telah dilakukan terbagi atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (nilai penuh), dengan suku bunga *Compounded SOFR* ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 15 September 2022 dan telah jatuh tempo pada tanggal 15 September 2023. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- BNP Paribas, cabang Singapura, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
 - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
 - DBS Bank Ltd, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Singapura, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
 - The Korea Development Bank, cabang Singapura, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
 - The Korea Development Bank, cabang Tokyo, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
 - PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
 - MUFG Bank Ltd, cabang Jakarta, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
 - Oversea-Chinese Banking Co., Ltd., sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh); dan
 - United Overseas Bank Limited, sebesar, ASD50.000.000 (nilai penuh).
- b. Fasilitas B sebesar ASD300.000.000 (nilai penuh), dengan suku bunga *Compounded SOFR* ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 15 September 2022 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2025. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
 - DBS Bank Ltd, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
 - The Hongkong and Shanghai Banking Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
 - The Korea Development Bank, cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000 (nilai penuh);
 - The Korea Development Bank, cabang Tokyo, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
 - MUFG Bank Ltd, cabang Jakarta, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
 - Oversea-Chinese Banking Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
 - Standard Chartered Bank (Singapura) Limited, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh); dan
 - United Overseas Bank Limited, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman sindikasi *Sustainability Linked Loan* (lanjutan)

c. Fasilitas C sebesar ASD500.000.000 (nilai penuh), dengan suku bunga *Compounded* SOFR ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 30 Desember 2022 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2026. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:

- BNP Paribas, cabang Singapura, sebesar ASD90.000.000 (nilai penuh);
- CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- DBS Bank Ltd, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- The Hongkong and Shanghai Banking Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- The Korea Development Bank, cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000 (nilai penuh);
- The Korea Development Bank, cabang Tokyo, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
- PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD80.000.000 (nilai penuh);
- MUFG Bank Ltd, cabang Jakarta, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- PT Bank OCBC NISP Tbk, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- Standard Chartered Bank (Singapura) Limited, sebesar ASD80.000.000 (nilai penuh); dan
- United Overseas Bank Limited, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh).

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%.
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI telah memenuhi persyaratan penting, dalam perjanjian yang diterima.

Pinjaman Diterima Pegadaian

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 24 Juli 2020, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas IV Tahap I, II & III (Konvensional) dari Pusat Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut "PIP") dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023.

Pada tanggal 24 Juli 2020, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas IV Tahap I, II & III (Syariah) dari PIP dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023.

Pada tanggal 28 Januari 2021, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas V Tahap I, II & III (Konvensional) dari PIP dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2024.

Pada tanggal 28 Januari 2021, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas V Tahap I dan II (Syariah) dari PIP dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2024.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas VI Tahap I (Konvensional) dari PIP dengan plafon sebesar Rp225.000 dengan suku bunga 3,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2024.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 23 Agustus 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas VI Tahap I (Syariah) dari PIP dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 3,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2024.

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Pemda Luwu Utara dari PIP dengan plafon sebesar Rp1.000 dengan suku bunga 2,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 29 (dua puluh sembilan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2025.

Pada tanggal 8 Desember 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi PT SMI dari PIP dengan plafon sebesar Rp1.000 dengan suku bunga 2,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2023.

Persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian adalah Pegadaian wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) dan wajib menyerahkan daftar piutang lancar yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 1 (satu) bulan dengan nilai dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 11 Mei 2022, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank Mandiri") dengan masing-masing plafon sebesar Rp5.500.000 dan Rp6.500.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2023.

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp1.250.000 dan Rp250.000 dengan suku bunga 6,50%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2024.

Pada tanggal 9 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp100.000 dan Rp75.000 dengan suku bunga 7,75%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2024.

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 4 (empat) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp350.000, Rp350.000, Rp450.000, dan Rp350.000 dengan suku bunga 5,75%. Keempat fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 18 (delapan belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2023.

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 3 (tiga) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp500.000, Rp500.000, dan Rp400.000 dengan suku bunga 5,75%. Ketiga fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 14 (empat belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023.

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 14 (empat belas) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp400.000, Rp400.000, Rp300.000, Rp600.000, Rp550.000, Rp500.000, Rp450.000, Rp400.000, Rp400.000, Rp350.000, Rp400.000, Rp350.000, Rp300.000, dan Rp300.000 dengan suku bunga 5,75%. Seluruh fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 17 (tujuh belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 15 (lima belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2023.

Pada tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan penandatanganan penambahan plafon fasilitas jangka pendek Bank Mandiri dihadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. dari sebelumnya plafon sebesar Rp10.500.000 menjadi sebesar Rp12.500.000 sehingga total plafon dari Bank Mandiri sebesar Rp14.000.000 dengan rincian plafon KMK sebesar Rp1.500.000 dan plafon jangka pendek sebesar Rp12.500.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,50%. Jangka waktu terhitung sejak penandatanganan sampai dengan tanggal 13 Mei 2024.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total penggunaan fasilitas jangka pendek Bank Mandiri adalah sebesar Rp10.500.000 dengan suku bunga sebesar 5,98%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain adalah sebagai berikut:

- Jaminan piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar minimum 100% dari OSL pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan laporan piutang serta laporan omset dan hasil usaha setiap bulannya dan paling lambat telah diterima Bank 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Memelihara *Current Ratio* di atas 110%, total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri, dan total nilai pinjaman gadai yang tergolong macet dan pinjaman non-gadai yang tergolong kurang lancar, diragukan, macet (*Non-Performing Loan*) maksimal 5% dari seluruh pinjaman yang diberikan.
- Menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Menyampaikan laporan posisi jaminan fidusia (daftar Objek jaminan fidusia) setiap triwulan.
- Melaporkan kepada Bank, perubahan anggaran dasar, perubahan status perusahaan, perubahan susunan pengurus (Direksi) dan Dewan komisaris, pembagian dividen, dan memindahtangankan agunan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 13 April 2022, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank BNI") dengan masing-masing plafon sebesar Rp5.100.000 dan Rp1.000.000 dengan suku bunga 5,50%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 14 April 2023.

Pada tanggal 13 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan masing-masing plafon sebesar Rp750.000 dan Rp250.000 dengan suku bunga 7,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023.

Pada tanggal 15 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 (tiga puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2023.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 15 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 28 (dua puluh delapan) hari dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2023.

Pada tanggal 15 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 29 (dua puluh sembilan) hari dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023.

Pada tanggal 12 Juli 2023 telah dilakukan penandatanganan fasilitas Bank BNI dibawah tangan dengan total plafon sebesar Rp5.100.000 dari total plafon sebesar Rp6.100.000. Adapun penurunan ini adalah penurunan plafon fasilitas KMK Promes dari sebesar Rp5.100.000 menjadi sebesar Rp4.100.000, sedangkan plafon KMK adalah tetap sebesar Rp1.000.000. Jangka waktu terhitung sejak penandatanganan sampai dengan tanggal 14 Januari 2024.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total penggunaan fasilitas KMK Promes Bank BNI adalah sebesar Rp3.200.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Total nominal Rp500.000 suku bunga sebesar 5,75%.
2. Total nominal Rp1.200.000 suku bunga 6,00%.
3. Total nominal Rp1.500.000 suku bunga 5,80%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain adalah sebagai berikut:

- Jaminan Piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada bank sebesar 100% dari plafon pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan setiap kali terjadi perubahan terbaru atas dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - b. Perizinan yang telah diperpanjang masa berlakunya.
- Dalam rangka pemantauan aktivitas usaha, Bank BNI diperkenankan untuk sewaktu-waktu melakukan peninjauan ke lokasi usaha dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- Menyampaikan secara rutin laporan keuangan (*home statement*) per triwulan sudah diterima bank paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- Menyampaikan laporan keuangan *audited* yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 9 Februari 2022, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Musyarakah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank BSI") dengan masing-masing plafon sebesar Rp300.000 dan Rp800.000 dengan suku bunga 5,35%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2023.

Pada tanggal 9 Februari 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BSI dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2024.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 9 Februari 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BSI dengan plafon sebesar Rp350.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 (tiga puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2023.

Pada tanggal 9 Februari 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BSI dengan plafon sebesar Rp350.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 (tiga puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2023.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total pemakaian fasilitas *Line Facility* Bank BSI adalah sebesar Rp700.000 dengan nisbah setara 5,90%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain adalah sebagai berikut:

- Menggunakan fasilitas pembiayaan untuk kepentingan/kebutuhan sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum di dalam akad pembiayaan.
- Mengizinkan petugas dan/atau kuasa/wakil Bank BSI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank BSI untuk sewaktu-waktu memeriksa pembukuan Pegadaian dan bukti-bukti yang terkait langsung dengan akad pembiayaan, oleh Bank BSI sepanjang terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan ini, dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja terlebih dahulu dari Bank BSI dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh Bank BSI.
- Pegadaian dan bukti-bukti yang terkait langsung dengan akad pembiayaan, oleh Bank BSI sepanjang terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan ini, dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja terlebih dahulu dari Bank BSI dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh Bank BSI.
- Selama pembiayaan ini masih berlangsung, Pegadaian harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam hal telah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus perusahaan, permodalan dan nilai saham.
 - b. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak lain.
 - c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan untuk pihak lain.
 - d. Mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
 - e. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
- Melakukan pembaharuan daftar piutang syariah yang dijaminkan:
 - a. Menyerahkan rincian daftar piutang syariah posisi akhir bulan yang disampaikan triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulanan, sebagai dasar pembaharuan daftar piutang syariah tidak kurang dari 100% dari pokok yang terhutang.
 - b. Menyerahkan surat pernyataan daftar piutang syariah yang menyatakan bahwa:
 1. Benar milik Pegadaian serta tidak ada pihak lain yang memiliki atau turut serta memiliki.
 2. Tidak sedang dan tidak akan dijaminkan kepada pihak ketiga.
 3. Tidak dalam keadaan sengketa serta tidak tersangkut suatu masalah Perdata atau keadaan yang dapat menimbulkan suatu sengketa dengan pihak ketiga.
 4. Tidak dalam keadaan sita jaminan.
 - c. Pembaharuan sertifikat jaminan fidusia secara notaril atas agunan piutang dilakukan maksimal setiap 1 (satu) tahun sekali dengan nilai piutang lancar syariah minimal sebesar limit pembiayaan.
- Nasabah agar mengupayakan penggunaan fasilitas di atas 80% dari total fasilitas pembiayaan Bank BSI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* 3 (tiga) bulanan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan *audited* paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah periode pelaporan.
- Menyampaikan laporan *Non-Performing Loan* (NPL) bersih konsolidasi dan *Non-Performing Loan* (NPL) bersih syariah yang disampaikan triwulanan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulanan.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 13 April 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* (PBMM) dari PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "Bank BCA") dengan plafon sebesar Rp9.400.000 dengan suku bunga 5,79%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 26 April 2023.

Pada tanggal 17 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BCA dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024.

Pada tanggal 17 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan 4 (empat) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BCA dengan masing-masing plafon sebesar Rp350.000, Rp1.500.000, Rp2.000.000, dan Rp1.000.000 dengan suku bunga 5,80%. Keempat fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2023.

Pada tanggal 17 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan 9 (sembilan) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BCA dengan masing-masing plafon sebesar Rp450.000, Rp720.000, Rp200.000, Rp1.300.000, Rp300.000, Rp500.000, Rp480.000, Rp1.200.000, dan Rp1.100.000 dengan suku bunga 5,80%. Seluruh fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total pemakaian fasilitas PBMM Bank BCA adalah sebesar Rp10.000.000 dengan suku bunga sebesar 6,00%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:

- Agunan yang dijaminkan adalah sebesar 100% dari plafon.
- Penggunaan fasilitas adalah untuk mendanai penyaluran pinjaman modal kerja Pegadaian.
- Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku.
- Memberitahukan secara tertulis apabila terjadi perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja tanggal efektifnya terjadi perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung atas perubahan tersebut.
- Menyerahkan kepada Bank Daftar Piutang (AR) setiap 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya periode laporan 6 (enam) bulan tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Konvensional dan Pinjaman Transaksi Khusus *Musyarakah* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut "Bank CIMB Niaga") dengan masing-masing plafon sebesar Rp550.000 dan Rp200.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2023.

Pada tanggal 6 Juni 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank CIMB Niaga dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023.

Pada tanggal 6 Juni 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank CIMB Niaga dengan plafon sebesar Rp450.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2023.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total pemakaian fasilitas Bank CIMB Niaga adalah sebesar Rp750.000 dengan suku bunga sebesar 5,95%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:

- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar 60% dari jumlah pembiayaan.
- Penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja Pegadaian.
- Memberikan informasi kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tindakan dilakukan, dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan pada Pengendali dari Pegadaian dan/atau Pemberi Agunan.
- Daftar tagihan harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan harus diperbarui setiap 3 (tiga) bulan (batas waktu pengiriman daftar piutang maksimum adalah 45 (empat puluh lima) hari setiap akhir 3 (tiga) bulan).

PT Bank DKI

Pada tanggal 18 Mei 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Kredit *Money Market Line* dari PT Bank DKI (selanjutnya disebut "Bank DKI") dengan plafon sebesar Rp200.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2023.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp750.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2023.

Pada tanggal 9 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 28 (dua puluh delapan) hari dan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2023.

Pada tanggal 9 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank DKI unit usaha syariah dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

Pada tanggal 17 Mei 2023 telah dilakukan penandatanganan perpanjangan kerjasama pembiayaan modal kerja fasilitas Bank DKI dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH. di Jakarta plafon fasilitas kredit *Money Market Line* sebesar Rp200.000,- dan plafon fasilitas pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp750.000 dengan jangka waktu dari 19 Mei 2023 sampai dengan 19 Mei 2024.

Sampai dengan Per 31 Desember 2023, total pemakaian fasilitas kredit *Money Market Line* sebesar Rp200.000 dengan suku bunga sebesar 5,98% serta pemakaian fasilitas pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp750.000 dengan nisbah setara 5,98%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:

- Jaminan piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar minimum 60% dari plafon pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan secara tertulis kepada Bank, perubahan pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) ataupun Anggaran Dasar Perusahaan, status hukum dan lingkup usaha serta penerbitan obligasi/surat berharga/Pinjaman/pembiayaan dari Bank/lembaga keuangan lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian perubahan.
- Daftar piutang diikat dengan Fidusia Notarial dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada saat penandatanganan perpanjangan fasilitas kredit. Daftar piutang diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan.
- Menyampaikan Laporan *Non-Performing Loan* (NPL) setiap triwulan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah akhir laporan.

PT Bank DKI – Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 29 November 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank DKI – Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut “Bank DKI – Unit Usaha Syariah”) dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 5,98%. Fasilitas ini memiliki tenor 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2024.

Pada tanggal 30 November 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank DKI – Unit Usaha Syariah dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 5,98%. Fasilitas ini memiliki tenor 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2024.

Pada tanggal 7 Desember 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank DKI – Unit Usaha Syariah dengan plafon sebesar Rp350.000 dengan suku bunga 5,98%. Fasilitas ini memiliki tenor 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2024.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 11 Oktober 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Bank Muamalat”) dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 5,20%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2023.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 2 Juni 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Muamalat dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2023.

Pada tanggal 25 Juli 2023 telah dilakukan penandatanganan perpanjangan kerjasama pembiayaan fasilitas Bank Muamalat plafon sebesar Rp200.000 dibawahtangan dengan jangka waktu dari tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 2 Juni 2024.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, tidak ada pemakaian fasilitas dari Bank Muamalat.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:

- Menyalurkan pembiayaan yang dananya bersumber dari Bank Muamalat dengan prinsip syariah (penyaluran pembiayaan dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah).
- Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah akhir laporan, dan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Muamalat atas hal-hal di bawah ini:
 - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya Perubahan Pemegang Saham, pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi), Permodalan dan Nilai Nominal Saham.
 - b. Memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank/lembaga pembiayaan lainnya.
- Melakukan pengikatan jaminan yang diberikan oleh *end user* kepada Pegadaian sesuai ketentuan Pegadaian yang berlaku dan diamankan dengan baik serta tidak dapat diagunkan ke pihak lain.
- Mengizinkan Bank Muamalat atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Pegadaian, serta pemeriksaan terhadap seluruh jaminan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pegadaian berdasarkan pemberitahuan dari Bank Muamalat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak ada balasan maka Pegadaian dianggap menyetujui pemberitahuan Bank Muamalat.

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 30 November 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Permata (selanjutnya disebut "Bank Permata") dengan plafon sebesar Rp450.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Pada tanggal 30 November 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2023.

Pada tanggal 30 November 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Permata unit usaha syariah dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 7,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2023.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 30 November 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Permata unit usaha syariah dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2023.

Pada tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan penandatanganan perubahan dan penambahan plafon fasilitas pembiayaan Bank Permata di hadapan Notaris Yumna Shabrina, SH. dari Kantor Notaris Ashoya Ratam, SH. di Jakarta dengan total plafon sebesar Rp1.750.000 dengan jangka waktu sejak penandatanganan sampai dengan 25 Oktober 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitas *Money Market Line* dari plafon sebesar Rp650.000 menjadi sebesar Rp1.150.000
2. Fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dari plafon sebesar Rp400.000 menjadi sebesar Rp600.000
3. Fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* plafon sebesar Rp200.000 dialihkan ke fasilitas MMQ.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, pemakaian fasilitas adalah dari fasilitas MMQ dengan rincian nominal Rp300.000 nisbah 5,90% dan Rp50.000 nisbah 6,00%

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:

- Fidusia atas *Account Receivable* nasabah (A/R), dengan jumlah minimum sebesar 100% dari *outstanding* fasilitas.
- Penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai usaha pembiayaan modal kerja Pegadaian.
- Selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender, Pegadaian melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dalam hal menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas *leasing* dari pihak lain, perubahan anggaran dasar.
- Laporan A/R setiap triwulan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya periode laporan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Pegadaian telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian yang diterima.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Plafon fasilitas *musyarakah* ini turun dari plafon sebesar Rp1.200.000 menjadi sebesar Rp800.000 dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2023.

Pada tanggal 30 Agustus 2023, telah dilakukan penandatanganan di bawah tangan Perubahan Akad Line Fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* iB (Badan Usaha) antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank") dan PT Pegadaian ("Pegadaian").

Plafon fasilitas *musyarakah* ini adalah sebesar Rp800.000 dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan 20 Agustus 2024.

Per 31 Desember 2023 suku bunga/nisbah yang didapatkan dari Bank Maybank adalah sebesar 5,75% dengan tenor selama maksimal 1 (satu) minggu. Penentuan besarnya suku bunga/nisbah dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total fasilitas Bank Maybank yang digunakan adalah sebesar Rp800.000, dengan suku bunga 6,01%.

Persyaratan-persyaratan (*covenants*) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut:

- Jaminan piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar 100% dari plafon pembiayaan dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan laporan keuangan *in-house* tiga bulanan untuk tahun buku berjalan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak akhir periode pelaporan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk laporan keuangan kuartal I (pertama) sampai kuartal III (ketiga)
- Menyerahkan daftar jaminan Bank berupa Piutang Pembiayaan Nasabah dengan status lancar, yang disampaikan setiap tiga bulan/triwulanan, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah akhir periode pelaporan.
- Mengizinkan Bank sewaktu-waktu melakukan *Random Sampling* minimal 1 (satu) kali dalam setahun terhadap Piutang Pembiayaan (*Account Receivables*) yang dijamin, dengan minimum *sampling* 100 (seratus) *end user* dengan nominal terbesar. Data *sampling* harus berbeda dengan data *sampling* yang digunakan sebelumnya dan dipilih oleh Bank.

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 22 September 2023, telah dilakukan penandatanganan kerjasama modal kerja secara dibawah tangan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Kredit antara PT Pegadaian dengan PT Bank BTPN Tbk tanggal 26 Agustus 2022. Dengan penambahan Plafon yang diberikan dari sebesar Rp500.000 menjadi sebesar Rp1.500.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 30 Agustus 2024.

Per 30 September 2023, suku bunga yang didapatkan dari Bank BTPN adalah sebesar 5,65% dengan tenor selama 1 (satu) bulan. Penentuan besarnya suku bunga/*nisbah* dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, pemakaian fasilitas dari Bank BTPN total sebesar Rp1.500.000 dengan rincian suku bunga sebesar Rp200.000, suku bunga 5,80% dan Rp1.300.000 suku bunga 5,85%.

Persyaratan-persyaratan (*covenants*) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut:

- Segera setelah tersedia, namun dalam hal apa pun dalam 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku, laporan keuangan konsolidasian Peminjam yang diaudit untuk tahun buku tersebut.
- Setelah diminta oleh Pemberi Pinjaman dan dalam 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan, laporan keuangan konsolidasian Peminjam untuk triwulan tahun buku tersebut.
- Salinan dari semua dokumen yang diserahkan oleh Peminjam kepada para krediturnya secara umum (atau setiap kelasnya) pada saat yang sama dengan saat dikirimkannya dokumen-dokumen tersebut.
- Segera setelah mengetahuinya, rincian mengenai setiap litigasi, arbitrase atau proses administrasi yang ada saat ini, terancam akan diajukan atau sedang menunggu putusan terhadap Peminjam, yang apabila dijatuhi putusan yang merugikan, akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

Segara setelah diminta, informasi lain mengenai kondisi keuangan, bisnis, dan kegiatan usaha Peminjam sebagaimana mungkin diminta secara wajar oleh Pemberi Pinjaman.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 16 November 2021, PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya disebut "PNM") telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank BNI") dengan plafon sebesar Rp1.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2024.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2023.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp305.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2023.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2024.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2024.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2024.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2025.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 14 September 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 20 Oktober 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BTN") dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 7,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2023.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 7,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 September 2024.

Pada tanggal 30 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 7,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 September 2024.

Pada tanggal 30 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 7,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 32 (tiga puluh dua) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 September 2024.

Pada tanggal 28 September 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Maret 2024.

Pada tanggal 28 September 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 April 2024.

Pada tanggal 30 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja BTN iB dari BTN dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 23 Februari 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank Mandiri") dengan plafon sebesar Rp1.000.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2023.

Pada tanggal 2 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp1.000.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2024.

Pada tanggal 2 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 (lima) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp20.800 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp33.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp20.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp20.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp75.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp31.200 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan (NPL) Ratio* maksimal 3,5%.
- Entitas anak wajib menjaga rasio piutang *end-user* (kolektibilitas 1) terhadap baki debit minimal 100%.
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik.
- Entitas anak wajib menyerahkan kualitas pembiayaan triwulan.
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan triwulan.

Atas seluruh fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia telah dilakukan pelunasan awal pada tanggal 25 Agustus 2023.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 30 Mei 2022, PNM telah mendapatkan sebanyak 2 (dua) fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (selanjutnya disebut "SMF") dengan plafon masing-masing sebesar Rp25.671 dan Rp24.372 dengan suku bunga 6,15%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2025.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 30 Mei 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari SMF dengan masing-masing plafon sebesar Rp11.572 dan Rp10.070 dengan suku bunga 4,60%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2023.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Facility Line* dari SMF dengan plafon sebesar Rp16.166 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2023.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari SMF dengan plafon sebesar Rp18.946 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2023.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Facility Line* dari SMF dengan plafon sebesar Rp139.884 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari SMF dengan plafon sebesar Rp232.100 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Facility Line* dari SMF dengan plafon sebesar Rp69.475 dengan suku bunga 6,55%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2024.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari SMF dengan plafon sebesar Rp67.604 dengan suku bunga 6,55%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain sebelum memperoleh persetujuan tertulis, PNM tidak diperkenankan untuk:

- Mengajukan permohonan pailit.
- Mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain, hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang dan menjaminkan harta kekayaan Bank.
- Menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 14 Agustus 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Pusat Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut "PIP") dengan plafon sebesar Rp647.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2023.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2023

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2024.

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp600.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2024.

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp600.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2024.

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2024.

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp300.000 dan Rp200.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 (tiga puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2024.

Pada tanggal 28 April 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp500.000 dan Rp500.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2025.

Pada tanggal 28 April 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp500.000 dan Rp500.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2025.

Pada tanggal 28 April 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp250.000 dan Rp250.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 33 (tiga puluh tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2025.

Pada tanggal 2 November 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp450.000 dan Rp1.050.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2025.

Pada tanggal 2 November 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp350.000 dan Rp150.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Juli 2023, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp850.000 dan Rp360.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2026.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2023, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp850.000 dan Rp360.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2026.

Pada tanggal 22 Desember 2023, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp560.000 dan Rp240.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 December 2026.

Persyaratan-persyaratan penting (*covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk pelaku usaha Ultra Mikro (UMi).
- Perusahaan wajib menyerahkan daftar piutang lancar yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 1 (satu) bulan dengan nilai dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir

Pada tanggal 12 Maret 2021, PNM telah mendapatkan 3 (tiga) fasilitas Kredit Modal Kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir dengan plafon sebesar Rp15.000, Rp4.000, dan Rp4.000 dengan suku bunga 6,75%. Ketiga fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 47 (empat puluh tujuh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2024.

Pada tanggal 12 Maret 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir dengan plafon sebesar Rp15.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 47 (empat puluh tujuh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar.
- Perusahaan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 (enam) bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Asian Development Bank

Pada tanggal 25 Januari 2005, PNM telah mendapatkan fasilitas kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman dari Asian Development Bank dengan plafon sebesar ASD364.782 (nilai penuh) dengan tingkat suku bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah 0,35% per tahun. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 228 (dua ratus dua puluh delapan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2028.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 11 Juli 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas *Installment Loan* 1 dari PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "BCA") dengan plafon sebesar Rp450.000 dan Rp50.000 dengan suku bunga 5,35%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 11 Juli 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan 2* dari BCA dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2023.

Pada tanggal 11 Juli 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan 2* dari BCA dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2023.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BCA dengan plafon sebesar Rp30.000 dengan suku bunga 9,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2025.

Pada tanggal 3 Oktober 2023 Addendum, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan 2* dari BCA dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,20%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2024.

Pada tanggal 3 Oktober 2023 Addendum, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan 2* dari BCA dengan plafon sebesar Rp1.500.000 dengan suku bunga 6,20%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *Gearing Ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT BCA Syariah

Pada tanggal 3 Oktober 2019, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari PT BCA Syariah (selanjutnya disebut "BCA Syariah") dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas *Mudharabah* dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp10.000 dan Rp30.000 dengan suku bunga 7,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 46 (empat puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 24 Maret 2021, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas *Mudharabah* dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp9.100 dan Rp60.000 dengan suku bunga 7,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2025.

Pada tanggal 25 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp5.000 dengan suku bunga 10,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 45 (empat puluh lima) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2025.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT BCA Syariah (lanjutan)

Pada tanggal 25 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp10.900, dengan suku bunga 10,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 47 (empat puluh tujuh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2025.

Pada tanggal 25 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp14.100 dengan suku bunga 10,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 57 (lima puluh tujuh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2027.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (selanjutnya disebut "Bank BJB") dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2023.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2023.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2023.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2023.

Pada tanggal 22 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 6,40%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2024.

Pada tanggal 4 Agustus 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp130.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan triwulan.
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan *unaudited*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY)

Pada tanggal 9 Juli 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari BPD DIY dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya

Pada tanggal 16 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari BPD DIY dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2024.

Pada tanggal 5 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari BPD DIY dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya

Pada tanggal 21 November 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari BPD DIY dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Financing to Asset ratio* 65%
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 120%
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan (NPL) Ratio* neto maksimal 5%.

PT Bank of China

Pada tanggal 6 Februari 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Bank of China dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,13%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga Utang Total Terkonsolidasi Terhadap Total Modal maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%.

Citibank N.A.

Pada tanggal 13 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Citibank N.A. dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 13 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Citibank N.A. dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2024.

Pada tanggal 13 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Citibank N.A. dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 2 (dua) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM adalah entitas anak wajib melaporkan DER, FAR, *Micro financing ratio*, NPL neto, *Current ratio*, ROA net, ROE neto, dan BOPO.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia - unit usaha syariah

Pada tanggal 20 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah* dari PT Bank Danamon Indonesia - unit usaha syariah (selanjutnya disebut "Danamon Syariah") dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 8 (delapan) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2023.

Pada tanggal 21 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah* dari Danamon Syariah dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 6,40%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 15 (lima belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2024.

Pada tanggal 21 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah* dari Danamon Syariah dengan plafon sebesar Rp600.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 10 (sepuluh) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 10 November 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan (NPL) Ratio* neto maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.

PT Bank DKI

Pada tanggal 19 November 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank DKI (selanjutnya disebut dengan "Bank DKI") dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2023.

Pada tanggal 19 November 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2023.

Pada tanggal 10 Mei 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2024.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp653.165 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2024.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp136.076 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2025.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp136.076 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2025.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2024.

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2024.

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2024.

Pada tanggal 19 November 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 19 November 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 10 Mei 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2024.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp546.835 dengan suku bunga 7,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2024.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp113.924 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2025.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp113.924 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2025.

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2024.

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2024.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 6 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari PT Bank HSBC Indonesia dengan plafon sebesar Rp1.000.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2024.

Persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM yaitu entitas anak diwajibkan untuk menjaga rasio pinjaman terhadap modal maksimum 10 (sepuluh) kali.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Pada Tanggal 10 Maret 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank JTrust") dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2023.

Pada tanggal 27 Januari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Bank JTrust dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2024.

Pada tanggal 10 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Bank JTrust dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.
- Entitas anak wajib menjaga *Micro Financing Ratio* minimal 50%.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Pada tanggal 19 Desember 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 November 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Maybank") dengan plafon sebesar Rp390.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2024.

Pada tanggal 29 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 29 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 29 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp110.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2024.

Pada tanggal 1 Agustus 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 (lima) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2024.

Pada tanggal 1 Agustus 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 4 (empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Current Ratio* minimum 1,2 (satu koma dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan Gross* keseluruhan maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan Mekaar* maksimal 3%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 8 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah* dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Muamalat") dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 3 November 2023.

Pada tanggal 8 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah* dari Bank Muamalat dengan plafon sebesar Rp350.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9 (sembilan) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank National Nobu Tbk

Pada tanggal 1 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari PT Bank NationalNobu Tbk dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10%.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari PT Bank Pan Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Panin") dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2025.

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari Bank Panin dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2024.

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari Bank Panin dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dengan plafon sebesar Rp291.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari PT Bank Permata Tbk (selanjutnya disebut "Bank Permata") dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,40%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Pada tanggal 21 Maret 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2023.

Pada tanggal 21 Maret 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2023.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp800.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp512.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,20%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,2%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,4%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,4%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,1%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,1%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2024.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* neto maksimal 5%.

PT Bank Resona Perdania

Pada tanggal 9 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari PT Bank Resona Perdania dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* neto maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga Rasio lancar minimal 100%.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10%.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt-Service Coverage Ratio* (DSCR) maksimal 100%.

PT Bank SBI Indonesia

Pada tanggal 16 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas PRK *on demand* dari PT Bank SBI Indonesia (selanjutnya disebut "Bank SBI") dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2024.

Pada tanggal 16 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas PRK *on demand* dari Bank SBI dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* neto maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.
- Entitas anak wajib menjaga *Micro Financing Asset* minimal 50%.
- Entitas anak wajib menjaga *Interest Coverage Ratio* minimal 1,1 (satu koma satu) kali.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Shinhan Indonesia

Pada tanggal 21 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Shinhan Indonesia dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* net maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga rasio cakupan bunga 1,00.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Pada tanggal 28 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (selanjutnya disebut "Bank Sulselbar") dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025.

Pada tanggal 28 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Sulselbar dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *current ratio* maksimal 100%.
- Entitas anak wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga/memaksimalkan *Return on Assets* (ROA).
- Entitas anak wajib menjaga/memaksimalkan *Return on Equity* (ROE).

PT Bank Victoria International Tbk

Pada tanggal 20 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya disebut "Bank Victoria") dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2023.

Pada tanggal 20 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Bank Victoria dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 21 September 2023.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Victoria dengan plafon sebesar Rp10.000 dengan suku bunga 10,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2025.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Victoria dengan plafon sebesar Rp10.000 dengan suku bunga 10,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2025.

Persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM adalah entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal tidak lebih dari 5%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank CCB Indonesia") dengan plafon sebesar Rp270.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023.

Pada tanggal 30 Mei 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp315.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2024.

Pada tanggal 4 Januari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp215.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024.

Pada tanggal 23 November 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp195.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2024.

Pada tanggal 23 November 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp45.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2024.

Pada tanggal 4 Januari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp315.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Collateral Coverage Ratio* minimal 100%.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 8 (delapan) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 3%.

PT Bank of India Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank of India Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank of India") dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Pada tanggal 26 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari Bank of India dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,05%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2024.

Pada tanggal 26 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari Bank of India dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 Mei 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Working Capital Executing* dari PT Bank IBK Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank IBK") dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025.

Pada tanggal 30 Mei 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Working Capital Executing* dari Bank IBK dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Asset Ratio* minimum 65%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Micro Financing Ratio* 50%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Current Ratio* minimum 120%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Non-Performing Loan Ratio* maksimal 5%.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Modal Kerja dari PT Bank Oke Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Oke") dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2025.

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Modal Kerja dari Bank Oke dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 10%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio piutang lebih dari 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% terhadap *gross piutang*.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Pada tanggal 19 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank QNB") dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 7 November 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Revolving Credit Facility* dari Bank QNB dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 2 (dua) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2024.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut "Bank Kalsel") dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 11,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 60 (enam puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2025.

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Kalsel dengan plafon sebesar Rp10.000 dengan suku bunga 10,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 59 (lima puluh sembilan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2027.

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Kalsel dengan plafon sebesar Rp40.000 dengan suku bunga 10,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 59 (lima puluh sembilan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2027.

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Kalsel dengan plafon sebesar Rp14.000 dengan suku bunga 10,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 59 (lima puluh sembilan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Oktober 2027.

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Kalsel dengan plafon sebesar Rp10.770 dengan suku bunga 10,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 31 (tiga puluh satu) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan Ratio* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 150%.
- Entitas anak wajib menjaga Solvabilitas minimal 200%.
- Entitas anak wajib menjaga *Profit Margin* lebih besar dari suku bunga kredit.

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Pada tanggal 13 Desember 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *AI Musyarakah* dari PT Bank Aladin Syariah Indonesia dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Current Ratio minimal 120%*.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Debt to equity ratio* maksimal 10X
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio *Non Performing Loan Ratio* Maksimal 5%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Pada tanggal 24 Oktober 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Modal Kerja dari PT Bank ICBC Indonesia dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Financing to Total Asset* minimal 40%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Micro Financing Ratio* 50%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Capital* minimal 10%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio *Non Performing Loan Ratio* maksimal 5%.

PT Bank Mizuho Indonesia

Pada tanggal 20 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Modal Kerja dari Bank Mizuho Indonesia dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Current Ratio* minimal 1.2x
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan DER maksimal 10x.

PT Bank Hibank Indonesia (sebelumnya PT Bank Mayora) (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 11 Desember 2015, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mayora dengan plafon sebesar Rp3.000 dengan suku bunga 13,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 120 (seratus dua puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Loan Ratio (NPL) neto maksimal 8%.
- Entitas anak wajib menyampaikan laporan keuangan tiap akhir tahun.
- Entitas anak wajib membuka rekening pada bank.
- Entitas anak wajib memelihara pembukuan dan catatan mengenai usaha bank.
- Entitas anak wajib mengizinkan pekerja atau wakil bank sewaktu-waktu untuk memeriksa usaha bank.
- Entitas anak wajib mengasuransikan barang yang dijaminan oleh bank.

PT Bank CIMB Niaga - Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 25 Maret 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank CIMB Niaga - Unit Usaha Syariah dengan plafon sebesar Rp6.000 dengan suku bunga 3,40%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 23 (dua puluh tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Financing Ratio (NPF) maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga tingkat kesehatan perseroan minimal kriteria sehat.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Danareksa Finance (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 3 Januari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Danareksa Finance (selanjutnya disebut "Danareksa Finance") dengan plafon sebesar Rp25.000 dengan suku bunga 9,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 11 (sebelas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga total debt atau equity ratio di bawah 3,5 (tiga koma lima) kali.
- Entitas anak wajib menjaga EBITDA atau Interest Expense Ratio di atas 2 (dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Financing Ratio (NPF) maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 10 (sepuluh) kali.

PT Bank Ina Perdana Tbk

Pada tanggal 28 Februari 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Ina Perdana Tbk dengan plafon sebesar Rp30.000 dengan suku bunga 10,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan Audited setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode laporan berakhir.
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan internal per 3 (tiga) bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode.
- Entitas anak wajib menjaga sinking fund 2 (dua) kali angsuran.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Permodalan Nasional Madani (PNM) telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian yang diterima.

Pinjaman Diterima Bank Raya

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 14 Desember 2020, Bank Raya telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk penyaluran KPR Sejahtera bagi masyarakat dengan berpenghasilan rendah dengan plafon sebesar Rp17.319 dengan suku bunga 4,45%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 184 (seratus delapan puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2036.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan pailit.
- Mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain, hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang dan menjaminkan harta kekayaan Bank.
- Menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari PT Bank BTPN Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank BTPN") dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari Bank BTPN dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2024.

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari Bank BTPN dengan plafon sebesar Rp134.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2024.

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari Bank BTPN dengan plafon sebesar Rp70.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2024.

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari Bank BTPN dengan plafon sebesar Rp96.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* tidak melebihi rasio 8,5 (delapan koma lima) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan (NPL) Ratio* di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

MUFG Bank, Ltd

Pada tanggal 8 Agustus 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek tanpa komitmen dari MUFG Bank, Ltd dengan plafon sebesar ASD60.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 6,14%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 9 (sembilan) hari dan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* tidak melebihi rasio 8,5 (delapan koma lima) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan (NPL) Ratio* di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 11 Oktober 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Credit Line* dari PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "Bank BCA") dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 31 (tiga puluh satu) hari dan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2023.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 12 Agustus 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank BCA dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2024.

Pada tanggal 11 Oktober 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank BCA dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga Gearing Ratio maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Loan (NPL) Ratio di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank Victoria International Tbk

Pada tanggal 6 Agustus 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Credit Line* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,00% - 6,45%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2023.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp270.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024.

Pada tanggal 6 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp90.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2024.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp90.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Maret 2024.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga Gearing Ratio maksimum sebesar 8 (delapan) kali.
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Loan (NPL) Ratio di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 21 Januari 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Committed* Kredit Modal Kerja dari PT Bank HSBC Indonesia (selanjutnya disebut "Bank HSBC") dengan plafon sebesar Rp300.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 12 April 2023.

Pada tanggal 12 April 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Corporate Facility Agreement* dari Bank HSBC dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga Gearing Ratio maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Loan (NPL) Ratio maksimal 5%.

PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 26 Desember 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Revolving Credit Facility* (RCF) dari PT Bank UOB Indonesia dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga Debt to Equity Ratio maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Loan (NPL) Ratio maksimal 5%.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 27 Januari 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Comitted Credit Line* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,50% - 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga rasio pinjaman terhadap modal maksimum 7 (tujuh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga rasio *Non-Performing Financing* (NPF) maksimum 5%.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 15 Desember 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Credit Line* dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Maybank") dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2025.

Pada tanggal 1 September 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted* Kredit Modal Kerja dari Bank Maybank dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 7,20%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2026.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *Gearing Ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Juni 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 8 (delapan) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Pada tanggal 16 November 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Working Capital Executing* dari PT Bank IBK Indonesia Tbk dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimal 5%.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 21 Desember 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Berjangka dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Danamon") dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 hari dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2023.

Pada tanggal 21 Desember 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dari Bank Danamon dengan plafon sebesar Rp900.000 dengan suku bunga 6,65%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimal 7%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 24 Mei 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Credit Line* dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,50%-6,75%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, fasilitas pinjaman BRI Multifinance masih tersedia Rp200.000.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimal 5%.

CTBC Bank Co. Ltd.

Pada tanggal 5 Juli 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Credit Line* dari CTBC Bank Co. Ltd. dengan plafon sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2026.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 8,5 kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank Mandiri (Persero) (Pihak Berelasi) Tbk

Pada tanggal 10 Juli 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Credit Line* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank Mandiri") dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,75%. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, fasilitas pinjaman BRI Multifinance masih tersedia Rp500.000.

Pada tanggal 23 November 2020, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 8,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2024.

Pada tanggal 7 Juli 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 November 2024.

Pada tanggal 16 Maret 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,25 - 6,35%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025.

Pada tanggal 2 Agustus 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,50 - 6,90%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2024.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 8 Maret 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,95%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI Multifinance telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian yang diterima.

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a) Rincian estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah</u>		
Garansi yang diterbitkan	2.990.195	3.341.794
Fasilitas kredit yang belum ditarik	1.225.100	1.393.074
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	29.082	202.884
<u>Mata uang asing</u>		
Garansi yang diterbitkan	1.824.001	1.121.139
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	41.499	340.248
Fasilitas kredit yang belum ditarik	7.891	59.204
Total	<u>6.117.768</u>	<u>6.458.343</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (di luar fasilitas kredit yang belum ditarik):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Garansi yang diterbitkan		28.646.881		29.244.037
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		1.011.622		1.317.462
		<u>29.658.503</u>		<u>30.561.499</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	845.182.743	13.013.279	756.287.351	11.773.503
Euro Eropa	52.468.464	893.974	62.685.706	1.039.437
Dolar Singapura	2.120.000	24.754	1.950.000	22.606
Yen Jepang	78.741.216	8.573	986.141.173	107.371
Ringgit Malaysia	41.319.804	138.636	54.016.500	190.876
Dolar Hongkong		-	38.551.400	76.970
		<u>14.079.216</u>		<u>13.210.763</u>
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	87.738.087	1.350.903	236.779.396	3.686.063
Euro Eropa	33.329.859	567.885	79.491.351	1.318.103
Renminbi	129.211.733	280.397	467.867.907	1.047.514
Yen Jepang	112.235.500	12.220	117.655.254	13.861
Pound Sterling Inggris		-	181.829	3.416
Dolar Singapura	409.439	4.781	312.465	3.622
Malaysian Ringgit	27.840	93		-
		<u>2.216.279</u>		<u>6.072.579</u>
		<u>16.295.495</u>		<u>19.283.342</u>
		<u>45.953.998</u>		<u>49.844.841</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Garansi yang diterbitkan		13.065.353		18.552.065
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		1.216.989		1.256.668
		<u>14.282.342</u>		<u>19.808.733</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	630.194.774	9.703.109	839.463.479	13.068.348
Yen Jepang	2.846.332.038	309.909	4.143.224.059	488.113
Won Korea Selatan	6.682.601.241	79.389		-
Euro Eropa	532.192	9.068	15.778.583	261.636
Ringgit Malaysia		-	8.500.000	30.036
		<u>10.101.475</u>		<u>13.848.133</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (di luar fasilitas kredit yang belum ditarik) (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>				
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	439.602.923	6.768.566	279.153.129	4.345.716
Euro Eropa	9.860.486	168.006	34.688.694	575.198
Yen Jepang	579.192.803	63.062	541.503.453	63.795
Franc Swiss	80.288	1.469		-
Renmibi	361.481	784		-
Pound Sterling Inggris	23.100	453	591.751	11.117
Dolar Singapura		-	1.391.667	16.133
		7.002.340		5.011.959
		17.103.815		18.860.092
		31.386.157		38.668.825
Total		77.340.155		88.513.666
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(4.884.777)		(5.006.065)
Bersih		72.455.378		83.507.601

c) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi berdasarkan kolektibilitas:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lancar	204.493.512	174.180.091
Dalam perhatian khusus	1.293.884	522.513
Kurang lancar	51.774	39.329
Diragukan	30.568	46.322
Macet	60.833	15.474
Total	205.930.571	174.803.729
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(6.117.768)	(6.458.343)
Bersih	199.812.803	168.345.386

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

31 Desember 2023				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan</u>				
Nilai tercatat awal	12.410.787	1.247.881	-	13.658.668
Pengalihan ke				
Stage 1	618.137	(618.137)	-	-
Stage 2	(1.144)	1.144	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Komitmen dan kontinjensi	(2.151.326)	(480.440)	-	(2.631.766)
baru yang diterbitkan atau dibeli	10.146.607	554.295	2.091	10.702.993
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(9.665.885)	(563.523)	-	(10.229.408)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(53.697)	440	-	(53.257)
Nilai tercatat akhir	11.303.479	141.660	2.091	11.447.230

31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan</u>				
Nilai tercatat awal	9.677.550	10.094	153	9.687.797
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Komitmen dan kontinjensi	(1.921.778)	2.064.851	-	143.073
baru yang diterbitkan atau dibeli	12.138.336	513.151	-	12.651.487
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(7.454.600)	(1.360.440)	(153)	(8.815.193)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(28.721)	20.225	-	(8.496)
Nilai tercatat akhir	12.410.787	1.247.881	-	13.658.668

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

31 Desember 2023				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Garansi yang diterbitkan</u>				
Nilai tercatat awal	69.738.900	5.116.098	-	74.854.998
Pengalihan ke				
Stage 1	76.231	(76.231)	-	-
Stage 2	(1.904.391)	1.904.391	-	-
Stage 3	(9.968)	(11.387)	21.355	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	49.461	88.650	-	138.111
Komitmen dan kontinjensi				
baru yang diterbitkan atau dibeli	43.995.410	2.191.578	195	46.187.183
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan				
pengakuannya	(51.304.879)	(4.040.515)	-	(55.345.394)
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	81.627	(23.600)	-	58.027
Nilai tercatat akhir	60.722.391	5.148.984	21.550	65.892.925
31 Desember 2022				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Garansi yang diterbitkan</u>				
Nilai tercatat awal	51.761.062	8.184	83.365	51.852.611
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	(868)	(868)
Komitmen dan kontinjensi				
baru yang diterbitkan atau dibeli	69.323.928	5.116.097	-	74.440.025
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan				
pengakuannya	(51.347.987)	(8.183)	(82.497)	(51.438.667)
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	1.897	-	-	1.897
Nilai tercatat akhir	69.738.900	5.116.098	-	74.854.998

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Bank Garansi yang diterbitkan</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	1.272.632	3.190.301	-	4.462.933
Pengalihan ke				
Stage 1	28.379	(28.379)	-	-
Stage 2	(2.317)	2.317	-	-
Stage 3	(16)	(2.762)	2.778	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(270.692)	1.740.509	11.277	1.481.094
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	556.886	1.552.582	195	2.109.663
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(808.854)	(2.430.995)	-	(3.239.849)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	5	350	-	355
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	776.023	4.023.923	14.250	4.814.196
	31 Desember 2022			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Bank Garansi yang diterbitkan</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	622.732	2.260.233	82.957	2.965.922
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	260	-	(459)	(199)
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	1.272.370	3.190.301	-	4.462.671
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(622.469)	(2.260.233)	(82.498)	(2.965.200)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(261)	-	-	(261)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	1.272.632	3.190.301	-	4.462.933

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik</u>				
Nilai tercatat awal	85.704.365	476.350	109.348	86.290.063
Pengalihan ke				
Stage 1	997.604	(981.421)	(16.183)	-
Stage 2	(456.310)	464.852	(8.542)	-
Stage 3	(229.962)	(137.843)	367.805	-
Pengukuran kembali nilai tercatat	5.084.318	530.277	(266.729)	5.347.866
Komitmen dan kontinjensi				
baru yang diterbitkan atau dibeli	46.105.345	3.861.346	21.059	49.987.750
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan				
pengakuannya	(11.446.815)	(1.423.817)	(197.693)	(13.068.325)
Penghapusbukuan	(3.714)	(8.929)	(9.065)	(21.708)
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	54.770	-	-	54.770
Nilai tercatat akhir	125.809.601	2.780.815	-	128.590.416

	31 Desember 2022			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik</u>				
Nilai tercatat awal	125.007.122	15.073.824	161.360	140.242.306
Pengalihan ke				
Stage 1	2.299.967	(2.158.820)	(141.147)	-
Stage 2	(267.035)	269.370	(2.335)	-
Stage 3	(99.561)	(21.342)	120.903	-
Pengukuran kembali nilai tercatat	(24.346.829)	(123.464)	(70.662)	(24.540.955)
Komitmen dan kontinjensi				
baru yang diterbitkan atau dibeli	37.120.613	2.711.217	182.333	40.014.163
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan				
pengakuannya	(54.603.173)	(15.273.219)	(133.808)	(70.010.200)
Penghapusbukuan	(46)	(1.216)	(7.296)	(8.558)
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	593.307	-	-	593.307
Nilai tercatat akhir	85.704.365	476.350	109.348	86.290.063

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	302.788	1.135.992	13.498	1.452.278
Pengalihan ke				
Stage 1	52.184	(52.141)	(43)	-
Stage 2	(2.678)	2.815	(137)	-
Stage 3	(1.321)	(10.985)	12.306	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan Kerugian	59.497	51.087	(12.714)	97.870
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	103.715	10.173	-	113.888
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(186.539)	(241.729)	(3.844)	(432.112)
Penghapusbukuan	(3.714)	(8.929)	(9.066)	(21.709)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	22.776	-	-	22.776
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	346.708	886.283	-	1.232.991
	31 Desember 2022			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	843.872	2.413.109	13.940	3.270.921
Pengalihan ke				
Stage 1	61.578	(61.426)	(152)	-
Stage 2	(6.157)	6.705	(548)	-
Stage 3	(2.284)	(2.233)	4.517	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(572.847)	10.971	7.341	(554.535)
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	182.870	241.100	138	424.108
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(191.219)	(1.494.037)	(4.442)	(1.689.698)
Penghapusbukuan	(46)	(1.216)	(7.296)	(8.558)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(12.979)	23.019	-	10.040
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	302.788	1.135.992	13.498	1.452.278

BRI melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara kolektif dan individual dengan menggunakan bukti objektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja (Catatan 42)	13.111.142	10.898.392
Cadangan Bonus dan Insentif	8.496.353	8.936.362
Cadangan Tunjangan Hari Raya	1.207.929	834.878
Cadangan pekerja kontrak	244.200	626.855
Total	23.059.624	21.296.487

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja meliputi program pensiun imbalan pasti, program pemutusan hubungan kerja, program masa persiapan pensiun dan program imbalan jangka panjang lain (Program penghargaan tanda jasa, cuti besar, BPJS kesehatan pasca kerja dan manfaat lain dana manfaat tambahan) sesuai dengan kebijakan BRI dan entitas anak yang dihitung sesuai dengan perhitungan aktuarial independen.

28. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri atas:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Liabilitas manfaat polis masa depan	9.255.256	7.774.936
Liabilitas kontrak investasi	3.286.965	3.742.547
Premi yang belum merupakan pendapatan	2.634.906	2.236.037
Estimasi liabilitas klaim	2.073.134	1.705.268
Utang akrual	1.141.169	1.482.067
Utang bunga	1.479.174	1.418.172
Cadangan kewajiban litigasi (Catatan 45b)	1.361.894	1.634.654
Liabilitas sewa	542.630	347.016
Utang reasuransi	317.014	423.494
Liabilitas kartu kredit	278.797	125.857
Pendapatan diterima di muka	170.130	149.159
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu	82.201	90.057
Cadangan pajak hadiah simpedes	15.691	16.790
Setoran jaminan	12.345	11.867
Lain-lain	5.773.478	4.862.302
	<u>28.424.784</u>	<u>26.020.223</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Term deposit</i> valas devisa hasil ekspor (TD Valas DHE) Bank Indonesia	5.839.397	-
Utang bunga	398.793	481.503
Pendapatan diterima di muka	416.639	261.018
Liabilitas sewa	108.611	130.830
Lain-lain	1.476.393	978.306
	<u>8.239.833</u>	<u>1.851.657</u>
Total	36.664.617	27.871.880

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Pihak Ketiga		
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Subordinasi IV	265.120	-
Obligasi Subordinasi III	-	138.893
	<u>265.120</u>	<u>138.893</u>
Pihak Berelasi (Catatan 44)		
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Subordinasi IV	229.507	-
Pinjaman <i>two-step loan</i>	2.056	2.374
Obligasi Subordinasi III	-	360.721
	<u>231.563</u>	<u>363.095</u>
Total	<u>496.683</u>	<u>501.988</u>

a. Pinjaman *two-step loan*

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari *Asian Development Bank (ADB)*, *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, *United States Agency for International Development (USAID)* dan *Islamic Development Bank (IDB)*. Tingkat suku bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan perjanjian masing-masing dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 2,28% dan 2,15% masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.

b. Obligasi Subordinasi III Tahun 2018

Pada tanggal 26 Juni 2018, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2023. Bunga Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dibayarkan 3 (tiga) bulanan sejak tanggal 26 Juni 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 ini mendapat peringkat AA dari Pefindo.

Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

c. Obligasi Subordinasi IV Tahun 2023

Pada tanggal 6 Juli 2023, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2028. Bunga Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 6 Juli 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 ini mendapat peringkat AA dari Pefindo.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)

c. Obligasi Subordinasi IV Tahun 2023 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Subordinasi IV tahun 2023 mendapatkan peringkat AA dari Pefindo.

Obligasi Subordinasi IV tahun 2023 tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

- c. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
- d. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Rupiah</u>		
> 3 bulan – 1 tahun	-	499.614
> 1 tahun – 5 tahun	496.683	2.374
Total	496.683	501.988

30. OPSI SAHAM

Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan motivasi bagi talent terbaik, Direksi BRI memutuskan untuk memberikan program kepemilikan saham bagi pekerja dalam bentuk Employee Stock Option Plan (ESOP)

Sesuai surat Direksi No. B.0017-DIR/HCS/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, BRI menerbitkan program ESOP pada tanggal 2 Januari 2023 (tanggal grant) sejumlah 131.357.200 lembar saham dimana tanggal pemberian alokasi hak saham atau tanggal grant pada 2 Januari 2023, dengan akhir periode vesting pada 31 Desember 2025. Masa berlaku dari exercise opsi untuk ESOP 2023 mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Setelah tanggal tersebut, seluruh hak opsi yang tidak digunakan akan menjadi gugur.

Perhitungan, metode dan asumsi mengenai ESOP diperoleh dari laporan aktuaris independen, Willis Towers Watson pada November 2023.

Nilai wajar dari ESOP sebesar Rp122.030. Nilai wajar ESOP diamortisasi selama masa vesting dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sedangkan akumulasi biaya selama periode vesting diakui dalam ekuitas.

Biaya ESOP yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp40.454.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. OPSI SAHAM (lanjutan)

Nilai wajar dari setiap hak opsi diestimasi pada tanggal pemberian hak opsi dengan menggunakan model “*Black-scholes*”, dengan asumsi utama sebagai berikut:

Periode <i>vesting</i> (dalam bulan)	36
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	4.870
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	4.870
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	929
Volatilitas harga saham	32,419%
Suku bunga bebas risiko	6,103
Tingkat dividen	5,834

31. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	300.000.000.000		15.000.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Negara Republik Indonesia				
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	80.610.976.875	50	4.030.548.843.750	53,20
Dewan Komisaris:				
- Kartika Wirjoatmodjo	689.800	50	34.490.000	0,00
- Rabin Indrajad Hattari	620.700	50	31.035.000	0,00
Direksi:				
- Sunarso	3.234.856	50	161.742.800	0,00
- Catur Budi Harto	1.839.057	50	91.952.850	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	3.587.470	50	179.373.500	0,00
- Handayani	3.425.200	50	171.260.000	0,00
- Supari	2.890.914	50	144.545.700	0,00
- Agus Noorsanto	2.071.941	50	103.597.050	0,00
- Agus Sudiarto	1.717.400	50	85.870.000	0,00
- Amam Sukriyanto	1.526.754	50	76.337.700	0,00
- Viviana Dyah Ayu R.K	1.512.800	50	75.640.000	0,00
- Agus Winardono	1.503.481	50	75.174.050	0,00
- Arga Mahanana Nugraha	1.313.785	50	65.689.250	0,00
- Andrijanto	1.123.000	50	56.150.000	0,00
Masyarakat	70.152.822.670	50	3.507.641.133.500	46,29
	150.790.856.704		7.539.542.835.200	99,49%
Saham treasuri (Catatan 1d)	768.144.900		38.407.245.000	0,51
Total	151.559.001.604		7.577.950.080.200	100,00%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	300.000.000.000		15.000.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Negara Republik Indonesia				
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	80.610.976.875	50	4.030.548.843.750	53,19
Dewan Komisaris:				
- Kartika Wirjoatmodjo	442.800	50	22.140.000	0,00
- Hadiyanto	1.048.700	50	52.435.000	0,00
- Rabin Indrajad Hattari	398.400	50	19.920.000	0,00
Direksi:				
- Sunarso	2.398.156	50	119.907.800	0,00
- Catur Budi Harto	1.344.957	50	67.247.850	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	3.120.870	50	156.043.500	0,00
- Handayani	2.958.600	50	147.930.000	0,00
- Supari	2.423.114	50	121.155.700	0,00
- Agus Noorsanto	1.401.041	50	70.052.050	0,00
- Agus Sudiarto	1.250.800	50	62.540.000	0,00
- Andrijanto	734.200	50	36.710.000	0,00
- Amam Sukriyanto	1.010.154	50	50.507.700	0,00
- Agus Winardono	982.681	50	49.134.050	0,00
- Viviana Dyah Ayu R.K	996.200	50	49.810.000	0,00
- Arga Mahanana Nugraha	847.185	50	42.359.250	0,00
Masyarakat	70.438.345.270	50	3.521.917.263.500	46,49%
	151.070.680.004		7.553.534.000.200	99,68%
Saham treasuri (Catatan 1d)	488.321.600		24.416.080.000	0,32
Total	151.559.001.604		7.577.950.080.200	100,00%

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan pailit dan pembubaran BRI.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Tambahan modal Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi	1.092.144	1.092.144
Sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya	5	5
Agio saham dari IPO	589.762	589.762
Eksekusi atas opsi saham		
Tahun 2004	49.514	49.514
Tahun 2005	184.859	184.859
Tahun 2006	619.376	619.376
Tahun 2007	140.960	140.960
Tahun 2008	29.013	29.013
Tahun 2009	14.367	14.367
Tahun 2010	43.062	43.062
Opsi saham MSOP tahap pertama yang telah jatuh tempo	504	504
Opsi saham MSOP tahap kedua yang telah jatuh tempo	1.845	1.845
Opsi saham MSOP tahap ketiga yang telah jatuh tempo	8.447	8.447
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2018	(81.195)	(81.195)
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2019	208.331	208.331
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2020	510.819	510.819
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2021	1.154.211	1.154.211
Opsi saham MSOP tahap keempat yang telah jatuh tempo	62.862	62.862
Kehilangan pengendalian atas entitas anak	565.209	565.209
Tambahan modal atas transaksi PMHMETD	94.419.142	94.419.142
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2021	(23.370.339)	(23.370.339)
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2022	(1.341)	(1.341)
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2022	(604.474)	(604.474)
Cadangan saham bonus yang telah jatuh tempo	210.266	-
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2023	5.778	-
	<u>75.853.127</u>	<u>75.637.083</u>

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah", Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, modal dasar dan ditempatkan BRI belum ditingkatkan dengan tambahan modal dari program rekapitalisasi tersebut, sehingga setoran modal Pemerintah sebesar Rp29.063.531 dicatat sementara pada akun "Tambahan Modal Disetor" bersama-sama dengan sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya sebesar Rp5.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 jumlah final kebutuhan rekapitalisasi BRI sebesar Rp29.063.531, dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.272.000 dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dibukukan sebagai agio saham. Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh BRI, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp24.699.387 dieliminasi ke agio saham, sehingga menghasilkan saldo agio saham sebesar Rp1.092.149 pada tanggal 30 Juni 2003.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2003, BRI telah melakukan IPO dengan mengeluarkan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp875 (nilai penuh) per saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam rangka IPO (lembar saham) (Catatan 1c)	1.764.705.000
Agio saham per saham (nilai penuh)	375
Total agio saham - sebelum diskon	661.764
Dikurangi	
- 3% diskon yang diberikan kepada nasabah BRI	(2.961)
- Biaya IPO	(69.041)
Agio saham dari IPO	589.762

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (*Management Stock Option Plan* (MSOP)).

Biaya kompensasi atas MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas.

Pekerja BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

Transaksi entitas sepengendali

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 70 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, PT Bahana Artha Ventura telah mengalihkan kepemilikan saham PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) sebanyak 15.874 lembar kepada BRI (Catatan 1f), dan berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., PT Danareksa (Persero) telah mengalihkan kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas (Danareksa Sekuritas), sebanyak 335.000.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f).

Transaksi jual beli tersebut merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Danareksa (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Transaksi entitas sepengendali (lanjutan)

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
Danareksa Sekuritas	446.888	366.359	80.529
BRI Ventures	3.090	2.424	666
Jumlah	449.978	368.783	81.195

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 47 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., Notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., PT Danareksa (Persero) telah mengalihkan kepemilikan saham PT Danareksa Investment Management ("DIM") sebanyak 10.500.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f). Atas transaksi ini BRI memiliki pengaruh signifikan terhadap DIM sehingga transaksi ini dicatat sesuai PSAK No.15 "Investasi pada Entitas Asosiasi", dimana dalam metode ekuitas pengakuan awal diakui sesuai dengan harga perolehan yang kemudian ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi DIM setelah tanggal perolehan.

Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 30 November 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta PT Danareksa (Persero) telah mengalihkan kepemilikan saham PT Danareksa Investment Management ("DIM") sebanyak 9.000.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f), sehingga BRI memiliki 19.500.000 lembar saham atau setara dengan 65% dari total saham beredar DIM. Atas transaksi ini BRI memperoleh pengendalian terhadap DIM sehingga atas transaksi ini merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali dan dicatat sesuai PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas. Pada tanggal akuisisi di tahun 2022 selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi adalah sebesar Rp604.474.

Kehilangan pengendalian atas entitas anak (BRIS)

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) akan menjadi entitas yang menerima penggabungan atau *surviving entity* dan seluruh pemegang saham PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Berdasarkan rasio penggabungan kepemilikan BRI atas BSI adalah sebesar 17,29% atau sebanyak 7.092.761.655 lembar saham senilai Rp3.546.381.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Kehilangan pengendalian atas entitas anak (BRIS) (lanjutan)

Sejak tanggal 1 Februari 2021 BRI telah kehilangan pengendalian atas BRIS yang mengakibatkan BRI harus menghentikan pengakuannya terhadap aset bersih BRIS pada nilai tercatatnya sebesar Rp909.707 dan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali terdahulu kepada BRIS ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali) senilai Rp1.452.824. Setelah itu BRI mengakui investasi pada BSI sesuai dengan rasio penggabungan dimana selisih antara net aset BRIS dengan investasi BSI dicatat sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp565.209.

Transaksi penggabungan ini merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, BNI, Mandiri, BSM, BRIS dan BNIS adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah tercatat investasi sebelumnya dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah tercatat investasi sebelumnya	Jumlah tercatat investasi akibat merger	Tambahan modal disetor
Kepemilikan BRI atas BSI	2.981.172	3.546.381	565.209

Penerbitan Saham Baru

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 22 Juli 2021, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 61 Notaris Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui BRI menerbitkan saham baru dalam rangka penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).

PMHMETD I tersebut telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK pada tanggal 30 Agustus 2021. Pemerintah Republik Indonesia, selaku pemegang saham pengendali Perseroan mengambil bagian atas seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menjadi haknya dengan melakukan *Inbreng* atas saham milik Pemerintah pada Pegadaian dan PNM kepada BRI adalah sebagai berikut:

- a) 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian;
- b) 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

Transaksi *inbreng* tersebut sesuai Akta Pengalihan Hak Atas Saham Republik Indonesia atas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani untuk dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, Notaris Fathiah Helmi, S.H., atas Transaksi *inbreng* tersebut merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
PNM	6.100.068	6.073.819	26.249
Pegadaian	48.670.528	25.326.438	23.344.090
Jumlah	54.770.596	31.400.257	23.370.339

Jumlah imbalan yang dialihkan sesuai dengan hasil nilai wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan, sesuai dengan laporan No. 00244/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan No. 00245/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/202 tanggal 30 Juni 2021.

Atas PMHMETD I meningkatkan modal dan disetor penuh sebanyak 28.213.191.604 lembar saham atau sebesar Rp1.410.659, yang terdiri dari *inbreng* Pemerintah sebanyak 16.108.998.710 lembar saham atau sebesar Rp805.450 dan publik sebanyak 12.104.192.894 lembar saham atau sebesar Rp605.210, yang mengakibatkan kenaikan tambahan modal disetor sebesar Rp94.419.142 (setelah dikurangi oleh biaya emisi).

c. Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan BRI Kantor Cabang/Perwakilan luar negeri (Cayman Islands, New York, Hong Kong, Singapura, Timor-Leste dan Taipei) dan entitas anak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong, Dolar Singapura dan Dolar Taiwan Baru ke dalam mata uang Rupiah (Catatan 2ai). Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing lainnya dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan.

d. Pembagian Laba

Dalam RUPS Tahunan BRI tanggal 13 Maret 2023 dan 1 Maret 2022 pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	Laba tahun berjalan	
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Konsolidasian	43.494.766	26.406.603

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. SR-602/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023, ditetapkan pembagian dividen interim atas tahun buku 2023, yang kemudian telah disetujui oleh Direksi berdasarkan Rapat Direksi tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp12.666.432 (Catatan18).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

d. Pembagian Laba (lanjutan)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-820/MBU/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, ditetapkan pembagian dividen interim atas tahun buku 2022, yang kemudian telah disetujui oleh Direksi berdasarkan Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp8.602.823.

e. Reklasifikasi Saldo Laba - Telah Ditentukan Penggunaannya

Dalam rangka menjaga struktur permodalannya, BRI telah melakukan reklasifikasi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan tujuan) ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.093.056 pada tahun 2016. Hal ini dilakukan sehubungan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 pada tanggal 26 September 2016 tentang "Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum".

f. Saham bonus BRI

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menciptakan *sense of belonging* terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang kepada pekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Manajemen BRI memutuskan untuk memberikan program bonus kepemilikan saham bagi pekerja dalam program *Employee Stock Allocation* (ESA). Alokasi saham diberikan kepada masing-masing pekerja berdasarkan kinerja individu dan perusahaan.

Sesuai surat Direksi No. B.0016-DIR/HCS/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, BRI kembali melaksanakan program ESA dimana tanggal pemberiaan alokasi hak saham atau tanggal *grant* pada 2 Januari 2023, dengan akhir periode *vesting* pada 31 Desember 2024.

Nilai wajar dari ESA pada saat pemberian pada tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp406.008. Nilai wajar ESA diamortisasi selama masa *vesting* dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sedangkan akumulasi biaya selama periode *vesting* diakui dalam ekuitas.

Biaya ESA yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp216.763.

Cadangan saham bonus dari program sebelumnya yang telah jatuh tempo sebesar Rp210.266 yang mengakibatkan kenaikan tambahan modal disetor.

Biaya ESA yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp203.004.

Selain program ESA bagi karyawan, terdapat juga program *Long Term Incentives* yang ditujukan kepada direksi dan komisaris non independen BRI dimana tanggal pemberiaan alokasi hak saham atau tanggal *grant* pada 23 Desember 2022, dengan akhir periode *vesting* pada 31 Maret 2025.

Nilai wajar dari ESA pada saat pemberian pada tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp141.438. Nilai wajar ESA diamortisasi selama masa *vesting* dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sedangkan akumulasi biaya selama periode *vesting* diakui dalam ekuitas.

Biaya ESA yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp63.630.

Biaya ESA yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp70.719.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

- g. Perubahan proporsi kepemilikan oleh kepentingan non-pengendali di PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana para Pemegang Saham menyetujui untuk menerbitkan saham baru sehingga modal dasar BRI Life menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah), terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) (Catatan 1f).

Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 2 Maret 2021, FWD Financial Services Pte. Ltd akan mengambil alih sebanyak 936.458 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham sebagai kelanjutan dari kerjasama strategis jangka panjang sehingga komposisi kepemilikan saham BRI Life adalah BRI sebesar 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI sebesar 6,31% dan FWD Financial Services Pte. Ltd sebesar 29,86% (Catatan 1f).

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 2 Maret 2023, Pemegang Saham BRI Life memutuskan dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp339.200 menjadi Rp365.559, dengan mengeluarkan saham baru 263.580 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) lembar saham atau dalam nilai nominal yaitu sebesar Rp26.358 yang diambil seluruhnya oleh FWD Management Holdings Limited. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi: BRI 54,77%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 5,42% dan FWD Management Holdings Limited 39,82% (Catatan 1f).

Dikarenakan proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, BRI menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendalian dan kepentingan non-pengendalian untuk mencerminkan perubahan kepemilikan dalam BRI Life. Perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima BRI diakui secara langsung dalam ekuitas yaitu pada akun "Dampak Transaksi Pengendalian Non-Pengendali" sebesar Rp1.758.580.

- h. Kepentingan non-pengendali

Berikut di bawah ini adalah rincian dari kepentingan non-pengendali:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Kepentingan non-pengendali</u>		
<u>Entitas induk</u>		
PT Asuransi BRI Life	4.162.054	3.223.619
PT Bank Raya Indonesia Tbk	454.832	451.221
PT BRI Asuransi Indonesia	201.041	162.216
PT BRI Danareksa Sekuritas	171.415	156.079
PT Danareksa Investment Management	79.261	79.610
Entitas anak	39.983	28.561
Total	<u>5.108.586</u>	<u>4.101.306</u>

- i. Pengalihan Sebagian saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada Indonesia *Investment Authority*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi telah ditetapkan penambahan penyertaan modal negara kepada Lembaga Pengelola Investasi (dalam hal ini Indonesia *Investment Authority*). Penambahan penyertaan modal tersebut berasal dari pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada BRI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

- i. Pengalihan Sebagian saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada Indonesia *Investment Authority* (lanjutan)

Selanjutnya sesuai dengan Akta Notaris No. 33 Tentang Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada dan Dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pengalihan Sebagian saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada BRI kepada Indonesia *Investment Authority* telah efektif setelah ditandatanganinya Akta tersebut pada tanggal 23 Desember 2021.

Pengalihan sebagian saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada BRI kepada Indonesia *Investment Authority* sejumlah 5.498.021.834 lembar saham atau sebesar 3,63%, sehingga saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada BRI menjadi sejumlah 80.610.976.875 lembar saham atau 53,19%.

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Rupiah		
Kredit yang diberikan		
Mikro	78.421.645	68.456.601
Ritel	53.918.613	50.441.719
Korporasi	2.416.635	(1.278.984)
Piutang Pembiayaan	5.391.369	5.430.057
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	270.644	222.135
Obligasi	62.666	22.819
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	3.034.842	3.959.578
Obligasi	798.664	784.794
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	1.613	2.874
<i>Medium-Term Note</i>	27.498	15.893
Sertifikat Bank Indonesia	318.783	-
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	6.181.050	6.428.279
Obligasi	117.789	89.665
<i>Medium-Term Note</i>	1.210	5.530
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	-	3.324
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.916.308	1.058.843
Penempatan pada Bank Indonesia		
dan lembaga keuangan lain		
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	287.304	464.903
<i>Inter-bank call money</i>	62.443	6.096
Lain-lain	979.344	639.957
Giro pada Bank Indonesia	5.679	11.202
Lain-lain	1.118.747	654.742
	155.332.846	137.420.027

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
<u>Mata uang asing</u>		
Kredit yang diberikan		
Korporasi	5.867.864	1.339.841
Ritel	274.070	180.661
Piutang pembiayaan	4.466	9.101
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	22.765	6.073
Obligasi	1.998	1.134
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	1.027.700	1.007.129
Obligasi	283.604	84.018
Sertifikat Bank Indonesia	106.273	12.544
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	6.366	1.965
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	670.571	736.801
Obligasi	18.138	18.049
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	379	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain		
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	879.372	271.833
<i>Inter-bank call money</i>	376.852	325.502
Lain-lain	390.216	124.466
Giro pada Bank Indonesia	37	27
Lain-lain	788.870	217.602
	<u>10.719.541</u>	<u>4.336.746</u>
Total Pendapatan Bunga	<u>166.052.387</u>	<u>141.756.773</u>
Pendapatan syariah diperoleh dari:		
<u>Rupiah</u>		
<i>Murabahah</i>	10.245.474	7.819.097
<i>Mudharabah</i>	2.693.765	2.296.645
<i>Ujrah</i>	4.368	2.301
Total Pendapatan Syariah	<u>12.943.607</u>	<u>10.118.043</u>
Total	<u>178.995.994</u>	<u>151.874.816</u>

Dalam pendapatan bunga kredit yang diberikan segmen korporasi termasuk juga kerugian modifikasi sebesar Rp6.636.709 akibat restrukturisasi debitur signifikan di tahun 2022. Dimana nilai tercatat debitur sebelum restrukturisasi sebesar Rp10.355.605 dan setelah restrukturisasi menjadi Rp3.718.896.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
<u>Rupiah</u>		
Deposito berjangka	18.796.685	10.529.033
Giro	4.339.643	2.946.557
Pinjaman yang diterima	2.836.395	1.495.161
Surat berharga yang diterbitkan	2.455.463	3.042.773
Tabungan	1.339.742	1.160.765
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	617.032	8.548
Simpanan dari bank lain dan Lembaga keuangan lainnya	264.514	94.016
Pinjaman Subordinasi	35.310	39.432
Sertifikat Deposito	-	14.633
Lain-lain	3.989.035	3.697.558
	<u>34.673.819</u>	<u>23.028.476</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Giro	3.095.269	483.614
Pinjaman yang diterima	1.812.804	691.111
Deposito berjangka	1.575.165	579.772
Surat berharga yang diterbitkan	513.444	690.081
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	412.641	364.637
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	341.089	171.648
Tabungan	8.832	4.603
Lain-lain	225.801	255.759
	<u>7.985.045</u>	<u>3.241.225</u>
	<u>42.658.864</u>	<u>26.269.701</u>
Beban syariah	1.153.643	1.008.042
Total Beban Syariah	<u>1.153.643</u>	<u>1.008.042</u>
Total	<u>43.812.507</u>	<u>27.277.743</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN - NETO

Akun ini merupakan beban/(pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Kredit yang diberikan (Catatan 11f)	26.242.301	25.730.075
Piutang pembiayaan (Catatan 13c)	2.701.049	2.291.058
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya (Catatan 8d)	684.994	497.759
Tagihan Akseptasi (Catatan 14d)	114.993	(351.099)
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain (Catatan 6e)	(123)	(3.907)
Giro pada Bank lain (Catatan 5e)	(8.542)	(10.722)
Efek-efek (Catatan 7i)	(18.805)	(643.554)
Pinjaman Syariah (Catatan 12)	(192.441)	(124.704)
Total	29.523.426	27.384.906

35. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Gaji, upah dan tunjangan	21.811.379	20.058.197
Bonus, insentif dan tantiem	8.644.647	9.896.459
Program bagi pekerja (Catatan 42)	2.306.592	3.325.725
Pendidikan dan pelatihan	1.243.074	1.153.346
Tunjangan kesehatan	747.928	1.476.937
Iuran Jamsostek	979.670	962.339
Biaya kompensasi saham	257.314	-
Lain-lain	1.859.671	2.517.130
Total	37.850.275	39.390.133

Jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi adalah sebesar Rp195.671 dan Rp189.966 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sedangkan jumlah gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp83.417 dan Rp84.369 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 44).

Jumlah tantiem, bonus dan insentif Direksi, Dewan Komisaris dan manajemen kunci BRI yang dibayarkan adalah sebesar Rp750.925 dan Rp672.863 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 44).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Jasa <i>outsourcing</i>	4.774.261	4.452.691
Barang dan jasa pihak ketiga	4.166.991	3.277.794
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna (Catatan 16)	3.726.291	3.614.805
Perbaikan dan pemeliharaan	2.880.929	2.686.849
<i>E-Channel</i>	1.863.958	1.891.867
Sewa	1.811.534	2.071.605
Transportasi	1.579.211	1.404.568
Jasa profesional	820.808	834.173
Listrik dan air	774.227	693.924
Komunikasi	522.559	405.604
Peralatan kantor	458.565	486.775
Percetakan dan benda pos	349.349	380.011
Penelitian dan pengembangan produk	215.980	279.262
Instalasi komputer	101.399	82.586
Lain-lain	4.438.147	3.396.172
Total	28.484.209	25.958.686

37. (BEBAN) PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Laba penjualan aset tetap	125.187	242.077
Pendapatan sewa	458	6.759
Sumbangan	(363)	(28.361)
<i>Corporate Social Responsibility</i>	(28.914)	(29.084)
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK	(341.998)	(284.912)
Lain-lain - neto	(153.395)	384.185
Total	(399.025)	290.664

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN

a) Utang Pajak

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>BRI (entitas induk)</u>		
Pajak Penghasilan		
Pasal 25	1.461.224	1.135.923
Pasal 29	20.725	678.296
	<u>1.481.949</u>	<u>1.814.219</u>
<u>Entitas anak</u>		
Pajak Penghasilan	959.642	1.148.050
Pajak Pertambahan Nilai	105.248	91.513
	<u>1.064.890</u>	<u>1.239.563</u>
Total	<u>2.546.839</u>	<u>3.053.782</u>

b) Beban Pajak

	<u>Untuk tahun yang berakhir</u> <u>pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>BRI (entitas induk)</u>		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	10.817.648	12.135.836
Beban (Manfaat) pajak penghasilan tangguhan	3.101.244	(544.446)
	<u>13.918.892</u>	<u>11.591.390</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
<u>Entitas anak</u>		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	2.241.079	2.178.688
Beban (Manfaat) pajak penghasilan tangguhan	(155.307)	(581.584)
	<u>2.085.772</u>	<u>1.597.104</u>
Total	<u>16.004.664</u>	<u>13.188.494</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	76.429.712	64.596.701
Bagian laba entitas anak	(9.357.562)	(5.177.391)
Laba sebelum beban pajak BRI (entitas induk)	<u>67.072.150</u>	<u>59.419.310</u>
Perbedaan temporer:		
<i>Benefit</i> pekerja berbasis saham	115.688	-
Penyusutan aset tetap	64.402	(70.504)
Kerugian yang belum direalisasi dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(39.388)	(84.240)
Pembentukan penyisihan beban pekerja	(221.789)	3.510.840
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(339.718)	(516.872)
Cadangan kerugian aset produktif	(15.807.615)	26.279
	<u>(16.228.420)</u>	<u>2.865.503</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Perbedaan permanen:		
Promosi	2.188.093	1.845.752
Humas	860.662	84.507
Representasi dan sumbangan	176.675	217.004
Perjalanan dan santunan	45.459	43.112
Pendapatan dividen yang dibebaskan dari pajak	(95.133)	(1.540.279)
Laba dari Unit Kerja Luar Negeri	(353.604)	(510.122)
Bagian laba entitas asosiasi	(884.087)	(749.580)
Pendapatan yang merupakan bukan objek pajak	(1.187.800)	(599.931)
Lain-lain	5.340.996	2.797.546
	<u>6.091.261</u>	<u>1.588.009</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>56.934.991</u>	<u>63.872.822</u>
<u>Entitas induk</u>		
Beban pajak-kini	(10.817.648)	(12.135.836)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	10.796.923	11.457.540
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29	<u>(20.725)</u>	<u>(678.296)</u>
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama catatan tahun berjalan (Catatan 17)	2.089.356	-
<u>Entitas anak</u>		
Beban pajak-kini	(2.241.079)	(2.178.688)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	1.520.080	1.225.579
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29 - neto	<u>(720.999)</u>	<u>(953.109)</u>

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagaimana disebutkan di atas akan dilaporkan oleh BRI dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh Badan) tahun 2023 ke kantor pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Perusahaan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak penghasilan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	76.429.712	64.596.701
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	14.810.004	12.792.030
Pendapatan yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan		
BRI	1.157.340	301.722
Entitas anak	37.320	94.742
	16.004.664	13.188.494

c) Aset Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "aset pajak tangguhan") adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023			
	Saldo awal	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi	Dibebankan ke ekuitas	Saldo akhir
<u>Entitas Induk</u>				
Cadangan kerugian aset produktif	9.891.617	(3.003.447)	-	6.888.170
Penyisihan beban pekerja	3.147.827	(42.140)	-	3.105.687
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.226.755	(64.546)	-	1.162.209
Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.046.955	-	(469.741)	577.214
Pengukuran kembali program imbalan pasti	162.159	-	295.628	457.787
<i>Benefit</i> pekerja berbasis saham	43.047	21.981	-	65.028
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(9.456)	(7.484)	-	(16.940)
Penyusutan aset tetap	(93.585)	(5.608)	-	(99.193)
	15.415.319	(3.101.244)	(174.113)	12.139.962
Aset pajak tangguhan neto - entitas induk	3.297.675			3.465.500
Aset pajak tangguhan neto - entitas anak				
Total aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	18.712.994			15.605.462

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "aset pajak tangguhan") adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	Saldo awal	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi	Dibebankan ke ekuitas	Saldo akhir
Entitas Induk				
Cadangan kerugian aset produktif	9.886.624	4.993	-	9.891.617
Penyisihan beban pekerja	2.480.767	667.060	-	3.147.827
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.324.961	(98.206)	-	1.226.755
Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(438.445)	-	1.485.400	1.046.955
Pengukuran kembali program imbalan pasti	301.080	-	(138.921)	162.159
Benefit pekerja berbasis saham	43.047	-	-	43.047
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.549	(16.005)	-	(9.456)
Penyusutan aset tetap	(80.189)	(13.396)	-	(93.585)
Aset pajak tangguhan neto - entitas induk	13.524.394	544.446	1.346.479	15.415.319
Aset pajak tangguhan neto - entitas anak	2.760.504	-	-	3.297.675
Total aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	16.284.898	-	-	18.712.994

Manajemen BRI berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Adapun aturan tersebut telah menetapkan antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020, 2021, 2022, dan tahun selanjutnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan surat keterangan dari Datindo Entrycom No. DE/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang berkaitan dengan kepemilikan saham BRI dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut telah terpenuhi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan surat keterangan dari Datindo Entrycom No. DE/I/2023-0187 tanggal 4 Januari 2023 yang berkaitan dengan kepemilikan saham BRI dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut telah terpenuhi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 20 Desember 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2023 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya pembentukan cadangan pajak untuk tahun pajak yang belum diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

39. MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha BRI senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha bank semakin kompleks. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis, BRI dituntut untuk mengelola risiko secara terpadu dan sistematis, yakni pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko hukum.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis oleh BRI dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMR). KMR sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, dimulai dari kebijakan umum, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, proses dan penerapan manajemen risiko, sampai dengan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko diatur dalam kebijakan-kebijakan turunan sesuai dengan jenis risikonya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu, Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Direksi menunjuk Direktur khusus, dalam hal ini Direktur Manajemen Risiko, untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian risiko secara *bank-wide*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) individual dan RMC terintegrasi (konsolidasi dengan entitas anak) sebagai komite dalam sistem manajemen risiko BRI yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BRI termasuk kegagalan *settlement*. BRI melakukan identifikasi dan mengukur tingkat risiko calon debitur melalui pengembangan *Internal Risk Rating*. BRI memantau kualitas kredit sebagai bagian dari identifikasi dini dari pemburukan kredit. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui kebijakan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi. BRI menyusun kebijakan manajemen risiko kredit diantaranya tata kelola, pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit pada batasan geografis, dan pengelolaan limit konsentrasi per industri. *Rating* risiko kredit diperbarui secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut perbaikan.

Penerapan manajemen risiko kredit selain bertujuan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, juga merupakan suatu keharusan dalam rangka menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktik di perbankan. Penerapan manajemen risiko kredit diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis BRI namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap perkembangan kondisi usaha debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan risiko kredit BRI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan BRI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator.

BRI senantiasa melakukan penyempurnaan metodologi penilaian risiko kredit dalam rangka meningkatkan akurasi dalam pengelolaan risiko kredit khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

	31 Desember 2023		
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	35.000.000	1.404.769

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (lanjutan):

	31 Desember 2022		
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	51.014.678	52.833.334	1.818.656

Untuk kredit yang diberikan, BRI menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit BRI dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

Untuk *secured loans*, BRI menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan properti.
- b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
- c. Lainnya berupa garansi, jaminan pemerintah dan lembaga penjamin.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), BRI akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Unsecured loans terdiri dari *fully unsecured loans* seperti kartu kredit pembiayaan Mekaar dan *partially secured loans* seperti kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, kredit untuk para pensiunan dan kredit konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

Dengan demikian, meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans*, tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans*, tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pekerja dan surat keterangan pensiun.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko

a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

	31 Desember 2023							Total
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	101.829.850	3.217	506	9.400	4.117	7.537	54.494	101.909.121
Giro pada Bank lain	19.927.489	14.651	9.518	23.468	20.313	28.942	2.307.538	22.331.919
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	53.257.077	30.500	455.000	-	284.500	654.300	10.543.883	65.225.260
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	22.241.263	-	-	-	-	-	151.908	22.393.171
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	152.358.665	-	-	-	-	-	10.980.500	163.339.165
Biaya perolehan di amortisasi	144.234.988	-	-	-	-	-	1.123.980	145.358.968
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	36.130.139	479.057	237.311	2.480.045	3.174.169	2.225.356	9.169.327	53.895.404
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	-	-	-	-	-	-	33.595.231
Tagihan derivatif	911.683	-	-	-	-	-	-	911.683
Kredit yang diberikan								
Mikro	40.158.787	52.072.126	88.364.744	76.424.151	100.872.300	146.224.668	-	504.116.776
Ritel	112.912.806	32.565.692	54.879.538	65.124.492	85.315.694	143.876.696	1.264.808	495.939.726
Korporasi	160.688.906	8.266.139	2.163.276	185.601	5.740.485	5.401.406	15.250.391	197.696.204
Pinjaman syariah	2.102.106	1.147.451	924.377	2.350.532	2.780.464	4.363.290	-	13.668.220
Piutang pembiayaan	3.484.098	12.817.167	6.408.672	8.951.008	14.544.931	8.791.558	10.887	55.008.321
Tagihan akseptasi	9.270.656	12.151	48.994	236.494	13.296	47.942	587.875	10.217.408
Aset lain-lain*)	28.371.173	279.981	311.488	433.251	606.988	1.205.464	324.927	31.533.272
Total	921.474.917	107.688.132	153.803.424	156.218.442	213.357.257	312.827.159	51.770.518	1.917.139.849
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(88.168.856)
Bersih								1.828.970.993
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	8.865.216	633.214	44.272	566.310	902.962	435.256	-	11.447.230
Garansi yang diterbitkan	46.379.671	5.000.214	2.588.992	2.877.476	3.209.606	5.836.966	-	65.892.925
Total	55.244.887	5.633.428	2.633.264	3.443.786	4.112.568	6.272.222	-	77.340.155
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(4.884.777)
Bersih								72.455.378

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah, dan term deposit valas DHE

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (lanjutan):

31 Desember 2022								
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	150.880.482	3.044	729	9.163	479	51	41.202	150.935.150
Giro pada Bank lain	19.745.303	41.579	12.547	13.105	29.945	45.043	1.600.912	21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	59.483.459	229.000	16.800	-	202.000	38.600	10.432.042	70.401.901
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	20.965.114	-	-	-	-	-	150.759	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	133.584.217	-	-	-	-	-	17.218.350	150.802.567
Biaya perolehan di amortisasi	154.852.243	-	-	-	-	-	3.554.135	158.406.378
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	25.486.991	212.781	135.450	2.501.971	2.112.522	1.500.095	7.117.565	39.067.375
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	51.014.678	-	-	-	-	-	-	51.014.678
Tagihan derivatif	911.405	-	-	-	-	-	-	911.405
Kredit yang diberikan								
Mikro	41.326.001	53.878.956	86.808.067	76.283.493	99.502.660	145.167.899	-	502.967.076
Ritel	95.071.388	27.608.453	44.433.267	51.895.813	64.973.907	117.527.679	1.010.176	402.520.683
Korporasi	127.742.427	9.770.411	2.182.753	3.003.544	10.247.441	7.001.584	13.838.900	173.787.060
Pinjaman syariah	1.621.953	879.618	704.180	1.894.283	2.189.561	3.224.734	-	10.514.329
Piutang pembiayaan	3.387.076	11.590.101	5.707.570	8.170.095	12.180.484	8.252.591	-	49.287.917
Tagihan akseptasi	6.635.986	12.689	26.780	377.830	48.047	66.268	-	7.167.600
Aset lain-lain*)	22.065.538	327.579	287.280	346.133	450.080	1.061.174	749.163	25.286.947
Total	914.774.261	104.554.211	140.315.423	144.495.430	191.937.126	283.885.718	55.713.204	1.835.675.373
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(94.966.839)
Bersih								1.740.708.534
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	9.187.432	1.685.436	26.922	911.091	1.662.614	185.173	-	13.658.668
Garansi yang diterbitkan	54.041.372	6.131.558	3.195.108	2.770.756	3.299.117	5.417.087	-	74.854.998
Total	63.228.804	7.816.994	3.222.030	3.681.847	4.961.731	5.602.260	-	88.513.666
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(5.006.065)
Bersih								83.507.601

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember 2023							Total
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	-	-	-	-	-	-	101.909.121
Giro pada bank lain	-	22.331.919	-	-	-	-	-	22.331.919
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	48.916.961	16.308.299	-	-	-	-	-	65.225.260
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	11.603.446	9.057.989	8.651	873.111	2	573.417	276.555	22.393.171
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	131.245.386	26.253.605	27	4.591.790	1.716	1.240.605	6.036	163.339.165
Biaya perolehan di amortisasi	123.438.096	21.263.702	11.000	473.431	-	172.739	-	145.358.968
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	1.718.917	-	-	1.266.396	106.919	1.489.692	49.313.480	53.895.404
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	19.317.543	14.277.688	-	-	-	-	-	33.595.231
Tagihan derivatif	-	911.683	-	-	-	-	-	911.683
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	119.599.123	37.707.275	202.897.491	43.433.532	100.479.355	504.116.776
Ritel	-	136.426	35.061.191	21.196.205	177.194.758	18.148.165	244.202.981	495.939.726
Korporasi	1.207.000	-	30.265.580	45.361.102	17.066.890	10.964.404	92.831.228	197.696.204
Pinjaman syariah	-	-	887.084	299.970	5.319.974	808.641	6.352.551	13.668.220
Piutang pembiayaan	-	579.021	10.797.567	3.592.020	33.679.628	4.008.258	2.351.827	55.008.321
Tagihan akseptasi	-	-	-	313.613	-	918.308	8.985.487	10.217.408
Aset lain-lain*)	18.675.355	6.525.822	751	42.255	434.940	327.108	5.527.041	31.533.272
Total	458.031.825	117.646.154	196.630.974	115.717.168	436.702.318	82.084.869	510.326.541	1.917.139.849
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(88.168.856)
Bersih								1.828.970.993
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	-	30.889	3.853.331	2.566.169	40.770	626.549	4.329.522	11.447.230
Garansi yang diterbitkan	-	3.685.723	554.292	11.964.097	147.438	13.372.299	36.169.076	65.892.925
Total	-	3.716.612	4.407.623	14.530.266	188.208	13.998.848	40.498.598	77.340.155
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(4.884.777)
Bersih								72.455.378

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah, dan term deposit valas DHE

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

	31 Desember 2022							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	150.935.150	-	-	-	-	-	-	150.935.150
Giro pada bank lain	-	21.488.434	-	-	-	-	-	21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	55.188.633	15.213.268	-	-	-	-	-	70.401.901
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	10.605.908	3.572.717	-	181.539	-	40.886	6.714.823	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	120.244.522	22.231.398	-	4.244.793	-	1.405.012	2.676.842	150.802.567
Biaya perolehan di amortisasi	134.094.983	23.630.150	11.000	250.344	-	419.901	-	158.406.378
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	2.477.321	-	8.928.592	2.680.436	100.631	106.981	24.773.414	39.067.375
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.176.061	4.838.617	-	-	-	-	-	51.014.678
Tagihan derivatif	-	911.405	-	-	-	-	-	911.405
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	113.826.272	39.702.962	211.046.231	38.626.285	99.765.326	502.967.076
Ritel	-	226.633	21.067.550	14.653.665	136.799.791	14.305.470	215.467.574	402.520.683
Korporasi	305.303	-	25.515.870	47.533.803	11.785.946	12.048.710	76.597.428	173.787.060
Pinjaman syariah	-	-	747.434	214.341	3.375.200	69.154	6.108.200	10.514.329
Piutang pembiayaan	-	425.045	5.118.615	3.103.897	28.625.489	5.372.731	6.642.140	49.287.917
Tagihan akseptasi	6.635.986	12.689	26.780	377.830	48.047	66.268	-	7.167.600
Aset lain-lain*)	15.911.136	496.711	-	1.487.612	-	399.700	6.991.788	25.286.947
Total	542.575.003	93.047.067	175.242.113	114.431.222	391.781.335	72.861.098	445.737.535	1.835.675.373
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(94.966.839)
Bersih								1.740.708.534
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	-	-	-	7.666.832	77.049	1.479.426	4.435.361	13.658.668
Garansi yang diterbitkan	-	2.443.425	622.700	27.229.128	662.063	608.496	43.289.186	74.854.998
Total	-	2.443.425	622.700	34.895.960	739.112	2.087.922	47.724.547	88.513.666
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(5.006.065)
Bersih								83.507.601

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

a. Giro pada bank lain

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif.

b. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan)

c. Efek-efek

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh efek-efek diklasifikasikan "Lancar".

d. Piutang pembiayaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Mengalami penurunan nilai	675.752	501.260
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	2.234.453	1.556.428
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	52.098.116	47.230.229
	<u>55.008.321</u>	<u>49.287.917</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.483.915)	(3.477.948)
Total	<u>50.524.406</u>	<u>45.809.969</u>

e. Kredit yang diberikan dan pinjaman syariah

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai ^{*)}	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Rupiah</u>					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	324.845.469	23.235.384	24.040.612	17.380.592	389.502.057
Pertanian	159.291.356	4.158.707	6.945.516	9.178.589	179.574.168
Perindustrian	59.888.517	2.497.974	3.857.594	6.557.963	72.802.048
Jasa dunia usaha	54.030.724	2.726.593	3.779.057	3.543.519	64.079.893
Listrik, gas dan air	11.190.010	90.535	74.665	145.921	11.501.131
Konstruksi	21.942.392	616.255	485.233	6.623.769	29.667.649
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	22.083.188	910.144	848.650	1.922.255	25.764.237
Jasa pelayanan sosial	5.902.571	399.620	332.307	408.163	7.042.661
Pertambangan	11.582.453	179.354	93.206	500.152	12.355.165
Lain-lain	292.865.061	5.061.289	8.947.437	4.725.767	311.599.554
	<u>963.621.741</u>	<u>39.875.855</u>	<u>49.404.277</u>	<u>50.986.690</u>	<u>1.103.888.563</u>

*) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan dan pinjaman syariah (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai ^{*)}	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Mata uang asing</u>					
Perindustrian	27.711.170	463	33.951	4.604.035	32.349.619
Pertanian	10.183.322	-	-	488.378	10.671.700
Listrik, gas dan air	19.679.604	-	-	-	19.679.604
Perdagangan, perhotelan dan restoran	6.902.186	2.669	-	1.052.197	7.957.052
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.131.779	-	-	74.285	1.206.064
Pertambangan	17.681.313	-	-	1.814.075	19.495.388
Jasa pelayanan sosial	1.207.241	-	-	-	1.207.241
Jasa dunia usaha	5.670.372	-	107.213	2.690.444	8.468.029
Konstruksi	5.016.705	-	-	131.408	5.148.113
Lain-lain	1.339.192	-	2.725	7.636	1.349.553
	<u>96.522.884</u>	<u>3.132</u>	<u>143.889</u>	<u>10.862.458</u>	<u>107.532.363</u>
Total	1.060.144.625	39.878.987	49.548.166	61.849.148	1.211.420.926
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(81.017.973)
Bersih					1.130.402.953

	31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai ^{*)}	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Rupiah</u>					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	270.598.277	51.737.757	17.390.013	15.148.331	354.874.378
Pertanian	131.013.202	6.934.234	3.603.995	12.316.969	153.868.400
Perindustrian	57.399.888	5.515.252	2.699.971	7.076.290	72.691.401
Jasa dunia usaha	45.021.262	6.155.829	2.420.618	3.036.574	56.634.283
Konstruksi	18.298.376	1.355.957	444.312	7.586.856	27.685.501
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	10.142.311	1.923.318	518.692	6.096.134	18.680.455
Listrik, gas dan air	13.149.691	158.508	48.924	815.222	14.172.345
Jasa pelayanan sosial	4.312.624	836.998	211.589	548.658	5.909.869
Pertambangan	2.766.125	282.380	74.720	695.413	3.818.638
Lain-lain	261.933.718	12.515.405	6.616.108	3.579.440	284.644.671
	<u>814.635.474</u>	<u>87.415.638</u>	<u>34.028.942</u>	<u>56.899.887</u>	<u>992.979.941</u>

^{*)} Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan dan pinjaman syariah (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai ^{*)}	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Mata uang asing</u>					
Perindustrian	26.726.014	570	98.184	5.104.382	31.929.150
Listrik, gas dan air	20.829.686	-	-	1.371.043	22.200.729
Pertanian	6.919.636	-	-	2.030.138	8.949.774
Jasa dunia usaha	5.536.793	5.848	-	2.907.310	8.449.951
Perdagangan, perhotelan dan restoran	6.467.842	-	-	1.075.554	7.543.396
Pertambangan	8.503.161	-	-	2.298.276	10.801.437
Konstruksi	4.592.170	-	-	2.285	4.594.455
Jasa pelayanan sosial	538.584	-	-	-	538.584
Pengangkutan, perdagangan dan komunikasi	535.165	-	-	265.740	800.905
Lain-lain	991.672	-	3.183	5.971	1.000.826
	<u>81.640.723</u>	<u>6.418</u>	<u>101.367</u>	<u>15.060.699</u>	<u>96.809.207</u>
Total	896.276.197	87.422.056	34.130.309	71.960.586	1.089.789.148
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(89.610.033)
Bersih					1.000.179.115

^{*)} Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

f. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 aset keuangan ini mengalami penurunan nilai baik secara individu dan kolektif.

g. Tagihan akseptasi

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif dan individual.

h. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

i. Aset lain-lain

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan)

j. Rekening administratif

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun-akun administratif ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Rupiah</u>		
Garansi yang diterbitkan	41.712.234	47.796.102
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	2.228.611	2.571.824
	<u>43.940.845</u>	<u>50.367.926</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Garansi yang diterbitkan	24.180.691	27.058.896
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	9.218.619	11.086.844
	<u>33.399.310</u>	<u>38.145.740</u>
	77.340.155	88.513.666
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4.884.777)</u>	<u>(5.006.065)</u>
Total	<u>72.455.378</u>	<u>83.507.601</u>

4. Kualitas aset keuangan

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*.

	31 Desember 2023				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai ^{*)}	Total
	High Grade	Standard Grade			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	-	-	-	101.909.121
Giro pada bank lain	22.262.708	69.211	-	-	22.331.919
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	65.225.260	-	-	-	65.225.260
Efek-efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	13.728.657	8.664.514	-	-	22.393.171
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	144.895.186	18.443.979	-	-	163.339.165
Biaya perolehan diamortisasi	124.204.129	21.154.839	-	-	145.358.968
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	53.895.404	-	-	-	53.895.404
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	-	-	-	33.595.231
Tagihan derivatif	911.683	-	-	-	911.683
Kredit yang diberikan					
Mikro	448.121.725	14.430.771	29.148.737	12.415.543	504.116.776
Ritel	431.464.628	25.409.037	19.291.593	19.774.468	495.939.726
Korporasi	168.142.815	-	141.163	29.412.226	197.696.204
Pinjaman syariah	12.415.457	39.179	966.673	246.911	13.668.220
Piutang pembiayaan	47.716.681	4.381.435	2.234.453	675.752	55.008.321
Tagihan akseptasi	10.217.408	-	-	-	10.217.408
Aset lain-lain ^{*)}	29.531.651	652.136	1.252.273	97.212	31.533.272
Total	<u>1.708.237.744</u>	<u>93.245.101</u>	<u>53.034.892</u>	<u>62.622.112</u>	<u>1.917.139.849</u>

^{*)} Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah, dan *term deposit valas DHE*

^{**)} Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*. (lanjutan)

	31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai**)	Total
	High Grade	Standard Grade			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	150.935.150	-	-	-	150.935.150
Giro pada bank lain	21.129.710	358.724	-	-	21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	70.401.901	-	-	-	70.401.901
Efek-efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	20.955.201	160.672	-	-	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	136.399.669	14.402.898	-	-	150.802.567
Biaya perolehan diamortisasi	156.934.530	1.471.848	-	-	158.406.378
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	38.467.643	-	599.732	-	39.067.375
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	51.014.678	-	-	-	51.014.678
Tagihan derivatif	911.405	-	-	-	911.405
Kredit yang diberikan					
Mikro	437.807.487	36.937.719	19.838.554	8.383.316	502.967.076
Ritel	323.608.890	45.667.970	13.591.274	19.652.549	402.520.683
Korporasi	130.043.450	-	98.184	43.645.426	173.787.060
Pinjaman syariah	9.409.869	222.868	602.297	279.295	10.514.329
Piutang pembiayaan	45.068.685	2.161.544	1.556.428	501.260	49.287.917
Tagihan akseptasi	7.167.600	-	-	-	7.167.600
Aset lain-lain*)	18.497.543	6.181.814	607.590	-	25.286.947
Total	1.618.753.411	107.566.057	36.894.059	72.461.846	1.835.675.373

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

**) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Tinggi (*High Grade*)

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang telah terdaftar pada Bursa.
- b) Kredit yang diberikan, piutang pembiayaan dan pinjaman syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta tidak pernah direstrukturasikan.
- c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi dengan *rating* minimal idA- (Pefindo), A- (Fitch), atau A3 (Moody's).
- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

2. Tingkat Standar (*Standard Grade*)

- a) Giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar pada Bursa.
- b) Kredit yang diberikan, piutang pembiayaan dan pinjaman syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, namun pernah direstrukturisasi.
- c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi, yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan memiliki kapasitas finansial yang memadai dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek dan obligasi dengan *rating* antara idBBB+ sampai dengan idBBB- (Pefindo), BBB+ sampai dengan BBB- (Fitch), atau Baa1 sampai dengan Baa3 (Moody's).
- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

Analisis Kualitas Kredit

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

a. Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

1. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
2. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank juga menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

1. Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD)
2. Indikator kualitatif
3. Tertunggak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

b. *Credit Risk Grades*

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, dan estimasi kondisi ekonomi.

c. Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur *PD term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (seperti restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), Tingkat Konsumsi, dan Tingkat Investasi. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan bervariasi untuk setiap portofolio dan termasuk perubahan kuantitatif pada PD dan faktor kualitatif, termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan.

Risiko kredit dari eksposur tertentu dianggap telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika, berdasarkan permodelan kuantitatif Bank, *probability of default* (PD) atas umur tersisa telah meningkat signifikan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Bank juga dapat menggunakan penilaian dari analisis kredit dan, jika mungkin, pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa mungkin eksposur telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dan pengaruhnya mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam analisis kuantitatif secara tepat waktu.

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

e. Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

f. Definisi Gagal Bayar (*Default*)

Grup menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya secara penuh tanpa bantuan (*recourse*) dari kelompok usahanya; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada kelompok usahanya.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Grup mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif - seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif - seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

a. Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

	2023	2024
Pertumbuhan PDB	dasar 5,17% Kisaran antara 4,94 hingga 5,04%	dasar 5,37% Kisaran antara 3,16 hingga 5,59%
Tingkat Konsumsi	dasar 5,06% Kisaran antara 4,54 hingga 5,22%	dasar 5,11% Kisaran antara 2,70% hingga 5,32%
Tingkat Investasi	dasar 4,63% Kisaran antara 2,11 hingga 5,77%	dasar 6,79% Kisaran antara 4,56 hingga 7,00%

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD)
- *Loss of Given Default* (LGD)
- *Exposure at Default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan *rating* yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif, kualitatif, dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai (lanjutan)

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. LGD juga diamati dengan mempertimbangkan jaminan tunai yang merupakan bagian intergral dari aset keuangan terhutang serta biaya yang dikeluarkan dalam proses pemulihan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis.

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- Jenis instrumen;
- Peringkat risiko kredit;
- Jenis agunan;
- Tanggal pengakuan awal;
- Sisa waktu jatuh tempo.

5. Berdasarkan PSAK No. 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, pinjaman syariah, dan piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

	31 Desember 2023			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	11.816.893	7.622.524	9.709.320	29.148.737
Ritel	9.468.675	4.877.863	4.945.055	19.291.593
Korporasi	141.163	-	-	141.163
Pinjaman syariah	620.753	345.920	-	966.673
Piutang pembiayaan	65.996	1.466.403	702.054	2.234.453
Total	22.113.480	14.312.710	15.356.429	51.782.619

	31 Desember 2022			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	8.249.936	5.197.796	6.390.822	19.838.554
Ritel	6.615.854	3.522.177	3.453.243	13.591.274
Korporasi	98.184	-	-	98.184
Pinjaman syariah	342.181	167.438	92.678	602.297
Piutang pembiayaan	1.556.428	-	-	1.556.428
Total	16.862.583	8.887.411	9.936.743	35.686.737

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan BRI untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BRI.

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (PPPMRL) yang mencakup kebijakan manajemen likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas (*maturity gap*), *net stable funding ratio* dan *liquidity coverage ratio*, pedoman penetapan limit risiko likuiditas, *stress test* risiko likuiditas, *contingency funding plan* dan sistem informasi risiko likuiditas. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan kecukupan pengelolaan risiko likuiditas harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi dan penghimpunan DPK yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* secara triwulanan yang disampaikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris BRI melalui *Risk Management Committee* (RMC). Tujuan dari *stress testing* yaitu untuk mengukur ketahanan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama kondisi krisis (*stress*). Selain itu, *stress test* juga digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan atau meningkatkan rencana pendanaan darurat (*contingency plan*), dan limit risiko likuiditas.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi *mismatch* likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

31 Desember 2023						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	31.603.784	31.603.784	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	101.909.121	-	-	-	-
Giro pada bank lain	22.331.919	22.331.919	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(9.984)	-	-	-	-	(9.984)
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain	65.225.260	61.436.447	1.242.493	2.546.320	-	-
Cadangan kerugian	(1.860)	-	-	-	-	(1.860)
Efek-efek	331.091.304	194.565.435	8.999.005	18.170.889	109.355.975	-
Cadangan kerugian	(81.510)	-	-	-	-	(81.510)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	53.895.404	29.072.292	16.049.621	8.773.491	-	-
Cadangan kerugian	(2.323.916)	-	-	-	-	(2.323.916)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	23.830.224	-	9.569.883	195.124	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

31 Desember 2023						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset (lanjutan)						
Tagihan Derivatif	911.683	143.622	156.256	227.894	383.911	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	504.116.776	6.385.698	11.020.678	62.977.195	423.733.205	-
Ritel	495.939.726	18.207.749	29.158.883	158.827.704	289.745.390	-
Korporasi	197.696.204	5.666.577	10.563.086	28.592.473	152.874.068	-
Cadangan kerugian	(79.924.211)	-	-	-	-	(79.924.211)
Pinjaman syariah	13.668.220	17.091	84.009	8.227.108	5.340.012	-
Cadangan kerugian	(1.093.762)	-	-	-	-	(1.093.762)
Piutang pembiayaan	55.008.321	629.914	1.818.246	29.138.207	23.421.954	-
Cadangan kerugian	(4.483.915)	-	-	-	-	(4.483.915)
Tagihan akseptasi	10.217.408	2.485.675	4.732.675	2.999.058	-	-
Cadangan kerugian	(249.698)	-	-	-	-	(249.698)
Aset lain-lain*)	31.533.272	2.427.759	6.876.823	9.212.645	1.331.761	11.684.284
	1.860.574.777	500.713.307	90.701.775	339.262.867	1.006.381.400	(76.484.572)
Liabilitas						
Liabilitas segera	30.651.807	14.808.230	1.591.242	14.252.335	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	346.124.372	-	-	-	-	346.124.372
Tabungan	527.945.550	-	-	-	-	527.945.550
Deposito berjangka	484.258.839	116.496.420	189.212.807	177.096.845	1.452.767	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	11.958.319	8.595.131	1.834.885	1.528.303	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	19.079.458	3.024.325	300.454	7.258.781	8.495.898	-
Liabilitas derivatif	925.210	274.872	200.232	66.126	383.980	-
Liabilitas akseptasi	10.217.408	2.485.675	4.732.675	2.999.058	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	49.637.581	1.020.000	8.634.126	18.223.255	21.760.200	-
Pinjaman yang diterima	98.850.813	41.422.439	21.601.299	8.057.724	27.769.351	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	496.683	-	-	-	496.683	-
Liabilitas lain-lain**)	14.052.073	4.264.064	5.637.757	174.704	3.898.932	76.616
	1.594.198.113	192.391.156	233.745.477	229.657.131	64.257.811	874.146.538
Perbedaan Jatuh Tempo	266.376.664	308.322.151	(143.043.702)	109.605.736	942.123.589	(950.631.110)

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah dan *term deposit valas DHE*

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dana *tabarru'*, dan *term deposit valas DHE*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

31 Desember 2022						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	27.407.478	27.407.478	-	-	-	-
Giro pada Bank						
Indonesia	150.935.150	150.935.150	-	-	-	-
Giro pada bank lain	21.488.434	21.488.434	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(18.577)	-	-	-	-	(18.577)
Penempatan pada Bank						
Indonesia dan Lembaga keuangan lain	70.401.901	67.806.648	554.458	2.040.795	-	-
Cadangan kerugian	(1.981)	-	-	-	-	(1.981)
Efek-efek	330.324.818	180.858.473	6.743.221	18.893.624	123.829.500	-
Cadangan kerugian	(82.835)	-	-	-	-	(82.835)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	39.067.375	11.843.924	14.829.717	12.393.734	-	-
Cadangan kerugian	(1.638.929)	-	-	-	-	(1.638.929)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	51.014.678	44.525.866	4.678.302	1.810.510	-	-
Tagihan Derivatif	911.405	222.094	82.911	78.715	527.685	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	502.967.076	6.013.367	11.184.966	60.345.250	425.423.493	-
Ritel	402.520.682	15.337.476	21.482.703	137.258.265	228.442.238	-
Korporasi	173.787.061	12.204.324	5.048.464	27.081.692	129.452.581	-
Cadangan kerugian	(88.323.830)	-	-	-	-	(88.323.830)
Pinjaman syariah	10.514.329	15.365	22.165	7.379.222	3.097.577	-
Cadangan kerugian	(1.286.203)	-	-	-	-	(1.286.203)
Piutang pembiayaan	49.287.917	7.085.480	1.873.852	24.774.175	15.554.410	-
Cadangan kerugian	(3.477.948)	-	-	-	-	(3.477.948)
Tagihan akseptasi	7.167.600	2.149.877	2.816.790	2.200.933	-	-
Cadangan kerugian	(136.536)	-	-	-	-	(136.536)
Aset lain-lain*)	25.286.947	587.031	3.293.586	2.460.394	4.140.171	14.805.765
	1.768.116.012	548.480.987	72.611.135	296.717.309	930.467.655	(80.161.074)
Liabilitas						
Liabilitas segera	24.910.579	-	-	-	-	24.910.579
Simpanan nasabah						
Giro	349.755.590	349.755.590	-	-	-	-
Tabungan	522.647.920	522.647.920	-	-	-	-
Deposito berjangka	435.480.503	157.614.528	136.820.206	138.687.411	2.358.358	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	9.334.547	5.778.567	2.539.965	1.016.015	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.997.592	508.193	3.687.552	1.710.879	4.090.968	-
Liabilitas derivatif	783.921	163.536	82.129	28.035	510.221	-

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dan dana *tabarru'*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

31 Desember 2022						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas (lanjutan)						
Liabilitas akseptasi	7.167.600	2.149.877	2.816.790	2.200.933	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	63.611.761	1.836.939	650.000	17.565.933	43.558.889	-
Pinjaman yang diterima	79.371.200	22.275.713	18.581.962	8.717.512	29.796.013	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.988	-	-	499.614	2.374	-
Liabilitas lain-lain**)	13.285.936	1.133.947	2.187.168	4.448.482	4.674.026	842.313
	1.516.849.137	1.063.864.810	167.365.772	174.874.814	84.990.849	25.752.892
Perbedaan Jatuh Tempo	251.266.875	(515.383.823)	(94.754.637)	121.842.495	845.476.806	(105.913.966)

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dan dana *tabarru'*

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas keuangan sesuai kontrak berdasarkan arus kas *undiscounted* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas						
Liabilitas segera	30.651.807	14.808.230	1.591.242	14.252.335	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	346.124.372	-	-	-	-	346.124.372
Tabungan	527.945.550	-	-	-	-	527.945.550
Deposito berjangka	489.862.004	4.935.530	2.205.417	2.004.786	480.716.271	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	12.007.709	9.498.503	1.348.574	1.160.632	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	20.054.639	391.556	5.954.035	4.289.283	9.419.765	-
Liabilitas derivatif	925.210	279.313	195.791	66.125	383.981	-
Liabilitas akseptasi	10.217.408	2.485.675	4.732.675	2.999.058	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	44.260.590	106.809	7.865.719	15.218.800	21.069.262	-
Pinjaman yang diterima	98.850.813	36.495.657	22.874.547	9.674.121	29.806.488	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	647.723	-	-	-	647.723	-
Liabilitas lain-lain****)	14.052.073	4.264.064	5.637.757	174.704	3.898.932	76.616
	1.595.599.898	73.265.337	52.405.757	49.839.844	545.942.422	874.146.538

****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dana *tabarru'*, dan *term deposit valas DHE*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas keuangan sesuai kontrak berdasarkan arus kas *undiscounted* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2022						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas						
Liabilitas segera	24.910.579	10.157.504	944.115	13.808.960	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	349.755.590	-	-	-	-	349.755.590
Tabungan	522.647.920	-	-	-	-	522.647.920
Deposito berjangka	441.437.271	188.024.029	125.706.609	125.579.069	2.127.564	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	9.359.227	6.710.638	1.712.778	935.811	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.108.796	988.674	4.520.854	2.819.012	1.780.256	-
Liabilitas derivatif	783.921	163.536	82.129	28.035	510.221	-
Liabilitas akseptasi Surat berharga yang diterbitkan	7.167.600	2.149.877	2.816.790	2.200.933	-	-
Pinjaman yang diterima	71.406.463	-	4.567.127	24.899.759	41.939.577	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	79.371.190	22.275.713	18.581.952	8.717.512	29.796.013	-
Liabilitas lain-lain***)	518.929	-	-	518.929	-	-
	13.285.936	1.133.947	2.187.168	4.448.482	4.674.026	842.313
	1.530.753.422	231.603.918	161.119.522	183.956.502	80.827.657	873.245.823

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dana *tabarru'*, dan *term deposit valas DHE*

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki BRI, baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* dan risiko pasar yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. *Middle Office* dapat melakukan pengukuran risiko pasar menggunakan model internal (*Value-at-Risk*) yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, *Middle Office* juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar.

1. Value-at-Risk (VaR): Tujuan Penggunaan Metode dan Keterbatasannya

BRI menggunakan pendekatan model *internal* untuk mengukur potensi kerugian VaR akibat perubahan harga pasar dari portofolio *trading* berdasarkan pada data historis. Potensi kerugian VaR dari risiko pasar diukur dengan menggunakan asumsi perubahan faktor risiko mengikuti pola distribusi normal. BRI menggunakan VaR untuk menghitung risiko nilai tukar untuk posisi *trading* dan *banking book* serta menghitung risiko suku bunga untuk posisi *trading book*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

2. Asumsi *Value-at-Risk* (VaR)

Potensi kerugian VaR dihitung berdasarkan nilai estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence level*) di 99% dan posisi risiko pasar yang tidak berubah dalam 1 (satu) hari (*holding period*). Hal ini menunjukkan potensi kerugian yang dapat melebihi nilai VaR dalam kondisi pasar normal, rata-rata dapat terjadi satu kali dalam seratus hari. Metode yang digunakan dalam pengukuran VaR adalah metode Historical VaR.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022:

	31 Desember 2023	
	Nilai Tukar ^{*)}	Suku Bunga
Rata-rata Harian	32.180,53	226.723,86
Tertinggi	67.411,01	333.276,04
Terendah	113,78	120.292,93
	31 Desember 2022	
	Nilai Tukar ^{*)}	Suku Bunga
Rata-rata Harian	19.040,59	71.324,38
Tertinggi	184.176,64	150.840,24
Terendah	121,14	28.410,52

^{*)} Termasuk *trading* dan *banking book*.

3. *Back Testing*

Tujuan dilaksanakannya *back testing* yaitu untuk memastikan bahwa hasil perhitungan internal model untuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar telah sesuai. Ketika melakukan *back testing*, BRI membandingkan antara estimasi VaR harian dengan realisasi perubahan harga.

Berdasarkan prosedur *back testing* untuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga, hasil kerugian sebenarnya sepanjang tahun telah sesuai secara signifikan dengan VaR *forecast model*.

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book*

a. Risiko Tingkat Suku Bunga

Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus kas di masa depan.

BRI telah mengembangkan metodologi pengukuran dampak pengaruh pergerakan suku bunga dalam *banking book* melalui *Interest Rate Risk in The Banking Book* sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Posisi Desember 2023, secara individu BRI mempunyai nilai *delta EVE* (*Economic Value of Equity*) sebesar 6,43% (perbandingan terhadap modal Tier 1). Delta EVE BRI di bawah RAS BRI (7,43%) dan di bawah batas regulator (15,00%). Secara konsolidasi, BRI mempunyai nilai *delta EVE* (*Economic Value of Equity*) sebesar 6,45% (perbandingan terhadap modal Tier 1).

Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan menimbang *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. *Review* atas penetapan suku bunga dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan dalam forum *Asset and Liability Committee* (ALCO).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	Rupiah (%)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Aset</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	5,45	5,21
Efek-efek	6,61	6,82
Kredit yang diberikan	11,79	11,37
Piutang pembiayaan	16,86	17,40
<u>Liabilitas</u>		
Simpanan nasabah		
Giro	2,72	2,07
Tabungan	0,26	0,22
Deposito berjangka	4,71	3,06
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	1,76	1,89
Pinjaman yang diterima	0,02	0,02
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	4,37	2,15
Surat berharga yang diterbitkan	7,04	5,69
	Valas (%)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Aset</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	2,68	3,75
Efek-efek	3,52	3,50
Kredit yang diberikan	5,07	4,28
Piutang pembiayaan	6,53	6,29
<u>Liabilitas</u>		
Simpanan nasabah		
Giro	2,62	0,61
Tabungan	0,19	0,12
Deposito berjangka	3,18	0,93
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	2,15	1,80
Pinjaman yang diterima	0,00	3,07
Surat berharga yang diterbitkan	3,95	4,29

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas pendapatan bunga - neto Bank BRI untuk satu tahun ke depan terhadap pergerakan suku bunga dari portofolio aset dan liabilitas yang memiliki suku bunga pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Bank BRI saja) yaitu:

	Peningkatan 400 bps	Penurunan 400 bps
31 Desember 2023	(15.434.868)	15.984.479
31 Desember 2022	(13.192.513)	12.121.776

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book* dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BRI.

31 Desember 2023	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 2.317.803

31 Desember 2022	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 1.144.881

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*):

31 Desember 2023						
Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset						
Kas	31.603.784	-	-	-	-	31.603.784
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	-	-	-	-	101.909.121
Giro pada Bank lain	22.331.919	-	-	-	-	22.331.919
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	62.753.990	2.471.270	-	-	-	65.225.260
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	22.393.171	-	22.393.171
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	163.339.165	-	163.339.165
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	145.358.968	-	145.358.968
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	45.121.913	8.773.491	-	-	-	53.895.404

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (lanjutan):

31 Desember 2023

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset (lanjutan)						
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.350.734	244.497	-	-	-	33.595.231
Tagihan derivatif	-	-	-	-	911.683	911.683
Kredit yang diberikan						
Mikro	385.330	61.751	92.656	503.577.039	-	504.116.776
Ritel	46.736.868	110.497.963	169.044.202	169.660.693	-	495.939.726
Korporasi	16.229.661	31.128.033	150.338.510	-	-	197.696.204
Pinjaman syariah	-	-	-	13.668.220	-	13.668.220
Piutang pembiayaan	13.694	8.947	418	54.985.262	-	55.008.321
Tagihan akseptasi	7.218.350	2.999.058	-	-	-	10.217.408
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.749.102	1.749.102
Aset lain-lain**)	969	-	-	7.189.322	24.342.981	31.533.272
	367.656.333	156.185.010	319.475.786	1.080.171.840	27.003.766	1.950.492.735
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	30.651.807	30.651.807
Simpanan nasabah						
Giro	239.203.910	-	-	106.920.462	-	346.124.372
Tabungan	176.757.401	-	-	351.188.149	-	527.945.550
Deposito berjangka	116.496.420	189.209.612	177.102.416	1.450.391	-	484.258.839
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	10.430.018	1.528.301	-	-	-	11.958.319
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6.365.596	12.713.862	-	-	-	19.079.458
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	925.210	925.210
Liabilitas akseptasi	7.218.350	2.999.058	-	-	-	10.217.408
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	49.637.581	-	49.637.581
Pinjaman yang diterima	59.331.954	9.712.371	29.806.488	-	-	98.850.813
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	496.683	-	496.683
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	5.839.397	8.212.676	14.052.073
	615.803.649	216.163.204	206.908.904	515.532.663	39.789.693	1.594.198.113
Perbedaan (gap) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	(248.147.316)	(59.978.194)	112.566.882	564.639.177	(12.785.927)	356.294.622

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah, dan *term deposit valas DHE*

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'*, dan *term deposit valas DHE*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (lanjutan):

31 Desember 2022

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset						
Kas	27.407.478	-	-	-	-	27.407.478
Giro pada Bank Indonesia	150.935.150	-	-	-	-	150.935.150
Giro pada Bank lain	21.488.434	-	-	-	-	21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	68.361.106	2.040.795	-	-	-	70.401.901
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	21.115.873	-	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	150.802.567	-	150.802.567
Biaya perolehan di amortisasi	-	-	-	158.406.378	-	158.406.378
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	26.673.641	12.393.734	-	-	-	39.067.375
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	49.204.168	1.810.510	-	-	-	51.014.678
Tagihan derivatif	-	-	-	-	911.405	911.405
Kredit yang diberikan						
Mikro	529.458	2.247.924	45.408.082	454.781.612	-	502.967.076
Ritel	36.034.322	93.739.042	118.254.236	154.493.082	-	402.520.682
Korporasi	17.544.255	26.756.901	129.485.905	-	-	173.787.061
Pinjaman Syariah	-	-	-	10.514.329	-	10.514.329
Piutang pembiayaan lain	17.764	48.051	58.501	49.163.601	-	49.287.917
Tagihan akseptasi	4.966.667	2.200.933	-	-	-	7.167.600
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.774.614	1.774.614
Aset lain-lain**)	2.202.856	-	-	-	23.084.090	25.286.946
	405.365.299	141.237.890	293.206.724	999.277.442	25.770.109	1.864.857.464

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dan dana *tabarru'*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (lanjutan):

31 Desember 2022						
Suku bunga mengambang						
Keterangan	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	24.910.579	24.910.579
Simpanan nasabah						
Giro	250.015.590	-	-	99.740.000	-	349.755.590
Tabungan	202.651.752	-	-	319.996.168	-	522.647.920
Deposito berjangka	41.032.273	121.411.897	1.945.786	271.090.547	-	435.480.503
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	8.318.532	1.016.015	-	-	-	9.334.547
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.195.745	1.710.879	4.090.968	-	-	9.997.592
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	783.921	783.921
Liabilitas akseptasi	4.966.667	2.200.933	-	-	-	7.167.600
Surat berharga yang Diterbitkan	-	-	-	63.611.761	-	63.611.761
Pinjaman yang diterima	40.857.675	8.717.512	29.796.013	-	-	79.371.200
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	501.988	-	501.988
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	13.285.936	13.285.936
	<u>552.038.234</u>	<u>135.057.236</u>	<u>35.832.767</u>	<u>754.940.464</u>	<u>38.980.436</u>	<u>1.516.849.137</u>
Perbedaan (<i>gap</i>) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	<u>(146.672.935)</u>	<u>6.180.654</u>	<u>257.373.957</u>	<u>244.336.978</u>	<u>(13.210.327)</u>	<u>348.008.327</u>

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dan dana *tabarru'*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN (Posisi Devisa Neto).

Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 mengenai Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, per mata uang, sebagai berikut:

Mata Uang	31 Desember 2023		
	Aset	Liabilitas	PDN
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	331.100.472	331.199.191	98.719
Dolar Kanada	38.691	24.303	14.388
Renminbi	1.230.517	1.176.670	53.847
Yen Jepang	5.574.573	4.698.897	875.676
Dolar Singapura	3.769.803	3.802.661	32.858
Euro Eropa	3.700.437	3.724.175	23.738
Dolar Australia	372.328	305.103	67.225
Pound Sterling Inggris	1.085.793	968.132	117.660
Lain-lain	858.490	617.292	241.198
			1.525.309
Modal (Catatan 48a)			250.568.767
Rasio PDN			0,62%
Mata Uang	31 Desember 2022		
	Aset	Liabilitas	PDN
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	286.822.033	285.848.495	973.538
Dolar Kanada	41.197	80.446	39.249
Renminbi	858.626	801.073	57.553
Yen Jepang	1.318.247	1.267.972	50.275
Dolar Singapura	3.805.263	4.180.177	374.914
Euro Eropa	2.934.476	2.815.341	119.135
Dolar Australia	410.625	341.148	69.477
Pound Sterling Inggris	439.996	316.310	123.686
Lain-lain	790.615	507.540	283.075
			2.090.902
Modal (Catatan 48a)			245.292.175
Rasio PDN			0,85%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penerapan manajemen risiko mencakup pilar Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*, Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan Sistem pengendalian internal.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dimaksudkan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, proses internal, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan strategik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko melalui sistem pengendalian internal dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Untuk mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penerapan proses manajemen risiko dilaksanakan sesuai ketentuan, maka Direksi BRI menetapkan fungsi manajemen risiko pada setiap unit kerja mulai dari level Kantor Pusat (*Divisi/Desk/ Team*), *Regional Office*, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, Kantor Kas, Sentra Layanan BRI Prioritas dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Di samping itu, SKMRO juga berperan dalam penyusunan dan implementasi tata kelola manajemen risiko operasional, penyusunan dan pemantauan profil risiko BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari suatu produk bank baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi *anti fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko. Pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional dilaksanakan dalam kegiatan Forum Manajemen Risiko (FMR) maupun *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan secara rutin bersama dengan SKMR dan Divisi/Desk lainnya.

Audit Intern selaku *third line* dalam *3 lines of model* yang meliputi Audit Intern Kantor Pusat dan Audit Intern Regional BRI seluruh Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal di BRI secara *bankwide*.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI difasilitasi melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa BRI *Operational Risk Assessor* (OPRA), *Integrated Risk Management System* (IRMS) maupun BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM), yang mencakup modul *Risk and Control Library* (RCL), *Risk and Control Self Assessment* (RCSA/CSA), *Key Risk Indicator* (KRI), *Loss Even Database* (LED), *Risk Maturity Self Assessment* (RMSA), dan fungsi *Briefing*, *Verification*, dan *Coaching* (BVC). Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional telah dikinikani dalam Surat Edaran No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022.

Upaya pemahaman manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya risiko. Budaya risiko merupakan nilai-nilai dan perilaku individu yang akan terefleksi dalam keputusan-keputusan yang diambil dan cara melakukan pekerjaan dengan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan manajemen risiko. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI, serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional, baik dalam melakukan percepatan deteksi kejadian risiko, maupun monitoring penyelesaian rencana tindak lanjut perbaikan kontrol. Budaya risiko telah diatur dalam Surat Edaran Direksi No. SE.04-DIR/CTR/01/2023 Buku 2 tentang Budaya Risiko tanggal 31 Januari 2023.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

1. Risk Control and Self Assessment (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan kejadian (*likelihood*), RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/*Desk/Team* Kantor Pusat BRI, *Regional Office*, Kantor Cabang Khusus, UKLN, Audit Intern Wilayah, *Regional Campus*, Kantor Cabang yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu dan Sentra Layanan BRI Prioritas.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data *Loss Event Database* (LED), *Key Risk Indicator* (KRI) maupun Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap semester, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

2. Loss Event Database (LED)

Loss Event Database (LED) BRI merupakan proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian non finansial maupun finansial yang meliputi *actual loss* dan *potential loss* termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul LED, analisa kejadian kerugian dapat dilakukan berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (*event type*) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasis pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI telah menerapkan Pengukuran Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar yang berpedoman pada Basel III *Framework*. Ketentuan ATMR Risiko Operasional dengan pendekatan standar diatur melalui Surat Edaran Direksi No. SE.66-DIR/MPE/12/2022 Buku 2 tentang Perhitungan ATMR Operasional.

3. Key Risk Indicator (KRI)

KRI adalah perangkat Manajemen Risiko yang berupa indikator kuantitatif yang dapat memberikan informasi secara dini terhadap peningkatan atau penurunan risiko dan atau penurunan efektivitas kontrol terhadap limit *threshold* yang telah ditentukan. KRI dapat bersifat *leading* maupun *lagging*. Pemantauan risiko melalui KRI bertujuan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait pengendalian risiko sehingga dapat mencegah atau meminimalisir dampak kerugian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

3. Key Risk Indicator (KRI) (lanjutan)

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau limit risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan Audit Internal, *Risk Owner* dan Unit Kerja terkait lainnya. KRI BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko *Regional Office* yang di-*monitor* secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

4. Forum Manajemen Risiko (Forum MR)

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja operasional dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI. Implementasi Forum MR di level Regional dilaksanakan dalam bentuk Forum *Governance, Risk, and Compliance (GRC)*, yang dihadiri oleh anggota tetap yaitu Regional CEO, Regional Risk Management Head, dan Kepala Audit Intern Wilayah.

5. Risk Maturity Self Assessment (RMSA)

Risk Maturity Self Assessment (RMSA) merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemapanaan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan.

6. Business Continuity Management (BCM)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management (BCM)* guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional BRI, mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, dan menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana. Kebijakan BCM diatur melalui Surat Edaran No.58-DIR/ORD/11/2022 Buku 3 tentang BCM dan Standar Operasional Prosedur No.SO.05-ORD/05/2023 tentang Pengelolaan Kelangsungan Usaha.

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*, serta berbagai pengujian rencana kelangsungan usaha. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman *Emergency Response Plan (ER Plan)* dan kebijakan *Business Continuity Plan (BC Plan)* untuk Unit Kerja Kritis. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan saat terjadi gangguan/bencana maka pelaksanaan uji coba *ER Plan* dan *BC Plan* dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

6. Business Continuity Management (BCM) (lanjutan)

Dalam periode satu tahun ke belakang telah terjadi berbagai kejadian-kejadian bencana yang telah mengaktifkan prosedur kelangsungan usaha Unit Kerja BRI, dimana hal tersebut menjadi bukti kesiapan organisasi BRI untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Ketentuan mengenai tanggap darurat bencana di tempat kerja telah dirumuskan melalui Surat Edaran No. 58-/DIR/ORD/11/2022 Buku 4 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan SOP No. SO.05-ORD/05/2023 tentang Pengelolaan Kelangsungan Usaha.

7. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk Bank Baru (PBB)

Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan risiko produk bank, maka setiap rencana penerbitan produk bank baru (PBB) di BRI, dilakukan proses validasi peningkatan materialitas risiko dan proses penilaian manajemen risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PBB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko yang dimaksud.

Selanjutnya, SKMR yang dikoordinasikan oleh SKMRO melakukan penilaian kecukupan pengelolaan risiko PBB dan merekomendasikan hasil penilaian yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI. Kebijakan PBB diatur dalam Surat Edaran No. 58-/DIR/ORD/11/2022 Buku 6 tentang Pengelolaan Risiko Penyelenggaraan Produk.

8. Penerapan Strategi Anti Fraud BRI

Semua kegiatan usaha Bank dapat terpapar risiko operasional salah satunya *fraud*. Untuk meminimalkan dampak kerugian akibat *fraud* maka BRI menerapkan Strategi *Anti Fraud* yang merupakan wujud komitmen BRI untuk tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) atas *fraud* melalui sistem pengendalian *fraud* yang efektif dan berkesinambungan. Penerapan Strategi *Anti Fraud* di BRI didukung dengan peningkatan kapabilitas deteksi *fraud* melalui pengembangan *Fraud Detection System*, serta peningkatan kompetensi dan *awareness* dari Pekerja BRI untuk mencegah, mendeteksi dan menangani *fraud* sebagai bagian dari pencegahan dan meminimalisir kerugian bank dan/atau nasabah. Sebagai bentuk komitmen seluruh Insan BRILian dalam mencegah *fraud* maka Jajaran Direksi dan Komisaris, serta jajaran Manajemen dan seluruh Pekerja BRI secara berkala menandatangani Komitmen *Anti Fraud* sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 Buku 5 tentang Strategi Anti Fraud.

Perkembangan Pemulihan Ekonomi Terkini

Perekonomian global terus menghadapi tekanan karena masih tingginya inflasi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dampak negatif dari pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi tingginya inflasi semakin terasa. Kenaikan bunga acuan yang sangat signifikan pada banyak negara menyebabkan kondisi keuangan semakin menegat, sehingga berdampak pada melemahnya perdagangan global serta menurunnya keyakinan konsumen dan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi global ke depan. Proyeksi Lembaga internasional, seperti: International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Hingga Triwulan-IV 2023, paling tidak terdapat empat indikator yang mencerminkan laju perlambatan ekonomi global, yaitu: (1) Pergerakan *Purchasing Manager Index* (PMI) yang melambat sejak Mei 2023, khususnya PMI manufaktur, (2) Penurunan laju ekspor berbagai negara utama seperti China dan AS, yang mengimplikasikan penurunan permintaan dunia, (3) Penurunan lowongan kerja aktif pada berbagai negara, yang mengimplikasikan penurunan aktivitas produksi, dan (4) Laju penurunan *Leading Economic Indicator* (LEI) pada berbagai negara utama di dunia. Dari keempat faktor tersebut, penurunan LEI pada berbagai negara utama di dunia menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa laju perekonomian global ke depan akan semakin tertekan dan melambat.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Perkembangan Pemulihan Ekonomi Terkini (lanjutan)

Paling tidak terdapat tiga tantangan utama yang perlu diwaspadai ke depan, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi global yang masih dinamis dan berfluktuasi. Pertama, tren inflasi global yang secara historis masih cukup tinggi. Laju inflasi pada berbagai negara saat ini memang dalam tren yang menurun, namun nilainya diperkirakan masih akan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal (pre-pandemi tahun 2019). Tekanan inflasi yang diperkirakan masih tinggi tahun 2024 disebabkan oleh dorongan biaya suplai (*cost push inflation*) karena proyeksi harga komoditas global yang masih cukup tinggi, baik komoditas energi dan pangan.

Kedua, kondisi geopolitik yang tidak pasti, di mana belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina dan memanasnya konflik Timur Tengah dapat memicu kembali disrupsi rantai pasok barang kebutuhan primer dan komoditas energi, sehingga dapat berdampak pada kenaikan inflasi global. Ketiga, pemulihan ekonomi China yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya akibat aktivitas industri dan permintaan konsumen yang melambat. Hal itu disebabkan oleh masih berlangsungnya krisis properti, lemahnya keyakinan konsumen, dan tingginya angka pengangguran umur produktif. Kombinasi dari berbagai tantangan tersebut diperkirakan akan berdampak negatif terhadap laju pemulihan ekonomi global tahun 2023 dan 2024.

Perekonomian global yang melambat mulai berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Triwulan-III 2023, perekonomian nasional tercatat tumbuh sebesar 4,94% *year-on-year/yoy*, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,17%*yoy*. Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi partner dagang utama Indonesia pada periode yang sama, khususnya China dan India. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi China tercatat sebesar 4,9%*yoy*, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 6,3%*yoy*. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi India juga mengalami penurunan dari 7,8%*yoy* pada Triwulan-II 2023 menjadi 6,5%*yoy* pada Triwulan-III 2023.

Berdasarkan permintaan agregat, laju pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun pada Triwulan-III 2023 karena melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga (Q3-2023 = 5,06%*yoy*; Q2-2023 = 5,22%*yoy*) dan kontraksi pertumbuhan pengeluaran pemerintah (Q3-2023 = -3,76%*yoy*; Q2-2023 = 10,57%*yoy*). Begitu juga, laju pertumbuhan ekspor juga semakin menurun dan kontraktif (Q3-2023 = -4,26%*yoy*; Q2-2023 = -2,97%*yoy*), seiring dengan tren penurunan harga komoditas dan perlambatan permintaan global. Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh industri pengolahan dengan proporsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan-III 2023 sebesar 20,40%. Pertumbuhan industri pengolahan dalam tren yang meningkat. Sedangkan, beberapa sektor tercatat mengalami pertumbuhan yang melambat, yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi-gudang.

Dari sisi perbankan, laju pertumbuhan kredit industri secara tahunan mulai mengalami peningkatan pada seluruh sektor ekonomi, namun tetap perlu disikapi secara hati-hati. Pertumbuhan kredit pada November 2023 tercatat mengalami peningkatan ke 9,74%*yoy* dari 8,99%*yoy* pada bulan sebelumnya. Namun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 sebesar 11,35%*YoY*. Secara *year-to-date* (YTD), pertumbuhan kredit industri juga hanya tumbuh sebesar 8,34% hingga November 2023, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 9,93%. Walaupun, pertumbuhan kredit yang masih dalam fase melambat, kualitas kredit masih relatif terjaga dan stabil. Pada November 2023, nilai *gross non-performing loan* (NPL) tercatat bergerak stabil dan masih di bawah 3%, yaitu sebesar 2,36%. Sementara itu, likuiditas industri perbankan semakin terbatas dan cenderung mengetat. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat ke 3,04%*yoy* pada November 2023, dari 3,43%*yoy* pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan DPK diperkirakan akan semakin terbatas karena masih ketatnya kebijakan moneter BI dan kemampuan menabung masyarakat yang cenderung melemah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Perkembangan Pemulihan Ekonomi Terkini (lanjutan)

Sementara itu dalam menghadapi peluang sekaligus tantangan di era pemulihan ekonomi yang saat ini terjadi, BRI mengupayakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

1. *Asset Initiatives*

Dalam meningkatkan pertumbuhan aset, BRI akan fokus pada beberapa hal yaitu:

- a. Fokus pada penyaluran kredit di segmen UMKM.
- b. Mengoptimalkan *New Source of Growth* yang berasal dari pembentukan holding ultra mikro dan entitas anak.
- c. Menjaga kualitas aset dengan tumbuh selektif pada sektor-sektor potensial dan tahan terhadap guncangan krisis.

2. *Liability & Equity Initiatives*

Sebagai sumber pertumbuhan aset, dibutuhkan pertumbuhan di sisi liabilitas dan permodalan yang berkelanjutan. BRI akan fokus pada likuiditas yang bersumber dari dana murah melalui peningkatan rasio CASA serta menjaga level permodalan (CAR) yang cukup sesuai ketentuan regulator dan akselerasi pertumbuhan aset.

3. *Digital Initiatives*

Sebagai upaya efisiensi dalam operasional perusahaan, peningkatan produktivitas pekerja, dan peningkatan pelayanan kepada nasabah, BRI akan terus melakukan digitalisasi dan mengembangkan tools dan aplikasi pendukung yang berkualitas bagi nasabah dan pekerja.

40. NILAI WAJAR ASSET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset				
Kas	31.603.784	31.603.784	27.407.478	27.407.478
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	101.909.121	150.935.150	150.935.150
Giro pada bank lain	22.321.935	22.321.935	21.469.857	21.469.857
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	65.223.400	65.223.400	70.399.920	70.399.920
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laba rugi	22.393.171	22.393.171	21.115.873	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	163.339.165	163.339.165	150.802.567	150.802.567
Biaya perolehan diamortisasi	145.277.458	144.137.459	158.323.543	154.579.632
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	51.571.488	51.571.488	37.428.446	37.428.446
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	33.595.231	51.014.678	51.014.678
Tagihan derivatif	911.683	911.683	911.405	911.405
Kredit yang diberikan dan pinjaman syariah	1.130.402.953	1.072.919.881	1.000.179.115	973.483.631
Piutang pembiayaan	50.524.406	49.953.587	45.809.969	43.880.120
Tagihan akseptasi	9.967.710	9.967.710	7.031.064	7.031.064
Penyertaan saham *)	1.749.102	1.749.102	1.774.614	1.774.614
Aset lain-lain **)	31.533.272	31.533.272	25.286.947	25.286.947
Total	1.862.323.879	1.803.129.989	1.769.890.626	1.737.521.382

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut. (lanjutan)

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Liabilitas				
Liabilitas segera	30.651.807	30.651.807	24.910.579	24.910.579
Simpanan nasabah				
Giro	346.124.372	346.124.372	349.755.590	349.755.590
Tabungan	527.945.550	527.945.550	522.647.920	522.647.920
Deposito berjangka	484.258.839	484.258.839	435.480.503	435.480.503
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya				
Giro	1.609.511	1.609.511	1.911.667	1.911.667
Tabungan	9.052	9.052	9.787	9.787
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	7.496.376	7.496.376	3.402.129	3.402.129
<i>Inter-bank call money</i>	2.843.380	2.843.380	4.010.964	4.010.964
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	19.079.458	19.079.458	9.997.592	9.997.592
Liabilitas derivatif	925.210	925.210	783.921	783.921
Liabilitas akseptasi	10.217.408	10.217.408	7.167.600	7.167.600
Surat berharga yang diterbitkan	49.637.581	49.856.444	63.611.761	63.816.479
Pinjaman yang diterima	98.850.813	98.850.813	79.371.200	79.371.200
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	496.683	505.878	501.988	505.258
Liabilitas lain-lain *)	14.052.073	14.052.073	13.285.936	13.285.936
Total	1.594.198.113	1.594.426.171	1.516.849.137	1.517.057.125

*) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- a) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu, kecuali efek-efek yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi, kredit yang diberikan, pinjaman syariah, piutang pembiayaan, surat berharga yang diterbitkan serta pinjaman dan surat berharga subordinasi, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap liabilitas keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b) Efek-efek

Nilai wajar untuk efek-efek yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut (lanjutan):

c) Kredit yang diberikan dan Pinjaman syariah

Portofolio kredit BRI secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh BRI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Portofolio pinjaman syariah secara umum memiliki tingkat margin mengambang dan pinjaman syariah yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap.

d) Piutang pembiayaan

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar.

e) Tagihan dan liabilitas derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

f) Pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman dan surat berharga subordinasi

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c):

	31 Desember 2023			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	9.519.463	9.519.463	-	-
Reksadana	5.964.633	5.964.633	-	-
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	2.083.983	2.083.983	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	1.470.125	1.470.125	-	-
Tagihan derivatif	911.683	-	911.683	-
Obligasi	699.447	699.447	-	-
Obligasi Subordinasi	15.783	15.783	-	-
Lainnya	2.639.737	2.639.737	-	-
	23.304.854	22.393.171	911.683	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan (lanjutan)				
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	100.239.655	100.239.655	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	30.414.559	30.414.559	-	-
Reksadana	13.961.119	13.961.119	-	-
Obligasi	13.897.860	13.897.860	-	-
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	2.203.544	2.203.544	-	-
<i>Monetary Authority of Singapore (MAS) Bills</i>	1.544.668	1.544.668	-	-
<i>Singapore Government Securities</i>	571.591	571.591	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	216.023	216.023	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	135.600	135.600	-	-
<i>U.S. Treasury Bills</i>	46.036	46.036	-	-
Lainnya	108.514	108.514	-	-
	<u>163.339.169</u>	<u>163.339.169</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	122.410.214	122.410.214	-	-
<i>Tagihan Risk Participation</i>	20.891.761	20.891.761	-	-
Obligasi	824.352	824.352	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	11.132	11.132	-	-
	<u>144.137.459</u>	<u>144.137.459</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Kredit yang Diberikan dan Piutang Pembiayaan				
Kredit yang diberikan	1.072.919.881	-	985.242.035	87.677.846
Piutang pembiayaan	49.953.587	-	49.953.587	-
	<u>1.122.873.468</u>	<u>-</u>	<u>1.035.195.622</u>	<u>87.677.846</u>
Total aset keuangan	<u>1.453.654.950</u>	<u>329.869.799</u>	<u>1.036.107.305</u>	<u>87.677.846</u>
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	925.210	-	925.210	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	49.856.444	49.856.444	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	505.878	505.878	-	-
	<u>50.362.322</u>	<u>50.362.322</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total liabilitas keuangan	<u>51.287.532</u>	<u>50.362.322</u>	<u>925.210</u>	<u>-</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	10.605.908	10.605.908	-	-
Reksadana	7.084.911	7.084.911	-	-
Tagihan derivatif	911.405	-	911.405	-
Obligasi	479.720	479.720	-	-
Obligasi Subordinasi	49.669	49.669	-	-
<i>Negotiable Certificate Of Deposits</i>	18.554	18.554	-	-
Lainnya	2.877.111	2.877.111	-	-
	22.027.278	21.115.873	911.405	-
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	117.770.585	117.770.585	-	-
Obligasi	15.434.106	15.434.106	-	-
Reksadana	11.422.671	11.422.671	-	-
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	1.754.568	1.754.568	-	-
<i>Monetary Authority of Singapore (MAS) Bills</i>	1.684.648	1.684.648	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	873.765	873.765	-	-
<i>Singapore Government Securities</i>	566.294	566.294	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	545.461	545.461	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	285.543	285.543	-	-
Obligasi Pemerintah Taiwan	153.075	153.075	-	-
Obligasi Subordinasi	119.071	119.071	-	-
Lainnya	192.780	192.780	-	-
	150.802.567	150.802.567	-	-
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	130.205.667	130.205.667	-	-
<i>Tagihan Risk Participation</i>	23.057.681	23.057.681	-	-
Obligasi	1.173.284	1.173.284	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	136.000	136.000	-	-
Obligasi Subordinasi	7.000	7.000	-	-
	154.579.632	154.579.632	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang Pembiayaan				
Kredit yang diberikan	973.483.631	-	923.081.388	50.402.243
Piutang pembiayaan	43.880.120	-	-	43.880.120
	1.017.363.751	-	923.081.388	94.282.363
Total aset keuangan	1.344.773.228	326.498.072	923.992.793	94.282.363
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	783.921	-	783.921	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	63.816.479	63.816.479	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	505.258	505.258	-	-
	64.321.737	64.321.737	-	-
Total liabilitas keuangan	65.105.658	64.321.737	783.921	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. SEGMENT OPERASI

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak:

a. Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan Perbankan Konvensional
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Perusahaan Perbankan Konvensional
BRI Global Financial Services Co. Ltd. (dahulu BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong)	Perusahaan Jasa Keuangan
PT Asuransi BRI Life	Perusahaan Asuransi Jiwa
PT BRI Multifinance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Sekuritas
PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura
PT BRI Asuransi Indonesia	Perusahaan Asuransi
PT Pegadaian	Perusahaan Pembiayaan
PT Permodalan Nasional Madani	Perusahaan Pembiayaan
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	Perusahaan Investasi

b. Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Ritel
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan segmen operasi:

Keterangan	Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut					Total
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	
Pendapatan bunga, premi, dan emas - neto	61.646.907	28.530.291	3.999.095	13.907.277	29.580.953	137.664.523
Pendapatan operasional lainnya	17.639.356	16.102.050	4.982.366	3.844.328	3.057.685	45.625.785
Total pendapatan	79.286.263	44.632.341	8.981.461	17.751.605	32.638.638	183.290.308
Beban operasional lainnya	(31.050.020)	(22.253.560)	(2.053.648)	(1.607.462)	(19.817.601)	(76.782.291)
Beban CKPN	(20.474.879)	(13.506.061)	7.888.285	(427.517)	(3.159.108)	(29.679.280)
Total beban	(51.524.899)	(35.759.621)	5.834.637	(2.034.979)	(22.976.709)	(106.461.571)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(20.591)	(77.380)	(48.903)	(377.093)	124.942	(399.025)
Laba sebelum beban pajak	27.740.773	8.795.340	14.767.195	15.339.533	9.786.871	76.429.712
Beban pajak	(5.270.747)	(1.671.115)	(2.872.313)	(4.104.717)	(2.085.772)	(16.004.664)
Laba Bersih	22.470.026	7.124.225	11.894.882	11.234.816	7.701.099	60.425.048
Aset segmen						
Kredit yang diberikan - bruto	496.554.160	442.703.668	197.696.204	-	60.798.674	1.197.752.706
Total aset	468.573.573	418.508.640	244.435.173	632.353.605	185.530.577	1.949.401.568
Liabilitas segmen						
Total simpanan Nasabah	373.473.514	488.122.102	491.087.385	-	5.645.760	1.358.328.761
Total liabilitas	373.473.514	488.122.102	507.421.680	151.222.833	128.294.759	1.648.534.888

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

b. Segmen Operasi (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan segmen operasi:

Keterangan	Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga, premi, dan emas - neto	59.395.789	30.128.931	(1.777.679)	12.971.032	25.755.474	126.473.547
Pendapatan operasional lainnya	13.689.096	15.553.855	3.593.099	3.879.051	2.412.593	39.127.694
Total pendapatan	73.084.885	45.682.786	1.815.420	16.850.083	28.168.067	165.601.241
Beban operasional lainnya	(34.395.404)	(18.746.771)	(1.884.810)	(1.237.497)	(18.051.530)	(74.316.012)
Beban CKPN	(8.779.414)	(17.073.704)	1.292.897	996.230	(3.415.201)	(26.979.192)
Total beban	(43.174.818)	(35.820.475)	(591.913)	(241.267)	(21.466.731)	(101.295.204)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	30.762	179.332	78.689	(11.879)	13.760	290.664
Laba sebelum beban pajak	29.940.829	10.041.643	1.302.196	16.596.937	6.715.096	64.596.701
Beban pajak	(3.892.308)	(2.164.708)	(479.226)	(5.055.150)	(1.597.102)	(13.188.494)
Laba Bersih	26.048.521	7.876.935	822.970	11.541.787	5.117.994	51.408.207
Aset segmen						
Kredit yang diberikan - bruto	449.626.718	399.555.810	173.787.061	-	56.305.230	1.079.274.819
Total aset	426.126.994	372.574.207	191.822.648	688.319.441	168.082.726	1.846.926.016
Liabilitas segmen						
Total simpanan Nasabah	367.656.835	469.090.526	464.028.257	-	7.108.395	1.307.884.013
Total liabilitas	367.656.835	469.090.526	477.581.582	128.737.434	119.177.316	1.562.243.693

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

c. Segmen Geografis

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen geografis:

Keterangan	Total Pendapatan	
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Indonesia	182.635.153	164.840.457
Amerika Serikat	203.615	397.108
Singapura	230.848	245.748
Timor-Leste	155.785	101.667
Hong Kong	20.423	14.223
Taiwan	44.484	2.038
Total	183.290.308	165.601.241

Keterangan	Laba sebelum beban pajak	
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Indonesia	76.060.127	64.111.292
Amerika Serikat	63.686	320.147
Singapura	181.470	135.024
Timor-Leste	109.877	54.946
Hong Kong	161	122
Taiwan	14.391	(24.830)
Total	76.429.712	64.596.701

Keterangan	Total Aset	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Indonesia	1.885.581.840
Amerika Serikat	26.087.423	27.856.321
Singapura	28.980.347	25.069.385
Timor-Leste	6.114.107	4.256.142
Hong Kong	24.232	17.982
Taiwan	2.613.619	563.644
Total	1.949.401.568	1.846.926.016

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

c. Segmen Geografis (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen geografis (lanjutan):

Keterangan	Total Liabilitas	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Indonesia	1.585.649.437	1.504.449.309
Amerika Serikat	26.148.777	28.000.956
Singapura	28.855.880	25.168.981
Timor-Leste	5.792.144	4.020.492
Hong Kong	6.467	4.257
Taiwan	2.082.183	599.698
Total	1.648.534.888	1.562.243.693

42. PROGRAM BAGI PEKERJA

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja terdiri atas:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Program cuti besar	3.679.294	3.207.290
Program pemutusan hubungan kerja	3.527.486	2.841.015
Program penghargaan tanda jasa	2.492.175	1.900.980
Program pensiun imbalan pasti	2.367.561	2.082.356
Program kesehatan pasca kerja BPJS	1.023.643	646.240
Program masa persiapan pensiun	20.983	17.996
Program manfaat lain dana manfaat tambahan	-	202.515
Total (Catatan 27)	13.111.142	10.898.392

Penilaian aktuarial atas program imbalan kerja masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh aktuaris independen sebagai berikut:

Entitas	Aktuaris Independen	Tanggal Laporan	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022
Entitas induk	KKA Enny Diah Awal	12 Januari 2024	5 Januari 2023
Entitas anak			
PT Bank Raya Indonesia Tbk	KKA Enny Diah Awal	2 Januari 2024	30 Desember 2022
PT Asuransi BRI Life	KKA Riana & Rekan	23 Januari 2024	6 Januari 2023
PT BRI Multifinance Indonesia	KKA Enny Diah Awal	27 Desember 2023	3 Januari 2023
PT BRI Danareksa Sekuritas	KKA Enny Diah Awal	8 Januari 2024	27 Januari 2023
PT BRI Ventura Investama	KKA Enny Diah Awal	21 Desember 2023	3 Januari 2023
PT BRI Asuransi Indonesia	KKA Steven & Mourits	4 Januari 2024	5 Januari 2023
PT Pegadaian	KKA Agus Susanto	21 Desember 2023	5 Januari 2023
PT Permodalan Nasional Madani	KKA Riana & Rekan	3 Januari 2024	3 Januari 2023
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	KKA Nandi & Utama	2 Januari 2024	13 Januari 2023

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun BRI dikelola oleh Dana Pensiun BRI (DPBRI). Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI, kontribusi pekerja BRI untuk iuran pensiun adalah sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBRI merupakan kontribusi BRI, dimana kontribusi BRI sejak tanggal 1 Maret 2023 adalah sebesar 42,86% dari penghasilan dasar pensiun.

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun Pegadaian dikelola oleh Dana Pensiun Pegadaian. Keputusan Direksi Pegadaian, Kontribusi Pekerja Pegadaian untuk iuran pensiun adalah sebesar 6,50% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun Pegadaian merupakan kontribusi Pegadaian, dimana kontribusi Pegadaian sejak tanggal 29 Desember 2020 adalah sebesar 16% dari penghasilan dasar pensiun.

Penilaian aktuarial atas beban pensiun BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Entitas induk		
Tingkat diskonto	6,70%	7,40%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	sesuai tabel PhDP	7,50
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,00	4,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,7-6,9%	7,00%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00	5,00
Tingkat kematian	GAM 1971	GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01% dari tingkat kematian	0,01% dari tingkat kematian
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

Mutasi atas nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti awal tahun	26.896.251	25.618.746
Beban bunga	1.927.502	1.837.112
Biaya jasa kini	413.663	386.314
Biaya jasa lalu	211.138	1.013.104
Beban pesangon	(1.012.889)	-
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(1.490.223)	(1.391.441)
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	1.471.670	(567.584)
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti akhir tahun	28.417.112	26.896.251

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Mutasi atas nilai wajar aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar aset program awal tahun	24.813.852	23.458.521
Hasil pengembangan riil	1.939.611	2.122.700
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) pemberi kerja (Catatan 44)	814.934	563.595
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) peserta program	58.691	60.992
Rugi aktuarial pada aset	(87.314)	(515)
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(1.490.223)	(1.391.441)
Total aset program	26.049.551	24.813.852

Mutasi atas kewajiban program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	2.082.356	2.160.113
Beban pensiun imbalan pasti - neto (Catatan 35)	(310.689)	1.452.579
Pembayaran iuran tahun berjalan (Catatan 44)	(814.934)	(563.595)
Pembayaran imbalan	(75)	-
Pengukuran kembali liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti - neto	1.410.903	(966.741)
Saldo akhir (Catatan 27)	2.367.561	2.082.356

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	2.422.737	3.389.477
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	1.471.670	(567.584)
Imbal hasil atas aset program	(60.767)	(399.156)
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti - neto	3.833.640	2.422.737

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Biaya jasa kini	413.663	386.314
Iuran peserta program	(58.691)	(60.922)
Beban bunga - neto	136.090	114.083
Biaya jasa lalu	211.138	-
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(1.012.889)	1.013.104
(Pendapatan)/beban pensiun imbalan pasti (Catatan 35)	(310.689)	1.452.579

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua

Pekerja BRI juga memperoleh manfaat dari pemberian Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Program THT dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

Iuran THT terdiri dari iuran beban pekerja dan iuran beban BRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI.

Berdasarkan perhitungan penilaian aktuarial atas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Tingkat diskonto	6,70%	7,40%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

Status THT sesuai dengan penilaian aktuarial masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Nilai wajar aset	6.150.654	5.539.252
Nilai kini liabilitas THT	(3.823.023)	(3.446.233)
Surplus	<u>2.327.631</u>	<u>2.093.019</u>

Mutasi atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	-	-
Beban THT	221.233	662.321
Pengukuran kembali liabilitas THT - neto	(84.590)	(533.854)
Pembayaran iuran tahun berjalan (Catatan 44)	(136.643)	(128.467)
Saldo akhir liabilitas	<u>-</u>	<u>-</u>

Pengukuran kembali atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	(809.240)	(275.386)
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	42.498	(437.452)
Imbal hasil atas liabilitas (aset) program	(206.817)	3.537
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga - neto	79.729	(99.939)
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas THT - neto	<u>(893.830)</u>	<u>(809.240)</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Perhitungan beban THT untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Biaya jasa kini	293.882	246.918
Iuran peserta program	(65.181)	(61.281)
Beban bunga - neto	(7.468)	(7.116)
Biaya jasa lalu	-	483.800
Beban THT (Catatan 35)	221.233	662.321

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI tidak mengakui adanya THT dibayar di muka dan manfaat THT karena manajemen BRI tidak memiliki keuntungan (*benefit*) atas aset tersebut dan BRI tidak memiliki rencana untuk mengurangi kontribusinya di masa depan.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

(i) BRI (entitas induk)

Pekerja BRI juga diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti sesuai dengan Keputusan Direksi BRI yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2000. Kontribusi BRI pada program ini yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp467.623 dan Rp428.961 masing-masing untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 35). Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh DPBRI.

(ii) Bank Raya (entitas anak)

Bank Raya Indonesia menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pekerja tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah kontribusi Bank Raya untuk dana pensiun adalah sebesar 84,97% dari iuran yang sudah ditetapkan berdasarkan tingkat dari masing-masing pekerja yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp1.074 dan Rp977 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 35).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perhitungan PHK dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuarial atas kewajiban perseroan yang berkaitan dengan cadangan penyisihan untuk penetapan uang pesangon. Uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan yang berlaku untuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Entitas induk		
Tingkat diskonto	6,90%	7,40%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,70 – 7,10%	7,20 - 8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 – 8,50	7,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019 GAM 1971	TMI IV 2019 GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01 – 10,00% dari tingkat kematian	0,01 – 10,00% dari tingkat kematian

Mutasi atas liabilitas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	2.841.015	1.972.177 ^{*)}
Beban PHK (Catatan 35)	756.697	433.557
Pembayaran manfaat aktual	(123.483)	(210.157)
Pengukuran kembali liabilitas PHK - neto	58.299	648.373
Biaya terminasi	(4.086)	(2.826)
Dampak batas aset	(363)	355
Kontribusi perusahaan	(593)	(464)
Saldo akhir (Catatan 27)	<u>3.527.486</u>	<u>2.841.015</u>

^{*)} Saldo awal periode 31 Desember 2022 termasuk saldo awal PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) sebesar Rp9.875.

Pengukuran kembali atas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	(126.778)	(775.151) ^{*)}
Kerugian aktuarial	58.299	648.373
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas PHK - neto	<u>(68.479)</u>	<u>(126.778)</u>

^{*)} Saldo awal periode 31 Desember 2022 termasuk saldo awal PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) sebesar Rp2.067.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

Perhitungan beban program PHK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Biaya jasa kini	559.016	241.014
Beban bunga	204.278	133.610
Biaya pesangon	8.281	7.298
Biaya jasa lalu	(17.531)	115.288
Pembayaran biaya terminasi	2.299	1.252
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	354	(2.138)
Dampak atas perubahan metode atribusi pada laba rugi	-	(62.767)
Beban PHK (Catatan 35)	756.697	433.557

e. Program Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Perhitungan aktuarial (PT Pegadaian) atas masa persiapan pensiun (MPP) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	7,00%	7,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00
Tingkat kematian	GAM 1971	GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01% dari TMI tingkat kematian	0,01% dari TMI tingkat kematian
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Mutasi atas liabilitas (aset) program masa persiapan pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	17.996	20.028
Beban MPP (Catatan 35)	2.629	2.622
Pembayaran imbalan	(18.935)	(15.166)
Pengukuran kembali liabilitas MPP - neto	19.293	10.512
Saldo akhir (Catatan 27)	20.983	17.996

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Program Masa Persiapan Pensiun (MPP) (lanjutan)

Perhitungan beban program Masa Persiapan Pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Biaya jasa kini	1.315	1.120
Beban bunga	1.314	1.502
Beban MPP (Catatan 35)	2.629	2.622

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pekerja BRI dan entitas anak juga memiliki imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS, dan program manfaat lain dana manfaat tambahan.

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa

Perhitungan aktuarial atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Entitas induk		
Tingkat diskonto	6,80%	7,40%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI	10,00% dari TMI
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,75 - 7,00%	4,40 - 7,50%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 - 9,00	7,00 - 10,00
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019 dan GAM 1971	TMI IV 2019 dan GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01 - 10,00% dari tingkat kematian	0,01 - 10,00% dari tingkat kematian

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

Mutasi untuk liabilitas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal liabilitas	1.900.980	1.754.761 ^{*)}
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	651.143	238.393
Pembayaran manfaat aktual	(75.541)	(93.160)
Rugi aktuarial pada kewajiban	15.593	986
Liabilitas penghargaan tanda jasa (Catatan 27)	<u>2.492.175</u>	<u>1.900.980</u>

^{*)} Saldo awal periode 31 Desember 2022 termasuk saldo awal PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) sebesar Rp1.101.

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Biaya jasa kini	187.471	158.443
Beban bunga	138.241	130.384
Biaya jasa lalu	34	125.303
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui	325.397	(175.737)
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	<u>651.143</u>	<u>238.393</u>

(ii) Cuti besar

Perhitungan aktuarial atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Entitas induk		
Tingkat diskonto	6,60%	7,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

Perhitungan aktuarial atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuarial adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,60 - 6,80%	4,70 - 7,50%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 - 9,00	5,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019 GAM 1971	TMI IV 2019 GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,10 - 10,00% dari tingkat kematian	0,10 - 10,00% dari tingkat kematian

Mutasi liabilitas atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal liabilitas	3.207.290	2.950.109 ^{*)}
Beban cuti besar (Catatan 35)	731.080	592.529
Pembayaran manfaat aktual	(259.076)	(335.348)
Liabilitas cuti besar (Catatan 27)	<u>3.679.294</u>	<u>3.207.290</u>

^{*)} Saldo awal periode 31 Desember 2022 termasuk saldo awal PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) sebesar Rp1.241.

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Biaya jasa kini	419.424	366.897
Beban bunga	226.507	205.768
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui	84.525	(329.267)
Biaya jasa lalu	624	349.131
Beban cuti besar (Catatan 35)	<u>731.080</u>	<u>592.529</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

Perhitungan aktuarial atas program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi (entitas induk) sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Tingkat diskonto	7,00%	7,40%
Tingkat kenaikan iuran BPJS Kesehatan	4,88	4,88
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

Status program kesehatan pasca kerja BPJS sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Nilai kini liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS	2.526.313	2.121.676
Nilai wajar aset	(1.502.670)	(1.475.436)
Surplus (Defisit)	1.023.643	646.240

Mutasi liabilitas atas program kesehatan pasca kerja BPJS pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal liabilitas	646.240	598.635
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	171.575	129.362
Pengukuran kembali aset program kesehatan pasca kerja BPJS	205.828	(81.757)
Liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 27)	1.023.643	646.240

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	(10.926)	70.831
Keuntungan aktuarial	172.708	(125.510)
Imbal hasil atas aset program	33.119	43.753
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - neto	194.901	(10.926)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

Beban program kesehatan pasca kerja BPJS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Biaya jasa kini	123.753	84.465
Beban bunga - neto	47.822	44.897
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	171.575	129.362

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan

Penilaian aktuaria atas program manfaat lain dana manfaat tambahan BRI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	6,70%	7,50%
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10% dari TMI 2019	10% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

Mutasi atas nilai kini liabilitas program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai kini liabilitas awal tahun	2.165.701	2.127.731
Biaya bunga	155.339	156.733
Biaya jasa kini	15.282	16.972
Biaya jasa lalu	(416.041)	-
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(133.039)	(130.910)
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	76.491	(4.825)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	1.863.733	2.165.701

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Mutasi atas nilai wajar aset program pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Nilai wajar aset program awal tahun	1.963.186	1.974.114
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(133.039)	(130.910)
Hasil pengembangan riil	153.820	119.982
Total aset program	<u>1.983.967</u>	<u>1.963.186</u>

Mutasi atas kewajiban program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	202.515	153.617
Beban program		
manfaat lain dana manfaat		
tambahan - neto (Catatan 35)	(385.773)	28.647
Pengukuran kembali liabilitas - neto	183.258	20.251
Saldo akhir (Catatan 27)	<u>-</u>	<u>202.515</u>

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	88.994	68.743
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	76.492	(4.825)
Imbal hasil atas aset program	(13.467)	25.076
Perubahan atas dampak aset diluar		
bunga neto liabilitas (aset)	120.233	-
Jumlah pengukuran kembali		
 atas (aset) liabilitas		
 imbalan pasti - neto	<u>272.252</u>	<u>88.994</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Beban program manfaat lain dana manfaat tambahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Biaya jasa lalu	(416.041)	-
Biaya jasa kini	15.282	16.972
Bunga - neto	14.986	11.675
Beban program manfaat lain dana manfaat tambahan (Catatan 35)	(385.773)	28.647

g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit):

(i) Program pemutusan hubungan kerja (PHK)

	31 Desember 2023	
	Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(287.595)
Penurunan	-1,00	341.387
	31 Desember 2022	
	Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(290.048)
Penurunan	-1,00	438.151

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	44.679	45.925
1 - < 2 tahun	42.715	43.887
2 - < 3 tahun	42.755	40.757
3 - < 4 tahun	39.919	40.217
4 - < 5 tahun	42.214	36.843
> 5 tahun	2.005.978	1.502.562

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(ii) Program pensiun imbalan pasti

		31 Desember 2023	
		Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan		+1,00%	(2.899.376)
Penurunan		-1,00	3.559.760
		31 Desember 2022	
		Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan		+1,00%	(3.217.521)
Penurunan		-1,00	2.885.038
<u>Juran Jatuh Tempo</u>			
		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Jatuh Tempo</u>			
< 1 tahun		272.064	323.921
1 - < 2 tahun		240.698	295.589
2 - < 3 tahun		229.567	291.267
3 - < 4 tahun		219.183	285.858
4 - < 5 tahun		209.947	280.142
> 5 tahun		610.435	856.816

(iii) Program tunjangan hari tua

		31 Desember 2023	
		Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan		+1,00%	(338.634)
Penurunan		-1,00	390.893
		31 Desember 2022	
		Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan		+1,00%	(301.300)
Penurunan		-1,00	347.790

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

- (iii) Program tunjangan hari tua (lanjutan)

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	142.759	156.804
1 - < 2 tahun	139.786	133.868
2 - < 3 tahun	130.677	130.058
3 - < 4 tahun	123.810	122.970
4 - < 5 tahun	109.409	115.815
> 5 tahun	3.176.581	2.786.719

- (iv) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

	<u>31 Desember 2023</u>	
	<u>Asumsi tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(413.143)
Penurunan	-1,00	547.176

	<u>31 Desember 2022</u>	
	<u>Asumsi tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(197.389)
Penurunan	-1,00	320.033

Iuran Jatuh Tempo

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	123.753	86.509
1 - < 2 tahun	127.334	91.048
2 - < 3 tahun	131.662	95.798
3 - < 4 tahun	136.652	100.893
4 - < 5 tahun	142.168	106.453
> 5 tahun	3.332.579	2.944.261

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

- (v) Cadangan penghargaan tanda jasa

	31 Desember 2023	
	Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(222.666)
Penurunan	-1,00	257.962

	31 Desember 2022	
	Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(163.880)
Penurunan	-1,00	189.468

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	73.040	69.730
1 - < 2 tahun	103.118	67.471
2 - < 3 tahun	107.707	92.982
3 - < 4 tahun	119.264	94.345
4 - < 5 tahun	87.647	103.083
> 5 tahun	1.793.147	1.317.680

- (vi) Cuti besar

	31 Desember 2023	
	Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(219.152)
Penurunan	-1,00	247.239

	31 Desember 2022	
	Asumsi tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(188.310)
Penurunan	-1,00	211.966

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	269.305	227.948
1 - < 2 tahun	312.512	241.756
2 - < 3 tahun	311.458	282.296
3 - < 4 tahun	308.038	272.297
4 - < 5 tahun	194.598	266.133
> 5 tahun	1.890.135	1.596.796

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Komitmen</u>		
Tagihan komitmen		
Pembelian <i>spot</i> dan berjangka mata uang asing	24.948.222	15.046.421
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan (Catatan 26d)	128.590.416	86.290.063
Penjualan <i>spot</i> dan berjangka mata uang asing	63.924.016	69.751.674
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26d)	11.447.230	13.658.668
	<u>203.961.662</u>	<u>169.700.405</u>
Komitmen - neto	<u>(179.013.440)</u>	<u>(154.653.984)</u>
<u>Kontinjensi</u>		
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26d) dalam bentuk:		
Garansi bank	56.219.970	62.487.277
<i>Stand by</i> L/C	9.672.955	12.367.721
	<u>65.892.925</u>	<u>74.854.998</u>
Kontinjensi - neto	<u>(65.892.925)</u>	<u>(74.854.998)</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Manajemen Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Program imbalan kerja
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek
Perusahaan Umum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Kredit yang diberikan
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Mandiri Taspen	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain
PT PNM Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT BNI Asset Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT INKA Multi Solusi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Industri Kereta Api (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Wijaya Karya Realty	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Aset lain-lain
PT PAL Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Telekomunikasi Selular	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah
PT Jasa Marga Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah
PT Taspen (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bukit Asam Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Pinjaman yang diterima, Simpanan dari bank lain
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Pinjaman yang diterima, Simpanan dari bank lain, Simpanan nasabah
PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham
PT Bahana TCW Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Pinjaman yang diterima, Simpanan dari bank lain
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Simpanan dari bank lain, Pinjaman yang diterima
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Simpanan nasabah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan dan liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Simpanan nasabah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan dan liabilitas akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya,
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor,
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Garansi yang diterbitkan, Pinjaman yang diterima
PT Pertamina EP Cepu	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
Pusat Investasi Pemerintah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Pinjaman yang diterima
PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT PP Presisi Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Utama Karya Infrastruktur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
PT Fintek Karya Nusantara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham
PT Petrokimia Kayaku	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Kilang Pertamina Internasional	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Pinjaman yang diterima
Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program THT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Dana Pensiun BRI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program pensiun imbalan kerja
Dana Pensiun Pegadaian	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program pensiun imbalan kerja
Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program pensiun iuran pasti
Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program pensiun iuran pasti
PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Pinjaman yang diterima
PT Bhirawa Steel	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
High Speed Railways Contractor Consortium	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Garuda Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Elnusa Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya,
PT Kimia Farma Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Wika Semarang Demak Seksi 2	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Pupuk Kujang Cikampek	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Prima Armada Raya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
PT Danareksa Finance	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Pinjaman yang diterima

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Aset		
Giro pada bank lain (Catatan 5)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	154.693	219.357
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	122.101	213.795
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	113.847	127.372
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	57.615	137.390
PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)	3	49
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	15
	<u>448.259</u>	<u>697.978</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain (Catatan 6)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.700.170	1.402.075
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	612.208	502.857
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	508.013	325.250
PT Bank Mandiri Taspen	100.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.050	822.531
	<u>2.927.441</u>	<u>3.052.713</u>
Efek-efek (Catatan 7)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	233.011.046	262.347.815
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	4.872.220	5.402.870
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.515.732	1.260.743
PT PNM Investment Management	1.907.182	719.559
PT Bahana TCW Investment Management	1.758.031	1.514.551
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.746.614	2.018.830
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.605.173	1.355.122
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.325.311	1.542.117
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.048.442	1.043.810
PT BNI Asset Management	759.176	756.788
Lainnya	5.991.354	8.349.087
	<u>256.540.281</u>	<u>286.311.292</u>
Wesel ekspor dan tagihan lainnya (Catatan 8)		
High Speed Railway Contractor Consortium	1.441.374	911.412
PT Pupuk Kalimantan Timur	935.126	105.910
PT Bhirawa Steel	515.002	415.641
PP WIKA Semarang Demak Seksi 2	500.000	567.168
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	434.070	432.832
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	230.000	446.250
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	183.076	933.726
PT PP Presisi Tbk	159.644	285.091
PT Pupuk Kujang Cikampek	143.762	-
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	60.028	218.658
Lainnya	436.962	4.594.737
	<u>5.039.044</u>	<u>8.911.425</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Aset (lanjutan)		
Kredit yang diberikan (Catatan 11)		
Perusahaan Umum BULOG	8.050.411	2.806.206
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	7.223.106	9.346.356
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.493.912	4.526.884
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.176.593	3.069.554
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2.270.033	1.332.717
PT Pertamina EP Cepu	2.263.613	2.573.381
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.033.162	2.119.335
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	2.025.180	2.140.183
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1.773.059	2.217.674
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	1.719.923	1.761.099
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.008.656	945.183
Manajemen Kunci	204.348	199.268
Lain-lain	25.038.474	30.711.916
Total	61.280.470	63.749.756
Piutang Pembiayaan (Catatan 13)		
PT Prima Armada Raya	30.351	-
PT Hutama Karya Infrastruktur	-	7.205
	<u>30.351</u>	<u>7.205</u>
Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (Catatan 14)		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	837.353	1.112.455
PT PP Presisi Tbk	156.230	-
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	100.038	70.618
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	52.350	133.693
PT INKA Multi Solusi	50.260	-
PT Wijaya Karya Industri Energi	14.687	2.070
PT Industri Kereta Api (Persero)	1.973	-
PT Petrokimia Kayaku	554	2.089
PT Elnusa Tbk	117	-
PT Petrokimia Gresik	-	176.581
Lainnya	-	112.465
	<u>1.213.562</u>	<u>1.609.971</u>
Penyertaan saham (Catatan 15)		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.479.625	4.662.635
PT Fintek Karya Nusantara	753.258	537.548
PT Bahana Artha Ventura	79.440	77.846
	<u>6.312.323</u>	<u>5.278.029</u>
Aset lain-lain (Catatan 17)		
PT Wijaya Karya Realty	707.466	707.609
	<u>707.466</u>	<u>707.609</u>
Total aset dari pihak-pihak berelasi	334.499.197	370.325.978
Total aset konsolidasian	1.965.007.030	1.865.639.010
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	<u>17,02%</u>	<u>19,85%</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Liabilitas		
Giro (Catatan 19)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	174.787.869	183.945.607
Manajemen Kunci	3.672	3.547
Lain-lain	103.303	216.597
	<u>174.894.844</u>	<u>184.165.751</u>
Tabungan (Catatan 20)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	259.230	646.598
Manajemen Kunci	166.445	183.727
Lain-lain	20.752	34.420
	<u>446.427</u>	<u>864.745</u>
Deposito Berjangka (Catatan 21)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	156.006.956	138.644.688
Manajemen Kunci	60.153	74.991
Lain-lain	231.150	477.302
	<u>156.298.259</u>	<u>139.196.981</u>
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 22)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	462.943	821.691
Surat Berharga yang Diterbitkan (Catatan 24)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	6.657.214	7.642.578
Pinjaman yang Diterima (Catatan 25)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	26.102.658	18.849.036
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi (Catatan 29)	231.563	363.095
Kompensasi kepada manajemen manajemen kunci (Catatan 42)		
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	801.974	488.989
Nilai kini kewajiban PHK	352.673	93.386
Nilai kini kewajiban THT	170.036	136.523
Nilai kini kewajiban cuti besar	145.896	80.502
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	115.505	60.890
Nilai kini kewajiban program manfaat lain		
pembayaran manfaat pasti	9.158	11.577
Nilai kini kewajiban BPJS	21.495	15.625
	<u>1.616.737</u>	<u>887.492</u>
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	<u>366.710.645</u>	<u>352.428.274</u>
Total liabilitas konsolidasian	<u>1.648.534.888</u>	<u>1.562.243.693</u>
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	<u>22,24%</u>	<u>22,58%</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26b)		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.562.647	4.590.082
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3.518.752	2.872.589
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.912.039	8.077.346
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.662.592	1.003.627
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.596.645	1.613.163
PT Pertamina (Persero)	1.308.967	3.182.709
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	978.687	3.284.232
PT Pertamina Hulu Rokan	769.850	982.231
PT PAL Indonesia	646.210	280.863
PT Telekomunikasi Selular	620.889	23.460
Lain-lain	5.589.550	6.489.896
	23.166.828	32.400.198
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26b)		
Perum BULOG	3.827.742	576.595
PT Kilang Pertamina International	1.694.273	1.741.143
PT Industri Kereta Api (Persero)	580.158	1.011.007
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	384.473	450.243
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	375.744	649.498
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	255.051	279.764
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	195.499	-
PT Pupuk Kalimantan Timur	191.032	42.387
PT Bhirawa Steel	190.796	151.966
PT Kimia Farma Tbk	107.040	-
Lain-lain	417.521	1.366.024
	8.219.329	6.268.627
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
luran Program Pensiun Imbalan Pasti (Catatan 42a)	814.934	563.595
luran Program Tunjangan Hari Tua (Catatan 42b)	136.643	128.467
luran Program Pensiun luran Pasti (Catatan 42c)	468.697	451.679
Total	1.420.274	1.143.741
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi (Catatan 35)		
Gaji dan tunjangan Direksi	195.671	189.966
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	83.417	84.369
Total	279.088	274.335

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Tantiem, bonus dan insentif Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen kunci (Catatan 35)		
Tantiem Direksi	404.423	443.816
Tantiem Dewan Komisaris	159.244	131.568
Bonus dan insentif Manajemen Kunci	187.258	97.479
Total	750.925	672.863

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset		
Giro pada Bank lain	0,023%	0,037%
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	0,149	0,164
Efek-efek	13,055	15,347
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	0,256	0,478
Kredit yang diberikan	3,119	3,417
Piutang pembiayaan	0,002	0,000
Tagihan akseptasi	0,062	0,086
Penyertaan saham	0,321	0,283
Aset lain-lain	0,036	0,038
Total	17,023%	19,850%
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Liabilitas		
Giro	10,609%	11,789%
Tabungan	0,027	0,055
Deposito berjangka	9,481	8,910
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya	0,028	0,053
Surat berharga yang diterbitkan	0,404	0,489
Pinjaman yang diterima	1,583	1,207
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	0,014	0,023
Kompensasi kepada manajemen Manajemen Kunci	0,098	0,057
Total	22,244%	22,583%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

- 1) Pada tanggal 5 Juni 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan CRM Tahun 2023 untuk Zona 1, Zona 2 dan Zona 3 untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp999.926.
- 2) Pada tanggal 26 Mei 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular sehubungan dengan Pengadaan 32.214 Unit HP Bristop Kaunit dan Mantri untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp409.762.
- 3) Pada tanggal 22 Agustus 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Pacificagung Trijaya sehubungan dengan Pengadaan Pengadaan Mesin Self Service Banking Terminal (SSBT) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp177.286.
- 4) Pada tanggal 13 April 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Info Solusindo Data Utama sehubungan dengan Pengadaan Penambahan Kapasitas *Backup Solution Workload* 2022 - 2023 DC Ragunan dan DC Tabanan untuk jangka waktu 22 (dua puluh dua) minggu dengan nilai kontrak senilai Rp146.398.
- 5) Pada tanggal 13 Juli 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan Mesin IBM AS/400 Power10 E1080 DC Tabanan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp125.000
- 6) Pada tanggal 20 Desember 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular sehubungan dengan Perpanjangan Sewa Layanan *Simcard* Telkomsel untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp258.590.
- 7) Pada tanggal 13 Juni 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan CRM RBB Tahun 2022 (Zona 1 dan Zona 2) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp504.023.
- 8) Pada tanggal 13 Juni 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan CRM RBB Tahun 2022 (Zona 3) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp272.614.
- 9) Pada tanggal 21 Februari 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Deloitte Consulting sehubungan dengan Pengadaan Konsultan *System Integrator* Fase Implementasi *Product* untuk jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp348.500.
- 10) Pada tanggal 17 Januari 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan Mesin IBM AS/400 Power10 untuk DC GTI Ragunan dan ODC Sentul untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp350.400.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar Rp1.361.894 dan Rp1.634.654 (Catatan 28). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh Bank Umum yang berbadan hukum di Indonesia. Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebaskan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang "Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum", Program Penjaminan Pemerintah melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) telah berakhir pada tanggal 22 September 2005 untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005.

Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan" yang terakhir kali diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK"), LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" yang disempurnakan melalui PLPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, bahwa saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000 (nilai penuh).

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 4,25% dan 3,75% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 2,25% dan 1,75%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024:

- a. Amandemen PSAK No. 1 “Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”. Entitas menerapkan amandemen tersebut pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK No. 25. Penerapan lebih dini diperkenankan. Apabila entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode lebih awal, maka entitas juga menerapkan amandemen PSAK No. 1 “Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang” pada periode tersebut.
- b. Amandemen PSAK No. 73 “Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik”. Penerapan lebih dini diperkenankan.
- c. Amandemen PSAK No. 2 “Laporan Arus Kas” dan Amandemen PSAK No. 60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok”. Penerapan lebih dini diperkenankan.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

- a. PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi”, yang diadopsi dari IFRS No. 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 71 dan PSAK No. 72.
- b. Amandemen PSAK No. 10 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran”. Penerapan lebih dini diperkenankan.

Saat ini BRI dan entitas anaknya sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan dan direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

48. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

BRI secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat BRI dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risk*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai kepada pemegang saham.

CAR pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan POJK No. 27/POJK.03.2022 tentang Perubahan kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, BRI wajib membentuk tambahan modal penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge*, yang wajib dibentuk secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pembentukan modal penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* yang wajib dibentuk oleh BRI berdasarkan persentase tertentu dari ATMR adalah masing-masing 2,5%, 0% dan 2,5%.

Berdasarkan profil risiko BRI pada semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2022, yaitu *low to moderate*, maka CAR minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 BRI telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio kecukupan modal.

CAR BRI (entitas induk) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dihitung sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Modal Inti (Tier 1)		
Modal Inti Utama (CET 1)	238.956.599	234.727.964
Modal Pelengkap (Tier 2)	11.612.168	10.564.211
Total Modal	<u>250.568.767</u>	<u>245.292.175</u>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk Risiko Kredit ^{*)}	890.512.335	839.721.640
ATMR untuk Risiko Pasar ^{**)}	3.617.404	3.118.189
ATMR untuk Risiko Operasional ^{***)}	99.021.545	209.879.369
Total ATMR	<u>993.151.284</u>	<u>1.052.719.198</u>
	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rasio CAR		
Rasio CET 1	24,06%	22,30%
Rasio Tier 1	24,06	22,30
Rasio Tier 2	1,17	1,00
Rasio Total	25,23	23,30
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50	4,50
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,00	9,00

^{*)} Risiko Kredit dihitung berdasarkan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

^{**)} Risiko Pasar dihitung berdasarkan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.

^{***)} Risiko Operasional dihitung berdasarkan SE OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020.

b. Rasio Kredit *Non-Performing* (NPL)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio NPL BRI konsolidasian (kredit yang diberikan, pinjaman syariah dan piutang pembiayaan) adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rasio NPL - bruto	2,95%	2,67%
Rasio NPL - neto	0,72%	0,69

Rasio NPL - neto dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sesuai dengan peraturan terkait dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan, piutang pembiayaan dan pinjaman syariah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

c. Kegiatan Jasa Kustodian

BRI melakukan kegiatan jasa penitipan harta (bank kustodian) sejak tahun 1996 berdasarkan izin operasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 dan telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI *Scriptless* oleh Bank Indonesia.

Jasa penitipan harta ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Jasa penyimpanan (*safe keeping services*) dan *Portfolio Valuation*;
- Jasa penyelesaian transaksi (*settlement handling*);
- Jasa penagihan penghasilan (*income collection*), termasuk pembayaran pajaknya;
- Jasa *corporate action* dan *proxy services*;
- Jasa informasi dan pelaporan (*reporting services*);
- Jasa *Custody Unit Link* dan DPLK;
- Jasa Kustodian untuk sekuritisasi aset; dan
- Jasa Kustodian Global untuk surat berharga yang diterbitkan di luar negeri.

Aset milik nasabah yang dititipkan pada Kustodian BRI adalah sebesar Rp Rp1.288.847.232 dan Rp555.527.157 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Aset yang disimpan dalam kegiatan jasa kustodian tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian BRI dan Entitas Anak.

d. Kegiatan Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa Wali Amanat sejak tahun 1996. Izin operasi BRI sebagai Wali Amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Jasa Wali Amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali Amanat;
- Agen jaminan; dan
- Agen pemantau.

e. Jasa *Trust*

Layanan Jasa *Trust* BRI merupakan layanan jasa penitipan harta nasabah yang berupa aset *financial* untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan Bank pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan Jasa *Trust* di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No. 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.

Ruang lingkup layanan Jasa *Trust* BRI meliputi:

- Layanan Jasa Agen Pembayar;
- Layanan Jasa Agen Peminjaman;
- Layanan Jasa Agen Investasi; dan
- Layanan Jasa Keagenan Lainnya, seperti misalnya Agen Penampungan dan Agen Jaminan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

e. *Jasa Trust* (lanjutan)

BRI saat ini telah memberikan pelayanan *Jasa Trust* untuk transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (Migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di bawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S.

Di samping memberikan layanan *Jasa Trust*, BRI juga memberikan layanan jasa Agen Pembayar dan Agen Penampungan (non-Trust) untuk sektor-sektor lain, seperti sektor infrastruktur, energi, perdagangan dan industri kimia. Tak hanya melayani *direct customer*, *Jasa Trust* BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi kegiatan pembiayaan infrastruktur, energi dan aktivitas transaksi pembiayaan sindikasi.

f. Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) didirikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 26 Maret 2004 berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B. 140- DIR/KUI/TRY/03/2004 tanggal 26 Maret 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-97/KM.6/2004 tanggal 24 Mei 2004.

DPLK BRI menyelenggarakan Program antara lain:

- *Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)*;
- *Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pasca Kerja (PPDKP)*; dan
- *Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK)*.

g. Agen Sindikasi

BRI saat ini memberikan pelayanan *Jasa Agen Sindikasi* untuk pembiayaan kredit sindikasi dari beberapa sektor/industri diantaranya sektor agribisnis, infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik, minyak & gas, tekstil, properti dan manufaktur yang melibatkan proyek-proyek pemerintah (BUMN) maupun proyek-proyek swasta.

Jasa agen sindikasi ini merupakan bagian dari kegiatan sindikasi yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- *Arranger*;
- Agen Fasilitas;
- Agen Jaminan; dan
- Agen Penampungan.

Jasa Agen Sindikasi BRI telah mengelola berbagai proyek sindikasi dengan total nilai proyek adalah sebesar Rp661.755.070 dan Rp509.525.513, masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

49. LABA PER LEMBAR SAHAM

Perhitungan laba per lembar saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	60.099.863	150.880.994.955	398
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	33.812.185	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	60.099.863	150.914.807.140	398
	31 Desember 2022		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	51.170.312	151.386.393.314	338
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	22.542.123	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	51.170.312	151.408.935.437	338

50. PERUBAHAN AKTIVITAS PENDANAAN

	31 Desember 2022	Arus Kas		Perubahan Non Kas	31 Desember 2023
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	79.371.200	31.573.410	(12.212.871)	119.074	98.850.813
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.988	494.142	(500.000)	553	496.683
Surat berharga yang diterbitkan	63.611.761	14.112.994	(28.141.850)	54.676	49.637.581
Total	143.484.949	46.180.546	(40.854.721)	174.303	148.985.077
	31 Desember 2021	Arus Kas		Perubahan Non Kas	31 Desember 2022
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	68.458.547	20.079.547	(9.011.013)	(155.881)	79.371.200
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.375	-	-	613	501.988
Surat berharga yang diterbitkan	55.306.697	21.739.525	(14.650.023)	1.215.562	63.611.761
Total	124.266.619	41.819.072	(23.661.036)	1.060.294	143.484.949

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

51. REKLASIFIKASI DAN PENYESUAIAN AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah direklasifikasi sehingga sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Ringkasan dari akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022		
	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Sesudah Reklasifikasi
<u>Pendapatan operasional lainnya</u>			
Lain-lain	13.243.725	(8.175.106)	5.068.619
<u>Beban operasional lainnya</u>			
Lain-lain	(16.843.148)	7.875.955	(8.967.193)
Pendapatan penjualan emas	-	8.175.106	8.175.106
Beban harga pokok penjualan emas	-	(7.875.955)	(7.875.955)

52. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen BRI bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi BRI pada tanggal 31 Januari 2024.

53. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk hanya menyajikan informasi laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas investasi pada entitas anak disajikan dengan metode biaya.

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan pada halaman 348 - 357.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET		
Kas	31.515.572	27.320.384
Giro pada Bank Indonesia	101.388.737	149.961.985
Giro pada Bank Lain	21.669.212	20.449.914
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.815)	(17.791)
	<u>21.659.397</u>	<u>20.432.123</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	63.886.042	68.259.629
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	(990)
	<u>63.884.965</u>	<u>68.258.639</u>
Efek-efek	305.475.916	309.070.065
Cadangan kerugian penurunan nilai	(65.374)	(73.583)
	<u>305.410.542</u>	<u>308.996.482</u>
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	53.895.404	39.067.375
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.323.916)	(1.638.929)
	<u>51.571.488</u>	<u>37.428.446</u>
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	33.350.175	51.014.678
Tagihan Derivatif	905.573	911.405
Kredit yang Diberikan	1.146.082.506	1.029.802.549
Cadangan kerugian penurunan nilai	(77.009.890)	(84.578.819)
	<u>1.069.072.616</u>	<u>945.223.730</u>
Tagihan Akseptasi	10.217.408	7.096.719
Cadangan kerugian penurunan nilai	(249.698)	(136.450)
	<u>9.967.710</u>	<u>6.960.269</u>
Penyertaan Saham	49.254.757	47.936.173
Aset Tetap		
Biaya perolehan	59.583.105	54.097.275
Akumulasi penyusutan	(16.550.584)	(14.582.523)
Nilai buku – neto	<u>43.032.521</u>	<u>39.514.752</u>
Aset Pajak Tangguhan – neto	12.139.962	15.415.319
Aset Lain-lain – neto	42.094.716	31.620.288
TOTAL ASET	<u>1.835.248.731</u>	<u>1.750.994.673</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	26.106.970	18.988.424
Simpanan Nasabah		
Giro	346.654.593	349.491.946
Tabungan	526.514.556	521.039.799
Deposito Berjangka	479.513.851	430.243.873
Total Simpanan Nasabah	<u>1.352.683.000</u>	<u>1.300.775.618</u>
Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	12.066.959	9.480.779
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	19.079.458	9.724.245
Liabilitas Derivatif	918.194	783.921
Liabilitas Akseptasi	10.217.408	7.096.719
Utang Pajak	1.481.949	1.814.219
Surat Berharga yang Diterbitkan	30.239.610	36.841.620
Pinjaman yang Diterima	41.650.054	38.803.987
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	6.116.888	6.456.606
Liabilitas Imbalan Kerja	18.880.915	17.419.000
Liabilitas Lain-lain	16.573.484	8.685.593
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	496.683	501.988
TOTAL LIABILITAS	<u>1.536.511.572</u>	<u>1.457.372.719</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)		
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham		
Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 151.559.001.603 lembar saham Seri B)	7.577.950	7.577.950
Tambahan modal disetor	76.245.954	76.029.910
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	19.848.571	19.848.571
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(253.585)	(128.611)
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	(2.460.750)	(4.463.331)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	120.722	137.288
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(1.951.615)	(691.307)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(3.614.321)	(2.202.178)
Opsi Saham	54.769	16.297
Cadangan kompensasi atas saham bonus	287.482	210.266
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	199.859.297	194.264.414
Total Saldo Laba	202.881.982	197.287.099
TOTAL EKUITAS	298.737.159	293.621.954
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.835.248.731	1.750.994.673

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga	146.917.842	123.834.560
Beban Bunga	(38.484.029)	(22.829.991)
Pendapatan Bunga - neto	<u>108.433.813</u>	<u>101.004.569</u>
Pendapatan Operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	20.292.184	18.469.908
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	16.275.168	11.856.901
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	428.531	992.890
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	1.792.940	1.430.867
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	89.152	49.764
Lain-lain	3.850.285	5.519.975
Total Pendapatan Operasional lainnya	<u>42.728.260</u>	<u>38.320.305</u>
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(26.860.060)	(24.076.699)
Beban penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	340.065	516.611
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan	(177)	(3.904)
Beban Operasional lainnya		
Tenaga kerja dan tunjangan	(26.519.496)	(29.316.409)
Umum dan administrasi	(21.019.914)	(19.038.743)
Lain-lain	(9.506.374)	(8.263.325)
Total Beban Operasional lainnya	<u>(57.045.784)</u>	<u>(56.618.477)</u>
LABA OPERASIONAL	67.596.117	59.142.405
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	(523.967)	276.905
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	67.072.150	59.419.310
BEBAN PAJAK	(13.918.892)	(11.591.390)
LABA TAHUN BERJALAN	53.153.258	47.827.920

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -
ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Penghasilan komprehensif lainnya:		
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.555.936)	731.161
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	295.628	(138.921)
Surplus atas revaluasi aset tetap	-	2.984.488
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(124.974)	(12.089)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	2.472.322	(7.817.894)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(16.566)	(395.950)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(469.741)	1.485.400
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan - Setelah Pajak	600.733	(3.163.805)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	53.753.991	44.664.115
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM		
Dasar (dalam Rupiah penuh)	352	316
Dilusian (dalam Rupiah penuh)	352	316

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambah modal disetor	Cadangan penurunan nilai Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	(Kerugian) Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham treasuri	Cadangan kompensasi saham kepada pekerja	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
										Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	7.577.950	76.324.093	533.238	(116.522)	1.869.163	(1.283.547)	(45.997)	226.563	16.864.083	3.022.685	181.445.920	286.417.629
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.827.920	47.827.920
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(395.950)	(12.089)	(6.332.494)	592.240	-	-	2.984.488	-	-	(3.163.805)
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	(395.950)	(12.089)	(6.332.494)	592.240	-	-	2.984.488	-	47.827.920	44.664.115
Pembagian laba												
- dividen atas laba tahun 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.406.603)	(26.406.603)
- dividen interim atas laba tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.602.823)	(8.602.823)
Akuisisi atas entitas sependali	-	(292.842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(292.842)
Saham bonus	-	(1.341)	-	-	-	-	31.363	-	-	-	-	30.022
Saham treasuri	-	-	-	-	-	-	(2.187.544)	-	-	-	-	(2.187.544)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	7.577.950	76.029.910	137.288	(128.611)	(4.463.331)	(691.307)	(2.202.178)	226.563	19.848.571	3.022.685	194.264.414	293.621.954

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahannya modal disetor	Cadangan penurunan nilai Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham treasuri	Cadangan kompensasi saham dan opsi saham kepada pekerja	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
										Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	7.577.950	76.029.910	137.288	(128.611)	(4.463.331)	(691.307)	(2.202.178)	226.563	19.848.571	3.022.685	194.264.414	293.621.954
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.153.258	53.153.258
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(16.566)	(124.974)	2.002.581	(1.260.308)	-	-	-	-	-	600.733
Total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan	-	-	(16.566)	(124.974)	2.002.581	(1.260.308)	-	-	-	-	53.153.258	53.753.991
Pembagian laba												
- dividen atas laba tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34.891.943)	(34.891.943)
- dividen interim atas laba tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.666.432)	(12.666.432)
Opsi saham	-	-	-	-	-	-	-	38.472	-	-	-	38.472
Saham bonus	-	216.044	-	-	-	-	31.305	77.216	-	-	-	324.565
Saham treasuri	-	-	-	-	-	-	(1.443.448)	-	-	-	-	(1.443.448)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	7.577.950	76.245.954	120.722	(253.585)	(2.460.750)	(1.951.615)	(3.614.321)	342.251	19.848.571	3.022.685	199.859.297	298.737.159

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan bunga	149.446.983	115.644.034
Pembayaran bunga	(38.291.956)	(22.293.240)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	16.275.168	11.856.901
Pendapatan operasional lainnya	26.200.640	24.755.197
Beban operasional lainnya	(43.435.228)	(53.494.619)
Beban non-operasional - neto	(641.374)	(55.705)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan tagihan pajak	(13.239.274)	(13.811.923)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	96.314.959	62.600.645
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
(Kenaikan) penurunan aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	(885.657)	(108.840)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(24.024)	(2.151.584)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(14.828.029)	(9.403.150)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.664.503	3.250.442
Kredit yang diberikan	(149.370.377)	(107.005.428)
Aset lain-lain	(9.039.269)	(3.665.791)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	(7.348.880)	5.549.002
Simpanan:		
Giro	(2.837.353)	130.094.794
Tabungan	5.474.757	26.464.054
Deposito berjangka	49.269.978	16.368.054
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	2.586.180	(3.644.982)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.355.213	(19.684.263)
Liabilitas lain-lain	5.076.952	(1.795.767)
Kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasi	1.408.953	96.867.186

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Penerimaan dividen	160.637	1.677.920
Perolehan aset tetap	(6.767.307)	(6.050.463)
Hasil penjualan aset tetap	117.407	332.609
Penambahan penyertaan saham	(500.000)	(1.566.343)
Kenaikan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	5.749.949	40.130.319
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan investasi	(1.239.314)	34.524.042
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman yang diterima	7.929.634	10.321.637
Pembayaran pinjaman yang diterima	(5.168.396)	(1.554.001)
Saham yang dibeli kembali	(1.443.448)	(2.187.544)
Pembagian laba untuk dividen	(43.494.766)	(26.406.603)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	6.059.485	10.036.163
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(12.307.750)	(4.666.850)
Penerimaan pinjaman subordinasi	494.142	-
Pembayaran pinjaman subordinasi	(500.000)	-
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	(48.431.099)	(14.457.198)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(48.261.460)	116.934.030
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(2.663)	(30.287)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	263.964.137	147.060.394
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	215.700.014	263.964.137
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:		
Kas	31.515.572	27.320.384
Giro pada Bank Indonesia	101.388.737	149.961.985
Giro pada bank lain	21.669.212	20.449.914
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	60.972.523	66.231.854
Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	153.970	-
Total Kas dan Setara Kas	215.700.014	263.964.137

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS INVESTASI PADA ENTITAS ANAK
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki BRI diungkapkan pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak yang disajikan dengan metode biaya sebagai berikut:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.448.979	86,85%	5.448.979	86,85%
BRI Global Financial Services Co. Ltd. (dahulu BRI Remittance Co. Limited)	2.289	100,00	2.289	100,00
PT Asuransi BRI Life	1.626.643	54,77	1.626.643	59,02
PT BRI Multifinance Indonesia	1.055.003	99,88	1.055.003	99,88
PT BRI Danareksa Sekuritas	513.888	67,00	513.888	67,00
PT BRI Ventura Investama	2.148.090	99,97	1.648.090	99,97
PT BRI Asuransi Indonesia	1.041.000	90,00	1.041.000	90,00
PT Pegadaian	25.326.438	99,99	25.326.438	99,99
PT Permodalan Nasional Madani	6.073.819	99,99	6.073.819	99,99
PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM))	458.433	65,00	458.433	65,00